



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (L K P J)

KABUPATEN NIAS

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Gambaran Umum Daerah	4
C.1. Kondisi Geografis Daerah	4
C.2. Gambaran Umum Demografi	8
C.3. Kondisi Pemerintahan	11
C.4. Kondisi Ekonomi	13
D. Sistematika Penulisan	20
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	22
A. Visi dan Misi	22
1. Visi	23
2. Misi	22
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	23
Misi – 1	23
Misi – 2	24
Misi – 3	25
Misi – 4	26
Misi – 5	38
C. Prioritas Daerah	29
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	31
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	32
1. Instensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	32
2. Target dan Realisasi Pendapatan	33
3. Permasalahan dan Solusi	34
B. Pengelolaan Belanja Daerah	34
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	35
2. Target dan Realisasi Belanja	35
3. Permasalahan dan Solusi	36
C. Pembiayaan	37
1. Kebijakan Umum Pembiayaan	37
2. Target dan Realisasi Pembiayaan	38
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39
A. Urusan Wajib yang dilaksanakan	39
1. Pendidikan	39
2. Kesehatan	57
3. Pekerjaan Umum	90
4. Perumahan dan Penataan Ruang	12
1	
5. Perencanaan Pembangunan	13
4	

6.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14
1		
7.	Lingkungan Hidup	14
8		
8.	Catatan Sipil dan Kependudukan	15
5		
9.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	15
9		
10.	Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16
9		
11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17
8		
12.	Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	18
5		
13.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	19
3		
14.1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	20
3		
14.2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Nias	22
6		
14.3.	Dinas Pendapatan Kabupaten Nias	23
1		
14.4.	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias	237
14.5.	Inspektorat Kabupaten Nias	24
2		
14.6.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias	25
0		
14.7.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias	25
9		
14.8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias.....	26
4		
14.9.	Kantor Kecamatan	27
0		

15.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28
9		
16.	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	29
8		
17.	Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian	30
0		
18.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31
3		
19.	Kearsipan dan Perpustakaan	32
0		
B.	Urusan Pilihan yang dilaksanakan	32
6		
1.	Pertanian dan Kehutanan	32
6		
2.	Kelautan dan Perikanan	33
7		
3.	Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	34
5		
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS		
PEMBANTUAN.....		35
4		
A.	Tugas Pembantuan Yang Diterima	35
4		
B.	Tugas Pembantuan Yang Diberikan	35
5		
C.	Tugas APBN Lain Yang Diterima	35
5		
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN		
		356
A.	Kerjasama Antar Daerah	35
6		
B.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	35
6		
C.	Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	36
1		
D.	Pembinaan Batas Wilayah	36
2		

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	36
3	
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	36
5	
BAB VII PENUTUP	367

DAFTAR TABEL

TABEL	U R A I A N	HALAMAN
1 - 1	Luas Wilayah Kabupaten Nias Tahun Menurut Kecamatan	5
1 - 2	Nama-nama Sungai di Kabupaten Nias menurut Panjang dan Klasifikasinya	5
1 - 3	Curah Hujan, Banyaknya Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2015	6
1 - 4	Penggunaan Lahan Kabupaten Nias	8
1 - 5	Perkembangan Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 ..	8
1 - 6	Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias Menurut Kecamatan Tahun 2016	9
1 - 7	Jumlah Penduduk Menurut Janis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	9
1 - 8	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu 2014-2015	10
1 - 9	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Nias Tahun 2016	11
1 - 10	Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Utama di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	15
1 - 11	Produksi Ikan di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	16
1 - 12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015	17
1 - 13	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias Tahun 2010-2015	19
1 - 14	PDRB Per Kapita Kabupaten Nias ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2011-2015	20
3 - 1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	33
3 - 2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 dengan Tahun 2016	34
3 - 3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	36
3 - 4	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah kabupaten Nias Tahun 2016	38
4 - 1	Kondisi Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Nias Tahun 2016	39
4 - 2	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Nias Tahun 2016	43
4 - 3	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Nias Tahun 2016	55
4 - 4	Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2011-2016	58

TABEL	U R A I A N	HALAMAN
4-5	Keadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	58
4-6	Keadaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias Tahun 2016	59
4-7	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Tahun 2016	66
4-8	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Rumah Sakit Gunungsitoli Kabupaten Nias Tahun 2016	74
4-9	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Tahun 2016	84
4-10	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Tahun 2016	87
4-11	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016	92
4-12	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Tahun 2016	120
4-13	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Perumahan dan Penataan Ruang SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias Tahun 2016	126
4-14	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Tahun 2016	132
4-15	Capaian Kinerja Urusan Bidang Gedung-gedung di Kabupaten Nias Tahun 2016	133
4-16	Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Sanitasi di Kabupaten Nias Tahun 2016	133
4-17	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Nias Tahun 2016	134
4-18	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun 2016	137
4-19	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016	140
4-20	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Tahun 2016	144
4-21	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Tahun 2016	147
4-22	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Tahun 2016	151
4-23	Capaian Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Tahun 2016	154
4-24	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tahun 2016	156
4-25	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tahun 2016.....	158
4-26	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016	163

TABEL	U R A I A N	HALAMAN
4- 27	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Tahun 2016	167
4- 28	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2016	172
4- 29	Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2016	176
4- 30	Perkembangan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2011-2016	179
4- 31	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016	181
4- 32	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Tahun 2016	184
4- 33	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016	188
4- 34	Capaian Kinerja Urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016	192
4- 35	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Nias Tahun 2016	196
4- 36	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Linmas Kabupaten Nias Tahun 2016	198
4- 37	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Nias Tahun 2016	201
4- 38	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Linmas Kabupaten Nias Tahun 2016	202
4- 39	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	208
4- 40	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yang Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	223
4- 41	Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2016	228
4- 42	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2016	230
4- 43	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2016	233

TABEL	U R A I A N	HALAMAN
4- 44	Capaian Kinerja Urusan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	236
4- 45	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Statistik yang Dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Stistik Kabupaten Nias Tahun 2016	239
4- 46	Capaian Kinerja Bidang Statistik pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Stistik Kabupaten Nias Tahun 2016	241
4- 47	Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan Kabupaten Nias Tahun 2016	245
4- 48	Tindaklanjut Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2016	248
4- 49	Hasil Penyelesaian Temuan Administratif Tahun 2011-2016	248
4- 50	Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2016	248
4- 51	Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	253
4- 52	Keadaan ASN Kabupaten Nias Tahun 2010-2016	256
4- 53	Keadaan Aparatur PNSD Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pegawai Struktural dan Fungsional Tahun 2016	256
4- 54	Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2016	257
4- 55	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016	260
4- 56	Data Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pemprosesan Izin Tahun 2016	262
4- 57	Perkembangan Pelayanan Perizinan dan Klasifikasi Usaha di Kabupaten Nias Tahun 2016	262
4- 58	Capaian Peningkatan Pengembangan Informasi dan Pelayanan Perizinan Tahun 2016	263
4- 59	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanganan Bencana Daerah yang Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	266
4- 60	Capaian Kinerja Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nias Tahun 2016	269
4- 61	Realisasi Pelaksanaan dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias Tahun 2016	272
4- 62	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan oleh Seluruh Kantor Kecamatan Tahun 2016	288
4- 63	Realisasi Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016	293

TABEL	U R A I A N	HALAMAN
4-64	Capaian Kinerja Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan yang Dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nias Tahun 2016	297
4-65	Realisasi Program dan Kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Nias Tahun 2016	299
4-66	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Nias Tahun 2016	300
4-67	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian yang Dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Nias Tahun 2016	304
4-68	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Nias Tahun 2016	311
4-69	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Tahun 2016	316
4-70	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Nias Tahun 2016	319
4-71	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016	321
4-72	Perkembangan Pengelolaan dan Penataan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Tahun 2016	324
4-73	Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Utama di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	326
4-74	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2016	329
4-75	Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Tahun 2016	334
4-76	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016	339
4-77	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Tahun 2016	343
4-78	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016	348
4-79	Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias Tahun 2016 ...	352
5-1	Realisasi Program dan Kegiatan APBDN Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Tahun 2016	355
6-1	Jenis dan Frekuensi Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Nias Tahun 2016	363

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	U R A I A N	HALAMAN
1 - 1	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nias Tahun 2011-2015	11
1 - 2	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	14
1 - 3	Perkembangan dan Luas Tanaman Produksi Karet di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	14
1 - 4	Perkembangan Produksi Ikan Laut di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	15
1 - 5	Perkembangan Produksi Ikan Air Tawar di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016	16
1 - 6	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Tahun 2011 s.d. 2015	17
1 - 7	PDRB Kabupaten Nias Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2011-2015	18
1 - 8	Inflasi Sumatera Utara dan Nasional	19
4- 1	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Nias Tahun 2012-2016	82
4- 2	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nias Tahun 2012-2016	83
4- 3	Angka Kesakitan Malaria Kabupaten Nias Tahun 2012-2016	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, pada Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan oleh Bupati Nias selaku Kepala Daerah memuat gambaran hasil-hasil pembangunan yang di dalamnya berisikan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), gambaran tentang tugas umum pemerintahan yang menjelaskan kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan urusan desentralisasi baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan serta penyelenggaraan tugas pembantuan, serta laporan ini juga menyampaikan gambaran kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan masa pemerintahan. Selanjutnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini juga dapat dipersepsikan sebagai *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nias di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;
40. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/643/KPTS/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 5 Seri: E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri: D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri: D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Seri: D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Seri: D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Seri: D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri: D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 16 Seri E)
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri: E);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sogae'adu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Seri: E);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Seri: E);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Seri: E);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 1 Seri: A);
54. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Seri: E);
55. Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Seri: E);
56. Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Seri: E);
57. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias tanggal 19 September 2014;
58. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri: A);
59. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri: E);
60. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
61. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

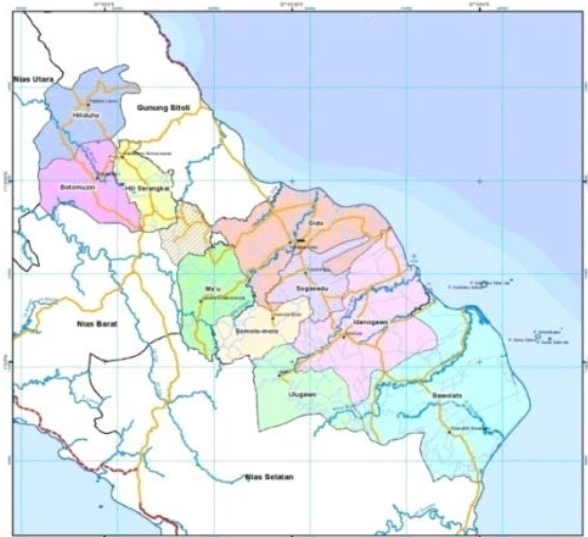
C. GAMBARAN UMUM DAERAH

C.1. Kondisi Geografis Daerah

C.1.1. Batas Administrasi dan Luas wilayah

Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak ± 86 mil laut dari kota Sibolga. Letak geografis Kabupaten Nias terletak pada 0°53'1,5"-1°17'16,6" Lintang Utara dan 97°29'0,7"-97°58'29" Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 853,34 Km² terdiri dari 10 Kecamatan: Idanogawo, Bawolato, Ulugawo, Gido, Ma'u, Somolo-molo, Hiliduho, Hiliserangkai, Hiliduho dan Sogae'adu dan 170 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Nias Selatan.
- Sebelah Timur : Kota Gunungsitoli dan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat : Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara.



Secara geografis Kabupaten Nias diuntungkan mengingat posisinya yang strategis dimana terletak di antara jalur-jalur penghubung wilayah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Selatan serta wilayah Kabupaten Nias Utara. Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.

Tabel : 1-1
Luas Wilayah Kabupaten Nias Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Rasio Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Nias
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Idanogawo	138,65	16,25
2	Bawolato	204,45	23,96
3	Ulugawo	65,96	7,73
4	Gido	110,05	12,90
5	Ma'u	61,18	7,17
6	Somolo-molo	44,85	5,26
7	Hiliduho	65,07	7,63
8	Hili Serangkai	61,91	7,26
9	Botomuzoi	59,98	7,03
10	Sogaeadu	41,26	4,84
Jumlah/Total		853,34	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Nias

C.1.2. Topografis

Kondisi alam/topografi Kabupaten Nias berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan di mana tinggi dari permukaan laut bervariasi antara 0 – 800 m, terdiri dari dataran rendah sampai tanah bergelombang mencapai 24 persen, tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8 persen dan berbukit sampai pegunungan 51,2 persen dari keseluruhan luas daratan. Mempunyai kemiringan lereng rata-rata 8 persen sampai 25 persen. Sedangkan daerah dataran dapat dijumpai sepanjang pantai timur dengan kemiringan 0-8 persen. Dengan kondisi alam Kabupaten Nias tersebut, maka terbentuklah 32 Daerah Aliran Sungai yang berada di 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu Gido, Hiliduho, Idanogawo, Bawolato dan Botomuzoi.

Tabel : 1-2
Nama-nama Sungai di Kabupaten Nias
Menurut Panjang dan Klasifikasi

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (m)	Lebar (m)	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sungai Binaka	Gido	4.000	10	Non Lintas
2	Sungai Gido Si'ite	Gido	26.580	20	Non Lintas
3	Sungai Gido Zebua	Gido	48.880	30	Non Lintas
4	Sungai Sinizi	Gido	4.000	10	Non Lintas
5	Sungai Mua	Gido	17.000	20	Non Lintas
6	Sungai Madawa	Gido	4.000	10	Non Lintas
7	Sungai Tulumbaho	Gido	4.000	10	Non Lintas
8	Sungai Baruzo	Gido	7.000	10	Non Lintas
9	Sungai Duria	Gido	6.000	10	Non Lintas
10	Sungai Wawea	Gido	5.000	10	Non Lintas
11	Sungai La'auri	Gido	28.420	15	Non Lintas
12	Sungai Megana	Hiliduho	5.000	10	Non Lintas
13	Sungai Idanogawo	Idanogawo	47.370	200	Lintas Kabupaten
14	Sungai Mo'awo	Idanogawo	-	-	Tidak ada data
15	Sungai Na'a	Idanogawo	3.400	10	Non Lintas
16	Sungai Siholi	Idanogawo	4.000	10	Non Lintas
17	Sungai Goasa	Idanogawo	8.000	10	Non Lintas
18	Sungai Mezawa	Idanogawo	28.560	25	Non Lintas
19	Sungai Mbongi	Bawolato	-	-	Tidak ada data
20	Sungai Mola	Bawolato	76.570	20	Non Lintas

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (m)	Lebar (m)	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
21	Sungai Idano Mola	Bawolato	21.430	20	Non Lintas
22	Sungai Nara	Bawolato	-	-	Tidak ada data
23	Sungai Hou	Bawolato	42.160	20	Non Lintas
24	Sungai Umbu	Bawolato	2.335	10	Non Lintas
25	Sungai Suani	Bawolato	27.040	10	Non Lintas
26	Sungai Sondri'i	Bawolato	23.000	15	Non Lintas
27	Sungai Bulumoso	Bawolato	6.000	10	Non Lintas
28	Sungai Gazamanu	Bawolato	249	10	Non Lintas
29	Sungai Nalawo	Bawolato	7.521	15	Non Lintas
30	Sungai Hoya	Bawolato	3.487	10	Non Lintas
31	Sungai Muzoi	Botomuzoi	92.560	30	Lintas Kabupaten
32	Sungai To'oro	Botomuzoi	10.000	20	Non Lintas

Sumber : Nias Dalam Angka Tahun 2016

C.1.3. Keadaan Iklim dan Cuaca

Kabupaten Nias beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi serta hari hujan yang bervariasi. Pada tahun 2015 rata – rata curah hujan mencapai 242 mm per bulan dengan banyaknya hari hujan mencapai 260 hari setahun atau rata-rata 21,7 hari per bulan. Sama halnya dengan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias juga mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau umumnya terjadi antara bulan April sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Suhu udara di Kabupaten Nias dalam satu tahun rata-rata 316,0°C per bulan dengan rata-rata minimum 319,1°C dan rata-rata maksimum 369,4°C.

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan iklim dan curah hujan di Kabupaten Nias dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel : 1-3
Curah hujan di Kabupaten Nias Tahun 2015

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	268,4	21
Februari	88,6	13
Maret	277,4	19
April	417,3	25
Mei	202,6	19
Juni	169,9	17
Juli	163,9	23
Agustus	160,2	26
September	242,9	22
Oktober	198,5	22
Nopember	372,8	28
Desember	346,0	25
Jumlah	2.908,5	260
Rata-Rata per Bulan	242,4	21,7

Sumber : - Nias Dalam Angka Tahun 2016
- Stasiun Meteorologi dan Geofisika Binaka Gunungsitoli

C.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Nias umumnya didominasi oleh jenis tanah Aluvial, Podsolik Merah Kuning dan sebagian kecil Hidromorfik Kelabu, Regosol, Mediteran Merah Kuning dan Litosol yang menyebar secara random (acak). Erosi merupakan permasalahan yang sangat potensial di Kabupaten Nias. Faktor alamiah yang menyebabkan terjadinya erosi adalah tingkat curah hujan, jenis vegetasi yang tidak mampu menahan laju aliran air permukaan, kemiringan lahan dan jenis tanah yang mudah tererosi seperti regosol, organosol dan rezina. Peristiwa erosi dan longsor ini umumnya terjadi pada lokasi bergelombang sampai berbukit sedangkan pada daerah datar (tepi pantai) kejadian ini umumnya tidak terjadi.

Lapisan permukaan tanah di Kabupaten Nias pada umumnya adalah tanah lunak (*soft soil*). Jenis tanah lunak adalah tanah lanau yang halus dan mudah tererosi. Di samping itu juga dijumpai jenis tanah lempung ekspansif serta pasir halus. Jenis-jenis tanah seperti ini banyak dijumpai pada daerah bergelombang sampai berbukit. Jenis tanah lempung ekspansif adalah salah satu jenis tanah berbutir halus dengan ukuran koloidal yang terbentuk dari mineral ekspansif. Tanah lempung ini mempunyai sifat yang khas yaitu kandungan mineral ekspansif menyebabkan mempunyai kapasitas pertukaran ion yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan tanah lempung ini mempunyai potensi kembang susut apabila terjadi peningkatan dan pengurangan kadar airnya.

Apabila terjadi peningkatan kadar air, tanah ini akan mengembang disertai dengan peningkatan tekanan air pori dan timbulnya tekanan pengembang (*swelling pressure*) sedangkan apabila kadar air berkurang akan terjadi pengerutan. Suatu konstruksi yang dibangun di atas jenis tanah lanau ini, jika tanah dasarnya terkena air maka tanah tersebut daya dukungnya akan berkurang, tanah menjadi lembek, tidak stabil dan tidak mampu lagi memikul konstruksi di atasnya. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan pada lapisan permukaan jalan dan apabila tidak diatasi dapat berakibat kegagalan.

C.1.5. Litologi/Batuan

Kondisi alam Kabupaten Nias disusun oleh batuan tektonik dan batuan sedimen yang secara umum sifat fisiknya belum kompak, terutama batuan sedimennya. Urutan batuan penyusun di Kabupaten Nias dimulai dari yang berumur tua sampai yang paling muda meliputi batuan tektonik dari Komplek Bancuh berumur Oligosen-Miosen Awal, terdiri dari:

- Batuan dari Formasi Lölomatua berumur Miosen Awal-Miosen Akhir berada tidak selaras diatas Komplek Bancuh. Terdiri dari batuan sedimen berlapis yaitu perselingan batu pasir, batu lanau, batul empung, konglomerat dan tufa serta bersisipan tipis dengan batubara dan serpih, batuan banyak mengandung fosil foraminifera dan plangton yang terendapkan di lingkungan sublitoral-neritik luar. Penyebaran batuan ini terutama di bagian tengah, yaitu di Kecamatan Idanögawo, serta Kecamatan Hiliduho.
- Batuan sedimen dari Formasi Gomo berhubungan menjari dengan Formasi Lölomatua yang juga berumur Miosen Tengah – Pliosen. Batuan berlapis diendapkan di lingkungan sublitoral – bathial, mengandung fosil foraminifera dan plangton, batuananya berupa batu lempung, napal, batu pasir, batu gamping bersisipan napal tufaan, tufa dan gambut tipis. Batuan ini terutama menyebar di Kecamatan Hiliduho, Bawölato, dan sedikit di Kecamatan Gidö dan Idanögawo.
- Batuan sedimen Formasi Gunungsitoli berumur Plio-Plistosen, terutama berupa batugamping terumbu, batu gamping lanauan, batu pasir kuarsa halus gampingan yang diendapkan di lingkungan laut dangkal. Tersebar terutama di pantai Timur dan Utara, yaitu di Kecamatan Gidö dan Idanögawo. Endapan aluvial, merupakan batuan paling muda yang berumur Holosen, berupa endapan sungai, rawa dan pantai yang terdiri dari pasir, lempung dan lumpur serta bongkahan batu gamping.

C.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Nias sebagaimana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Tahun 2014-2034, hutan (lindung, produksi dan rakyat) merupakan penggunaan lahan yang paling dominan yakni seluas 40.190,88 Ha, diikuti oleh penggunaan lahan untuk pertanian (lahan kering, lahan basah dan hortikultura) seluas 23.290,37 Ha sementara penggunaan lahan paling kecil adalah penggunaan lahan untuk kawasan pariwisata seluas 15,58 Ha. Hasil interpretasi citra satelit yang menghasilkan tutupan lahan wilayah Kabupaten Nias dapat dilihat pada berikut:

Tabel : 1-4
Penggunaan Lahan Kabupaten Nias

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
[1]	[2]	[3]
1	Hutan	40.190,88
2	Pertanian	23.290,37
3	Perkebunan	12.576,17
4	Gambut	3.967,53
5	Permukiman	2.986,26
6	Sungai	1.019,64
7	Pantai	544,92
8	Perikanan	529,45
9	Kawasan Pertambangan	419,84
10	Kawasan Industri	285,76
11	Mangrove	212,96
12	Kawasan Pariwisata	15,58
Jumlah		86.039,36

Sumber : Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Nias, RTRW

C.2. Gambaran Umum Demografi

C.2.1. Kependudukan

Kabupaten Nias terdiri dari 10 Kecamatan dan 170 desa dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 153.849 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 75.564 dan perempuan sebanyak 78.285. Perkembangan penduduk Kabupaten Nias kurun waktu 2011 s.d. 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel: 1-5
Perkembangan Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2011 s.d 2016

Tahun	Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Laki-laki	Perempuan		
2011	76.440	78.216	154.656	181,22
2012	79.533	81.438	160.971	188,62
2013	81.682	83.632	165.314	193,71
2014	84.455	86.647	171.102	200,49
2015*	74.680	76.398	151.078	177,04
2016	75.564	78.285	153.849	180,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nias

Keterangan : *angka setelah verifikasi

Kepadatan penduduk Kabupaten Nias tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada Tahun 2011 kepadatan penduduk Kabupaten Nias sebesar 181,22 jiwa/Km² dan Tahun 2016 kepadatan penduduk Nias mengalami penurunan menjadi sebesar 180,27 jiwa/Km². Dengan wilayah Kabupaten Nias yang masih relatif luas serta terdapat daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan, rawa, dan lainnya, mengakibatkan di beberapa daerah tertentu ada kepadatan penduduk dan di sebagian daerah lain merupakan daerah yang kepadatan penduduknya masih rendah.

Tahun 2016 daerah terpadat penduduknya adalah Kecamatan Sogaeadu dengan kepadatan penduduknya sebesar 302,23 jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Bawolato merupakan daerah paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk hanya sekitar 121,77 jiwa/Km²

Tabel: 1-6
Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias
Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk (jiwa)	Distribusi Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Idanogawo	27.753	138,65	200,17
2	Bawolato	24.896	204,45	121,77
3	Ulugawo	11.573	65,96	175,45
4	Gido	23.520	110,05	213,72
5	Mau	11.733	61,18	191,78
6	Somolo-molo	7.057	44,85	157,35
7	Hiliduho	10.431	65,07	177,88
8	Hiliserangkai	13.747	61,91	222,05
9	Botomuzoi	10.669	59,98	177,88
10	Sogae'adu	12.470	41,26	302,23
Kabupaten Nias		153.849	853,34	180,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias (data diolah)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan. Bila ditinjau dari jenis kelamin penduduk perempuan di Nias dari Tahun 2011 s.d. 2016 lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, kondisi ini tergambar oleh nilai *sex ratio* sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 1-7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kabupaten Nias Tahun 2011 s.d 2016

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2011	76.440	78.216	154.656	97,73
2012	79.533	81.438	160.971	97,66
2013	81.682	83.632	165.314	97,67
2014	84.455	86.647	171.102	97,47
2015	74.680	76.398	151.078	97,75
2016	75.564	78.285	153.849	96,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias (data diolah)

C.2.2. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan regional dan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk 15 tahun keatas (tenaga kerja) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar

bekerja dan mereka yang tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya tenaga kerja yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah mencakup mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Nias diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Selain pengangguran terbuka (*disguised unemployed*) dan pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (*under employed*) juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Kabupaten Nias yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

Tabel : 1-8
Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas
Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu 2014-2015

Kegiatan Utama	2014		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Angkatan Kerja	72.805	90.83	69.462	85,72
- Bekerja	72.485	99.56	68.820	99,07
- Pengangguran	320	0.43	642	0,92
Bukan Angkatan Kerja	7.344	9.16	11.572	14,28
Jumlah	80.149	100	81.034	100
T P A K (%)	90,84		85,72	
TPT (%)	0,44		0,92	

Sumber : BPS Kabupaten Nias

C.2.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

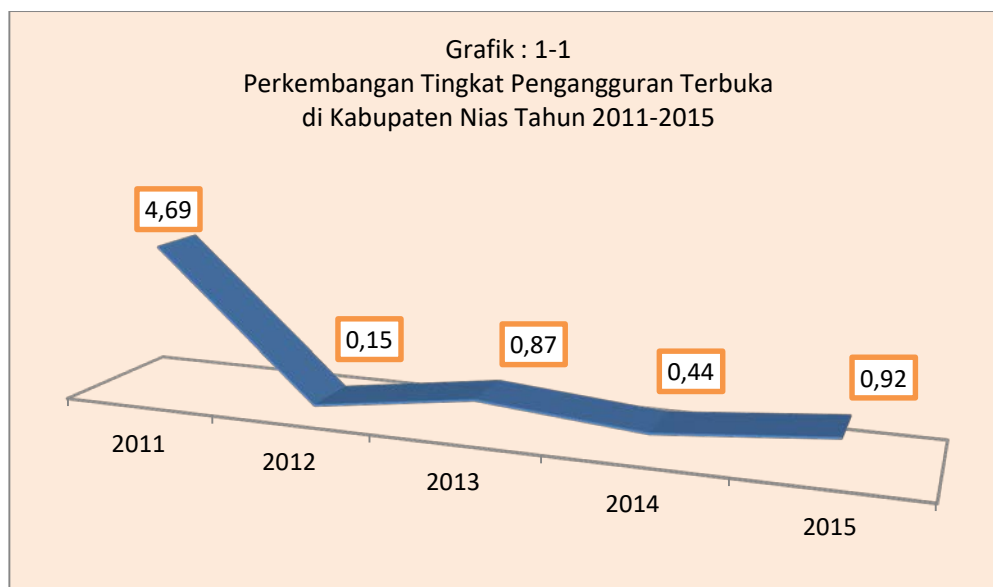
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2015 pada semester 2, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Nias adalah 81.034 orang yang terdiri dari 69.462 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 11.572 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja di dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Nias tahun 2015 adalah sebesar 85,72 persen yang artinya bahwa pada tahun 2015 sebanyak 86 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Nias siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha, dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Nias menunjukkan kecenderungan stabil. Pada tahun 2011 TPAK Nias tercatat 76,51 persen dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 85,72 persen.

C.2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selanjutnya indikator ketenagakerjaan lainnya yang sangat penting adalah tingkat pengangguran. Dimana pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Data menunjukkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nias selalu mengalami Peningkatan. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 0,92 persen dari total angkatan kerja lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang sebesar 0,44 persen. Kecenderungan semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka ini akan berakibat pada kerawanan sosial.



Sumber : BPS Kabupaten Nias

C.3. Kondisi Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akselerasi pembangunan dan mengimplementasikan pola pendekatan/model pembangunan yang spesifik sebagai daerah kepulauan dengan ragam potensi sumberdaya alam yang cukup besar di bidang pariwisata, perikanan dan pertanian guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi maka Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa.

Sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sogae'adu, maka wilayah Kabupaten Nias pada Tahun 2015 terdiri atas 10 Kecamatan dan 170 Desa sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel : 1-9
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Idanogawo	28	-
2.	Gido	21	-
3.	Hiliduho	16	-
4.	Bawolato	25	-
5.	Hili Serangkai	15	-
6.	Botomuzoi	18	-
7.	Ulugawo	14	-
8.	Ma'u	11	-
9.	Somolo-molo	11	-
10.	Sogae'adu	11	-
Kabupaten Nias		170	-

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nias

Untuk mendukung dan menjamin berjalannya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Nias telah mengundang dan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Pembentukan Susunan Organisasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Nias. Susunan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nias adalah terdiri dari:

SEKRETARIAT DAERAH

1. Sekretaris Daerah.
2. Staf Ahli, terdiri dari:
 - a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
 - b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - c) Staf Ahli Bidang Pembangunan
 - d) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 - e) Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan
3. Asisten, terdiri dari:
 - a) Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c) Asisten III Administrasi Umum.
4. Bagian-bagian:
 - a) Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
 - c) Bagian Hukum;
 - d) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - e) Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
 - f) Bagian Administrasi Perekonomian;
 - g) Bagian Organisasi;
 - h) Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - i) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - j) Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan.

A. SEKRETARIAT DPRD

1. Sekretaris Dewan
2. Bagian-Bagian :
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Persidangan;
 - c) Bagian Perundang-Undangan;
 - d) Bagian Keuangan.

B. KECAMATAN

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi-Seksi :
 - a) Seksi Tata Pemerintahan;
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Susunan organisasi Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias terdiri dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Pertanian;
5. Dinas Pendapatan;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias terdiri dari:

- A. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
 6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
 8. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- B. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor:
 1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 2. Kantor Lingkungan Hidup.
- C. Inspektorat Kabupaten.
- D. Satuan Polisi Pamong Praja.
- E. Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli.

C.4. Kondisi Ekonomi

C.4.1. Potensi Unggulan Daerah

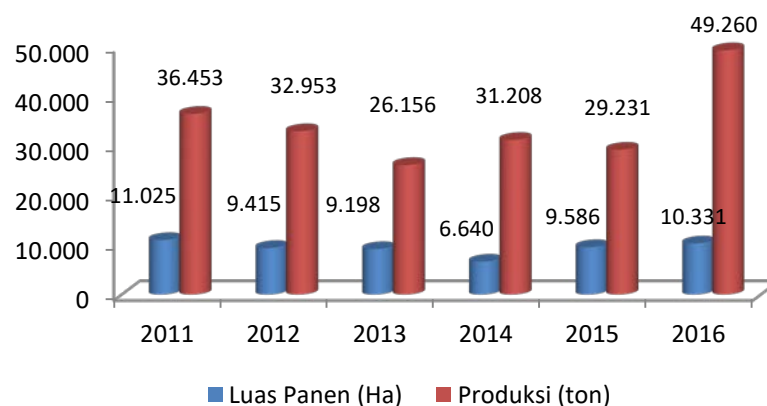
Kabupaten Nias memiliki ragam potensi sumber daya alam, yang relatif memiliki keunggulan komperatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan sumber daya alam yang melimpah ini telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komoditi hasil produksi masyarakat yang berasal dari sumber daya alam, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Nias terutama di bidang pertanian dan perikanan. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Nias yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan alam yang dimiliki sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin. Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap PDRB Kabupaten dari tahun ke tahun.

C.4.1.1. Tanaman Pangan

Pada tahun 2015 kontribusi PDRB menurut lapangan usaha yang diantaranya sub sektor pertanian, peternakan, perburuan serta jasa pertanian lainnya menyumbang 28,49 persen, disusul dengan sub sektor perikanan sebesar 14,27 persen dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar 5,62 persen.

Grafik: 1-2
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi
di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016



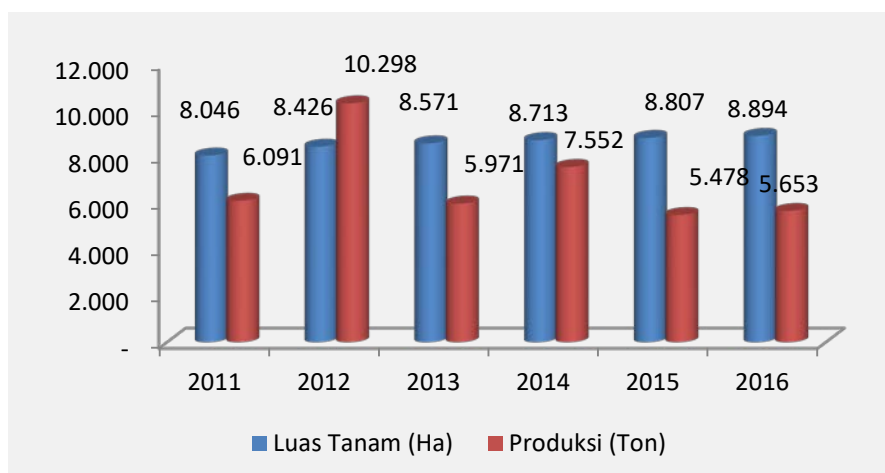
Berdasarkan grafik 1-2 menunjukkan luas panen dan produksi padi di Kabupaten Nias tahun 2011-2016. Pada tahun 2011 produksi padi mencapai 36.453 ton dengan luas panen sebesar 11.025 hektar. Jika dilihat dari luas panen pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10.331 hektar namun diiringi dengan peningkatan produksi sebesar 49.260 ton.

Keberadaan tanaman sayur-sayuran cukup penting walaupun potensinya tidak sebesar tanaman padi terutama untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Terdapat beberapa tanaman sayuran yang cukup potensi untuk dikembangkan yaitu bayam, terung, kacang panjang, ketimun, kangkung, cabe, buncis dan bawang daun. Pada tahun 2016 Kabupaten Nias menghasilkan 51 Kwintal bayam, 852 Kwintal terung, 573 Kwintal kacang panjang, 512 Kwintal ketimun, 272 Kwintal kangkung, 1,065 Kwintal cabe, 5 Kwintal buncis dan 35 Kwintal bawang daun.

C.4.1.2. Tanaman Perkebunan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Nias, luas tanaman perkebunan khususnya karet terus mengalami peningkatan. Pada kurun waktu 2011-2016 seperti terlihat pada tabel 1-10 dan grafik 1-3 peningkatan luas tanam komoditi karet masih belum diiringi dengan peningkatan produksinya. Terlihat pada tahun 2011 luas tanam seluas 8.046 hektar dengan produksinya mencapai 6.091 ton.

Grafik : 1-3
Perkembangan Luas Tanaman dan Produksi Karet
Di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Nias

Pada tahun 2013 luas tanam seluas 8.571 hektar dan produksi karet sebanyak 5.971 ton. Tampak jelas bahwa produksi karet pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Namun pada tahun 2016, luas tanam mengalami peningkatan menjadi 8.894 hektar dengan produksi karet hanya sebesar 5.653 ton. Sedangkan untuk produksi komoditi tanaman perkebunan lainnya seperti kakao, kelapa, kopi, pinang dan cengkeh pada tahun 2016 yakni masing-masing sebesar kakao 668 ton, kelapa 871,8 ton, kopi 5,90 ton, pinang 10,90 ton, cengkeh 1,6 ton.

Tabel : 1-10
Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Utama
di Kabupaten Nias Tahun 2011-2016

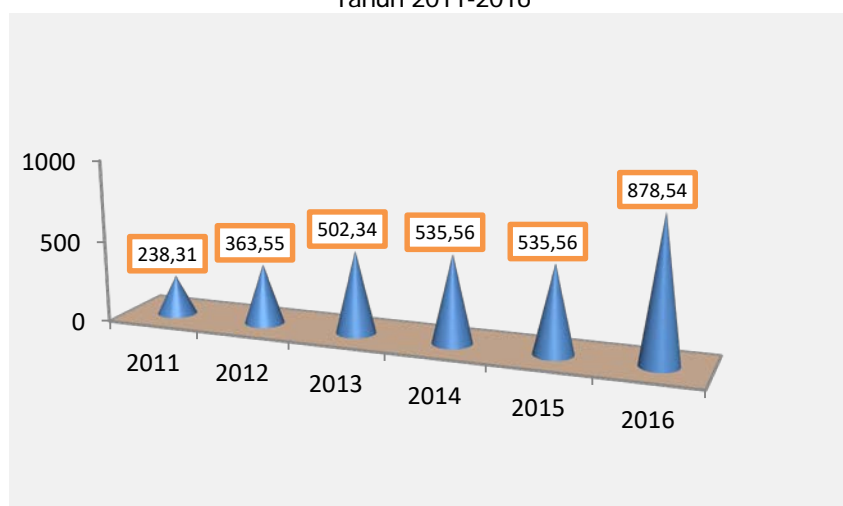
Komoditas	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1. Karet	8.046	6.091	8.246	10.296	8.571	5.971	8.713	7.552	8.807	5.480	8.894	5.653
2. Kelapa	1.455	628	1.488	523,80	1.515	674,30	1.522	764	1.538	1.102	1.540	871,8
3. Kopi	120	31	120	31,92	118,7	36,97	117	31	59	13	53	5,90
4. Cengkeh	155	31	155	27,43	124	24,06	103	20	103	3	25	1,6
5. Nilam	14	2	14	1,86	0	0	14	2	14	2	-	-
6. Kakao	1.233	511	1.199	588,59	1.414	691	1.421	859	1.473	349	1.487	668
7. Pinang	12,50	4,8	21,5	7,5	27,30	13,17	34	15	37	11	57	10,90

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Nias

C.4.1.2. Sektor Perikanan

Seperti halnya subsektor peternakan, subsektor perikanan juga pada saat ini sedang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nias terutama masalah pengembangan penangkapan ikan di laut. Berdasarkan tabel 1-11, grafik 1-4. dan grafik 1-5. yang bersumber dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias menunjukkan bahwa selama periode tahun 2011-2016 terdapat peningkatan produksi perikanan.

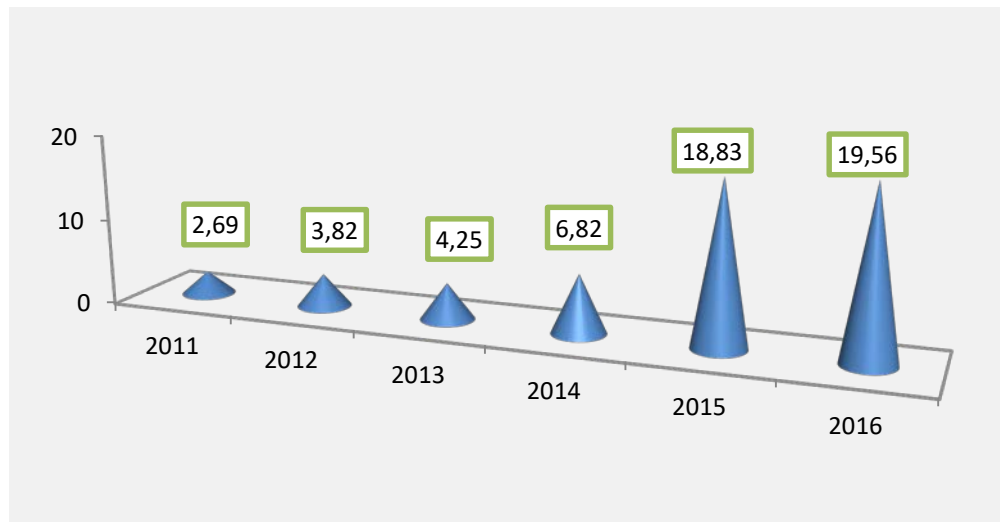
Grafik : 1-4
Perkembangan Produksi Ikan Laut di Kabupaten Nias
Tahun 2011-2016



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias

Pada tahun 2011-2016, berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias tercatat bahwa produksi ikan laut tahun 2011 sebesar 238,31 meningkat menjadi 878,54 ton pada tahun 2016.

Grafik: 1-5
Perkembangan Produksi Ikan Air Tawar di Kabupaten Nias
Tahun 2011-2016



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias

Sedangkan untuk kondisi produksi ikan air tawar pada tahun 2011-2016 produksi ikan air tawar dan budidaya berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias tercatat sebesar 2,69 ton pada tahun 2011. Tahun 2016 produksi ikan air tawar dan budidaya mengalami peningkatan menjadi sebesar 19,56 ton.

Tabel 1-11
Produksi Ikan di Kabupaten Nias
Tahun 2011-2016 (ton)

Jenis Budi Daya	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Ikan Laut	238,31	363,55	502,34	535,56	535,56	878,54
2. Ikan Air Tawar	2,69	3,82	4,25	6,82	18,83	19,56
Jumlah	241	367,37	506,59	542,38	554,39	898,10

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias

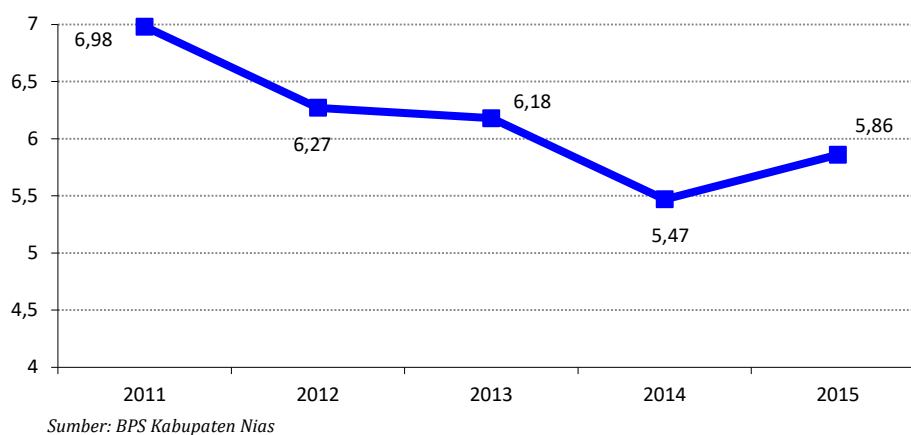
Bila diperhatikan bahwa dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan produksi ikan laut dan ikan air tawar ini artinya akan berpeluang untuk memberikan kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat dan peluang berusaha yang sangat tidak terbatas di sektor perikanan baik di hulu maupun di hilir di tahun mendatang jika dikelola dengan baik dan profesional oleh sumber daya manusia/sumber daya insani dengan memberdayakan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam tersedia.

C.4.2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Berdasarkan formula baru dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2011 perekonomian Kabupaten Nias tumbuh sebesar 6,98 persen menjadi 5,86 persen pada tahun 2015.

Grafik: 1-6. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Tahun 2011 s.d. 2015 (persen)



Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dapat diketahui dari kategori-kategori ekonomi yang menyumbang pada pembentukan nilai tambah atau PDRB Kabupaten Nias. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias tahun 2015 mencapai 5,86 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,47 persen. Hal ini disebabkan mayoritas lapangan usaha mengalami pertumbuhan yakni lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha jasa pendidikan dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan jasa lainnya.

Tabel : 1-12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 s.d. 2015 (persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,17	6,28	6,48	5,15	5,47
02. Pertambangan dan Penggalian	8,44	7,64	6,16	7,30	6,80
03. Industri Pengolahan	3,64	5,22	4,81	4,33	4,20
04. Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	5,78	5,12	3,68	3,82
05. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0				
06. Konstruksi	7,08	5,17	5,84	5,23	5,39
07. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,91	7,99	5,22	6,90	6,46
08. Transportasi dan Pergudangan	3,38	5,12	6,12	8,43	7,77

Lapangan Usaha	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,10	6,6	7,80	6,80	6,37
10. Informasi dan Komunikasi	7,06	6,16	5,22	7,20	6,72
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	15,68	13,23	9,59	5,77	5,45
12. Real Estate	7,51	2,12	4,08	6,60	6,19
13. Jasa Perusahaan	5,36	7,47	4,37	6,80	6,37
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,77	5,46	6,65	6,90	6,45
15. Jasa Pendidikan	4,8	4,9	8,30	6,40	6,02
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16	10,6	10,80	7,00	6,54
17. Jasa Lainnya	3,53	3,1	4,95	5,00	4,76
Jumlah	6,98	6,27	6,18	5,90	5,96

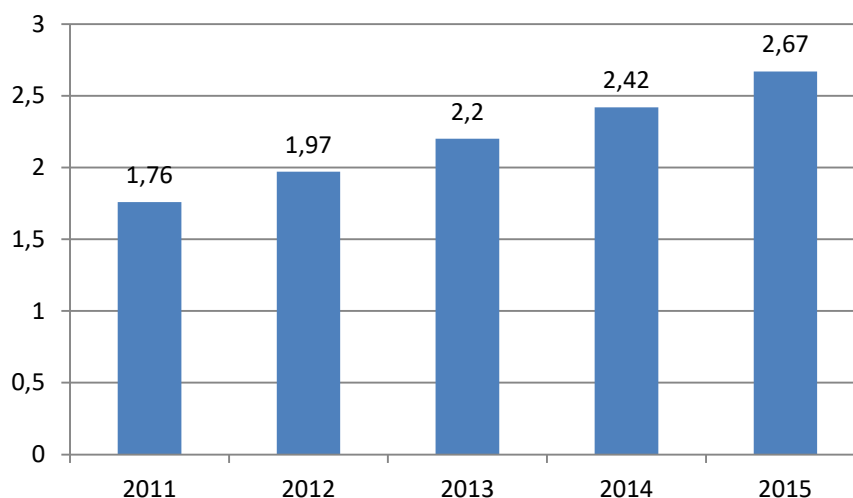
Sumber : BPS Kabupaten Nias

Dari tabel di atas, dapat diketahui tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Nias pada tahun 2015 disumbang oleh pertumbuhan beberapa sektor yang tumbuh di atas 7 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 7,77 persen. Hal ini disebabkan peningkatan khusus di sektor infrastruktur jalan yang menghubungkan kabupaten/ kota di Kepulauan Nias.

Selain sektor transportasi dan pergudangan sebagai penyumbang utama laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias terdapat tiga sektor pendukung utama kabupaten Nias yakni sektor pertambangan dan penggalian 6,80 persen, sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,72 persen, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,54 persen. Selain sektor – sektor di atas tersebut, lapangan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh 6,46 persen, kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontribusi 6,45 persen. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang 6,37 persen untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias,

Total nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh seluruh sektor di Kabupaten Nias pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2,67 triliun.

Grafik: 1-7
PDRB Kabupaten Nias Berdasarkan Harga Berlaku
Tahun 2011-2015 (triliun Rp.)



Sumber BPS Kabupaten Nias

Jika kita amati Grafik 1-6 di atas dan Tabel 1-12 berikut, peningkatan nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu lima tahun, periode 2011 hingga 2015, sekitar 34,08 persen dari Rp. 1,76 triliun meningkat menjadi Rp. 2,67 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 10,94 persen per tahun.

Tabel: 1-13
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Nias 2010 – 2015

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 (Jutaan Rp.)
[1]	[3]	[2]
2011	1.764.612,34	1.671.210,89
2012	1.969.174,02	1.776.048,73
2013	2.206.366,53	1.885.758,76
2014	2.417.925,20	1.996.990,40
2015	2.670.903,12	2.115.959,70

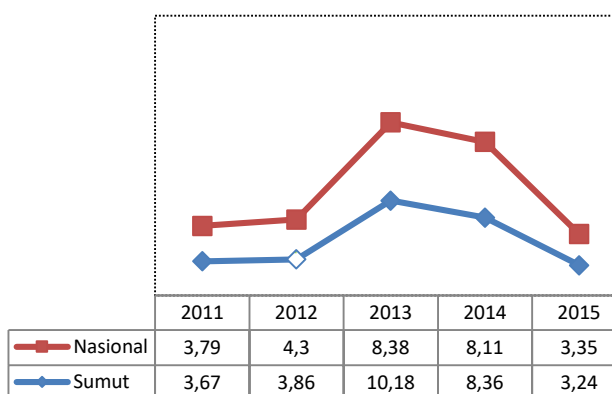
Sumber : BPS Kabupaten Nias

Grafik : 1-8
Inflasi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2011-2015 (%)

C.4.3. Laju Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator makro stabilitas perekonomian yang harus selalu dicermati dan dikendalikan. Laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan, karena berdampak luas terhadap sektor kehidupan.

Meningkatnya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Peningkatan daya beli masyarakat jika diiringi dengan tingkat harga yang stabil dan terkendali akan menambah kesejahteraan mereka. Tingkat harga yang stabil dan terkendali ini dapat dipantau setiap saat, dan salah satu indikatornya adalah angka inflasi.



Pada grafik diatas terlihat inflasi Sumatera Utara dan Nasional. Tingkat inflasi di Sumatera Utara sebagai kota rujukan dalam melihat inflasi di Kabupaten Nias. Pada tahun 2011 tercatat sebesar 3,67 persen, artinya secara rata-rata di Kabupaten Nias pada tahun 2011 terjadi kenaikan harga sebesar 3,67 persen dibanding bulan Desember 2010. Sedangkan tingkat inflasi Nasional secara umum sebesar 3,79 persen.

Pada Tahun 2015 tingkat inflasi tercatat sebesar 3,24 persen, artinya secara rata-rata di Kabupaten Nias pada tahun 2015 terjadi kenaikan harga sebesar 3,24 persen dibandingkan bulan Desember 2014. Sedangkan tingkat inflasi nasional secara umum sebesar 3,35 persen.

C.4.4. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa selama satu tahun di suatu wilayah. Indikator ini dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Namun salah satu kelemahan ukuran ini adalah bahwa besarnya PDRB perkapita suatu daerah belum tentu dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut karena PDRB perkapita di dapat dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sedangkan menurut studi yang lebih dalam sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar dari nilai tambah PDRB yang dihasilkan hanya diterima oleh pengusaha saja sedangkan sebagian kecil sisanya baru diterima oleh para pekerja. Daerah yang memiliki PDRB Perkapita tinggi biasanya berasal dari daerah yang memiliki lahan perkebunan luas dan konsentrasi industri.

Tabel: 1-14
PDRB Perkapita Kabupaten Nias
ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2011-2015 (Rp)

Tahun	PDRB Per kapita	
	ADH Berlaku	ADH Konstan 2010
[1]	[2]	[3]
2011	13.297,96	12.594,09
2012	14.738,11	13.292,68
2013	16.243,31	14.046,05
2014	17.889,94	14.721,17
2015	19.640,87	15.560,01

Sumber: PDRB Kabupaten Nias

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Nias tahun 2011 hingga 2015 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 13,29 juta perkapita per tahun pada tahun 2011 menjadi Rp. 19,64 juta perkapita per tahun pada tahun 2015 atau meningkat 34 persen. Namun bila dilihat PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2011, angka PDRB perkapita Kabupaten Nias tahun 2015 hanya naik sebesar 19 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu dari Rp. 12,59 juta menjadi Rp. 15,56 juta.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini disusun berdasarkan kerangka logis penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : **Pendahuluan**
Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, gambaran umum daerah dan sistematika penulisan.
- Bab II : **Kebijakan Pemerintah Daerah**
Menguraikan kebijakan Pemerintah daerah yang menjelaskan visi, misi, strategi dan kebijakan Umum daerah serta prioritas daerah.
- Bab III : **Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**
Menguraikan tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.
- Bab IV : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**
Penguraikan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Bab ini juga menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dinas/badan/kantor dalam pelaksanaan program masing-masing beserta solusi pemecahan permasalahannya.
- Bab V : **Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**
Menguraikan tentang Tugas pembantuan yang diterima sesuai dengan dasar hukumnya, instansi pemberi tugas pembantuan, program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya, sumber dan jumlah anggaran serta permasalahan dan solusinya.
- Bab VI : **Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**
Menguraikan tentang kerja sama antar daerah, pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, Pencegahan dan penanggulangan bencana, serta penanggulangan ketentraman dan ketertiban.
- Bab VII : **Penutup**

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nias Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011–2016. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil capaian kinerja pembangunan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011–2016 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2006 – 2011, telah ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2011 – 2016 yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Nias Yang Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri Yang Dilayani Oleh Pemerintah Yang Bersih dan Responsif”***.

Berkeadilan	:	Mengandung arti perwujudan pelayanan dan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu, gender, maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nias.
Sejahtera	:	Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, terbebas dari kemiskinan, kemelaratn hidup dan buta aksara, serta sehat jasmani dan rohani.
Mandiri	:	Kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta memiliki daya saing dan kesiapan menghadapi era globalisasi.
Dilayani oleh Pemerintah yang bersih dan responsif	:	Mengandung makna bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, dimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bertanggungjawab, tertib administrasi dan tertib anggaran, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan kebijakan yang selalu berpihak kepada kepentingan rakyat serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

2. Misi

Misi Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016 yaitu:

- a. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (*Good Governance and Clean Government*).
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- c. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah.
- d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Berdasarkan kondisi umum, evaluasi dan analisa, permasalahan pokok dan mempertimbangkan pencapaian hasil pembangunan tahun sebelumnya, tantangan dan peluang yang dihadapi, serta Visi dan Misi Pembangunan yang hendak dicapai, maka diperlukan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias pada Tahun 2006-2011.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditempuh adalah :

Misi 1. **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*)**

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Penataan organisasi perangkat daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah
 - b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
2. Perbaikan kesejahteraan pegawai dengan arah kebijakan: Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD
3. Penataan kecamatan, desa, dan wilayah administrasi pemerintahan dengan arah kebijakan:
 - a. Pemekaran Kecamatan dan Desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Penataan tapal batas desa dan kecamatan
 - c. Penamaan wilayah administrasi pemerintahan
 - d. Penataan ibu kota Kabupaten Nias
4. Penataan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Penataan tata administrasi pemerintahan
 - b. Penataan pengelolaan informasi, kearsipan dan dokumentasi
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pelaksanaan APBD
 - d. Peningkatan koordinasi pemerintahan dan pembangunan
5. Penguatan fungsi lembaga DPRD dengan arah kebijakan: Peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD
6. Perbaikan manajemen kepegawaian dengan arah kebijakan:
 - a. Penataan kembali tenaga fungsional (guru, medis, dan PPL)
 - b. Pemerataan PNS secara proporsional pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - c. Penempatan pejabat struktural yang didasarkan pada pertimbangan jenjang akademik, kompetensi dan prestasi kerja serta bebas KKN
 - d. Rekrutment PNSD yang dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan daerah terutama dalam memenuhi tenaga guru dan medis.
 - e. Penerapan prinsip *reward and punishment*
 - f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian aparatur
7. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku
 - b. Penataan pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-tax secara terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat
 - e. Peningkatan akurasi dan cakupan data wajib/objek pajak dan redistribusi daerah
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemungutan pajak daerah
8. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan efektivitas sistim pengawasan, dalam upaya mencegah atau meminimalkan praktek KKN
 - b. Pemantapan Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban aparatur pemerintah
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan
9. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran yang jelas dan terukur) dan partisipatif serta tepat waktu
 - b. Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - c. Peningkatan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan
10. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik dan informasi pembangunan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Perkuatan sistem data dan informasi pembangunan daerah
 - b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Peneliti
11. Peningkatan Kualitas pelayanan publik dengan arah kebijakan:
 - a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
12. Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat
 - b. Membangun program e-Government secara terintegrasi
13. Pemantapan tatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan arah kebijakan:
 - a. Memperkuat kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik
 - b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
14. Peningkatan kerjasama daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah se Kepulauan Nias
 - b. Peningkatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga
 - c. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah

Misi: 2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau dan Berkeadilan

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, relevan dan terjangkau diseluruh kecamatan dan desa dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) meliputi penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidik dan manajemen PAUD berkompeten
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, serta pemenuhan guru SD dan SMP secara merata
 - c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, serta pemenuhan guru SMA/SMK secara merata
 - d. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK)
 - e. Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
 - f. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah
 - g. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal
 - h. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
 - i. Fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri
 - j. Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi (umum non PNS)
 - k. Gerakan Cinta Buku

2. Peningkatan keterjaminan kepastian memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau diseluruh kecamatan dan desa dengan arah kebijakan:
 - a. Kesehatan ibu, bayi dan balita
 - b. Perbaikan status gizi masyarakat
 - c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, yang didukung dengan upaya penyehatan lingkungan
 - d. Pemberdayaan masyarakat dan Promosi kesehatan
 - e. Peningkatan kesehatan lingkungan, tempat-tempat umum dan makanan
 - f. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan yang berkualitas dan merata
 - g. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
 - h. Pengembangan dan Pemasyarakatan Obat Tradisional
 - i. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang merata
 - j. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas
 - k. Peningkatan sistem manajemen kesehatan
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di RSUD Gunungsitoli dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana RSUD Gunungsitoli
 - c. Perbaikan manajemen dan tata kelola di RSUD Gunungsitoli
 - d. Pengembangan kemampuan, keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia RSUD Gunungsitoli untuk pelayanan berkualitas
 - e. Penambahan Produk Pelayanan
4. Revitalisasi layanan program keluarga berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk menuju keluarga sejahtera dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan pelayanan informasi KB/KR
5. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam memberhasilkan pembangunan dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan
 - b. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
6. Meningkatkan pembinaan, pembudayaan dan prestasi olah raga dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
 - b. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi

Misi 3. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dan Prasarana Daerah

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan jalan dan jembatan yang merata dan berkualitas dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibukota kecamatan dan desa untuk membuka keterisoliran wilayah, menuju sentra-produksi, dan kawasan strategis cepat tumbuh
 - b. Meningkatkan nilai kemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan milik pemerintah daerah.
2. Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung sistem jaringan irigasi.
3. Peningkatan upaya pengendalian banjir dan tanah longsor dengan arah kebijakan: Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor.
4. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum , persampahan, dan sanitasi lingkungan perumahan dan peemukiman pada kawasan perkotaan, kawasan kumuh, wilayah pesisir, dan pedesaan
 - b. Pengelolaan Areal Pemakaman.

5. Peningkatan penyediaan pelayanan energi listrik dengan arah kebijakan:
 - a. Mendorong penambahan kapasitas dan perluasan jangkauan pelayanan PLN
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif (mikro hidro, surya, dan angin).
6. Peningkatan kualitas dan keselamatan pelayanan transportasi darat dan laut dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat
 - b. Peningkatan pelayanan transportasi laut
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat
 - d. Peningkatan pelayanan transportasi pedesaan.
7. Peningkatan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan arah kebijakan:
 - a. Percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten Nias
 - b. Koordinasi penataan ruang daerah
 - c. Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bencana dengan arah kebijakan:
 - a. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana, peralatan dan logistik penanggulangan bencana.
9. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan daerah kabupaten Nias di Ibu Kota Kabupaten Nias yang baru
 - b. Pembangunan kantor prasarana pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Desa.

Misi 4. Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kecukupan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan
 - b. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan Produktivitas dan luas panen komoditas pertanian dan populasi ternak unggul daerah
 - b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak
 - c. Penyediaan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian dan peternakan sebagai stimulasi peningkatan produksi
 - d. Peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan rakyat dalam skala yang luas
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana produksi pertanian (benih/bibit, pupuk, pakan,) di tingkat petani dengan harga yang terjangkau
 - f. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pertanian dan perdesaan
3. Revitalisasi penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
 - b. Fasilitasi PPL Swakarsa.
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan
4. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan mutu produk pertanian serta efisiensi produksi
 - b. Mendorong investasi pengolahan hasil pertanian berbasis produk lokal
 - c. Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian skala rumah tangga
5. Peningkatan pengembangan perikanan dan kelautan, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

- c. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - d. Perluasan wilayah tangkapan nelayan ke ZEEI dan laut lepas dengan dukungan peralatan yang memadai
 - e. Pengembangan budidaya perikanan
 - f. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI)
 - g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - h. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan
6. Perbaikan tatakelola dan manajemen BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Penyehatan BUMD melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD
 - b. Peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah
 - c. Aktivasi BUMD PT. Pembangunan Prasarana Kabupaten Nias.
 - d. Pendirian BUMD industri pengolahan karet
 7. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
 - b. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan Sumberdaya hutan
 - c. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
 - e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam melindungi sumberdaya hutan
 8. Peningkatan pemanfaatan potensi bahan tambang untuk kesejahteraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup yang tetap terjaga, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber energi terbarukan untuk meningkatkan tingkat ketersediaan energi listrik
 - b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan
 9. Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan penyediaan sarana pelayanan panti-panti sosial
 - b. Peningkatan Cakupan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - c. Penanggulangan korban bencana
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial
 - e. Pemberian santunan uang duka
 - f. Peningkatan Kesetiakawanan Sosial
 - g. Perlindungan dan layanan hukum bagi korban permasalahan sosial
 10. Peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui dunia usaha maupun program-program pemerintah daerah
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
 - c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

11. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian dan pemberdayaan industri rumah tangga, dengan arah kebijakan:
 - a. Penumbuhan industri pengolah hasil pertanian skala menengah-besar
 - b. Pembinaan dan penumbuhan industri pengolah hasil pertanian/ kerajinan skala rumah tangga
12. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kesetaraan gender
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
13. Peningkatan produktivitas usaha UMKM dan Koperasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
 - b. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
 - c. Penyehatan Koperasi
 - d. Penguatan kelembagaan koperasi
14. Pengembangan destinasi pariwisata, promosi, dan penciptaan iklim kondusif bagi pertumbuhan sektor pariwisata, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata
 - b. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
 - c. Mengembangkan objek tujuan wisata dan pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata
15. Peningkatan kelancaran arus barang dan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - b. Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan
16. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan bidang perekonomian, dengan arah kebijakan: Penguatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Pemerintah bersubsidi/pro rakyat
17. Menciptakan iklim kondusif untuk masuknya investasi, dengan arah kebijakan: Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias

Misi 5. Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Nias Yang Religius, Berbudaya dan Taat Hukum

Dalam mewujudkan Misi Kelima: Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum, maka strategi pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
 - b. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribadatan
2. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya *ono niha* (kearifan lokal), dengan arah kebijakan:
 - a. Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya (kearifan lokal)
 - b. Pemasyarakatan simbol-simbol budaya, ornamen berciri khas budaya Nias untuk digunakan dalam acara resmi pemerintahan dan kehidupan sehari-hari
 - c. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan budaya
3. Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Ideologi Bangsa, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mempertahankan NKRI
 - b. Fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional

4. Peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan kesadaran hukum masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan Pendidikan Politik terhadap masyarakat, sehingga paham akan hak dan kewajiban
 - b. Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik
 - c. Penegakkan produk - produk hukum daerah dan pemeliharaan kamtibmas
 - d. Penyusunan, evaluasi dan dokumentasi Produk Hukum Daerah
 - e. Meningkatkan budaya taat hukum dan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

C. PRIORITAS DAERAH

Dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016, maka pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah telah menetapkan prioritas pembangunan daerah yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas-prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur daerah yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, fokus kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias pada bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- b. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum terutama air bersih dan jaringan listrik.
- c. Pembangunan prasarana produksi (irigasi) dan perdagangan
- d. Pembangunan prasarana kantor Pemerintah Daerah

Prioritas 2 : Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Nias, kemandirian dan keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara kualitas mutu pendidikan, ketersediaan sarana serta ketersediaan tenaga terdidik melalui fokus kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK)
- d. Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru
- e. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah
- f. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
- g. Fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri.
- h. Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Pendidikan

Prioritas 3 : Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya
- b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
- c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular
- d. Pengembangan kemampuan, keahlian, dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan
- e. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
- f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
- g. Peningkatan kualitas pelayanan RSU Gunungsitoli

- h. Revitalisasi layanan program keluarga berencana
- i. Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Kesehatan

Prioritas 4 : Ekonomi, dengan fokus kegiatan :

- a. Peningkatan ketahanan pangan.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, perkebunan peternakan, dan perikanan.
- c. Peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan rakyat.
- d. Penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan.
- e. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian.
- f. Penumbuhan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian dan perikanan.
- g. Peningkatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan
- h. Peningkatan kuantitas penyuluhan pertanian dan perikanan.
- i. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI)
- j. Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah
- k. Pendirian BUMD industri pengolahan karet
- l. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- m. Pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
- n. Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan sarana distribusi perdagangan.
- o. Percepatan pencapaian sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi

Prioritas 5 : Penanggulangan kemiskinan, dengan fokus kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang masalah kesejahteraan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya.
- c. Peningkatan kesempatan kerja.
- d. Optimalisasi program PNPM, PKH, BOS, JAMKESMAS

Prioritas 6 : Lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus kegiatan:

- a. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
- c. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- d. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Prioritas 7 : Pemerintahan dan aparatur, dengan fokus kegiatan :

- a. Perbaikan manajemen kepegawaian
- b. Perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah
- c. Optimalisasi pendapatan asli daerah.
- d. Penataan sistim administrasi dan tatalaksana pemerintahan.
- e. Peningkatan Kualitas pelayanan publik, utamanya dalam pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan.
- f. Optimalisasi fungsi pengawasan.
- g. Penetapan dan penataan ibu kota kabupaten Nias (pasca pemekaran)
- h. Penataan kecamatan dan desa
- i. Pemantapan tatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang proses pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, pada dasarnya merupakan landasan dan kebijakan operasional bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyampaikan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan setiap tahunnya.

Kebijakan umum APBD disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, guna mengantisipasi permasalahan yang akan datang dan dinamika perkembangan lingkungan strategis serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan proses perencanaan daerah. Disamping itu juga memperhatikan kebijakan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Upaya optimalisasi penggunaan APBD disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Nias berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD Kabupaten Nias yang pada pokoknya adalah:

1. Perumusan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat merupakan landasan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan.
2. Usaha meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaan dana secara transparan, objektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, sesuai hasil anggaran yang berbasis kinerja.
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak sesuai dengan porsinya.
5. Pengembangan sistem akuntansi, sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab dan penataan manajemen keuangan daerah.
6. Peningkatan pengawasan baik secara preventif maupun represif atas pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan bahwa azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup Hibah, Dana Darurat, Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, disamping berupaya memperbaiki data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dana perimbangan Pusat maupun Propinsi melalui pengiriman data dan rekonsiliasi Dana Perimbangan, maka arah dan kebijakan umum pendapatan daerah adalah mengintensifkan sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Kabupaten Nias, tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan tetap menjaga penciptaan kondisi bagi pengembangan dunia usaha.

Sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat, masih banyak bergantung pada penerimaan dari Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemandirian keuangan daerah kearah yang lebih baik, dengan mengupayakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dengan berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah yang diarahkan dalam rangka mempersempit celah fiskal yang dimiliki daerah dari tahun ke tahun.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pendataan (up-dating) dan pendaftaran subjek dan objek pajak (perluasan dan peremajaan basis pajak), termasuk rasionalisasi penetapan target berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada;
2. Penataan dan pendataan objek dan subjek PAD;
3. Meningkatkan kesadaran atau ketaatan para wajib pajak/wajib retribusi melalui penyuluhan;
4. Meningkatkan pengawasan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;
6. Meningkatkan koordinasi secara sinergis antara SKPD di bidang pendapatan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam penerimaan Dana Perimbangan;
8. Penegakan peraturan daerah dalam memberhasilkan PAD;
9. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penerimaan PAD.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan karena sektor PAD ini merupakan salah satu tolok ukur kemampuan keuangan daerah, maka optimalisasi penerimaan dari sektor ini terus diupayakan. Untuk mengetahui posisi komponen PAD dalam struktur pendapatan daerah, dilakukan dengan menganalisis rasio pertumbuhan penerimaan berdasarkan besaran nilai kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD merupakan cermin dari perkembangan ekonomi daerah. Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang menjadi obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD sekaligus merupakan indikator penting untuk menilai laju pembangunan di daerah. Sedangkan dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat dari segi administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan pelayanan yang mudah, tepat dan cepat sehingga usaha ekonomi tersebut diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.

A.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan tata kelola (*governance*) tentang keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi.

Pada tahun 2016 target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nias dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 3-1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Uraian pendapatan	Jumlah (Rupiah)		%
		Anggaran	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pendapatan Asli Daerah	74.265.040.188,00	82.840.434.008,95	111,55
	a. Pajak Daerah	5.347.870.000,00	7.062.252.388,44	132,06
	b. Retribusi Daerah	2.286.600.000,00	2.843.342.707,00	124,35
	c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.801.202.685,00	9.501.202.685,00	96,94
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	56.829.367.503,00	63.433.636.228,51	111,62
2	Dana Perimbangan	644.307.475.600,00	611.361.799.024	94,89
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	2.774.001.412,00	-
	b. Dana Alokasi Umum	-	178.992.705.000,00	-
	c. Dana Alokasi Khusus	-	11.222.055.000,00	-
	d. Dana Transfer Khusus	203.498.965.600,00	157.218.732.690,00	77,26
	e. Dana Transfer Umum	440.808.510.000,00	261.154.304.922,00	59,24
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	119.287.538.755,00	124.253.756.209,00	104,16
	a. DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	14.138.307.233,00	15.937.852.921,00	112,73
	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103.736.501.000,00	103.736.501.000,00	100
	c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	1.412.730.522,00	1.412.730.522,00	100
	d. Pendapatan Lainnya	-	3.166.671.766,00	-
	TOTAL PENDAPATAN	837.860.054.543,00	818.455.989.241,95	97,68

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Ket: *) Data final realisasi keuangan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, dari target pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp. 837.860.054.543,00.- dapat terealisasi sebesar Rp. 818.455.989.241,95 atau 97,68 persen. Selanjutnya bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 686.777.059.191,36 maka realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nias tahun 2016 mengalami trend meningkat yakni sebesar Rp. 131.678.930.050 atau naik sebesar 19,17 persen.

Tabel : 3-2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2015 dengan Tahun 2016

No	Sumber Pendapatan	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	%
01	PAD	66.647.791.157,36	82.840.434.008,95	23,74
02	Dana Perimbangan	525.799.031.813,00	611.361.799.024,00	16,27
03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94.330.236.221,00	124.253.756.209,00	31,72
	TOTAL	686.777.059.191,36	818.455.989.241,95	19,17

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Ket: *) Data final realisasi keuangan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016

A.3. Permasalahan dan Solusi

Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nias dan solusi yang ditempuh dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2016 antara lain:

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi masih rendah.
- Kontribusi PAD terhadap APBD kecil bila dibandingkan dengan penerimaan Dana Perimbangan
- Penegakan Peraturan Daerah dalam memberhasilkan PAD masih terbatas
- Belum seluruhnya objek pajak dan retribusi terdata dengan akurat.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan pendapatan.

2. Solusi

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan di bidang pendapatan beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- Perlunya optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah khususnya PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- Penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Pentingnya upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi daerah dengan dukungan sarana serta pembiayaan yang memadai
- Pendataan objek/subjek pajak dan retribusi daerah yang berkesinambungan.
- Penggalian sumber sumber potensi PAD secara lebih intensif
- Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara SKPD pengelola PAD dan Instansi terkait lainnya
- Penempatan sumber daya manusia yang memahami tentang perpajakan daerah
- Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan yang potensial mendatangkan PAD.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 adalah suatu Rencana Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Secara operasional, APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi

dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah terhadap belanja daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan, untuk itu kebijakan belanja diarahkan pada kebijakan pembangunan meliputi:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Nias.
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta memprioritaskan penuntasan program kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.
- d. Belanja daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost.
- e. Menyediakan dana pendamping bagi kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan pengurangan resiko bencana.
- g. Belanja daerah kepada prioritas pembangunan fasilitas dasar yaitu :
 - Peningkatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
 - Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
 - Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan;
 - Pemberdayaan Ekonomi.
- h. Pemerataan alokasi belanja program pembangunan yang dilakukan secara proposional sesuai kebutuhan dan potensi daerah (prinsip keadilan alokasi anggaran).
- i. Perencanaan lokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya dikaitkan dengan output kegiatan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan kebutuhan riil.
- j. Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilaksanakan sesuai kebutuhan serta dilakukan evaluasi barang yang tersedia sesuai umur ekonomis.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

B.2. Target dan Realisasi Belanja

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung, dimana belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian belanja langsung atau belanja pembangunan daerah dilaksanakan antara lain dengan mendasari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD, dan arah kebijakan pembangunan lokal, regional, dan nasional. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Sementara kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel : 3-3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rupiah)		%
		Anggaran	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Belanja Tidak Langsung	395.740.279.291,00	353.338.298.337,90	89,29
	a. Belanja Pegawai	246.228.378.704,00	216.311.145.373,00	87,85
	b. Belanja Hibah	8.614.400.000,00	7.869.600.000,00	91,35
	c. Belanja Bantuan Sosial	380.000.000,00	370.000.000,00	97,37
	d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	337.703.500,00	-	-
	e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	136.162.956.307,00	128.775.304.213,90	94,57
	f. Belanja Tidak Terduga	4.016.840.780,00	12.248.751,00	0,30
2	Belanja Langsung	566.057.731.521,00	443.248.341.785,85	78,30
	a. Belanja Pegawai	64.369.693.285,00	60.788.629.245,00	94,44
	b. Belanja Barang dan Jasa	183.417.336.865,00	154.900.210.197,00	84,45
	c. Belanja Modal	318.270.701.371,00	227.559.502.343,85	71,50
Total Belanja		961.798.010.812,00	796.586.640.123,75	82,82

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Ket: *) Data final realisasi keuangan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016

B.3. Permasalahan dan Solusi

Memperhatikan kondisi Kabupaten Nias tahun 2016, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang cukup besar. Jumlah anggaran belanja yang besar inilah yang merupakan permasalahan utama terhadap belanja daerah di Kabupaten Nias.

Banyak anggaran belanja daerah yang telah diprioritaskan dalam program dan kegiatan daerah, namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka sebagian besar program dan kegiatan yang prioritas tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nias dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
2. Adanya beban kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar 6 (enam) persen yang tidak dibarengi dengan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat yang cukup tinggi;
4. Belum maksimalnya penerapan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Sering terjadinya perubahan peraturan pemerintah sehingga mengakibatkan aparatur belum maksimal melaksanakan kegiatan seperti yang diharapkan.
6. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kerap terlambat diterbitkan oleh Kementerian yang menangani serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Masih sulitnya penggunaan analisis standar belanja, karena sampai saat ini belum ada pedoman khusus

tentang analisis standar belanja serta masih sulitnya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan mengukur hasil dari suatu kegiatan agar mencerminkan kinerja hasil dari suatu aktivitas.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya antara lain:

1. Untuk mengantisipasi rendahnya kemampuan keuangan daerah disamping mengoptimalkan kegiatan peningkatan PAD, juga dengan memperbaiki data dan validasi data-data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah yang merupakan data dasar penghitungan DAU dan DBH melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Keuangan, serta melakukan rekonsiliasi kebutuhan belanja pegawai seiring dengan adanya penambahan CPNS baru dan kenaikan Gaji PNSD. Dengan upaya tersebut diharapkan penerimaan PAD dan besaran alokasi DAU yang diterima akan mengalami peningkatan secara signifikan.
2. Untuk memenuhi kenaikan belanja pegawai, dilaksanakan penghematan terhadap belanja langsung khususnya belanja pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh SKPD serta penundaan beberapa program/kegiatan yang kurang mendesak.
3. Mengalokasikan dana DAU dan DBH serta mengoptimalkan pemanfaatan dana DAK dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
4. Komponen pendapatan APBD Kabupaten Nias didominasi dari dana perimbangan sehingga pada saat terjadi kenaikan gaji yang tidak seimbang dengan kenaikan DAU, maka solusi yang ditempuh adalah pengalihan alokasi belanja langsung ke belanja tidak langsung, hal ini disikapi dengan penentuan skala prioritas daerah sehingga terpaksa harus menunda penyelesaian beberapa kegiatan.
5. Untuk mengatasi permasalahan masih kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan dan masih tingginya angka kemiskinan ditempuh dengan mengalokasikan dana stimulan dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan melalui berbagai program kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD murni maupun pemanfaatan Alokasi Dana Desa.
6. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang mengelola DAK sehingga informasi menu kegiatan DAK yang akan dilaksanakan dapat diperoleh lebih awal.

C. Pembiayaan

C.1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa pembiayaan merupakan salah satu komponen dalam struktur APBD yaitu merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan, pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan umum pembiayaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memperkuat struktur APBD serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.

C.2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, target dan realisasi pembiayaan baik penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 3-4
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah		
		Target	Realisasi	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pembiayaan	123.937.956.269,00	120.250.604.695,70	97,02
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	125.937.956.269,00	122.070.604.695,70	96,93
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)	121.868.448.086,00	121.868.448.085,68	100
	b. Penerimaan Piutang Daerah	3.969.508.183,00	-	-
	c. Penerimaan Kembali Investasi Modal Bergulir	100.000.000,00	202.156.610,02	202,16
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	1.820.000.000,00	91,00
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.820.000.000,00	91,00
Pembiayaan Netto		-	142.119.953.814,90	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Ket: ^a Data final realisasi keuangan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

1.1. Gambaran Umum

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan dan perluasan memperoleh pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan. Program-program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik pendidikan formal maupun non formal. Untuk menangani urusan pendidikan, berbagai upaya memberi akses lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun telah memberikan beberapa hasil positif.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Nias bertekad mewujudkan insan masyarakat Kabupaten Nias yang bermoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Secara kuantitas, sarana pendidikan di Kabupaten Nias relatif masih terbatas. Walaupun demikian jumlah unit sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK mulai tahun 2011 sampai tahun 2016 cenderung meningkat. Berikut gambaran tentang jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah guru di Kabupaten Nias Tahun 2016.

Tabel : 4-1
Kondisi Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Jenjang	Sekolah (Unit)		Murid (Orang)		Guru (Orang)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	TK	12	11	483	530	34	36
	– Negeri	2	2	81	54	0	1
	– Swasta	10	9	402	476	34	35
2	SD	159	161	27.347	26.965	1.882	1.879
	– Negeri	158	160	27.242	26.824	910	880
	– Swasta	1	1	105	141	972	999
3	SLTP	49	49	9.837	10.105	733	738
	– Negeri	44	44	8.641	9.037	230	220
	– Swasta	5	5	1.196	1.068	503	518
4	SMA	10	10	2.595	3.151	202	206
	– Negeri	8	8	2.293	2.726	63	63
	– Swasta	2	2	302	425	139	134
5	SMK	16	16	3.152	3.347	336	319
	– Negeri	14	14	2.796	3.012	106	101
	– Swasta	2	2	356	335	230	218

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

*) GTT/GTY Negeri/Swasta

1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan umum Dinas Pendidikan Kabupaten Nias selalu diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Kriteria efisiensi dan efektifitas menjadi pertimbangan manajemen ketika ketersediaan sumber dana senantiasa terbatas. Keterbatasan ini pada kenyataannya tidak bersifat absolutis tetapi relatif, karena selalu dikaitkan dengan target yang akan dicapai. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidik dan manajemen PAUD berkompeten.
2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar serta pemenuhan guru SD dan SMP secara merata.
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah serta pemenuhan guru SMA/SMK secara merata.
4. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK).
5. Peningkatan mutu, kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru.
6. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.
7. Penguatan dan perluasan pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi
9. Menumbuhkan gerakan cinta buku.
10. Pemantapan Sistem mekanisme pertanggungjawaban aparatur pemerintah, melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
11. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, melalui peningkatan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan administrasi perkantoran.

1.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan :

- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
- Pembangunan pagar sekolah
- Pembangunan Parit/Tembok Penahan/Bronjong
- Pengadaan Meubelair
- Rehabilitasi Gedung Sekolah
- Pengadaan Meubelair
- Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan
- Pengadaan Media Pendidikan
- Pengadaan Peralatan Pendidikan
- Rehabilitasi Sekolah
- Pembangunan Kamar Mandi/WC
- Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan
- Olimpiade Sains SMP/MTs
- Pengelolaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI
- Pengelolaan Ujian Akhir Sekolah/Nasional SMP/MTs
- Olimpiade Sains Nasional SD
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP
- Beasiswa bagi Siswa/i SD Berprestasi
- Beasiswa bagi Siswa/i SMP Berprestasi
- Fasilitas Pelaksanaan Dana BOS

b. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan :

- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
- Pembangunan Pagar Sekolah:
- Pengadaan Meubelair
- Pengadaan Meubelair SMA/SMK
- Peningkatan Mutu Pendidikan
- Pembangunan MCK
- Pengadaan Personal Computer (PC)
- Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Tingkat SMA Negeri/Swasta
- Olimpiade Sains Mata Pelajaran SMA
- Pengelolaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional SMA dan SMK
- Uji Kompetensi Siswa SMK
- Beasiswa SMA/SMK Berprestasi
- Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Menengah Atas
- Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
- Festival Lomba Seni Siswa SMA/SMK Tingkat Kabupaten
- Olimpiade Olahraga Siswa SMA/SMK

- c. **Program Pendidikan Non Formal**, dengan kegiatan :
- Fasilitas Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI)
 - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
 - Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
 - Pengelolaan Ujian Nasional Paket A,B dan C
 - Biaya Pembinaan Lembaga Pendidikan Kursus
 - Keaksaraan Fungsional/Buta Aksara
 - Fasilitas Pelantikan Bunda PAUD
- d. **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, dengan kegiatan :
- Biaya Pengelolaan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/Tunjangan Khusus/Biaya Siswa Kualifikasi
 - Diklat Guru Mata Pelajaran yang di UN kan/Mata Pelajaran Pokok SMP
 - Diklat Sistem Evaluasi Terstandar
 - Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Nias
 - Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kabupaten Nias
 - Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kabupaten Nias
 - Penyelenggaraan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK N/S, Pengawas/Penilik PLS
 - Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
 - Pemilihan PTK Berprestasi
 - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA se-Kabupaten Nias
 - Musyawarah Guru Mata Diklat SMK
 - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP se-Kabupaten Nias
 - Pelatihan Guru SD untuk Mata pelajaran yang di US kan
 - Gerakan Pesona Lingkungan Sekolah
 - Olimpiade Sains Nasional Guru
 - Pelatihan Guru PAUD
 - Pelatihan Guru Taman Kanak-kanak
 - Biaya Kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Yang Berperestasi
 - Bantuan Bagi Mahasiswa Utusan Daerah
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Tidak Tetap (GTT)
 - Workshop penguatan bagi Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/Pengawas TK/SD
 - Pembentukan dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
 - Honorarium Guru Bantu Daerah
 - Pengelolaan dan Pelaksanaan Seleksi Guru Bantu Daerah
 - Pengelolaan dan Pelaksanaan Seleksi Guru Bantu Daerah Formasi Tahun 2017
- e. **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Bidang Pendidikan
 - Pembuatan Profil Pendidikan
 - Inventarisasi Barang Inventaris Milik Negara
 - Pembuatan Kalender Pendidikan TK/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA
 - Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Pengawas TK/SD/SLB
 - Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Pengawas SMP/SMA/SMK
 - Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Penilik PLS
 - Sosialisasi dan Pengelolaan Kuisisioner Pendidikan
 - Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
 - Fasilitas Kelompok Kerja Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
 - Biaya Penunjang Operasional Dewan Pendidikan
 - Biaya Operasional Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru
 - Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus
 - Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan DAK SILPA
 - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kabupaten Nias
 - Workshop Pengelolaan DAK TA 2016
 - Pengelolaan Beasiswa Berprestasi SD/SMP/SMA/SMK
 - Biaya Operasional Pengelolaan Beasiswa Miskin Program Indonesia Pintar (PIP)
 - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
 - Biaya Operasional Pengelolaan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD

- f. **Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)**, dengan kegiatan :
- Pembangunan Gedung TK
 - Lomba Kreativitas Anak dan Guru TK
 - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
- g. **Program Pelayanan UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli**, dengan kegiatan :
- Honorarium Dosen Tetap/Dosen Tidak Tetap
 - Honorarium Kepala Urusan/Unit/Petugas
 - Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dosen, Rapat Civitas, Rapat Keanggotaan dan Komisi Senat Akademik
 - Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS)
 - Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS)
 - Pembuatan Laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi untuk Laporan ke Dikti
 - Pembuatan Kalender Semester Genap dan Semester Ganjil
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler
 - Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Instalasi Listrik
 - Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi
 - Pembangunan Tembok Penahan Asrama Akper Gunungsitoli
 - Pembangunan Septictank
 - Penyediaan Jasa Kebersihan
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Bahan Medis Habis Pakai untuk Unit Kesehatan Kampus Akper
 - Pengadaan Obat-obatan untuk Unit Kesehatan Kampus Akper
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (AKPER)
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Akper)
 - Pemeliharaan Gedung kantor dan Asrama
 - Kegiatan Penelitian Dosen
 - Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
 - Penyusunan Renstra, Renop, SOP dan Uraian Tugas, RIP UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias
 - Lanjutan Penyelenggaraan Akreditasi Program Study
 - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kab. Nias
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Pelatihan Penggunaan dan Analisis EKG
 - Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Gedung Kantor
 - Pembangunan Ruang Senat dan BEM UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kab. Nias
 - Rak Buku Perpustakaan
 - Lanjutan Pembangunan Ruang Aula Akper Gunungsitoli

1.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2016, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. **36.303.783.183,-** dan telah direalisasikan sebesar Rp. **27.200.317.023,-** atau sebesar **74,92 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Pendidikan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel : 4-2
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Nias
Tahun 2016

1.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan urusan pendidikan tahun 2016 digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 4-3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016 Target	Capaian	Status Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I Program Pendidikan Anak Usia Dini						
01	Jumlah PAUD	Klpk	18	30	100	Tercapai
02	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	3,28	3,58	23,57	Tercapai
Program Pendidikan Taman Kanak – Kanak						
03	APK TK	%	3,45	5,75	6,47	Tercapai
04	Jumlah unit TK baru yang dibangun	Unit	-	1	2	Tercapai
05	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Daerah	TK	-	15	-	Tidak Tercapai
II Program Pendidikan Dasar						
06	Angka melek huruf	%	92,05	97,60	89,28	Tidak Tercapai
07	APK SD	%	96,06	97,31	115,19	Tercapai
08	APM SD	%	78,90	90,50	94,43	Tercapai
09	APK SMP	%	54,93	61,71	86,72	Tercapai
10	APM SMP	%	36,18	54,96	59,36	Tercapai
11	APS SD	%	0,49	0,34	0,72	Tidak Tercapai
12	APS SMP	%	0,34	0,18	0,00	Tercapai
13	AL SD	%	96,69	96,99	100	Tercapai
14	AL SMP	%	99,94	99,98	100	Tercapai
15	AM SD	%	95,66	95,69	101,91	Tercapai
16	AM SMP	%	83,49	83,52	71,11	Tidak Tercapai
17	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,41	7,40	8,60	Tercapai
18	SD kondisi bangunan baik	%	65,74	95,00	59,05	Tidak Tercapai
19	SMP memiliki laboratorium IPA	%	-	60,00	14,29	Tidak Tercapai
20	SMP kondisi bangunan baik	%	62,54	100	67,47	Tidak Tercapai
21	Rasio murid SD / guru		52,25	51,98	30,64	Tercapai
22	Rasio murid SD / sekolah		207,4	188,70	167,48	Tercapai
23	Rasio murid SMP / guru		47,19	46,94	45,93	Tercapai
24	Rasio murid SMP / sekolah		219,08	197,48	206,22	Tidak Tercapai
25	Jumlah siswa SD yang menerima beasiswa berprestasi dari daerah	Org	-	4.960	8.220	Tercapai
26	Jumlah siswa SMP yang menerima beasiswa berprestasi dari daerah	Org	-	1.000	1.920	Tercapai
27	Jumlah Unit Sekolah Baru SD	Unit	-	2	3	Tercapai
28	Jumlah Unit Sekolah Baru SMP	Unit	-	2	-	Tidak Tercapai
29	Tambahan Ruang Kelas/RKB SD	Lokal	-	18	48	Tercapai
30	Tambahan Ruang Kelas/RKB SMP	Lokal	21	52	14	Tidak Tercapai
31	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun	Unit	-	5	-	Tidak Tercapai
32	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun	Unit	-	10	-	Tidak Tercapai
33	Rehabilitasi Gedung SD	Unit	-	21	1	Tidak Tercapai
34	Rehabilitasi Gedung SMP	Unit	-	20	-	Tidak Tercapai
III Program Pendidikan Menengah						
35	APK SMA/SMK	%	28,28	74,94	55,85	Tidak Tercapai
36	APM SMA/SMK	%	17,43	62,44	40,79	Tidak Tercapai
37	APS SMA/SMK	%	2,77	2,51	0	Tercapai
38	AL SMA/SMK	%	99,97	100	100	Tercapai
39	Rasio siswa SMA/K /guru		31,16	31,19	40	Tidak Tercapai
40	Rasio siswa SMA/K sekolah		175,32	156,72	250	Tidak Tercapai
41	SMA/SMK kondisi bangunan baik	%	70	95	95	Tercapai
42	SMA yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi	Unit	-	1	-	Tidak Tercapai
43	SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK	Unit	-	2	-	Tidak Tercapai
44	SMK memiliki bengkel/praktek kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK	Unit	-	1	-	Tidak Tercapai
45	Jumlah siswa SMA/SMK yang menerima beasiswa berprestasi dari daerah	Org	-	600	1.188	Tercapai

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016 Target	Capaian	Status Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
46	Jumlah Unit Sekolah Baru SMA/SMK	Unit	-	1	2	Tercapai
47	Tambahan Ruang Kelas Baru SMA/SMK	Lokal	-	18	30	Tercapai
48	Dana Operasional Sekolah (BOS) SMAN/SMKN	Skth	-	17	26	Tercapai
IV Program Pendidikan Non formal dan Informal						
49	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A	%	32,02	36,73	-	Tidak Tercapai
50	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B	%	18,31	20,59	1,54	Tidak Tercapai
51	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C	%	9,42	11,46	1,54	Tidak Tercapai
V Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
52	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Org	76	126	490	Tercapai
53	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Org	73	98	185	Tercapai
54	Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Org	84	109	156	Tercapai
55	Guru SD bersertifikat pendidik	Org	139	739	305	Tidak Tercapai
56	Guru SMP bersertifikat pendidik	Org	157	457	51	Tidak Tercapai
57	Guru SMA/SMK bersertifikat pendidik	Org	11	161	57	Tidak Tercapai
58	Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK yang mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari daerah	Org	839	1500	823	Tidak Tercapai
59	Jumlah guru yang mengikuti diklat mata pelajaran	Org	-	124	164	Tercapai
60	Jumlah guru yang mengikuti diklat Profesional	Org	-	26	182	Tercapai
61	Kepala SD mengikuti diklat kepemimpinan	Org	-	36	164	Tercapai
62	Pengawas SD yang mengikuti diklat pengawasan	Org	-	20	23	Tercapai
63	Kepala SMP mengikuti diklat kepemimpinan	Org	-	35	46	Tercapai
64	Pengawas SMP mengikuti diklat pengawasan	Org	-	18	13	Tidak Tercapai
65	Kepala SMA/SMK mengikuti diklat kepemimpinan	Org	-	18	23	Tercapai
66	Pengawas SMA/SMK mengikuti diklat pengawasan	Org	-	18	13	Tidak Tercapai
VI Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						
67	Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang berprestasi penerima bantuan dari daerah (Umum Non PNS)	Org	-	200	75	Tidak Tercapai
68	Jumlah dokumen Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri	Dok	-	-	1	Tercapai
69	Regulasi pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang berprestasi dari daerah	Dok	-	-	1	Tercapai
70	Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan perencanaan pendidikan	%	-	100	100	Tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tahun 2016. Pada Pendidikan Dasar (SD), APK SD Tahun 2016 mencapai 115,19% dengan target 97,31%. Pencapaian APK SD diatas target ini terjadi dikarena peningkatan minat anak usia 7 – 12 Tahun untuk bersekolah di jenjang SD, dan adanya siswa dari Kabupaten/Kota yang lain bersekolah di Kabupaten Nias sehingga jumlah siswa di jenjang SD lebih banyak dari pada usia penduduk 7 – 12 tahun.

Untuk Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), APK mencapai 86,72% dengan target 61,71%. Pencapaian APK SMP diatas target ini terjadi dikarena peningkatan minat anak usia 13 – 15 Tahun untuk bersekolah di jenjang SMP, dan adanya siswa dari Kabupaten/Kota yang lain bersekolah di Kabupaten Nias sehingga jumlah siswa di jenjang SMP lebih banyak dari pada usia penduduk 13 – 15 tahun.

APK untuk Pendidikan Menengah (SMA/SMK) Tahun 2016 mencapai 55,84% dengan target 74,94%. Namun demikian capaian APK SMA/SMK tersebut tetap dibawah target RPJMD 2011 – 2016.

Realisasi fisik Tahun 2016 terdiri dari pembangunan RKB SD sebanyak 48 lokal, rehabilitasi SD 1 paket, RKB SMP sebanyak 14 lokal dan RKB SMA/SMK 30 lokal.

1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik (guru) di setiap jenjang pendidikan.
- b. Pemerataan pendidikan belum seluruhnya diakses oleh anak usia sekolah terutama masyarakat yang berkemampuan ekonomi lemah.
- c. Rendahnya kualitas guru karena masih terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memiliki kualifikasi pendidikan setara S-1.
- d. Kurangnya fasilitas sarana prasarana sekolah terutama Perpustakaan, Laboratorium, Peralatan Teknologi Informasi dan Tambahan Ruang Kelas.
- e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat/komite sekolah dalam memberikan sumbangan pikiran terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- f. Infrastruktur jalan menuju sekolah belum memadai.
- g. Belum adanya kesepahaman antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pendirian sekolah baru.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, solusinya adalah :

- a. Merekrut Guru Bantu Daerah (GBD) untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah masing-masing.
- b. Pembangunan unit sekolah baru.
- c. Pemberian tunjangan kualifikasi S1/D-IV bagi guru SD, SMP, SMA/SMK yang mengikuti perkuliahan bersumber dari dana APBN.
- d. Melaksanakan pembangunan perpustakaan, ruang belajar serta pengadaan alat-alat penunjang mutu pendidikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- e. Dilaksanakan rapat kerja bidang pendidikan tingkat kecamatan dengan melibatkan unsur Muspika dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- f. Pelaksanaan rapat terpaduan instansi terkait (Dinas PU dan Tarukim) untuk penyediaan sarana jalan (infrastruktur) menuju lokasi sekolah terutama di daerah terisolir.
- g. Pemberian izin pendirian dan izin operasional sekolah didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

2.1. Gambaran Umum

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendekatan promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nias, telah ditempuh melalui berbagai upaya. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias pada tahun 2016 adalah melalui 21 program, yang terdiri dari 136 kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Nias.

Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama berbagai komponen masyarakat. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur dari umur harapan hidup (UHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari tahun 2011 s/d 2016, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 4-4
Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2011–2016

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,58	68,69	68,77	68,87	68,97	*)
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100 ribu kelahiran hidup	403,02	506,58	549,75	251,25	185,67	138,6
3	Persentase balita gizi buruk	%	0,33	0,24	1,14	0,21	0,37	0,32
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 kelahiran hidup	11,87	10,13	15,39	5,44	3,52	12,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

*) Belum ada data dari BPS

Dari tabel di atas, terlihat bahwa status kesehatan masyarakat khususnya angka kematian ibu mengalami penurunan dari 185,67 pada tahun 2015 menjadi 138,6/100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu masih menjadi prioritas utama bidang kesehatan di Kabupaten Nias. Sementara persentase balita gizi buruk dan angka kematian bayi mengalami penurunan, yaitu balita gizi buruk dari 0,37% pada tahun 2015 turun menjadi 0,32% pada tahun 2016, dan angka kematian bayi dari 3,52 per 1.000 KH pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,47 per 1.000 KH pada tahun 2016 namun masih dibawah target RPJMD Tahun 2016 (23 per 1.000 KH).

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin memadai. Sarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten Nias Tahun 2016 meliputi : RSUD Gunungsitoli Kelas C 1 unit, Puskesmas 12 unit (Puskesmas Rawat Inap 7 unit, Puskesmas Rawat Jalan 5 unit), Puskesmas Pembantu 28 unit dan Poskesdes (termasuk Posyandi Plus) 53 unit, Puskesmas Keliling 15 unit, Ambulance 9 unit, dan Mobil Operasional Gudang Farmasi 3 unit (1 unit rusak berat).

Tabel : 4-5
Keadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Nias
Tahun 2011 – 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
1	Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1	1
2	Puskesmas Rawat Inap	Unit	4	4	6	6	6	7
3	Puskesmas Rawat Jalan	Unit	5	5	4	4	5	5
4	Puskesmas Pembantu	Unit	28	28	29	30	29	28
5	Poskesdes/Posyandu Plus	Unit	37	40	46	50	51	53
6	Puskesmas Keliling	Unit	5	6	6	7	7	15
7	Ambulance	Unit	0	3	3	5	6	9
8	Mobil Operasional Gudang Farmasi	Unit	2	2	2	2	2	3 **)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

*) Puskesmas Pembantu berkurang 1 (satu) unit karena pada tahun 2015 Puskesmas Pembantu Ehosakhozi ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Jalan dan pada tahun 2016 berkurang 1 (satu) unit karena pada tahun 2016 Puskesmas Pembantu Bozhiona ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Jalan.

**) 1 unit rusak berat

Untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Nias pada tahun 2016, terdapat 998 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari : 33 orang Dokter Umum, 5 orang dokter gigi, 11 orang Apoteker, 350 orang bidan, 423 orang Perawat, 40 orang ahli gizi, 5 orang ahli sanitasi, 43 orang Ahli Kesehatan Masyarakat, 30 orang Analis Kesehatan, 33 orang asisten apoteker dan 10 orang perawat gigi. Namun harus diakui bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya masih kurang dan tidak merata, sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan yang masih belum optimal.

Tabel : 4-6
Keadaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Uraian	Status (orang)				Jumlah
		PNSD	PTT/ Peg BLUD	Nusantara Sehat	Tenaga Sukarela	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Dinas Kesehatan Kabupaten	50	0	0	2	52
	Apoteker	1	0	0	0	1
	Bidan	7	0	0	1	8
	Perawat	15	0	0	0	15
	Ahli Gizi	3	0	0	0	3
	Ahli Sanitasi	1	0	0	0	1
	Ahli Kesehatan Masyarakat	19	0	0	1	20
	Analis Kesehatan	3	0	0	0	3
	Asisten Apoteker	1	0	0	0	1
II	Puskesmas dan Jaringannya	192	140	24	0	356
	Dokter Umum	7	3	1	0	11
	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0
	Dokter Keluarga	0	0	0	0	0
	Dokter Gigi	1	0	1	0	2
	Apoteker	0	0	2	0	2
	Bidan	60	137	5	0	202
	Perawat	105	0	3	0	108
	Ahli Gizi	3	0	4	0	7
	Ahli Sanitasi	1	0	3	0	4
	Ahli Kesehatan Masyarakat	6	0	2	0	8
	Analis Kesehatan	2	0	2	0	4
	Farmasi (D3)/Asisten Apoteker	3	0	1	0	4
	Perawat Gigi	4	0	0	0	4
III	Gudang Farmasi	9	0	0	0	9
	Apoteker	1	0	0	0	1
	Bidan	1	0	0	0	1
	Perawat	2	0	0	0	2
	Asisten Apoteker	5	0	0	0	5
IV	Rumah Sakit Umum Gunungsitoli	220	319	0	77	616
	Dokter Umum	14	0	0	8	22
	Dokter Spesialis	15	0	0	0	15
	Dokter Keluarga	0	0	0	0	0
	Dokter Gigi	3	0	0	0	3
	Apoteker	5	2	0	0	7
	Bidan	34	72	0	33	139
	Perawat	101	165	0	32	298
	Ahli Gizi	12	21	0	0	33
	Ahli Sanitasi	0	0	0	0	0
	Ahli Kesehatan Masyarakat	9	6	0	0	15
	Analis Kesehatan	5	17	0	1	23
	Asisten Apoteker	7	16	0	0	23
	Perawat Gigi	3	3	0	0	6
	Tenaga Fisioterapi	3	7	0	0	10
	Tenaga Elektromedik	4	1	0	0	5

No	Uraian	Status (orang)				Jumlah
		PNSD	PTT/ Peg BLUD	Nusantara Sehat	Tenaga Sukarela	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Tenaga Oksigen	1	2	0	0	3
	Tenaga Rekam Medik	0	6	0	3	9
	Tenaga Radiologi	4	1	0	0	5
V	Total (Jumlah I+II+III+IV)	456	442	24	76	998
	Dokter Umum	21	3	1	8	33
	Dokter Spesialis	15	0	0	0	15
	Dokter Keluarga	0	0	0	0	0
	Dokter Gigi	4	0	1	0	5
	Apoteker	7	2	2	0	11
	Bidan	102	209	5	34	350
	Perawat	223	165	3	32	423
	Ahli Gizi	15	21	4	0	40
	Ahli Sanitasi	2	0	3	0	5
	Ahli Kesehatan Masyarakat	34	6	2	1	43
	Analisis Kesehatan	10	17	2	1	30
	Asisten Apoteker	16	16	1	0	33
	Perawat Gigi	7	3	0	0	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
RSUD Gunungsitoli

Sementara itu, kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli yang memiliki tipe rumah sakit Kelas C merupakan satu-satunya pusat rujukan kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota di Kepulauan Nias. Sarana dan prasarana RSUD Gunungsitoli yang saat ini dimiliki Pemerintah Kabupaten Nias, antara lain Ruang Kantor/administrasi, Ruang Perawatan Kebidanan/Nifas, Verban Kamar/VK dan Ruang Perinatologi, Ruang Penyakit Dalam/RPD, Ruang Penyakit Bedah/RPB, Instalasi Gizi, ruang ICU, Instalasi Jenazah, Ruang Sarana Prasarana, Ruang Rekam Medik, Ruang Kesehatan Anak/RKA, Poliklinik, Farmasi, Laboratorium, Fisioterapi, Radiologi, Aula/Training Center, Instalasi Gawat Darurat/IGD, Kamar Operasi.

Untuk mendukung RSUD Gunungsitoli sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Regional Se-Kepulauan Nias dan menunjang kegiatan Akreditasi Versi Baru 2012, RSUD Gunungsitoli pada tahun anggaran 2016 telah melaksanakan Pengadaan Mensin Genset, Rehabilitasi dan Pengembangan Rumah Sakit, Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit, Renovasi dan Pengecatan Bangunan Gedung Rumah Sakit, Rehabilitasi dan Pengembangan Ruang NICU Rumah Sakit, Pembangunan Rumah Genset Rumah Sakit, Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Rumah Sakit, Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit, Pengadaan Obat-obatan dan BMHP, mengadakan fasilitas yang mendukung akreditasi, sewa rumah dinas dokter, pengadaan kendaraan dinas operasional yang diperuntukkan bagi Dokter Spesialis dan kegiatan lainnya.

Pada tahun 2012, RSUD Gunungsitoli telah terakreditasi 5 (lima) Pelayanan Dasar oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KARS-SERT/833/VI/2012 yang mencakup :

1. Pelayanan Administrasi dan manajemen;
2. Pelayanan Medis;
3. Pelayanan Gawat Darurat;
4. Pelayanan Keperawatan;
5. Pelayanan Rekam Medis.

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli selama tahun 2016 melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/K/II/2008 dengan pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Gawat Darurat
- b. Pelayanan Rawat Jalan
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Bedah
- e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- f. Pelayanan Intensif (ICU)
- g. Pelayanan Radiologi
- h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- j. Pelayanan Farmasi
- k. Pelayanan Gizi
- l. Pelayanan Rekam Medis
- m. Pengelolaan Limbah
- n. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- o. Pelayanan Ambulance
- p. Pelayanan Laundry
- q. Pelayanan Keluarga Miskin
- r. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
- s. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- t. Pencegah Pengendalian Infeksi

Penambahan Jenis pelayanan kesehatan juga pada tahun 2014 telah bertambah 1 (satu) layanan yaitu Layanan Haemodialisis. Kebutuhan masyarakat akan jenis pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat yang menderita gagal ginjal adalah Pelayanan Hemodialisis (cuci darah) yang telah mendapat Rekomendasi Operasional oleh PERNEFRI Wilayah Sumatera Utara Nomor 53/PERNEFRI/Korwil/Des 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Rekomendasi Pemberian Izin Operasional Unit Hemodialisis RSUD Gunungsitoli dan peresmian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Bupati Nias.

RSUD Gunungsitoli telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status BLUD Penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Nias Nomor 445/336/K/2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan urusan wajib kesehatan adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya
- b. Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Kesehatan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- e. Peningkatan pemberantasan penyakit menular
- f. Peningkatan pelayanan kefarmasian
- g. Peningkatan sistem pelayanan kesehatan
- h. Peningkatan promosi kesehatan
- i. Peningkatan kesehatan keluarga, ibu dan anak
- j. Peningkatan gizi masyarakat
- k. Peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar
- l. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan masyarakat rentan
- m. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
- n. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan secara merata dan berkualitas
- o. Perbaikan manajemen dan tata kelola RSUD Gunungsitoli
- p. Pengembangan kemampuan, keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia RSUD Gunungsitoli untuk pelayanan berkualitas
- q. Penambahan produk pelayanan

2.3. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh dua Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Gunungsitoli. Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias pada Tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan bidang kesehatan sebagai berikut:

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan :

- Pengadaan perbekalan kesehatan
- Pengambilan-penjemputan dan pendistribusian barang, obat dan alat kesehatan ke unit-unit pelayanan kesehatan
- Pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar
- Pengadaan obat program
- Pengadaan alat dan bahan medis habis pakai

- Pengadaan Vaksin Refrigerator
- Sosialisasi pemanfaatan obat-obat tradisional
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**, dengan kegiatan :
 - Monitoring Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan
 - Pelaksanaan Kegiatan P3K
 - Honor tetap tenaga dokter/dokter gigi PTT
 - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Operasi katarak, bibir sumbing, dll)
 - Pertemuan Koordinasi dengan Dokter Puskesmas, koordinasi keperawatan dan koordinasi bidan Puskesmas
 - Monitoring dan evaluasi tentang aset, keuangan dan administrasi kepegawaian bidan PTT di wilayah kerja UPT Dinas Kesehatan
 - Penyelenggaraan administrasi dan operasional manajemen BOK Kabupaten Nias
 - Penilaian Kinerja Bidan
 - Biaya operasional kesehatan (BOK)
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan kegiatan :
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Promosi, Jaminan Kesehatan & Penyehatan Lingkungan
 - Peningkatan PHBS di rumah tangga
 - Pembinaan Desa Percontohan PKK
 - Pembinaan Kader Posyandu
 - Penyuluhan/Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
 - Lomba PHBS Desa Antar
 - Lomba TOGA (Tanaman Obat Keluarga) Desa Antar Kecamatan
 - Lomba Posyandu
 - Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)
 - Pembinaan Desa Siaga
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**, dengan kegiatan :
 - Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk
 - Pengadaan Makanan Pendamping (MP-ASI)
 - Pengadaan PMT Bumil KEK
 - Biaya Pendistribusian, Sewa Gudang MP-ASI dan PMT Bumil KEK
 - Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Dalam Upaya Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
 - Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Masyarakat
- e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**, dengan kegiatan :
 - Stimulan Pembangunan Jamban Percontohan Berbasis Masyarakat
 - Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
 - Orientasi CLTS (Community Lead Total Sanitation) Penanggulangan Penyakit Diare
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Imunisasi Rutin
 - Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
 - Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Campak
 - Surveillance Penyakit
 - Penyelidikan KLB/Wabah dan Penanganan Masalah Kesehatan Akibat Bencana
 - Pengendalian Penyakit TB Paru
 - Pengendalian Penyakit Malaria
 - Pengendalian Penyakit Kusta
 - Pengendalian Penyakit Filariasis
 - Pengendalian Penyakit DBD
 - Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan infeksi menular seksual
 - Pengendalian Penyakit Rabies
- g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Nias
 - Penyusunan Profil SDM Kesehatan Kabupaten Nias
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Kesehatan Pasien Umum
 - Penyediaan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Program JKN/BPJS
 - Pengelolaan Administrasi Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS
 - Jaminan Persalinan
 - Pengelolaan Administrasi Jaminan Persalinan di Kabupaten Nias

- Operasional Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program JKN di FKTP Kabupaten Nias
- Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP Kabupaten Nias
- Penyediaan Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Program JKN/BPJS Tunggal Tahun 2014
- Penyediaan Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Program JKN/BPJS Tunggal Tahun 2015
- Penyediaan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Dana Non Kapitasi JKN FKTP
- h. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya**, dengan kegiatan :
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskesdes/Posyandu Plus
 - Pembangunan Puskesmas Pembantu
 - Pembangunan Pagar
 - Pembangunan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES)
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Posyandu Plus
 - Pembangunan Sarana Pendukung Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
 - Pengadaan Ambulance/Puskesmas Keliling Roda 4 (Empat)
 - Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Non Rawat Inap
 - Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap
 - Penambahan Ruang Puskesmas
 - Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang di Puskesmas
 - Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten Nias (DAK Rp 400.000.000 + DAU Rp 34.000.000)
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten Nias
 - Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas
 - Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis
 - Pengadaan Kendaraan Roda-2 Operasional Puskesmas (DAK Rp. 108.955.000 + DAU Rp. 5.000.000)
 - Pembangunan Tembok Penahan Bertulang (Bor File) dan Parit Beton
 - Pemeriksaan tanah (sondir) di Puskesmas Hiliduho dan Puskesmas Sogaeadu
 - Biaya Perencanaan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 2017
- i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan KMS Balita
- j. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**, dengan kegiatan :
 - Monitoring dan Pengawasan Tempat Pengelolaan dan Penjualan Makanan dan Minuman
 - Pemeriksaan Air Isi Ulang
- k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**, dengan kegiatan :
 - Pembinaan Desa Percontohan Penggunaan Buku KIA dan Stiker P4K
 - Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal)
 - Magang Bidan Desa di RSUD Gunungsitoli
 - Pengadaan KMS Balita
 - Penerapan Program AMP (Audit Maternal Perinatal)
 - Peningkatan Kapasitas Petugas pengelola SDIDTK di Puskesmas
 - Pelatihan Asuhan Bayi Baru Lahir
 - Pembekalan Petugas Penjaringan Kesehatan siswa kelas 1 SD sederajat
 - Sosialisasi Skrining Hypothyroid Kongenital Bagi Petugas Kesehatan
- l. Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan**, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor
 - Penyelenggaraan Rapat Kerja Konsultasi Kesehatan
 - Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Daerah
 - Pengelolaan Administrasi Perencanaan Obat/Alat Kesehatan Terpadu Kab. Nias
 - Pembinaan, Bimtek, Monitoring dan Pengawasan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian, Distributor Obat, obat tradisional, kosmetik di wilayah Puskesmas
 - Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Kesehatan
 - Biaya umum pelaksanaan kegiatan fisik/Konstruksi
 - Pengelolaan Administrasi Pelaporan Dinas Kesehatan

- Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan Penyiapan Administrasi Puskesmas Menjadi BLUD (Lanjutan)
- Sosialisasi tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP)
- Pengelolaan Administrasi Perpustakaan
- Persiapan Akreditasi Puskesmas
- m. Program pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan**, dengan kegiatan :
 - Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Kearsipan
- n. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat**, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Perda tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten
 - Pendataan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias dan penyusunan MOU dengan pihak BPJS Kesehatan
- o. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan**, dengan kegiatan :
 - Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga medis dan paramedis
 - Pengelolaan administrasi perpustakaan
- p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular**, dengan kegiatan :
 - Pelatihan Kader Pelaksana Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-PTM)
- q. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Profil SKPD
 - Penyediaan Honorarium Tenaga Dokter dan Supervisor di Luar Jam Dinas
 - Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
 - Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pengendali Mutu dan Pengawasan Internal
 - Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis dan Residen Senior
 - Lanjutan Akreditasi RSUD Gunungsitoli Versi 2012 (JCI)
 - Akreditasi RSUD Gunungsitoli Versi 2012
- r. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rs.jiwa/ rs.paru-paru/ rs.mata**, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBH-CHT)
 - Pengadaan Meubelair
 - Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Pengadaan Mesin Genset
 - Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
 - Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran
 - Pengembangan Aplikasi dan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Siap Ponek
 - Penambahan Daya Listrik Rumah Sakit
- s. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**, dengan kegiatan :
 - Pemeliharaan rutin/kalibrasi peralatan medik
 - Pemeliharaan bangunan Rumah Sakit
 - Pembangunan Rumah Genset Rumah Sakit
 - Rehabilitasi dan Pengembangan Ruang NICU Rumah Sakit
 - Renovasi dan Pengecatan Bangunan Gedung Rumah Sakit
 - Operasional dan Pemeliharaan Mesin Genset, Mesin Oksigen, Mesin Ipal dan Mesin Insenerator Rumah Sakit
 - Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Rumah Sakit
 - Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit
- t. Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan**, dengan kegiatan :
 - Perencanaan Rehabilitasi Fisik/Konstruksi
 - Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
- u. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan**, dengan kegiatan :
 - Penetapan angka kredit point Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- v. Program Akses Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**, dengan kegiatan :
 - Penanggulangan krisis/bencana
- x. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**, dengan kegiatan :
 - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

2.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 57.581.206.378,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 39.008.889.834,-** atau sebesar **67,75 persen**, sementara alokasi anggaran pada SKPD RSUD Gunungsitoli sebesar **Rp. 87.934.590.230,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 71.059.854.451,-** atau sebesar **80,80 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan RSUD Gunungsitoli Tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 4-7
Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan
Yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
Tahun 2016

Tabel : 4-8
Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan
Yang dilaksanakan RSUD Gunungsitoli
Tahun 2016

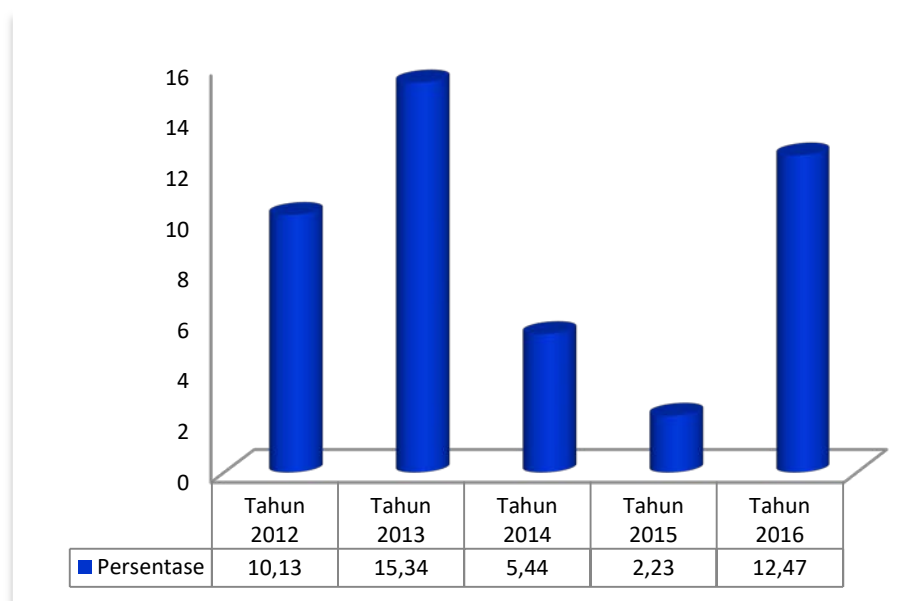
Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana antara lain:

- i. Penyediaan jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan pasien umum, dari pagu anggaran sebesar Rp.28.700.000,- tidak dapat terealisasi (realisasi 0%). Hal ini terjadi karena tidak ada laporan pasien umum dari Puskesmas, dan hampir semua yang dilayani adalah pasien peserta JKN BPJS.
- ii. Pengadaan Generator Listrik untuk Puskesmas, dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.600.000.000,- tidak dapat terealisasi (realisasi 0%). Hal ini terjadi karena pihak penyedia tidak dapat memenuhi pengadaan hingga akhir tahun anggaran 2016.
- iii. Kegiatan sumber dana SILPA DAK yang dianggarkan pada P-APBD T.A. 2016 antara lain: 1) pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Ma'u dan Bozihona (2 unit) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.769.765.908,-; dan 2) Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan (3 unit) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.677.000.000,- realisasi 0%, karena tidak sempat terlaksana pada tahun anggaran 2016.
- iv. Kegiatan Jaminan persalinan sumber dana DAK Non Fisik, dari pagu anggaran sebesar Rp.1.635.370.000,- realisasi sebesar Rp.72.748.100,- (4,45%). Kegiatan fasilitasi pelayanan persalinan ini hanya terlaksana di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Hiliduho dan Puskesmas Idanogawo. Sebagian besar tidak terlaksana selain kegiatan baru juga karena adanya keraguan Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Hasil Capaian Kinerja

Dalam hal menilai keberhasilan kinerja bidang kesehatan, maka salah satu indikator utama yang dapat dijadikan barometer adalah indikator derajat kesehatan. Secara kumulatif tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 sebagian besar telah tercapai dari target kumulatif yang telah ditentukan. Indikator mortalitas (angka kematian) menunjukkan angka kematian bayi 12,47/1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2016 (target tahun 2016 sebesar 23/1.000 kelahiran hidup).

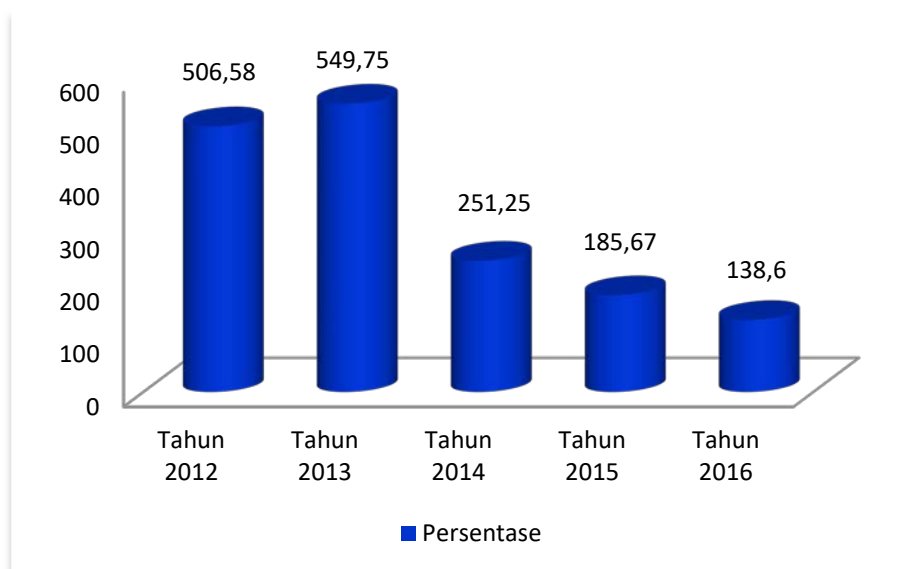
Grafik : 4-1
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Nias Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

Selain angka kematian bayi, angka kematian ibu juga merupakan salah satu indikator kesehatan dalam suatu daerah sebagai barometer kondisi kesehatan di Kabupaten Nias. Angka kematian ibu di Kabupaten Nias adalah 506,58/100.000 KH pada tahun 2012, mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 183,27/100.000 KH pada tahun 2016 sedangkan angka kematian balita 0 (tidak ada) pada tahun 2016.

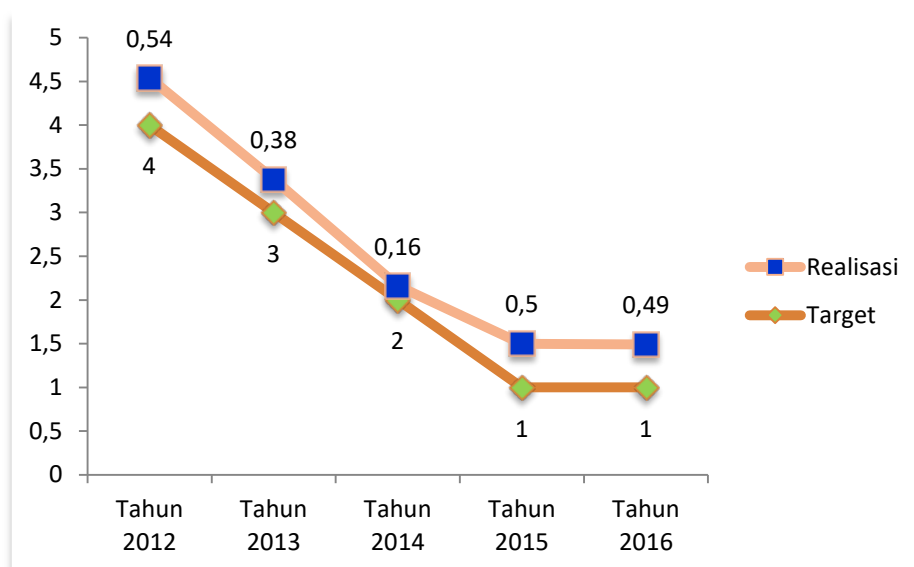
Grafik : 4-2
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nias Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

Morbiditas (Angka Kesakitan) menunjukkan Angka Kesakitan Malaria yang semakin menurun dari 0,54/1.000 penduduk pada tahun 2012 turun menjadi 0,49/1.000 penduduk pada tahun 2016, dimana penurunan ini disebabkan oleh jangkauan pelayanan kesehatan yang semakin baik serta meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria di Kabupaten Nias. Sementara angka kesembuhan penderita TB paru BTA+ tahun 2016 sebesar 100% (target kumulatif RPJMD 2016 yaitu 85%); status gizi menunjukkan persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0,32% (Target RPJMD 2016 sebesar 18,5%); persentase kecamatan bebas rawan gizi sebesar 20% (target RPJMD 2016 sebesar 100%).

Grafik : 4-3
Angka Kesakitan Malaria di Kabupaten Nias Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

Capaian kinerja pelaksanaan urusan kesehatan Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

Tabel : 4-9
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kesehatan SKPD Dinas Kesehatan
Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
01	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	80	100	100	Tercapai
II	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
02	Jumlah kegiatan penunjang peningkatan kesehatan	%	100	100	100	Tercapai
III	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					
03	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	18,5	80	81,18	Tercapai
04	Koordinasi lintas program dan lintas sektor	%	77,13	100	100	Tercapai
05	Rasio Posyandu per Jumlah Balita	%	11,94	12	13,08	Tercapai
IV	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
06	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	%	15,6	100	100	Tercapai
07	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan dari keluarga miskin	%	5,8	60	19,77	Tidak Tercapai
08	Persentase bayi usia 0 - 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	3,34	80	31,52	Tidak Tercapai
09	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium	%	73,7	90	79,33	Tidak Tercapai
10	Persentase bayi 6 - 59 bulan dapat kapsul vitamin A	%	73,2	85,50	87	Tercapai
11	Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet	%	70,35	85	5,04	Tidak Tercapai
12	Persentase balita dengan gizi buruk	%		18,50	0,32	Tercapai
13	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	55,56	100	20	Tidak Tercapai
V	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					
14	Persentase rumah yang memenuhi syarat Kesehatan	%	13,97	55	33,44	Tidak Tercapai
15	Persentase penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yg berkualitas	%	27,54	67	30	Tidak Tercapai
16	Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat	%	27,54	100	50	Tidak Tercapai
17	Persentase penduduk yg menggunakan jamban sehat	%	5,13	75	40,8	Tidak Tercapai
18	Jumlah desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Desa	3	85	45	Tidak Tercapai
VI	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
19	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	26,6	100	78,82	Tidak Tercapai
20	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100	Tercapai
21	Non Polio Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 thn		1	1	2	Tidak Tercapai
22	Cakupan balita dengan pnemonia yang ditangani	%	100	100	0	Tercapai (Tidak ada kasus)
23	Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	%		80	108,5	Tercapai
24	Penderita DBD Yang Ditangani	%	0	0	100	Tercapai
25	Penderita Diare yang ditangani	%	100	100	100	Tercapai
26	Cakupan kesembuhan TB Paru	%		85	100	Tercapai
27	Angka kesakitan malaria/1000 pddk (API)		10,4	1	0,49	Tercapai

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
28	Cakupan imunisasi pada bayi 0 – 11 bln	%	83,18	100	91,7	Tidak Tercapai
29	Cakupan imunisasi pada imunisasi Campak pada anak kelas I Sekolah dasar	%	98	100	97,3	Tidak Tercapai
30	Cakupan imunisasi DT pada kls I dan TT pada kelas II dan III SD	%	98	100	92,5	Tidak Tercapai
31	Prevalensi HIV (Persentase Kasus Terhadap Penduduk Berisiko)	%	0	0	0	Tercapai (Tidak ada kasus)
32	Jumlah Kasus TB Paru per 100,000 penduduk		178,3	200	183,48	Tercapai
33	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 Penduduk		0	0	18,49	Tidak Tercapai
34	Jumlah Kasus Diare per 1000 penduduk		14,3	11,3	6,14	Tercapai
VII	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Puskesmas keliling dan Poskesdes					
35	Rumah Sakit Umum Tipe D	Unit	-	-	-	-
36	Puskesmas	Unit	8	9	12	Tercapai
37	Peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap	Unit	-	-	1	Tercapai
38	Puskesmas Pembantu	Unit	27	28	28	Tercapai
39	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Unit	-	1	3	Tercapai
40	Rehabilitasi Puskesmas		-	1	4	Tercapai
41	Puskesmas Keliling	Unit	7	10	15	Tercapai
42	Ambulance	Unit	-	2	9	Tercapai
43	Poskesdes	Unit	27	60	53	Tidak Tercapai
44	Rasio Posyandu per Jumlah Balita		11,94	12	13,08	Tercapai
45	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Jumlah Penduduk		0,48	0,65	0,67	Tercapai
46	Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk		0,076	0,076	0,076	Tercapai
47	Cakupan Puskesmas per Kecamatan	%	89,99	100	120	Tercapai
48	Jumlah Pembantu Puskesmas (Pustu, Poskesdes, Polindes, BKIA)		44	55	80	Tercapai
VIII	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					
49	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	70,3	100	84,76	Tidak Tercapai
IX	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					
50	Jumlah puskesmas santun lansia	Unit	-	8	8	Tercapai
X	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan					
51	Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	28	85	35	Tidak Tercapai
XI	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					
52	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	%	67,4	95	75,02	Tidak Tercapai
53	Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani	%	63,8	80	2,78	Tidak Tercapai
54	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	62,1	95	67,36	Tidak Tercapai
55	Cakupan Pelayanan Nifas	%	62,1	90	58,71	Tidak Tercapai
56	Cakupan peserta aktif KB.	%	32,7	75	60,5	Tidak Tercapai
57	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC	%	80	95	74,34	Tidak Tercapai
58	Angka Kematian Ibu / 100.000 KH		130,09	102	138,6	Tidak Tercapai
XII	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja					

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
59	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yg ditangani	%	3,3	80	0	Tercapai (tidak ada kasus)
60	Cakupan Kunjungan Bayi	%	71,9	90	91,05	Tercapai
61	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	70,3	100	84,76	Tidak Tercapai
62	Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	%	67,93	90	90,88	Tercapai
63	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	%	61,2	90	72,34	Tidak Tercapai
64	Angka Kematian Bayi / 1.000 KH			23	12,47	Tercapai
65	Angka Kematian Balita / 1.000 KH		0,87	32	0	Tercapai (Tidak ada kasus)
66	Angka harapan hidup waktu lahir		69,5	72	70,12	Tidak Tercapai
67	Angka kelangsungan hidup bayi		994	977	973	Tidak Tercapai
68	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	50	100	92,5	Tidak Tercapai
XII	Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan					
69	Koordinasi lintas program dan lintas sektor	%	100	100	100	Tercapai
70	Penyusunan profil kesehatan	%	100	100	100	Tercapai
XIII	Program Pembinaan Desa Siaga					
71	Persentase Desa Siaga Aktif	%	18,5	80	81,18	Tercapai
XIV	Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan					
72	Rasio dokter/100.000 pddk		7,56	20	20,62	Tercapai
73	Rasio dokter spesialis/100.000 pddk		-	6	10,67	Tercapai
74	Rasio dokter keluarga/100.000 pddk		-	1	0	Tidak Tercapai
75	Rasio dokter gigi/100.000 pddk		0,76	12	3,56	Tidak Tercapai
76	Rasio apoteker/100.000 pddk		-	10	6,40	Tidak Tercapai
77	Rasio bidan/100.000 pddk		85,39	100	138,68	Tercapai
78	Rasio perawat/100.000 pddk		102,02	115	278,07	Tercapai
79	Rasio ahli gizi/100.000 pddk		3,02	15	8,53	Tidak Tercapai
80	Rasio ahli sanitasi/100.000 pddk		2,27	15	-	Tidak Tercapai
81	Rasio ahli kesehatan masyarakat/100.000 pddk		23,43	40	12,08	Tidak Tercapai
82	Rasio analis kesehatan/100.000 pddk		2,27	15	17,78	Tercapai
83	Rasio asisten apoteker/100.000 pddk		4,53	15	22,05	Tercapai
84	Rasio perawat gigi/100.000 pddk		3,02	9	7,11	Tidak Tercapai
85	Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONE	%	0	100	66,67	StatusTercapai
86	Jumlah tenaga kesehatan (paramedis, bidan dan operator alat) yang dilatih dalam penggunaan alat-alat kesehatan di Puskesmas dan Pustu	Org		30	-	Tidak Tercapai
XV	Program Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)					
87	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	37,9	100	22,74	Tidak Tercapai
88	Cakupan Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%	76	100	58,38	Tidak Tercapai
XVI	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia					
89	Identifikasi dan inventarisasi obat tradisional	Dok		-	-	-
90	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan obat tradisional	Keg		1	1	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nias

Dari 90 indikator kinerja Dinas Kesehatan, ada 2 (dua) indikator yang tidak ada target, yaitu Rumah Sakit Umum Type D dan Identifikasi dan Inventarisasi Obat Tradisional. Dari 88 indikator tahun 2016 terdapat 48 indikator yang tercapai (54,55 persen) dan 40 indikator yang tidak tercapai (45,45 persen). Beberapa indikator yang tidak tercapai karena :

1. Keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
2. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja belum terlaksana karena belum adanya regulasi yang mengatur implementasi kegiatan, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan staf yang kompeten pada bidang kegiatan dimaksud.
3. Beberapa jenis penyakit yang sebelumnya belum ada di Kabupaten Nias, kini telah ada kasusnya seperti penyakit rabies (tahun 2010), demam berdarah (2012) dan HIV/AIDS (2013).
4. Adanya perubahan Petunjuk Teknis sasaran pemanfaatan dana khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan, halmana sejak tahun 2014 DAK Bidang Kesehatan hanya difokuskan pada pembenahan sarana dan prasarana Puskesmas sejalan dengan implementasi Program JKN BPJS untuk memperkuat pelayanan di Puskesmas.
5. Keterbatasan tenaga kesehatan khususnya tenaga medis dan paramedis (bidan dan perawat).
6. Peran serta masyarakat terhadap upaya kesehatan belum optimal, terutama dalam memanfaatkan pelayanan dan sarana kesehatan yang telah ada.

2. Capaian kinerja pelayanan di RSUD Gunungsitoli

Tabel : 4-10
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kesehatan SKPD RSUD Gunungsitoli
Kabupaten Nias Tahun 2016

No.	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
1.	Cakupan pelayanan IGD	Pasien	15.496	27.452	17.526	Tidak Tercapai
2.	Cakupan pelayanan Poliklinik umum	Pasien	19.200	34.014	32.851	Tidak Tercapai
3.	Cakupan pelayanan pemeriksaan laborat	Pasien	14.821	26.256	20.680	Tidak Tercapai
4.	Cakupan pelayanan pemeriksaan radiologi	Pasien	5.180	9.177	9.636	Tercapai
5.	Cakupan pelayanan fisioterapi	Pasien	2.280	4.039	5.642	Tercapai
6.	Jumlah pasien rawat inap	Pasien	8.590	15.218	15.798	Tercapai
7.	Rata-rata jumlah hari rawat pasien	Hari	31.613	56.004	75.961	Tercapai
8.	BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)	%	79,96	85	98,67	Tercapai
9.	LOS (Length of Stay = Rata rata lamanya pasien dirawat)	Hari	3,78	3	4,47	Tidak Tercapai
10.	TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)	Hari	0,92	1	0,08	Tercapai
11.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	6,79	6	5,16	Tercapai
12.	GDR (Gross Death Rate = angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.)	‰	50,97	45	35,26	Tercapai
13.	NDR (Net Death Rate = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	‰	12,97	12	15,37	Tidak Tercapai
14.	Cakupan kegiatan pembedahan	Pasien	531	945	2.759	Tercapai
15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	Tercapai
16.	Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan RSUD	%	-	≥80	78	Tidak Tercapai
	Kejadian kematian ibu karena persalinan					
17.	Pendarahan	%	37,5	≤ 1	-	Tercapai
18.	Pre-eklampsia	%	37,5	≤ 30	2,56	Tercapai
19.	Sepsis	%	100	≤ 1	-	Tercapai

No.	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
	Perbaikan manajemen dan tata kelola di RSUD Gunungsitoli					
20.	BLUD RSUD Gunungsitoli	%	-	100	100	Tercapai
21.	Adanya SPM RSUD Gunungsitoli	Dokumen	-	1	1	Tercapai
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
22.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (meubelair, perlengkapan rumah tangga RS, bahan-bahan logistik)	%	100	100	86	Tidak Tercapai
	Proram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
23.	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (peralatan medik dan prasarana lainnya)	Keg	2	2	8	Tercapai

Sumber : RSUD Gunungsitoli

2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dalam pelaksanaan Urusan Bidang Kesehatan pada sampai Tahun 2016 yaitu:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan balita.
- Pengadaan Generator Listrik untuk puskesmas dan kegiatan fisik yang dianggarkan pada P-APBD T.A. 2016 sumber dana SILPA DAK tidak sempat terlaksana karena pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan hingga akhir tahun 2016.
- Pemerataan pelayanan kesehatan belum optimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan yang masih terbatas.
- Dana JKN/BPJS khususnya biaya operasional tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Puskesmas karena keterbatasan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan dana dimaksud.

Untuk mengatasi permasalahan di atas disarankan solusi pemecahannya sebagai berikut:

- Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk meminimalkan faktor risiko akibat penyakit degeneratif di masyarakat, khususnya tingkat rumah tangga.
- Peningkatan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk khususnya pada ibu hamil, bayi dan balita.
- Pendayagunaan tenaga kesehatan yang telah ada, serta mengupayakan penempatan tenaga kesehatan PTT/Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan RI di Kabupaten Nias, serta rekrutmen tenaga CPNS melalui Pemerintah Kabupaten Nias.
- Memaksimalkan peran serta Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam memberhasilkan kegiatan yang telah diprogramkan agar upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Nias dapat terlaksana dengan baik
- Kegiatan-kegiatan yang belum/tidak terlaksana Tahun 2016 diusulkan untuk dianggarkan kembali pada APBD TA. 2017.
- Mengusulkan kepada Menteri Kesehatan perubahan petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN FKTP, dalam hal ini untuk pemeliharaan dan operasional rutin lainnya di Puskesmas dan jaringannya.

Sementara permasalahan yang dihadapi oleh RSU Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan wajib kesehatan adalah sebagai berikut :

- Kurangnya ruang perawatan dan meningkatnya jumlah kunjungan pasien yang berobat di RSUD Gunungsitoli menyebabkan kapasitas tempat tidur selalu penuh. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan angka penggunaan tempat tidur (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) sebesar 98,67%, cenderung lebih tinggi dari indikator BOR Nasional adalah 60-85%. Kapasitas ruang perawatan RSUD Gunungsitoli saat ini dengan jumlah 218 tempat tidur (TT) masih sangat kurang.
- Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional mempunyai kriteria dan tugas mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan

Regional, maka Rumah Sakit Rujukan Regional harus sebagai rumah sakit kelas B dan rumah sakit pendidikan.

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional di Kepulauan Nias, RSUD Gunungsitoli diwajibkan terakreditasi rumah sakit standar Nasional (standar akreditasi rumah sakit versi 2012) dan sekurangnya lulus akreditasi tingkat Utama.
- d. Memenuhi kriteria Rumah Sakit Rujukan Regional, RSUD Gunungsitoli harus ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B, sehingga sumber daya manusia di RSUD Gunungsitoli harus dipersiapkan sesuai standar SDM Rumah Sakit Kelas B, meliputi pemenuhan tenaga medis spesialis dasar, tenaga medik spesialis penunjang, tenaga medik spesialis lain, tenaga medik subspesialis, tenaga medik spesialis gigi mulut, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan.
- e. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
- f. Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, maka RSUD Gunungsitoli mengimplementasikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Semakin bertambahnya jenis penyakit yang membutuhkan perawatan khusus dan meningkatnya kasus rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka penambahan pelayanan unggulan di RSUD Gunungsitoli menjadi prioritas untuk pengembangan produk pelayanan spesialistik.
- h. Kurangnya jenis produk layanan unggulan seperti unit stroke, diabetes centre, poliklinik sore, senam ibu hamil, dan ruang penitipan anak.

Untuk mengatasi permasalahan di atas disarankan solusi pemecahannya sebagai berikut :

- a. RSUD Gunungsitoli sebagai sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional di Kepulauan Nias diharuskan:
 - meningkatkan klasifikasi Kelas RSUD Gunungsitoli menuju Rumah Sakit Kelas B sesuai Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
 - RSUD Gunungsitoli terakreditasi Standar Nasional (standar akreditasi rumah sakit versi 2012) sekurangnya lulus akreditasi Tingkat Utama.
 - Pemenuhan sumber daya manusia di RSUD Gunungsitoli sesuai standar SDM Rumah Sakit Kelas B melalui peningkatan pendidikan dokter umum menjadi dokter spesialis dan dokter spesialis menjadi sub spesialis serta peningkatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan kementerian kesehatan RI.
 - Pemenuhan fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan RSUD Gunungsitoli harus sesuai standar rumah sakit Kelas B dan pemenuhan peralatan medik yang dibutuhkan oleh dokter spesialis/sub spesialis.
- b. Pembenahan sarana dan prasarana untuk penilaian Akreditasi rumah sakit versi 2012 dan mengubah budaya kerja untuk lebih optimal dalam melayani pasien
- c. Penambahan SDM non medis dan keperawatan, serta memberikan pendidikan/pelatihan bagi pegawai guna meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan pada pasien, dan peningkatan pada pemasaran/sosialisasi terhadap produk unggulan yang ada di RSUD Gunungsitoli.
- d. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Baru RSUD Gunungsitoli Tahap I dan kegiatan Pembangunan Ruang Perawatan RSUD Gunungsitoli (DAK PENUGASAN) pada tahun 2017.
 - Kegiatan Pembangunan Gedung Baru RSUD Gunungsitoli Tahap I (DAK PENUGASAN) pada TA 2017 dengan output:
 - Ruang baru Poliklinik spesialis/subspesialis
 - Ruang Hemodialisa baru dengan kapasitas 21 TT (Non Isolasi 17 TT; Isolasi 4 TT), dari 5 TT sebelumnya
 - Ruang ICU baru dengan kapasitas 26 TT (Non Isolasi 20 TT; Isolasi 6 TT), dari 7 TT sebelumnya dan tersedianya ruang NICU/PICU/ ICCU
 - Penambahan ruangan perawatan (jumlah TT) sebanyak 168 TT. Dengan penambahan 168 TT, maka dari 218 TT sebelumnya menjadi 386 TT
 - Basemant (Ruang Parkir)

- Ruang/Aula Pertemuan.
 - Kegiatan Pembangunan Ruang Perawatan RSUD Gunungsitoli (DAK PENUGASAN) pada tahun 2017 dengan output:
 - Ruang Perawatan Kelas III
 - Cafetarian/Kantin dan Fotocopy Rumah Sakit
 - Parkir Roda-2
- Pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tempat tidur di RSUD Gunungsitoli.
- e. Penyediaan alat-alat pemeriksaan yang canggih dan memadai
 - f. Pemeliharaan alat kedokteran serta sarana prasarana yang lain secara rutin, peremajaan alat kedokteran atau melakukan kerjasama/KSO untuk penyediaan alat penunjang / canggih.
 - g. Penambahan jenis produk layanan unggulan seperti unit stroke, diabetes centre, poliklinik sore, senam ibu hamil, dan ruang penitipan anak.

3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

3.1. Gambaran Umum

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Nias menyusun bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nias Akhir Tahun Anggaran 2016.

Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Nias tahun anggaran 2016 melaksanakan program dan kegiatan, dengan berpedoman pada Perda penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016, serta Perda penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Nomor 11 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016.

Salah satu program pembangunan infrastruktur yang sangat strategis telah terlaksana di Tahun 2016, yakni peningkatan struktur beberapa ruas jalan strategis kabupaten, dari konstruksi lapen menjadi hotmix.

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan pembebasan lahan, keterbatasan personil pengelola kegiatan, serta hal-hal lain sebagaimana diuraikan pada Bab VI. Meski dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, Dinas Pekerjaan Umum tetap berupaya semaksimal mungkin mensukseskan semua program kegiatan yang telah direncanakan.

3.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias yaitu :

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa untuk membuka keterisolasian wilayah menuju sentra – sentra produksi dan kawasan strategis cepat tumbuh.
2. Pembangunan daerah irigasi baru dan pemeliharaan prasarana dan jaringan irigasi yang berpotensi, sehingga terwujudnya swasembada beras.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air (sungai sebagai sumber air) dan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai pendukung operasional dan pemeliharaan bangunan irigasi.
4. Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai (DAS).
5. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang berbasis sambungan rumah tangga.
6. Mengoptimalkan nilai pemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan milik pemerintah daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, yang disajikan sebagai berikut :

1. **Program pembangunan jalan dan jembatan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan
 - b. Peningkatan jalan dan jembatan
2. **Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan jalan dan jembatan
 - b. Rehabilitasi jalan dan jembatan
3. **Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan jaringan irigasi dan daerah irigasi baru.
 - b. Rehabilitasi jaringan irigasi.
 - c. Peningkatan jaringan irigasi.
4. **Program pembangunan turap/ talud/ bronjong**, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan bronjong/ perkuatan tebing sungai
 - b. Pengendalian banjir/ normalisasi sungai.
 - c. Pembangunan tanggul
5. **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan drainase/ gorong-gorong/ parit beton di lingkungan pedesaan atau fasilitas umum
 - b. Pembangunan tembok penahan pada bangunan fasilitas umum
6. **Program pembangunan infrastruktur pedesaan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan jalan setapak yang menghubungkan antar desa dan beberapa fasilitas umum.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang berbasis sambungan rumah tangga.
7. **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan/ rehabilitasi alat-alat berat
 - b. Operasional alat berat
 - c. Pengadaan alat-alat berat.

3.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum total pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias berdasarkan PERDA nomor 01 Tahun 2016 tentang APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 160.746.995.918,- dan mengalami perubahan sesuai PERDA nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2016 menjadi **Rp. 179.287.031.987,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 151.816.976.409,-** atau **84,68 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib Pekerjaan Umum disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 4-11
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2016

3.5. Hasil Capaian Kinerja

Dampak dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016, berupa hasil capaian kinerja untuk masing-masing program/ kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga memiliki indikator kinerja yang menjadi acuan setiap tahunnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016, yakni:

1. Jumlah ibukota kecamatan yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4
Salah satu program Pemerintah kabupaten Nias tahun 2011 hingga 2016 adalah pembangunan jalan menuju ibukota kecamatan. Adapun ibukota kecamatan yang belum dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4 di Kabupaten Nias sejak awalnya yakni Ibukota kecamatan Ma'u, Kecamatan Ulugawo dan Ibukota kecamatan Somolo-molo. Sejak Tahun Anggaran 2015 semua Ibukota kecamatan telah tuntas dan telah dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4. Ibukota Kecamatan yang terakhir dimaksud adalah Ibukota Kecamatan Ma'u. sehingga pada tahun anggaran 2016 dinas pekerjaan umum tidak memasang target.
2. Jumlah desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4
Indikator kinerja berikut adalah Jumlah Desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4. Pada kondisi awal pada tahun 2010, jumlah desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4 berjumlah 63 Desa. Capaian kinerja hingga Tahun 2016, tersisa 20 Desa lagi yang belum terjangkau. Jumlah ini tidak termasuk jumlah desa setelah pemekaran desa tahun 2012 yakni sebanyak 44 Desa lagi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah selain karena keterbatasan anggaran dan lebih memprioritaskan jalan ruas strategis, lokasi desa-desa di Kabupaten Nias pada umumnya terpencar dan terisolir oleh rintangan alam. Sebagai contoh untuk jalan masuk wilayah Desa Loloana'a kecamatan Gido, warga desa harus menyeberang sungai Gido Sebua. Sehingga pembangunan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan jembatan.
3. Jalan lintas yang menghubungkan wilayah Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli
Target kinerja yang dibebankan pada TA. 2016 adalah 1 paket kegiatan, sementara realisasi yang dicapai sebesar 4 paket dengan persentase kinerja 400%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya (TA. 2015), target yang dibebankan sebesar 1 Paket, dan realisasi yang dicapai 2 paket, dengan persentase capaian kinerja 200,00%. Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2016 telah mencapai 5 paket kegiatan. Diantaranya paket pekerjaan :
 - o Paket jalan ruas Huno – Hou yang menghubungkan kecamatan Bawolato (kabupaten Nias) dengan kecamatan Gomo (kabupaten Nias Selatan).
 - o Paket pekerjaan jalan ruas Hiligodu Tanose'o – Gunungsitoli Alo'oa yang menghubungkan Kecamatan Hiliduho (kabupaten Nias) dengan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (Kota Gunungsitoli).
 - o Paket pekerjaan jalan ruas Hiligodu Botomuzoi – Simango/Bayo yang menghubungkan kecamatan Botomuzoi (kabupaten Nias) dengan kecamatan Mandrehe Utara (kabupaten Nias Barat).
 - o Paket pekerjaan Sisobalauru – Anaoma yang menghubungkan kecamatan Hiliduho (kabupaten Nias) dengan kecamatan Alasa Talumuzoi (kabupaten Nias Utara).
 - o Paket pekerjaan jalan ruas Botombawo – Talafu, yang menghubungkan kecamatan Botomuzoi (kabupaten Nias) dengan kecamatan Tugala Oyo (kabupaten Nias Utara).
4. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam).
Target indikator kinerja berikutnya pada TA. 2016 adalah 23,60 km jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam), hasil yang dicapai sebesar 36,587 km dengan persentase kinerja 105,85%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya (TA. 2015), target yang dibebankan sebesar 16,80 km, dan realisasi yang dicapai sebesar 18,40 km, dengan persentase capaian kinerja 109,52%. Maka capaian kinerja pada tahun 2015 meningkat 24,78%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai sebesar 250,66 km. sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 sebesar 265,33 km. Artinya capaian kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) telah direalisasikan sebesar 106,00%.

5. Panjang jalan kabupaten yang dilalui roda 4.
Target yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 15,72 km, sementara realisasi yang dicapai sebesar 39,09 km dengan persentase kinerja 248,70%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya TA. 2015 adalah 15,72 km, sementara realisasi yang dicapai sebesar 39,09 km dengan capaian 248,70%. Hal ini menggambarkan peningkatan capaian kinerja sebesar 13,46%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai sebesar 333,61 km. sementara total capaian sejak tahun 2011-2016 telah mencapai 366,74 km. Artinya capaian kinerja Panjang jalan kabupaten yang dilalui roda 4 telah direalisasikan sebesar 106,00%. Tercapainya target panjang jalan kabupaten yang dilalui roda 4 dimaksud, dipengaruhi oleh faktor banyaknya pekerjaan pembukaan jalan baru menuju desa-desa terisolir dan akses menuju fasilitas umum seperti objek wisata serta untuk mencapai target ruas jalan menuju daerah perbatasan Kabupaten Nias.
6. Meningkatnya panjang jembatan yang dibangun
Target panjang jembatan yang dibangun untuk TA. 2016 adalah 36,00 meter (kumulatif = 1024,94 meter), dan hasil kinerja yang dicapai sepanjang 77,80 meter (kumulatif 1.079,10 meter) dengan persentase kinerja 105,62%. Bila dibandingkan dengan panjang jembatan yang dibangun untuk TA. 2015 adalah 18 m (kumulatif = 988,94 meter), hasil yang dicapai sebesar 22,8 m (kumulatif = 1.001,3 meter) dengan persentase kinerja 101,00%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk peningkatan panjang jembatan yang dibangun sebesar 1.024,94 m. sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 1.079,10 meter. Artinya capaian kinerja meningkatnya panjang jembatan yang dibangun telah direalisasikan sebesar 105,00%. Tercapainya target kinerja peningkatan panjang jembatan ini dipengaruhi oleh target pembukaan jalan baru menuju desa-desa terisolir.
7. Panjang jalan yang ditingkatkan
Target kinerja yang dibebankan pada TA. 2016 adalah panjang jalan yang akan ditingkatkan sebesar 6,00 km (kumulatif = 28,29 km), dan realisasi yang dicapai sebesar 33,85 km (kumulatif = 112,69 km) dengan persentase kinerja 398,34%. Jika dibandingkan dengan Target kinerja yang dibebankan pada TA. 2015 adalah panjang jalan yang akan ditingkatkan sebesar 5,70 km (kumulatif = 22,29 km), dan realisasi yang dicapai sebesar 25,93 km (kumulatif = 78,84%) dengan persentase kinerja 353,71%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk peningkatan jalan sebesar 28,89 km. sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 112,69 km atau capaian kinerja sebesar 398,34%. Tercapainya indikator peningkatan jalan di Tahun 2016 tidak terlepas dari tersedianya anggaran dana alokasi khusus yang besar dari pusat. Dimana salah satu petunjuk teknis DAK Tahun 2016 adalah program peningkatan jalan kabupaten.
8. Meningkatnya panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
Target kinerja yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 17,00 km (kumulatif 2016 = 87,54 km), realisasi yang dicapai sebesar 17,15 km (kumulatif 2016 = 74%) dengan persentase kinerja 84,23%. Jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya TA. 2015 adalah 14,00 km (kumulatif 2015 = 70,54 km), realisasi yang dicapai sebesar 13,18 km (kumulatif 2015 = 56,58 km) dengan persentase kinerja 80,21%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk peningkatan jalan sebesar 87,54 km, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 74,00 km atau capaian kinerja sebesar 84,23%. Penyebab tidak tercapainya indikator panjang jalan yang dipelihara tersebut karena tingkat kerusakan yang terjadi di semua ruas jalan kabupaten tidak dapat teratasi lagi dengan pekerjaan pemeliharaan. Akan tetapi dilakukan dengan pembangunan jalan baru/ pengalihan arah jalan.
9. Jumlah pembukaan Jalan baru
Target yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 13,50 km (kumulatif = 43,38 km), realisasi yang dicapai sebesar 24,84 km (kumulatif = 67,07 km) dengan persentase kinerja 154,62%. Perbandingan dengan TA. 2015 adalah 10,80 km (kumulatif 2015 = 29,88 km), sementara realisasi yang dicapai sebesar 12,85 km (kumulatif 2015 = 42,23 km) dengan persentase kinerja 141,34%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk jumlah pembukaan jalan baru sebesar 43,38 km, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 67,07 km atau capaian kinerja sebesar 154,62%. Peningkatan capaian kinerja pada indikator kinerja pembukaan jalan baru tahun 2016 tersebut dipengaruhi oleh banyaknya usulan dari masyarakat berupa program pembangunan jalan untuk menjangkau desa-desa terisolir.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air memiliki indikator kinerja yang menjadi acuan setiap tahunnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016, yakni :

1. Rasio jaringan irigasi (luas sawah yang terairi) dibanding luas lahan sawah
Target kinerja yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 58%, sementara hasil yang dicapai sebesar 20,89% dengan persentase kinerja 36,02%. Jika dibandingkan dengan untuk TA. 2015 adalah 53%, sementara hasil yang dicapai sebesar 16,03% dengan persentase kinerja 30,25%. Capaian tahun ini berubah karena total luas lahan sawah yang dipedomani adalah luas lahan sawah yang tertera dalam dokumen RTRW Kabupaten Nias, yakni 7.119 Ha. Sementara luas sawah yang terairi (memiliki jaringan irigasi) sesuai hasil pemetaan 1.488 ha. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk rasio jaringan irigasi (luas sawah yang terairi) dibanding luas lahan sawah sebesar 58%, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 baru mencapai 20,89% atau capaian kinerja masih sebesar 36,02%.
2. Luas Irigasi kabupaten kondisi baik dibanding luas seluruh daerah irigasi
Target kinerja yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 40%, sementara hasil yang dicapai sebesar 40,41% dengan persentase kinerja 101,03%. Perbandingan dengan TA. 2015 adalah 35%, sementara hasil yang dicapai sebesar 39,12% dengan persentase kinerja 112,00%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk luas irigasi kabupaten kondisi baik dibanding luas seluruh daerah irigasi sebesar 40%, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 40,41% atau capaian kinerja sebesar 101,03%.
3. Jumlah unit Daerah Irigasi (DI) yang dibangun
Target kinerja jumlah unit daerah irigasi yang dibangun untuk TA. 2016 adalah 5 unit (kumulatif 2016 = 32 unit), sementara hasil yang dicapai sebesar 0 unit (tidak ada daerah irigasi baru)/ kumulatif 2016 = 20 unit, dengan persentase kinerja 62,50%. Perbandingan pada TA. 2015 target sebanyak 4 unit (kumulatif 2015 = 27 unit D.I), sementara hasil yang dicapai sebesar 1 unit (kumulatif 2015 = 20 unit D.I) dengan capaian kinerja 74,07%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk jumlah unit Daerah Irigasi yang dibangun sebesar 32 Unit Daerah Irigasi, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 baru mencapai 20 unit daerah irigasi atau capaian kinerja masih sebesar 62,50%. Tidak tercapainya target pembangunan daerah irigasi yang baru disebabkan karena beberapa daerah irigasi yang terdata untuk dibangun, belum dilakukan studi kelayakan. Sehingga perlu menunggu hasil pendataan oleh konsultan pemetaan daerah irigasi pada akhir tahun 2016.
4. Panjang saluran irigasi yang dibangun
Target panjang saluran irigasi yang dibangun tahun 2016 adalah 2.500 meter (kumulatif 2016 = 20.278 meter), realisasi yang telah dicapai sepanjang 4.430 meter (kumulatif 2016 = 35.868 meter), dengan persentase kinerja 176,88%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 adalah 3.000 meter (kumulatif 2015 = 17.778 meter), sementara realisasi yang telah dicapai sepanjang 7.399 meter (kumulatif 2015 = 31.438 meter), dengan persentase kinerja 176,84%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk panjang saluran Irigasi yang dibangun sepanjang 20.278 meter. Sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 35.868 meter atau capaian kinerja sebesar 176,88%. Tercapainya target dari indikator panjang saluran irigasi yang dibangun ini tidak terlepas dari dukungan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi Tahun 2016), dimana petunjuk teknis penggunaan DAK tersebut fokus pada peningkatan jaringan irigasi, terutama pada pembangunan saluran irigasi.
5. Jumlah kelompok P3A aktif
Target yang dibebankan pada TA. 2016 adalah sebanyak 1 kelompok P3A yang aktif (kumulatif 2016 = 4 unit kelompok), sementara hasilnya tahun ini tidak tercapai (kumulatif 2016 = 7 kelompok P3A), dengan persentase kinerja 175,00%. Jika dibandingkan dengan target TA. 2015 adalah 1 kelompok (kumulatif 2016 = 3 kelompok), sementara hasilnya tercapai sebanyak 6 kelompok P3A (kumulatif 2016 = 7 kelompok), dengan persentase kinerja 233,33%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk jumlah kelompok P3A aktif sebanyak 4 kelompok. sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 7 kelompok atau capaian kinerja telah mencapai 175,00%. Tercapainya target jumlah kelompok P3A

aktif ini disebabkan karena peran Pemerintah Kabupaten Nias dalam hal ini Bappeda dan SKPD terkait termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias dan Dinas Pertanian dalam membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Nias, sebagai wadah pembinaan kelompok P3A di wilayah Kabupaten Nias. Adapun kelompok P3A yang telah aktif dan telah terbentuk antara lain :

- a. P3A DI. Uluwi Desa Baruzo kecamatan Sogaeadu
- b. P3A DI. Sinizi Desa Tuhembuasi kecamatan Sogaeadu
- c. P3A DI. Siholi Desa Baruzo kecamatan Idanogawo
- d. P3A DI. Laowo Desa Laowo Hilimbaruzo kecamatan Idanogawo
- e. P3A DI. Sisake Desa Hilihuru kecamatan Bawolato
- f. P3A DI. Simanani Desa Hiliganoita kecamatan Bawolato
- g. P3A DI. Noho Desa Hiligodu kecamatan Botomuzoi

6. Panjang sungai yang dinormalisasi

Target yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 700 meter (kumulatif 2016 = 3.705 meter), realisasi yang telah dicapai sepanjang 1.470 meter (kumulatif 2016 = 3.981 meter), dengan persentase kinerja 107,45% tercapai. Perbandingan dengan TA. 2015 adalah 500 meter (kumulatif 2015 = 3.005 meter), realisasi sebesar 0,00 meter atau tidak adanya kegiatan (kumulatif 2015 = 2.511 meter), dengan persentase kinerja 83,56% dengan status tidak tercapai. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk panjang sungai yang dinormalisasi sepanjang 3.705 meter sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 3.981 meter atau capaian kinerja masih sebesar 107,45%. Tercapainya target panjang sungai yang dinormalisasi ini disebabkan oleh faktor banyaknya usulan masyarakat untuk penanganan luapan banjir sungai Idanomate yang menggenangi pemukiman warga desa Hilibadalu dan luapan banjir sungai Sinizi desa Tuhembuasi Kecamatan Sogaeadu.

7. Panjang Bronjong

Target kinerja pembangunan bronjong yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 700 meter (kumulatif 2016 = 3.204 meter), sementara realisasi sebesar 814 meter (kumulatif 2016 = 4.401 meter), dengan persentase kinerja 137,38%. Dibandingkan target pada TA. 2015 adalah 860 meter (kumulatif 2015 = 2.504 meter), sementara realisasi sepanjang 635 meter (kumulatif 2016 = 3.587,5 meter), dengan persentase kinerja 143,27%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk panjang bronjong sepanjang 3.204 meter sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 telah mencapai 4.401,5 meter atau capaian kinerja masih sebesar 137,38%. Tercapainya target panjang bronjong pada tahun 2016 ini disebabkan oleh faktor banyaknya usul masyarakat untuk penguatan tebing sungai dan mengancam pemukiman.

8. Panjang Tanggul

Target kinerja yang dibebankan untuk panjang tanggul yang dibangun TA. 2016 adalah 350 meter (kumulatif 2016 = 350 meter), sementara realisasi sepanjang 0,00 meter (kumulatif 2016 = 315 meter), dengan persentase capaian kinerja 91,30%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya TA. 2015 adalah 200 meter (kumulatif 2015 = 345 meter), realisasi sepanjang 158 meter (kumulatif 2015 = 315 meter), dengan persentase kinerja 91,30%. Kondisi akhir RPJMD 2016 target wajib tercapai sepanjang 345 meter, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 baru mencapai 315 meter atau capaian kinerja masih sebesar 91,30%. Kegiatan pembangunan tanggul ini tidak tercapai karena selain faktor keterbatasan anggaran, untuk hal yang lebih mendesak dalam penanggulangan banjir diutamakan kegiatan normalisasi sungai.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya memiliki indikator kinerja yang menjadi acuan setiap tahunnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016, yakni :

1. Panjang parit beton/ drainase

Target kinerja panjang parit beton/ drainase yang dibebankan untuk Tahun 2016 adalah 600 meter (kumulatif 2016 = 8.341 meter), realisasi sebesar 3.461 meter (kumulatif 2016 = 17.665,5 meter), dengan persentase kinerja tercapai sebesar 211,79%. Perbandingan dengan tahun 2015, target kinerja panjang parit beton/ drainase yang dibebankan sebesar 500 meter (kumulatif 2015 = 7.741 meter), realisasi yang dicapai sebesar 1.204 meter (kumulatif 2016 = 16.969,8 meter), persentase capaian kinerja 219,22%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk panjang parit beton/ drainase sepanjang 8.341m sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 sudah mencapai 17.665,50 meter atau capaian kinerja sebesar 211,79% dengan status Tercapai. Adapun faktor tercapainya indikator panjang parit beton/ drainase

diantaranya dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan pembukaan jalan baru dan kegiatan pencegahan luapan air permukaan pada ruas jalan kabupaten/ jalan desa.

2. Panjang tembok penahan

Target kinerja panjang tembok penahan untuk TA. 2016 adalah 200 meter (kumulatif 2016 = 1.392 meter), sementara realisasi sebesar 972,59 meter (kumulatif 2016 = 4.130,54 meter), dengan persentase capaian kinerja 296,73%. Perbandingan tahun sebelumnya tahun 2015 target kinerja panjang tembok penahan sebesar 300 meter (kumulatif 2015 = 1.192 meter), sementara realisasi sebesar 147 meter (kumulatif 2015 = 3.157,95 meter), dengan persentase capaian kinerja 264,93%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk panjang tembok penahan sepanjang 1.392 meter sementara total capaian kinerja sejak tahun 2010-2016 sudah mencapai 4.130 meter atau capaian kinerja sebesar 296,73% status Tercapai dan tuntas. Hal ini berarti indikator kinerja Panjang tembok penahan dalam RPJMD telah tuntas. Adapun faktor tercapainya indikator panjang tembok penahan diantaranya dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan pembukaan jalan baru dan kegiatan pencegahan longsohnya tebing disepanjang ruas jalan kabupaten/ jalan desa.

3. Panjang pipa /bronkep/HU/KU untuk prasarana air minum

Target kinerja yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 15.000 meter (kumulatif 2016 = 64.290 meter), sementara realisasi sebesar 68.750 meter (kumulatif 2016 = 130.244,00 meter), dengan persentase capaian kinerja 130,24%. Jika dibandingkan dengan target untuk TA. 2015 adalah 8.000 meter (kumulatif 2015 = 49.920 meter), sementara hasil yang dicapai sebesar 7.480 meter (kumulatif 2015 = 61.494 meter), dengan persentase capaian kinerja 124,76%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk panjang pipa/bronkep/HU/KU untuk prasarana air minum sepanjang 64.290 meter. Sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 sudah mencapai 130.244,00 meter atau capaian kinerja masih sebesar 202,59%. Hal ini berarti indikator kinerja panjang pipa/bronkep/ HU/KU untuk prasarana air minum dalam RPJMD telah tuntas. Tercapainya indikator panjang pipa/bronkep/ HU/KU untuk prasarana air minum tidak terlepas dari tersedianya alokasi dana DAK infrastruktur air minum tahun 2016 untuk kabupaten Nias.

4. Panjang Jalan Setapak

Target kinerja yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 1.200 meter (kumulatif 2016 = 7.500 meter), realisasi sebesar 1.576 meter (kumulatif 2016 = 19.399 meter), dengan persentase capaian kinerja 258,66%. Jika dibandingkan target tahun 2015 adalah 1.400 meter (kumulatif 2015 = 6.300 meter), sementara hasil yang dicapai 2.094 meter (kumulatif 2015 = 17.823 meter), dengan persentase kinerja 282,90%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk panjang jalan setapak sepanjang 7.500 meter. Sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 sudah mencapai 19.399 meter atau capaian kinerja sebesar 258,66%. Hal ini berarti indikator kinerja panjang jalan setapak dalam RPJMD telah tuntas. Tercapainya indikator panjang jalan setapak tidak terlepas dari tersedianya dana APBD tahun 2016 untuk pembangunan jalan setapak yang menghubungkan jalan utama/ jalan kabupaten menuju kompleks fasilitas umum seperti menuju jalan setapak menuju Puskesmas, menuju gereja, menuju kantor pemerintahan dan juga jalan setapak yang menghubungkan antar desa.

Bidang Peralatan

Bidang Peralatan memiliki indikator kinerja yang menjadi acuan setiap tahunnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016, yakni :

1. Jumlah Alat Berat

Target kinerja yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 2 unit (kumulatif 2016 = 32 unit), sementara hasil yang dicapai 2 unit alat berat (kumulatif 2016 = 31 unit), dengan persentase kinerja 96,88%. Perbandingan dengan target yang dibebankan untuk TA. 2015 adalah 2 unit (kumulatif 2015 = 30 unit), sementara hasil yang dicapai 1 unit alat berat (kumulatif 2015 = 29 unit), dengan persentase kinerja 96,67%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk jumlah alat berat sebanyak 32 unit, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 baru mencapai 31 unit atau capaian kinerja sebesar 96,88%. Tidak tercapainya target jumlah alat berat yang diadakan pada akhir 2016 dimaksud disebabkan karena keterbatasan anggaran.

2. Jumlah Alat Berat yang dipelihara

Target kinerja dalam jumlah pemeliharaan alat berat yang dibebankan untuk TA. 2016 adalah 32 unit, sementara hasil yang dicapai 31 unit, dengan persentase kinerja 96,88%. Perbandingan pada tahun sebelumnya dari TA. 2015 adalah 30 unit, sementara hasil yang dicapai 29 unit, dengan persentase kinerja 96,67%. Jika dilihat pada kondisi kinerja pada akhir RPJMD 2016, target yang wajib dicapai untuk jumlah alat berat yang dipelihara sebanyak 32 unit, sementara total capaian sejak tahun 2010-2016 baru mencapai 31 unit atau capaian kinerja sebesar 96,88%. Tidak tercapainya target jumlah alat berat yang dipelihara pada akhir 2016 dimaksud disebabkan karena keterbatasan anggaran.

Secara umum hasil capaian kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 4-12
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
01	Jumlah ibu kota kecamatan yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4	Kec.	3	-	-	-
02	Jumlah desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda 4	Desa	63	28	20	Tercapai
03	Jalan lintas yang menghubungkan Kecamatan Botomuzoi, Hiliduho dan Hiliserangkai dengan Ibukota Kabupaten	Paket	-	0	5	Tercapai
04	Jalan lintas yang menghubungkan wilayah Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli	Paket	-	1	5	Tercapai
05	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	Km	134,23	23,60	36,587	Tercapai
06	Panjang jalan Kabupaten yang dilalui roda 4	Km	209,44	24,65	33,85	Tercapai
07	Meningkatnya panjang jembatan yang dibangun	M	830	36,00	77,80	Tercapai
08	Jumlah pembukaan Jalan baru	Km		13,5	24,84	Tercapai
09	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		6,00	33,85	Tercapai
II	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
10	Meningkatnya panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara	Km		17	17,15	Tercapai
III	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya					
11	Rasio jaringan irigasi (luas sawah yang terairi) dibanding luas lahan sawah	%	30	58	20,89	Tidak Tercapai
12	Luas irigasi kabupaten kondisi baik dibanding luas seluruh daerah irigasi	%	10	40	40,41	Tercapai
13	Jumlah unit Daerah Irigasi (DI) yang dibangun	Unit	16	5	0	Tidak Tercapai
14	Panjang saluran irigasi yang dibangun	M	6700	2.500	4.430	Tercapai
15	Jumlah kelompok P3A aktif	Unit	0	1	0	Tidak Tercapai
16	Panjang sungai yang dinormalisasi	M	0	700	1.470	Tercapai
IV	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong					
17	Panjang bronjong	M	339	700	814	Tercapai
18	Panjang tanggul	M	65	350	0	Tidak Tercapai

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
V	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
19	Panjang parit beton/drainase	M	2.765	600	3.461	Tercapai
20	Panjang tembok penahan	M	-	200	972,59	Tercapai
VI	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					
21	Panjang pipa/bronkep/ HU/KU untuk prasarana air minum	M	9.500	15.000	68.750	Tercapai
22	Panjang jalan setapak	M	1.200	1.200	1.576	Tercapai
VII	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
23	Jumlah alat berat	Unit	24	2	2	Tercapai
24	Jumlah alat berat yang dipelihara	Unit	24	32	31	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias

3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan lahan yang sangat rumit, sehingga pelaksanaan pembangunan banyak ditentukan oleh permintaan masyarakat, tanpa mempertimbangkan aspek teknis.
2. Panjang jalan yang dipelihara terdata relatif sedikit karena tingkat kerusakan yang terjadi tidak dapat teratasi lagi dengan pekerjaan pemeliharaan.
3. Beberapa daerah irigasi yang terdata untuk dibangun, belum dilakukan studi kelayakan. Sehingga perlu menunggu hasil pendataan oleh konsultan.
4. Terbatasnya sumber mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana air bersih.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung kepada pemilik lahan sebaiknya dilakukan pada saat MUSRENBANG Kecamatan, sehingga hasilnya menentukan layak atau tidaknya usulan pembangunan dimaksud. Selanjutnya, apabila usulan kegiatan dalam Musrenbang Kecamatan tertampung dalam RENJA (Rencana Kerja), Dinas Pekerjaan Umum wajib mengecek dan survey usulan tersebut untuk memastikan apakah warga pemilik lahan benar-benar merelakan tanahnya untuk kepentingan pembangunan.
2. Program pembangunan jalan dan jembatan supaya di prioritaskan terutama pada ibukota kecamatan dan desa yang masih terisolir.
3. Perencanaan daerah irigasi baru perlu dilakukan study kelayakan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan untuk dalam pembangunan daerah irigasi yang baru dan bermanfaat.
4. Perlu kerjasama dengan pihak BUMD dalam hal ini PDAM untuk menjamin ketersediaan air bersih di lokasi-lokasi yang minim sumber air bersih.

4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG

4.1. Gambaran Umum

Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi dalam penanganan urusan wajib Penataan Ruang dan Perumahan diberi peranan yang sangat strategis untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan berdasarkan Azas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Urusan Wajib Penataan Ruang yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sedangkan Urusan Wajib Perumahan meliputi Peningkatan LKJP Bupati Nias Akhir Tahun 2016

Kualitas Kawasan dengan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, baik yang sifatnya fisik infrastruktur maupun yang bersifat penyediaan dokumen-dokumen teknis penataan ruang sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk urusan wajib Perumahan memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang baik yang merupakan upaya strategis dalam mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah di ibukota kabupaten. Pembangunan infrastruktur dan prasarana Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun fondasi perekonomian dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan masyarakat sehingga ukuran keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah dimaksud.

4.2. Arah Kebijakan

- 1) Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan :
 - Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana gedung-gedung.
 - Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana perumahan yang layak.
 - Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang bersih, nyaman, aman, serasi dan lancar.
 - Meningkatkan pelaksanaan pelayanan jasa kebersihan di wilayah Kabupaten Nias yang bersih dan mengoptimalkan pengelolaan sampah secara profesional.
- 2) Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang :
 - Menetapkan tata ruang, tata kota dan tata lingkungan yang serasi sesuai dengan peraturan yang ada.
 - Menyenggarakan program pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan yang ada melalui sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen DPA/DPPA tahun 2016, yang disajikan sebagai berikut :

- 1) **Program Pengembangan Perumahan** dengan kegiatan :
 - Biaya Operasional SKPD Pengelola Kegiatan DAK
- 2) **Program Lingkungan Sehat Perumahan** dengan kegiatan :
 - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Sogae'adu dhi. Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Desa Wea-wea
 - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Gido dhi. Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Desa Lasara Idanoi
 - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Idanogawo dhi. Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Desa Oladano
 - Biaya Penunjang DAK Reguler Sub Bidang Sanitasi
 - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Botomuzoi dhi. Pembangunan MCK+ di Desa Balohili Botomuzoi
 - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Hiliduho dhi. Pembangunan MCK+ di Desa Ombolata Salo'o
 - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Hiliserangkai dhi. Pembangunan MCK+ di Desa Dahadano Botombawo
 - Biaya Penunjang DAK Afirmasi Sub Bidang Sanitasi
 - Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja GNKPI di Desa Sisarahili Ma'u Kecamatan Ma'u
 - Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Hiligodu Tanoseo Kecamatan Hiliduho
 - Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Mesjid di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo
 - Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja AMIN di Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai
 - Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Mesjid di Desa Hiliweto Kecamatan Gido

- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Holi Kecamatan Ulugawo
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Sisarahili Bawolato Kecamatan Bawolato
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Lasara Siwalubania Kecamatan Ma'u
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja GPDI di Desa Hilizia Lauru Kecamatan Hiliserangkai
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja AFY di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Sirete Kecamatan Gido
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Balohili Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP Jemaat Hiliamaigila di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja Sungai Yordan di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo
- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Mesjid di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato
- Biaya Penunjang DAK IPD Sub Bidang Sanitasi
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Laowohilimbaruzo Kecamatan Idanogawo
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sandruta Kecamatan Idanogawo
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Otalua Kecamatan Idanogawo
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Hiligogowaya Maliwaa Kecamatan Idanogawo
- Biaya Penunjang DAK IPD Sub Bidang Perumahan
- Lanjutan pembangunan parit beton + tembok penahan di jalan Mbobonakhe Desa Tetehosi Kec. Idanogawo
- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Bawolato (*Dana belum sempat bayar di PAPBD tahun 2015*)
- Biaya Operasional Tim Penyusun Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan BPS di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016
- Pembangunan parit beton di jalan Mbombonakhe Dusun I Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo
- Pembangunan parit beton antara SMKN 1 Hiliserangkai dan gedung Gereja GPDI Desa Hilizia Lauru Kecamatan Hiliserangkai

3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah dengan kegiatan :

- Fasilitas Kegiatan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Nias dan Gedung Kantor DPRD Kab. Nias
- Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Nias (Tahap 2)
- Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Tahap 2)
- Pembangunan Kantor SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias (DAK Rp 3.077.290.000 + DAU Rp 84.900.000)
- Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD Kabupaten Nias (Tahap III)
- Pembangunan Lapangan Upacara dan Parit Beton di Kantor Kecamatan Somolo-molo
- Penataan Lapangan Upacara Kantor Kecamatan Hiliserangkai
- Pembangunan Tembok Penahan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Nias di Desa Hilizoi Kecamatan Gido
- Penataan Lapangan Upacara Kantor Kecamatan Hiliduho

- Penataan lapangan Kantor Kecamatan Sogaeadu
 - Pembenahan Lapangan Sepak Bola di Desa Tetehosi Ibukota Kecamatan Idanogawo
 - Relokasi Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ma'u
 - Pembangunan Kantor Bupati Nias (Pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga yang belum diselesaikan)
 - Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ulugawo
 - Pembangunan tembok penahan di SMKN 1 Hiliserangkai
 - Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Bupati Nias
 - Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Nias
 - Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido
 - Pemeliharaan Gedung Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido
 - Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido
 - Penataan Halaman Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido
 - Pematangan Lahan Relokasi Kantor Camat Ma'u
 - Pembangunan jalan dan pemasangan paving blok di Kantor Kantibmas Kecamatan Somolo-molo
- 4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang** dengan kegiatan :
- Monitoring dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 5) Program Perencanaan Tata Ruang** dengan kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Kecamatan Gido sebagai calon Ibukota Kabupaten Nias (Tahap I)
 - Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Kabupaten Nias
 - Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Nias
- 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** dengan kegiatan :
- Pelaksanaan pengelolaan persampahan Kabupaten Nias
 - Pengadaan tong sampah kebutuhan Kab. Nias
 - Lanjutan Pembuatan Gudang Peralatan dan Suku Cadang Kegiatan Persampahan

4.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Perumahan pada SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 47.699.075.222,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 19.920.064.019,-** atau sebesar **41,76 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Perumahan pada SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 4-13
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang dan Perumahan
Kabupaten Nias Tahun 2016

4.5. Hasil Capaian Kinerja

Adapun hasil capaian kinerja terhadap pelaksanaan urusan wajib perumahan dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias Tahun 2016 dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan kantor SKPD di Kecamatan Gido sebanyak 1 unit
2. Pembangunan kantor kecamatan sebanyak 1 unit
3. Rehabilitasi gedung kantor sebanyak 4 unit
4. Meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi menjadi 39,5 %
5. Meningkatnya rasio rumah layak huni menjadi 46,87 % atau sebanyak 183 unit
6. Pembangunan MCK sebanyak 3 paket atau 6 unit

a. Penataan Ruang

Secara umum hasil capai pelaksanaan urusan Penataan Ruang telah mencapai hasil yang baik antara lain telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Kabupaten Nias dan disempurnakannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Nias.

Tabel : 4-14
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Tahun 2016

No.	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Pemanfaatan Ruang					
1.	Dokumen Study Kelayakan Rencana Ibu Kota Kab. Nias	Dok	-	-	-	-
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di daerah perkotaan	%	-	2,5	1,05	Tidak Tercapai
3.	Kegiatan sosialisasi, pendataan, pembinaan dan pengawasan IMB	Keg	-	2	1	Tidak Tercapai
	Program Perencanaan Tata Ruang					
4.	Tersusunnya RTRW Kabupaten Nias yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Dok	-	-	-	-
5.	Dokumen Master Plan Ibukota Kabupaten Nias	Dok	-	-	-	-
6.	Dokumen Rencana Detail Ibu Kota Kabupaten Nias	Dok	-	-	-	-
7.	Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.	Dok	-	-	-	-
8.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan	Dok	-	1	-	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kab. Nias

b. Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah

Capaian kinerja bidang pembangunan prasarana dan sarana pemerintah daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja terbangunnya gedung kantor SKPD 1 (satu) unit, pembangunan kantor kecamatan sebanyak 1 (satu) unit dan rehabilitasi gedung kantor sebanyak 4 (empat) unit.

Tabel : 4-15
Capaian Kinerja Bidang Gedung-gedung di Kabupaten Nias Tahun 2016

No.	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah.					
01	Gedung Kantor Bupati Nias	Unit	-	-	-	-
02	Gedung Kantor DPRD	Unit	-	-	-	-
03	Gedung Kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Unit	3	4	1	Tidak Tercapai
04	Gedung Perpustakaan Daerah	Unit	1	-	-	-
05	Gedung Kantor Camat	Unit	-	-	1	Tercapai
06	Gedung Balai Serba Guna	Unit	-	1	-	Tidak Tercapai
07	Rumah Dinas Jabatan	Unit	-	6	-	Tidak Tercapai
08	Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	-	-	4	Tercapai
09	Rehabilitasi Balai Serba Guna	Unit	1	-	-	-
10	Lanjutan pembangunan gedung kantor	Unit	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kab. Nias

c. Perumahan dan Sanitasi Lingkungan

Capaian kinerja urusan perumahan khususnya pada kegiatan Pembangunan Sanitasi berbasis masyarakat telah terlaksana sebanyak sebanyak 3 (tiga) paket kegiatan (capaian kinerja 75%), rumah tangga bersanitasi 104,38 persen, dan rasio rumah layak huni sebesar 104,16 persen.

Tabel : 4-16
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Sanitasi di Kabupaten Nias tahun 2016

No.	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.					
01	Meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi	%	20	32	39,5	Tercapai
02	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas)	Pkt	4	4	3	Tidak Tercapai
	Program Pembangunan Lingkungan Sehat.					
03	Meningkatnya rumah tangga ber-Sanitasi	Kk	17.701	19.932	20.805	Tercapai
04	Rasio rumah layak huni	%	30	45	46,87	Tercapai
05	Rasio permukiman layak huni	%	30	45	46,87	Tercapai
06	Rumah tangga pengguna air bersih	Kk	736	1.299	1.709	Tercapai
07	Menurunnya Lingkungan pemukiman kumuh	Km2	294,1	216,21	235,65	Tidak Tercapai
08	Pembangunan MCK	Pkt	4	3	3	Tercapai
09	Pembangunan sarana air bersih	Pkt	-	3	-	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kab. Nias

d. Kebersihan Lingkungan

Capaian kinerja penanganan persampahan telah terlaksana dengan baik, antara lain persentase penanganan sampah (volume sampah yang ditangani) sebesar 38,02 persen, Tempat Pembuangan Sampah

(TPS) per satuan penduduk sebesar 0,1 m³/1100 jiwa dan jumlah tong sampah organik dan anorganik sebanyak 2.050 (dua ribu lima puluh) unit.

Tabel : 4-17
Capaian Kinerja Bidang Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					
01	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Pkt	-	1	-	Tidak Tercapai
02	Kegiatan pengelolaan persampahan	Keg	1	2	1	Tidak Tercapai
03	Dokumen Study Kelayakan lokasi TPA	Dok	-	-	-	-
04	Persentase penanganan sampah (volume sampah yang ditangani)	%	-	37.73	38.02	Tercapai
05	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	m ³ /1100 Jiwa	-	0,1	0,1	Tercapai
06	Jumlah peralatan pengolahan sampah/pencacah sampah organik	Pkt	-	1	-	Tidak Tercapai
07	Jumlah tong sampah organik dan anorganik	Unit	-	116	2.050	Tercapai

Sumber : Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kab. Nias

4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pembangunan kantor Bupati (Tahap II) tahun anggaran 2016 dan Pembangunan kantor DPRD (Tahap II) tahun anggaran 2016 tidak dapat dilaksanakan karena terkait proses hukum, dalam hal ini pemeriksaan awal berkenaan pengelolaan kegiatan dimaksud oleh institusi hukum dan pertimbangan teknis terkait keterbatasan waktu pelaksanaan.
- 2) Masih rendahnya kualitas pemukiman masyarakat.

b. Solusi

- 1) Percepatan penetapan status hukum atas pelaksanaan kegiatan paket Pembangunan kantor Bupati dan Pembangunan kantor DPRD (Tahap I) tahun anggaran 2015.
- 2) Perlu upaya berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pemukiman masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar lingkungan/kawasan permukiman pada program/kegiatan lingkungan sehat perumahan, sanitasi berbasis masyarakat dan perbaikan rumah tidak layak huni.

5. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5.1. Gambaran Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi. Harus diakui bahwa kinerja investasi di Kabupaten Nias saat ini belum terlihat secara nyata dan merupakan tantangan besar yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang.

Untuk mencapai kelima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut diatas serta peningkatan kinerja investasi di Kabupaten Nias, maka Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Kapasitas Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, kepentingan sektoral dan kedaerahan (kecamatan/desa).

Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational learning). Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat menuntut Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sementara itu sebagai institusi yang menangani urusan penanaman modal, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias dituntut untuk mampu menjadi fasilitator dan koordinator untuk meningkatkan kinerja investasi melalui perbaikan iklim investasi, penyediaan prasarana pendukung investasi, dan promosi peluang investasi di daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan didasarkan pada Visi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias yaitu "Institusi Perencanaan dan Penanaman Modal yang Andal, Bersih dan Responsif dengan semangat pengabdian melayani dengan tulus" dengan 5 (lima) Misi utama yaitu: 1). Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas; 2). Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang berkualitas; 3). Melakukan koordinasi yang efektif dalam memaksimalkan hasil pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penanaman modal; 4). Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja, dan 5). Melakukan fasilitasi, harmonisasi dan koordinasi untuk pengembangan investasi.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran yang jelas dan terukur) dan partisipatif serta tepat waktu;
- b. Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Peningkatan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan;
- d. Melaksanakan Koordinasi penataan ruang daerah;
- e. Optimalisasi fungsi pengendalian dan pengawasan penataan ruang;
- f. Meningkatkan promosi dan penyediaan informasi peluang investasi di Kabupaten Nias.

5.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nias, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Nias telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Musrenbang Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2017
 - Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2016
 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Bupati Nias
 - Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Nias Periode 2011-2016

- Penyusunan Dokumen RPJMD Kab. Nias 2016-2021
 - Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD Kabupaten Nias Tahun 2016
 - Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nias Tahun 2017
 - Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Nias
 - Penggandaan Perda Tentang RPJPD Kab. Nias Tahun 2005-2025
 - Fasilitasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi SIPKD Modul Perencanaan Pembangunan Daerah
2. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Nias
 3. **Program Perencanaan Sosial Budaya**, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nias
 - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TK-PKD) Kabupaten Nias
 - Pemetaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Nias
 4. **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**, dengan kegiatan:
 - Operasional Pokja Sanitasi Kabupaten Nias Tahun 2016
 5. **Program Perencanaan Tata Ruang**, dengan kegiatan:
 - Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Nias
 - Sosialisasi PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Nias Tahun 2014-2034

5.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Nias untuk Tahun 2016, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.182.000.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.273.538.936,-** atau **71,45 persen**. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 4-18
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2016

5.5. Hasil Capaian Kinerja

Secara umum hasil capaian kinerja pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan tahun 2016 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 4-19
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	PENATAAN RUANG					
	Program Perencanaan Tata Ruang					
01	Koordinasi penataan ruang daerah	Keg	-	1	1	Tercapai
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
04	Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	Dok.	1	1	1	Tercapai
05	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	60	100	90	Tidak Tercapai
06	Dokumen KUA dan PPAS	Dok.	2	2	2	Tercapai
08	Tingkat kepuasan stakeholder dan mitra kerja terhadap pelayanan Bappeda dan Penanaman Modal	%	-	≥ 80	≥ 80	Tercapai
09	Evaluasi pelaksanaan RKPD	Dok.		1	1	Tercapai
10	Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021	Dok.	-	1	1	Tercapai
11	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dok.	1	1	1	Tercapai
13	Koordinasi sumber pendanaan APBN	Keg	1	1	1	Tercapai
14	Koordinasi sumber pendanaan DAK	Keg	1	1	1	Tercapai
15	Profil Daerah	Dok.	-	1	-	-
16	Data audiovisual	Dok.	-	1	-	-
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya					
18	Koordinasi program bidang ekonomi dan sosial budaya	Keg	-	1	1	Tercapai
19	Analisis data/indikator bidang sosial budaya	Dok.	-	1	1	Tercapai
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam					
20	Analisis data bidang prasarana wilayah dan SDA	Dok.	-	2	0	-
21	Koordinasi program bidang prasarana wilayah dan SDA	Keg	-	1	1	Tercapai
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					
22	Analisis data/indikator bidang ekonomi	Dok.	1	1	1	Tercapai
	PENANAMAN MODAL					
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
24	Jumlah investor (perkebunan besar, industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perhotelan dan pariwisata)	Inv.	-	1	-	-
25	Media informasi promosi peluang investasi	Keg	-	1	-	-

Sumber : Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias

5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan yang dihadapi:

1. Perbedaan pemahaman terhadap batas tugas perencanaan dan penganggaran;
2. Kurangnya data dan statistik yang berkualitas;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah tahapan selanjutnya;

4. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
 5. Permasalahan ego sektoral atau kepentingan antar sektor dan perbedaan pandangan dalam menentukan skala prioritas merupakan hal yang menonjol dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) yang kadangkala mengesampingkan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya;
 6. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan;
 7. Belum optimal mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan investasi di daerah, termasuk dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan promosi potensi dan peluang investasi;
 8. Terbatasnya prasarana infrastruktur pendukung investasi (transportasi dan ketersediaan energi) yang menyebabkan daya saing daerah dalam bidang penanaman modal relatif rendah.
- b. Solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan:
1. Melaksanakan tugas berdasarkan Tupoksi;
 2. Ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan
 3. Meningkatkan pengkajian dan analisis perencanaan yang lebih akurat untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan sistim monitoring dan evaluasi yang cermat serta pengembangan sistim informasi perencanaan pembangunan daerah.
 4. Menjaga keutuhan komitmen yang telah terbangun dengan melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan/skala prioritas nasional dan provinsi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengoptimalkan koordinasi kepentingan antar sektor, memaksimalkan kebutuhan yang sebenarnya dari kecamatan dan desa, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi.
 5. Mengawal konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan penganggaran secara tepat
 6. Mengirimkan staf perencana untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan non teknis, serta diklat lainnya khususnya bidang perencanaan
 7. Mengoptimalkan pengkoordinasian dan memfasilitasi pengembangan investasi di Kabupaten Nias
 8. Meningkatkan prasarana infrastruktur pendukung investasi (transportasi dan ketersediaan energi).

6. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.1. Gambaran Umum

Ditengah dinamika masyarakat yang semakin maju dengan mobilisasi yang sangat tinggi dewasa ini telah menjadikan transportasi menjadi urat nadi pergerakan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume kendaraan dengan frekuensi dan intensitas yang cukup tinggi melintasi wilayah Kabupaten Nias. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan letak Kabupaten Nias yang merupakan daerah perlintasan arus lalu lintas dari berbagai Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi positif sekaligus menjadi tanggungjawab yang cukup berat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas infrastruktur disegala bidang.

Keberadaan transportasi sebagai urat nadi pergerakan masyarakat di Kabupaten Nias harus diiringi dengan tersedianya fasilitas infrastruktur lalu lintas yang merupakan bagian dari indikator peningkatan pembangunan di Kabupaten Nias serta adanya sistim pelayanan transportasi yang lebih terpadu dan terkontrol dengan baik. Kita dituntut adanya perubahan tingkat pelayanan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pengurangan resiko kecelakaan.

Selain itu, patut diperhatikan bahwa letak geografis Kabupaten Nias yang terletak disebelah Timur Kepulauan Nias merupakan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau di depannya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk memfasilitasi tersedianya angkutan transportasi lokal berupa transportasi penyeberangan. Dengan demikian selain peningkatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan transportasi darat juga menjadi tanggungjawab bersama untuk menyediakan

fasilitas penyeberangan berupa moda transportasi penyeberangan dan infrastruktur penyeberangan berupa dermaga/tambatan perahu yang disertai dengan pelayanan yang memadai untuk itu.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan serta pengembangan informasi dan komunikasi di daerah perlu adanya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam rangka menunjang tugas-tugas di pemerintahan dan juga untuk menyediakan informasi yang cukup kepada masyarakat.

Penyelenggaraan urusan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika yang telah dipercayakan pelaksanaannya kepada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka melayani masyarakat secara optimal di bidang transportasi dan juga komunikasi informasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6.2. Arah Kebijakan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias sebagai satuan kerja yang menangani bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, maka dalam melaksanakan segala rencana kerja, program dan kegiatan di dasarkan pada Visi : "Terwujudnya transportasi yang berkelanjutan, aman, nyaman dan tertib serta berkeadilan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Nias". Untuk mewujudkan visi dimaksud maka dirumuskan menjadi beberapa misi yakni; (a). Menciptakan Program perhubungan berkualitas berdasarkan prinsip kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan. (b). Membangun koordinasi yang sinergis antar pelaku pemangku kepentingan diberbagai lini dan tingkatan. (c). Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai pembina ketertiban lalu lintas angkutan jalan dengan konsistensi antara pengendalian dan pengawasan. (d). Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam hal keselamatan lalu lintas. (e). Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dan (f). Mendukung peningkatan efesiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan di Dinas perhubungan dan Komunikasi Informatika yang berbasis Good Governance dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Adapun arah kebijakan penyelenggaraan urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan teknis transportasi, pengendalian dan pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias;
2. Penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi local diantaranya melalui penyusunan Rancangan Umum Jaringan Transportasi Jalan meliputi penataan simpul, ruang kegiatan, ruang lalu lintas serta penataan pola distribusi daerah sesuai dengan perkembangan yang ada;
3. Kerjasama antar lembaga pemerintah (Dishub dan Instansi terkait);
4. Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, serta kualitas pengelolaan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
6. Perlunya dibangun dermaga untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang pada angkutan lokal; dan
7. Pengembangan sistem informasi daerah berbasis IT.

6.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen DPA/DPPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Tahun 2016 yang disajikan sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**, dengan kegiatan :
 - a. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya.
 - b. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
 - c. Biaya pos pemeriksaan kendaraan Angkutan Umum
 - d. Monitoring Pengelolaan Moda Transportasi Darat
 - e. Biaya operasional Kapal Bermotor/Boat
 - f. Biaya Operasional Bus Sekolah

- g. Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat dhi.pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalulintas agnkutan jalan (DAK 2016 Rp.499.520.000 + DAU Rp.26.250.000)
- h. Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat dhi.pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalulintas agnkutan jalan (sisa DAK 2011 s.d 2014 Rp.605.000.000 DAU Rp.30.600.000)
- 2. Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Moda transportasi darat (sisa DAK 2011 s.d 2014 Rp. 250.000.000 + Rp 15.000.000)
 - b. Pemeliharaan saran dan fasilitas perlengkapan jalan.
 - c. Pengadaan Halte Bus
 - d. Pengadaan Bus Sekolah (sisa DAK 2011 s/d 2014 Rp. 1.500.391.987 + Rp. 57.500.000)
- 3. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas**, dengan kegiatan :
 - a. Survei /pendataan fasilitas dan perlengkapan jalan raya di Kabupaten Nias.
 - b. Pengawasan Pejabat Daerah dan Tamu dari Luar Daerah
 - c. Pengamanan Jalan pada acara – acara resmi pemerintahan dan hari – hari besar keagamaan dan pasar – pasar tradisional
- 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan :
 - a. Pengawasan /Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - b. Pengelolaan Media Center.
 - c. Biaya Operasional Mobil Pusat Informasi Teknologi Komunitas (M-Pustaka)
 - d. Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang penyiaran publik.
 - e. Pembentukan wadah kelompok informasi masyarakat di Kecamatan
 - f. Pembinaan kelompok inforamasi masyarakat.

6.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika selama tahun 2016, telah dialokasikan anggaran belanja langsung (BL) sebesar **Rp. 4.584.971.987,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 3.584.977.250 ,-** atau **78,18 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel : 4-20
Realisasi Program Kegiatan Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Nias Tahun 2016

6.5. Hasil Capaian Kinerja

Adapun hasil capaian kinerja terhadap pelaksanaan urusan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah, sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias telah menambah armada bus sekolah sebanyak 3 unit, serta diharapkan pada tahun 2017 bus sekolah tersebut dapat beroperasi untuk mengangkut anak sekolah dengan gratis.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias senantiasa dengan rutin melaksanakan kegiatan peningkatan pengamanan lalulintas melalui forum lalulintas angkutan jalan raya, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan jalan raya serta Advokasi gerakan siswa sekolah dasar berlalulintas yang mencakup beberapa sekolah di Kabupaten Nias.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias sebagai bagian dalam program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias pada tahun 2016 telah membentuk kelompok informasi masyarakat sebanyak 4 kelompok.

Tabel : 4-21
Capaian kinerja urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja		Status Pencapaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	PERHUBUNGAN					
I	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
01	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	%	-	100	-	Tidak Tercapai
02	Jumlah Uji KIR angkutan Umum	%	60	100	-	Tidak Tercapai
03	Jumlah Angkutan Darat	Unit	47	119	250	Tercapai
04	Jumlah Angkutan Darat yang tidak memiliki KIR	%	40	10	10	Tercapai
05	Lama waktu pemrosesan pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Minggu	12	1	-	Tidak Tercapai
06	Biaya pengujian Kelayakan Angkutan	Rp	160.000	170.000	-	Tidak Tercapai
II	Program Peningkatan pengamanan Lalulintas					
07	Rasio Panjang Jalan	Km/ Kendaraan	2,67	335,56/ 119	0,96	Tidak Tercapai
08	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Org/ Barang	-	150.000	150.000	Tercapai
III	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					
09	Jumlah terminal bus yang dibangun	Unit	-	1	-	Tidak Tercapai
10	Jumlah Sub Terminal yang dibangun	Unit	-	1	-	Tidak Tercapai
11	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan	Unit	-	1	-	Tidak Tercapai
12	Presentasi jumlah rambu lalulintas	%	40	100	34	Tidak Tercapai
13	Presentasi jumlah transportasi pedesaan meningkat	%	5	50	20,60	Tidak Tercapai
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
IV	Program pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Masa					
14	Web site milik pemerintah daerah		-	1	-	Tidak Tercapai
15	Jumlah jaringan komunikasi		2	4	-	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja		Status Pencapaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
16	Jumlah wartel/warnet	Unit	3	9	-	Tidak Tercapai
17	Jumlah surat kabar nasional/lokal		10	20	-	Tidak Tercapai
18	Jumlah penyiaran radio lokal		-	1	-	Tidak Tercapai
19	Optimalisasi pemanfaatan Website milik Pemerintah Daerah		50	100	100	Tercapai
20	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	%	-	100	100	Tercapai
21	Pusat Pengelolaan Informasi, Data dan Informasi Daerah	%	100	100	100	Tercapai
V	Program kerjasama informasi dengan media masa					
22	Kegiatan bidang informasi dan hubungan masyarakat	Keg	3	3	4	Tercapai

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Nias

6.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan wajib perhubungan, komunikasi dan informatika pada Tahun Anggaran 2016 ada beberapa permasalahan dan solusi penyelesaiannya adalah, sebagai berikut :

1. Permasalahan

- Belum memadainya Sarana dan Prasarana Perhubungan sebagai pendukung pelayanan angkutan umum sehingga pelayanan Angkutan umum dari segi penerbitan perizinan baik itu izin trayek dan perizinan tertentu masih belum bisa terlaksana dengan baik mengingat ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk itu.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan perundang undangan bidang lalu lintas angkutan jalan.
- Terbatasnya Fasilitas pendukung Lalu lintas Angkutan Jalan.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia khususnya bidang teknis Lalu lintas Angkutan Jalan seperti PPNS , Penyelia untuk penguji kendaraan Bermotor.

2. Solusi

- Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan yakni Pembangunan Terminal bus, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Fasilitas pendukung lainnya dalam kerangka pelayanan angkutan sehingga pelaksanaan tugas lebih maksimal dan target PAD dapat tercapai.
- Pelaksanaan penyuluhan / sosialisasi undang undang dan peraturan peraturan tentang lalu lintas angkutan jalan kepada masyarakat pengguna lalu lintas angkutan jalan.
- Memenuhi fasilitas pendukung Lalu lintas dan Angkutan jalan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas kebutuhan serta upaya pemeliharaan fasilitas dan kelengkapan lalu lintas angkutan jalan.
- Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia yang profesional dibidang teknis lalu lintas angkutan jalan dengan mengikutkan PNS untuk mengikuti Bimtek ataupun kursus – kursus dibidang lalulintas.

7. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

7.1. Gambaran Umum

Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias sesuai dengan Perda No. 08 Tahun 2008 Tanggal 11 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias, adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga kelestarian dan meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan LKPJ Bupati Nias Akhir Tahun 2016

lingkungan hidup di daerah khususnya wilayah Kabupaten Nias. Program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias untuk mendukung terwujudnya kelestarian dan pengelolaan lingkungan dan mendukung tercapai standar pelayanan minimal (SPM) lingkungan hidup antara lain :

- Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan;

Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi umum lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Nias dan karakteristik wilayah kerja instansi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias yaitu wilayah pedesaan (rural), yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Isu aktual yang berkenaan dengan sumber potensial pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Nias meliputi isu yang berkenaan dengan kegiatan seperti: pertambangan bahan galian mineral bukan logam, pengusahaan hutan, perkebunan, perikanan, peternakan, pesisir pantai dan laut, kerusakan DAS (daerah aliran sungai), rumah sakit, penanganan sampah rumah tangga dan pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPA) sampah.

7.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan – aparat pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, dan visi organisasi.

Arah kebijakan penyelenggaraan urusan wajib Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016 dengan arah kebijakan seperti yang tertuang dalam RENSTRA Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias tahun 2011-2016.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias maka kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Menyusun pranata-pranata yang mendukung terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup;
- b. Mengendalikan terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
- c. Menyusun jaringan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- d. Menyiapkan pranata kelembagaan dan personalia Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan akuntabilitas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias;

7.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias TA. 2016, yang disajikan sebagai berikut :

- 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan peralatan pengolahan sampah organik.
- 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Tong Sampah untuk kebutuhan Sekolah-Sekolah dan Kantor Pemerintah Kabupaten Nias
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan :
 - a. Pengujian kualitas lingkungan.
 - b. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Kesehatan dan Puskesmas Bawolato Kec. Bawolato
 - d. Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor.
 - e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Kesehatan dan Puskesmas Bawolato Kec. Bawolato.
 - f. Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan Peraturan Bupati Nias tentang izin lingkungan.

4. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat bidang lingkungan hidup melalui sosialisasi pengenalan program Adiwiyata di sekolah-sekolah.
- b. Pengembangan data dan informasi lingkungan melalui penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah/SLHD Tahun 2015.

7.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 telah dialokasikan Anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp 3.474.860.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp 3.283.868.947,-** atau **95 persen**.

Realisasikan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016, adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 4-22
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Nias Tahun 2016

7.5. Hasil Capaian Kinerja

Adapun hasil capaian kinerja terhadap pelaksanaan urusan wajib lingkungan hidup pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah, sebagai berikut:

Tabel : 4-23
Capaian Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
01	Jumlah kawasan pemukiman yang dipantau mutu airnya	Sumber Mata Air	-	3	6	Tercapai
02	Jumlah sumber mata air yang dipantau mutu airnya	Sungai	-	2	4	Tercapai
03	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi)	Unit	-	-	-	-
04	Penegakan hukum lingkungan	%	-	20	-	Tidak Tercapai
05	Jumlah gedung dan peralatan laboratorium	Unit	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam					
06	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor	Ha	-	-	-	-
07	Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air	Ha	120	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan					
08	Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup	%	50	100	100	Tercapai

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias

7.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan yang ditangani termasuk permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias antara lain :

1. Terbatasnya jumlah pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias.
2. Lemahnya kapasitas organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias, apabila dibandingkan dengan beban kerja dan cakupan ruang lingkup pekerjaan yang ditangani.
3. Belum tersedianya SDM yang berpotensi dan ahli untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan lingkungan.
4. Terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Penambahan pegawai yang sesuai dengan bidang lingkungan hidup.
2. Usul meningkatkan kapasitas lembaga dari Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup.
3. Mengikutsertakan personil dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias pada pelatihan di dalam dan luar daerah.
4. Merekrut dan melengkapi tenaga fungsional bidang lingkungan hidup.

8. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

8.1. Gambaran Umum

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan wajib di bidang kewenangan otonomi daerah yaitu bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat antara lain memproses dan menerbitkan dokumen-dokumen penting kependudukan seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional dan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Akta Perceraian serta akta lainnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nias cukup antusias, salah satu yang menjadi faktor yakni seluruh pelayanan penerbitan dokumen kependudukan **dilakukan secara gratis**.

8.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias yaitu: Peningkatan kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen DPA/DPPA Tahun 2016, yang disajikan sebagai berikut :

1. **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan kegiatan :
 - a. Implementasi SIAK (Updating dan pemeliharaan);
 - b. Pengolahan data dan penyusunan laporan kependudukan;
 - c. Pelaksanaan penerapan e-KTP;
 - d. Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang Pelaporannya Melampaui Batas Waktu 60 hari Sejak Tanggal Kelahiran;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pencatatan Sipil di Kecamatan;
 - f. Pelayanan Langsung Pemrosesan Dokumen Kependudukan diseluruh Kecamatan Kabupaten Nias;
 - g. Penyusunan Dokumen Administrasi Kependudukan;
 - h. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 - i. Penatausahaan Arsip Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil.

8.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan wajib Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran belanja langsung (BL) sebesar **Rp. 2.110.000.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.707.956.147,-** atau **80,95 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 4-24
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2016

8.5. Hasil Capaian Kinerja

Selanjutnya hasil capai kinerja dapat dilihat persentase penduduk Kabupaten Nias yang sudah memiliki KTP, KK, berbasis NIK Nasional dan persentase penduduk Kabupaten Nias yang sudah memiliki dokumen akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian dan Perceraian, serta turut dijelaskan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2015 dengan tahun 2016 mengalami perubahan yang signifikan mengingat jumlah penduduk pada tahun 2015 yang sebelumnya sebanyak 174.883 jiwa dan pada tahun 2016 dilaporkan sebanyak 153.849 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Nias yang disajikan merupakan data hasil konsolidasi dari Kementerian Dalam Negeri Cq. Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan persentase hasil capaian kinerja yang dimaksudkan diatas disampaikan sebagai berikut pada tabel di bawah ini :

Tabel : 4-25
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2016

No.	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Penataan Administrasi Kependudukan					
1.	Ketersediaan Data Base Kependudukan	%	75	100	100	Tercapai
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	75	100	100	Tercapai
3.	Penerapan e-KTP	%	0	60	83,70	Tercapai
4.	Jumlah Penduduk yang ber KTP	%	30	80	83,70	Tercapai
5.	Jumlah KK yang memiliki Kartu Keluarga	%	60	85	76,05	Tidak Tercapai
6.	Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	15	35	41,29	Tercapai
7.	Pasangan yang berakte nikah	%	5	25	27,94	Tercapai
8.	Pelayanan Mobil e-KTP Berjalan	%	0	100	100	Tercapai

Sumber : Disdukcapil Kab. Nias

8.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2016 ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Tenaga PNS (Brainware) yang menguasai teknologi komputer masih sangat terbatas sementara cakupan pekerjaan sangat banyak.
- Peralatan kerja yang dibutuhkan sangat minim dan sudah merupakan barang-barang lama sehingga sering menghambat penyelesaian pekerjaan.
- Masih banyak aparat kecamatan, desa dan masyarakat belum mengerti dan memahami pengisian formulir akta catatan sipil.
- Aparat kecamatan, desa dan masyarakat belum mengetahui masa perpanjangan dispensasi pemberian akta lahir gratis dan penetapan putusan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias.
- Oleh karena pemrosesan KK dan KTP melalui sistim SIAK, maka sering ditemukan berkas yang bermasalah yang disebabkan karena KK dan KTP yang bersangkutan pernah di cetak dan tidak disertai surat keterangan hilang dari Kepolisian dalam permohonan tersebut, dan juga di dalam KK ada anggota keluarga yang telah meninggal dunia atau telah menikah atau bertambah anggota keluarga baru tetapi pada permohonan tidak disertai surat keterangan kepala desa.
- Jumlah berkas pelaporan akta kelahiran yang begitu banyak tidak sebanding dengan jumlah pegawai/tenaga operator entry data yang menangani/memproses berkas tersebut.

Dari beberapa kendala dan permasalahan tersebut di atas, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya penambahan personil PNS yang menguasai teknologi komputer.

- b. Perlu mengutus personil PNS yang sudah ada untuk pelatihan/kursus komputer/spesifikasi aplikasi SIAK dan e-KTP.
- c. Perlu penambahan/pembelian peralatan perangkat komputer yang baru sehingga proses penyelesaian pekerjaan bisa tepat waktu serta kendaraan operasional baik roda empat dan roda dua.
- d. Perlu diadakan peremajaan data pada Sistem Data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga data yang dihasilkan dengan keadaan penduduk real dilapangan dapat disajikan dengan tepat dan akurat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Online) yang mana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri (Kementerian Dalam Negeri), antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminalitas.
- e. Melaksanakan sosialisasi tentang pengurusan dokumen dan administrasi kependudukan kepada masyarakat di 10 Kecamatan se-Kabupaten Nias baik dokumen KK dan KTP serta dokumen akta catatan sipil.

9. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

9.1. Gambaran Umum

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias membidangi dua urusan wajib yaitu urusan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang mempunyai Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kebijakan Operasional, Administrasi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program Nasional dasar yang strategis bagi upaya peningkatan kualitas keluarga dan kemajuan satu bangsa. Dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga didefinisikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Keberhasilan program KB ini menjadi dasar tumbuhnya keluarga yang berkualitas yang memberi peluang pada pembentukan sumber daya manusia yang lebih tangguh dan mandiri, serta memberi dampak positif pada pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.

Adapun gambaran Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional Program Keluarga Berencana keadaan akhir Desember 2016 adalah :

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)	: 1 unit
Klinik Keluarga Berencana (KKB)	: 31 unit
Mobil Unit Penerangan (MUPEN)	: 1 unit
Mobil Unit Pelayanan (MUYAN)	: 1 unit
Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan (1 unit setiap kecamatan)	: 10 unit

Disamping berbagai Sarana dan Prasarana diatas dan untuk memperkuat Kualitas dan Ketahanan Keluarga, telah dibentuk Kelompok Tribina Keluarga, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Kelompok Konseling Remaja meliputi :

a. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	: 32 kelompok
b. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	: 26 kelompok
c. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	: 25 kelompok
d. Kelompok UPPKS	: 12 kelompok
e. Kelompok PIK-R	: 32 kelompok

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan di berbagai sektor melalui pengarusutamaan gender, perencanaan,

penganggaran responsif gender dan pemenuhan hak-hak anak dengan pengembangan Kabupaten/Kecamatan Layak Anak serta perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk membantu penanganan berbagai kasus kekerasan dimaksud telah tersedia 1 unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang melayani dan memfasilitasi berbagai pengaduan kasus kekerasan utamanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lebih lanjut bahwa pada tahun 2013 yang lalu, Kabupaten Nias telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188-44/502/KPTT/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2014.

Untuk menyelenggarakan kedua Urusan tersebut diatas dengan melaksanakan penyusunan rencana secara terpadu dengan perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara adil dan merata terutama dalam pengendalian angka kelahiran dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

9.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pengembangan kelompok masyarakat yang sadar Gender dan peduli terhadap hak-hak anak
 - Kesetaraan kesempatan Antara laki-laki dan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi/pekerjaan.
 - Perlindungan hak-hak anak dan kesempatan partisipasi anak dengan sasaran perlindungan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi tenaga kerja industri.
 - Upaya penegakkan supremasi hukum untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
 - Penumbuhan dan pembinaan terhadap lembaga/organisasi sosial peduli perempuan dan anak.
 - Pengembangan dan peningkatan kerjasama dibidang kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
- b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - Menata Kembali Personil KB dan Revitalisasi Program KB, memperkuat SDM ditingkat Lapangan
 - Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun Keluarga Kecil Berkualitas
 - Menggalang koordinasi, komunikasi, kemitraan dan keterpaduan jejaring kerja antar organisasi perangkat daerah dalam peningkatan kesejahteraan dan Ketahanan keluarga serta peningkatan Aksesibilitas dan peningkatan Kualitas Pelayanan KB/KR.
 - Meningkatkan Promosi, Perlindungan dan Upaya Perwujudan Hak-hak Reproduksi
 - Memberikan fasilitas penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin.

9.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, selama Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. **Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**, dengan kegiatan :
 - Penguatan/Operasional Kegiatan PUG
 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kekerasan
 - Pelatihan TOT Analisis Responsif Gender (ARG)
- b. **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**, dengan kegiatan :
 - Perayaan hari-hari Besar Nasional
 - Pembinaan dan Lomba Desa Percontohan program PKK
- c. **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**, dengan kegiatan :
 - Pengembangan Kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - Penguatan Forum Anak Kabupaten Nias
 - Pelatihan Kader Desa PKDRT dan Perlindungan Anak
- d. **Program Keluarga Berencana**, dengan kegiatan :

- Operasional PLKB
- Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan
- Pembentukan dan Pencanaan Kampung KB
- e. **Program Pelayanan Kontrasepsi**, dengan kegiatan :
 - Pelayanan KB Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes
 - Pelayanan KB Bhakti Sosial TNI KB-Kesehatan
 - Pelayanan Bulan Bhakti IBI-KB Kesehatan
 - Operasional Pelayanan Tim KB Keliling
 - Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi (Kontap Wanita dan Kontap Pria)
 - Pendistribusian Alokasi ke Fayankes (Fasilitasi Pelayanan Kesehatan)
- f. **Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling PIK-R**, dengan kegiatan :
 - Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - Pembinaan/Pengembangan Peningkatan Akses dan Kualitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R)
- g. **Program peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan Mobil Box Pengantar Alokasi
 - Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana KIE dan Pengolahan Data Program KB
 - Pengadaan Materi dan Media Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit
 - Pengadaan Sarana Kantor (Meubelair) Balai Penyuluhan KB Kecamatan
 - Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB
 - Jasa Konsultasi Perencanaan.
- h. **Program Pengembangan Informasi Dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga**, dengan kegiatan :
 - Pendataan Keluarga
 - Penguatan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Nias
- i. **Program Advokasi KIE dan Konseling**, dengan kegiatan :
 - Operasional Tim KIE Keliling
- j. **Program Pembinaan Peran Serta Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**, dengan kegiatan :
 - Operasional PPKBD
 - Pembentukan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS
 - Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS

9.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016, telah dialokasikan anggaran untuk SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias sebesar **Rp. 4.142.581.125,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 3.297.274.567,-** atau **80 persen**.

Adapun rincian anggaran yang tidak terealisasi secara lengkap dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Kategori karena kegiatan tidak terlaksana/sebagian terlaksana yaitu :
 - a. Pengadaan Mobil Pengantar Alokasi (Mobil Box) bersumber dari Anggaran DAK Fisik Sub Bidang KB 2016 sebesar Rp 285.380.000.- Hal ini disebabkan karena spesifikasi Mobil Box dimaksud sebagaimana tertera dalam Juknis tidak termuat dalam E-Katalog (Mobalnya ada dalam E-Katalog sedangkan Box dan perangkatnya tidak ada dalam E-Katalog), sementara kedua komponen tersebut (Mobil dan Box bersama perangkatnya) merupakan satu paket/ satu unit. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Kendaraan Dinas Roda Empat (Pengadaan melalui (E-Katalog) maka paket pengadaan Mobil Box dimaksud tidak dapat terlaksana.
 - b. Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari DAK Non Fisik Sub Bidang KB tahun 2016 yang baru pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 yaitu Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB sebesar Rp.450.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 232.446.680.- (51,66%), dan biaya Pengantar Alokasi ke Klinik KB sebesar Rp. 27.360.000,- hanya terealisasi Rp. 6.000.000,- (21,93%) Hal ini disebabkan karena Juknis penggunaan BOKB dimaksud baru diterima pada bulan Maret 2016 dan selanjutnya terjadi lagi perubahan/penyempurnaan Juknis

BOKB dimaksud pada bulan Mei 2016 sehingga sebagian sasaran kegiatan BOKB dimaksud harus disesuaikan/disempurnakan pada P-APBD 2016, sementara penggunaan/peruntukan BOKB dimaksud merupakan dukungan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan (Januari s/d Desember 2016).

2. Kategori sisa dana atau sisa tender kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 247.879.662.-
3. Kategori Efisiensi Anggaran dari beberapa jenis kegiatan sebesar Rp. 83.604.584.-

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 4-26
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Nias Tahun 2016

9.5. Hasil Capaian Kinerja

Capai kinerja pelaksanaan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel : 4-27
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
	1. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	%	-	27,50	39,86	Tercapai
	2. Rasio KDRT (jumlah KDRT/ jumlah keluarga)	%	-	5,00	0,04	Tercapai
	3. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	20,00	1,41	Tercapai
	4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	-	30,40	31,18	Tercapai
	5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	-	100	100	Tercapai
	6. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Keg	1	1	1	Tercapai
	7. Kegiatan advokasi pendampingan kasus KDRT	Keg	1	1	1	Tercapai
	8. Kegiatan sosialisasi KDRT dan perlindungan anak	Keg	1	1	1	Tercapai
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA						
2.	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					
	9. Total fertilitas rate (TFR) menurun	%	2,78	2,25	3,2	Tidak Tercapai
	10. Rata-rata jumlah anak per keluarga menurun	%	48,00	19,90	19,85	Tercapai
	11. Keluarga Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I	Orang	28.059	19.641	26.826	Tercapai
	12. Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi melalui KIE dan TKBK	Keg	12	2	25	Tercapai
	13. Pelayanan Kontrasepsi melalui KIE dan TKBK	Akseptor	-	40	636	Tercapai
	14. IUD Kit yang diadakan	Unit	-	-	30	Tercapai
	15. Implant Kit yang diadakan	Unit	-	-	-	-
	16. Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Unit	-	-	-	-
3.	Pelayanan Kontrasepsi					
	17. Rasio akseptor KB terhadap pasangan usia subur meningkat	Orang	9.524	21.527	14.080	Tidak Tercapai
	18. Cakupan peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur meningkat	%	44,00	56,00	60,50	Tercapai
	19. Jumlah Peserta KB baru/PB meningkat	Orang	5.841	96.915	4.456	Tidak Tercapai
	20. Jumlah Peserta KB aktif/ PA meningkat	Orang	9.524	10.208	14.080	Tercapai
	21. Jumlah peserta KB baru Mandiri meningkat	Orang	1.965	1.990	-	Tidak Tercapai
	22. Persentase peserta KB aktif mandiri meningkat	%	20,77	26,50	-	Tidak Tercapai
	23. Persentase peserta KB baru MKJP meningkat	%	40,00	51,05	20,82	Tidak Tercapai
	24. Kegiatan Pelayanan KB	Keg	4	4	4	Tercapai
	25. Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi (kontak wanita dan pria)	Akseptor	-	20	508	Tercapai
	26. Laparascopi/ Minilap yang disediakan	Unit	-	1	-	Sudah Tercapai
4.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR					
	27. Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja	kelompok	14	4	5	Tercapai
	28. Kegiatan peningkatan pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Keg	-	2	2	Tercapai
5.	Advokasi, KIE dan Konseling					
	29. Kegiatan peningkatan Advokasi, KIE dan Konseling	Keg	-	2	25	Tercapai
6.	Pembinaan Peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri					
	30. Pembentukan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) PPKBD	Desa	-	166	170	Tercapai
	31. Pembinaan PPKBD	Desa	-	166	170	Tercapai

No	Indikator		Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
					Target	Capaian	
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
7.	Pengembangan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga						
	32.	Data makro dan informasi kependudukan	Keg	1	1	1	Tercapai
INDIKATOR TAMBAHAN							
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB						
	33.	Terbangunnya Balai Penyuluhan KB 1 unit setiap Kecamatan	Unit	-	10	-	Sudah Tercapai

Sumber : BP2AKB Kab. Nias

Dari tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa sebahagian besar Indikator kinerja Tahun 2016 dapat tercapai yaitu dari jumlah 33 indikator kinerja hanya 6 indikator yang tidak tercapai. Khusus untuk capaian kinerja nomor 14 sampai dengan 16 indikator dimaksud sesungguhnya telah tercapai pada tahun anggaran 2011, dan indikator kinerja nomor 33 telah tercapai pada tahun 2015 (sebagaimana terlihat pada capaian kumulatif).

Dari semua indikator diatas, ada 2 indikator yang sudah tercapai target pada tahun- tahun sebelumnya yaitu indikator nomor 26 tentang laparascopi/minilap yang disediakan sudah terlaksana pada tahun 2012 dan indikator nomor 33 tentang pembangunan Balai Penyuluhan KB 1 Unit setiap kecamatan dimana sampai tahun 2015 Balai Penyuluhan telah terpenuhi di seluruh Kecamatan Kabupaten Nias.

Kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender tetap dilanjutkan penguatan, advokasi dan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi masyarakat serta stakeholder. Salah satu dampak dapat terlihat dari peningkatan persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Nias. Khusus bagi para perencana pada tingkat SKPD dilakukan Penguatan Focal Point dalam hal Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan trafficking tetap dilayani di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tindakan yang telah dilakukan dalam penanganan kasus antara lain rujukan kepada pihak kepolisian (jalur Hukum) dan penyelesaian melalui jalur perdamaian. Tahun 2016, jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani dengan baik dan telah terselesaikan adalah sebanyak 8 kasus, sementara kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 4 kasus dan sudah diselesaikan secara hukum dan mediasi.

Jumlah peserta KB Baru terutama pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria mengalami peningkatan yang signifikan dapat dilihat dari perbandingan jumlah peserta Tahun 2016 adalah 508 akseptor sedangkan pada tahun 2015 adalah 256 akseptor.

9.6. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana selama tahun 2016, mengalami permasalahan antara lain :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Masih lemahnya jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
 2. Masih kurangnya persepsi/pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender.
 3. Masih terbatasnya implementasi kebijakan pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender.
 4. Masih adanya nilai-nilai social budaya yang bias gender.
- b. Urusan Keluarga Berencana
 1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM terutama ditingkat Kecamatan.
 2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam Program KB terutama kaum laki-laki.
 3. Kurang berfungsinya Institusi Masyarakat Pedesaan terutama para PPKBD/Sub PPKBD dalam pelayanan dilapangan
 4. Masih terbatasnya dukungan anggaran terutama dari APBN

Untuk mengatasi permasalahan diatas, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Memperluas jaringan dan pemahaman Pemberdayaan Perempuan/Pengarusutamaan Gender di Tingkat SKPD melalui Focal Point dan di Tingkat Kecamatan dengan Sosialisasi.
 2. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang KDRT dan Perlindungan Anak
 3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dimasing-masing SKPD yang responsif gender.
- b. Urusan Keluarga Berencana
 1. Penambahan jumlah tenaga baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.
 2. Pelaksanaan Diklat terutama bagi para Petugas Lapangan (PLKB).
 3. Meningkatkan Program KIE bagi masyarakat (PUS) dengan melibatkan para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
 4. Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan dengan pemberian bantuan insentif.
 5. Penambahan anggaran terutama dari APBN.

10. URUSAN WAJIB SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

10.1. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui undang-undang ini kepada daerah telah diserahkan berbagai kewenangan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya. Penyerahan kewenangan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik secara individu, kelompok, golongan ataupun secara kelembagaan. Dan selanjutnya melalui Perda No. 7 Tahun 2008, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Nias, maka dengan ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias bertanggung jawab kepada Bupati Nias, yang berkedudukan di Kabupaten Nias.

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias wajib dipertanggungjawabkan kegiatannya baik pertanggungjawaban rutin maupun pertanggungjawaban atas permintaan pihak berwenang. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias yaitu membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selama tahun 2016, guna melihat dan menilai kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias selama 1 (satu) tahun anggaran. Kewenangan otonomi di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias senantiasa berpedoman pada Perda Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Nias dengan tugas pokok "Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi".

Sedangkan fungsi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten Nias bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintah Kabupaten di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program pembangunan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial dilaksanakan sebagai upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial korban bencana alam, korban

bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah, masyarakat rentan dan tidak mampu serta rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Dari Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia mengakibatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Walaupun dilihat dari hasil capai kegiatan yang rata-rata baik, namun harus diakui bahwa masih ada program dan kegiatan yang menuntut kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Bahan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan cerminan dari apa yang telah dikerjakan dan dicapai oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias selama tahun 2016, dengan harapan bahwa di masa-masa yang akan datang dapat terus ditingkatkan dalam rangka pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.

10.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 :

- a. Urusan Sosial :
 1. Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 3. Peningkatan Pembinaan Anak Terantar;
 4. Peningkatan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
 5. Peningkatan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
 6. Peningkatan Penanganan Fungsi-Fungsi Sosial Dalam Kehidupan Kebangsaan;
 7. Peningkatan Pembinaan Lanjut Usia (LANSIA);
 8. Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana;
 9. Peningkatan Pemberian Bantuan Sosial.
- b. Urusan Ketenagakerjaan :
 1. Peningkatan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

10.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial dan Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian Tahun 2016, sebagaimana dalam dokumen P-APBD Kabupaten Nias tahun 2016 yang disajikan sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH).
 - b. Pemutakhiran Data PMKS dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - c. Pembinaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (PFM) melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS).
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin.
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha.
 - f. Biaya Pendukung Operasional Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Nias.
2. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, dengan kegiatan :
 - a. Optimalisasi fungsi Lembaga Konsultasi, Kesejahteraan Keluarga (LK3).
 - b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Nias.
3. **Program Pembinaan Anak Terlantar**, dengan kegiatan :
 - a. Bantuan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan.
4. **Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**, dengan kegiatan :
 - a. Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyandang Cacat Berat.
 - b. Bantuan Sosial Perawatan Pasien Masalah Kejiwaan dan Eks Trauma Ke Rumah Sakit Jiwa.
5. **Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**, dengan kegiatan :
 - a. Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti.

6. **Program Penanganan Fungsi-Fungsi Sosial Dalam Kehidupan Kebangsaan**, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Tingkat Kabupaten Nias.
7. **Program Pembinaan Lanjut Usia (LUT)**, dengan kegiatan :
 - a. Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lanjut Usia Terlantar (LUT).
 - b. Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial Bagi LANSIA.
8. **Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana**, dengan kegiatan :
 - a. Biaya operasional pengiriman bantuan kepada korban bencana.
 - b. Pelatihan dan operasional TAGANA Kabupaten Nias.
 - c. Pengadaan Bahan Pangan Tanggap Darurat (Emergency Food).
 - d. Penyusunan Data Base Korban Bencana Kabupaten Nias.
9. **Program Pemberian Bantuan Sosial**, dengan kegiatan :
 - a. Penanganan Mayat Terlantar (Mr. X).
 - b. Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat/Lansia.
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin.
10. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan Kewirausahaan.
 - b. Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Kabupaten Nias.
 - c. Biaya operasional system informasi bursa kerja Online (BKOL) Kabupaten Nias.
 - d. Pemutakhiran data pekerja anak putus sekolah dari keluarga penerima manfaat PKH.
 - e. Fasilitasi penempatan tenaga kerja Kabupaten Nias ke luar daerah.
 - f. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan program pelatihan bidang industri.
11. **Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembentukan dan Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Nias.
 - b. Penyusunan perencanaan tenaga kerja.

10.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Sosial dan Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias pada tahun anggaran 2016, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 2.993.750.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.834.323.195,-** atau **94,67 persen** sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-28
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016

10.5. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Tahun 2016 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-29
Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	SOSIAL					
I	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya					
1	Prosentase Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Keluarga Rentan)	%	0,2	1,75	6,26	Tercapai
2	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapat bantuan pembangunan rumah	KK	-	-	-	-
3	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	Org	-	15	10	Tidak Tercapai
4	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha	Org	-	40	40	Tercapai
5	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)	Unit	-	190	184	Tidak Tercapai
6	Prosentase Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis	%	10	37,50	72,76	Tercapai
7	Optimalisasi pendampingan PKH	Optimal	Belum Optimal	Optimal	Optimal	Tercapai
II	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
9	Jumlah masyarakat yang mendapat konseling dan advokasi	Org	-	40	-	Tidak Tercapai
10	Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang kesejahteraan sosial	Keg	2	2	-	Tidak Tercapai
III	Program Penanganan Fungsi-fungsi Sosial dalam Kehidupan Kebangsaan					
11	Kegiatan yang mendorong rasa kesetiakawanan sosial	Keg	-	1	-	Tidak Tercapai
IV	Program Pemberian Bantuan Sosial					
12	Pemberian uang duka dari Pemerintah Daerah kepada keluarga yang meninggal dunia	%	-	100	-	Tidak Tercapai
V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana					
13	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	Tercapai
14	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	Tercapai
VI	Program Pembinaan Anak Terlantar					
15	Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina	Org	-	10	30	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
VII	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma					
16	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial	%	0,79	100	100	Tercapai
VIII	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo					
17	Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina	Unit	2	1	1	Tercapai
IX	Program Pembinaan Lanjut Usia (Lansia)					
18	Prosentase lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	-	100	100	Tercapai
	KETENAGAKERJAAN					
X	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
19	Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	-	100	100	Tercapai
20	Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	%	-	2,10	-	Tidak Tercapai
21	Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	%	-	100	100	Tercapai
XI	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					
22	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	8,33	-	-	-
23	Keselamatan dan Perlindungan	%	8,33	41,67	-	Tidak Tercapai
24	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	-	-	-	-
XII	Program Pengembangan Kesempatan Kerja					
25	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	91,26	93,19	85,72	Tidak Tercapai
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	87,38	88,42	88,25	Tidak Tercapai
27	Prosentase pekerja yang ditempatkan	%	83,33	92,54	90,62	Tidak Tercapai
28	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,02	0,92	Tercapai
29	Kegiatan Padat Karya	keg	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nias

10.6. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan urusan sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi Tahun 2016, menghadapi kendala/permasalahan antara lain :

- Belum tertampungnya seluruh keluarga yang berkategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
- Lemahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja karena faktor ketrampilan yang masih kurang;
- Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- Tidak adanya lagi BLK di Kabupaten Nias karena BLK yang sudah ada sudah merupakan wilayah daerah otonom baru.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan tambahan peserta program PKH yang didukung dengan data yang akurat dan up to date;

- b. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di BLK;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- d. Pengusulan Unit BLK baru di Kabupaten Nias.

11. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

11.1. Gambaran Umum

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias sesuai dengan tugas pokok sebagai salah satu Dinas Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sasaran pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias sesuai fungsinya dalam mewujudkan tujuan pembangunan sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan perekonomian rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan dalam 3 (tiga) bagian yakni (1) urusan pemerintahan absolut, (2) urusan pemerintahan konkuren, dan (3) urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam ketentuan undang-undang pemerintahan daerah dimaksud telah terurai pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan amanat undang-undang pemerintahan daerah dimaksud telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan dan penataan struktur organisasi perangkat daerah. Sebagai implikasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka terdapat beberapa urusan pemerintahan yang berasilimasi/bergabung maupun urusan pemerintahan yang sebelumnya bergabung menjadi terpisah/terbagi. Termasuk dalam hal ini Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berasilimasi dengan urusan ketenagakerjaan. Secara khusus urusan usaha Mikro, Kecil dan Menengah terjadi pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana sesuai dengan amanat dan ketentuan peraturanperundang-undangan tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya mengurus Usaha Mikro, sementara usaha kecil menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan urusan usaha menengah langsung menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Tahun 2016 adalah tahun transisi antara Rencana Strategi SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016-2021. Secara umum target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias sebagaimana pada Renstra SKPD tahun 2011-2016 dan RPJMD Kabupaten Nias tahun 2011-2016 telah tercapai sebagaimana pada tabel 4. Namun demikian masih terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai akibat beberapa faktor antara lain terkait regulasi serta kondisi usaha perkoperasian dan UMKM yang cenderung menurun. Target yang tidak tercapai dimaksud merupakan suatu evaluasi terhadap kami dengan upaya-upaya meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang. Perkembangan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah dari data awal (tahun 2010 sebelum terbentuknya DOB) selama tahun 2011 s.d. 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel : 4-30
Perkembangan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Jumlah Anggota (orang)	Volume Usaha (Rp.)	Sisa Hasil Usaha (Rp.)	Jumlah UMKM (unit)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2010	83	5.748	23.022.646	1.758.888	373
2011	86	5.706	23.382.646	1.746.036	547
2012	91	5.754	23.982.646	1.760.724	571
2013	101	6.791	24.107.086	2.078.046	584
2014	107	6.838	25.381.925	2.092.428	917
2015	125	7.288	33.845.446	2.975.030	977
2016	129	7.357	35.537.718	32.064.280	1.80

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Nias

11.2. Arah Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016 disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias telah dituangkan dalam Renstra SKPD Tahun 2011-2016 dan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 yaitu peningkatan produktifitas usaha UMKM dan Koperasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM
- b. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
- c. Penyehatan Koperasi
- d. Penguatan kelembagaan koperasi

11.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen DPA/DPPA SKPD tahun 2016, yang disajikan sebagai berikut :

1. **Program Penciptaan Iklim Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif,** dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Kebijakan / Produk Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembalian, Penjatuhan Sanksi/ Denda serta Pembebasan/ Penghapusan Piutang Daerah kepada Penerima Manfaat Dana Bergulir.
 - b. Sosialisasi Kebijakan tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Penyusunan Database UKM dan Koperasi.
2. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah,** dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Produk Lokal.
 - b. Pelatihan Pengurus Koperasi Berbasis Komoditi Karet dan Coklat.
3. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),** dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Koperasi yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian.
 - b. Fasilitasi UMKM yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian.
 - c. Pemantauan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM dan Koperasi.
 - d. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UKM.
 - e. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.
 - f. Pengadaan Tenda Bagi Pedagang.
4. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,** dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi yang Berprestasi.
 - b. Pelatihan Manajemen Modern Bagi Pengurus Koperasi.
 - c. Peningkatan Pembinaan Koperasi Melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.

- d. Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi di Lokasi Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK.
- e. Gerakan Sosialisasi Sadar Koperasi.
- f. Perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi.
- g. Pembentukan Koperasi Baru.
- h. Bantuan Operasional Dekopinda Kabupaten Nias.
- i. Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.
- j. Pembubaran Koperasi yang Tidak Aktif.

11.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Memengah pada SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias pada tahun anggaran 2016 telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 1.496.150.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.454.344.149,-** atau **97,21 persen**, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 4-31
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Memengah
pada SKPD Koperasi dan Usaha Kecil Memengah Kabupaten Nias
Tahun 2016

11.5. Hasil Capaian Kinerja

Secara umum hasil evaluasi terhadap target kinerja program dan kegiatan Renstra sampai dengan tahun 2016 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah dapat digambarkan sesuai program dan kegiatan terkait, yaitu :

1. Meningkatnya jumlah koperasi sebesar 55,42%, dimana pada tahun 2010 berjumlah 83 unit dan pada tahun 2016 koperasi yang ada diwilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Nias sebanyak 129 unit.
2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkoperasi sebesar 31,12%, dimana pada tahun 2010 berjumlah 5.748 orang dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7.357 orang dengan volume usaha mencapai Rp. 35.537.718.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan peningkatan perekonomian masyarakat anggota koperasi mencapai 8,62% dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 3.064.280.000,- (tiga milyar enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sampai tahun 2016 sebanyak 1.080 unit yang terdiri atas berbagai jenis kegiatan wirausaha.

Hasil capaian tersebut diatas masih belum dapat memuaskan akibat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi terutama keterbatasan sumber daya yang tersedia maupun keterbatasan anggaran yang tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya.

Tabel : 4-32
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I.	Program Penciptaan Iklim Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					
1.	Jumlah UKM Non BPR/LKM	unit	80	24	-	Tidak Tercapai
2.	Jumlah BPR/Lembaga Keuangan Mikro	unit	-	-	-	-
3.	Unit Koperasi/Kios Penyedia Sarana Produksi di Tingkat Kecamatan/Desa	unit	25	15	24	Tercapai
II.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					
4.	Jumlah Unit Usaha Mikro dan Kecil	unit	373	100	103	Tercapai
5.	Jumlah Bantuan Permodalan Modal Bergulir dari Pemerintah Daerah :					
	- Koperasi	juta	-	500	195	Tidak Tercapai
	- Usaha Kecil Menengah	juta	-	500	630	Tercapai
6.	Dokumen regulasi pengelolaan permodalan modal bergulir	dok	-	-	-	-
III.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					
7.	Jumlah UMKM yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian	unit	15	10	11	Tercapai
8.	Jumlah Koperasi yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian	unit	10	5	5	Tercapai
IV.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					
9.	Jumlah Unit Koperasi Aktif Sehat	unit	23	128	80	Tidak Tercapai
10.	Jumlah Unit Koperasi Aktif Tidak Sehat	unit	25	-	49	Tercapai
11.	Persentase Koperasi Aktif	%	56	100	62,01	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias

11.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias dihadapkan pada permasalahan dan hambatan yang merupakan isu-su penting yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan SKPD yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya keterampilan/kualitas sumber daya yang dimiliki oleh pengurus dan anggota koperasi serta pelaku usaha (UMKM) mengakibatkan rendahnya daya saing usaha koperasi dan UMKM dengan pelaku ekonomi lainnya;
- b. Terbatasnya modal usaha yang dimiliki oleh masing-masing koperasi dan pelaku usaha (UMKM);
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan kaidah-kaidah koperasi yang sesungguhnya sehingga anggota koperasi lebih banyak berhutang daripada menabung bahkan terkesan suatu koperasi didirikan hanya bertujuan mengharapakan bantuan dari Pemerintah;
- d. Masih rendahnya pengelolaan koperasi sebagaimana mestinya ditambah dengan makin tingginya persaingan dari badan usaha non koperasi;
- e. Pelaku Usaha Mikro yang tidak memiliki legalisasi usaha sulit mendapatkan fasilitasi-fasilitasi dari pemerintah maupun lembaga keuangan/pemberdayaan lainnya;
- f. Kekurangan sarana dan prasarana pendukung usaha dan promosi;

Dengan terdapatnya permasalahan dan hambatan tersebut diatas, solusi telah ditempuh antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan penyusunan laporan keuangan perkoperasian yang dilaksanakan dalam daerah;
- b. Fasilitasi penyaluran dana bantuan modal bergulir kepada UMKM dan operasi dan fasilitasi permohonan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian terkait melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada gerakan koperasi yang layak dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
- c. Diselenggarakannya sosialisasi gerakan sadar koperasi pada kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah menengah atas;
- d. Menugaskan/mengutus pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan diluar yang berkaitan dengan pengelolaan perkoperasian;
- e. Meyakinkan pimpinan untuk menerbitkan dan menetapkan regulasi pembembasan biaya legalisasi usaha khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- f. Penyediaan sarana dan prasana pendukung pengelolaan usaha dan mengikut sertakan dalam pameran pembangunan daerah Kabupaten Nias

12. URUSAN WAJIB PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

12.1. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten Nias di Bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pengelolaan Urusan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Potensi bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Nias antara lain :

- A. Bidang Kepemudaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaaan, ditegaskan bahwa Pemuda adalah warga Negara yang memasuki periode penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun, maka secara Nasional persentase Pemuda sekitar 27% dari jumlah penduduk. Dan bila diproyeksikan di Daerah Kabupaten Nias, maka jumlah pemuda adalah sekitar \pm 41.540 orang.
- B. Bidang Olahraga
 - 1. Olahraga Pendidikan, terpadu dengan kurikulum mata pelajaran di sekolah secara berjenjang.
 - 2. Olahraga Prestasi, berkembang sejalan dengan kegiatan cabang-cabang olahraga yang bergabung dalam KONI Kabupaten Nias.
 - 3. Olahraga Rekreasi berupa olahraga tradisional yang bersifat meriah, murah dan massal.
- C. Bidang Kebudayaan
Potensi di Bidang kebudayaan berupa peninggalan sejarah seperti batu-batu megalith, rumah adat tradisional; seni tari dan musik tradisional seperti tari tuwu, tari moyo, tari maena, tari baluse, hendri-hendri, hoho, faondru, humbra, folaya dan lain sebagainya.
- D. Bidang Pariwisata
Potensi Bidang Pariwisata tersebar di beberapa Kecamatan berupa keunikan dan keindahan alam seperti Pantai, Pulau, Air Terjun, Mata Air Panas, Gua dan Bahan Baku untuk Batu Cincin.

12.2. Arah Kebijakan

Strategi penyelenggaraan urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, adalah :

- A. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - 1. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam memberhasilkan Pembangunan dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan
 - b. Peningkatan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
 - 2. Meningkatkan Pembinaan, pembudayaan dan prestasi Olahraga dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - b. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi
- B. Urusan Kebudayaan
Pengembangan dan Pelestarian nilai-nilai budaya ono niha (kearifan lokal), dengan arah kebijakan :
 - a. Penggalan dan pelestarian nilai-nilai budaya (kearifan lokal).
 - b. Pemasyarakatan simbol-simbol budaya, ornamen berciri khas budaya Nias untuk digunakan dalam acara resmi Pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.
 - c. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan budaya.
- C. Urusan Pariwisata
Pengembangan Destinasi Pariwisata, Promosi dan Penciptaan iklim kondusif bagi pertumbuhan Sektor Pariwisata, dengan arah kebijakan :
 - a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan Prasarana dan Sarana pendukung Pariwisata.
 - b. Meningkatkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
 - c. Mengembangkan objek tujuan wisata dan pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata.

12.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias sebagaimana tertuang dalam dokumen APBD dan P-APBD 2016, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan, disajikan sebagai berikut :

- 1. **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penyambutan dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda;
 - b. Pelaksanaan Seleksi dan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera di Kabupaten Nias; dan
 - c. Pertemuan rutin Pimpinan Organisasi Pemuda dan Tokoh Pemuda.

2. **Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
3. **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional;
 - b. Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar se Kabupaten Nias;
 - c. Pelatihan Wasit Olahraga; dan
 - d. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
4. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Kostum Marching Band;
 - b. Pengadaan Alat-alat Olahraga; dan
 - c. Pengadaan alat kelengkapan Marching Band.
5. **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitasi Rumah Adat Tradisional di Kabupaten Nias;
 - b. Pembinaan Sanggar Budaya;
 - c. Penyusunan Sinopsis Asal Usul/Sejarah Batu megalith;
 - d. Perawatan dan pelestarian Batu Megalith Desa Saitagaramba;
 - e. Perawatan dan pelestarian Batu Megalith Desa Akhelauwe; dan
 - f. Perawatan dan pelestarian Rumah Adat Tradisional.
6. **Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pembentukan Pengurus Baru Sanggar Budaya Kabupaten Nias.
7. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, dengan kegiatan :
 - a. Mengikuti Kegiatan PRSU di Medan
 - b. Penyelenggaraan Hari Pariwisata; dan
 - c. Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di TMII Jakarta.
8. **Program Peningkatan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Desa Percontohan Program PKK;
 - b. Biaya Operasional dan Perawatan Objek Wisata Pemandian Air Panas Mbomboaukhu;
 - c. Lanjutan Penataan Objek Wisata Bahari Desa Tagaule Kecamatan Bawolato;
 - d. Pembuatan Gapura dan Pengecatan Shelter di Objek Wisata Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato;
 - e. Pengadaan kelengkapan Rest Area di Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato;
 - f. Pembangunan Panggung terbuka di Objek Wisata Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo;
 - g. Pengerasan tempat parkir di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo; dan
 - h. Pengerasan Jalan di Lingkungan Objek Wisata Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato.
9. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Budaya**, dengan kegiatan :
 - a. Keikutsertaan Tim Kesenian Kabupaten Nias pada Pembukaan Pesta Ya'ahowu di Kabupaten Nias Selatan dan pada acara penutupan di Kota Gunungsitoli;
 - b. Lomba Maena Kreasi Baru se Kepulauan Nias di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo;
 - c. Keikutsertaan Utusan Kabupaten Nias pada Pemilihan Puteri Pariwisata di Kabupaten Nias Barat; dan
 - d. Keikutsertaan Utusan Kabupaten Nias pada Lomba Voli Pantai di Kabupaten Nias Utara.

12.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.550.000.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 4.355.413.280,-** atau **95,72 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 4-33
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Nias Tahun 2016

12.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, digambarkan sebagai berikut :

1. Urusan Kepemudaan
 - a. Terlaksananya Penyambutan dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2016 Kabupaten Nias di Lapangan Beringin Hiliweto Kecamatan Gido;
 - b. Terseleksinya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih untuk tingkat Kabupaten Nias Tahun 2016 sebanyak 25 orang dan terkirimnya utusan Kabupaten Nias untuk Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih tingkat Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 orang, serta terlaksananya Pengibaran Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 71 Tahun 2016 serta Penurunan Bendera di Lapangan Merdeka Gunungsitoli.
 - c. Terlaksananya Pertemuan Rutin Pimpinan Organisasi Pemuda dan Tokoh Pemuda di Wisma Soliga Gunungsitoli.
 - d. Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda se-Kabupaten Nias untuk keterampilan salon sebanyak 20 orang di Nusa Lima Fowa.
2. Urusan Olahraga
 - a. Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Kabupaten Nias Tahun 2016 di Lapangan Merdeka Gunungsitoli;
 - b. Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar se Kabupaten Nias di Lapangan Beringin Hiliweto Gido.
 - c. Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi berprestasi Tingkat Kabupaten Nias sebanyak 10 orang.
 - d. Terlaksananya Pengadaan Kostum Marching Band untuk SMK Negeri I Idanogawo.
 - e. Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Olahraga Bola Voli untuk SMP, SMA/SMK se Kabupaten Nias.
 - f. Terlaksananya Alat Kelengkapan Marching Band untuk SMK Negeri I Sogaeadu.
3. Urusan Kebudayaan
 - a. Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Adat Tradisional an. Arofati Ndraha di Kecamatan Hiliduho;
 - b. Terlaksananya Pembentukan dan pelantikan Pengurus Sanggar Budaya Tingkat Kecamatan se Kabupaten Nias;
 - c. Tersusunnya Sinopsis Asal Usul/Sejarah Batu Megalith Bawi Sigelo Galua dan Batu Megalith Lahemo;
 - d. Terlaksananya Perawatan dan Pelestarian Batu Megalith Desa Saitagaramba;
 - e. Terlaksananya Perawatan Rumah Adat Tradisional di Desa Sisarahili Kec. Bawolato dan di Desa Balodano Kec. Ma'u;
 - f. Terfasilitasinya Pembentukan Pengurus Baru Sanggar Budaya Kabupaten Nias.
4. Urusan Pariwisata
 - a. Ikutsertanya Pemerintah Kabupaten Nias pada Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 45 Tahun 2016 dan Penampilan Tim Kesenian Kabupaten Nias di Medan;
 - b. Terselenggaranya Peringatan Hari Pariwisata di Kecamatan Gido;
 - c. Terlaksananya pameran dan promosi Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Nias di Anjungan Sumatera Utara TMII Jakarta;
 - d. Terwujudnya desa percontohan menuju desa wisata dan terciptanya kesadaran masyarakat atas pentingnya Program PKK dan Sapta Pesona di Desa Hiliwarasi Kecamatan Hiliserangkai, Desa Talafu Kecamatan Botomuzoi dan Desa Orahili Kecamatan Ulugawo;
 - e. Terlaksananya Perawatan Objek Wisata Pemandian Air Panas Mbomboaukhu Desa Oladano Kecamatan Idanogawo;
 - f. Terlaksananya lanjutan Pentaan Objek Wisata Bahari Desa Tagaule Kecamatan Bawolato berupa 10 (sepuluh) buah pondok, 4 (empat) buah kios dan rabat beton penghubung pondok;
 - g. Tersedianya kelengkapan Rest Area di Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato dalam rangkaian Kegiatan Pesta Ya'ahowu se Kepulauan Nias Tahun 2016;
 - h. Terbangunnya Panggung Terbuka di Objek Wisata Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo dalam rangka Lomba Maena Kreasi Baru pada kegiatan Pesta Ya'ahowu se Kepulauan Nias Tahun 2016;
 - i. Terlaksananya pengerasan tempat parkir di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo;
 - j. Terlaksananya pengerasan Jalan di Lingkungan Objek Wisata Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato;

- k. Ikutsertanya Tim Kesenian Kabupaten Nias pada acara Pembukaan Pesta Ya'ahowu se Kepulauan Nias di Telukdalam Kabupaten Nias Seatan dengan menampilkan Tari Tuwu dan pada acara Penutupan di Kota Gunungsitoli dengan menampilkan Grup Musik Tradisional Nias;
- l. Terlaksananya Lomba Maena Kreasi Baru se Kepulauan Nias di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo dalam rangkaian acara Pesta Ya'ahowu Kepulauan Nias Tahun 2016;
- m. Ikutsertanya Utusan Kabupaten Nias pada Pemilihan Puteri Pariwisata se Kepulauan Nias di Kabupaten Nias Barat dalam rangka Pesta Ya'ahowu se Kepulauan Nias Tahun 2016; dan

Tabel : 4-34
Capaian Kineja Urusan Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
di Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I. Bidang Kepemudaan						
1.	Jumlah Siswa SLTA yang direkrut menjadi Pasukan Paskibraka Tingkat Kabupaten Nias	Org	25	25	25	Tercapai
2.	Jumlah Siswa SLTA yang diutus menjadi Pasukan Paskibraka Tingkat Provinsi	Org	1	2	2	Tercapai
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Keg	-	4	4	Tercapai
4.	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	Klpk	10	1	-	Tidak Tercapai
5.	Jumlah Pemuda yang Dilatih Kewirausahaan	Org	-	18	-	Tidak Tercapai
II. Bidang Olahraga						
1.	Jumlah Organisasi Olahraga	Klpk	8	-	-	-
2.	Jumlah Kegiatan Olahraga	Keg	3	5	5	Tercapai
3.	Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	80	1	-	Tidak Tercapai
4.	Ketersediaan Alat-alat Olahraga	Paket	-	-	1	Tercapai
5.	Jumlah Wasit Bola Voli yang Dilatih	org	-	27	-	Tidak Tercapai
6.	Jumlah Wasit Sepakbola yang Dilatih	org	-	12	-	Tidak Tercapai
7.	Jumlah Gedung Olahraga	unit	-	2	-	Tidak Tercapai
III. Bidang Kebudayaan						
1.	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Keg	4	-	3	Tercapai
2.	Jumlah Grup Kesenian	Grup	47	2	1	Tidak Tercapai
3.	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	3	-	Tidak Tercapai
4.	Kawasan Adat Terpencil (KAT)	Keg	-	-	-	-
5.	Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	4	2	5	Tercapai
6.	Jumlah Sanggar Budaya dan Pemusik Tradisional yang Dibina	grup	-	10	-	Tidak Tercapai
7.	Jumlah Kegiatan LBN yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	keg	-	1	-	Tidak Tercapai
IV. Bidang Pariwisata						
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Org	6.686	9.833	6.880	Tidak Tercapai
2.	Jumlah Pembangunan / Pengembangan Sarana Objek Wisata	Unit	1	-	3	Tercapai
3.	Jumlah Kantor Pusat Informasi Tourisme (TIC) di Kab. Nias	Unit	-	-	-	-
4.	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata	keg	-	4	3	Tidak Tercapai

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Nias

12.6. Permasalahan dan Solusi

Secara Umum Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata hingga tahun 2016, menghadapi kendala / permasalahan antara lain :

- a. Sarana dan prasarana di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang sangat minim;
- b. Rendahnya SDM Pemuda sehingga belum optimal dalam berpartisipasi dan berperan serta dalam Pembangunan;
- c. Kurangnya pembinaan terhadap organisasi pemuda dan cabang olahraga serta minimnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi para pemuda, atlet maupun wasit;
- d. Kurangnya pelaksanaan event olahraga baik ditingkat umum maupun tingkat pelajar;
- e. Tidak adanya komunikasi antar pemuda yang disebabkan kepengurusan Induk Organisasi Kepemudaan (KNPI) yang telah demisioner;
- f. Terbatasnya tenaga pelatih dan tenaga guru olahraga di sekolah;

- g. Kurang berperannya organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Nias;
- h. Banyaknya jenis dan keanekaragaman seni budaya yang belum terlestarikan dan benda-benda cagar budaya yang belum terpelihara;
- i. Terbatasnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
- j. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana wisata, pemasaran dan promosi wisata serta pembenahan dan pengelolaan Daerah Tujuan Wisata;

Sesuai tabel diatas, dimana ada 2 (dua) program dan kegiatan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 yang tidak dapat terlaksana antara lain :

- a. Pelaksanaan Pelatihan Wasit Olahraga
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan untuk memfasilitasi Calon Wasit/Juri Utusan Kabupaten Nias dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Latihan Wasit/Juri Cabang Olahraga Bola Volly dan Sepak Bola di luar daerah sebanyak 10 orang, maka setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi dan pihak Induk Cabang Olahraga baik PBVSI maupun PSSI dimana pelaksanaan Pelatihan Wasit/Juri Bola Volly maupun Sepak Bola untuk Tahun 2016 tidak ada jadwal pelaksanaannya.
- b. Perawatan dan Pelestarian Batu Megalith Desa Akhelauwe
Program dan Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan berhubung permasalahan teknis lapangan, dimana masyarakat di Desa Akhelauwe Kecamatan Gido, tidak bersedia menerima kegiatan ini dengan alasan bahwa mereka tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan perawatan dan pelestarian Batu Megalith di Desa Akhelauwe. Pihak Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias telah berupaya melakukan sosialisasi, dan koordinasi baik kepada aparat desa maupun masyarakat, tetap tidak bersedia menerima program ini.

Maka untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut, solusi yang disarankan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana baik di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. Meningkatkan mutu SDM Pemuda sehingga mampu berpartisipasi dan berperan serta dalam Pembangunan;
- c. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pemuda dan cabang olahraga serta minimnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi para pemuda, atlet maupun wasit;
- d. Melaksanakan event olahraga baik ditingkat umum maupun tingkat pelajar;
- e. Memfasilitasi terbentuknya kepengurusan Induk Organisasi Kepemudaan (KNPI) Kabupaten Nias;
- f. Meningkatkan mutu tenaga pelatih dan tenaga guru olahraga di sekolah;
- g. Memberdayakan organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Nias;
- h. Melestarikan dan memelihara jenis dan keanekaragaman seni budaya serta benda-benda cagar budaya yang ada;
- i. Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
- j. Mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana wisata, pemasaran dan promosi wisata serta pembenahan dan pengelolaan Daerah Tujuan Wisata

13. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

13.1. Gambaran Umum

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.

Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Penyelenggaraan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias.

13.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Tahun 2016 dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Arah kebijakan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan produk-produk hukum daerah;
- b. Peningkatan iklim politik yang kondusif;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat.

13.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan :

- a. Fasilitasi FKUB dan DP-FKUB di Kabupaten Nias
- b. Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nias
- c. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Nias

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat :

- a. Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada masyarakat

3. Program Pemasyarakatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan :

- a. Melaksanakan Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan kepada siswa/I SMA/SMK sederajat di Kabupaten Nias.
- b. Fasilitasi Pelaksanaan rapat dan operasional Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (DP-FKDM) dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Nias.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan rapat dan Operasional Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nias.

4. Program Peningkatan Pengembangan Demokrasi :

- a. Pemantauan Aktual di Kabupaten Nias
- b. Verifikasi pemeriksaan dan pengawasan bantuan keuangan Partai Politik
- a. Pendataan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Nias.

5. Program penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas :

- a. Pelatihan bagi Personil Linmas di Kabupaten Nias

6. Program Pemantapan dan Peningkatan Ideologi :

- a. Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 setiap bulan di Kabupaten Nias
- b. Memfasilitasi pelaksanaan hari-hari besar Nasional di Kabupaten Nias.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja bahwa Polisi Pamong Praja adalah sebagai unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagai Penegak Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja adalah ujung tombak pemerintah daerah dalam mendorong penegakan peraturan daerah secara maksimal, menciptakan rasa aman, nyaman di tengah-tengah masyarakat, dan pada Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :

- a. Pengendalian Keamanan Lingkungan;
- b. Pengawasan Perda Kab. Nias;
- c. Pengamanan Kunker Pejabat/Temu Pisah/Ramah Tamah/Unjuk Rasa/Demo dan hari-hari besar keagamaan
- d. Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Kabupaten Nias

- 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** dengan kegiatan:
- a. Perpanjangan Izin Senjata Api

13.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 1.242.783.200,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.128.612.124,-** atau sebesar **90,81 persen** sementara alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias adalah sebesar **Rp. 2.016.300.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.947.524.802,-** atau **92,33 persen**.

Realisasi program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh kedua SKPD ini, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 4-35
Realisasi Program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Nias
Tahun 2016

Tabel : 4-36
Realisasi Program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias
Tahun 2016

13.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala daerah yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi, pengawasan Peraturan Daerah serta penertibannya;
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang semakin menurun;
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Secara umum pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2016 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : 4-37

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang telah dicapai oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
1	2	3	4	Target	Capaian	7
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1.	Meningkatnya peran dan fungsi FKUB	%	1	100	100	Tercapai
2.	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	keg				
Program Pemasarakatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan						
3.	Pelaksanaan Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan	keg	1	100	100	Tercapai
Program Pendidikan Politik Masyarakat						
4.	Pileg	%	66,87	78	97,50	Tercapai
5.	Pemilihan Presiden	%	59,9	69	92,00	Tercapai
6.	Pilgub	%	59,9	51,10	-	Tidak Tercapai
7.	Pilkada	%	64,87	65,63	65,63	Tercapai
8.	Jumlah Pemilih	Jiwa	89,477	85,829	85,829	Tercapai
Program Pemantapan dan Peningkatan Ideologi						
9.	Jumlah hari-hari besar yang difasilitasi	Kali	4	4	4	Tercapai
Program peningkatan dan pengembangan demokrasi						
10.	Jumlah Parpol dan ORMAS yang terdaftar di Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Nias:	Parpol	16	12	12	Tercapai
	a. Parpol	Ormas	138	15	15	Tercapai
	b. Organisasi Kemasyarakatan					
11.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	keg	-	1	1	Tercapai
12.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	keg	-	1	1	Tercapai
Program penguatan kelembagaan dan personil Linmas						
13.	Jumlah Linmas per jlh 10.000 penduduk meningkat	Org	866	866	866	Tercapai
Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan PILKADA Kab. Nias						
14.	Jumlah Personil Linmas PAM Pemilukada Kabupaten Nias	Org	866	866	866	Tercapai
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam						
15.	Fasilitasi dalam penanganan bencana di Daerah Bencana	keg	1	-	-	-

Tabel : 4-38
 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
1.	Persentase penegakkan Perda	%	75	100	100	Tercapai
2.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	8,52	6,89	6,89	Tercapai
3.	Jumlah Patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan dalam 24 Jam	%	80	100	100	Tercapai
4.	Jumlah demo dalam setahun	Kali	3	1	4	Tidak Tercapai
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					
5.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan kriminal	%	100	100	100	Tercapai
6.	Angka kriminal menurun	%	0,15	0,06	0	Tercapai
7.	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten	%	50	100	100	Tercapai

13.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan masih mengalami beberapa kendala/permasalahan antara lain :

- Terbatasnya SDM dan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas
- Terbatasnya sarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Idelisme kebangsaan yang makin terkikis, yang nampak dari fenomena semakin mudarnya pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku bahkan sering melawan petugas/Aparat Satpol PP
- Adanya beberapa orang personil Satpol PP kurang terampil untuk memahami tugas pokoknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
- Peningkatan sarana kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
- Penyuluhan produk-produk hukum daerah.
- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang didasarkan pada 4 pilar hidup berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- Adanya penyuluhan dan pembinaan secara kontinyu pada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait.

14. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN DAN PERTANAHAN

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan di Kabupaten Nias Tahun 2016, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias, Dinas Pendapatan Kabupaten Nias, Inspektorat Kabupaten Nias, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias, Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias serta Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias. Penyelenggaraan urusan wajib ini yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD penyelenggara, dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut :

14.1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS

14.1.1. Kondisi Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah merupakan salah satu Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nias 2011-2016 sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik secara akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik termanifestasi dalam kebijakan pemerintah daerah dalam berbagai regulasi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas dan penataan penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam hal penataan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Selain dari pada itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias melaksanakan fungsi yang sifatnya koordinatif dalam hal perumusan kebijakan daerah.

Dengan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka penyelenggaraan tugas pelayanan, pemerintahan dan pembangunan daerah mensyaratkan terwujudnya kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah yang semakin meningkat dalam pengambilan keputusan publik, pelaksanaan tugas dan fungsi atau wewenangnya, dan pengelolaan keuangan secara mandiri. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

14.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan pembangunan. Arah Kebijakan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2011-2016 dan RPJMD Kabupaten Nias 2011 – 2016 bertumpu pada upaya mendorong penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*) melalui peningkatan tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah.

1. Penataan organisasi perangkat daerah dengan arah kebijakan: restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja melalui Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, dan Penyelenggaraan Analisis Jabatan;
2. Perbaikan kesejahteraan pegawai dengan arah kebijakan: Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD;
3. Penataan kecamatan, desa, dan wilayah administrasi pemerintahan dengan arah kebijakan: pemekaran Kecamatan dan Desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, penataan tapal batas desa dan kecamatan, penamaan wilayah administrasi pemerintahan dan penataan ibu kota Kabupaten Nias;

4. Penataan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah dengan arah kebijakan: penataan tata administrasi pemerintahan, penataan pengelolaan informasi, kearsipan dan dokumentasi, peningkatan kualitas pelayanan administrasi pelaksanaan APBD dan peningkatan koordinasi pemerintahan dan pembangunan;
5. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan arah kebijakan: pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan penataan pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peningkatan Kualitas pelayanan publik dengan arah kebijakan: penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
7. Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT dengan arah kebijakan: meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat dan membangun program e-Government secara terintegrasi melalui Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis IT, Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Pengoperasian Website Pemerintah Kabupaten Nias;
8. Pemantapan tatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan arah kebijakan: menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa, Penataan tapal batas desa, Pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa, Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sosialisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
9. Peningkatan kerjasama daerah dengan arah kebijakan: peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah se-Kepulauan Nias, peningkatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah.

14.1.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, dengan kegiatan :
 - Fasilitas Tamu Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - Pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintahan Kabupaten Nias;
 - Pengelolaan dan Penatalayanan Keprotokolan Pemerintah Daerah;
 - Pemrosesan Pengangkatan/Penghunjujkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017;
 - Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan;
 - Fasilitas Keprotokolan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias
 - Fasilitas Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Nias Terpilih 2016-2021
 - Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - Pelaksanaan temu pisah FORKOPIMDA/Muspida Plus Kabupaten Nias;
 - Fasilitas Sekretariat FORKADA se-Kepulauan Nias.
2. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**, dengan kegiatan :
 - Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa APBD Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias tentang Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2016;
 - Penghimpunan Data, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan APBD Kab. Nias;
 - Fasilitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Nias;
 - Menghimpun dan Mengevaluasi Data Laporan Kegiatan Bidang Perekonomian;

- Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) di Wilayah Kabupaten Nias;
 - Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016;
 - Koordinasi, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Nias;
 - Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - Penyusunan Naskah Akademik tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umu Kab. Nias;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias;
 - Verifikasi dan Evaluasi Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang diusulkan oleh Organisasi Keagamaan di Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Berdasarkan wilayah Tujuan Pelaksanaan Perjalanan dinas oleh Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, TP-PKK, serta DWP di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias TA. 2017;
 - Pemilihan Calon Direktur PDAM Tirta Umu Kabupaten Nias Periode 2016-2020;
 - Penyusunan Ranperda tentang Perubahan Perda No 2 Tahun 2010 tentang PD Pasar Ya'ahowu.
3. **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**, dengan kegiatan :
- Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
 - Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa di Kabupaten Nias;
 - Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penataan Desa di Kabupaten Nias;
 - Program Legislasi Daerah;
 - Eksaminasi terhadap berbagai rancangan produk Hukum Daerah Kabupaten Nias;
 - Evaluasi Peraturan Desa;
 - Asistensi Peraturan Daerah Kabupaten Nias;
 - Pengawasan terhadap Hukum Daerah Bawahan;
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Nias
4. **Program Penataan Daerah Otonomi Baru**, dengan kegiatan :
- Penegasan Batas Daerah Kabupaten Nias;
5. **Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah**, dengan kegiatan :
- Persiapan pelaksanaan P3D untuk Daerah Otonom Baru (DOB);
 - Pemetaan Urusan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Nias berdasarkan Revisi PP 41 Tahun 2007;
 - Penyusunan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Ranperda tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Nias;
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Penyelenggaraan kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias;
 - Penyelenggaraan Kegiatan POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Buku Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nias Tahun 2016;
 - Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias;
 - Persiapan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Nias Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. **Program Penegakan Hukum**, dengan kegiatan :
 - Pelayanan Pendampingan Hukum kepada Aparat Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Penyuluhan Hukum di wilayah Kabupaten Nias;
 - Menjalankan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - Pembentukan Tim Fasilitasi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) Kab. Nias;
 - Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kabupaten Nias;
 - Pembentukan Sekretariat Bersama Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum Kepada Aparat Pemerintah Desa.
7. **Program Pendokumentasian Produk Hukum**, dengan kegiatan :
 - Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Nias;
 - Penggandaan Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias.
8. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH Beserta Kelengkapannya;
 - Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Nias.
9. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
 - Mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/Kursus/Sosialisasi di Luar Daerah;
 - Penilaian Kecamatan/Camat Terbaik;
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal.
10. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan**, dengan kegiatan :
 - Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan;
11. **Program Penataan Administrasi Pemerintahan**, dengan kegiatan:
 - Pembakuan Nama Rupa Bumi Kabupaten Nias;
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nias.
12. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan :
 - Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa;
 - Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Nias;
 - Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - Pelatihan dan Pembekalan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi Kepala Desa Terpilih TA. 2016 se-Kab. Nias.
13. **Program Pemilihan Kepala Desa**, dengan kegiatan :
 - Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias;
 - Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
14. **Program Pembinaan dan Pengawasan di bidang Pertambangan**, dengan kegiatan :
 - Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - Pendataan Potensi Sumber daya alam;
 - Sosialisasi Sumber Daya Alam.
15. **Program Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa**, dengan kegiatan :
 - Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
16. **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah**, dengan kegiatan :
 - Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Identifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Perintisan Batas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias yang terletak di Ononamolo I Lot Kec. Gunungsitoli Selatan dhi. Lokasi Kantor Bupati Nias dan DPRD Kabupaten Nias;
 - Pemasangan pilar batas tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Survey Lokasi Tanah yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
 - Fasilitasi Penyelesaian masalah-masalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Satuan Tugas Penanganan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias.
17. **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan SKJ di lingkungan Sekretariat Daerah, BKD dan BPKAD Kabupaten Nias.
18. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan kegiatan :
 - Kuliah Agama PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, BKD dan BPKAD Kabupaten Nias;

- Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar Keagamaan;
19. **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan :
 - Pelatihan SPSE Versi 4, SiKAP, E-Kontrak Non E-Tendering, E-Lelang Cepat dan E-Purchasing;
 - Penataan piranti pendokumentasian;
 - Pengelolaan dan penataan PPID;
 - Sosialisasi Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Kab. Nias.
 20. **Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Nias;
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Pelaksanaan Temu Pers;
 - Penyusunan Buletin Pemerintah Kabupaten Nias;
 21. **Program Sistem Aplikasi Pengelola Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan Jasa Internet Service Provider (ISP);
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Pendukung Sandi dan Telekomunikasi;
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Perangkat Internet/Website;
 - Pembuatan Aplikasi Sistem Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias.

14.1.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 23.616.000.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 20.835.258.737,-** atau **88,23 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2016, secara rinci dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-39
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintah Umum
Yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab Nias
Tahun 2016

14.1.5. Hasil Capaian Kinerja

Secara umum, penyelenggaraan pelaksanaan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 dapat dikatakan berhasil. Adapun hasil capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan efektif (*Good Governance and Clean Government*) merupakan salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011–2016 sebagai elemen penting dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ini meliputi:

a. Penataan ketatalaksanaan organisasi dan perangkat daerah, meliputi:

- Terlaksananya persiapan P3D untuk Daerah Otonom Baru (Kota Gunungsitoli) sebanyak 1 (satu) Kali;
- Terlaksananya Pemetaan Urusan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Nias berdasarkan Revisi PP 41 Tahun 2007 (1 Dokumen);
- Tersusunnya Dokumen jabatan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (1 Dokumen);
- Tersusunnya Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias (1 Dokumen);
- Tersusunnya Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 (1 Dokumen);
- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nias (1 Kali);
- Tersusunnya Naskah Akademik Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias (1 Dokumen);
- Tersusunnya Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (1 Dokumen);
- Terlaksananya kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias;
- Terlaksananya Kegiatan POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias;
- Tersusunnya Buku Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nias Tahun 2016;
- Tersusunnya Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias;
- Terlaksananya Persiapan Pengalihan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Nias Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1 Dokumen);
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias (1 Dokumen);
- Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (1 Dokumen);

b. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, meliputi :

- Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016;
- Tersusunnya Peraturan Bupati Nias Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 sebanyak 3 (tiga) Dokumen yakni:
 1. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016;

2. Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016; dan
 3. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016;
 - Tersusunnya Peraturan Bupati Nias tentang Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - Tersusunnya Keputusan Bupati Nias Nomor 640/1022/K/Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Berdasarkan Wilayah Tujuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Oleh Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta Dharma Wanita Persatuan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 (satu) dokumen.
 - c. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - Tersusunnya Keputusan Bupati Nias tentang Pengangkatan/Penghunjujkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Tersusunnya Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017;
 - d. Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. Laporan Kegiatan Harian dan Bulanan Bupati Nias sebanyak 12 eksemplar dan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara setiap Tanggal 5 bulan berkenaan pada Tahun 2016;
 - f. Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintahan Kabupaten Nias sebanyak 2 (dua) kali, dengan hasil adanya informasi sejauhmana pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dan tersosialisasinya kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias kepada seluruh SKPD;
 - g. Terlaksananya Temu Pisah FORKOPIMDA/Muspida Plus Kabupaten Nias Tahun 2016;
 - h. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Hari Jadi Kabupaten Nias (1 Dokumen);
 - i. Tersusunnya dokumen Memori Jabatan Bupati Nias Periode 2011-2016 (1 Dokumen);
 - j. Terlaksananya pengambilan titik koordinat Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Nias dan telah dan disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara pada bulan Juli 2016;
 - k. Terlaksananya Identifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 62 Lokasi;
 - l. Terlaksananya pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2016 sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) berkas;
 - m. Terlaksananya pembuatan dan pemasangan pilar permanen/patok pada batas-batas tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 27 lokasi.
 - n. Terlaksananya survey lokasi tanah yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 23 persil dan telah diajukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias untuk mendapatkan sertifikat tanah;
 - o. Terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Sertifikat Tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias;
 - p. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah-masalah tanah milik Pemerintah kabupaten Nias sebanyak 4 kasus;
 - q. Terlaksananya Perintisan Batas tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias yang terletak di Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan dhi. Kantor Bupati Nias dan DPRD Kabupaten Nias;
 - r. Terlaksananya kunjungan kerja Bupati Nias/Wakil Bupati Nias ke 4 (empat) wilayah Kecamatan di Kabupaten Nias.
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel adalah indikator kunci dari kaidah *good governance*. Hal ini ditempuh melalui pemantapan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban aparatur pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien,

efektif serta memenuhi prinsip tepat waktu dengan standar yang baku serta didukung dengan sistem informasi yang memadai. Memenuhi sasaran dimaksud, indikator kinerja yang dicapai adalah:

- a. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nias Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara sebanyak (1 Dokumen);
 - b. Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Nias sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - c. Tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Nias Tahun 2015 dan telah disampaikan melalui Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - d. Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - e. Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - f. Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - g. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - h. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - i. Tersusunnya Laporan Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - j. Tersusunnya Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nias TA. 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - k. Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Nias TA. 2016 sebanyak 1 (satu) dokumen;
 - l. Terlaksananya penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - m. Terlaksananya Pameran Pembangunan Tahun 2016.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terus diupayakan melalui pemenuhan standar dan prosedur yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan publik. Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:
- a. Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - b. Terlaksananya Penyuluhan Hukum di wilayah Kabupaten Nias (Kecamatan Ulugawo dan Kecamatan Ma'u);
 - c. Terlaksananya Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kabupaten Nias;
 - d. Terlaksananya Pembentukan Sekretariat Bersama Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum kepada Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Terbentuknya Tim Fasilitasi Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) Kabupaten Nias;
 - f. Terlaksananya pemberian penghargaan (Reward) kepada SKPD berkinerja lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (10 SKPD: Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, BPKAD, BAPPEDA dan Penanaman Modal, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, BP2A-KB, Dinas TRPK, BPMDDK, Dinas Perindagtamben dan ESDM.);
 - g. Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nias;
 - h. Terlaksananya pemilihan Kecamatan/Camat Terbaik Tingkat Kabupaten Nias Tahun 2016, dengan hasil Kecamatan/Camat Gido meraih Predikat Terbaik I Kecamatan/Camat Terbaik Tingkat Kabupaten Nias Tahun 2016, dan telah dilaksanakan upacara penyerahan Tunggal Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Nias Tahun 2016 di lapangan Beringin Desa Hiliweto Kecamatan Gido;
 - i. Tersusunnya bahan rapat Unsur Muspida Kabupaten Nias dan telah disampaikan sebagai bahan pembahasan pada setiap pelaksanaan Rapat Unsur Muspida.
4. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa
- Capaian kinerja dari peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa meliputi :
- a. Tersusunnya Peraturan Bupati Nias tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Nias (1 Dokumen)
 - b. Tersusunnya Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias (1 Dokumen);
 - c. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa di Kabupaten Nias (1 Dokumen);

- d. Tersusunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penataan Desa di Kabupaten Nias (1 Dokumen);
 - e. Tersusunnya Peraturan Bupati Nias Nomor 71 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Nias (1 Dokumen);
 - f. Terlaksananya rapat Koordinasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias;
 - g. Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Nias;
 - h. Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - i. Terlaksananya Pelatihan dan Pembekalan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi Kepala Desa Terpilih Tahun Anggaran 2016 se-Kabupaten Nias (73 orang);
 - j. Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias;
 - k. Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2016 di Kabupaten Nias (73 orang);
 - l. Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa di Kab. Nias;
5. Peningkatan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan program dan kegiatan yang menyediakan layanan informasi kepada publik, meliputi:
- a. Terbentuknya PPID Utama dan Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. Pengoperasian dan pemeliharaan website/situs internet Pemerintah Kab. Nias;
 - c. Pelaksanaan temu pers sebanyak 2 (dua) kali;
 - d. Tersusunnya Dokumen Informasi, Data dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nias;
 - e. Terselenggaranya unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Nias;
 - f. Tersedianya aplikasi Sistem Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias;
 - g. Tersusunnya Buletin Pemerintah Kabupaten Nias (Buletin Datatuwu).
6. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan bidang perekonomian
Salah satu tugas penting pemerintahan daerah adalah melakukan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Capaian program dan kegiatan meliputi :
- a. Tersusunnya Data Laporan Kegiatan Perekonomian (1 Dokumen);
 - b. Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) di Wilayah Kabupaten Nias. Penerima Raskin pada Tahun 2016 berjumlah 10.161 penerima manfaat;
 - c. Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Nias;
 - d. Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Nias.
 - e. Tersusunnya Peraturan Bupati Nias Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Minyak Tanah di Kabupaten Nias (1 Dokumen);
 - f. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu (1 Dokumen);
 - g. Tersusunnya Naskah Akademik tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uumbu Kabupaten Nias (1 Dokumen);
 - h. Terlaksananya pemilihan Direktur PDAM Tirta Uumbu Kabupaten Nias Periode 2016-2020;
 - i. Terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Nias.
7. Penataan peraturan perundang-undangan
Capaian kinerja pada program penataan peraturan perundang-undangan adalah :
- a. Penerbitan Produk Hukum Daerah
Dengan produk hukum yang telah diterbitkan dalam kurun waktu Tahun 2016, sebagai berikut:
 - Peraturan Daerah sebanyak 14 buah
 - Peraturan Bupati sebanyak 75 buah
 - Keputusan Bupati sebanyak 1025 buah
 - Instruksi Bupati sebanyak 1 buah
 - MoU sebanyak 25 buah
 - b. Dokumentasi/Koleksi Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi pelaksanaan setiap tahun (jenis, volume dan bentuk) yakni Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias selama Tahun 2016 telah dihimpun dalam buku himpunan sebanyak 4 (empat) jilid.

- c. Pemberian Bantuan Hukum
 - Pemberian bantuan hukum pada prinsipnya diberikan terhadap setiap pejabat yang terkait.
 - Bantuan hukum yang disediakan yakni sebagai kuasa, mendampingi dan memfasilitasi.
8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial serta kerukunan umat beragama
- Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan kerukunan umat beragama serta pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja antara lain:
- a. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan hari-hari besar keagamaan;
 - b. Pelaksanaan kuliah agama;
 - c. Terlaksananya verifikasi dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang diusulkan oleh Organisasi Keagamaan di Kabupaten Nias.

Dalam merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016, telah ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Secara umum tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nias. Dalam tujuan pembangunan tersebut ditetapkan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai selama jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dalam rentang waktu masa RPJMD. Secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel : 4-40

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I.	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan PILKADA Kab. Nias					
1	Desk Pemilukada Kabupaten Nias	Keg	1	-	-	-
II	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
2	Petunjuk Pelaksanaan APBD	Dok.	1	1	1	Tercapai
3	Rapat Kerja Pemerintahan	Kali	1	2	2	Tercapai
III	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah					
4	Standar Biaya Umum	Dok.	1	1	4	Tercapai
5	Data pembangunan fisik di Kabupaten Nias	Dok.	1	1	1	Tercapai
6	Dokumen LPPD Kab. Nias	Dok.	1	1	1	Tercapai
7	Dokumen ILPPD Kab. Nias	Dok.	-	1	1	Tercapai
8	Dokumen Laporan Kegiatan Harian/Bulanan Bupati Nias	Dok.	1	1	1	Tercapai
9	Dokumen LPPD akhir masa Jabatan Bupati Nias	Dok.	-	1	1	Tercapai
10	Memori jabatan Bupati Nias	Dok.	-	1	1	Tercapai
11	Tingkat ketepatan penyaluran Raskin	%	95	100	100	Tercapai
12	Tingkat ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	%	80	100	100	Tercapai
13	Tingkat ketepatan penyaluran BBM bersubsidi	%	80	100	100	Tercapai
14	Tingkat ketepatan penyaluran LPG bersubsidi	%	0	100	-	Tidak Tercapai
IV	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					
15	Dokumen Produk Hukum Daerah	Dok.	1	1	1	Tercapai
16	Eksaminasi, evaluasi produk hukum daerah	Dok.	1	1	1	Tercapai

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
17	Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	Dok.	-	7	14	Tercapai
V	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					
18	Pembentukan Kecamatan Baru	Kec.	9	-	-	-
19	Pembentukan Desa Baru	Desa	119	-	-	-
20	Meningkatnya status desa menjadi kelurahan	Kel.	-	-	-	-
21	Tapal batas kecamatan	Kec.		1	-	Tidak Tercapai
22	Tapal batas desa	Desa	-	5	10	Tercapai
23	Penetapan lokasi Ibukota Kab. Nias	Kali	-	-	1	Tercapai
VI	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah					
24	Pedoman tata naskah dinas satuan kerja perangkat daerah	Dok.	1	-	-	-
25	Lanjutan penyerahan P3D kepada DOB	Dok.	1	1	1	Tercapai
VII	Program Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah					
26	Struktur organisasi pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi	SKPD	37	< 35	41	Tidak Tercapai
27	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Unit	-	-	-	-
VIII	Program Penyelenggaraan Analisis Jabatan					
28	Dokumen analisis jabatan satuan kerja perangkat daerah	%	2,85	-	-	-
29	Dokumen analisis beban kerja	%	-	-	-	-
IX	Program Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah					
30	Jumlah SPM yang ditetapkan	SPM	1	-	-	-
X	Program Penegakan Hukum					
31	Penyuluhan hukum	Keg	-	1	2	Tercapai
32	Pelayanan Pendampingan Hukum	%	100	100	100	Tercapai
XI	Program Pendokumentasian Produk Hukum					
33	Kegiatan pendokumentasian produk hukum daerah	Keg.	2	2	2	Tercapai
XII	Program Penataan Administrasi Pemerintahan					
34	Data/ informasi nama rupabumi	Dok.	-	1	1	Tercapai
35	Nomor kode wilayah administrasi pemerintahan	Dok.	1	-	-	-
XIII	Program Pemilihan Kepala Desa					
36	Kepala desa defenitif meningkat	Desa	53	25	73	Tercapai
XIV	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
37	Standarisasi Indeks Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang didasarkan pada pembobotan beban tugas, serta pembayarannya didasarkan pada indikator capaian kinerja dan indikator kedisiplinan	Dok.	-	1	1	Tercapai
38	Standarisasi Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang bertugas di daerah terpencil atau melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.	Dok.	-	1	1	Tercapai
XV	Program Pemberian Bantuan Duka					
39	Bantuan sosial bagi PNSD dan Kepala Desa	Keg	1	1	-	Tidak Tercapai

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
XVI	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
40	Penyelesaian kasus-kasus tanah milik Pemkab Nias	%	0	100	100	Tercapai
41	Pensertifikatan tanah milik Pemkab Nias	Sertifikat	23	20	27	Tercapai
42	Izin prinsip/rekomendasi lokasi	Izin		-	2	Tercapai
XVII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					
43	Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih dalam bidang pemerintahan desa dan pengelolaan administrasi desa	%	-	100	100	Tercapai
44	Persentase aparatur pemerintahan desa terlatih dalam bidang pengelolaan keuangan desa	%	-	100	100	Tercapai
45	Persentase pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang termasuk kategori baik	%		100	100	Tercapai
XVIII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
46	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Keg		1	1	Tercapai
XIX	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan					
47	Kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Keg		2	3	Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Dari tabel di atas, beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dicapai sampai dengan Tahun 2016, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa Program dan Indikator yang capaian kerjanya telah terlaksana pada Tahun sebelumnya.
2. Target pembentukan kecamatan baru, selain karena adanya kebijakan Pemerintah yakni moratorium pemekaran wilayah, juga disebabkan karena persyaratan pembentukan kecamatan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang sangat sulit dipenuhi dengan keadaan wilayah Kabupaten Nias saat ini yakni:
 - a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan, minimal 5 (lima) tahun;
 - b. Cakupan wilayah kecamatan yang akan dibentuk untuk daerah kabupaten, paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan.
3. Peningkatan status Desa menjadi Kelurahan tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 21 huruf b yang menyatakan bahwa perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali.
4. Untuk pelaksanaan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias disebabkan oleh beberapa hal:
 - a. Adanya masalah/konflik batas tanah yang akan disertifikatkan antara penghibah dengan pemilik lahan yang berbatasan.
 - b. Banyaknya surat hibah tanah yang membutuhkan klarifikasi baik materi maupun penegasan ukuran dan batas di lapangan.
 - c. Adanya aturan hutan lindung yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, sehingga mengakibatkan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias yang berada di wilayah Kecamatan Somolo-molo, Ma'u, Hiliserangkai, Botomuzoi dan Hiliduhu tidak dapat diajukan pensertifikatan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias.
5. Konversi minyak tanah ke LPG belum dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nias dikarenakan fasilitas LPG di Kepulauan Nias belum tersedia dan sarana transportasi dan infrastruktur yang mendukung penggunaan LPG ke seluruh desa belum memadai.

6. Pelaksanaan Program dan kegiatan pemberian Bantuan Sosial kepada PNSD dan Kepala Desa belum dapat terlaksana pada Tahun 2016 yang disebabkan belum adanya regulasi daerah terkait kegiatan dimaksud.
7. Dengan terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias yang sebelumnya termasuk Bagian Administrasi Keuangan dalam SKPD Setda Kabupaten Nias berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias maka capaian kinerja mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias tidak lagi menjadi bagian capaian kinerja SKPD Sekretariat Daerah Kab. Nias.

14.1.6. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- c. Adanya anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya dikarenakan adanya aturan baru yang membatasi penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.
- d. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Adanya Kegiatan yang tertunda dikarenakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya belum keluar ataupun belum ditetapkan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut diatas, maka solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur melalui Diklat dan Bimtek;
- b. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan fasilitas yang ada seiring dengan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- c. Agar diprogramkan kembali pelaksanaan kegiatan yang tertunda pada APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 serta dilakukan penyesuaian kembali pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan percepatan dalam menyiapkan dasar hukum pelaksanaan setiap kegiatan

14.2. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS

14.2.1. Gambaran Umum

Peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam era otonomi daerah, sangat strategis dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah khususnya dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislative yang pada saat ini cukup rentan dengan berbagai polemik kepentingan. Hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang baik yang diantaranya mengandung nilai-nilai demokratis, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta melibatkan masyarakat luas, aktif dan nyata dalam setiap program pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah secara bersama. Salah satu indikator berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peran Sekretaris DPRD tersebut, menuntut peningkatan kemampuan dan kecakapan manajerial serta kepekaan dalam merespons aspirasi masyarakat yang berkembang khususnya dalam menerapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) agar kebijakan yang ditempuh tetap mengacu kepada kepentingan masyarakat. Sebab terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga yang memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menduduki posisi yang cukup strategis dalam mendukung tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut hakekatnya merupakan visi dan misi masyarakat yang telah mempercayakan suaranya kepada para wakilnya di lembaga DPRD, dengan kata lain, Sekretariat DPRD harus

tumbuh menjadi unit organisasi yang dapat memberikan pelayanan yang prima untuk mendukung aktivitas Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, tentunya diperlukan unsur aparatur yang profesional dan memiliki kinerja yang handal.

Profesionalisme aparat dan citra pelayanan publik adalah dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan peran sesuai bidang tugas yang di emban, aparat sudah seharusnya selalu berusaha meningkatkan kualitas diri yang menyangkut keahlian, memahami hakekat dan tanggung jawab profesi. Pelayanan publik yang profesional artinya yang bercirikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan.

14.2.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka arah kebijakan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Nias difokuskan pada peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.2.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat DPRD selama Tahun 2016 adalah **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, sebagaimana tertuang dalam dokumen DPA/DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Nias tahun 2016, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah;
- b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
- c. Kegiatan reses;
- d. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- e. Kegiatan Panitia-Panitia Khusus DPRD;
- f. Kegiatan Badan Kehormatan DPRD;
- g. Kegiatan Komisi-Komisi DPRD;
- h. Kegiatan Badan Musyawarah;
- i. Kegiatan Badan Anggaran;
- j. Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- k. Penyediaan buku risalah-risalah rapat dan dokumentasi kegiatan-kegiatan DPRD;
- l. Operasional Sekretariat Fraksi-Fraksi DPRD;
- m. Survey besaran tarif tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias;
- n. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- o. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias beserta Keluarga;
- p. Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW).

14.2.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan umum pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 23.895.998.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 18.219.464.711,-** atau **76,24 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang pemerintahan umum pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 4-41
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Bidang Pemerintahan Umum
pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2016

14.2.5. Hasil Capaian Kinerja

Dalam penyelenggaraan urusan bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias kurun waktu 2016, capaian kinerja yang telah berhasil dilaksanakan dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-42
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Pencapaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					
1.	Persentase Implementasi Fungsi Pengawasan	%	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase Implementasi Fungsi Legislasi	%	100	100	85	Tidak Tercapai
3.	Persentase Implementasi Fungsi Anggaran	%	100	100	100	Tercapai
4.	Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	buah		7	17	Tercapai
5.	Kegiatan Reses DPRD	kali		3	3	Tercapai
6.	Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD	kali		6	7	Tercapai
7.	Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD	kali		2	2	Tercapai
8.	Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD	kali		3	3	Tercapai
9.	Rapat Kerja DPRD	kali		2	1	Tidak Tercapai
10.	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat/agama	kali		2	-	Tidak Tercapai
11.	Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPRD	kali		2	2	Tercapai
12.	Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD	kali		1	2	Tercapai

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Nias

14.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum pada Tahun Anggaran 2016, beberapa masalah yang ditemui oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

- Permasalahan Umum (kumulatif) adalah seluruh indikator kinerja Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan terintegrasi secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran yang melekat pada DPRD
- Permasalahan khusus Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Terbatasnya SDM utamanya PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias sehingga fasilitasi terhadap kegiatan DPRD tidak tepat waktu.
 - ❖ Padatnya agenda kegiatan-kegiatan DPRD baik dalam daerah maupun luar daerah.

Untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan umum pemerintahan selama Tahun Anggaran 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Mengorganisir dan mengarahkan PNS yang ada dengan pemberian motivasi yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan berorientasi pada pencapaian target kinerja kegiatan secara efektif dan proporsional dan memaksimalkan kemampuan PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias melalui keikutsertaan pada Bimtek, Pelatihan, Workshop ataupun sejenisnya.

- b. Mengusulkan kepada Pimpinan tentang penambahan tenaga PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Nias sehingga tugas fasilitasi terhadap kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
- c. Sebagai strategi pemecahan masalah pada masa yang akan datang, Sekretariat DPRD Kabupaten Nias akan melakukan upaya mendorong terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan agenda kegiatan DPRD Kabupaten Nias pada setiap masa persidangan untuk menjamin terlaksana fungsi legislasi / pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan secara optimal.

14.3. DINAS PENDAPATAN KABUPATEN NIAS

14.3.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias, Dinas Pendapatan Kabupaten Nias sebagai salah satu SKPD pengelola pendapatan daerah dan sekaligus sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah Kabupaten Nias berkewajiban untuk memberhasilkan pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan dalam APBD dan P. APBD Kabupaten Nias.

14.3.2. Arah Kebijakan

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah beberapa kebijakan di bidang Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- b. Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- c. Peningkatan kesadaran para Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- d. Peningkatan pengawasan atas pemungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- e. Peningkatan koordinasi antara SKPD pengelola Pendapatan Daerah dan instansi terkait lainnya.
- f. Penegakan Peraturan Daerah dalam memberhasilkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

14.3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Nias telah melaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, dengan kegiatan :
 1. Penyampaian SPPT dan DHKP PBB.
 2. Penyampaian SKP Daerah kepada WP.
 3. Penagihan Tunggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah.
 5. Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Nias.
 6. Rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
 7. Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Tahun 1999-2009.
 8. Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nias.
- b. **Program Pemantauan dan Pengendalian Program di Bidang Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan :
 1. Rapat Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 2. Penyusunan Data Setoran PAD dan Pengendalian Benda Berharga di UKP PAD.
 3. Monitoring dan Verifikasi SKHPK/ SKHPL Pemanfaatan Kios/Lods Pasar Beringin dan Pasar Ex Gudang Garam serta Pasar Tradisional di Kecamatan Idanogawo, Bawolato dan Kecamatan Hiliduho.

4. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Kios/ Lods Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kab. Nias.
 5. Penyesuaian dan Pengendalian Benda Berharga di Kecamatan.
 6. Uji Petik Pemungutan Retribusi di Pasar Pekan.
 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Verifikasi Data Wajib Pajak PBB-P2.
- c. **Program Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan:
1. Perhitungan dan Penetapan Pajak/ Retribusi Daerah.
 2. Sosialisasi Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kab. Nias.
- d. **Program Pendataan dan Pendaftaran Subjek/Objek Pajak/Retribusi Daerah**, dengan kegiatan:
1. Pendataan dan Peremajaan Objek/Subjek PAD.
 2. Pelaksanaan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat tentang Pajak Reklame.
 3. Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
 4. Pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Nias.

14.3.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Nias pada Tahun 2016 telah dialokasikan Anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 1.973.700.000,00** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.813.498.430,00** atau **91,88%**.

Gambaran umum realisasi anggaran penyelenggaraan program dan kegiatan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian pada SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Nias tahun 2016, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel : 4-43
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun 2016

14.3.5. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capaian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nias pada Tahun 2016 sebagai dampak realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD serta kebijakan dan upaya yang telah ditempuh dalam hal pencapaian target kinerja yang telah tertuang dalam RPJMD, antara lain:

1. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pengalihan penanganan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias.
3. Penataan, pengendalian dan evaluasi objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Pencapaian target kinerja tersebut diatas dapat diuraikan capaian kinerja tahun 2016 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel : 4-44
Capaian Kinerja Urusan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah					
01	Penyesuaian data setoran PAD dan pengendalian benda berharga di Unit Kerja Pengelola PAD	Kali	4	8	12	Tercapai
02	Monitoring pemanfaatan kios/ los dan pelataran pasar/ pekan serta penelitian izin kios dan los di Kecamatan	Kec	9	9	10	Tercapai
03	Penyesuaian dan pengendalian benda berharga di kecamatan	Kec	9	9	10	Tercapai
04	Pemantauan dan evaluasi penerimaan PBB	Kec	-	9	10	Tercapai
05	Uji Petik pemungutan retribusi di pasar pekan	Kec	-	-	8	Tercapai
II	Program Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pendapatan Daerah					
06	Aplikasi Pajak Daerah Online	%	-	100	-	Tidak Tercapai
07	Aplikasi BPHTB Online	%	-	100	-	Tidak Tercapai
08	Aplikasi PBB Online	%	-	100	100	Tercapai
09	Tersedianya sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah	Keg		1	1	Tercapai
10	Jumlah Pos Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Unit	-	9	9	Tercapai
III	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah :					
11	Pajak Daerah	Miliar	1,99	1,34	3,96	Tercapai
12	Retribusi Daerah	Miliar	6,37	13,12	42,04	Tercapai
13	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Miliar	4,41	8,00	6,09	Tidak Tercapai
14	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Miliar	4,86	1,88	8,7	Tercapai
IV	Program Pendataan dan Pendaftaran Subjek/ Objek Pajak/ Retribusi Daerah					
15	Jumlah kegiatan pendataan Wajib/Objek Pajak Retribusi Daerah	Keg	-	2	2	Tercapai

Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Nias

Selanjutnya, dijelaskan bahwa beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat terealisasi antara lain : Jumlah Pos Pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan hal ini sebabkan Lokasi Bahan Galian Bukan Logam dan Batuan hanya berada di 5 Kecamatan Wilayah Kabupaten Nias dengan 9 lokasi pemungutan.

14.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nias harus diakui bahwa ada beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, namun permasalahan tersebut tidak menjadi kendala yang berarti dalam memberhasilkan program dan kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengakibatkan berkurangnya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut sehingga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Penagihan tunggakan pajak daerah (piutang pada tahun 2006) sangat sulit direalisasikan disebabkan karena alamat subjek/ objek pajak daerah berubah-ubah terutama subjek/objek pajak daerah (Pajak BGG'C) pada masa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias.
3. Kesadaran para penyewa kios dan los pasar pekan dalam memperpanjang izin penyewaan kios dan los pasar pekan sangat rendah.
4. Pemanfaatan kios dan los pasar pekan oleh para pedagang belum maksimal, hal ini disebabkan karena para pedagang tidak bersedia memanfaatkan kios/los dengan berbagai alasan termasuk tata lokasi dan regulasi sehingga hal ini mengakibatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari pos retribusi pasar pekan tidak maksimal.

Untuk menanggulangi beberapa permasalahan tersebut di atas telah diambil langkah-langkah konkrit sebagai solusi antara lain:

1. Memaksimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Memaksimalkan upaya penagihan, serta melaksanakan identifikasi sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang penghapusan piutang Pajak/ Retribusi Daerah, bagi piutang pajak yang secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan.
3. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pemakaian dan perpanjangan izin sewa kios dan los.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan pasar tradisional yang sudah dibangun dan belum berfungsi melalui koordinasi lintas SKPD.

14.4. BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN NIAS

14.4.1. Kondisi Umum

Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias. Tugas, fungsi dan tata kerja lembaga ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias. Pembentukan lembaga teknis ini pada hakekatnya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara garis besar, Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah dibidang penelitian, pengembangan dan statistik.

Memasuki Tahun Anggaran 2016, Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias telah memulai dan secara bertahap telah mengoptimalkan kinerja bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Nias, sebagaimana dimaksud dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 yaitu : "Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan mandiri di Kabupaten Nias yang nyaman didiami karena dilayani oleh pemerintah yang bersih dan responsive".

14.4.2. Arah Kebijakan

Secara umum arah kebijakan dari program kegiatan Badan Penelitian, Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian data terbaru (up to date) dari berbagai sektor riil di Kabupaten Nias, untuk dipublikasikan kepada public sebagai media informasi resmi tentang profil Kabupaten Nias, kiranya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (stake holder) ;
2. Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan (Jarlitbangdik) di Kabupaten Nias.
3. Melakukan Penelitian Tentang Unsur Hara Tanah di Kabupaten Nias
4. Memberikan pelayanan administrasi dan teknis terhadap Perguruan Tinggi yang akan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Nias.

14.4.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias pada Tahun 2016 dalam penyelenggaraan Bidang Statistik Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Buku Nias Dalam Angka Tahun 2016
 - b. Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias Tahun 2016
 - c. Penyusunan Buku Indeks Harga Bahan Konstruksi dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IHBK-IKK) Kabupaten Nias Tahun 2016
 - d. Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias Tahun 2016
 - e. Penyusunan Buku Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Nias Tahun 2016
 - f. Penyusunan Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kabupaten Nias Tahun 2016.
2. **Program Pengkajian dan Penelitian**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Tim Kelompok Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pendidikan
 - b. Penelitian Tentang Unsur Hara Tanah di Kabupaten Nias
 - c. Fasilitasi Pemrosesan Penerbitan Izin Penelitian.
 - d. Fasilitasi Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Nias

14.4.4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan umum, serta urusan bidang penelitian, pengembangan dan statistik maka pada tahun 2016 Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias mendapat alokasi belanja langsung sebesar **Rp. 1.298.220.000,-** dan telah direalisasi sebesar **Rp. 1.236.511.635,-** atau **95,25 persen**.

Uraian pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang-bidang tersebut di atas untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel : 4-45
Realisasi Program dan kegiatan Penyelenggaran Bidang Statistik
pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kab. Nias
Tahun 2016

14.4.5. Hasil Capaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan TA 2016 yang terkait dengan bidang Statistik Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias telah menghasilkan 6 (enam) Buku Statistik, yaitu :

- Penerbitan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- Penerbitan buku Nias Dalam Angka (NDA) yang memuat data dan informasi daerah Kabupaten Nias Tahun 2016
- Penerbitan buku Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Nias Tahun 2016
- Penerbitan buku Data Indeks Harga Bahan Konstruksi Kemahalan Konstruksi Kabupaten Nias Tahun 2016.
- Penerbitan buku Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Nias Tahun 2016.
- Penerbitan Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kabupaten Nias Tahun 2016.

Sedangkan Kegiatan pada Program Pengkajian dan Penelitian telah terlaksana beberapa kegiatan yaitu :

- Telaksananya Fasilitasi Tim Kelompok Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pendidikan di Kabupaten Nias
- Terlaksananya Penelitian tentang Unsur Hara Tanah di Kabupaten Nias
- Fasilitasi Pemrosesan Penerbitan Izin Penelitian.

Tabel : 4-46
Capaian Kinerja bidang Statistik pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		% Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
1	Buku Nias Dalam Angka	Dok.	1	1	1	Tercapai
2	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Dok.	1	1	1	Tercapai
3	Buku Indeks Harga Bahan Konstruksi dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IHBK/IKK)	Dok.	1	1	1	Tercapai
4	Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dok.	1	1	1	Tercapai
5	Buku <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	Dok.	1	1	1	Tercapai
6	Buku Analisis ketimpangan Pendapatan Penduduk Kab. Nias	Dok.	1	1	1	Tercapai
7	Koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan Kab. Nias	Keg	1	1	1	Tercapai
8	Kegiatan pemanfaatan teknologi Biogas	Keg	-	2	0	Tidak Tercapai

Sumber : Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kab. Nias

14.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi selama ini, khususnya menyangkut pelaksanaan urusan bidang penelitian, pengembangan dan statistik, adalah :

- Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan menganalisa dan mengembangkan data dan informasi
- Belum maksimalnya pemberdayaan para peneliti yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Peneliti ;
- Terbatasnya fasilitas atau sarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengumpulan data statistik ;
- Tidak tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan penelitian.

Terkait dengan masalah yang muncul sebagaimana diuraikan di atas, maka berikut ini kami sarankan beberapa solusi sebagai berikut :

1. Diklat bagi Aparatur Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias.
2. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti sebagai tenaga teknis dalam melakukan kerja penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nias ;
3. Pengadaan fasilitas pendukung kegiatan penelitian, pengkajian dan penghimpunan data statistik.
4. Dukungan yang maksimal dari pihak Pemerintah Kabupaten Nias dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif, terutama menyangkut penempatan personil PNS yang sesuai antara latar belakang pendidikan formal dan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga teknis ini, serta dukungan dana operasional terutama menyangkut anggaran bidang penelitian dan pengembangan.

14.5. INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS

14.5.1. Gambaran Umum

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nias melaksanakan pengawasan fungsional internal atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Inventaris dan Aset serta Pengelolaan Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan yang didasari pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Nias dan pemeriksaan yang diluar PKPT (Non PKPT).

Pemeriksaan sesuai PKPT yang berpedoman pada :

1. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa :
 - a. Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
 - b. Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
 - c. Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
 - d. Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Permendagri Nomor 2 tahun 2008 yang menyatakan " Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan saran kepada Pimpinan komponen yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan materi pemeriksaan mencakup :
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. Pengelolaan keuangan;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana.

Sedangkan pemeriksaan yang diluar PKPT (Non PKPT) adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus atas hal-hal lain di bidang keuangan, kepegawaian dan audit investigatif.

Secara umum tugas-tugas pengawasan tersebut meliputi :

- a. Pemeriksaan reguler;
- b. Pemeriksaan khusus kasus dan Sertijab;
- c. Monitoring tindak lanjut;
- d. Monitoring aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (aksi PPK);
- e. Reviu yang terdiri atas :
 - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias, Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- Reviu RKA SKPD dan PPKD.

Substansi pokok rencana kerja Inspektorat Kabupaten Nias adalah mengoptimalkan pencapaian sasaran program dan kegiatan setiap tahunnya dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya.

14.5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan urusan Pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan Pemerintahan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah dan terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*Clean Government dan Good Governance*).
- b. Memberantas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan aparatur Negara yang didukung dengan penegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mewujudkan kompetensi aparatur pengawas yang professional dan bertanggungjawab sehingga dapat mewujudkan pengawasan yang berkualitas.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang sinergi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam rangka memberhasilkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias.

14.5.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan pengawasan selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**, dengan kegiatan :
 - a. Menyusun Usul Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Rekonsiliasi PKPT Antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se Sumatera Utara
2. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan uraian kegiatan :
 1. Melaksanakan Pemeriksaan audit regular satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;
 2. Melaksanakan Pemeriksaan audit regular Proyek-proyek Pembangunan yang dikelola oleh Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dengan uraian kegiatan pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat, sertijab dan khusus lainnya;
 - c. Tindak lanjut hasil pertemuan pengawasan;
 - d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan uraian kegiatan:
 1. Melaksanakan Monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan.
 2. Rapat pemutakhiran data, koordinasi pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan
 3. Rapat koordinasi tindak lanjut pengawasan tingkat Kabupaten Nias.
 - f. Implementasi Sistem Pengendalian Internal pemerintah.
 - g. Pemeriksaan Biaya Operasional Sekolah (BOS);
 - h. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya;
 - i. Evaluasi dan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
 - j. Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kabupaten;
 - k. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - l. Operasional Tim TPKN/TP/TGR Kabupaten Nias;
 - m. Monitoring Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - n. Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;
 - o. Pemeriksaan Dana Desa;
 - p. Reviu RKA SKPD dan PPKD;
 - q. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

3. **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 - b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengawasan Fungsional.
4. **Program Pembinaan Ketaatan PNS Membayar Pajak-Pajak Pribadi**, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan, Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/PNS dan Guru-guru Gol. III/a ke atas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
5. **Program Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi**, dengan kegiatan :
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK).

14.5.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada SKPD Inspektorat Kabupaten Nias Tahun 2016 telah dialokasikan Anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 2.472.220.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.232.629.844,-** atau **90,31 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada SKPD Inspektorat Kabupaten Nias Tahun 2016 digambarkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 4-47
Realisasi Program dan kegiatan Bidang Pengawasan
Kabupaten Nias Tahun 2016

14.5.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada SKPD Inspektorat Kabupaten Nias digambarkan sebagai berikut:

1. Tindaklanjut Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tabel : 4-48
Tindaklanjut Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Tahun 2016

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		Jumlah	Nilai (Rp)	Setor (Rp)	Sisa (Rp)
1	Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler				
a.	Kerugian	52 Kasus	1.263.433.802,06	422.221.266,74	841.212.535,32
b.	Kewajiban Setor	52 Kasus	1.263.433.802,06	422.221.266,74	841.212.535,32

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Nias

2. Tindaklanjut Hasil Penyelesaian Temuan Administratif

Tabel : 4-49
Hasil Penyelesaian Temuan Administratif Tahun 2011 – 2016

No	Uraian	Jumlah Rekomendasi	Kategori Tindak lanjut Pemeriksaan Reguler Tahun 2011- 2016			Sisa
			Selesai	Dalam proses	Belum	
1	Reguler Inspektorat Kabupaten Nias dari tahun 2007 s.d. 2016	688	645	17	26	43
2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pengaduan Masyarakat, Sertijab Kepala SKPD, dana BOS, PNPM-MPd, DAK)	674	475	20	179	199
Jumlah		1362	1120	37	205	242

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Nias

3. Capaian Indikator Kinerja Pengawasan

Tabel : 4-50
Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah					
01	Pengawasan Internal, LHP Reguler yg meliputi Tupoksi, Aspek Pengelolaan Keuangan, Aspek SDM dan Aspek Pengelolaan Barang milik Daerah dan LHP BOS, DAK dan PNPM	LHP	53	82	64	Tidak Tercapai
02	Kasus pengaduan dan serah terima jabatan di lingkungan pemerintah daerah	LHP	14	50	37	Tidak Tercapai

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
03	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, termasuk tindak lanjut hasil audit BPK-RI	Dok	3	3	3	Tercapai
04	Dokumen evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Dok	81	82	82	Tercapai
05	Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijaksanaan KDH	Kali	2	2	1	Tidak Tercapai
06	Laporan Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Dok	1	1	1	Tercapai
07	Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	Dok	1	1	1	Tercapai
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
08	TPKN/TP/TGR Pemerintah Daerah	Keg		1	1	Tercapai
	Program Pembinaan Ketaatan PNS Membayar Pajak-Pajak Pribadi					
09	Ketaatan PNS untuk membayar pajak-pajak pribadi di lingkungan Pemerintah daerah	%	40,83	100	66,76	Tidak Tercapai
	Program Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi					
10	Kegiatan monitoring Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	Keg	1	1	0	Tidak Tercapai

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Nias

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 yang indikator kinerjanya tercapai meliputi :

1. Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kabupaten Nias dan Hasil Audit BPK RI sebanyak 3 Dokumen;
2. Dokumen evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan capaian 82 Dokumen.
3. Pelaksanaan review dan evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 1 dokumen;
4. Pelaksanaan review laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 1 dokumen;
5. TPKN/TP/TGR Pemerintah Daerah telah terlaksana sebanyak 1 kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2016 antara lain :

1. Pengawasan Internal, LHP Reguler yg meliputi Tupoksi, Aspek Pengelolaan Keuangan, Aspek SDM dan Aspek Pengelolaan Barang milik Daerah dan LHP BOS, DAK dan PNPM dengan capaian 64 LHP; Hal ini disebabkan karena :
 - a. Adanya penghentian kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Per 31 Desember 2014 sehingga berpengaruh atas jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan output dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan untuk tahun 2015 sampai dengan akhir tahun RPJMD pada tahun 2016;
 - b. Pada tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Nias lebih focus pada Kebijakan Nasional yang baru yaitu Pemeriksaan Dana Desa sesuai dengan yang diamanatkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Penanganan kasus pengaduan dan serah terima jabatan di lingkungan pemerintah daerah dengan capaian 37 LHP;
3. Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijaksanaan KDH dengan capaian 50 %. Hal ini disebabkan karena jumlah anggaran yang tertampung dalam APBD yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sangat terbatas.
4. Ketaatan PNS untuk membayar pajak-pajak pribadi di lingkungan Pemerintah daerah dengan capaian 66,76 %. Hal ini disebabkan karena kesadaran PNS untuk menyampaikan LP2P masih kurang. Jumlah Pejabat/PNS dan Guru-guru Gol. III/a ke atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang wajib menyampaikan LP2P sebanyak 2.148 orang namun yang menyampaikan sebanyak 1.434 orang dan yang belum sebanyak 714 Pejabat/PNS dan Guru-guru Gol. III/a ke atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Kegiatan monitoring Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang setiap tahunnya mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan regulasi untuk pelaksanaan kegiatan

tersebut dan pada tahun 2016 nomenklatur kegiatan ini adalah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2016 kegiatan ini belum terlaksana karena hingga akhir tahun 2016 Regulasi untuk pelaksanaan kegiatan ini belum terbit.

14.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengawasan yaitu :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia aparatur pengawas yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pengawasan yang spesifik. Tugas tersebut sangat membutuhkan latar belakang pengalaman dan pelatihan khusus pengawasan.
2. Rencana perubahan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Nias yang mempedomani Permen PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 mengisyaratkan bahwa Jabatan Struktural Kepala Seksi dibawah Inspektur Pembantu dihapus yang digantikan Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) akan berdampak pada ketersediaan sumber daya aparatur yang dipersiapkan untuk jabatan tersebut.
3. Jumlah anggaran yang tertampung dalam APBD yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Inspektorat Kabupaten Nias setiap tahun sangat terbatas;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang akan dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka solusi yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawas, melalui diklat dan Bimtek APIP yang didukung dengan penempatan sumber daya PNSD yang cakap dan menguasai bidang-bidang khusus;
2. Penyiapan sumber daya PNSD yang melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang akan berkarir secara profesional pada Jabatan Fungsional Auditor dan telah memiliki Standarisasi sebagai Auditor;
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Nias;
4. Peningkatan kemampuan Aparatur Inspektorat Kabupaten Nias dalam aspek penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

14.6. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NIAS

14.6.1. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang teratur dan terarah dengan meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma/ketentuan yang berlaku.

Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias dituntut untuk lebih berperan aktif, memiliki pemikiran yang berkembang, tanggap dan responsif terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias dibentuk berdasarkan PERDA Kab. Nias No. 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Nias, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias, yang mempedomani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) bahwa di setiap daerah dibentuk

Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan diperkuat oleh Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistimatis, bertahap konprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka mewujudkan Good Governance. Sejalan dengan itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias dihadapkan pada permasalahan dan hambatan yang merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan SKPD yang diuraikan sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi

- Penataan kembali (Redistribusi) Tenaga fungsional (guru, paramedis dan PPL).
- Pemerataan ASN secara proporsional pada seluruh SKPD.
- Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- Kenaikan pangkat/golongan belum menggambarkan adanya peningkatan kompetensi.

2. Perbaikan kualitas pelayanan publik

- Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM / aparatur secara optimal.
- Diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis IT;
- Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) bagi ASN harus mampu memberikan pemahaman/penghayatan kepada ASN sebagai pelayan masyarakat (Yanmas) dan peningkatan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan.

3. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah.

- Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal, yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan ASN dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya.
- Penerapan Prinsip Reward and Punishment yang belum efektif.
- Rendahnya tingkat disiplin, motivasi dan tanggungjawab ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

14.6.2. Arah Kebijakan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias selama tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD (2011-2016) dan RPJMD (2011-2016) secara bertahap melakukan perbaikan manajemen kepegawaian dalam melaksanakan pelayanannya dengan arah kebijakan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan penataan kembali (*Redistribusi*) penempatan tenaga-tenaga Fungsional (Guru, medis dan tenaga-tenaga penyuluh lapangan/PPL) secara proporsional di seluruh SKPD/unit kerja;
- b. Penempatan pejabat-pejabat Struktural yang didasarkan pada pertimbangan jenjang akademik, kompetensi dan prestasi kerja serta bebas KKN;
- c. Penerapan prinsip Reward dan Punishment;
- d. Peningkatan Kapasitas SDM aparatur;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian aparatur;
- f. Menyajikan informasi kepegawaian secara akurat, tepat waktu dan mudah diakses.

14.6.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan Bidang Kepegawaian Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Kedinasan, dengan kegiatan :

1. Bantuan kepada PNS Peserta Diklat

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pemberian Tambahan Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
2. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Mahasiswa Program D-IV Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

3. Pemrosesan SPMJ dan Daftar Penilaian Kinerja PNS
4. Tim Baperjakat Pemerintah Kabupaten Nias
5. Penyelenggaraan Pelantikan pejabat Struktural/ Fungsional;
6. Penyelenggaraan sumpah/janji bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS
7. Pemrosesan Surat Pernyataan Pelantikan
8. Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN Pemkab Nias
9. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
10. Pengelolaan sistem Aplikasi e-formasi (Kementerian PAN dan RB)
11. Pengelolaan dan Pengembangan Website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias
12. Penataan jaringan dan Pembekalan Teknis Operator Komputer
13. Pengelolaan Administrasi Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala
14. Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian
15. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
16. Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Usul Formasi CPNS
17. Seleksi Penerimaan Pegawai ASN Formasi Tahun 2016
18. Diklat Prajabatan
19. Pengelolaan Seleksi Administrasi Pendaftaran Peserta Diklat PIM IV, III dan II
20. Pengelolaan Administrasi dan Pendaftaran PNS Ujian Dinas TK.I dan TK.II
21. Pemberian Tambahan Biaya kepada PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tk. I dan Tk.II
22. Pengelolaan dan pemrosesan administrasi Keputusan Bupati Nias tentang Pemberian Tugas Belajar dan Surat Bupati Nias tentang Pemberian Izin Belajar
23. Pengelolaan administrasi peningkatan pendidikan
24. Pelayanan Administrasi Pengajuan Usul CPNS menjadi PNS
25. Pemrosesan pengangkatan, pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional tertentu
26. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
27. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
28. Tim Terpadu Penertiban dan Pembinaan PNS
29. Pemrosesan Berkas Administrasi Calon Pegawai ASN
30. Pengelolaan Usul Kenpang Pengabdian dan SK Pensiun bagi PNS dan Janda/Duda
31. Pelayanan Administrasi Pengajuan Usul Pemberian Satya Lencana bagi PNS
32. Pemberian Penghargaan kepada PNS Terbaik dan Berprestasi di Lingkungan Pemkab Nias
33. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
34. Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
35. Supervisi dan Pengelolaan Administrasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

14.6.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka menyelenggarakan urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias tahun 2016, telah dialokasikan anggaran **Belanja Langsung** sebesar **Rp. 6.049.728.600,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 5.246.658.865,-** atau **86,73 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 4-51
Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2016

14.6.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian Kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan urusan Bidang Kepegawaian Tahun 2016, antara lain :

- a. Keadaan Aparatur Sipil Negara pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada penambahan ASN melalui formasi umum, sedangkan di sisi lain ada banyak ASN yang pensiun baik karena mencapai batas usia pensiun maupun karena meninggal dunia atau pindah ke Kabupaten/kota lain. Keadaan jumlah Aparatur Sipil Negara selengkapnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : 4-52
Keadaan ASN Kabupaten Nias
Tahun 2010 - 2016

No.	Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		%% Capaian Kinerja 2016
				Target	Capaian	
1.	Struktural	Orang	-	1.389	1.280	92,15
2.	Fungsional					
	- Guru	Orang	1.574	1.274	943	80,94
	- Paramedis	Orang	497	373	362	75,05
	- PPL Pertanian	Orang	30	23	28	76,67
	- PPL KB	Orang	10	3	5	30
JUMLAH PNSD			-	2.818	2.696	100

- b. Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki, PNSD berpendidikan SD sebanyak 0,51 %, SLTP 0,61 %, SLTA 29,56 %, Diploma 23,30 %, Starata-I 43,01 % dan Strata – II sebanyak 3,01 %.

Tabel : 4-53
Keadaan Aparatur PNSD Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pegawai Struktural dan Fungsional Tahun 2016

No	Uraian	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S-2	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Struktural	0	0	148	81	260	58	547
2	Fungsional Umum	15	18	390	116	183	11	733
3	Fungsional Tertentu							
	a. Guru SD	0	0	223	199	436	0	858
	b. Guru SMP	0	0	12	29	177	1	219
	c. Guru SMA/K	0	0	2	8	153	2	165
	d. Pengawas/Penilik PLS	0	0	1	15	16	0	32
	e. PPL Pertanian	0	0	0	15	2	0	23
	f. PPL KB	0	0	94	1	0	0	3
	g. Dokter	0	0	6	0	22	17	39
	h. Paramedis	0	0	2	220	17	0	323
	i. Apoteker	0	0	0	0	4	0	4
	j. Asisten Apoteker	0	0	2	4	0	0	7
Total		22	35	941	683	1.330	80	2.953
Persentase		0,51	0,61	29,56	23,30	43,01	3,01	100,00

Secara umum, capaian kinerja bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias tahun 2016, dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-54
Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I Program Pendidikan Kedinasan						
01	Peserta Diklat PIM Tingkat II	Org		4	1	Tidak Tercapai
02	Peserta Diklat PIM Tingkat III	Org		6	8	Tercapai
03	Peserta Diklat PIM Tingkat IV	Org		15	10	Tidak Tercapai
II Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
04	Menurunnya jumlah PNS tenaga Fungsional yang bekerja pada Jabatan Struktural (didasarkan pada rekam Karir dan lama bekerja dalam Jabatan Struktural)	%	100	0	10	Tidak Tercapai
05	Berfungsinya Tim Baperjakat			Optimal	Optimal	Tercapai
06	Fit and Proper Test untuk Pengangkatan Eselon II dan Camat			Fit and Proper Test	-	Tidak Tercapai
07	Persentase pemenuhan Tenaga Medis dan para medis meningkat	%	34	90	75	Tidak Tercapai
08	Jumlah PNSD meningkat	Org	2.802	3.500	2.953	Tidak Tercapai
09	Kode Etik (Code of Conduct) PNSD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Dok		-	-	-
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas:						
10	D-1 Penilai PBB	Org	-	5	-	Tidak Tercapai
11	Strata - 1 (Program Studi yang sangat dibutuhkan/ langka antara lain kedokteran, planologi, arsitektur)	Org	-	35	3	Tidak Tercapai
12	Dokter Spesialis	Org	-	6	1	Tidak Tercapai
13	Strata - 2	Org	-	10	16	Tercapai
14	Strata - 3	Org	-	2	1	Tidak Tercapai
15	Diklat Prajabatan Gol. II	Org	-	40	39	Tidak Tercapai
16	Diklat Prajabatan Gol. III.	Org	-	60	119	Tercapai
17	Kegiatan penegakkan disiplin & evaluasi kinerja PNS	Keg	-	1	1	Tercapai
18	Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNS	%	100	100	0	Tidak Tercapai
19	Database PNSD se-Kabupaten Nias	%	100	100	100	Tercapai
20	Pengembangan/pemeliharaan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	%	-	100	100	Tercapai
21	Pengelolaan Administrasi dan Pendaftaran PNS Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II	Org	100	60	57	Tidak Tercapai
22	Pengelolaan administrasi pendaftaran Peserta Seleksi Diklat PIM IV; III; dan II	%	100	100	100	Tercapai
23	Pelayanan administrasi pengajuan usul CPNS menjadi PNS	%	100	100	100	Tercapai
24	Pengelolaan usul Kenpang Pengabdian dan SK Pensiun bagi PNS dan Pensiun Janda/Duda.	%	100	100	100	Tercapai

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
25	Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pemakaian gelar	%	100	100	100	Tercapai
26	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan bidang kepegawaian meningkat.	%	-	60	80	Tercapai
27	Kegiatan pemberian penghargaan kepada PNS atas Pengabdian dan Prestasi Kerja yang dicapai	Keg	-	1	1	Tercapai

Sumber : BKD Kab. Nias

14.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Bidang Kepegawaian antara lain :

- Masih terbatasnya jumlah ASN khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.
- Kegiatan pendidikan dan latihan baik penjenjangan struktural maupun fungsional pelaksanaannya belum terencana dan terjadwal secara akurat karena dipengaruhi oleh instansi pengelola diklat di Propinsi dan Pusat.
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Diklat-diklat Teknis, Struktural maupun Fungsional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Pengangkatan tenaga Guru Bantu Daerah dan Tenaga Kesehatan Daerah yang di ikuti dengan pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan.
- Koordinasi pada instansi di tingkat propinsi dan pusat yang sering menyelenggarakan beberapa kegiatan diklat baik teknis, struktural maupun fungsional perlu ditingkatkan.
- Peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan latihan para Aparatur Sipil Negara.

14.7. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN NIAS

14.7.1. Gambaran Umum

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2007 dengan nomenklatur SKPD yakni Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Setelah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 seluruh bentuk urusan pelayanan perizinan di Kabupaten Nias ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan sampai saat ini SKPD telah menyelenggarakan pelayanan dan pemrosesan berbagai perizinan maupun non perizinan seperti pengurusan IMB, SIUJK, SITU, SIUP, HO dan izin lainnya.

14.7.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan urusan bidang pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan informasi yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Meningkatkan pelayanan perizinan yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, kepastian, transparan, cepat dan jelas
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan perizinan dan non perizinan.

14.7.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dalam dokumen DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran 2016, yang disajikan sebagai berikut :

- 1. Program Peningkatan Informasi Pelayanan Perizinan**, dengan kegiatan :
 - a. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
 - b. Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - c. Fasilitasi Tim Perhitungan besaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - d. Pembuatan Buku Daftar Badan Usaha di Kabupaten Nias
 - e. Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

14.7.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 671.000.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 636.450.829,-** atau **94,85 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 4-55
Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Nias Tahun 2016

14.7.5. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capai kinerja yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Tahun 2016 dan digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Retribusi Tahun 2016 sebesar Rp. 55.011.403,- (lima puluh lima juta sebelas ribu empat ratus tiga rupiah), pelayanan pemrosesan perizinan dan non perizinan selama Tahun 2016 sebanyak 755 buah.

Tabel : 4-56
Data Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pemrosesan Izin Tahun 2016

No	Hasil capai	Satuan	Tahun	
			2015	2016
1	2	3	4	5
1.	Realisasi Penerimaan Retribusi	Rp.	92.660.421	55.011.403
2.	Pemrosesan Izin yang diproses	Buah	821	755

Sumber Data : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Nias

2. Melaksanakan pelayanan langsung 5 (lima) jenis perizinan yakni Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan, Izin Gangguan di 10 (sepuluh) Kecamatan.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan survey kepada masyarakat para pemohon izin, melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias dengan Nilai 84,34 %.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias telah mendapat Piagam Penghargaan sebagai TERBAIK II Satuan Kerja Perangkat Daerah Berkinerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015.

Secara umum perkembangan pelayanan perizinan dan klarifikasi bidang usaha di Kabupaten Nias, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 4-57
Perkembangan Pelayanan Perizinan dan Klasifikasi Usaha
di Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2015	2016
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
1	Jumlah Perizinan dan Dokumen Yang diterbitkan			
1.	Izin Penyewaan Kios/Losd	Kios/Losd	52	12
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		52	6
3.	Izin Penggalian Jalan Umum Untuk Penanaman Pipa, Kabel dan Sejenisnya		-	-
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	Perusahaan	19	20
5.	Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum	Perusahaan	-	-
6.	Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Becak Mesin)	Perusahaan	-	-
-	Kartu Pendaftaran Becak Mesin	Unit	-	-
7.	Izin Pengangkutan Umum Tidak Bermotor Roda Tiga (Becak Dayung)	Unit	-	-
8.	Izin Pemakaian Jalan	Orang	-	-
9.	Izin Bongkar Muat Barang	Truck/Pick Up	5	-
10.	Izin Penggunaan jalan untuk mobil truk bermuatan 3000 kg keatas	-	-	-
11.	Izin Trayek	Mobil	-	-
a.	Izin Trayek (Kartu Pengawasan)			
b.	Izin Insidentil	Mobil	-	-
12.	Izin Sim Becak Dayung (Sim- D)	Orang	-	-
13.	Izin Gangguan (HO)	Usaha	144	153
14.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Usaha	5	5
15.	Izin Tempat Usaha (SITU)	Usaha	127	134

	16. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Usaha	188	196
	17. Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI)	Usaha	14	7
	18. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Usaha	8	6
	19. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C"	Usaha	-	-
	20. Izin Gudang/Ruang	Gudang/ Ruang	5	11
	21. Izin Pengelolaan Objek Wisata	Usaha	-	-
	22. Izin Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati	Usaha	-	-
	23. Izin Usaha Pondok Wisata	Usaha	-	-
	24. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Usaha	3	1
	25. Izin Usaha Rumah Makan	Usaha	4	5
	26. Izin Usaha Rumah Permondokan	Usaha	-	-
	27. Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan	Unit	27	-
	28. Surat Izin Balai Pengobatan Swasta (BPS)	Unit	1	-
	29. Surat Izin Toko Obat	Unit	2	3
	30. Surat Izin Apotik	Unit	-	-
	31. Izin mendirikan Rumah Sakit Swasta	Unit	-	-
	32. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Perusahaan	188	196
2	Jumlah Perusahaan Menurut Golongan Usaha			
	a. Perusahaan Besar	Perusahaan	-	-
	b. Perusahaan Menengah	Perusahaan	14	14
	c. Perusahaan Kecil	Perusahaan	48	97
	d. Perusahaan Mikro	Perusahaan	125	86
3	Jumlah Perizinan Menurut Bentuk Badan Hukum			
	a. PT	Unit	-	1
	b. CV	Unit	20	24
	c. Koperasi	Unit	1	3
	d. Perorangan	Unit	165	169
	e. Bentuk Perusahaan Lainnya	Unit	1	-

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Nias

Pencapaian kinerja urusan pelayanan perizinan tahun 2016 tergambarkan pada tabel berikut :

Tabel : 4-58
Capaian Peningkatan Pengembangan Informasi dan Pelayanan Perizinan
Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capain	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Peningkatan Pengembangan Informasi dan Pelayanan Perizinan					
1	Jumlah pelayanan perizinan langsung di Kecamatan	Jenis	6	6	5	Tidak Tercapai
2	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)		45 menit s/d 14 hari	45 menit s/d 14 hari	45 menit s/d 14 hari	Tercapai
3	Mobil Keliling Pelayanan Perizinan	Unit	-	-	-	-
4	Jumlah izin yang diproses	Izin	-	125	755	Tercapai

Sumber data : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Nias

14.7.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- Terbatasnya tenaga pegawai saat ini
- Kurangnya kesadaran pengusaha dalam pengurusan perizinan usaha.

2. Solusi

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai pelayanan yang efektif dalam pemrosesan perizinan.
- b. Peningkatan kompetensi pegawai melalui bimtek dan diklat.
- c. Penambahan personil pegawai
- d. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.

14.8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

14.8.1. Gambaran Umum

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias, maka SKPD BPBD Kabupaten Nias adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana dalam mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nias. Sebagai unsur pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias adalah merupakan unsur pendukung tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias sedangkan unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias adalah salah satu Badan yang bertugas dan berfungsi untuk menetapkan pedoman dan pengawasan terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang mencakup Pencegahan Pra bencana, Tanggap Darurat serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang secara adil, merata dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara Penanggulangan Bencana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Kepala Pelaksana yang kedudukannya adalah Eselon IIb. dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Eselon IIIb serta 3 (tiga) orang Kepala Bidang Eselon IIIb. Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dengan Eselon IVa.

Selanjutnya hasil capaian kinerja dapat dilihat dari terlaksananya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana, tersedianya logistik dan peralatan lainnya dalam mengantisipasi keadaan pada saat tanggap darurat serta terlaksananya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam. Gambaran tersebut meliputi : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah, Penanganan Kedaruratan dan Logistik pada saat Tanggap Darurat, Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Daerah Kabupaten Nias.

14.8.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan urusan bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana.
- c. Penyiapan sarana dan prasarana, peralatan dan logistik penanggulangan bencana.
- d. Pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana.

14.8.3. Program dan Kegiatan

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam, dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nias
- b. Bantuan Kepada Petugas Posko Siap Siaga Bencana pada Kabupaten Nias
- c. Bantuan kepada petugas Operator SSB Kabupaten Nias
- d. Bantuan Kepada Petugas Speed Boat
- e. Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat
- f. Sosialisasi tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- g. Penyusunan Ranperda Kab Nias tentang Penanggulangan Bencana Daerah
- h. Peringatan Terjadinya Gempa Bumi Nias tanggal 28 Maret 2005 di Kab Nias

- i. Pemeliharaan Alat Komunikasi
- 2. Program Kedaruratan**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Logistik dalam Penanganan Bencana
 - b. Pendistribusian peralatan dan Logistik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
 - c. Biaya Pengangkutan dan Penjemputan Peralatan dan Bahan Logistik dari Luar Daerah ke Kabupaten Nias
 - d. Operasional Penanganan Pengungsi
 - e. Survey dan Pendataan Lokasi Tempat Pengungsian dan Sumber daya yang tersedia di Kecamatan dalam wilayah Kab Nias
- 3. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan dan Operasional Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangki Air
 - b. Operasional Petugas Pemadam Kebakaran
 - c. Pengadaan Mobil Tangki Air dan perlengkapannya
 - d. Biaya Umum Pengadaan Mobil Tangki Air Kabupaten Nias
- 4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan Tekhnis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Bagi Tenaga Pelaksana Perhitungan di Kab Nias
 - b. Prasurvey / Pra-perencanaan dan kegiatan penanggulangan bencana yang disampaikan ke BPBD Provinsi dan BNPB Pusat
 - c. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kab Nias (berasal dari Dana Bantuan Hibah APBN melalui BNPB RI)

14.8.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan Bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 11.467.973.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 10.238.466.099,-** atau **89.27 persen** yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 4-59
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah
Pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2016

14.8.5. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penanggulangan Bencana Daerah
2. Pelatihan kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana sebanyak 50 orang
3. Pengadaan logistik kedaruratan penanganan bencana setiap tahun
4. Pelaksanaan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam sebanyak 1 kali
5. Pengadaan mobil tangki air yang baru sebanyak 1 (satu) unit

Tabel : 4-60
Capaian Kinerja Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam					
01	Peta Rawan Bencana	Dok.	-	-	-	-
02	Dokumen Protap Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias	Dok.	-	-	-	-
03	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB)	Dok.	-	-	-	-
04	Jumlah masyarakat yang dilatih dalam rangka penanggulangan bencana	Org	-	50	50	Tercapai
05	Kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam	Keg	-	1	1	Tercapai
06	Tersusunnya peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana daerah kabupaten nias	Dok	-	1	1	Tercapai
II	Program Kedaruratan		-			
07	Peralatan dan logistik kedaruratan penanganan bencana	Pkt	-	1	1	Tercapai
08	Pengelolaan peralatan dan logistik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Pkt	-	1	1	Tercapai
09	Kegiatan penanganan pengungsi	Keg.	-	1	-	Tidak Tercapai
III	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		-			
10	Data kerusakan dan kerugian akibat bencana	Dok	-	-	-	-
11	Pemulihan sosial ekonomi pasca bencana	Paket	-	-	-	-
12	Rehabilitasi sarana dan prasarana	Paket	-	3	3	Tercapai
IV	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		-			
13	Jumlah mobil kebakaran yang dipelihara dan dioperasikan	Unit	-	2	2	Tercapai
14	Jumlah petugas/personil yang dilatih	Org	-	-	-	-
15	Jumlah mobil yang diadakan (mobil tangki air)	Unit	-	1	1	Tercapai

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias

14.8.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias antara lain :

- a. Wilayah kabupaten Nias termasuk dalam kawasan rawan bencana
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
- c. Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan dalam penanggulangan bencana sangat terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang disarankan antara lain:

- a. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai pelayanan yang efektif meliputi gedung kantor, gudang tempat penyimpanan barang logistik dan kendaraan/peralatan, peralatan tenda untuk pengungsi, kendaraan roda dua, mobil pemadam kebakaran, dan mobil tangki air.
- c. Penambahan jumlah pegawai pada BPBD dan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat dan pelatihan.

14.9. KANTOR KECAMATAN

14.9.1. Arah Kebijakan

Dengan mempedomani arah kebijakan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016, maka arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias Tahun 2016, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama fungsional antara instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum di tingkat Kecamatan.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi tingkat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Tingkat Kecamatan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan.
- f. Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dan meningkatkan pembinaan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- h. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Kecamatan.
- i. Melaksanakan koordinasi yang sinergis di berbagai lini dan tingkatan di wilayah Kecamatan.

14.9.2. Program dan Kegiatan

Dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2016, Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- b. **Program Pemberdayaan Perempuan**, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi/Pembinaan Tim Penggerak PKK
- c. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional
 - Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan
- d. **Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan**, dengan kegiatan :
 - Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 - Rapat Koordinasi Antar Kepala Unit Kerja dan Unsur MUSPIKA di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi dan pembinaan Administrasi APBDesa
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. **Program Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan :
 - Pemantauan dan Pendataan objek-objek Pajak dan Retribusi Daerah
- f. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Nias
 - Fasilitas Program RASKIN di Kecamatan
 - Pelaksanaan Perlombaan Desa di Kabupaten Nias
 - Pelaksanaan Kegiatan Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK
- g. **Program Peningkatan Peran seta Kepemudaan**, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi/Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian
- h. **Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan**, dengan kegiatan :
 - Mengikuti kegiatan Pameran Pembangunan

- i. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan
 - Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparat dan perangkat pemerintah desa

14.9.3. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan Bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 4.650.000.000,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 4.452.068.469,-** atau **95,7 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Kecamatan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel : 4-61
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kab. Nias
Tahun 2016

14.9.4. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Nias pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel : 4-62
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Kecamatan Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
1	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Keg	9	20	20	Tercapai
II	Program Penataan Administrasi Kependudukan					
2	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	Keg	4	4	4	Tercapai
III	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					
3	Jumlah kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian	Keg	18	8	8	Tercapai
IV	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
4	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	Keg	18	18	18	Tercapai
V	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan					
5	Jumlah kegiatan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Keg	19	24	24	Tercapai
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
6	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat	Keg	27	26	25	Tercapai
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					
7	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparat dan perangkat pemerintah desa	Keg	1	2	2	Tercapai

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kab. Nias

Adapun indikator program kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh beberapa Kantor Kecamatan di Kabupaten Nias yang tidak tertuang di dalam RPJMD antara lain Program Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh 5 (lima) kecamatan yang *output nya* adalah jumlah kegiatan Pemantauan dan Pendapatan objek-objek Pajak dan Retribusi Daerah serta Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan yang diikuti oleh 2 (dua) kecamatan, yang *output nya* adalah kegiatan pameran Pembangunan.

14.9.5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di tingkat Kecamatan masih sangat terbatas
- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih terbatas.
- Luas wilayah setiap kecamatan tidak sama membuat beberapa desa di sebagian wilayah kecamatan masih terisolir dan belum dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan.
- Peningkatan penempatan aparatur di wilayah Kecamatan serta peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal terkait dengan tugas bidang pelayanan.

- c. Prioritas pembangunan di beberapa wilayah kecamatan sebaiknya diarahkan pada pembukaan infrastruktur jalan ke beberapa desa yang terisolir sehingga mempermudah dalam pelayanan pemerintah.

14.10. URUSAN WAJIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

14.10.1. Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias yang disingkat BPKAD pada awalnya adalah salah satu Bagian dari SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yakni dengan nomenklatur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, namun setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias, maka terhitung 01 Januari 2015 seluruh urusan terkait dengan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ditangani SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias adalah salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

Berikut Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Nias, yakni :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
5. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanggungjawaban; dan
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan.
6. Bidang Aset, membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset; dan
 - b. Sub Bidang Pengendali dan mutasi aset.

14.10.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias dititikberatkan pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dalam rangka terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara garis besar arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku yang meliputi :
 - a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis IT;
 - b. Tingkat ketepatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 - c. Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah;
 - d. Opini terbaik atas hasil audit laporan keuangan daerah;

- e. Tingkat pelayanan kepada SKPD yang memenuhi prinsip tepat waktu; dan
 - f. Tingkat penyusunan dan penyesuaian berbagai instrumen pengelolaan keuangan daerah.
2. Penataan pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang meliputi :
- a. Inventarisasi/Identifikasi barang milik daerah;
 - b. Inventarisasi/identifikasi barang hasil rehabilitasi dan rekonstruksi dan aset off budget dari NGO;
 - c. Sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. Neraca Daerah yang akuntabel;

14.10.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan anggaran dan cakupan kewenangan serta fungsi yang ada, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam kurun waktu 2011 – 2016. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyajian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 hanya sebatas pada urusan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan urusan semua SKPD disajikan oleh SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Untuk Tahun Anggaran 2015 disajikan secara keseluruhan baik urusan semua SKPD maupun urusan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan tersebut meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
 - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - Penyediaan alat tulis kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Penyediaan makanan dan minuman;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Umum.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
 - Penyusunan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah;
 - Penyusunan Laporan Tahunan SKPD;
 - Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan**, dengan kegiatan :
 - Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan.
- 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran Berikutnya;

- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran Berikutnya;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nias;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Penelitian dan Pengesahan DPA SKPD;
- Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) anggaran belanja daerah;
- Penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
- Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah serta penelitian dokumen pengeluaran Belanja Daerah;
- Penyusunan Laporan Semester;
- Penatausahaan Administrasi Gaji CPNS/PNS se-Kabupaten Nias dan Evaluasi serta Pembinaan Bendahara Daerah se-Kabupaten Nias;
- Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Nias;
- Penatausahaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Gaji CPNS/PNS Pemkab Nias;
- Penatausahaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Nias;
- Penyusunan Laporan dana Perimbangan dan Penyesuaian;
- Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Kebijakan Akuntansi Daerah;
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- Penyediaan Kertas Komputer untuk Daftar Gaji CPNS/PNS se-Kabupaten Nias;
- Penyusunan rancangan peraturan Bupati Nias tentang kebijakan akuntansi keuangan daerah Kabupaten Nias berbasis akrual;
- Penyusunan rancangan peraturan Bupati Nias tentang Tatacara Penganggaran dan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN;
- Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur tentang Penyusutan Nilai Barang Milik Daerah;
- Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- Penyusunan DKBMD dan BKPMMD;
- Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Nias;
- Verifikasi Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- Pembangunan Website BPKAD Kabupaten Nias.
- Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias

14.10.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias kurun waktu tahun 2011-2016 telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 19.735.868.000.-** dan hingga akhir tahun

anggaran 2016 (keadaan 31 Desember 2016) telah direalisasikan sebesar **Rp. 15.690.786.557.-** atau sebesar **79,50 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan pada SKPD BPKAD Kabupaten Nias dalam tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel : 4-63
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2016

14.10.5. Hasil Capai Kinerja

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel adalah indikator kunci dari kaidah *good governance*. Hal ini ditempuh melalui pemantapan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban aparatur pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif serta memenuhi prinsip tepat waktu dengan standar yang baku serta didukung dengan sistem informasi yang memadai. Memenuhi sasaran dimaksud, indikator kinerja yang dicapai adalah:

1. Tersusunnya 6 (enam) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan APBD;
2. Tersusunnya 6 (enam) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan APBD;
3. Tersusunnya 7 (tujuh) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang APBD;
4. Tersusunnya 7 (tujuh) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran APBD;
5. Tersusunnya 6 (enam) dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Tersusunnya 6 (enam) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Penelitian dan Pengesahan DPA dan DPPA sebanyak 255 dokumen dan DPPA sebanyak 255 dokumen;
8. Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung sebanyak 8.315 SPD dan Belanja Tidak Langsung sebanyak 2.120 SPD;
9. Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Daerah sebanyak 6 kegiatan;
10. Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah serta penelitian dokumen pengeluaran belanja daerah selama 6 kegiatan;
11. Tersusunnya 6 (enam) dokumen Laporan Semester;
12. Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji CPNS/PNS serta Pembinaan Bendahara se-Kabupaten Nias sebanyak 6 (enam) kegiatan;
13. Tersedianya peralatan pendukung server SIPKD serta upgrade aplikasi SIPKD berbasis Akruar;
14. Tersusunnya 6 (enam) dokumen Laporan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian;
15. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
17. Penyediaan Kertas Komputer untuk Daftar Gaji CPNS/PNS se-Kabupaten Nias;
18. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang kebijakan akuntansi keuangan daerah Kabupaten Nias berbasis akrual;
21. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Tatacara Penganggaran dan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN.
22. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur tentang Penyusutan Nilai Barang Milik Daerah;
23. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
24. Tersusunnya DKBMD dan BKPMMD;
25. Tersosialisasinya PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
26. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
27. Tersusunnya 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Nias tentang SAPD Kabupaten Nias;
28. Terlaksananya verifikasi Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
29. Terbangunnya Website BPKAD Kabupaten Nias.
30. Tersusunnya Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias

Dalam merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nias yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Nias tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, telah pula ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Secara umum tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nias. Dalam tujuan pembangunan tersebut ditetapkan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai selama jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dalam rentang waktu masa RPJMD.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 4-64
Capaian Kinerja Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
1	Sistim informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis IT	%	50	100	95	Tidak Tercapai
2	Tingkat ketepatan penyusunan APBD dan P-APBD		Kurang Tepat Waktu	Tepat Waktu	Kurang Tepat Waktu	Tidak Tercapai
3	Tingkat ketepatan penyelesaian laporan keuangan daerah		Kurang Tepat Waktu	Tepat Waktu	Kurang Tepat Waktu	Tidak Tercapai
4	Opini terbaik atas hasil audit laporan keuangan daerah		Disclaimer	WTP	WDP	Tercapai
5	Tingkat pelayanan kepada SKPD yang memenuhi prinsip tepat waktu	%	75	100	100	Tercapai
6	Tingkat penyusunan dan penyesuaian berbagai instrumen pengelolaan keuangan daerah	%	65	100	100	Tercapai
7	Sistim informasi pengelolaan barang milik daerah	%	50	100	100	Tercapai
8	Inventarisasi/Identifikasi barang milik daerah	%	85	95	95	Tercapai
9	Inventarisasi / Identifikasi barang hasil rehabilitasi dan rekonstruksi dan aset off budget dari NGO	%	25	80	75	Tidak Tercapai
10	Neraca daerah yang akuntabel	Dok.	1	7	6	Tidak Tercapai

Sumber : BPKAD Kab. Nias

14.10.6. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur;
- Penataan Aset Daerah yang masih belum tertib;
- Piutang Daerah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang masih belum terselesaikan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut diatas, maka solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur melalui Diklat dan Bimtek;
- Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan fasilitas yang ada seiring dengan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- Optimalisasi pengelolaan dan penataan aset daerah melalui penilaian dan penghapusan aset daerah.
- Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan konsultasi teknis kepada lembaga teknis terkait dengan penyelesaian Piutang Daerah.

14.11. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

14.11.1. Gambaran Umum

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terbentuk karena tuntutan kebutuhan. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terbentuk sebagai wadah berhimpunnya seluruh anggota KORPRI di Kabupaten Nias untuk menyamakan persepsi dalam menyukseskan program-program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya. Melalui usulan program kegiatan dalam PPAS yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA Tahun 2016 adalah pertama kalinya kegiatan Sekretariat KORPRI dilaksanakan. Kegiatan ini sebelumnya diusulkan melalui Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias, sebagai respon dan konsekuensi logis karena telah terbentuknya Sekretariat KORPRI melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 24 Tahun 2016. Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tahun 2016 masih belum menyentuh pada kegiatan-kegiatan inti mengingat baru terbentuk dan baru berjalan selama 1 (satu) tahun.

Seiring dengan berjalannya waktu dan kebijakan-kebijakan Pemerintah pada dewasa ini yang salah satunya adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai perubahan dari PP 41 Tahun 2007 tentang SOTK sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dihapus karena tidak termasuk urusan Penunjang dan Urusan Pemerintahan. Oleh karenanya, mulai Tahun 2017 Sekretariat DP KORPRI tidak lagi menyelenggarakan urusan wajib dari berbagai aspek dan tidak lagi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah karena kelembagaannya telah dihapus dalam Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nias.

14.11.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Penataan tata kelola administrasi KORPRI yang baik
- b. meningkatkan kualitas SDM KORPRI
- c. pembinaan kepengurusan unit KORPRI
- d. meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI
- e. melaksanakan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI
- f. membangun jiwa Korps anggota KORPRI
- g. pembinaan mental dan rohani anggota KORPRI
- h. pembinaan kesadaran anggota KORPRI dalam berolahraga, seni dan budaya
- i. pembinaan usaha dan keterampilan kepada anggota KORPRI dan keluarganya.

14.11.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan wajib Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias sesuai dengan DPA/DPPA SKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Disiplin Pegawai, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan PIN KORPRI
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Rapat Kerja Korpri Kabupaten Nias
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan HUT KORPRI

14.11.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan urusan wajib Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 405.500.000.-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 290.509.050.-** atau **71,64 persen**, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel : 4-65
Realisasi Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias
Tahun 2016

14.4.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang telah dicapai di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel : 4-66
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	satuan	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
			Target	capaian	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan PIN KORPRI	paket	1	1	Tercapai
2	Pelaksanaan HUT KORPRI	keg	1	1	Tercapai
3	Pelaksanaan rapat kerja KORPRI	keg	1	0	Tidak Tercapai

14.11.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Yang merupakan permasalahan kurang tercapainya program kegiatan di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias untuk Tahun anggaran 2016 yakni sebagai berikut :

- Kurangnya SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dan juga mengingat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI baru terbentuk dengan Peraturan Bupati tahun 2014 dan dana APBD baru dialokasikan untuk Tahun 2016.
- Keterbatasan jumlah pegawai di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias.

2. Solusi

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalnya pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- Pelayanan dalam pengelolaan administrasi umum kepada seluruh anggota KORPRI Kabupaten Nias dan menyelenggarakan administrasiumum dan keuangan, kegiatan social, usaha dan kerjasama serta bidang hukum disarankan untuk dilaksanakan pendidikan dan pelatihan ;
- Bagi pejabat struktural yang telah memenuhi syarat baik pangkat maupun golongan disarankan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- Memberi dorongan kepada setiap Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias untuk Profesional dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan di masing-masing Sub Bagian Lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu;
- Meningkatkan kebijakan-kebijakan untuk disiplin kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Menghimbau Anggota KORPRI untuk menanamkan nilai-nilai Revolusi mental melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing Pegawai.

15. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

15.1. Kondisi Umum

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias mempunyai tugas pokok "melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Ketahanan Pangan melaksanakan berbagai program kegiatan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2015 dan Rencana Strategis Tahun 2011-2016.

Peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian yang dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan perumusan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan pangan dan cadangan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, menggerakkan partisipasi masyarakat petani – nelayan dalam penerapan rekayasa teknik, sosial dan ekonomi secara terencana, meluas dan terpadu, terkoordinasi di setiap tingkatan melalui program – program serta rencana kerja penyuluh yang mengacu pada sistem kerja penyuluhan pertanian secara partisipatif, dinamis dan spesifik lokasi.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias sebagai lembaga teknis daerah selain membidangi ketahanan pangan sebagai urusan wajib juga sebagai SKPD yang menangani bidang Penyuluhan Pertanian, perikanan serta kehutanan sebagaimana diharapkan pada Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian dengan tujuan antara lain :

1. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan serta kehutanan dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan
2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi dan peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan demikian upaya memperkuat Ketahanan Pangan tidak terlepas dari peran aktif penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka transformasi teknologi pertanian untuk peningkatan produksi pertanian. Tugas-tugas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias terdiri dari bidang Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan.

Pada tahun 2016 dalam melaksanakan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias telah berupaya untuk mencapai target RENJA dan target Kinerja RENSTRA 2011-2016. Hal ini di implementasikan dengan kegiatan Pembinaan/Monitoring Kelompok Pengelola Lumbung Pangan, Penyusunan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Nias, Pembinaan/Pemantauan daerah rawan pangan, Pemantauan Pola Pangan masyarakat sehingga dapat diketahui skor PPH, Pembuatan Model Percontohan Kawasan Rumah Pangan Lestari, Lomba pengolahan pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kabupaten, Rapat Dewan Ketahanan Pangan, Penyusunan Data Ketahanan Pangan.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, berjalan dengan baik walaupun dirasakan belum optimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian yang belum merata. Dari sisi kuantitas, kondisi saat ini PPL PNS yang berada di lapangan sebanyak 23 orang dan 1 orang yang sedang melaksanakan tugas belajar dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 23 orang yang tersebar di 10 Kecamatan. Dari sisi kualitas dirasakan bahwa penyuluh pertanian masih belum merata pengetahuannya baik dari sisi menguasai paket teknologi pertanian maupun dari sisi menguasai metode dan menggunakan media penyuluhan. Upaya yang telah dilaksanakan agar penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan dengan baik adalah melaksanakan Percontohan penerapan paket teknologi pertanian pada lahan BP3K, Pelatihan bulanan bagi PPL secara rayonisasi di tingkat BP3K, Pelatihan Penyuluh/Petugas Tentang Tanaman Kakao, Demplot Cabe, demplot padi sawah, Pelatihan bagi Penyuluh Pertanian/Petani tentang Penanggulangan Penyakit Ternak Babi dan Ayam, Pelatihan Pengolahan Ransum Ayam Buras bagi Penyuluh Pertanian. Selanjutnya dalam rangka memberdayakan penyuluh swadaya telah dilaksanakan Pemberdayaan Kontak Tani sebagai penyuluh swadaya, Pelatihan Kontak Tani sebagai Penyuluh swadaya, Untuk meningkatkan Pengetahuan Keterampilan dan Sikap Petani juga telah dilaksanakan berbagai pelatihan diantaranya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok/Petani Perikanan Pembudidaya Ikan Air Tawar. Memberikan motivasi kepada penyuluh pertanian agar lebih bekerja dengan baik maka telah dilaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Penyuluh Pertanian, Penilaian kemampuan peningkatan kelas kelompok tani se Kabupaten Nias, Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 2017, Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kecamatan 2017, Rapat POSKO Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

15.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi dan misi. Arah Kebijakan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecukupan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan
2. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan
3. Meningkatkan kemampuan Penyuluh dan petani/ nelayan dalam mengelola usaha peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) PPL dan meningkatnya Pengetahuan Keterampilan dan Sikap (PKS) Petani
5. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat
6. Memfasilitasi Penyuluh Swadaya

15.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan**, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
 - b. Penilaian kemampuan peningkatan kelas kelompok tani se Kabupaten Nias
 - c. Pemberdayaan Kontak Tani sebagai penyuluh swadaya
 - d. Pelatihan Kontak Tani sebagai Penyuluh swadaya
 - e. Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 2017
 - f. Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kecamatan 2017
 - g. Rapat POSKO Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
 - h. Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Penyuluh Pertanian
 - i. Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
 - j. Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
2. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan/Monitoring Kelompok Pengelola Lumbung Pangan
 - b. Penyusunan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Nias
 - c. Pemantauan dan monitoring daerah rawan pangan
 - d. Pemantauan dan monitoring pola pangan harapan (PPH)
 - e. Lomba Pengolahan Pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kecamatan
 - f. Lomba pengolahan pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kabupaten
 - g. Rapat Dewan Ketahanan Pangan
 - h. Penyusunan Data Ketahanan Pangan
3. **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan**, dengan kegiatan :
 - a. Percontohan Penerapan Teknologi pada lahan BPPK
 - b. Pelatihan Bulanan bagi PPL Secara Rayonisasi di tingkat BPPK
 - c. Pelatihan Penyuluh/Petugas tentang Kakao
 - d. Demplot Cabe
 - e. Demplot Padi sawah
4. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan dasar bagi Petani tentang Penanggulangan Penyakit Ternak Babi dan Ayam
 - b. Pelatihan Pengolahan Ransum Ayam Buras bagi Penyuluh Pertanian
 - c. Pelatihan Penyuluh tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak babi
5. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**, dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani/Kelompok PKK/PT.P2WKSS
 - b. Rembug dan Mimbar Sarasehan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nias
6. **Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok/Petani Perikanan Pembudidaya Ikan Air Tawar
 - b. Pelatihan Petugas/ Penyuluh tentang Budidaya Ikan Lele Jumbo
 - c. Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya ikan lele jumbo dengan media terpal.

15.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian selama tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 5.025.080.000.-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 3.561.804.297.-** atau **70,88 persen**.

Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Wajib Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 4-67
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Kabupaten Nias Tahun 2016

15.5. Hasil Capai

Hasil capai pelaksanaan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias selama tahun 2016 sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang tersedia antara lain :

a. Ketahanan Pangan

1. Pembinaan/Monitoring Kelompok Pengelola Lumbung Pangan

Pada Tahun 2016 pelaksanaan Pembangunan urusan wajib Ketahanan Pangan telah dilaksanakan melalui Pembinaan/Monitoring Kelompok Lumbung Pangan di 12 desa pengelola lumbung pangan yaitu Kecamatan Bawolato Kelompok Lumbung Pangan Suka Maju Desa Siofaewali, Kelompok Lumbung Pangan Sumber Jaya Desa Hilialawa, Kelompok Lumbung Pangan Angorudua Desa Hiliganoita. Kecamatan Idanogawo, Kelompok Pengelola lumbung pangan Samaeri Desa Otalua, kelompok lumbung pangan Fajar Baru Desa Bobozioli Loloanaa Kelompok lumbung Pangan Segar Desa Baruzo. Kecamatan Gido kelompok pengelola lumbung pangan Ohitododo Desa Umbu, kelompok pengelola lumbung pangan Sepakat desa Hilisebua, kelompok pengelola lumbung pangan Sinar Setia Desa Sirete, kelompok pengelola lumbung pangan Lalawauri desa Hilizoi.

2. Penyusunan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Tahun 2017

Untuk memberikan kemudahan dan acuan kepada instansi pendukung terwujudnya ketahanan pangan maka telah disusun program ketahanan pangan Kabupaten Nias Tahun 2017. Dari kegiatan ini diharapkan dapat terwujud koordinasi dan integrasi fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program peningkatan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Tahun 2017.

3. Pendataan daerah rawan pangan

Untuk mendapatkan data yang baik tentang kondisi Ketahanan pangan di masyarakat maka telah diadakan pemantauan dan monitoring daerah rawan pangan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang peningkatan ketahanan pangan. Kegiatan ini dapat bermanfaat untuk mengetahui situasi ketersediaan, keamanan dan kebutuhan pangan masyarakat sehingga dapat disimpulkan apakah daerah dimaksud rawan pangan atau tidak. Lokasi pelaksanaan monitoring adalah di 10 Kecamatan dan setiap Kecamatan dipilih 1 desa sebagai sampel pengambilan data. Dari hasil pemantauan/monitoring berdasarkan analisa produksi tanaman padi sawah daerah warna hijau atau daerah bebas daerah rawan pangan 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Gido, Sogaeadu, Idanogawo dan Bawolato.

4. Pemantauan dan monitoring pola pangan harapan (PPH)

Pemantauan dan monitoring Pola Pangan Harapan (PPH) bertujuan untuk mengetahui susunan pangan beragam atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa, mengetahui susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, mengetahui mutu pangan berdasarkan skor dari 9 bahan pangan dan untuk mengetahui skor pola pangan harapan Kabupaten Nias Tahun 2016. Pemantauan dilakukan di 10 Kecamatan dengan memilih 2 desa setiap Kecamatan dan 10 responden setiap desa. Kepada setiap responden sekaligus dibagikan contoh bahan makanan dengan menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Dari hasil pengolahan data hasil monitoring dan pemantauan diketahui bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 77,5% dengan tingkat kecukupan energy termasuk kategori tahan pangan yaitu 94 % AKE dan tingkat Kecukupan protein termasuk kategori sedang yaitu 87,9 % AKP.

5. Penyusunan Data Ketahanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan tersedianya dokumen data Ketahanan Pangan berdasarkan laporan bulanan perkembangan Ketahanan Pangan dari Kecamatan yang diolah menjadi data SKPG di tingkat Kabupaten.

6. Lomba pengolahan pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kecamatan

Dengan terlaksananya lomba pengolahan pangan non beras berbasis pangan lokal di 10 Kecamatan maka diharapkan dapat merubah pola piker masyarakat yang dulunya mengkonsumsi beras ke mengkonsumsi non beras. Diharapkan juga dari 50 kelompok wanita peserta lomba tercipta menu pangan non beras dengan resep-resep baru.

7. Lomba pengolahan pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kabupaten

Telah terlaksananya lomba pengolahan bahan pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 10 kelompok wanita tani merupakan utusan kelompok

wanita tani dari setiap Kecamatan. Melalui pelaksanaan lomba ini maka diharapkan terciptalah menu pangan non beras berbasis pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

8. Penyusunan Data Ketahanan Pangan

Dengan terlaksananya penyusunan data ketahanan pangan tahun 2016 maka diharapkan tersedia laporan bulanan perkembangan ketahanan pangan setiap Kecamatan sebagai bahan laporan ke tingkat Provinsi.

9. Melalui dana dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kepada 12 kelompok wanita tani penerima manfaat sehingga diharapkan dapat tercapai penganekaragaman konsumsi pangan keluarga. Selain pembinaan pada tahun 2016 juga kelompok wanita tani dimaksud diberikan dana sosial untuk pengembangan kebun bibit desa yang bertujuan untuk menyediakan sumber bibit kepada anggota kelompok dan masyarakat di sekitarnya.

b. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Dalam urusan penyelenggaraan penyuluhan pertanian beberapa hal yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 dalam upaya pemberhasilannya adalah :

1. Percontohan Penerapan Teknologi pada lahan BPPK

Sebagai media penyuluhan yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat petani untuk dapat diadopsi dan diterapkan pada lahan usahatannya, setiap tahunnya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan Percontohan dan Kaji Terap Teknologi di lahan BP3K. Percontohan dan kaji terap dilaksanakan sebanyak 8 unit masing-masing seluas 0,5 Ha yaitu BP3K Hiliweto Gido, BP3K Sogaeadu, BP3K Idanogawo, BP3K Bawolato, BP3K Ulugawo, BP3K Somolo-molo, BP3K Hiliserangkai, BP3K Botomuzoi dan BP3K Hiliduho. Komoditi yang dijadikan percontohan adalah komoditi mentimun.

2. Pelatihan Bulanan Bagi PPL secara Rayonisasi

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 12 kali. BP3K dibagi dalam 3 rayon yaitu Rayon I berpusat di BP3K Sogaeadu terdiri dari PPL dari BP3K Hiliweto Gido, BP3K Somolo-molo, PPL BP3K Sogaeadu dan BPP3K Ma'u. Rayon II berpusat di BP3K Idanogawo terdiri dari PPL dari BP3K Idanogawo, BP3K Bawolato dan BP3K Ulugawo. Rayon III berpusat di BPP3K Hiliduho terdiri dari PPL BP3K Hiliduho, BP3K Hiliserangkai dan BP3K Botomuzoi. Pelaksanaan kegiatan rayonisasi secara bergiliran di BP3K. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan PPL tentang teknologi pertanian melalui dagang teknologi yang disampaikan oleh PPL secara bergantian dan penyampaian materi dari Staf Badan Ketahanan Pangan, menyelesaikan masalah dan kendala dari masing-masing wilayah kerja penyuluh oleh Koordinator PPL.

3. Pelatihan Penyuluh/Petugas Tentang Kakao

Pelatihan ini telah terlaksana dengan baik peserta sebanyak 12 orang terdiri dari Penyuluh Pertanian dan Petugas Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan Pelatihan Penyuluh/Petugas tentang Kakao dilaksanakan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember. Dari pelaksanaan kegiatan ini telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Penyuluh dan Petugas tentang cara-cara kakao. Dengan demikian Penyuluh pertanian diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diterimanya di kelompok tani yang ada di wilayah binaannya.

4. Demplot Cabe

Demplot cabe bertujuan untuk membangun keterkaitan dan sinkronisasi program penelitian sehingga dapat mempercepat proses alih teknologi, mengembangkan system dan proses inovasi cabe merah spesifik lokasi yang didukung oleh jaringan informasi yang efektif dan efisien serta menguatkan kelembagaan di sentra produksi cabe merah. Telah terlaksana di 10 Kecamatan di 12 Desa dan 12 kelompok tani yaitu :

- Kecamatan Ulugawo 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Setia Desa Onodalinga.
- Kecamatan Botomuzoi 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Setia Desa Talafu.
- Kecamatan Hiliserangkai 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Serangkai Desa Dahadano Botombawo.
- Kecamatan Hiliduho 2 kelompok tani yaitu kelompok tani Sepakat Desa Mazingo Tanoseo, kelompok tani Tuwu Desa Sisobahili I Tanoseo.
- Kecamatan Bawolato 2 Kelompok tani yaitu kelompok wanita tani Mentari desa Dahana dan kelompok tani Saudara desa Siofabanua.
- Kecamatan Idanogawo 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Berkat desa Awoni Lauso
- Kecamatan Sogaeadu 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Bunga padi desa Baruzo

- h. Kecamatan Gido 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Fajar Baru desa Lasara Idanoi
 - i. Kecamatan Mau 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Sepakat desa Lasara Siwalubunua
 - j. Kecamatan Somolo-molo 1 kelompok yaitu kelompok tani Awoni Desa Hiligodu Somolo-molo
5. Demplot Padi Sawah
- Dengan melaksanakan demplot padi sawah dapat mempercepat alih teknologi pengelolaan padi sawah kepada petani pelaksana dan petani di sekitar lokasi demplot. Demplot padi sawah dilaksanakan di 6 Kecamatan 25 Desa dan 30 Kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kecamatan Gido 6 kelompok tani yaitu kelompok tani Serasih Desa Hilizoi, kelompok tani Falulu Desa Hilisebua, kelompok tani Ingin Maju Desa Hiliweto, kelompok wanita tani orahua Desa Sirete, kelompok tani Safuria Desa Umbu dan kelompok tani Tunas Harapan Desa Soewe.
 - b. Kecamatan Sogaeadu 6 kelompok tani dalam 1 Desa Baruzo yaitu kelompok tani Zosa kelompok tani Uluwi, kelompok tani Eho, kelompok tani Kartini, kelompok tani Lahia dan kelompok tani Serasi.
 - c. Kecamatan Idanogawo 7 kelompok tani yaitu kelompok tani Mekar Desa Hiligogowaya, kelompok tani Sinar Orahua desa Hiliadulo, kelompok tani Sanaru Desa Maliwaa, kelompok tani Tuberi desa Hilinaa Tafuo, kelompok tani Kerjasama Desa Bobozioli Loloanaa, kelompok wanita tani Restui desa Otalua, kelompok tani Faomakhoda Desa Ahedano.
 - d. Kecamatan Bawolato 7 kelompok tani yaitu kelompok tani Datariwu Desa Sitolubunua, kelompok tani Sihura I Desa Dahana, kelompok tani Lazasebolo Desa Orahili, kelompok tani Sukamaju Desa Gazamanu, kelompok tani Sejati desa Hilifaosi kelompok tani Dalfan Desa Siofabanua dan kelompok tani Sinar Hilimaoga desa Hiliganoita.
 - e. Kecamatan Hiliduho yaitu kelompok tani Sehati desa Silima Banua, kelompok tani Mulo desa Sinarikhi.
 - f. Kecamatan Botomuzoi yaitu kelompok tani Fahuwu desa Hiliwaele I dan kelompok tani Faomakhoda desa Loloanaa.
6. Peningkatan Kesejahteraan PPL
- Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kreatifitas dari Penyuluh Pertanian maka pada tahun 2016 diberikan bantuan transport sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik.
7. Penilaian kemampuan peningkatan kelas kelompok tani se Kabupaten Nias
- Dengan melaksanakan kegiatan ini maka kelompok tani yang kurang aktif menjadi aktif kembali sebanyak 500 kelompok dan adanya peningkatan kelas menjadi kelompok pemula sebanyak 349 kelompok dan dari pemula ke lanjut sebanyak 151 kelompok.
8. Pemberdayaan Kontak Tani sebagai penyuluh swadaya
- Tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan ketua kelompok tani (kontak tani) untuk menjadi penyuluh swadaya, sehingga dapat menjadi mitra penyuluh pertanian dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya masing-masing. Penyuluh swadaya diberdayakan dengan cara pembelajaran secara partisipatif melalui media penyuluhan seperti percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama. Kontak tani yang diberdayakan selama tahun 2016 sebanyak 34 orang dari 8 Kecamatan :
- a. Kecamatan Bawolato, Ketua kelompok tani Onida Desa Siofabanua, ketua kelompok tani Muene Baru desa Sisarahili , ketua kelompok tani Serasi desa Hilifaosi, ketua kelompok tani Sejati Desa Hilifaosi, ketua kelompok tani Datafaeri Desa Hilihoru, ketua kelompok tani Daifan desa Siofabanua, kelompok tani Sinar Boga desa Hilihoru, ketua kelompok tani Saudara desa Siofabanua, ketua kelompok tani Mandiri desa Sisarahili, ketua kelompok tani Mohili desa Hiliganoita, ketua kelompok tani Sihura desa Dahana.
 - b. Kecamatan Idanogawo, ketua kelompok tani Baewahosi desa Tetelesi, ketua kelompok tani Sanaru Desa Maliwa'a, ketua kelompok tani Ingin Maju desa Baruzo, ketua kelompok tani Sinar Gunung desa Laowo Hilimbaruzo.
 - c. Kecamatan Hiliduho, ketua kelompok tani Serasi desa Ononamolo I Bot
 - d. Kecamatan Sogaeadu, ketua kelompok tani Lahia Desa Baruzo, ketua kelompok tani Fahuwusa Desa Hilibadalu, ketua kelompok tani Gatawaena Desa Sogaeadu, ketua kelompok tani Eho Desa Baruzo.
 - e. Kecamatan Gido, ketua kelompok tani Fajar Baru Desa Lasara Idanoi, ketua kelompok tani Mandiri Desa Hilizoi, ketua kelompok tani Hasaradodo desa Somi, ketua kelompok tani Ingin Maju desa Hilisebua.
 - f. Kecamatan Somolo-molo, ketua kelompok tani Tamulai Desa Sifaoroasi

- g. Kecamatan Botomuzoi, ketua kelompok tani Ehowu Desa Hilihambawa dan ketua kelompok tani Ehowu desa Simanaere Bot.
 - h. Kecamatan Hiliserangkai, ketua kelompok tani Onogauko Desa Dahadano Botombawo, ketua kelompok tani Lara Sakti Desa Lawa-lawa, ketua kelompok tani Segar desa Ehosakhozi, ketua kelompok tani Olah desa Orahili.
 - i. Kecamatan Ulugawo, ketua kelompok tani Mudah desa Hlibadalu, ketua kelompok tani Ingin Maju desa Onodalinga.
 - j. Kecamatan Mau, ketua kelompok tani Sepakat desa Lasara Siwalubanua.
9. Pelatihan Kontak Tani sebagai Penyuluh swadaya
Kontak tani yang telah direkrut menjadi penyuluh swadaya dilatih dengan berbagai teknologi pertanian modern dan agar penyuluh swadaya mengetahui dan memahami apa yang menjadi peran mereka kepada petani di sekitar wilayahnya. Penyuluh swadaya yang dilatih adalah sebanyak 34 orang.
10. Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 2017
Penyusunan program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 2017 diharapkan memberikan arah penyusunan Rencana Kerja Penyuluh di Tingkat Kabupaten pada tahun 2017 serta adanya pedoman penilaian capaian program kerja penyuluh pertanian pada tahun 2017.
11. Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kecamatan 2017
Telah disusun program penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap Kecamatan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Tahun 2017 dan sekaligus sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja para penyuluh pertanian di Tahun 2017.
12. Rapat POSKO Tingkat Kabupaten
Dengan terselenggaranya Rapat POSKO tingkat Kabupaten maka koordinasi antar SKPD, penyuluh, Babinsa dapat berjalan dengan baik sehingga selama tahun 2016 semua instansi yang terkait dalam mendukung Program Upsus Pajale dan Ketahanan Pangan dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan rapat POSKO tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan rincian 4 kali di Kabupaten dan 10 kali di tingkat Kecamatan.
13. Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Penyuluh Pertanian
Kegiatan ini bermanfaat untuk melihat kinerja penyuluh pertanian PNS maupun THL-TBPP di lapangan sehingga dengan adanya penilaian ini dapat memberikan motivasi yang baik untuk menjalankan tugas di lapangan. Penilaian dilaksanakan dengan pengamatan, supervisi dan monitoring, wawancara, angket (kuesioner) berdasarkan instrumen penilaian evaluasi kinerja penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya 3 orang penyuluh terbaik PNS dan 3 orang terbaik THL-TBPP. Jumlah yang dinilai dalam kegiatan ini adalah 47 orang terdiri dari 24 orang PNS dan 23 orang THL-TBPP.
14. Pelatihan bagi Penyuluh tentang Penanggulangan Penyakit Ternak Babi dan Ayam
Kegiatan ini telah terselenggara dengan baik dengan melatih penyuluh pertanian sebanyak 51 orang. Tujuannya adalah agar para penyuluh mampu menanggulangi penyakit ternak babi dan ayam di wilayahnya masing-masing.
15. Pelatihan dasar bagi petani tentang penanggulangan penyakit ternak Babi dan Ayam
Pelatihan ini dilaksanakan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi dan Hiliserangkai dengan jumlah petani sebanyak 25 orang setiap Kecamatan. Dari kegiatan ini diharapkan petani dapat menerapkan teknologi yang dipelajarinya dan membagikannya kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya.
16. Pelatihan Pengolahan Ransum Ayam Buras bagi Penyuluh Pertanian
Telah dilatihnya penyuluh pertanian sebanyak 30 orang tentang Pengolahan Ransum Ayam buras sehingga diharapkan dapat menyebarkanluaskannya kepada petani sehingga petani mampu menerapkannya pada usaha taninya.
17. Pemberdayaan Kelompok Perikanan Tentang Budidaya Ikan Air Tawar
Dengan kegiatan ini maka terlaksanalah pembinaan dan pemberdayaan kepada 15 kelompok pembudidaya ikan air tawar di 6 Kecamatan dengan memberikan percontohan budidaya ikan lele jumbo di kolam memakai media terpal, sehingga dapat mempercepat penyebaran informasi teknologi pada petani sekitar serta dapat meningkatkan akses gizi masyarakat di pedesaan. Lokasi kegiatan ini adalah Kecamatan Botomuzoi Desa Hiligodu dan desa Hilihambawa, Kecamatan Hiliserangkai di desa Dahadano Botombawo, Kecamatan Gido di Desa Sirete, Desa Soewe dan Desa Hilizoi, Kecamatan Sogaeadu di Desa Wea-wea, Desa Hilimbana dan Desa Hlibadalu, Kecamatan Bawolato di desa Sitolubanua dan desa Sisarahili, Kecamatan Idanogawo di desa Tafuo, Desa Sisarahili Iraono Hura dan Desa Baruzo.

18. Pelatihan Petugas / Penyuluh Tentang Budidaya Ikan Lele Jumbo
Pelatihan ini diikuti oleh 10 orang terdiri dari 2 orang staf BKP3 dan 8 orang Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan di lokasi Budidaya ikan lele Jumbo Simalungun.
19. Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Lele Jumbo dengan Media Terpal
Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kecamatan dengan peserta sebanyak 10 orang setiap Kecamatan. Peserta kegiatan ini adalah para petani pembudidaya ikan lele jumbo yang diharapkan dapat menerapkan teknologi budidaya ikan lele jumbo dengan media terpal yang berorientasi pasar (bukan sekedar untuk konsumsi saja).
20. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani/Kelompok PKK/PT.P2WKSS
Dengan pelaksanaan kegiatan maka kelompok wanita tani/kelompok PKK/PT.P2WKSS diberdayakan melalui kebun percontohan sehingga kelompok ini dapat lebih kreatif, produktif dan responsif. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari bulan April sampai dengan bulan November 2016 di 3 kelompok dengan perincian :
a. Lokasi PT.P2WKSS yaitu di Desa Maliwaa Kecamatan Idanogawo.
b. Lokasi Hatinya PKK yaitu Lolowua Hiliwarasa desa Hiliserangkai
c. Lokasi Toga di desa Hiliotalua Kecamatan Gido.
21. Rembug dan Mimbar Sarasehan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nias.
Telah terlaksana Rembug KTNA Kabupaten Nias sebanyak 2 kali dengan agenda pada rapat pertama yaitu pemilihan pengurus KTNA Kabupaten Nias dengan susunan Ketua Fanahatodo Ndraha, Wakil Ketua Yatiaro Zai, Sekretaris Eliyudi Laoli, Wakil Sekretaris Asama Waruwu dan Bendahara Suarni Gulo. Pada pertemuan kedua pengurus KTNA Kabupaten Nias menyusun rencana kerja KTNA Tahun 2016.
22. Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 4 unit yaitu BPP Kecamatan Gido, BPP Kecamatan Idanogawo, BPP Kecamatan Bawolato dan BPP Kecamatan Botomuzoi.
23. Penyelenggaraan Penyuluhan
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian selama tahun 2016 masih belum optimal diakibatkan keterbatasan jumlah penyuluh. Pada tahun 2016 penyuluh telah diberikan alat bantu penyuluhan seperti Demplot atau Demfarm berbagai komoditi. Jumlah kelompok tani yang dibina selama tahun 2016 adalah 804 kelompok yang menyebar di 170 desa dan 10 Kecamatan. Jumlah Penyuluh pertanian saat ini adalah 47 orang dengan rincian 23 orang penyuluh PNS dan 23 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan 1 orang sedang mengikuti tugas belajar di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan. Pada tahun 2016 Honor THL-TBPP yang disediakan oleh Kementerian Pertanian hanya selama 10 bulan, sehingga melalui APBD Kabupaten Nias tahun 2016 telah ditampung honor THL-TBPP tersebut selama 2 bulan.

Tabel : 4-68
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan					
1	PPL yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	Orang	-	62	47	Tidak Tercapai
2	PPL yang mendapat peningkatan kesejahteraan	Orang	-	62	47	Tidak Tercapai
3	Kelompok tani yang menjadi sasaran penilaian kemampuan kelas kelompok tani	Kelompok	-	150	500	Tercapai
4	Jumlah PPL Swakarsa	Orang	-	10	34	Tercapai
5	Jumlah PPL Swakarsa yang dilatih	Orang	-	10	34	Tercapai
II	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
6	Jumlah petani yang mengadopsi paket teknologi pertanian	Orang	-	90	640	Tercapai

III	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan					
7	Jumlah Desa yang cukup dan mampu mengembangkan cadangan pangan	Desa	10	4	12	Tercapai
8	Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	K.Kal	1.650	1.980	1.985	Tercapai
9	Penguatan Cadangan Pangan (lumbung pangan)	Desa	3	2	2	Tercapai
10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Orang	51.082	14.696	94.867	Tercapai
11	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	20	10	12	Tercapai
IV	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan					
12	Jumlah PPL yang menguasai paket teknologi Pertanian	Orang	20	66	51	Tidak Tercapai
13	Jumlah petani yang mengadopsi paket teknologi pertanian	Orang	40	120	640	Tercapai
14	Jumlah Kelompok tani binaan	Kelompok	578	863	863	Tercapai
15	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Pemula ke Lanjut	Kelompok	5	4	151	Tercapai
16	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Lanjut ke Madya	Kelompok	3	3	-	Tidak Tercapai
V	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
17	Petugas/PPL yang dilatih dalam penanggulangan penyakit ternak di 9 (sembilan) kecamatan	-	-	-	-	-
18	Jumlah Petani peternak yang dilatih tentang bisnis peternakan	Orang	-	30	10	Tidak Tercapai
19	Jumlah Petani/ Peternak yang dilatih tentang bisnis peternakan	Orang	-	25	10	Tidak Tercapai
20	Jumlah PPL yang dilatih dalam bidang peternakan	Orang	-	25	10	Tidak Tercapai
21	Jumlah Petani dan PPL yang dilatih dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Orang	-	20	12	Tidak Tercapai
VI	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan					
22	Jumlah kelompok perikanan darat yang dibina	Kelompok	-	25	-	Tidak Tercapai
23	Jumlah Petugas/PPL yang dilatih	Orang	-	10	12	Tercapai
24	Jumlah Kecamatan yang mendapat pembuatan Kolam	Kecamatan	-	9	10	Tercapai
	Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan					
25	Masyarakat yang meningkat pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam melindungi sumberdaya hutan	Orang	-	900	-	Tidak Tercapai
26	Masyarakat yang meningkat kesadarannya untuk tidak merusak hutan	Orang	-	180	-	Tidak Tercapai

15.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan wajib Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2016, antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik sumber daya PPL dan sumber daya petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian yang semakin berkembang.
2. Sistem penyaluran sarana produksi (pupuk) tidak tepat waktu sesuai kebutuhan petani.
3. Produksi tanaman padi sawah masih kurang optimal karena salah satu faktor sistem penyaluran sarana produksi (pupuk) tidak tepat waktu sesuai kebutuhan petani, cadangan pangan keluarga dari produksi lokal belum mampu menutupi kebutuhan keluarga, sistem kewaspadaan pangan dan gizi belum optimal, kurangnya minat masyarakat mengkonsumsi bahan pangan lokal non beras sebagai sumber karbohidrat karena faktor kebiasaan.

4. Minimnya dan kurang efektifnya kelembagaan pemasaran formal yang dibentuk dan dikuasai pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa antara lain terbatasnya sarana dan prasarana distribusi pangan seperti jalan usaha tani dan pasar.
5. Masalah yang berkembang saat ini adalah konsumsi masyarakat masih tergantung terhadap beras sedangkan konsumsi umbi-umbian pangan yang bersumber dari hewan, sayur-sayuran, buah dan kacang-kacangan masih sangat rendah, tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota terutama antara rumah tangga berpendapatan rendah sebagai akibat rendahnya daya beli aneka ragam pangan dan pengetahuan terhadap gizi pada kelompok berpendapatan rendah.
6. Jumlah Penyuluh Pertanian tidak mencukupi untuk mensukseskan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh.
7. Pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam menyerap/mengadopsi inovasi baru masih sangat terbatas akibat tingkat pendidikan yang masih rendah.
8. Sikap ketergantungan petani dengan pihak lain masih dominan serta kurangnya motivasi untuk menggabungkan diri dalam wadah kelompok/gabungan kelompok dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi pada setiap unit usahatani.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diharapkan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Penambahan fasilitas dan sarana kerja serta tenaga penyuluh di masing-masing kecamatan/desa.
3. Mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan yang ada di Kecamatan.
4. Pembinaan dan pendampingan yang terus menerus terhadap kelompok.
5. Peningkatan produksi pertanian dengan mengupayakan perubahan pengaturan pola tanam dan tertib tanam.
6. Sosialisasi panganekaragaman pangan untuk merubah kebiasaan masyarakat yang terlalu tergantung pada pangan beras.
7. Perlu dikaji proses penyaluran pupuk bersubsidi dan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida yang lebih optimal serta pentingnya terobosan penggunaan pupuk alternatif terutama pupuk organik melalui diklat bagi para petani.
8. Perlu diprogramkan penambahan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan untuk mensukseskan 1 desa 1 penyuluh.

16. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

16.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan wajib pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan pendekatan multi disiplin serta memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan potensi yang ada.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias sebagai berikut:

1. Kedudukan
Suatu Badan yang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian
2. Tugas Pokok
Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana dan pengembangan institusi.
3. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - b. Pengkoordinasian tugas dan fungsi pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

- c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

16.2. Arah Kebijakan

Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, salah satu tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias adalah menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan kehidupan sosial budaya masyarakat dan sekretariat.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok yang dapat dilaksanakan tidak hanya secara teori.

Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran serta penetapan penggunaan sumber daya yang ada.

Arah kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias tahun 2016 meliputi:

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan.
- b. Peningkatan kapasitas capaian kinerja, tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

16.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SKPD BPMDK Kabupaten Nias yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tertuang pada DPA/DPA-P SKPD BPMDK Kabupaten Nias, antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan kegiatan:

- a. BOP DPD/K Kabupaten dan Kecamatan
- b. Pembinaan dan Fasilitasi DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Nias DPC LPM Kabupaten, LPM Kecamatan.
- c. Pelatihan Keterampilan bagi kelompok Masyarakat dengan memanfaatkan Alat Teknologi Tepat Guna.
- d. Pelatihan keterampilan penyediaan sarana pendukung bagi warga/kelompok Masyarakat Kabupaten/Kecamatan/Desa di Kabupaten Nias
- e. Pembinaan/Fasilitasi/Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten Nias.
- f. Penyusunan Profil Desa.
- g. Pelatihan Budi Daya Jamur.
- h. Pembinaan/Pelatihan Kader Posyandu di Kabupaten Nias.
- i. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam .

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Ronyong Masyarakat di Kabupaten Nias.
- c. Fasilitasi Kegiatan Tim Pegerak PKK Kabupaten Nias.
- d. Koordinasi, Monitoring, Pendataan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program PMPN Mandiri Pedesaan Kabupaten Nias.
- e. Pembinaan dan Fasilitasi pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Nias.
- f. Pemberdayaan Lembaga PKK/Desa PT-P2W-KSS.
- g. Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang kegiatan yang didanai dari Dana Desa.
- h. Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Nias.
- i. Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) Dana Desa di Kabupaten Nias.
- j. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Nias.
- k. Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun 2015.
- l. Peraturan Bupati Nias tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- m. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (RamperDes APBDes).

- n. Peraturan Bupati Nias tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa Kabupaten Nias.
 - o. Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (DPD) Kabupaten Nias.
 - p. Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan APBDes di Kabupaten Nias.
- 3. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**, dengan kegiatan :
- a. Sosialisasi Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaannya.
 - b. Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

16.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 3.260.000.000.-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.402.518.734,-** atau **73,69 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel : 4-69
Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016

16.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Nias yang tercapai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 4-70
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa					
01	Tersusunnya Profil Desa	%	-	46	94,52	Tercapai
02	Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa	Klpk	-	5	5	Tercapai
03	Jumlah LPM desa yang berprestasi	Desa	-	10	-	Tidak Tercapai
04	Jumlah Posyandu desa aktif	Desa	50	5	5	Tercapai
05	Persentase pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	Tercapai
II	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
06	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	Tercapai
07	Jumlah kelompok binaan PKK desa	Klpk	9	9	9	Tercapai
08	Persentase jumlah PKK desa yang aktif	%	100	100	100	Tercapai
09	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	-	100	100	Tercapai
10	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam membangun desa	Desa	3	170	170	Tercapai
III	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					
11	Alokasi Dana Desa (ADD)	%	-	170	170	Tercapai
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
12	Persentase jumlah RPJM Desa	%	-	100	100	Tercapai
13	Persentase jumlah RKP Desa	%	-	100	100	Tercapai
V	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					
14	Persentase pengelolaan administrasi desa yang termasuk kategori baik	%	0	100	100	Tercapai

Dari tabel tersebut di atas, ditemukan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 yang belum tercapai, sehingga perlu kerja keras untuk mengoptimalkannya dimasa yang akan datang sebagai yakni indikator Jumlah LPM Desa Yang Berprestasi.

16.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Nias Tahun 2016, adalah :

- Tingkat partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dan kelembagaan masyarakat pedesaan akan pembangunan dikategorikan masih rendah
- Letak geografis wilayah desa yang masih terisolir dan belum memadai sarana prasarana transportasi sampai ke desa-desa.
- Nilai dan harga hasil perekonomian masyarakat yang tidak stabil.
- Program PNPM-MPd yang sudah dihentikan sampai dengan tahun 2014.

2. Solusi

Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, adalah :

- a. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa terkait pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- b. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi kepada masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan akan partisipasi dan semangat gotong royong pada pelaksanaan pembangunan perdesaan.
- c. Menstabilkan nilai-nilai hasil perekonomian masyarakat dan membuka keterisoliran melalui pembukaan akses sarana transportasi jalan sampai ke desa-desa.
- d. Dengan adanya Dana Desa yang langsung di kelola oleh Pemerintahan Desa melalui penyusunan RAPDes dan APBDes.

17. URUSAN WAJIB KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

17.1. Gambaran Umum

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Nias menjadi satu Unit Kerja SKPD di Kabupaten Nias berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perpustakaan, Seksi Kearsipan dan Seksi Dokumentasi.

17.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan adalah :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah, juga mempersiapkan personalia Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi dalam pelayanan administrasi perpustakaan
- b. Meningkatkan pembinaan perpustakaan, baik itu di Desa/Kelurahan dan Sekolah-sekolah
- c. Meningkatkan Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan adalah :

- a. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam hal kearsipan
- b. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat, workshop, pelatihan dan lain-lain.

17.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen APBD dan P.APD 2016, yang disajikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - b. Processing dan Preservasi bahan Pustaka
 - c. Penyediaan Jasa Perpustakaan
 - d. Layanan Perpustakaan pada hari Sabtu
 - e. Pengembangan Minat dan Budaya Baca
 - f. Lomba Meringkas Berkualitas
2. **Program Penataan Dokumentasi Kepustakaan dan Kearsipan**, dengan kegiatan :
 - a. Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah
 - b. Pengadaan Piranti Pendokumentasian

17.4. Program dan Kegiatan

Untuk Menyelenggarakan Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Nias telah dialokasikan Anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 775.000.000.-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 746.147.013.-** atau **96,27 persen**.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel : 4-71
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2016

17.5. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capai pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Koleksi buku yang ada melalui pengadaan TA. 2016 di Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Nias sebanyak 567 Judul dan 2.774 eksemplar.
2. Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Tahun 2016 sebanyak 1.649 orang, yakni Pengunjung Umum dan pengunjung Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang mana 715 laki-laki dan 931 perempuan.
3. Jumlah Anggota Perpustakaan di Tahun 2016 sebanyak 1.306 orang, yaitu Anggota Umum dan anggota pada MPK yakni 615 laki-laki dan 691 perempuan.
4. Jumlah Desa yang telah dikunjungi Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sebanyak 8 Kecamatan (34 Desa / 34 Sekolah)
5. Jumlah Perpustakaan Desa yang telah dibentuk Perpustakaan Desa di tahun 2016 **TIDAK ADA**, akan tetapi telah diusulkan di Baperasda Provinsi sampai sekarang belum terealisasi.

Secara umum perkembangan pengelolaan dan penataan dokumen dan arsip daerah seperti pada tabel berikut :

Tabel : 4-72
Perkembangan Pengelolaan dan Penataan Pelestarian
Dokumen/ Arsip Daerah Tahun 2016

No	Program dan Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah					
1	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%		100	-	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya jumlah SDM pengelola kearsipan (arsiparis)	Org	2	4	-	Tidak Tercapai
3	Kegiatan penataan arsip daerah	Keg		1	-	Tidak Tercapai
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia	Buku	4.593	4.500	2.774	Tidak Tercapai
5	Jumlah mobil perpustakaan keliling	Unit	-	4	-	Tidak Tercapai
6	Jumlah ruangan perpustakaan	Unit	-	-	-	-
7	Jumlah perpustakaan desa yang dibentuk	Desa	-	41	-	Tidak Tercapai
8	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	485	750	1.649	Tercapai

Sumber : Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kab. Nias

17.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib Perpustakaan dan Kearsipan di daerah yakni antara lain :

- a. Gedung Kantor belum memadai (tidak memenuhi) standart Perpustakaan Umum
- b. Tenaga Fungsional Perpustakaan (Pustakawan) masih belum ada.
- c. Kantor Perpustakaan sangat kekurangan Tenaga Pustakawan.
- d. Ruang baca, ruang Pegawai dan Ruang Referensi belum ada.
- e. Tenaga Fungsional Arsiparis tidak ada.
- f. Tenaga Pegawai sangat kekurangan terlebih dengan adanya kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, beberapa solusi yang disarankan yakni :

- a. Memanfaatkan ruangan yang ada yakni Gedung Kantor Eks. Disporabudpar menjadi ruang Pegawai, Ruang Baca, dan Ruang Koleksi.
- b. Membina dan memanfaatkan tenaga yang ada dengan mengikutsertakan pada Bintek/Diklat yang dilaksanakan baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

- c. Membina para pegawai Perpustakaan tentang tata Kelola Perpustakaan dengan berpedoman pada Peraturan Perpustakaan.
- d. Membina para Pegawai tentang Arsiparis juga beberapa SKPD Lingkup Pemkab Nias.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN

1.1. Gambaran Umum

Sampai saat ini subsektor pertanian masih memberikan sumbangan yang nyata terhadap pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja di pedesaan, peningkatan pendapatan petani dan penyumbang devisa, laju pertumbuhan pembangunan subsektor pertanian relatif semakin tertinggal dibandingkan subsektor lainnya sejalan dengan menurunnya kontribusi pertanian dalam perekonomian nasional.

Kebutuhan akan produk pertanian semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang semakin didominasi oleh beras, semakin berkembangnya industri olahan berbahan dasar pangan, subsektor pertanian masih dihadapkan pada perubahan iklim global dan terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi.

Disamping itu, tanaman perkebunan di Kabupaten Nias merupakan komoditi yang paling menonjol, antara lain karet, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, pinang dan nilam. Berdasarkan tabel dibawah ini terlihat perkembangan luas tanaman dan produksi utama yang ada di Kabupaten Nias pada tahun 2011-2016.

Tabel : 4-73
Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Utama
Di Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016

Komoditas	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Karet	8.046	6.091	8.246	10.296	8.571	5.971	8.713	7.552	8.807	5.480	8.894	5.653
Kelapa	1.455	628	1.488	523,80	1.515	674,30	1.522	764	1.538	1.102	1.540	871,8
Kopi	120	31	120	31,92	118,7	36,97	117	31	59	13	53	5,90
Cengkeh	155	31	155	27,43	124	24,06	103	20	103	3	25	1,6
Nilam	14	2	14	1,86	0	0	14	2	14	2	-	-
Kakao	1.233	511	1.199	588,59	1.414	691	1.421	859	1.473	349	1.487	668
Pinang	12,50	4,8	21,5	7,5	27,30	13,17	34	15	37	11	57	10,90

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Nias

1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan, arah kebijakan pembangunan pertanian dan kehutanan Kabupaten Nias adalah :

- Peningkatan produktivitas usaha pertanian dan kehutanan.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Peningkatan sarana dan prasarana.
- Rehabilitasi hutan dan lahan.
- Penataan pengelolaan administrasi.

1.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam Dokumen APBD dan P-APBD 2016, yang disajikan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan**, dengan kegiatan :
 - Pengembangan Intensifikasi Padi Sawah

- Pengembangan Intensifikasi Umum (Inmum) Tanaman Padi Sawah
 - Pelaksanaan Forum SKPD
 - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Cabe
 - Pengadaan Mini Tiller
 - Pengembangan Jalan Usaha Tani
 - Bantuan Sarana Produksi pada Lokasi Percontohan PKK/PT P2WKSS/KWT
 - Pengumpulan Data Statistik Pertanian
 - Dana Pendukung dan Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
 - Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
 - Pemeliharaan Mesin Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) di Rumah UPPO
 - Pelatihan Operator Alsintan (Hand Tractor, Power Tresher dan Minitiler)
 - Penyediaan Tenaga Mekanik Hand Tractor, Power Tresher dan Minitiler
 - Fasilitasi Rapat Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Tingkat Kabupaten Nias
 - Dana Pendamping Non Fisik DAK 2016
 - Pengembangan Sumber-Sumber Air
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Lauri Kecamatan Sogaeadu (Sisa DAK 2014 Rp. 294.681.000 + SILPA Rp. 29.468.100)
 - Pembangunan Embung di Kecamatan Hiliduho
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier
 - Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan Embung di Kecamatan Sogae'adu
 - Pengadaan Alat Mesin Pemipil Jagung
 - Pengadaan Alat Mesin Penepung Jagung
- 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**, dengan kegiatan :
- Gerakan Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao
- 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**, dengan kegiatan :
- Pengadaan Bibit Kakao
 - Pengadaan Bibit Karet Okulasi
 - Pengadaan Sarana Produksi Bagi Petani Penerima Bantuan Bibit Karet
 - Pelatihan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Karet
 - Penumbuhan dan Pembinaan Petani Penangkar Bibit Karet Okulasi
 - Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan
 - Pembangunan Jalan Produksi di Dusun IV Desa Hiliweto Kecamatan Gido
- 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**, dengan kegiatan :
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
- 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**, dengan kegiatan :
- Pengembangan ternak babi
 - Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna
- 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**, dengan kegiatan :
- Operasional Rumah Potong Hewan
- 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**, dengan kegiatan :
- Pembuatan Kebun Bibit Rakyat
 - Gerakan Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2016
 - Pengkayaan pada Hutan Rakyat
 - Biaya Umum DAK Kehutanan
 - Fasilitasi Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah) Dalam Kawasan Hutan
 - Review Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL) 2016-2020 dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) Tahun 2016
 - Pengadaan Sarana Pengamanan Hutan
 - Pengkayaan pada Hutan Rakyat (Pengadaan Tanaman Kehutanan)
 - Penanaman Tanaman Kehutanan Dalam Hutan Rakyat

1.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan Bidang Pertanian dan Kehutanan pada tahun 2016 SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 19.890.802.130,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 16.400.545.383,-** atau **82,45 persen**.

Uraian pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-74
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian dan Kehutanan
Tahun 2016

1.5. Hasil Capaian Kinerja

Capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pertanian dan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel : 4-75
Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Nias Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pertanian						
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan					
	Padi Sawah					
	1 Luas Tanam	Ha	12.806,00	14.424	12.237,00	Tidak Tercapai
	2 Luas Panen	Ha	8.890,00	11.468	10.331,40	Tidak Tercapai
	3 Produktivitas	Kw/Ha	33	38,5	47,68	Tercapai
	4 Produksi (gabah kering giling)	Ton	29.337,00	44.151	49.260,12	Tercapai
	5 Jumlah Penduduk	Jiwa	131.377,00	151.833	153.849	Tercapai
	6 Kebutuhan	Ton	19.378,11	21.387	23.930	Tercapai
	7 Produksi (beras)	Ton	18.482,31	27.815	27.194	Tidak Tercapai
	8 Perimbangan	Kw/Ha	-895,8	6.428	3.264,50	Tidak Tercapai
	9 % Swasembada	%	0,95	130	113,64	Tidak Tercapai
	Cabe					
	10 Luas Tanam	Ha	102	177	125	Tidak Tercapai
	11 Luas Panen	Ha	95	179	75	Tidak Tercapai
	12 Produktivitas	Kw/Ha	30,15	39,88	36	Tidak Tercapai
	13 Produksi	Ton	286	714	270	Tidak Tercapai
	14 Luas percontohan intensifikasi padi Sawah	Ha	40	260	385	Tercapai
	15 Luas percontohan intensifikasi sayuran/ cabe	Ha	-	20	6	Tidak Tercapai
	16 Panjang jalan usaha tani yang dibangun	M	4.002	-	1.771	Tercapai
	17 Panjang jalan produksi yang dibangun	M	-	-	-	-
	18 Dokumen regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Dok	-	-	-	-
II	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian					
	19 Jumlah Petani yang dilatih dalam menggunakan Hand Tractor, Power Tresher, Minitiller	Org	-	20	40	Tercapai
	20 Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik	Unit	-	20	-	-
	21 Jumlah Bantuan Hand Tractor	Unit	-	10	-	-
	22 Jumlah Bantuan Power Thresher	Unit	-	10	-	-
	23 Jumlah bantuan Rice Milling			-	-	-
	24 Jumlah bantuan Mini Tiller	Unit	-	-	8	Tercapai
	25 Jumlah Pompanisasi tingkat petani	Unit	-	10	-	Tidak Tercapai
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan					
	26 Jumlah Petani Kakao yang dilatih tentang PBK & Pasca Panen	Org	-	100	-	Tidak Tercapai
III	27 Pelatihan SL-PHT bagi Petani	Org	-	120	-	Tidak Tercapai
	28 Pelatihan budi daya Karet	Org	-	300	150	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	Target	Capaian	[7]
IV	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan					
	Karet					
29	Luas Tanam	Ha	8.006	9.000	8.894	Tidak Tercapai
30	Luas Panen	Ha	5.193	5.373	6.782	Tercapai
31	Produktivitas	Ton	1,12	1,130	0,636	Tidak Tercapai
32	Produksi	Ton	5.816	6.071	5.653	Tidak Tercapai
	Kakao					
33	Luas Tanam	Ha	1.173	1.683	1.487	Tidak Tercapai
34	Luas Panen	Ha	658	1.358	888	Tidak Tercapai
35	Produktivitas	Ton	0,722	0,85	0,449	Tidak Tercapai
36	Produksi	Ton	475	1.154	753	Tidak Tercapai
37	Persentase produksi karet yang menerapkan penanganan pasca panen yang baik	%	5	35	25	Tidak Tercapai
38	Persentase produksi Kakao yang menerapkan penanganan pasca panen yang baik	%	5	40	20	Tidak Tercapai
39	Panjang Jalan Produksi Perkebunan	m	-	1.400	849	Tidak Tercapai
40	Peremajaan Tanaman Karet	Ha	-	120	-	-
41	Perluasan Areal Tanaman Karet	Ha	-	40	240	Tercapai
42	Jumlah Bantuan Bibit Kakao Unggulan	Btg	-	30.000	12.000	Tidak Tercapai
43	Jumlah Bantuan Bibit Karet Unggulan	Btg	-	120.000	120.000	Tercapai
44	Kebun Induk Karet (Penangkar Bibit Karet)	Unit	-	-	1	Tercapai
V	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
45	Jumlah hewan yang divaksin	Ekor	14.000	16.800	14.165	Tidak Tercapai
VI	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
46	Jumlah bantuan bibit ternak babi	Ekor	-	350	76	Tidak Tercapai
VII	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					
47	Pembangunan RPH	Unit	-	1	-	Tidak Tercapai
VII	Program Peningkatan Teknologi Peternakan					
48	Pelatihan Kader Vaksinator	Org	-	60	-	Tidak Tercapai
49	Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Org	-	150	40	Tidak Tercapai
	Kehutanan					
VIII	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
50	Luas Kawasan Hutan	Ha	38.418,97	38.418,97	26.108	Tidak Tercapai
51	Luas kerusakan kawasan hutan	Ha	38.293,97	35.315,97	24.932	Tercapai
52	Luas hutan rakyat	Ha	-	96	-	Tidak Tercapai
53	Luas lahan kritis yang rehabilitasi	Ha	725	813	775	Tidak Tercapai
54	Luas reboisasi dalam kawasan hutan	Ha	-	80	-	Tidak Tercapai
55	Luas penghijauan diluar kawasan hutan	Ha	-	112,5	-	Tidak Tercapai
56	Luas hutan bakau yang direhabilitasi	Ha	-	-	-	Tidak Tercapai
57	Jumlah tanaman bakau yang disalurkan	Btg	-	-	-	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	Target	Capaian	[7]
58	Luas hutan yang dibiarkan tanaman kehutanan	Ha	-	450	750	Tercapai
59	Jumlah bibit penghijauan yang disalurkan kepada masyarakat	Btg	40.000	180.000	10.000	Tidak Tercapai
60	Jumlah Gerakan yang melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Keg	1	6	1	Tidak Tercapai
IX Program Penatagunaan dan Pengusahaan Hutan						
61	Jumlah kegiatan penatagunaan dan pengusahaan hutan	Keg	-	3	-	Tidak Tercapai
X Program Peredaran Hasil Hutan						
62	Kegiatan pengawasan hasil hutan	Keg	1	1	-	Tidak Tercapai
XI Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan						
63	Penyuluhan dampak kerusakan hutan	Keg	-	-	-	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Nias

1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan urusan pertanian dan kehutanan di Kabupaten Nias, antara lain :

- Peningkatan produksi pertanian dan peternakan menghadapi permasalahan dari aspek penggunaan benih unggul, pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan masih minimnya penggunaan pupuk secara berimbang.
- Terbatasnya prasarana irigasi dan belum berfungsinya P3A di setiap daerah irigasi
- Ancaman hama dan penyakit masih relatif tinggi.
- Tingkat kemampuan kelompok tani dan kesadaran berkelompok masih rendah.
- Pengetahuan, keterampilan, sikap (PKS) dan etos kerja petani masih rendah.
- Mutu hasil pertanian masih rendah disebabkan penanganan pasca panen yang kurang baik.
- Harga pasar yang fluktuatif dan posisi tawar petani yang rendah.
- Penarikan Kewenangan bidang Kehutanan ke tingkat Propinsi sehingga banyak kegiatan bidang kehutanan yang tidak terlaksana pada tahun 2016.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan penyuluhan dalam rangka alih teknologi terutama dalam hal perbaikan teknik bercocok tanam (penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang).
- Pembangunan prasarana irigasi dan penumbuhan/pemberdayaan P3A dalam rangka optimalisasi pemanfaatan air.
- Pelaksanaan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dalam rangka meningkatkan kemampuan petani untuk mengendalikan hama/penyakit tanaman.
- Penyuluhan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani.
- Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan berbagai metode penyuluhan yang ada.
- Perbaikan penanganan pasca panen pada tingkat petani.
- Pengembangan sistem informasi pasar dan penguatan perkumpulan/asosiasi petani menurut komoditas yang dikelola.
- Penyerahan kewenangan dan daftar kegiatan yang belum dilaksanakan untuk dilanjutkan oleh pihak Propinsi.

2. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Gambaran Umum

Kabupaten Nias memiliki banyak potensi sumber daya alam yang besar, baik yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun di bagian daratan. Di wilayah pesisir, laut merupakan sumber daya yang memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Urusan perikanan menjadi pilihan mata pecaharian sebagian besar masyarakat karena sumber daya yang ada sangat menjanjikan meskipun dikelola secara tradisional dan tidak secara optimal.

Wilayah Perikanan Tangkap yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Nias terdapat di 3 Kecamatan (Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato) pada 16 Desa pesisir yang di dalamnya terdapat 5 pulau kecil yang terletak di wilayah Timur Pulau Nias, sedangkan Perikanan Budidaya tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias sebagai Instansi teknis yang diberi kewenangan melaksanakan pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Nias, memiliki Visi “Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera” dan dituangkan dalam Misi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan
- b. Mengembangkan usaha perikanan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat
- c. Meningkatkan system pengawasan yang terpadu dan partisipatif terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- d. Penguatan kelembagaan dan kapabilitas masyarakat perikanan.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Nias merupakan kebijakan yang berkaitan dengan visi, misi pembangunan daerah yang dijabarkan pada visi, misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias.

Pendekatan dalam perumusan arah kebijakan ini mengikuti amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan umum yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias tahun 2011-2016, yaitu antara lain :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pesisir, Laut dan pulau-pulau Kecil.
- c. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Perluasan wilayah tangkapan nelayan ke ZEEI dan laut lepas dengan dukungan peralatan yang memadai.
- e. Pengembangan budidaya perikanan
- f. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI)
- g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- h. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan

2.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam dokumen DPA/DPPA SKPD Tahun 2016, yang disajikan sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**, dengan kegiatan :
 - a. Pembuatan Bagan Tancap
2. **Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
3. **Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya Laut**, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat Pengawasan
 - b. Patroli dan Operasional Kapal Pengawasan Wilayah Penangkapan Ikan di Perairan Laut Kabupaten Nias

4. **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Pokdakan
 - b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR
 - c. Pembangunan Demplot Budidaya Ikan Air Tawar
 - d. Pengadaan Calon Induk Ikan Air Tawar
 - e. Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar
 - f. Pelaksanaan Penilaian Peningkatan Kapasitas Kelas Kelompok Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap (POKDAKAN dan KUB) di Kabupaten Nias
5. **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Alat Yang Dijatuhkan (Falling Gears) dhi. Tramel Net.
 - b. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
 - c. Pengadaan Rumpon
 - d. Pengadaan Motorisasi Perahu Nelayan
 - e. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (Gill Net)
 - f. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
6. **Program Perencanaan, Pendataan dan Informasi**, dengan kegiatan :
 - a. Pendataan dan Penyajian Data Statistik Perikanan
 - b. Survey dan pemetaan potensi Sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Nias
 - c. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Desa Percontohan PT2WKSS di Kabupaten Nias
8. **Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang**, dengan kegiatan :
 - a. Pembuatan Terumbu Karang Buatan
9. **Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan**, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.4. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias telah dialokasikan Belanja Langsung sebesar **Rp. 8.443.634.315,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 7.041.921.725,-** atau **83,40 persen**.

Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-76
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016

2.5. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capaian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan secara kumulatif sampai dengan tahun 2016 adalah tercapainya beberapa target dari indikator kinerja seperti pembuatan bagan tancap bagi nelayan tradisional diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 4 unit, Cakupan bina kelompok masyarakat pengawas sebanyak 4 kelompok, Penurunan Tingkat Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan 75 %, Jumlah sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebanyak 2 unit yaitu Speed Boat Pengawasan dan Mobil Pengawasan Kelautan dan Perikanan, Frekuensi pelaksanaan Patroli pengawasan di laut sebanyak 11 kali, Produksi perikanan budidaya sebanyak 19,56 ton, Cakupan bina Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) sebanyak 65 kelompok, Jumlah Calon Induk Ikan Air Tawar sebanyak 1.307 ekor, Jumlah Demplot Budidaya Ikan Air Tawar sebanyak 6 unit, Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 878,54 ton, Cakupan bina Kelompok Nelayan (KUB) sebanyak 65 Kelompok, Jumlah Gill Net size 1 1/4 Inch sebanyak 580 piece, Jumlah Trammel Net sebanyak 686 set, Rawai Dasar sebanyak 90 set, Jumlah dokumen statatus pengelolaan dan atau model pemanfaatan SDKP sebanyak 1 dokumen, Jumlah ketersediaan data base, peta potensi dan arah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebanyak 1 dokumen, Jumlah personil/aparatur yang mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 orang, Jumlah habitat ikan buatan sebanyak 60 unit, Jumlah pengolahan hasil perikanan sebanyak 150 unit, Jumlah unit prasarana pasar pemasaran hasil perikanan sebanyak 30 unit.

Berdasarkan indikator kinerja yang direncanakan dalam RPJMD masih terdapat beberapa target yang masih belum tercapai hingga tahun 2016 seperti pembuatan bagan tancap bagi nelayan tradisional, tidak berfungsinya beberapa bangunan strategis kelautan dan perikanan (Jetty di Bozihona dan Gazamanu, Tempat Pelelangan Ikan di Bozihona, Balai Benih Ikan Air Tawar dan Kios Pemasaran Ikan di Hiliweto Gido), Jumlah prasarana pengawasan yaitu Pembangunan Garasi Speed Boat Pengawasan, Cakupan bina Kelompok Nelayan (KUB), kegiatan sosialisasi/penyuluhan perikanan.

Status pencapaian target kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat lebih jelas dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 4-77
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir					
1	Jumlah Bagan Tancap bagi nelayan tradisional di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Unit	-	2	4	Tercapai
2	Jumlah Sarana Tambat Kapal/Jetty yang terbangun di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Unit	-	-	-	-
3	Jumlah prasarana pendukung perikanan diwilayah pesisir	Unit	-	5	-	Tidak Tercapai
4	Ketersediaan sarana penerangan bagi masyarakat nelayan diwilayah Pesisir	Unit	34	15	-	Tidak Tercapai
II	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan					
5	Jumlah sarana pengawasan POKMASWAS	Unit	-	-	-	-
6	Cakupan bina kelompok masyarakat pengawas	Klpg	3	3	4	Tercapai
7	Penurunan Tingkat Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan	%	100	40	75	Tercapai
III	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam penayagunaan sumberdaya laut					
8	Jumlah sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Unit	-	-	-	-
9	Frekuensi pelaksanaan Patroli pengawasan di laut	Kali/Tahun	2	8	11	Tercapai
10	Penurunan Tingkat Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan	%	100	40	75	Tidak Tercapai
11	Jumlah prasarana pengawasan	Unit	-	-	-	-
IV	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					
12	Produksi perikanan budidaya	Ton	2,57	3,41	19,56	Tercapai
13	Cakupan bina Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Klpg	29	5	65	Tercapai
14	Jumlah Bibit Ikan Air Tawar	Ekor	-	50.750	-	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
15	Jumlah Calon Induk Ikan Air Tawar	Kg	-	600	1.307	Tercapai
16	Jumlah BBI Air Tawar	Unit	-	-	-	-
17	Jumlah Demplot Budidaya Ikan Air Tawar	Unit	1	1	6	Tercapai
V	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					
18	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	79,171	325,788	878,54	Tercapai
19	Cakupan bina Kelompok Nelayan (KUB)	Kub	50	60	65	Tercapai
20	Jumlah kapal motor 0,5 GT berikut kelengkapannya	Unit	154	32	-	Tidak Tercapai
21	Jumlah kapal motor 3 GT berikut kelengkapannya	Unit	-	2	-	Tidak Tercapai
22	Jumlah kapal motor 5 - 7 GT berikut kelengkapannya	Unit	12	3	-	Tidak Tercapai
23	Jumlah Gill Net size 1 1/4 Inch	Piece	135	100	580	Tercapai
24	Jumlah Trammel Net	Set	-	0	686	Tercapai
25	Jumlah Rawai Dasar	Unit	10	0	90	Tercapai
26	Jumlah Rumpun	Unit	-	30	50	Tercapai
VI	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan					
27	Kegiatan sosialisasi/penyuluhan perikanan	Keg	-	-	-	-
VII	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					
28	Berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibangun.	%	68	-	-	-
	Berfungsinya Tambatan Perahu/Jetty yang telah dibangun di :					
29	- Desa Bozihona	%	58	-	-	-
30	- Desa Gazamanu	%	20	100	-	Tidak Tercapai
VIII	Program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut					
31	Dokumen status pengelolaan dan atau jumlah model pemanfaatan SDKP	Dok	-	-	1	Tercapai
IX	Program Perencanaan, Pendataan dan Informasi					
32	Ketersediaan Data Base, peta potensi dan arah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Dok	-	-	1	Tercapai
33	Data Base Sumber Daya Terumbu Karang Kabupaten Nias	Dok	-	-	-	-
X	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
34	Jumlah POKDAKAN yang dilatih	Klpg	-	3	-	Tidak Tercapai
35	Jumlah KUB yang dilatih	Kub	-	3	-	Tidak Tercapai
36	Jumlah Nelayan yang mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan	Org	-	6	-	Tidak Tercapai
37	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan	Org	-	0	-	Tidak Tercapai
38	Jumlah Personil/Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan	Org	-	2	1	Tidak Tercapai
XI	Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang dan hutan Mangrove berbasis masyarakat					
39	Jumlah habitat ikan buatan	Unit	-	30	60	Tercapai
40	Jumlah mangrove yang ditanam	Btg	-	-	-	-
XII	Program Penyediaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan					
41	Jumlah unit pengolahan hasil perikanan	Unit	8	0	150	Tercapai
42	Jumlah unit prasarana pasar pemasaran hasil perikanan	Unit	2	0	30	Tercapai

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias

2.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Berdasarkan target indikator kinerja dalam RPJMD maka dapat dilihat masih banyak target yang belum tercapai dikarenakan berbagai hal sebagai berikut :

a. Keterbatasan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan.

Kabupaten Nias belum memiliki infrastruktur yang lengkap dan memadai untuk proses produksi perikanan. Bangunan yang telah dibangun banyak yang tidak berfungsi seperti Jetty di Bozihona dan

Gazamanu, TPI di Bozihona, Kios Pemasaran Ikan di Hiliweto, Balai Benih Ikan Air Tawar di Hiliweto. Tidak berfungsinya beberapa infrastruktur tersebut disebabkan diantaranya kondisi alam sekitar bangunan yang telah berubah oleh faktor alam seperti iklim. Tak dipungkiri bahwa penelitian yang mendalam terhadap kesesuaian lokasi bangunan-bangunan tersebut kurang mendapat perhatian yang juga turut mempengaruhi tidak berfungsinya infrastruktur tersebut.

- b. Keterbatasan sarana di bidang kelautan dan perikanan.
Dengan kondisi sarana di bidang perikanan saat ini terlebih di bidang perikanan tangkap, baik jumlah maupun ukuran armada penangkapan ikan, jumlah peralatan tangkap, maupun alat bantu penangkapan lainnya dibandingkan dengan potensi perikanan yang ada di perairan kepulauan Nias masih sangat terbatas, sehingga tidak bisa member pengaruh yang signifikan dalam memacu pertumbuhan perekonomian nelayan. Hal yang sama juga terjadi di bidang budidaya perikanan.
- c. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan masih rendah.
Nelayan di perairan Kabupaten Nias pendidikannya masih rendah dan sulit untuk menerima perkembangan teknologi perikanan yang lebih baik, selain itu Kapasitas aparatur yang membidangi juga belum memadai sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak maksimal.
- d. Terbatasnya Data dan Informasi Perikanan.
Belum adanya data yang menjadi acuan pada perencanaan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dan data adalah merupakan hal yang sangat penting untuk pengemabihan kebijakan untuk pengembangan pembangunan bidang kalautan dan perikanan.
- e. Menurunnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Akibat dari kerusakan habitat laut mengakibatkan penurunan populasi biota laut yang ada terutama ikan, sehingga dengan demikian perlu adanya sosialisasi akan pentingnya menjaga kelestarian kelautan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Solusi

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, solusi yang diharapkan adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan Teknis perikanan
- b. Pemanfaatan Sarana pengawasan berupa Speed Boat pengawasan dan Kendaraan Roda-4 Pengawasan Perikanan secara maksimal dan meningkatkan operasional yang memadai.
- c. Meningkatkan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan atau POKDAKAN.
- d. Pemanfaatan sarana penangkapan ikan oleh nelayan secara maksimal
- e. Pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut
- f. Pengembangan armada penangkap ikan baik dari segi kuantitas maupun tonase serta kualitas
- g. Pengembangan jenis dan alat penangkap ikan serta pemanfaatan alat penangkap ikan yang ada.

3. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Nias, dimana Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias di Bidang Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energy dan Sumber Daya Mineral;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Pemerintah Kabupaten Nias di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energy dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energy dan Sumber Daya Mineral, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati Nias sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan, dalam pelaksanaan program kegiatannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias

telah membangun Pasar Tradisional dan melakukan beberapa Pelatihan untuk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

3.2. Arah dan Kebijakan

Arah kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain :

- a. Melaksanakan efisiensi kegiatan administrasi yang bersih dan responsive;
- b. Meningkatkan kemampuan dan sumber daya aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Meningkatkan kegiatan-kegiatan dan partisipasi masyarakat Kabupaten Nias dalam pembangunan melalui berbagai ragam pelatihan dan bimtek untuk mengangkat potensi-potensi industri, perdagangan, energi dan sumber daya mineral di wilayah Kabupaten Nias;
- d. Membuka peluang perdagangan melalui pembangunan fisik dan sarana perdagangan;
- e. Meningkatkan pengawasan-pengawasan potensi dan pemanfaatan industri, perdagangan, energy dan sumber daya mineral di wilayah Kabupaten Nias;
- f. Meningkatkan inisiatif bagi pengembangan-pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal (mikro hidro, surya dan angin).

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Dokumen DPA/DPPA Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016, yang disajikan sebagai berikut :

- a. **Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**, dengan kegiatan :
 - Bimtek dan Bantuan Peralatan Teknik Pengolahan Dodol dan Keripik
 - Bimtek dan Bantuan Peralatan Teknik Meubel Kayu
 - Bimtek dan Bantuan Peralatan Kerajinan Batu Akik
 - Mengikuti Pameran di Luar Daerah
 - Pendataan dan pengembangan industri kecil menengah dan perdagangan
 - Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kabupaten Nias
- b. **Program Pengawasan Hasil-Hasil Industri**, dengan kegiatan :
 - Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Peredaran Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai dan yang dilekati Pita Cukai Palsu di Kabupaten Nias
 - Pembuatan papan informasi peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu
- c. **Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan**, dengan kegiatan :
 - Pengadaan PLTS Tersebar di Wilayah Kabupaten Nias
 - Pengadaan PLTS Tersebar untuk Fasilitas Sosial
 - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sistem PLTS Tersebar dan Terpusat di Kabupaten Nias.
 - Monitoring dan Pengawasan Terhadap Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan (FS dan DED)
 - Pemetaan Lokasi Potensi Mineral, Batu Bara dan Sungai di Kabupaten Nias
- d. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, dengan kegiatan :
 - Pengawasan Terhadap Barang Kadaluaarsa dan Bahan Makanan yang Mengandung Formalin dan Bahan Pengawet lainnya.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang.
 - Pengawasan Terhadap Harga Barang Bersubsidi.
 - Pengembangan Informasi Pasar dan Pemantauan Gejolak Harga Pasar di Kabupaten Nias.
 - Pelaksanaan Operasi Pasar.
- e. **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**, dengan kegiatan :
 - Rehabilitasi Pasar Tradisional di Desa Lolozasai Kecamatan Gido
 - Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Dekha Kecamatan Mau
 - Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Lolofaoso Lalai Kecamatan Hiliserangkai

- Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo
- Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai

3.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016, telah dialokasikan anggaran pada SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias sebesar **Rp. 9.238.782.164,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 6.233.599.138,-** atau **67,47 persen**.

Selanjutnya realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel : 4-78
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2016

3.5. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capai Program dan Kegiatan pada Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : 4-79
Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian, Perdagangan,
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Perdagangan					
I.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
1.	Pasar tradisional yang dibangun	Unit	-	2	5	Tercapai
2.	Pasar semi modern (tertutup) yang dibangun	Unit	-	-	-	-
II.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					
3.	Jumah kegiatan bidang perlindungan konsumen	Keg	-	1	1	Tercapai
4.	Jumlah kegiatan bidang pengendalian dan pengawasan perdagangan	Keg	-	4	4	Tercapai
	Industri					
III.	Program Pembinaan dan Pengembangan IKM					
5.	Pertumbuhan jumlah industry skala menengah-besar	Unit	-	-	-	-
6.	Pameran industry, perdagangan para pengusaha kecil dan menengah	Keg	-	1	2	Tercapai
7.	Kegiatan publikasi hasil industry	Keg	-	1	1	Tercapai
8.	Cakupan binaan industry makanan ringan	Org	10	5	5	Tercapai
9.	Cakupan binaan pengrajin kayu	Org	33	10	10	Tercapai
10.	Bimtek pengolahan Sumber Daya Alam	Org	-	5	5	Tercapai
IV.	Program Pengawasan Hasil-Hasil Industri					
11.	Pengawasan terhadap produk yang dilekati pita cukai	Keg	1	-	1	Tercapai
	Energi dan Sumber Daya Mineral					
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan					
12.	Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB	%	3,74	3,76	3,76	Tercapai
13.	Perda Pengaturan Bidang Pertambangan	Dok	1	-	-	-
VI.	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan					
14.	Perda tentang pemanfaatan air	Dok	-	-	-	-
15.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	45,29	70	46	Tidak Tercapai
16.	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Unit	-	-	-	-
17.	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar yang diadakan	Unit	100	150	164	Tidak Tercapai
		Unit	-	94	-	-
18.	Studi Kelayakan Potensi Air Terjun di Kab. Nias	Kec	-	-	-	-
19.	Pemutakhiran Data Teknis dan Dokumentasi	Desa	-	-	-	-
20.	Publikasi Peta Tematik	Kec	-	3	10	Tercapai
VII.	Program Pengembangan Energi Alternatif					

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun 2016		Status Capaian
				Target	Capaian	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
21.	Kegiatan pemanfaatan teknologi biogas	Keg	-	2	-	Tidak Tercapai
22.	Jumlah unit pengadaan peralatan teknologi biogas	Unit	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindag ESDM Kab. Nias

3.6. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami permasalahan antara lain :

- Rendahnya Produksi dan mutu hasil IKM, serta tantangan untuk menumbuhkan industri-industri kecil menengah dalam mengolah hasil pertanian, perikanan dan sumber daya alam lainnya.
- Minimnya upaya dan dukungan sarana dan prasarana pemberdayaan pedagang kecil untuk peningkatan produksi dalam negeri.
- Minimnya ketersediaan energi terbarukan, air bersih dan pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan Belum ada peraturan tentang pemanfaatan sumber daya mineral karena adanya perubahan undang-undang tentang pengaturan pengelolaan mineral dan batu bara.
- Rendahnya kualitas SDM pelaku industry kecil menengah sehingga produk yang dihasilkan masih belum bisa berdaya saing.
- Penguasaan informasi pasar masih terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang disarankan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Produksi dan Mutu IKM melalui Pelatihan dan bantuan teknik serta menumbuhkembangkan IKM-IKM baru.
- Memberdayakan para pedagang kecil dengan merevitalisasi pasar tradisional dalam meningkatkan mutu produksi dalam negeri.
- Mengoptimalkan pencarian sumber energi terbarukan, air bersih yang baru melalui kegiatan survey di beberapa lokasi yang memiliki potensi dan memprogramkan penambahan dana dan tenaga-tenaga ahli dalam pemanfaatan sumber daya mineral.
- Perlu dilaksanakan pemilihan komoditi inti industry dan membuat kebijakan-kebijakan pembinaan yang menyokong pertumbuhan industri yang optimal.
- Perlu kegiatan pemagangan dan pelatihan bagi kelompok industry sehingga produktifitas hasil industry khususnya home industry mampu bersaing di pasar baik kebutuhan pasar lokal maupun ekspor.
- Perlu dilaksanakan pelatihan Enterpreneusip bagi pengusaha.
- Melakukan pengembangan informasi pasar dan kebijakan dunia usaha.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, 99 dan 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Merujuk pada PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen Teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Pemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Nias menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang didanai dari alokasi anggaran Kementerian dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias.

Dengan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DPA-018.08.4.079053/2016 melalui Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 608.580.000,- dan telah teralisasi sebesar Rp. 435.035.800,- atau 71,48 persen, dengan program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.

Tabel : 5-1
Realisasi Program dan Kegiatan APBN Tugas Pembantuan
pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian				
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim (3 unit embung)	300.000.000	100	300.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Perkantoran	98.440.000	100	89.205.900
3.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Layanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	210.140.000	100	45.829.900
JUMLAH			608.580.000	100	435.035.800

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Nias tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintah bawah atau pemerintahan Desa.

C. Tugas APBN Lain yang Diterima

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Nias tidak menerima pelaksanaan tugas-tugas yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan yang terdiri dari:

A. Kerjasama Antar Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Kerjasama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerjasama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerjasama yang diperoleh daerah dapat berupa uang yang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi atas pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

Program kerjasama antar daerah dalam wilayah Kepulauan Nias telah dimulai dan dideklarasikan sejak tanggal 9 Juli 2011 yang ditandai dengan dikeluarkannya Deklarasi Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias. Namun sampai dengan tahun 2016, program kerjasama ini belum dapat disepakati terkait dengan objek yang akan dikerjasamakan antar daerah.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dimaksudkan disini adalah kerjasama yang dilakukan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah.

Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2016 adalah :

1. PT. BPJS

1. Dasar Hukum	: MOU Nomor 04/KTR/I-13/0116 dan Nomor 445/7806/RS
2. Bidang kerjasama	: Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan
3. Nama Kegiatan	: Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Bagi Peserta BPJS
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: PT. ASKES (Persero)
5. Jangka waktu kerjasama	: Tahun 2016
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlayani seluruh peserta Askes Sosial PT.BPJS
7. Permasalahan dan Solusi	: --

2. PT. MENDJANGAN

1. Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 445/5712/RS/IX/2015 dan Nomor 0168/M/KSO/IX/2015
2. Bidang kerjasama	: Pelayanan Hemodialisa
3. Nama Kegiatan	: Kerjasama Operasional Mesin Hemodialisa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: RSUD Gunungsitoli
5. Jangka waktu kerjasama	: 5 (lima) tahun sejak unit-unit mulai difungsikan
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlayani pasien gagal ginjal di RSUD Gunungsitoli
7. Permasalahan dan Solusi	: --

3. PT. TIRTA MEDICAL INDONESIA

1. Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Operasional Pinjam Pakai Alat Laboratorium Nomor 445/2376/RS dan Nomor 0211/TMI/V/2015
2. Bidang kerjasama	: Pelayanan Laboratorium
3. Nama Kegiatan	: Kerjasama Operasional Pinjam Pakai Alat Laboratorium
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: RSUD Gunungsitoli
5. Jangka waktu kerjasama	: 06 Mei 2015 s.d. 06 Mei 2020
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium di RSUD Gunungsitoli
7. Permasalahan dan Solusi	: --

4. Akademi Kebidanan HAGA Nias

1. Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Nomor: 357/AKBID-HAGA/Y.2/X/2014 dan 893.3/5355/DIKLAT/X/2014
2. Bidang kerjasama	: Pendidikan
3. Nama Kegiatan	: Praktek Pendidikan Kebidanan
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: Yayasan AKBID HAGA
5. Jangka waktu kerjasama	: Oktober 2014 s.d. Oktober 2017
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlaksananya praktek mahasiswa kebidanan
7. Permasalahan dan Solusi	: --

5. Akademi Keperawatan Gunungsitoli

1. Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Nomor 415/1297-UPT/AK{ER/2016 dan Nomor 893.3/6413/DIKLAT/XI/2016
2. Bidang kerjasama	: Pendidikan Keperawatan
3. Nama Kegiatan	: Praktek Klinik Keperawatan
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: AKPER Gunungsitoli
5. Jangka waktu kerjasama	: November 2016 – November 2018
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlaksananya praktek mahasiswa keperawatan
7. Permasalahan dan Solusi	: --

6. SMK Negeri Dharma Caraka Gunungsitoli

1. Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Nomor 421.5/527-PP/V/2016 dan Nomor 893.3/2832/DIKLAT/V/2016
2. Bidang kerjasama	: Pendidikan
3. Nama Kegiatan	: Praktek Kerja Industri/ Praktek Klinik Keperawatan
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: Yayasan SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunungsitoli
5. Jangka waktu kerjasama	: Mei 2016 s.d. Mei 2017
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlaksananya praktek lapangan siswa SMK Negeri 1 Dharma Caraka
7. Permasalahan dan Solusi	: --

7. DINAS KESEHATAN

1. Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Nomor 440/6369/YANKES/XI/2016 dan Nomor 893.3/6391/DIKLAT/XI/2016
2. Bidang kerjasama	: Magang Bidan Desa
3. Nama Kegiatan	: Magang Bidan Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
5. Jangka waktu kerjasama	: 25 – 09 November 2016
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlaksananya magang bidan desa
7. Permasalahan dan Solusi	: --

8. YAYASAN OBOR BERKAT INDONESIA

1. Dasar Hukum	: MOU Nomor 445/458/RS/2016
2. Bidang kerjasama	: Perjanjian Kerjasama Operasi Hernia dan Bibir Sumbing
3. Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Operasi Hernia dan Bibir Sumbing
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: Yayasan OBI
5. Jangka waktu kerjasama	: 11 - 13 Februari 2016
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlayani dan terlaksananya Operasi Hernia dan Bibir Sumbing di RSUD Gunungsitoli
7. Permasalahan dan Solusi	: --

9. TEARS INTERNATIONAL

1. Dasar Hukum	: Perjanjian Kerjasama Bakti Sosial Nomor 9015/TEARS/IX/2016 dan Nomor 445/4951/RS/2016
2. Bidang kerjasama	: Bakti Sosial Kesehatan
3. Nama Kegiatan	: Bakti Sosial Kesehatan Operasi Katarak Gratis
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: TEARS International
5. Jangka waktu kerjasama	: 11 – 13 Oktober 2016
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlayani dan terlaksananya operasi bagi penderita katarak di RSUD Gunungsitoli
7. Permasalahan dan Solusi	: --

10. PT. MULTAZAM

1. Dasar Hukum	:	Perjanjian Kerjasama Nomor 011/5232/PSP/XI/2016 dan Nomor 049/PKS/LB3/MTZ/XI/2016
2. Bidang kerjasama	:	Pengolahan Limbah Rumah Sakit
3. Nama Kegiatan	:	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	:	RSUD Gunungsitoli
5. Jangka waktu kerjasama	:	2016
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	:	Terlaksananya Pengolahan Limbah RSUD Gunungsitoli sebanyak 3.825,2 kg
7. Permasalahan dan Solusi	:	--

11. KANTOR AKUNTAN PUBLIC FAHRUDIN DAN MAHYUDI

1. Dasar Hukum	:	Surat Perintah Kerja
2. Bidang kerjasama	:	Audit Laporan Keuangan BLUD
3. Nama Kegiatan	:	Audit Laporan Keuangan BLUD oleh Auditor Independen
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	:	RSUD Gunungsitoli
5. Jangka waktu kerjasama	:	2016
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	:	Terlaksananya audit laporan keuangan BLUD Gunungsitoli oleh auditor independen
7. Permasalahan dan Solusi	:	--

12. PT. ASKES

1. Dasar Hukum	:	Nomor : <u>FEB- 02/C.2.4/2016</u> 900/6526/BPKAD/2016
2. Bidang kerjasama	:	Keuangan
3. Nama Kegiatan	:	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Nias
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	:	APBD
5. Jangka waktu kerjasama	:	--
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	:	Terlaksananya pengelolaan iuran JKK dan JKM Pemerintah Kabupaten Nias
7. Permasalahan dan Solusi	:	--

13. PT. Bank SUMUT

1. Dasar Hukum	:	Nomor : <u>900/22/2012</u> 1604/KC07-OPS/Mou/2012
2. Bidang kerjasama	:	Keuangan
3. Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Nias
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	:	--
5. Jangka waktu kerjasama	:	--
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	:	Terlaksananya pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Nias
7. Permasalahan dan Solusi	:	--

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias terdapat berbagai instansi vertikal, yaitu Kepolisian Resort Nias, Komando Distrik Militer 0213/Nias, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Pos TNI AL Gunungsitoli, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli dan Kantor Departemen Agama. Mengingat bahwa masing-masing instansi vertikal tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, maka telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal sehingga terdapat keselarasan, keserasian dan keterpaduan meliputi berbagai kegiatan dengan melibatkan instansi vertikal melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang setiap tahun rutin dilaksanakan, rapat koordinasi pemerintahan yang dijadwalkan setiap bulannya, dan rapat-rapat lainnya dalam menjaga keharmonisan dan keterpaduan program dan stabilitas daerah agar tetap kondusif.

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan instansi vertikal di daerah, dilakukan melalui:

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi vertikal di Kabupaten Nias salah satunya dilakukan melalui Forum Unsur Muspida sebagai upaya pemantapan stabilitas dan keamanan daerah di Kabupaten Nias serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian diantara unsur pimpinan daerah yang beranggotakan Bupati Nias, Wakil Bupati Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias, Dandim 0213/Nias, Kapolres Nias, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. Rapat Muspida dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang dibahas dalam rapat Muspida terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan. Besar anggaran yang tertampung dalam kegiatan ini sebesar *Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)*.

2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nias.

Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nias, dengan melibatkan unsur Kodim 0213 Nias, Polres Nias, Kejari Gunungsitoli, Angkatan Laut dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor 300/273/K/2012 tanggal 07 November 2012, dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini kecenderungan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta mengantisipasi secara dini terhadap wilayah rawan dari gangguan kelompok radikal untuk segera dilaporkan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Besar anggaran yang tertampung dalam kegiatan ini sebesar *Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*.

3. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan melibatkan beberapa unsur instansi vertikal yang berada di daerah antara lain Polres Nias, Dan POM Gunungsitoli – Nias, JASARAHARJA dan Organisasi Pengusaha Angkutan (ORGANDA) di Kabupaten Nias. Koordinasi ini difasilitasi oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias dan dilaksanakan dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah bidang lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum

Kabupaten Nias, pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan umum di jalan raya dan mengatasi permasalahan/persoalan tentang lalu lintas angkutan jalan. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupten Nias Tahun 2016 sebesar *Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*.

Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2016, beberapa koordinasi yang telah dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dengan instansi vertikal di Kabupaten Nias, antara lain yaitu:

1. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias dalam rangka penyusunan Buku Nias dalam Angka (NDA), Buku PDRB Kabupaten Nias, Indeks Harga Bahan Konstruksi (IHBK) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan SKPD Penyelenggara adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias dalam rangka penyusunan Indikator Ekonomi Daerah di Kabupaten Nias dan Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Nias Tahun 2015 dengan SKPD Penyelenggara adalah Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ubinan Prakarsa Kabupaten dengan SKPD Penyelenggara adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nias.
4. Koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Nias dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dengan SKPD Penyelenggara adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nias.
5. Koordinasi dengan Pos TNI-AL Gunungsitoli, Polair Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam rangka patroli dan pengawasan wilayah penangkapan ikan di perairan laut Kabupaten Nias dengan SKPD Penyelenggara adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias.
6. Koordinasi dengan SAR Nias, BMKG Gunungsitoli, BULOG Gunungsitoli, PT. (Persero) PLN Cabang Gunungsitoli, Polres Nias, Kodim 0213/Nias, RRI Gunungsitoli dan BPS Kabupaten Nias dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kepulauan Nias.
7. Koordinasi dengan PT. Pos Indonesia Cabang Gunungsitoli dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nias dengan SKPD Penyelenggara adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias.
8. Koordinasi dengan Perum Bulog Gunungsitoli dalam rangka Penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Wilayah Kabupaten Nias.
9. Kegiatan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nias, dengan melibatkan denominasi gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor 450/108/K/2013 tanggal 11 April 2013, yang bertujuan untuk memelihara Kerukunan antara Umat Beragama yang ada di Kabupaten Nias.
10. Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional di Kabupaten Nias (yakni Hari Kebangkitan Nasional, HUT Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan), dengan melibatkan unsur Kodim 0213/Nias, Polres Nias, dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, yang bertujuan untuk Tingginya Rasa Kesadaran/Kesetiaan terhadap Bangsa dan Negara Indonesia.
11. Kegiatan Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera pada tanggal 17 setiap bulan di Kabupaten Nias, dengan melibatkan unsur Kodim 0213/Nias, Polres Nias, Instansi Vertikal dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran aparatur dalam melaksanakan Upacara Bendera.
12. Koordinasi dengan Kodim 0213/Nias dalam rangka seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Nias Tahun 2016 dengan SKPD penyelenggara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias.
13. Koordinasi dengan pihak Polres Nias/Satreskrim Polres Nias dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan SKPD penyelenggara koordinasi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka pembinaan batas wilayah serta dalam rangka penyelesaian permasalahan terhadap batas daerah Kabupaten Nias dengan daerah otonom baru, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Nias telah membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Nias dan telah melakukan klarifikasi serta pengambilan titik koordinat batas daerah antara Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Selatan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun ulah manusia (man made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain :

- ⇒ Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya ulah manusia (man made hazards) yang dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).
- ⇒ Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bencana.
- ⇒ Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam :

- ⇒ Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- ⇒ Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- ⇒ Pengurangan resiko bencana dan penanggulangan resiko bencana dengan program pembangunan
- ⇒ Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Apabila dilihat dari letak geografis, topografis dan iklim, Kabupaten Nias termasuk rentan terhadap bencana gempa, bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, kebakaran, dan kekeringan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan yang terus berjalan, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu intensitas dan jumlah terjadinya bencana hidrometeorologi serta penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Nias sepanjang tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 6-1
Jenis dan Frekuensi Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	Jenis Bencana	Frekuensi (Kali)	Keterangan
1	Kebakaran	13	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebakaran terjadi di Kecamatan Mau, Bawolato, Somolomolo, Idanogawo, Ulugawo dan Botomuzoi dengan korban 13 KK▪ Tanah Longsor terjadi di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi, Bawolato dan Mau dengan korban 8 KK▪ Angin Kencang terjadi di Kecamatan Mau dengan korban 1 KK
2	Longsor	4	
3	Angin Kencang	1	
Jumlah		18	

Sumber : BPBD Kabupaten Nias

2. Status Bencana

Selama tahun 2016 bencana yang terjadi di Kabupaten Nias masih tergolong tergolong bencana lokal.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Nias pada tahun 2016, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Nias yang masing-masing dilaksanakan oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 10.545.013.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.457.594.032,-.

4. Program dan Kegiatan

Untuk pencegahan dan penanggulangan bencana telah dilaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten Nias Tahun 2016, yaitu :

- a. Pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.344.013.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.264.141.132,- melalui Program Kedaruratan, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Logistik Dalam Penanganan Bencana
 - 2) Pendistribusian Peralatan dan Logistik Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
 - 3) Biaya Pengangkutan dan Penjemputan Peralatan dan Bahan Logistik dari Luar daerah ke Kabupaten Nias
 - 4) Operasional Penanganan Pengungsi
 - 5) Survey dan Pendataan Lokasi Tempat Pengungsian dan Sumber Daya yang Tersedia di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Nias
 - 6) Pemeliharaan dan Operasional Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangki Air
 - 7) Operasional Petugas Pemadam Kebakaran
 - 8) Biaya Umum Pengadaan Mobil Tangki Air
 - 9) Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Bagi Tenaga Pelaksana Perhitungan di Kabupaten Nias
 - 10) Prasurvey / Pra-perencanaan dan kegiatan penanggulangan bencana yang disampaikan ke BPBD Provinsi dan BNPB Pusat
 - 11) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kab Nias
- b. Pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 201.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 193.452.900,- melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, dengan kegiatan :
 - 1) Biaya operasional pengiriman bantuan kepada korban bencana
 - 2) Pengadaan Bahan Pangan Tanggap Darurat (Emergency Food)
 - 3) Biaya Operasional TAGANA Kabupaten Nias
 - 4) Pemutakhiran Data Base Korban Bencana Kabupaten Nias

5. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

- a. **Sebelum terjadi bencana**
 - 1) melakukan sosialisasi terhadap kemungkinan bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana
 - 2) Mempersiapkan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana yaitu : Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 10 (sepuluh) orang
 - 3) Menyediakan bahan pangan, sandang, peralatan tidur, peralatan dapur umum dan logistik lainnya.
- b. **Saat terjadi bencana**
 - 1) Melaksanakan penanganan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait
 - 2) Mendistribusikan bantuan tanggap darurat kebutuhan dasar berupa : pangan, sandang, peralatan dapur dan peralatan tidur.
- c. **Setelah terjadi bencana**
 - 1) Melakukan inventarisasi kerusakan, kerugian tafsiran biaya kerugian dan biaya rehabilitasi dengan memperhatikan aspek kewenangan, kemampuan daerah dan situasi lain yang bersifat khusus.
 - 2) Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

6. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana

Lembaga yang menangani bencana daerah di Kabupaten Nias, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Nias

7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Nias, potensi bencana yang diperkirakan terjadi meliputi :

- a. Bencana gempa bumi;
- b. Bencana Tsunami;
- c. Bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran;
- d. Bencana yang terjadi karena ulah manusia yaitu pengrusakan lingkungan.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi selama tahun 2016

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, telah dilaksanakan berbagai upaya konsepsional, teknis operasional dan taktis bersama-sama unsur terkait lainnya untuk tetap menjaga kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif. Upaya tersebut antara lain penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui penyusunan sistem prosedur tetap pengamanan, peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketertiban umum, peningkatan swakarsa di masing-masing lingkungan dan peningkatan intensitas penegakkan hukum khususnya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Nias masih mengalami berbagai kendala/gangguan yang terjadi namun masih dalam batas toleransi, umumnya hanya ditingkat pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum

Demi menjaga jalannya roda pemerintahan yang stabil dan kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum telah menjalankan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah sebagai bagian dari tugas pemerintahan umum yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam melaksanakan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias didukung oleh 62 (enam puluh dua) orang sumber daya aparatur, dengan kualifikasi sebagai berikut :

- Kualifikasi pendidikan : Sarjana (S1) sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 46 orang dan SD sebanyak 3 orang.
- Kualifikasi Golongan : Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 9 orang, Golongan II sebanyak 42 orang dan Golongan I sebanyak 3 orang.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nias pada Tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten dengan total jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 527.910.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 503.783.000,-

5. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan:
 - 1) Pengendalian Keamanan Lingkungan;
 - 2) Pengawasan Peraturan Daerah/Kepala Daerah;
 - 3) Pengamanan Upacara/Kunjungan Kerja Pejabat/ Temu Pisah/Ramah Tamah/Unjuk Rasa/Demo dan Hari-hari Besar Keagamaan;
 - 4) Pengawasan Pimpinan/Pejabat/Tamu Pejabat Kabupaten Nias.
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan :
 - 1) Perpanjangan Izin Senjata Api.

6. Penanggulangan dan Kendalanya

Untuk menanggulangi berbagai gangguan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nias telah diupayakan berbagai langkah penertiban secara persuasif, pembinaan dan penyuluhan serta senantiasa Melakukan pendekatan, koordinasi baik dengan masyarakat maupun dengan Instansi terkait.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Terbatasnya fasilitas pendukung operasional.

Untuk menanggulangi kendala tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Untuk meningkatkan kualitas anggota dengan mengirim Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti Binmtek yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- b. Untuk menambah jumlah/kuantitas dengan mengajukan tambahan anggota ke Bupati Nias melalui pengembalian seluruh personil yang pengangkatan status kepegawainnya di Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias serta mengoptimalkan personil yang ada.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait.
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan secara berkesinambungan akan pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah.

7. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam rangka penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum, keikutsertaan aparat keamanan bekerjasama dengan unit kerja terkait antara lain:

- a. Polres Nias
- b. Kodim 0213 Nias
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Nias
- e. BPPT Kabupaten Nias
- f. Dinas Pendapatan Kabupaten Nias
- g. Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias
- h. Camat setempat
- i. Kepala Desa.

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nias Tahun Anggaran 2016, merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis penyusunannya mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nias Akhir Tahun Anggaran 2016, diharapkan mampu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh semua pihak dalam mengevaluasi hasil capai kinerja Bupati Nias sebagai Kepala Daerah dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan kondisi objektif Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016, kiranya menjadi bahan yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Nias pada masa yang akan datang.

Gunungsitoli Selatan, Maret 2017

BUPATI NIAS,

Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM

Tabel : 4 - 2
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.470.750.000		1.414.690.429
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengadaan perangko dan benda-benda pos lainnya termasuk biaya paket pengiriman surat-surat dinas	5.610.000	100	4.674.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening telepon, listrik, air, faximile a. Dinas Pendidikan sebesar <u>Rp. 59.500.000,-</u> b. UPT Disdik Kecamatan sebesar <u>Rp. 6.000.000,-</u> disesuaikan jumlah sekolah yang ada di masing-masing kecamatan	65.500.000	100	42.503.087
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yg mendapat pengurusan izin (Roda empat sebanyak 1 Unit) BB 245 V	1.000.000	100	1.000.000
	04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya biaya kebersihan kantor dan pembelian Peralatan kebersihan/ bahan pembersih lainnya	15.000.000	100	15.000.000
	05 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk Dinas Kabupaten dan UPT Disdik Cam dan UPT SKB Nias a. Dinas Pendidikan sebesar <u>Rp. 67.000.000,-</u> b. UPT Disdik Kecamatan (10 UPT) sebesar <u>Rp. 70.000.000,-</u> disesuaikan jumlah sekolah yang ada di masing-masing kecamatan c. UPT SKB Nias sebesar <u>Rp. 6.000.000,-</u>	137.500.000	100	137.500.000
	06 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pencetakan, penggandaan dan foto copy surat dinas di Kabupaten dan UPT Disdik Kecamatan a. Dinas Pendidikan sebesar <u>Rp. 39.000.000,-</u> b. UPT Disdik Kecamatan (10 UPT) sebesar <u>Rp. 50.000.000,-</u> disesuaikan jumlah sekolah yang ada di masing-masing kecamatan	89.000.000	100	89.000.000
	07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	10.000.000	100	10.000.000
	08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tagihan rekening surat kabar harian dan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	10.000.000	100	5.940.000
	09 Biaya Makanan dan Minuman Kantor	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, minuman harian dan minuman tamu, termasuk UPT Disdik Kecamatan a. Dinas Pendidikan sebesar <u>Rp. 55.000.000</u> b. UPT Disdik Kecamatan (10 UPT) sebesar <u>Rp. 25.000.000,-</u> disesuaikan jumlah sekolah yang ada di masing-masing kecamatan	80.000.000	100	79.044.000
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000	100	299.909.342
	11 Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya pembinaan/pengawasan/evaluasi serta rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah, UPT dan SKB a. Dinas Pendidikan Kab. Nias sebesar <u>Rp. 200.000.000</u> b. UPT Disdik Kecamatan sebesar <u>Rp. 50.000.000</u>	250.000.000	100	247.980.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terbayarnya honor Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Komputer SIPKD, Penyimpan dan Pengurus Barang serta pembuat Dokumen	507.140.000	100	482.140.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.000.672.700		565.847.073
01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor : - Kursi susun merk Chitos - Lemari kayu merk Piner - Meja Kayu - Laptop - Finger Print dan Perlengkapan - Infocus	41.250.000 3.850.000 19.250.000 29.700.000 10.000.000 15.950.000	100 100 100 100 100 100	41.187.342 3.840.114 19.200.570 29.618.544 9.912.278 15.866.152
02	Pengadaan genset	Jumlah genset	250.000.000	-	-
03	Pengadaan dan pembangunan Rumah Genset beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Panel ATS-SMF Genset 30 KVA beserta perlengkapan dan pemasangan + Pembuatan Pondasi dan Kerangkeng Genset	67.400.000	-	-
04	Pembuatan Website Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Adanya website SKPD Dinas Pendidikan Kab. Nias	30.000.000	100	29.795.208
05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan/pemeliharaan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan UPT Disdik a. Dinas Pendidikan sebesar <u>Rp. 45.000.000</u> b. UPT Disdik Kecamatan sebesar <u>Rp. 20.000.000</u>	65.000.000	100	62.622.000
06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat terdiri dari 1 Unit (BB 245 V)	30.000.000	100	29.817.165
07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan dan peralatan gedung kantor antara lain komputer, dan alat-alat lainnya tetap berfungsi a. Dinas Pendidikan sebesar <u>Rp. 20.000.000,-</u> b. UPT Disdik Kecamatan sebesar <u>Rp. 10.000.000,-</u>	30.000.000	100	29.795.000
08	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor : UPT Disdik Kab. Nias - Kantor UPT Disdik Kec. Ma'u - Kantor UPT Disdik Kec. Hiliserangkai - Pengadaan Meubelair UPT Disdik Kec. Botomuzoi - Pengadaan Meubelair UPT Disdik Kec. Hiliduho	33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000	100 100 100 100	31.980.000 31.980.000 31.980.000 31.980.000
09	Pemasukan dan Pemasangan Baru Instalasi Listrik Kantor UPT Disdik Kabupaten Nias	Pemasangan instalasi listrik di Kantor UPT Disdik Kabupaten Nias - Kantor UPT Disdik Kec. Hiliduho - Kantor UPT Disdik Kec. Botomuzoi - Kantor UPT Disdik Kec. Sogaeadu - Kantor UPT Disdik Kec. Hiliserangkai - Kantor UPT Disdik Kec. Somolo-molo	22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000	- - - - -	- - - - -
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	166.272.700	100	166.272.700
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		125.000.000		119.170.000
01	Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan SD, SMP, dan SMA/SMK dan Kantor UPT	Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan SD, SMP dan SMA/SMK dan Kantor UPT, 1 kegiatan	50.000.000	100	49.670.000
02	Mengikuti diklat/bimtek/workshop/ kursus/ sosialisasi di luar daerah	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti diklat/bimtek/workshop/ kursus/ sosialisasi dalam bidang: 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur PEMDA sebanyak 3 orang; 2) Strategi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Berbasis Kinerja sebanyak 3 orang; 3) Aplikasi SIPKD Modul Aset sebanyak 2 orang ; dan 4) Kewenangan daerah bidang pertanahan sebanyak 2 orang	40.000.000	100	34.500.000
03	Pelatihan Pendataan Inventaris Barang	Pendataan Inventaris Barang	20.000.000	100	20.000.000
04	Pelatihan Pengelolaan Administrasi UPT Disdik Kecamatan	Jumlah Peserta Pengelolaan Administrasi UPT Disdik Kecamatan	15.000.000	100	15.000.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000		31.755.900
01	Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Renja SKPD Tahun 2017, 1 dokumen	5.000.000	100	4.928.900

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	02	Penyusunan RENSTRA	15.000.000	100	14.022.600
	03	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.500.000	100	3.451.000
	04	Penyusunan Laporan Tahunan	6.000.000	100	5.902.400
	05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	3.500.000	100	3.451.000
05	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		25.000.000		25.000.000
	01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	25.000.000	100	25.000.000
	URUSAN PENDIDIKAN				
06	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)		217.600.000		68.325.000
	01	Pembangunan Gedung TK			
		Penuntasan Pembangunan Gedung TK			
		- <u>Kec. Idanogawo</u>			
		Lanjutan pembangunan gedung TK NEGERI IDANOGAWO	100.000.000	-	550.000
		- <u>Kec. Hiliserangkai</u>			
		Lanjutan pembangunan gedung TK NEGERI HILISERANGKAI	50.000.000	-	525.000
	02	Lomba Kreativitas Anak dan Guru TK	25.000.000	100	24.650.000
	03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD			
		Tersedianya bantuan operasional penyelenggaraan PAUD di			
		- TK Negeri Idanogawo Desa Maliwa'a	24.600.000	100	24.600.000
		- TK Negeri Hiliserangkai Desa Dahadano Botombawo	18.000.000	100	18.000.000
07	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		21.864.652.483		15.851.195.948
	01	Pembangunan Ruang Kelas Baru			
		Terbangunnya Ruang kelas Baru			
		<u>SEKOLAH DASAR (SD) :</u>			
		<u>Kec. Somolo-molo :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 078498 I'ODANO	55.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Hiliserangkai :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 075052 ORAHILI IDANOI	110.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Ma'u :</u>			
		- SDN 078521 Sihare'o III Hilibadalu + Meubelair Kec. Ma'u	628.875.000	100	36.260.000
		<u>Kec. Ulugawo :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 078506 HILI'OTALUA	71.500.000	-	550.000
		<u>Kec. Botomuzoi :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 077271 SOHUWO	132.000.000	-	525.000
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 1 BOTOMUZOI	66.000.000		525.000
		<u>Kec. Gido :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SD 078508 SISOBHILI DARAI DI DESA SISOBHILI	110.000.000	-	1.325.000
		<u>Kec. Bawolato :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 077296 SOMA ORAHUA	66.000.000	-	500.000
		- RKB SDN 078518 Hiliuso + Meubelair	387.305.000	100	377.612.000
		<u>Kec. Soqaeadu :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 071069 SIHARE'O BERUA	55.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Idanogawo :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 078482 SANDRUTA	55.000.000	-	550.000
		- Lanjutan pembangunan RKB SDN 078507 Ahedano	77.000.000	-	550.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<u>SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) :</u>				
		<u>Kec. Somolo-molo :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 1 Somolo-molo	88.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Hiliserangkai :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 3 Hiliserangkai	121.000.000	-	1.050.000
		<u>Kec. Bawolato :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 4 Bawolato	82.500.000	-	500.000
		<u>Kec. Idanogawo :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 1 Idanogawo	55.000.000	-	550.000
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 3 Idanogawo	66.000.000	-	550.000
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 4 Idanogawo	66.000.000	-	550.000
		- RKB SMPN 7 Idanogawo + meubelair	387.305.000	100	376.826.960
		<u>Kec. Hiliduho :</u>			
		- Lanjutan pembangunan RKB SMPN 2 HILIDUHO	55.000.000		525.000
		- Pembangunan RKB SMPN 3 HILIDUHO	300.000.000		291.292.000
		<u>Kec. Botomuzoi :</u>			
		- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Botomuzoi (Sisa DAK 2010)	4.924.800	100	-
02	Pembangunan Pagar Sekolah	Terbangunnya pagar sekolah			
		<u>Kec. Hiliduho :</u>			
		- Pemb. Pagar SMP Negeri 2 Hiliduho	110.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Somolo-molo :</u>			
		- Pemb. Pagar SMPN 1 Somolo-molo	110.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Hiliserangkai :</u>			
		- Pemb. Pagar SMP N 1 Hiliserangkai	300.000.000	-	1.375.000
		<u>Kec. Botomuzoi :</u>			
		- Pemb. Pagar SDN 070997 Ononamolo Talafu	88.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Gido :</u>			
		- Pemb. Pagar SDN 071057 Hiliweto	220.000.000	-	1.075.000
		<u>Kec. Bawolato :</u>			
		- Pemb. Pagar SDN 075039 Hiliwarokha	88.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Sogaeadu :</u>			
		- Pemb. Pagar SMPN 1 Sogaeadu	165.000.000	-	1.300.000
03	Pembangunan Pari/Tembok Penahan/Bronjong:	Jumlah Pembangunan Pari/Tembok Penahan/Bronjong di Sekolah			
		<u>Kec. Gido :</u>			
		- SDN No. 078442 Hiliotalua Kec. Gido	165.000.000	-	525.000
		<u>Kec. Hiliduho :</u>			
		- SMP Negeri 2 Hiliduho (parit + tembok penahan)	110.000.000	-	525.000
04	Pengadaan Meubelair :	Jumlah Meubelair Sekolah			
		<u>Kec. Hiliduho</u>			
		SMPN 3 Hiliduho	77.000.000	100	74.458.000
		<u>Kec. Hiliserangkai :</u>			
		SDN 078500 Fahasaradodo Fadoro Hunogoa	77.000.000	100	74.333.000
		<u>Kec. Ulugawo :</u>			
		SDN 078510 Idanohili	77.000.000	100	4.858.000
		SMP Negeri 4 Ulugawo	77.000.000	100	4.858.000
		SMP Negeri 5 Ulugawo	77.000.000	100	4.858.000
		SDN 078467 Sifaoro'asi	77.000.000	100	4.858.000
		SDN 078505 Hililaza Fatodano	77.000.000	100	4.858.000
		SDN 078501 Sisarahiligela	77.000.000	100	4.858.000
		<u>Kec. Ma'u :</u>			
		SMP Negeri 2 Ma'u	117.000.000	100	7.733.143
		SDN 071074 Sisarahili Mau	77.000.000	100	5.155.429
		SDN 076080 Sihareo III Mau	77.000.000	100	5.155.429
		<u>Kec. Botomuzoi :</u>			
		SDN 078512 Sifelendrua Banua	77.000.000	100	74.530.667

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		SMPN 3 Botomuzoi	77.000.000	100	74.530.667
		SDN 070996 Fulolo Boto Muzoi	35.000.000	100	34.995.000
		SMPN 1 Botomuzoi	77.000.000	100	74.530.667
		SMPN 4 Botomuzoi	77.000.000	100	76.550.000
		Kec. Gido :			
		SDN 074053 Duria Hilisebua	77.000.000	100	73.858.000
		SDN 078441 Ladea Orahua	77.000.000	100	73.858.000
		Kec. Bawolato :			
		SDN 078443 Orahili	77.000.000	100	74.733.556
		SDN 075034 Siofabanua	77.000.000	100	74.733.556
		SDN. 078513 Sitolubanua	77.000.000	100	74.733.556
		SDN 075041 Dahana	77.000.000	100	74.733.556
		SDN. 078514 Hilifadolo	77.000.000	100	74.733.556
		SDN 078475 Toba'a	77.000.000	100	74.733.556
		SDN 071049 Sifaoroasi	77.000.000	100	74.733.556
		SDN 078444 Hilihao	77.000.000	100	74.733.556
		SDN 078480 Woliorahua	77.000.000	100	74.733.556
		Kec. Sogaeadu :			
		SMPN 2 Sogaeadu	154.000.000	100	148.716.000
	- Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar di Kecamatan Ma'u	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	109.834.000	100	109.834.000
	- Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar di Kecamatan Gido	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	179.792.000	100	179.792.000
	- Pengadaan Meubelair SMP di Kecamatan Bawolato	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	79.902.000	100	79.902.000
	- Pengadaan Meubelair SMP di Kecamatan Ma'u	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	39.951.000	100	39.951.000
	- Pengadaan Meubelair SMP di Kecamatan Hiliserangkai	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	39.951.000	100	39.951.000
	- Pengadaan Meubelair SMP di Kecamatan Botomuzoi	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	39.951.000	100	39.951.000
	- Pengadaan Meubelair SMP di Kecamatan Somolo-molo	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	19.963.000	100	19.963.000
	DAK TA. 2016 :				
A.	Pembangunan RKB SD + Meubelair :	Jumlah RKB yang dibangun + meubiler			
		Kecamatan Gido			
		- SDN 078441 Ladea Orahua	434.375.000	100	434.375.000
		Kecamatan Idanogawo			
		- SDN 078137 Hiligogowaya	397.620.600	100	397.620.600
		Kecamatan Bawolato			
		- SDN 074059 Onolimbu	434.375.000	100	434.375.000
		- SDN 071049 Sifaoroasi	434.375.000	100	434.375.000
		Kecamatan Somolomolo			
		- SDN 078504 Sisarandrawa	434.375.000	100	434.375.000
		Kecamatan Ulugawo			
		- SDN 078501 Sisarahiligela	434.375.000	100	434.375.000
		- SDN 078468 Soroma'asi	434.375.000	100	434.375.000
		Kecamatan Ma'u			
		- SDN 078509 Lewuoguru II	434.375.000	100	434.375.000
		- SDN 078520 Balodano	434.375.000	100	434.375.000
		- SDN 078511 Sihare'o III Bawasalo'o	434.375.000	100	434.375.000
		Kecamatan Hiliserangkai			
		- SDN 071003 Lalai	397.620.600	100	397.620.600
		Kecamatan Hiliduho			
		- SDN 071014 Dima	397.620.600	100	397.620.600
		Kecamatan Botomuzoi			
		- SDN 078512 Sifelendrua Banua	397.620.600	100	397.620.600
		Kecamatan Sogaeadu			
		- SDN 074051 Sisarahili	397.620.600	100	397.620.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	B. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan	Jumlah buku koleksi yang diadakan sebanyak 40 paket	2.000.000.000	100	1.270.067.200
	C. Pengadaan Media Pendidikan	Jumlah media pendidikan yang diadakan			
		<u>Kecamatan Gido</u>			
		- SDN 071060 Lasara Idanoi	65.000.000	-	-
		- SDN 075044 Saewe	65.000.000	-	-
		- SDN 075045 Somi	65.000.000	-	-
		<u>Kecamatan Idanogawo</u>			
		- SDN 076084 Tetelesi	65.000.000	-	-
		- SDN 071056 Tetelesi	65.000.000	-	-
		- SDN 077295 Baruzo Bobozi'oli	65.000.000	-	-
		- SDN 071048 Tetegeo Na'ai	65.000.000	-	-
		- SDN 074057 Maliwaa	65.000.000	-	-
		<u>Kecamatan Bawolato</u>			
		- SDN 071047 Bawolato	65.000.000	-	-
		- SDN 071053 Bawalia	65.000.000	-	-
		- SDN 075041 Dahana	65.000.000	-	-
		- SDN 078473 Sisarahili	65.000.000	-	-
		<u>Kecamatan Hiliserangakai</u>			
		- SDN 071003 Lalai	65.000.000	-	-
		- SDN 074043 Lolowua	65.000.000	-	-
		<u>Kecamatan Hiliduho</u>			
		- SDN 071014 Dima	65.000.000	-	-
		<u>Kecamatan Botomuzoi</u>			
		- SDN 071011 Orahua Muzoi	65.000.000	-	-
		<u>Kecamatan Sogaeadu</u>			
		- SDN 071058 Sogae'adu	65.000.000	-	-
		- SDN 074052 Tulumbaho	65.000.000	-	-
		- SDN 077785 Tuhembuasi	65.000.000	-	-
	D. Pengadaan Peralatan Pendidikan	Jumlah Alat-alat Peraga Pendidikan			
		<u>Kecamatan Gido</u>			
		- SDN 071060 Lasara Idanoi	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 075044 Saewe	46.894.400	100	46.394.250
		<u>Kecamatan Idanogawo</u>			
		- SDN 076087 Tetelesi	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 077295 Baruzo Bobozi'oli	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 071048 Tetegeo Na'ai	33.479.800	100	46.394.250
		<u>Kecamatan Bawolato</u>			
		- SDN 071047 Bawolato	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 071053 Bawalia	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 075041 Dahana	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 078473 Sisarahili	46.894.400	100	46.394.250
		<u>Kecamatan Hiliserangakai</u>			
		- SDN 071003 Lalai	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 074043 Lolowua	46.894.400	100	46.394.250
		<u>Kecamatan Hiliduho</u>			
		- SDN 071014 Dima	33.479.800	100	32.644.250
		<u>Kecamatan Botomuzoi</u>			
		- SDN 071011 Orahua Muzoi	33.479.800	100	32.644.250
		<u>Kecamatan Sogaeadu</u>			
		- SDN 071058 Sogae'adu	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 074052 Tulumbaho	46.894.400	100	46.394.250
		- SDN 077785 Tuhembuasi	33.479.800	100	46.394.250
	- Rehabilitasi Sekolah Dasar SDN 077295 Baruzo Bobozi'oli Kec. Idanogawo (Sisa DAK s.d. 2014 : Rp. 202.337.139 + Sisa DAK 2015 :Rp. 65.209.544)	Terlaksananya rehabilitasi SD	267.546.683	100	267.546.683
	05 Pembangunan MCK DAU TA 2015				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	- Pembangunan MCK SDN 076064 Tuhegafoa II Muzoi Kec. Hiliduho	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	27.720.000	100	27.720.000
	- Pembangunan MCK SDN 078504 Sisaratandrawa Kec. Somolomolo	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	27.670.000	100	27.670.000
06	Peningkatan Mutu Pendidikan				
	- Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	372.003.000	100	372.003.000
	- Pengadaan Peralatan IPS SMP	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	35.629.000	100	35.629.000
07	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Jumlah Peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP/MTs sebanyak = 150 rang	80.000.000	100	70.400.000
08	Pengelolaan Ujian Sekolah SD/ MI	Pelaksanaan US SD/MI TP 2015/2016 se-Kabupaten Nias	70.000.000	100	67.240.200
09	Pengelolaan Ujian Akhir Sekolah/Nasional SMP/MTs	Pelaksanaan UAS SMP/MTs se-Kabupaten Nias	70.000.000	100	67.584.900
10	Olimpiade Sains Nasional SD	Jumlah siswa peserta Olimpiade Sains Nasional SD utusan ke Provinsi sebanyak = 20 orang	50.000.000	100	41.950.000
11	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP	Olimpiade Olahraga tingkat SMP, 1 kegiatan	70.000.000	100	62.075.000
12	Beasiswa bagi Siswa/i SD Berprestasi	Jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi, sebanyak = 8220 orang	2.959.200.000	100	2.959.200.000
13	Beasiswa bagi Siswa/i SMP Berprestasi	Jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi, sebanyak = 1920 orang	720.000.000	100	719.760.000
14	Fasilitasi Pelaksanaan Dana BOS	Fasilitasi pelaksanaan dan penyaluran Dana BOS (Sosialisasi Juknis Baru) Tahun 2016	150.000.000	100	141.325.000
08	Program Pendidikan Menengah		5.115.850.000		3.915.257.300
01	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SMA/SMK			
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 1 Hiliserangkai		121.000.000	-	525.000
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 2 Hiliserangkai		99.000.000	-	525.000
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 1 Ulugawo		66.000.000	-	550.000
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 1 Bawolato		88.000.000	-	525.000
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 1 Somolo-molo		33.000.000	-	525.000
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 1 Hiliduho		55.000.000	-	525.000
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 1 Ma'u		308.000.000	100	299.787.800
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 1 Botomuzoi		88.000.000	-	525.000
	- Lanjutan pembangunan RKB SMKN 2 Botomuzoi		55.000.000	-	1.100.000
	- Pembangunan RKB SMAN 2 Bawolato + Meubelair		473.932.000	100	461.132.500
	- Pembangunan RKB SMKN 2 Idanogawo + Meubelair		416.762.000	100	405.481.500
	- Pembangunan RKB SMKN 3 Hiliserangkai		200.000.000	100	199.425.000
	- Pembangunan RKB SMAN 1 Ulugawo		200.000.000	100	199.000.000
02	Pembangunan Pagar Sekolah:	Jumlah Pembangunan Pagar SMA/SMK			
	- SMKN 1 Sogaeadu		154.000.000	-	550.000
	- SMKN 1 Hiliserangkai		200.000.000	-	525.000
03	Pengadaan Meubelair SMA/SMK				
	- Pengadaan Meubelair SMKN 1 Bawolato	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	39.951.000	100	39.951.000
	- Pengadaan Meubelair SMKN 2 Hiliserangkai	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	19.963.000	100	19.963.000
	- Pengadaan Meubelair SMKN 1 Ma'u	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	39.951.000	100	-
	- Pengadaan Meubelair SMAN 1 Ma'u	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	39.951.000	100	39.951.000
04	Peningkatan Mutu Pendidikan				
	- Pengadaan Buku Teks Pelajaran/Referensi SMAS Perguruan Advent Nias (DAK TA. 2015 : Rp. 27.256.364 + SILPA : Rp. 2.725.636)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	29.982.000	100	29.982.000
	- Pengadaan Peralatan Olahraga dan atau Kesenian SMK Swasta Kristen Tomosa 2 (SILPA 2014)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	19.788.000	100	19.788.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	- Pengadaan Buku Teks Pelajaran / Referensi SMK (DAK TA 2015 : Rp. 118.110.909 + SILPA : Rp. 11.811.091)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	129.922.000	100	129.922.000
	- Pengadaan Peralatan Olahraga dan/atau Kesenian SMA (SILPA 2014)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	19.788.000	100	19.788.000
	05 Peningkatan Mutu Pendidikan				
	- Pengadaan Alat-alat Praktek SMK (DAK TA. 2015 : Rp. 272.727.273 + SILPA : Rp.27.272.727)	Alat-alat Praktek untuk 2 SMK (SMK 1 Sogaeadu dan SMK 1 Idanogawo)	300.000.000	100	298.650.000
	- Pengadaan Alat-alat Praktek SMK (DAK SILPA 2014)	Alat-alat Praktek untuk 2 SMK (SMK 1 Bawolato dan SMK 1 Botomuzoi)	200.000.000	100	199.474.000
	06 Pembangunan MCK				
	- Pembangunan MCK SMKN 2 Hilliserangkai	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Tahun 2015	30.700.000	100	30.700.000
	07 Pengadaan Personal Computer (PC)	Tersedianya personal computer (PC) untuk sekolah SMK (7 SMK x 10 unit)	350.000.000	100	338.065.000
	08 Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 tingkat SMA Negeri/ Swasta	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 TK. SMA Negeri/Swasta, 1 kegiatan	70.000.000	100	57.664.800
	09 Olimpiade Sains Mata Pelajaran SMA	Olimpiade Sains Mata Pelajaran SMA sebagai utusan ke Provinsi, 1 kegiatan	60.000.000	100	46.000.000
	10 Pengelolaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional SMA dan SMK	Pelaksanaan UAS di Tk. SMA dan SMK	50.000.000	100	48.114.700
	11 Uji Kompetensi Siswa SMK	Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa SMK	40.000.000	100	40.000.000
	12 Beasiswa SMA/SMK Berprestasi	Jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi (SMA =522 Org, SMK=666 Org)	578.160.000	100	578.160.000
	13 Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Sekolah Unggulan bagi Sekolah Menengah Atas, 1 sekolah (SMA 1 Gido)	250.000.000	100	181.350.000
	14 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) siswa/i SMK Negeri/Swasta, 1 kegiatan	35.000.000	100	35.000.000
	15 Festival Lomba Seni Siswa SMA/SMK Tingkat Kabupaten	Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Kabupaten siswa/i SMA/SMK Negeri/Swasta serta terpilihnya utusan ke provinsi, 1 kegiatan	75.000.000	100	37.396.000
	16 Olimpiade Olahraga Siswa SMA/SMK	Olimpiade Olahraga siswa/i SMA/SMK Negeri/ Swasta Tingkat Kabupaten, 1 kegiatan	180.000.000	100	154.636.000
09	Program Pendidikan Non Formal dan Informal		368.000.000		346.383.000
	01 Fasilitas Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI)	Lomba Karya Tulis Keaksaraan Tingkat Kabupaten Nias dan Lomba Karya Tulis Keaksaraan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Nias	10.000.000	100	10.000.000
	02 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok belajar Paket B setara SMP	90.000.000	100	90.000.000
	03 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah Kelompok belajar Paket C setara SMA	90.000.000	100	90.000.000
	04 Pengelolaan Ujian Nasional Paket A, B dan C	Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A, B dan C	50.000.000	100	45.910.000
	05 Biaya Pembinaan Lembaga Pendidikan Kursus	Jumlah lembaga kursus di wilayah kabupaten nias	3.000.000	100	3.000.000
	06 Keaksaraan Fungsional/Buta aksara	Jumlah kelompok keaksaraan fungsional/buta aksara	40.000.000	100	40.000.000
	07 Fasilitas Pelantikan Bunda PAUD	Kegiatan Pelantikan Bunda PAUD	85.000.000	100	67.473.000
10	Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		2.830.000.000		2.566.552.000
	01 Biaya Pengelolaan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/Tunjangan Khusus/Biaya siswa kualifikasi	Pendataan dan Penyeleksi berkas usul sertifikasi Guru/Tunjangan Khusus/Biaya siswa kualifikasi	50.000.000	100	48.945.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02	Diklat Guru Mata Pelajaran yang di UN kan/Mata Pelajaran Pokok SMP	Jumlah Peserta Diklat Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA TK SMP, sebanyak =75 orang	70.000.000	100	57.975.000
03	Diklat Sistem Evaluasi Terstandar	Jumlah Peserta Diklat Sistem Evaluasi Tersatandar, sebanyak =35 orang	20.000.000	100	20.000.000
04	Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Nias	Jumlah peserta musyawarah Kepala sekolah SMP Negeri/Swasta, sebanyak =49 orang	25.000.000	100	24.860.000
05	Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se- Kabupaten Nias	Jumlah peserta musyawarah Kepala sekolah SMA/MA Negeri/Swasta, sebanyak =10 orang	10.000.000	100	10.000.000
06	Pelaksanaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se- Kabupaten Nias	Jumlah Peserta Musyawarah Kepala sekolah SMK Negeri/Swasta, sebanyak = 15 orang	15.000.000	100	15.000.000
07	Penyelenggaraan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK N/S, Pengawas/ Penilik PLS	Terlaksanya Penetapan Angka Kredit Fungsional Guru (Periode April dan Oktober Tahun 2016),	60.000.000	100	60.000.000
08	Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan penilaian angka kredit jabatan fungsional bagi Ka. SD, SMP, SMA, SMK, sebanyak = 100 orang	60.000.000	100	60.000.000
09	Pemilihan PTK berprestasi	Jumlah Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas TK/SD, Rumpun Mata Pelajaran dan Tutor Pendidikan Kesetaraan berprestasi dan menjadi utusan Kab. Nias ke Tingkat Propinsi, sebanyak = 89 orang	125.000.000	100	118.910.000
10	Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA se - Kabupaten Nias	Jumlah Peserta Musyawarah Guru SMA di Kabupaten Nias yang mengikuti MGMP, sebanyak = 24 orang	20.000.000	100	20.000.000
11	Musyawarah Guru Mata Diklat SMK	Jumlah Guru SMK di Kabupaten Nias yang mengikuti MGMD, sebanyak = 40 orang	25.000.000	100	25.000.000
12	Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP se - Kabupaten Nias	Jumlah Guru SMP di Kabupaten Nias yang mengikuti MGMP , sebanyak = 50 orang	30.000.000	100	30.000.000
13	Diklat Guru SD untuk Mata pelajaran yang di US kan	Jumlah guru peseta pelatihan dalam penyusunan dokumen soal yang terstandar, sebanyak = 60 orang	50.000.000	100	50.000.000
14	Pelatihan Guru PAUD	Jumlah Guru PAUD yang dilatih , sebanyak = 60 orang	50.000.000	100	50.000.000
15	Pelatihan Guru Taman Kanak-kanak	Jumlah pelatihan Guru TK di Kabupaten Nias, sebanyak = 40 orang	35.000.000	100	35.000.000
16	Olimpiade Sains Nasional Guru	Jumlah peserta Olimpiade Sains Nasional Guru SMP dan SMA, sebanyak = 75 orang	40.000.000	100	36.687.000
17	Biaya kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang Berprestasi	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi yang Mencapai Indeks Prestasi 2,90 ke atas, sebanyak = 75 orang	620.000.000	100	619.477.000
18	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Tidak Tetap (GTT)	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Tidak Tetap (GTT) Tingkat Pendidikan Dasar, sebanyak = 75 orang	50.000.000	100	50.000.000
19	Workshop Penguatan bagi Pengawas Rumpun Mata Pelajaran/Pengawas TK/SD	Jumlah peserta workshop bagi Pengawas Rumpun Mata Pelajaran= 13 Org; Pengawas TK/SD = 23 Org	70.000.000	100	62.492.000
20	Biaya Pembentukan dan Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah peserta pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD, SMP, SMA dan SMK, sebanyak = 10 sekolah	50.000.000	100	50.000.000
21	Honorarium Guru Bantu Daerah	Honorarium Guru Bantu Daerah (250 orang x Rp 1.000.000 x 4 bulan)	1.005.000.000	100	1.000.000.000
22	Pengelolaan dan Pelaksanaan Seleksi Guru Bantu Daerah	Terlaksananya seleksi perekrutan Guru Bantu Daerah oleh Tim Independen serta tersedianya biaya pengelolaan administrasi GBD	150.000.000	100	122.206.000
23	Pengelolaan dan Pelaksanaan Seleksi Guru Bantu Daerah Formasi Tahun 2017	Terlaksananya seleksi perekrutan Guru Bantu Daerah oleh Tim Independen serta tersedianya biaya pengelolaan administrasi GBD	200.000.000	-	-
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1.082.058.000		1.002.167.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01	Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pendidikan	Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Bidang Pendidikan	40.000.000	100	37.244.200
02	Pembuatan Profil Pendidikan	Jumlah buku Profil Pendidikan, 1 buku	20.000.000	100	20.000.000
03	Inventarisasi Barang Inventaris Milik Daerah	Data barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas, 1 dokumen	65.000.000	100	65.000.000
04	Pembuatan Kalender Pendidikan TK/SD/MI/ SMP/MTs/ SMA/MA	Kalender Pendidikan TK/SD/MI/ SMP/MTs/ SMA/MA, 2 dokumen	3.000.000	100	3.000.000
05	Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tingkat Kecamatan	Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan di Tingkat Kecamatan, 10 kecamatan	50.000.000	100	41.000.000
06	Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Pengawas TK/SD/SLB	Supervisi Pendidikan Pengawas TK/SD/SLB	57.960.000	100	55.200.000
07	Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Pengawas SMP/SMA/SMK	Supervisi Pendidikan Pengawas SMP/SMA/SMK	35.880.000	100	28.060.000
08	Penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Penilik PLS	Supervisi Pendidikan Penilik PLS	11.160.000	100	5.580.000
09	Sosialisasi dan Pengelolaan Kuisisioner Pendidikan	Laporan Data Kuisisioner Pendidikan dan Laporan Data Kuisisioner (LI) Pendidikan, 1 buku	15.000.000	100	14.950.000
10	Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Raker Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, 1 kali	50.000.000	100	49.525.600
11	Fasilitasi Kelompok Kerja Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	Fasilitasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kab. Nias	100.000.000	100	94.782.000
12	Biaya Penunjang Operasional Dewan Pendidikan	Kegiatan Dewan Pendidikan	10.000.000	-	-
13	Biaya Operasional Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru	Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru	10.000.000	100	10.000.000
14	Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus	Biaya umum Perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan DAK	348.000.000	100	348.000.000
15	Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan DAK SILPA	Biaya umum Perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan DAK SILPA	16.058.000	100	14.558.000
16	Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kabupaten Nias	Hardiknas di Kabupaten Nias	20.000.000	100	20.000.000
17	Workshop Pengelolaan DAK TA 2016	Sekolah penerima DAK memahami tentang pengelolaan keuangan dan administrasi DAK 2016	70.000.000	100	35.267.800
18	Pengelolaan Beasiswa berprestasi SD/SMP/SMA/SMK	Kegiatan Pengelolaan Beasiswa berprestasi SD/SMP/SMA/SMK	100.000.000	100	100.000.000
19	Biaya Operasional Pengelolaan Beasiswa Miskin Program Indonesia Pintar (PIP)	Pengelolaan Beasiswa Miskin Program Indonesia Pintar (PIP)	20.000.000	100	20.000.000
20	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Kegiatan Pelaksanaan PPDB	20.000.000	100	20.000.000
21	Biaya Operasional Pengelolaan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	Pengelolaan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	20.000.000	100	20.000.000
12.	Program Pelayanan UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli		2.171.200.000		1.293.972.773
01	Honorarium Dosen Tetap (Non PNS) dan Tidak Tetap (PNS/Non PNS)	Honorarium Dosen Tetap/Dosen Tidak Tetap UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias, 30 orang	231.200.000	100	225.275.000
02	Honorarium Kepala Urusan/Unit/Petugas (Non PNS)	Honorarium Kepala Urusan/Unit/Petugas UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias, 30 orang	453.600.000	100	440.400.000
03	Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dosen, Rapat Civitas, Rapat Keanggotaan dan Komisi Senat Akademik	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kab.Nias	15.696.000	100	8.115.000
04	Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS)	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil dan Genap bagi mahasiswa/i UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kab.Nias	44.200.000	100	42.132.000
05	Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS)	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil dan Genap bagi mahasiswa/i UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kab.Nias	43.900.000	100	39.512.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
06	Pembuatan Laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi Untuk Laporan ke DIKTI	Laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi untuk Laporan ke Dikti UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias, 1 dokumen	7.304.000	100	7.304.000
07	Pembuatan Kalender Akademik Semester Genap dan Ganjil	Kalender Semester Genap dan Semester Ganjil UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias, 1 dokumen	9.700.000	100	9.250.000
08	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000	100	69.136.200
09	Penyelenggara Kegiatan Ekstrakurikuler	Kegiatan ekstrakurikuler UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016	20.000.000	100	19.700.000
10	Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru	Publikasi dan promosi UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias	16.000.000	100	15.920.000
11	Pembangunan Tembok Penahan Asrama Akper Gunungsitoli	Pembangunan tembok penahan Asrama Akper Gunungsitoli	80.000.000	-	-
12	Pembangunan Septictank	Pembangunan septictank	30.000.000	-	-
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Instalasi Listrik	Tagihan rekening listrik, Wi-fi dan koran UPT Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2015	60.000.000	100	59.951.023
14	Penyediaan Jasa Kebersihan	Pemenuhan alat-alat dan perlengkapan kebersihan	10.000.000	100	9.735.000
15	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor	20.000.000	100	16.665.550
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas 2 Unit (BB 1086 V dan BB7003 V)	90.000.000	100	79.968.750
17	Pengadaan Alat-alat Laboratorium Keperawatan	Pemenuhan alat-alat laboratorium keperawatan	125.000.000	-	-
18	Pengadaan Buku-buku Perpustakaan	Pemenuhan buku-buku perpustakaan	10.000.000	100	10.000.000
19	Pengadaan Alat Kesehatan/Bahan Medis Habis Pakai untuk Unit Kesehatan Kampus Akper	Pemenuhan alat kesehatan/bahan medis	10.000.000	100	10.000.000
20	Pengadaan Obat-obatan untuk Unit Kesehatan Kampus Akper	Pemenuhan pengadaan obat-obatan untuk Unit Kesehatan Kampus Akper	5.000.000	100	5.000.000
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (AKPER)	Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (AKPER)	10.000.000	-	-
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	100	7.886.250
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Akper)	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor (Akper)	15.000.000	100	7.295.000
24	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Asrama	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Asrama	35.000.000	100	33.605.000
25	Kegiatan Penelitian Dosen	Penelitian dosen, 9 orang	60.000.000		21.652.000
26	Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat	Pengabdian pada masyarakat	50.000.000	100	48.640.000
27	Penyediaan Blanko Ijazah, Blanko Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendampingan Ijazah dan Blanko Sertifikat Kompetensi	Jumlah blanko ijazah, blanko transkrip akademik, dan surat keterangan pendampingan ijazah dan blanko sertifikat kompetensi yang diadakan	42.000.000	100	33.330.000
28	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/workshop/kursus/ sosialisasi di luar daerah	15.000.000	100	14.400.000
29	Lanjutan Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi	Terselenggaranya Akreditasi Program Studi Akper Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias	46.200.000	100	46.200.000
30	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kab. Nias	Terbayaran Pajak Bumi dan Bangunan UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kab. Nias	5.000.000	-	-
31	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, benda-benda pos lainnya dan biaya-biaya paket pengiriman surat-surat di UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kab. Nias	4.000.000	100	3.900.000
33	Pelatihan Penggunaan dan Analisis EKG	Terlaksanannya Pelatihan Penggunaan dan Analisis EKG	50.000.000	-	-
34	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya : - Komputer PC	95.000.000	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		- Meja dan Kursi Komputer	49.800.000	-	-
	35 Pembangunan ruang senat dan BEM UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kab. Nias	Tersedianya ruang senat dan BEM UPT AKPER Gunungsitoli Pemerintah Kab. Nias	200.000.000	-	-
	36 Rak Buku Perpustakaan	Jumlah Rak Buku, 3 buah	27.600.000	100	9.000.000
	37 Lanjutan Pembangunan Ruang Aula Akper Gunungsitoli	Pembangunan Ruang Aula Akper	75.000.000	-	-
		JUMLAH	36.303.783.183		27.200.317.023

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-7
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Tahun 2016

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	UUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.389.080.781	100	1.191.812.884
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, benda pos lainnya dan biaya pengiriman surat-surat dinas selama 12 bulan	3.000.000	100	3.000.000
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan biaya rekening telpon, air, listrik, faxmili dan internet selama 12 bulan	285.580.581	100	139.109.811
	03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg mendapat pengurusan izin (roda empat) sebanyak 16 unit	25.500.000	100	9.282.554
	04 Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	102.929.000	100	100.972.169
	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	52.600.000	100	52.600.000
	06 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pemasangan dan pengadaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	52.000.000	100	41.300.000
	07 Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga selama 12 bulan	31.500.000	100	26.937.300
	08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar sebanyak 2 SKH (SIB dan Realitas) dan Peraturan perundang-undangan	4.000.000	100	1.200.000
	09 Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman Rapat, tamu dan kegiatan dinas lainnya selama 12 bulan	50.000.000	100	47.824.850
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah serta perjalanan Dinas Luar daerah lainnya selama 12 bulan	375.461.200	100	375.461.200
	11 Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta perjalanan dinas dalam daerah lainnya selama 12 bulan	100.000.000	100	92.975.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honor Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Komputer SIPKD, Penyimpan dan Pengurus Barang, Panitia Penerima serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selama 12 bulan	306.510.000	100	301.150.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		472.230.000	97,22	423.345.611
	01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor sebanyak 8 dari 9 jenis antara lain finger print 2 unit, laptop 3 unit, bell sound system komunikasi kantor 1 paket, meja ruang rapat 1 set, kursi ruang rapat 2 lusin, kursi tamu 1 set, printer 2 buah, lemari arsip 2 unit	96.000.000	88,89	88.720.000
	02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala (2 unit)	36.600.000	100	36.600.000
	03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas / operasional terpelihara secara rutin / berkala sebanyak 8 unit (BB 8888 V, BK 9539 H, BB 8152 V, BB 8098 V, BK 9964 H, BK 1766 H, BB 1006 V, BB 8173 V)	282.400.000	100	240.797.511
	04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Peralatan gedung kantor seperti mesin tik, komputer, laptop, dan AC terpelihara dengan baik	57.230.000	100	57.228.100
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		80.000.000	100	60.450.000
	01 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ workshop/ kursus/sosialisasi di luar daerah (9 orang/ 11 kali) antara lain Bimtek Pengadaan Barang/Jasa, Bimtek Penyusunan RPJMD/RENSTRA SKPD, Bimtek BLUD/Akreditasi Puskesmas	80.000.000	100	60.450.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		50.000.000	100	49.549.900
01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	1 Dokumen Renja SKPD Tahun 2017	5.000.000	100	5.000.000
02	Penyusunan RENSTRA	1 Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016 -2021	15.000.000	100	15.000.000
03	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) SKPD Tahun 2015	3.500.000	100	3.500.000
04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD 2015	6.000.000	100	6.000.000
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2016	3.500.000	100	3.050.000
06	Pengelolaan administrasi pendukung sistem informasi kesehatan	Administasi pendukung Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000	100	9.999.900
07	Penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan SKPD	1 Dokumen laporan evaluasi program/ kegiatan SKPD Dinas Kesehatan	7.000.000	100	7.000.000
05.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000	100	15.000.000
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Nias	15.000.000	100	15.000.000
06.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		4.135.970.502	100	2.627.720.536
01	Pengadaan Perbekalan kesehatan (DAK Rp 500.000.000 + DAU Rp 9.000.000)	Perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan sebanyak 1 paket	509.000.000	100	490.552.600
02	Pengambilan/penjemputan dan pendistribusian barang, obat dan alat kesehatan ke unit-unit pelayanan kesehatan	Mobilisasi barang dari Propinsi dan pendistribusian ke Unit-Unit pelayanan kesehatan sebanyak 5 kali	68.000.000	100	66.360.000
03	Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK 2016 Rp 2.406.953.000 + SISA DAK 2015 Rp.378.017.502 + DAU Rp 50.000.000)	Tersedia Obat-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar sebanyak 1 paket	2.834.970.502	100	1.367.445.370
04	Pengadaan Obat Program	Tersedia obat program untuk pelayanan kesehatan sebanyak 1 paket	204.750.000	100	204.330.850
05	Pengadaan Alat dan Bahan Medis Habis Pakai	Tersedia alat dan bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan sebanyak 1 paket	105.000.000	100	99.334.500
06	Pengadaan Obat-obatan	Tersedia obat untuk Pelayanan dasar yang tidak tersedia dalam E-Katalog sebanyak 1 paket	204.750.000	100	204.143.850
07	Pengadaan Vaccine Refrigerator (DAK Rp 180.000.000 + DAU Rp 4.500.000)	Vaccine Refrigerator untuk Puskesmas Hiliweto Gido dan Puskesmas Botombawo sebanyak 2 unit	184.500.000	100	171.219.966
08	Sosialisasi Pemanfaatan Obat Tradisional	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan obat tradisional di Desa Percontohan PKK	25.000.000	100	24.333.400
07.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		2.431.000.000	100	1.970.482.270
01	Monitoring kegiatan bidang pelayanan kesehatan	Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dimonitoring di bidang pelayanan kesehatan dasar di 10 Puskesmas dan jaringannya	15.000.000	100	14.700.000
02	Pelaksanaan kegiatan P3K	Kegiatan P3K pada Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan antara lain HUT KEMRI, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	20.000.000	100	18.965.000
03	Honor Tetap Tenaga Dokter/Dokter Gigi PTT	Insentif bagi dokter / dokter gigi PTT sebanyak 3 orang	36.000.000	100	36.000.000
04	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin (operasi katarak, bibir sumbing, dll)	Penduduk miskin/tidak mampu yang dilayani sebanyak 157 orang	20.000.000	100	5.125.000
05	Pertemuan Koordinasi dengan Dokter Puskesmas, Koordinator Keperawatan dan Koordinator Bidan Puskesmas	Terlaksananya pertemuan koordinasi dokter, koordinator keperawatan dan koordinator bidan puskesmas (1 kali) dengan peserta sebanyak 30 orang	20.000.000	100	19.700.000
06	Monitoring dan Evaluasi Tentang Aset, Keuangan dan Administrasi Kpegawaian/Bidan PTT di Wilayah Kerja UPT Dinas Kesehatan	UPT Puskesmas yang dimonitoring dan dievaluasi sebanyak 10 puskesmas dan jaringannya	20.000.000	100	19.925.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	07 Biaya Operasional Kesehatan (BOK)	Kegiatan upaya kesehatan masyarakat di 10 puskesmas antara lain Lokakarya Mini Puskesmas, Kunjungan Rumah, Pelayanan Luar Gedung, dan lain-lain	2.300.000.000	100	1.856.067.270
08.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		400.000.000	100	370.323.000
	01 Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Promosi, Jaminan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan	Monitoring dan evaluasi bid. Promosi, jamkes dan penyehatan lingkungan di 10 Puskesmas	15.000.000	100	14.875.000
	02 Peningkatan PHBS di rumah tangga	Sosialisasi dan implementasi PHBS di rumah tangga	35.000.000	100	32.100.000
	03 Pembinaan Desa Percontohan PKK	Jumlah Desa Percontohan yang dilakukan pembinaan sebanyak 9 desa	50.000.000	100	35.950.000
	04 Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah kader Posyandu yang dibina di 4 Kecamatan (89 orang)	35.000.000	100	35.000.000
	05 Penyuluhan/Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat	Kegiatan penyuluhan/promosi kesehatan (29 kali) di RRI, Gereja dan sekolah-sekolah	35.000.000	100	34.424.000
	06 Lomba PHBS Desa Antar Kecamatan	Lomba PHBS (6 desa)	50.000.000	100	49.600.000
	07 Lomba TOGA (Tanaman Obat Keluarga) Desa Antar Kecamatan	Lomba TOGA (10 desa)	50.000.000	100	49.925.000
	08 Lomba Posyandu	Lomba Posyandu (5 desa)	50.000.000	100	40.424.500
	09 Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)	Lomba LBS (5 desa)	50.000.000	100	48.024.500
	10 Pembinaan Desa Siaga	Jumlah Desa Siaga yang dibina (7 desa)	30.000.000	100	30.000.000
09.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		688.215.000	100	665.688.500
	01 Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk yang ditangani (45 orang)	282.715.000	100	278.520.000
	02 Pengadaan Makanan Pendamping (MP-ASI)	MP-ASI bagi anak umur 6-12 bln 29 hari = 135 anak dan anak umum 12-24 bln = 224 anak (total 359 anak)	154.500.000	100	153.354.000
	03 Pengadaan PMT Bumil KEK	PMT Bumil KEK sebanyak 260 orang	155.000.000	100	153.764.500
	04 Biaya Pendistribusian, Sewa Gudang MP-ASI dan PMT Bumil KEK	Distribusi MP-ASI dan PMT bumil KEK	41.000.000	100	35.000.000
	05 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Dalam Upaya Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Pelatihan Kader dan Tim Penggerak PKK Desa dalam Pencegahan Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	30.000.000	100	30.000.000
	06 Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Masyarakat	Pemantauan garam beryodium	25.000.000	100	15.050.000
10.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		393.500.000	100	389.460.000
	01 Stimulan Pembangunan Jamban Percontohan Berbasis Masyarakat	Jamban percontohan bagi masyarakat (50 unit di 2 kecamatan)	263.500.000	99,98	263.450.000
	02 Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	55.000.000	100	51.660.000
	03 Orientasi CLTS (Community Lead Total Sanitation) Penanggulangan Penyakit Diare	Jumlah Kecamatan yang diorientasi CLTS	75.000.000	100	74.350.000
11.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		410.000.000	100	405.235.700
	01 Pelaksanaan imunisasi rutin	Imunisasi bayi umur 0-11 bulan sebanyak 2.870 org dari penyakit PD3I dan fasilitasi pelaksanaan PIN 2016	90.000.000	100	90.000.000
	02 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Imunisasi siswa SD kelas 1 s/d 3 sebanyak 14.500 orang dari penyakit tetanus	45.000.000	100	44.794.000
	03 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Campak	Imunisasi siswa SD kelas 1 sebanyak 3.500 orang dari penyakit campak	40.000.000	100	39.691.000
	04 Surveilans Penyakit	Pelaksanaan pengamatan (surveilans) penyakit sebanyak 24 kali	25.000.000	100	24.894.000
	05 Penyelidikan KLB/Wabah dan Penanganan Masalah Kesehatan akibat Bencana	Pelaksanaan Penyelidikan dan penanggulangan KLB/Wabah penyakit dan penanganan masalah kesehatan akibat bencana sebanyak 32 kali	25.000.000	100	24.753.000
	06 Pengendalian Penyakit TB Paru	Pengendalian penyakit TB Paru	35.000.000	100	34.950.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07	Pengendalian Penyakit Malaria	Pengendalian penyakit Malaria	20.000.000	100	20.000.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	08 Pengendalian Penyakit Kusta	Pengendalian penyakit kusta	10.000.000	100	9.756.000
	09 Pengendalian penyakit filariasis	Pengendalian dan pengobatan massal penyakit filariasis	45.000.000	100	44.812.000
	10 Pengendalian Penyakit DBD	Pengendalian penyakit DBD	35.000.000	100	32.656.000
	11 Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual	Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual	25.000.000	100	24.265.800
	12 Pengendalian Penyakit Rabies	Pengendalian penyakit rabies	15.000.000	100	14.663.900
12.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		10.463.093.180	69,14	5.911.724.625
	01 Penyusunan Profil Kesehatan Kab. Nias	Dokumen Profil Kesehatan Kab. Nias Tahun 2015	20.000.000	100	19.600.000
	02 Penyusunan Profil SDM Kesehatan Kab. Nias	Dokumen Profil SDM Kesehatan Kab. Nias Tahun 2015	15.000.000	100	14.884.000
	03 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Kesehatan Pasien Umum	Pelayanan dan Jasa Sarana terhadap pasien di Puskesmas	28.700.000	0	0
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Program JKN/BPJS	Pelayanan dan dukungan biaya operasional program JKN/BPJS di 10 kecamatan	5.273.430.000	76,11	4.013.775.575
	05 Pengelolaan Administrasi Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS	Penataan administrasi dan operasional program JKN di Unit pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya)	20.000.000	100	13.033.000
	06 Jaminan Persalinan	Fasilitasi persalinan dan rumah tunggu persalinan (2 puskesmas)	1.635.370.000	20,00	72.748.100
	07 Pengelolaan Administrasi Jaminan Persalinan di Kabupaten Nias	Operasional Tim Pengelola kegiatan Jaminan Persalinan di Kabupaten Nias	47.000.000	44,57	20.950.000
	08 Operasional Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program JKN di FKTP Kabupaten Nias	Operasional Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program JKN di FKTP Kabupaten Nias	25.000.000	100	18.788.000
	09 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP Kabupaten Nias	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP Kabupaten Nias (10 kecamatan)	35.000.000	100	30.622.000
	10 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Program JKN/BPJS Tunggakan Tahun 2014	Pelayanan dan dukungan biaya operasional program JKN/BPJS (10 Puskesmas)	1.448.238.600	45,70	661.829.900
	11 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Program JKN/BPJS Tunggakan Tahun 2015	Pelayanan dan dukungan biaya operasional program JKN/BPJS (10 Puskesmas)	1.823.129.580	52,77	962.019.050
	12 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Dana Non Kapitasi JKN FKTP	Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Dana Non Kapitasi (Pelayanan Persalinan dan Rawat Inap) JKN FKTP (4 Puskesmas)	92.225.000	90,51	83.475.000
13.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes		35.338.366.915	85,19	23.785.706.618
	01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas	Pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas (10 Puskesmas)	150.000.000	90,00	135.000.000
	02 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu (28 unit)	150.000.000	100	137.500.000
	03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Poskesdes/Posyandu Plus	Terpeliharanya sarana dan prasarana poskesdes/posyandu plus (47 unit)	47.000.000	100	44.650.000
	04 Rehabilitasi Sedang/Berat Poskesdes/Posyandu Plus	Terehabilitasinya Poskesdes/ Posyandu Plus	208.500.000	100	206.185.000
	05 Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun :		100	
		- Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu LASELA Kec. Gido	215.000.000	100	210.480.000
	06 Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar Puskesmas dan Pustu yang dibangun		100	826.162.000
		- Pembangunan Pagar, Pemasangan Paving Block, dan Pembangunan Tempat Parkir UPT Puskesmas Botombawo, Kec. Hillserangkai (SILPA DAK Rp 400.000.000 + DAU Rp 34.000.000)	434.000.000	100	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Pembangunan Pagar dan Pemasangan Paving Block Rumah Dinas dokter dan paramedis UPT Puskesmas Idanogawo (SILPA DAK Rp 263.854.977 + DAU Rp 23.750.000)	287.600.000	100	
		- Pembangunan Pagar dan Halaman UPT Puskesmas Ehosakhozi Kec. Hiliserangkai (SISA DAK 2015 Rp. 101.046.007 + SILPA Rp. 9.500.000)	110.546.007	100	
	07 Pembangunan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES)	Jumlah Poskesdes yang di bangun		100	782.132.000
		- Pembangunan Poskesdes di DESA LOLOZASAI Kec. Gido	370.000.000	100	
		- Pembangunan Poskesdes di DESA AWELA Kec. Hiliserangkai	420.000.000	100	
	08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Posyandu Plus	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Poskesdes		100	
		- Pembangunan Ruang Poliklinik Gigi di UPT Puskesmas Hiliweto Gido (DAK Rp 400.000.000 + DAU Rp 19.500.000)	423.500.000	100	415.053.000
	09 Pembangunan Sarana Pendukung Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Jumlah sarana pendukung yang dibangun		100	
		- Pembangunan Tembok Penahan di Puskemas Pembantu Lewuoguru II Kec. Ma'u	317.000.000		287.018.000
	10 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab		100	1.138.220.000
		- Relokasi Puskesmas Pembantu Sisobahili Kec. Gido	625.000.000	100	
		- Relokasi Puskesmas Pembantu Simanaere Kec. Botomuzoi	525.000.000	100	
	11 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi		91,25	3.479.305.600
		- Rehabilitasi atap Puskesmas Bawolato (DAK Rp 400.000.000 + DAU Rp 20.000.000)	420.000.000	100	
		- Rehabilitasi total gedung Puskesmas Rawat Jalan Ma'u (DAK Rp 3.200.000.000 + DAU Rp 90.000.000)	3.290.000.000	65,00	
		- Rehabilitasi sedang gedung Puskesmas Rawat Inap Botombawo (DAK Rp 550.000.000 + DAU Rp 40.000.000)	590.000.000	100	
		- Rehabilitasi sedang gedung Puskesmas Rawat Jalan Somolo-molo (DAK Rp 550.000.000 + DAU Rp 40.000.000)	590.000.000	100	
	12 Pengadaan Ambulance/Puskesmas Keliling Roda 4 (Empat)	Jumlah Kendaraan yang diadakan		66,67	5.159.360.888
		- Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan (DAK Rp 4.400.000.000 + DAU Rp 40.000.000)	4.440.000.000	100	-
		Pengadaan Ambulance Transportasi (DAK Rp 1.650.000.000 + DAU Rp 25.000.000)	1.675.000.000	100	
		Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan (SISA DAK 2015 Rp 1.650.000.000 + SILPA Rp 27.000.000)	1.677.000.000	0	
	13 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Non Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap			
		Peningkatan Puskesmas Pembantu BOZIHONA Menjadi Puskesmas Non Rawat Inap (DAK Rp 3.000.000.000 + DAU Rp 165.000.000)	3.165.000.000	100	3.079.066.000
	14 Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Rawat Inap		100	
		Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan BOTOMUZOI menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK Rp 1.500.000.000 + DAU Rp 95.000.000)	1.595.000.000	100	1.357.652.000
	15 Penambahan Ruangan Puskesmas	Jumlah Penambahan Ruangan Puskesmas			
		Pembangunan Ruangan Persalinan UPT Puskesmas Bawolato Kec. Bawolato (DAK Rp 800.000.000 + 59.000.000)	859.000.000	100	841.194.000
	16 Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang di Puskesmas	Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam mendukung UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)		80	1.249.051.390
		Kit BIDAN (DAK Rp 600.000.000 + DAU Rp 5.000.000)	605.000.000	100	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kit POSBINDU PTM (DAK Rp 150.000.000 + DAU Rp 5.000.000)	155.000.000	100	
		<u>Penyediaan Peralatan Kesehatan dalam mendukung UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)</u>			
		Set Kesehatan Gigi dan Mulut (DAK Rp 300.000.000 + DAU Rp 5.000.000)	305.000.000	100	
		<u>Penyediaan Alat Penunjang Puskesmas</u>			
		Generator Set (DAK Rp 3.600.000.000 + DAU Rp 20.000.000)	3.620.000.000	0	
		Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah (IPL) UPT Puskesmas Idanogawo (DAK Rp 550.000.000 + DAU Rp 13.000.000)	563.000.000	100	
	17	Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten Nias (DAK Rp 400.000.000 + DAU Rp 34.000.000)	434.000.000	100	431.446.000
	18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten Nias		83,33	
		Jumlah sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten Nias			
		Pengadaan Sarana Pengolah Data	50.000.000	100	36.570.000
		Pengadaan Sarana Penyimpanan	100.000.000	0	-
		Pengadaan Sarana Pengaman	200.000.000	100	199.875.000
		Pengadaan Sarana Distribusi	500.000.000	100	404.701.857
		Pengadaan Sarana Penunjang	50.000.000	100	47.840.000
		Biaya Umum Pengelolaan Kegiatan	18.500.000	100	18.500.000
	19	Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas		100	985.645.714
		- Puskesmas Non Rawat Inap BOZIHONA (DAK Rp 500.000.000 + DAU Rp 12.500.000)	512.500.000	100	
		- Puskesmas Rawat Inap BOTOMUZOI (DAK Rp 500.000.000 + DAU Rp 12.500.000)	512.500.000	100	
	20	Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis		33,33	
		Jumlah Rumah Dinas Dokter dan Paramedis yang dibangun			
		UPT Puskesmas Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai (SILPA DAK Rp 1.000.000.000 + DAU Rp 70.000.000)	1.070.000.000	100	1.046.384.000
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Ma'u Kec. Ma'u (SISA DAK 2015 Rp. 1.500.000.000 + SILPA Rp. 54.247.500)	1.554.247.500	0	-
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Bozihona Kec. Idanogawo (SISA DAK 2015 Rp. 1.171.482.108 + SILPA Rp. 44.036.300)	1.215.518.408	0	-
	21	Pengadaan Kendaraan Roda-2 Operasional Puskesmas (DAK Rp. 108.955.000 + DAU Rp. 5.000.000)	113.955.000	100	105.670.000
	22	Pembangunan Tembok Penahan Bertulang (Bor File) dan Parit Beton :		100	
		Jumlah unit pembangunan tembok penahan bertulang (bor file) dan parit beton			
		Puskesmas Hilduho	700.000.000	100	694.742.169
		Puskesmas Sogaeadu	400.000.000	100	396.879.000
	23	Pemeriksaan tanah (sondir) di Puskesmas Hilduho dan Puskesmas Sogaeadu	20.000.000	100	20.000.000
		Tersedianya data keadaan tanah di Puskesmas Hilduho dan Puskesmas Sogaeadu (1 dokumen)			
	24	Biaya Perencanaan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 2017	55.000.000	100	49.423.000
		Tersedianya dokumen perencanaan sarana kesehatan tahun 2017 (1 dokumen)			
14.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		10.000.000	100	10.000.000
	01	Pengadaan KMS Lansia	10.000.000	100	10.000.000
		Jumlah KMS Lansia yang diadakan (1000 lembar)			
15.	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		35.000.000	100	33.838.000
	01	Monitoring dan Pengawasan Tempat Pengelolaan dan Penjualan Makanan dan Minuman	20.000.000	100	20.000.000
		Kegiatan Monitoring dan pengawasan tempat pengelolaan dan penjualan makanan dan minuman (10 kecamatan)			
	02	Pemeriksaan Air Isi Ulang	15.000.000	100	13.838.000
		Jumlah depot Air isi ulang yang diperiksa (3 depot)			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		480.750.000	100	454.343.400
	01 Pembinaan Desa Percontohan Penggunaan Buku KIA dan Stiker P4K	Desa yang dibina sebanyak 5 desa	47.750.000	100	47.750.000
	02 Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) bagi Petugas	Petugas yang dilatih tentang APN (Asuhan Persalinan Normal) sebanyak 20 orang	150.000.000	100	133.561.900
	03 Magang Bidan Desa di RSUD Gunungsitoli	20 orang Bidan Desa yang magang di RSUD Gunungsitoli	50.000.000	100	48.850.000
	04 Pengadaan KMS Balita	KMS Balita sebanyak 1000 lembar	10.000.000	100	10.000.000
	05 Penerapan Program AMP (Audit Maternal Perinatal)	Penerapan Program AMP di 10 Puskesmas	50.000.000	100	48.975.000
	06 Peningkatan Kapasitas Petugas pengelola SDIDTK di Puskesmas	Petugas kesehatan yang dilatih SDIDTK (30 orang)	48.000.000	100	44.850.000
	07 Pelatihan Asuhan Bayi Baru Lahir	Tenaga Kesehatan yang dilatih tentang asuhan bayi baru lahir (20 orang)	60.000.000	100	58.835.000
	08 Pembekalan Petugas Penjarangan Kesehatan siswa kelas 1 SD sederajat	Guru pengelola UKS di SD dan Petugas UKS Puskesmas yang mengikuti pembekalan (60 orang)	25.000.000	100	23.321.500
	09 Sosialisasi Skrining Hypothyroid Kongenital Bagi Petugas Kesehatan	Petugas Kesehatan (Kabupaten dan Puskesmas) yang mendapatkan sosialisasi tentang Skrining Hypothyroid Kongenital (20 orang)	40.000.000	100	38.200.000
17.	Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan		399.000.000	98,18	294.944.890
	01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor	Jumlah Rapat koordinasi / kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor (terlaksana 1 dari 4 kegiatan, yaitu Hari Kesehatan Nasional)	90.000.000	80	65.000.000
	02 Penyelenggaraan Rapat Kerja Konsultasi Kesehatan	Kegiatan RAKONKES Th. 2016 (2 kali)	30.000.000	100	29.700.000
	03 Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Daerah	RAKERKESDA Th. 2016 (1 kali)	20.000.000	100	18.500.000
	04 Pengelolaan Administrasi Perencanaan Obat/Alat Kesehatan Terpadu Kab. Nias	Daftar rencana kebutuhan obat/alat kesehatan Thn. 2017 (1 dokumen)	20.000.000	100	20.000.000
	05 Pembinaan, Bimtek, Monitoring dan Pengawasan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian, Distributor Obat, obat tradisional, kosmetik di wilayah Puskesmas	Pembinaan, bimtek, monitoring dan pengawasan obat dan Perbekalan Kesehatan, pelayanan kefarmasian, distributor obat, obat tradisional, kosmetik di wilayah Puskesmas (10 Puskesmas)	15.000.000	100	14.900.000
	06 Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Kesehatan	Forum SKPD Bidang Kesehatan (1 kali)	30.000.000	100	29.000.000
	07 Pengelolaan Administrasi Pelaporan Dinas Kesehatan	Laporan bulanan, triwulan dan semester Dinas Kesehatan	9.000.000	100	9.000.000
	08 Kegiatan Penyiapan Administrasi Puskesmas Menjadi BLUD (Lanjutan)	Terlaksananya kegiatan penyiapan Administrasi Puskesmas menjadi BLUD (10 Puskesmas)	100.000.000	100	29.972.500
	09 Sosialisasi tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP)	Jumlah peserta sosialisasi SKP dan PKP (44 orang)	30.000.000	100	30.000.000
	10 Pengelolaan Administrasi Perpustakaan	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias selama 12 bulan	5.000.000	100	4.850.000
	11 Persiapan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pertemuan dalam rangka persiapan akreditasi Puskesmas (1 kali)	50.000.000	100	44.022.390
18.	Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan		30.000.000	100	29.700.000
	01 Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Kearsipan	Jumlah pegawai yang dilatih tentang Administrasi Perkantoran dan Kearsipan (57 orang)	30.000.000	100	29.700.000
19.	Program Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat		270.000.000	100	232.566.900
	01 Penyusunan Perda tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias	Perda tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias (1 Dokumen)	75.000.000	100	48.944.900

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	02 Pendataan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias	Terlaksananya pendataan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias (10 kecamatan)	150.000.000	100	142.100.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	03	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias dan penyusunan MOU dengan pihak BPJS Kesehatan	45.000.000	100	41.522.000
20.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan	40.000.000	100	37.057.000
	01	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Medis dan Paramedis	40.000.000	100	37.057.000
21.		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	50.000.000	100	49.950.000
	01	Pelatihan Kader Pelaksana Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-PTM)	50.000.000	100	49.950.000
		JUMLAH	57.581.206.378	94,67	39.008.899.834

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-8
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Tahun 2016

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.925.870.000		2.876.955.123
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangko, benda-benda pos lainnya dan biaya-biaya paket pengiriman surat-surat dinas selama 12 bulan	3.000.000	100	2.913.160
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meliputi: biaya rekening telpon, listrik, faxmili dan internet selama 12 bulan	1.002.000.000	100	974.293.426
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional roda empat sebanyak 3 unit (BB 1047 V, BB 8231 V, BB 1085 V)	10.000.000	30	3.580.130
04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya biaya kegiatan kebersihan kantor di RSUD Gunungsitoli meliputi: jasa cleaning service sebanyak 45 orang, belanja bahan dan peralatan kebersihan selama 12 bulan	900.000.000	100	898.848.400
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan berupa file pasien, kertas resep, dan file-file lainnya selama 12 bulan	461.550.000	100	460.582.500
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan surat kabar sebanyak 1 SKH selama 12 bulan	4.000.000	100	2.190.000
07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat-rapat kerja pegawai RSUD Gunungsitoli selama 12 bulan	50.000.000	100	46.972.200
08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya mengikuti rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dalam rangka peningkatan mutu dan membina kerjasama diberbagai bidang demi keberlangsungan dan kemandirian rumah sakit sebanyak 61 orang selama 12 bulan	200.000.000	100	197.895.307
09	Monitoring/ Survey/ Pengawasan/ Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah untuk supir Ambulance untuk mengantar/ menjemput pasien/jenazah dalam daerah wilayah Kepulauan Nias sebanyak 262 kali dan perjalanan dinas dalam daerah pegawai sebanyak 16 kali selama 12 bulan	36.000.000	100	30.360.000
10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terbayarnya honorarium Pejabat Pengguna Anggaran, PPK, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, PPTK, Staf PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Khusus Gaji, Pembantu Bendahara Pengeluaran Khusus Belanja Langsung, Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (verifikasi), Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Honor Operator SIPKD, Honorarium tenaga non PNS Daerah, Honorarium SAI/ SIMAK dan Honor Operator Mesin Genset selama 12 bulan	259.320.000	100	259.320.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		609.540.000		607.472.334
01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda empat sebanyak 10 unit (ambulance 7 unit dan mobil dinas 3 unit) BB 1047 V, BB 233 V, BB 7671 XX, B 7380 IP, BB 1085 V, BB 119 T, BB 1720 SHX, BB 8231 V, BB 1087 V, BB 154 T	329.540.000	100	327.472.809

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung RSUD Gunungsitoli meliputi pemeliharaan komputer, laptop, printer, AC, kulkas, alat-alat elektronik lainnya, pembuatan papan data jumlah pasien, pemeliharaan instalasi air, pemeliharaan mesin pompa air, pembuatan anti slip dan jalur triage, perbaikan tungku masak di instalasi gizi, pemeliharaan bangku dan lemari obat, perbaikan mesin gurinda, pembuatan tiang jemuran, pembuatan plang dilarang merokok, perbaikan kursi sofa, perbaikan tulisan RSUD Gunungsitoli.	200.000.000	100	199.999.525
03	Sewa Rumah Dinas Dokter	Tersedianya 1 unit rumah bertingkat dengan luas tanah 300 m, luas bangunan 265 meter, termasuk rekening air dan listrik selama 1 tahun, genset 1 unit, sumur bor, sofa dan kursi 1 set, AC 4 unit, spring bed 5 unit, kompor gas, cctv 8 unit, televisi 2 unit, kulkas 1 unit, lantai keramik untuk tempat tinggal bagi Dokter Spesialis/ Residen Senior, Sub Spesialis yang akan ditugaskan di RSUD Gunungsitoli untuk mendukung RSUD Gunungsitoli menjadi rumah sakit rujukan regional di Kepulauan Nias	80.000.000	100	80.000.000
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		1.222.950.000		1.110.353.700
01	Mengikuti Kegiatan Diklat Bimtek/ Workshop/ Kursus/ Sosialisasi di Luar Daerah	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam kegiatan diklat bimtek/ workshop/ kursus di luar daerah yang diikuti oleh tenaga manajemen, dokter dan perawat dengan rincian sebagai berikut : - tenaga manajemen sebanyak 26 orang - paramedis dan tenaga penunjang lainnya sebanyak 22 orang - dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi sebanyak 24 orang - Pelatihan Petugas ICU sebanyak 3 orang - Pelatihan Inhouse Training Bantuan Hidup Dasar sebanyak 735 orang - Pelatihan Inhouse Training PPGD sebanyak 32 orang - Pelatihan Inhouse Training Manajemen Tanggap Darurat Bencana di Rumah Sakit sebanyak 87 orang -Pelatihan In House Training Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)	1.222.950.000	88	1.110.353.700
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000		31.605.790
01	Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya 1 (satu) dokumen Rencana Kerja RSUD Gunungsitoli 2017	5.000.000	100	4.992.500
02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja (LK) SKPD RSUD Gunungsitoli Tahun 2015	3.500.000	100	3.490.175
03	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2020	Tersusunnya 1 (satu) dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2021	15.000.000	100	13.636.085
04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersusunnya 1 (satu) dokumen Laporan Tahunan RSUD Gunungsitoli 2015	6.000.000	100	5.989.550
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya 1 (satu) dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2016	3.500.000	100	3.497.480
05	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		20.000.000		19.999.200
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya keikutsertaan RSUD Gunungsitoli dalam kegiatan pameran pembangunan Kabupaten Nias	20.000.000	100	19.999.200

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN KESEHATAN				
06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		2.397.796.000		1.700.580.398
	01 Penyusunan Profil SKPD	Tersusunnya 1 (satu) dokumen Profil RSUD Gunungsitoli Tahun 2015	5.000.000	100	4.999.700
	02 Penyediaan Honorarium Tenaga Dokter dan Supervisor di Luar Jam Dinas	Terbayarnya honor tenaga dokter spesialis on call sebanyak 15 orang; dokter standby di IGD sebanyak 18 orang dan supervisor keperawatan sebanyak 24 orang selama 12 bulan	922.500.000	100	922.450.000
	03 Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Terlaksananya evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) RSUD Gunungsitoli sebanyak 22 SPM	30.000.000	100	29.154.100
	04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pengendali Mutu dan Pengawasan Internal	<p>Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendali mutu dan pengawasan internal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tim Pelaporan, Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal -Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Gunungsitoli Kab. Nias -Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergency dan Komprehensif (PONEK) -Promosi Kesehatan Rumah Sakit -Komite Farmasi dan Terapi (KFT) -Komite Health Technology Assessment (HTA) -Komite Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA) -Tim Pencegahan Fraud -Tim Clinical Pathway -Satuan Pengawas Internal -Komite Medik -Komite Perawatan -Tim Voluntary counselling and Testing (VCT) dan Care Support and Treatment (CST) -Tim Tuberculosis Directly Observed Treatment Shortcourse (TB Dots) -Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS -Etika dan Disiplin -Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS 	225.000.000	100	210.795.400
	06 Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis dan Residen Senior	Terpenuhinya honorarium tenaga dokter spesialis/ residen senior di RSUD Gunungsitoli sebanyak 2 orang selama 8 bulan	586.000.000	18	80.000.000
	07 Lanjutan Akreditasi RSUD Gunungsitoli Versi 2012 (JCI)	<p>Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dengan persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terbayarnya honorarium panitia pelaksana kegiatan Akreditasi RSUD Gunungsitoli Versi 2012 selama 12 bulan -Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor kegiatan Akreditasi RSUD Gunungsitoli Versi 2012 	185.000.000	100	184.944.650
	08 Akreditasi RSUD Gunungsitoli Versi 2012	<p>Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dengan persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan dokumen: 28 jenis Kebijakan; 26 jenis Pedoman; 45 jenis Panduan; 349 jenis SPO; 125 jenis Formulir. -Rapat-rapat pleno sebanyak: 19 kali -Rapat-rapat pokja sebanyak: 153 kali -Pelaksanaan sosialisasi dokumen sebanyak 6 kali -Pertemuan tim Akreditasi 2 kali -Rapat evaluasi kegiatan Akreditasi 3 kali -Pelaksanaan Bimbingan Akreditasi dari Tim KARS kepada Tim Akreditasi dan Pokja sebanyak 1 (satu) kali dengan peserta sebanyak 114 orang 	444.296.000	60	268.236.548

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		-Survey Simulasi Akreditasi dari Tim KARS sebanyak 1 (satu) kali dengan peserta sebanyak 114 orang			
07	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rs.jiwa/rs.paru-paru/rs.mata		32.590.896.727		16.013.052.427
01	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya kebutuhan meubelair rumah sakit meliputi: -meja ruang rapat sebanyak 1 set -meja 1 biro sebanyak 4 unit -meja 1/2 biro sebanyak 28 unit -kursi rapat sebanyak 8 lusin -kursi plastik sebanyak 8 lusin -lemari arsip sebanyak 6 unit -lemari locker sebanyak 4 unit -filling kabinet sebanyak 6 unit	200.000.000	100	199.650.000
02	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBH-CHT)	Terpenuhinya fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok meliputi alat kesehatan: -Nebulizer sebanyak 11 unit -Compressor Nebulizer 3 unit	150.000.000	100	149.997.477
03	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga rumah sakit meliputi: -AC 1 PK 5 unit -C109AC 2 PK 1 unit -Note Book/Laptop 1 unit -Komputer PC 2 unit -Monitor Komputer 3 unit -Printer 3 unit -Uninterruptible Power Supply (UPS) UPS 1200 2 unit UPS 2250 1 unit -Switch Internet 1 unit -Kipas Angin 2 unit	100.000.000	100	99.876.700
04	Pengadaan Mesin Genset	Terpenuhinya mesin genset (generator silent) rumah sakit ukuran 635 KVA sebanyak 1 (satu) unit dan peralatan pendukung lainnya	2.500.000.000	100	1.407.982.015
05	Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit				
	- Pengadaan Peralatan IGD	Terpenuhinya peralatan kesehatan IGD rumah sakit meliputi: -Resusitation Set Bayi 6 set -Resusitation Set Anak 4 set -Resusitation Set Dewasa 14 set -Stetoscope Dewasa 19 unit -Stetoscope Anak 2 unit -Stetoscope Bayi 2 unit -Tencimeter Mobile 19 unit -Lemari Obat Kaca 4 unit -Lemari Locker 2 unit -Kursi Roda 5 unit -Brankar 5 unit -Instrumen Trolley 8 unit -Emergency Trolley 5 unit -Bed Pasien Set 2 unit -Matras 2 unit -Vena Suction Set 2 unit -Orthopaedic Set 1 unit	700.000.000	100	681.432.374
	- Pengadaan Peralatan Kamar Operasi	Terpenuhinya peralatan kesehatan Kamar Operasi rumah sakit meliputi: -Scrub Station 2 unit -Laparotomy Instrument 1 Set -Appendectomy Instrument 1 Set -Anal Fistula Instrument 1 Set -Hernia Instrument 1 Set -Thyroidectomy Instrument 1 Set	700.000.000	100	665.028.957

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	- Pengadaan Peralatan ICU	Terpenuhinya peralatan kesehatan ICU rumah sakit meliputi: -Defibrilator 1 unit -Patient Warming 4 unit -Vein Viewer 1 unit -Matras Anti Decubitus 10 unit -Infusion Warmer 4 unit	1.000.000.000	100	995.369.654
	- Pengadaan Peralatan Kebidanan dan Neonatus	Terpenuhinya peralatan kesehatan Kebidanan dan Neonatus rumah sakit meliputi: -Fetal Monitor/cardiography 2 unit -Oximeter Oxy 5 unit -Baby Scale Digital 4 unit -Column Scale Digital 2 unit -Autoclave 2 unit -Curretage Instrument Set 2 set -Partus Set 3 set -Hecting Instrument Set 2 set -Sectio Set 1 set	553.290.000	100	552.881.331
	- Pengadaan Peralatan Radiologi	Terpenuhinya peralatan kesehatan Radiologi rumah sakit meliputi: -USG 1 unit -Probe Medical Linear 1 unit -Probe Medical Volume 1 unit -Stationary X-Ray 1 unit -Printer Radiologi Laser Imager 1 unit -Computed Radiologi 1 unit	3.280.000.000	100	3.197.382.878
	- Pengadaan Peralatan Central Sterile Supply Department (CSSD)	Terpenuhinya peralatan kesehatan Central Sterile Supply Department (CSSD) rumah sakit meliputi: -Steam Sterilizer 1 unit -Washer disinfectant 1 unit -Equipment Washing Sink 1 unit -Double Bowl 1 unit -Packing Table 1 unit -Perforated Shelves 1 unit	2.300.000.000	100	2.293.456.999
	- Pengadaan Peralatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Terpenuhinya peralatan kesehatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) rumah sakit meliputi: -Infant Warmer 1 unit -Suction Pump 2 unit -CPAP(Continuous Positive Airway Pressure) 2 unit -Air Compresor untuk CPAP 2 unit -Infant Ventilator 1 unit -Medical Oxygen Therapy 2 unit -Incubator Bayi 1 unit -Incubator Bayi 2 unit -Emergency trolley (resuscitation crash cart) 2 unit -Kompresor untuk Emergency trolley (resuscitation crash cart) 2 unit -Transport Incubator 1 unit	2.560.000.000	100	2.508.445.854
	- Pengadaan Peralatan Rawat Inap	-Terpenuhinya peralatan kesehatan rawat inap rumah sakit meliputi: -Bedside cabinet 120 unit -Children bed 7 unit -Mattress foam children 7 unit -Dressing trolley 23 unit -Medicine cabinet 1 unit -Mattress latex adult 6 unit -Mattress foam adult 34 unit -Medical report trolley 15 unit -Medicine trolley 25 drawers 11 unit -Room divider 8 unit -Sofa bed 20 unit -Overbed table 32 unit -Food trolley 6 unit -Waiting chair 7 unit -Locker 12 cupboard 5 unit	2.289.878.000	100	2.275.832.739

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		-Manual supramak bed 13 unit			

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		-Locker 6 cupboard 2 unit			
06	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran	Terpenuhinya alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit	15.000.000.000	0	-
07	Pengembangan Aplikasi dan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	<p>Tersedianya Aplikasi dan Jaringan Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) meliputi:</p> <p>Belanja Pengadaan Komputer/laptop, UPS dan Printer</p> <p>-Komputer Server 1 unit -Lan Kabel 3 unit -UPS Server 1 unit -Connector RJ 45 3 unit -Access Point 2 unit -Switch/HUB 2 unit -Printer Dot Metrik 1 unit -Printer Injek 1 unit -Laptop 1 unit -Komputer Client 9 unit -UPS Client 9 unit -connector RJ 45 10 unit -Biaya ATK kegiatan pengembangan Aplikasi dan Jaringan Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) -Belanja Fotocopy dan penjilidan modul Aplikasi dan Jaringan Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sebanyak 2 modul untuk 91 orang -Belanja Makanan dan Minuman rapat sebanyak 10 kali pertemuan -Honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengembangan Aplikasi dan Jaringan Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) selama 6 bulan</p>	440.800.000	100	322.393.100
08	Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Siap Ponek	Terpenuhinya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Siap Ponek di RSUD Gunungsitoli meliputi alat kesehatan Doppler 5 unit	16.928.727	100	16.899.999
09	Penambahan Daya Listrik Rumah Sakit	Terpenuhinya kebutuhan penambahan daya KWH meter listrik rumah sakit dari daya 345 KVA menjadi 555 KVA	800.000.000	100	646.422.350
08	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		3.155.000.000		3.144.791.750
01	Pemeliharaan Rutin/ Kalibrasi Peralatan Medik	<p>Terkalibrasinya peralatan medik sehingga hasil pemeriksaan lebih baik dan valid, yang dilaksanakan oleh Tim Kalibrasi BPFK dari Medan dan terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit meliputi:</p> <p>-cuci membran RO untuk Hemodialisis 11 kali -perbaikan alat kimia klinik sphaera 1 kali -penyediaan sparepart alat dental unit 1 kali -perbaikan alat processing film x-ray 1 kali -penyediaan sparepart alat medik 5 kali -perbaikan alat x-ray mobile 2 kali -pembersihan ruangan water treatment RO, peralatan dan perbaikan mesin pompa air 1 kali -perbaikan alat Elektro Surgical Valley Lab 1 kali -pembayaran biaya pembacaan TLD 1 kali -perbaikan sterilisator 3 kali -perbaikan centrifuge 1 kali -perbaikan suction pump 1 kali -penggantian jok kursi roda 1 kali -perbaikan trolley obat dan brankar mayat 1 kali -bubut besi tempat tidur 1 kali -perbaikan lampu operasi 1 kali -perbaikan incubator 1 kali -perbaikan pompa Hemodialisis 1 kali</p>	450.000.000	100	449.985.500

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		-penyediaan kabel monitor 1 kali			
02	Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit	<p>Terpeliharanya bangunan rumah sakit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pemeliharaan WC-WC tersumbat -perbaikan air/kamar mandi di instalasi HD -perbaikan plafon selasar di Ruang dr. Efori Gea, Sp.A, ke selasar Ruang dr. Hadi Abedneg dan perbaikan plafon di Ruang Supervisi -Perbaikan plafon di ruang Instalasi Radiologi dan Instalasi Hemodialisa, Ruang Tunggu Ruang Radiologi, Ruang dr.MG Thomsen dan Ruang Poliklinik -perbaikan jaringan instalasi air limbah di Instalasi Radiologi -perbaikan gantungan gorden sekat ranjang pasien dan gantungan gorden jendela di IGD,ruang VIP, ruang kamar operasi, Poli Ibu Hamil (PIH), Ruang dr. Hadi Abednego, dan Poli Gigi -perbaikan pagar taman depan ruang kasir -perbaikan atap ruang kamar operasi -perbaikan halaman dan taman rumah sakit -pembuatan handrel di gedung fase I, jembatan, ruang dr. Efori Gea, Sp.OG, ruang dr. Yuliana Zebua, selasar ruang MR, dan selasar ruang Poliklinik, ruang dr. Hadi Abednego, selasar dan tangga, ruang tunggu kamar operasi. -perbaikan pintu kamar mandi depan ruang dr.Hadi Abednego dan dr. H. Daeli, Sp.OG -penyekatan ruangan kamar 3 ruang dr. Hadi Abednego -penyekatan ruang training centre -perbaikan jendela kaca di ruang Bidang Pemeliharaan dan Teknologi Kedokteran dan ruang Bidang Program dan SDM, dan pintu kaca di ruang Instalasi Hemodialisis -perbaikan talang -pembuatan pallet kayu di Instalasi Farmasi -perbaikan lantai dan jalan yang rusak 	800.000.000	100	799.999.300
03	Pembangunan Rumah Genset Rumah Sakit	Terlaksananya pembangunan rumah genset rumah sakit sebanyak 1 unit	200.000.000	100	198.726.000
04	Rehabilitasi dan Pengembangan Ruang NICU Rumah Sakit	Terlaksananya rehabilitasi dan pengembangan ruang NICU rumah sakit sebanyak1 ruang perawatan	200.000.000	100	199.530.000
05	Renovasi dan Pengecatan Bangunan Gedung Rumah Sakit	Terlaksananya renovasi dan pengecatan bangunan gedung rumah sakit sebanyak 2 ruang perawatan	400.000.000	100	393.826.000
06	Operasional dan Pemeliharaan Mesin Genset, Mesin Oksigen, Mesin Ipal dan Mesin Insenerator Rumah Sakit	<p>Terlaksananya pemeliharaan dan beroperasinya 2 (dua) mesin genset, mesin oksigen, mesin Ipal dan mesin Insenerator di RSUD Gunungsitoli terdiri dari pembelian minyak solar 23.765 liter dan pembelian sparepart/ kegiatan kebutuhan mesin genset yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kontaktor scneider LC 1 D80-AC 1 buah -kontaktor ABB UA 1 buah -kabel TIK uk 2 x 6 3 meter -batere GS 150 A 1 buah -kepala batere 1 pasang -air radiator 38 jeregen -oli meditrans SX isi 10 liter 15 jeregen -air batere 2 kotak -batere GS ASTRA 120 A 4 buah -batere GS N 120 A -pengaturan beban instalasi listrik yang disuplay oleh genset 1 kegiatan -perbaikan panel dan modul genset 2 unit 	230.000.000	100	229.989.750
07	Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Rumah Sakit	Terlaksananya pembangunan bak penampungan air bersih rumah sakit sebanyak 1 unit	200.000.000	100	199.500.000

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Keluaran/ Output Yang Dicapai	Anggaran	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
08	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Terlaksananya pengolahan limbah B3 rumah sakit sebanyak 6.278,4 kg	675.000.000	100	673.235.200
09	Program Peningkatan Sistem Manajemen Kesehatan		322.600.000		302.129.780
01	Perencanaan Rehabilitasi Fisik/ Konstruksi	Tersusunnya 1 (satu) dokumen perencanaan kegiatan fisik/ konstruksi rumah sakit tahun 2017	50.000.000	100	49.940.000
02	Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa	Terlaksananya pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa RSUD Gunungsitoli yang didanai DAU dan DAK meliputi Honor Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), biaya jasa Konsultan Pengawasan kegiatan fisik TA 2016 , ATK, biaya penggandaan, dan biaya-biaya lainnya	272.600.000	100	252.189.780
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan		30.000.000		29.287.925
01	Penetapan Angka Kredit Point Jabatan Fungsional Tertentu/ Jabatan Fungsional Umum dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Terlaksananya penilaian angka kredit point jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional umum dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sebanyak 163 orang	30.000.000	100	29.287.925
11	Program Akses Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		25.000.000		-
01	Penanggulangan Krisis/ Bencana	Meningkatkan kemampuan tim brigade siaga bencana rumah sakit dan mengantisipasi korban bencana dan perluasan akses pelayanan kesehatan diluar rumah sakit	25.000.000	0	-
12	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		44.601.937.503		45.223.626.024
01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (PAD)	Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang terdiri dari: - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	44.601.937.503 22.027.541.600 21.702.570.533 871.825.370	100	45.223.626.024 22.881.202.537 21.499.287.490 843.135.997
		JUMLAH	87.934.590.230		71.059.854.451

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-11
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.992.540.000		1.579.208.682
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, benda-benda pos lainnya dan biaya paket pengiriman surat-surat dinas selama 12 bulan	5.000.000	100	4.998.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya rekening telepon, air, listrik, faximili pemasangan jaringan internet viber optik selama 12	453.000.000	100	235.232.419
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan roda dua sebanyak 64 Unit, roda empat sebanyak 7 Unit, roda enam sebanyak 3 Unit dan roda sepuluh sebanyak 1 Unit	25.000.000	100	11.121.850
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor selama 12 bulan	80.000.000	100	79.760.900
	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	35.000.000	100	32.962.000
	06 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Biaya rekening surat kabar selama 12 bulan	4.000.000	100	3.600.000
	07 Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga selama 12 bulan	15.000.000	100	14.430.900
	08 Penyediaan makanan dan minuman	Rapat, tamu dan minuman harian selama 12 bulan	37.000.000	100	36.277.000
	09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah serta perjalanan dinas luar daerah lainnya selama 12 bulan	550.000.000	97	532.376.913
	10 Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah serta perjalanan dinas dalam daerah lainnya selama 12 bulan	145.000.000	40	58.475.000
	11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honor Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator komputer, SIPKD, Penyimpan dan Pengurus Barang, Panitia Penerima, Pejabat Pengadaan barang/ jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan, honorarium Tenaga Non NIP Daerah pada Sekretariat , dan Honor Petugas EmonDAK SDA, Honor Tim Pengadaan Tanah selama 12 bulan	503.140.000	86	433.461.700
	12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Honorarium tenaga pengamanan gedung kantor, workshop dan AMP sebanyak 9 orang	140.400.000	100	136.512.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.045.750.000		1.449.777.140
	01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Roda empat = 1 unit	520.000.000	100	510.215.100
		Roda dua = 5 unit			
	02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	643.500.000	100	588.195.000
	03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional Roda Empat	8 unit	238.000.000	100	126.424.590
	04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	93.000.000	100	62.443.000
	05 Operasional dan Pemeliharaan Mesin Genset	1 unit	25.000.000	100	12.599.450
	06 Pembenahan Prasarana AMP	1 Paket	50.000.000	100	49.600.000
	07 Pengadaan Lahan Untuk AMP Baru	1 Ha	375.000.000	-	-
	08 Operasional Laboratorium Pengendalian Mutu	1 Tahun	100.000.000	100	100.000.000
	09 Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	1 Tahun	1.250.000	100	300.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		22.500.000		-
	01 Pengadaan Pakaian Dinas Security beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas security beserta perlengkapannya	22.500.000	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		270.800.000		205.750.000
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 52 orang	260.000.000	100	194.950.000
	02 Penyediaan Jasa Instruktur Olah Raga	Tersedianya jasa instruktur olah raga selama 12 bulan	10.800.000	100	10.800.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		183.000.000		32.350.000
	01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen Renja SKPD Tahun 2017	5.000.000	100	4.700.000
	02 Penyusunan Renstra SKPD	1 Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2021	15.000.000	100	14.650.000
	03 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015	3.500.000	100	3.500.000
	04 Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	6.000.000	100	6.000.000
	05 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2016	3.500.000	100	3.500.000
	06 Penilaian/Penaksiran Aset Dinas Pekerjaan Umum	Terlaksananya penilaian/ penaksiran aset Dinas PU selama 12 bulan	150.000.000	-	-
6	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		15.000.000
	01 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Ikut serta pada kegiatan pameran pembangunan	15.000.000	100	15.000.000
7	Program Peningkatan Pembangunan Bidang Infrastruktur		30.000.000		30.000.000
	01 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Bidang Infrastruktur Kabupaten Nias	7 SKPD	30.000.000	100	30.000.000
	Bidang Bina Marga		134.652.861.009		113.678.744.008
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		62.287.927.326		55.219.300.506
	KECAMATAN BOTOMUZOI				
	01 Pembangunan Lanjutan Jalan Ruas Ononamolo Talafu - Ononamolo I Bot, Kecamatan Botomuzoi / Hiliduho (DAU TA. 2016)	Lapen = 350 Tembok Penahan = 152 m Bronjong = 18 m	600.000.000	100	591.379.000
	02 Pembangunan Lanjutan Jalan Ruas Balohili Bot. Menuju Desa Fadorolauru Kecamatan Botomuzoi (DAU TA. 2016)	Duiker Plat = 3 tpt Lapen = 200 Parit Pas = 25.5 m Parit Pas+Tembok Penahan = 74 m Tembok Penahan = 66,5 m Bronjong = 69 m	1.000.000.000	100	991.625.100
	03 Pembangunan Lanjutan Jalan Ruas Aramo - Simanaere - Ononamolo Kecamatan Botomuzoi (DAU TA. 2016)	Lapen = 750 Tembok penahan = 238.5 m	1.000.000.000	100	985.685.000
	04 Pembangunan Lanjutan Jalan ruas dari Desa Ononamolo Talafu - Desa Tuhegafoa II Kecamatan Botomuzoi /	Lapen = 287 Tembok Penahan = 80 m	400.000.000	100	393.603.000
	05 Pembangunan Jalan Desa Simanaere Menuju Lokasi SMP Negeri 2 Botomuzoi (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Lapen = 140	200.000.000	100	197.600.000
	06 Pembangunan Lanjutan Jalan Ruas Hiligodu Menuju simango/ bayo sampai ke perbatasan Kabupaten Nias Barat (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Box Culvert = 1 tpt Stabilisasi = 123.5 m	500.000.000	100	486.811.400

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Tembok Penahan = 242.5 m			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
07	Pembangunan Jembatan To'oro Desa Hiliwaele I Kecamatan Botomuzoi (DAU TA.2016)	Parit Pas+Tembok Penahan = 44.5 m Tembok Penahan = 42.6 m Bronjong = 30 m Abutment = 2 tpt Jembatan = 1 tpt	1.800.000.000	100	1.788.541.800
08	Pembangunan Lanjutan Jalan Ruas dari Ononamolo Talafu - Talafu, Kecamatan Botomuzoi (DAU TA.2016)	Lapen = 211 Parit Pas+Tembok Penahan = 20 m Tembok Penahan = 25m	300.000.000	100	292.672.000
09	Pembukaan lanjutan jalan dari ujung Desa Talafu Kecamatan Botomuzoi menuju Sinuwe Desa Sisobalauru Kecamatan Hiliduho (SILPA TA. 2015)	Pembukaan = 1400 m	200.000.000	100	193.020.000
	KECAMATAN HILISERANGKAI				
01	Pembangunan jalan ruas Orahili Idanoi - Gui-Gui -Atualuo Kecamatan Mau Dhi. Dimulai dari Dusun IV Orahili Idanoi perbatasan Dusun II, Ehosakhozi, Kec. Hiliserangkai (DBH Prov. TA.2016)	Pembukaan = 4,396 m	500.000.000	100	487.912.200
02	Lanjutan Pembangunan jalan ruas Orahili Idanoi (Simpang tiga) - Lolofaoso Lalai dhi. dimulai dari Orahili Idanoi Kec.Hiliserangkai (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Pembukaan = 728 m Lapen = 239	500.000.000	100	483.989.000
03	Pembangunan lanjutan jalan ruas Lolofaoso Lalai (Onohada) - Orahili Idanoi Kecamatan Hiliserangkai (DAK IPD TA. 2016)	Box Culvert = 1 tpt Stabilisasi = 342,50 m Parit Pas = 23,50 m Parit Pas+Tembok Penahan = 222,90 m Tembok Penahan = 35,30 m Bronjong = 9 m	1.341.148.700	100	1.305.350.000
04	Pembangunan jalan ruas dari jalan Provinsi Menuju mata air Bozokhu Desa Hilizia Luru, Kecamatan Hiliserangkai (DAU TA.2016)		700.000.000	100	688.970.000
05	Pembangunan ruas jalan dari Simpang tiga Luaha Sungai BOLOZA - Ladea Kec. Gido Menuju Perbatasan Dusun II Desa Awela Kec. Hiliserangkai (Ex. PNPM MP.d Ehosakhozi tahun 2014) (DAU TA.2016)	Lapen = 246	300.000.000	100	293.174.400
	KECAMATAN MA'U				
01	Pembangunan Jalan ruas Lahemo - Dekha - Sihare'o III - Hilibadalu - Sihare'o III - Bawosalo'o Berua dhi. Dimulai dari simpang Lahemo Kecamatan Mau (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 2 tpt Box Culvert = 1 tpt Lapen = 200 Parit Pas = 55.5 m Tembok penahan = 134.5 m Bronjong = 15 m	1.000.000.000	100	976.598.000
02	Pembangunan jalan ruas Lasara Siwalubanua - Tuhemberua, Kec. Mau (DAU TA.2016)		500.000.000	100	485.260.000
03	Pembangunan jalan ruas Dekha - Lewa - Lewa, Kecamatan Ma'u (DAU TA.2016)		950.000.000	100	928.820.000
04	Pembangunan Jalan ruas Balodano - Fadoro Ehosakhozi (Huruna Nias Selatan), Kec. Ma'u (DAU TA. 2016)	Duiker Plat = 10 tpt Parit Pas = 125.3 m Parit Pas+Tembok Penahan = 81.1 m Tembok penahan = 24.5 m Bronjong = 21 m	1.000.000.000	100	981.449.900

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
05	Pembangunan jalan dari Balodano Menuju Desa Sisarahili Ma'u Dusun II Kec. Ma'u (DAU TA.2016)	Pembukaan = 938 m	200.000.000	100	197.230.000
06	Pembangunan jalan ruas Tuhemberua (Dusun I) - Wango, Kecamatan Ma'u (DAU TA.2016)	Pembukaan = 230 m	200.000.000	100	195.033.000
		Stabilisasi = 50 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 67 m			
	KECAMATAN GIDO				
01	Pembangunan Lanjutan Jalan Menuju Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias di Hilizoi, Kec. Gido (DAU TA. 2016)	Box Culvert = 1 tpt	2.000.000.000	90	1.698.093.671
		Stabilisasi = 416 m			
		Tembok Penahan = 279 m			
02	Pembangunan jalan dalam kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Nias di Hilizoi Kec. Gido (DAU TA. 2016)	Pembukaan = 150 m	500.000.000	80	370.620.440
		Stabilisasi = 15 m			
03	Pembangunan lanjutan jembatan sungai Haroronga dalam kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Nias di Hilizoi Kec. Gido (DBH Pusat TA. 2016)	Stabilisasi = 10 m	1.000.000.000	85	798.205.544
		Tembok Penahan = 24 m			
		Jembatan = 1 tpt			
04	Pembangunan lanjutan jalan ruas kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Nias di desa Hiliweto Kec. Gido (DBH Prov. TA. 2016)	-	500.000.000	-	8.860.000
05	Pembangunan Jalan ruas Somi - Laira melalui Ladea Orahua, Kec. Gido (DAK Transdes Afiriasi Rp. 1.500.000.000,- + DAU Rp. 28.680.000,-TA.2016)	Lapen = 142	1.528.680.000	85	1.198.179.678
		Tembok Penahan = 161,3 m			
06	Pembangunan Jalan perluasan Desa Lolozasai (melalui pekan), Kecamatan Gido (DBH Prov. TA.2016)	Stabilisasi = 55,5 m	200.000.000	100	194.550.000
		Tembok Penahan = 259 m			
07	Pembangunan lanjutan Jalan ruas Hilizoi - Hiliweto, Kecamatan Gido (DUA TA. 2016)	Pembukaan = 1,114 m	200.000.000	100	197.122.000
08	Pembangunan lanjutan Jalan ruas Hiliweto - Daulo Kec. Gido (DAK Afiriasi Infra Jalan Rp. 724.384.000,- + DAU Rp. 13.980.000,-TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt	738.364.000	100	685.354.050
		Stabilisasi = 359 m			
		Tembok Penahan = 529,50 m			
09	Pembangunan lanjutan Jalan ruas Somi - Somogia Kecamatan Gido (DAU TA. 2016)	Stabilisasi = 30 m	500.000.000	100	487.360.000
		Lapen 190			
		Tembok Penahan = 150 m			
10	Pembangunan Jalan ruas Lasela - Laira Kecamatan Gido (DAU TA.2016)	Pembukaan = 3,118 m	700.000.000	100	675.969.900
11	Pembangunan Jalan ruas Sihare'o Sogaeadu - Hiliweto - Sihare'o III (Kec. Ma'u), Kecamatan Gido (DAU TA. 2016)	Pembukaan = 13 m	300.000.000	100	290.289.900
		Stabilisasi = 223.5 m			
		Tembok Penahan = 101.5 m			
12	Pembangunan Lanjutan Jalan ruas Nifalo'o Lauru - Bayo Soewe, Kec. Gido (DAK Transdes Afiriasi Rp. 400.000.000,- + DAU Rp. 7.250.000,-TA.2016)	Pembukaan = 1,365 m	407.250.000	100	400.774.000
13	Pembangunan lanjutan jalan Menuju Goa Togi Mbogi Desa Sirete, Kec. Gido (DAU TA.2016)	Lapen = 217	500.000.000	100	484.870.000
		Parit Pas+Tembok Penahan = 93,5 m			
		Tembok Penahan = 109 m			
14	Pembangunan Jalan Menuju Sekolah SMP/SMK Swasta Tomosa (DAU TA.2016)	Box Culvert = 1 tpt	400.000.000	100	385.969.900
		Stabilisasi = 225 m			
		Parit Pas = 82 m			
15	Pengaspalan jalan Dusun I Hiliweto Gido (ex. Padat Karya) dhi. jalan Pemuda Menuju ex.BBIAT Hiliweto Gido (DAU TA.2016)	Stabilisasi = 297.3 m	200.000.000	100	195.392.000
		Lapen = 50			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 71.2 m			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
16	Pembangunan jalan ruas Lahemo-Ladea melalui Nifalo'o Lauru Kecamatan Gido (DAK Transdes Tahun 2015)	Kewajiban kepada pihak ke tiga TA. 2015	29.605.000	100	29.605.000
17	Pembangunan lanjutan Jembatan Gido Sebua pada Jalan Ruas Ohi'uso - Loloana'a, Kecamatan Gido (DAU TA.2016)	Jembatan = 1 tpt	1.000.000.000	55	655.421.875
18	Pembangunan Jembatan Gido Si'ite di ruas Jalan Lolozasai - Sisobahili Kecamatan Gido (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 1 tpt Stabilisasi = 83,20 m Parit Pas = 200 m Parit Pas+Tembok Penahan = 38 m Tembok Penahan = 121 m Abutment = 2 tpt Jembatan = 1 tpt	3.059.485.000	90	2.573.213.365
19	Pembangunan jembatan Mondua I Ruas Jalan Hiliweto - Lasara Siwalubanua Kec. Gido (DAK IPD TA. 2016)	Box Culvert = 1 tpt Lapen = 50	1.544.447.500	90	1.306.037.500
20	Pembangunan jembatan Mondua II Ruas Jalan Hiliweto - Lasara Siwalubanua Kec. Gido (DAK IPD TA. 2016)	Jembatan = 1 tpt	1.544.447.500	90	1.308.688.000
21	Pembangunan jalan ruas Menuju Perkantoran Pemkab di Hilizoi Kec. Gido (DBH Provinsi TA. 2015)	Kewajiban kepada pihak ke tiga TA. 2015	591.812.005	100	591.812.005
22	Pembangunan lanjutan Jembatan Sungai Gido Sebua Menuju desa Loloana'a Kec. Gido (DAU TA. 2015)	Kewajiban kepada pihak ke tiga TA. 2015	237.456.000	100	237.456.000
23	Pembangunan Jembatan Sungai Hororonga Hilizoi Kecamatan Gido (DBH PUSAT TA. 2015)	Kewajiban kepada pihak ke tiga TA. 2015	361.195.000	100	361.195.000
24	Pembangunan jembatan sungai Sugaeadu Kecamatan Gido (SILPA TA. 2015)	Kewajiban kepada pihak ke tiga TA. 2012	232.673.621		-
25	Pembangunan Tembok Penahan pada Jalan Ruas Soewe-Nifalo'olauru Kec. Gido (SILPA TA. 2015)	Tembok penahan = 36,5 m	150.000.000	100	149.350.000
26	Pembukaan badan jalan dari jalan Provinsi menuju jalan Somagia Kecamatan Gido (SILPA TA. 2015)	Pembukaan = 1000 m Stabilisasi = 250 m	200.000.000	100	193.495.000
27	Pembukaan badan jalan dari Dusun III Desa Sisobahili menuju Desa Ladea Kecamatan Gido dhi. Dari perbatasan Desa Sisobahili dengan Desa Hilimbowo Idanoi Kecamatan Gido (SILPA TA.2015)	Pembukaan = 1650 m	200.000.000	100	193.845.000
	KECAMATAN ULUGAWO				
01	Pembangunan lanjutan jalan ruas Holi - Fahandrona Kec. Ulugawo (DAU TA.2016)	Lapen = 802 Parit Pas = 158 m Parit Pas+Tembok Penahan = 317 m Tembok Penahan = 230,5 m Bronjong = 19 m	1.500.000.000	100	1.264.494.925
02	Pembangunan jalan ruas Tuhewaebu - Somolo - molo, melalui Lawa-lawa Luo, Kec. Ulugawo (DBH Prov. TA.2016)	Stabilisasi = 204 m Parit Pas+Tembok Penahan = 78 m Tembok Penahan = 110.5 m	200.000.000	100	196.458.000
03	Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Idanogawo di Desa Holi, Kec. Ulugawo (DAU TA.2016)	Duiker plat = 1 tpt Parit pas = 39 m Bronjong = 54 m abutment = 2 tpt	1.500.000.000	100	1.486.199.900

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	KECAMATAN BAWOLATO				
01	Pembangunan lanjutan jalan ruas Dahana - Tanah baru, Kec. Bawolato (DAK Transdes Afiriasi Rp. 500.000.000,- + DAU Rp. 9.800.000,-TA.2016)	Stabilisasi = 315 m	509.800.000	100	496.915.000
		Tembok Penahan = 640 m			
02	Pembangunan lanjutan jalan ruas Sisarahili - Balale (DAK IPD TA. 2016)	Pembukaan = 135 m	1.035.200.000	100	1.015.299.000
		Stabilisasi = 100 m			
		Lapen = 473			
		Tembok Penahan = 244,50 m			
		Bronjong = 12 m			
		Penggantian Papan = 1 tpt			
03	Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Hou, pada Ruas Jalan Huno - Hou, Kec. Bawolato (DAU TA.2016)	Parit pas = 153,5 m	1.000.000.000	60	574.433.600
		Tembok penahan = 40,5 m			
		Bronjong = 18 m			
		Abutment = 1 tpt			
04	Pembangunan lanjutan jalan ruas Bobozioli-Siofabanua dhi. Dimulai dari Siofabanua, Kecamatan Bawolato (DAK Transdes Afiriasi Rp. 600.000.000,- + DAU Rp. 12.470.000,-TA.2016)	Lapen = 295	612.470.000	100	600.894.700
		Parit Pas = 40 m			
		Parit Pas+Tembok = 74 m			
		Tembok Penahan = 5 m			
		Bronjong = 12 m			
05	Pembangunan jalan keliling pekan Kecamatan Bawolato (DBH Prov. TA.2016)	Lapen = 95	200.000.000	100	195.954.000
		Parit pas = 65 m			
		Tembok penahan = 133,5 m			
06	Pembangunan lanjutan jalan ruas Orahili - Orahua Faondrato, Kecamatan Bawolato (DAK Transdes Rp. 500.000.000,- + DAU Rp. 9.800.000,-TA.2016)	Stabilisasi = 186 m	509.800.000	100	496.888.000
		Tembok Penahan = 744 m			
07	Pembangunan Jalan Menuju lokasi pertapakan Universitas Nias (sondri'i), dimulai dari Jalan Nasional Km. 57, Kecamatan Bawolato (DAU TA.2016)	Duiker plat = 1 tpt	300.000.000	100	292.684.000
		Stabilisasi = 86,8 m			
		Tembok penahan = 148 m			
08	Pembangunan jembatan Sungai Bagaru, pada jalan ruas Hilihoru - Siofabanua, Kec. Bawolato (DAU TA.2016)	Box culvert = 1 tpt	1.000.000.000	100	985.335.000
		Stabilisasi = 150 m			
		Tembok penahan = 64,7 m			
09	Pembangunan Lanjutan Jalan Ruas Bobozioli-Loloana'a-Siofabanua dhi. Dimulai dari Siofabanua Kec. Bawolato (SISA DAK 2013 Rp. 426.967.002,- + DAU Rp. 73.032.998,- TA. 2015)	Kewajiban kepada pihak ketiga TA.2015	188.802.000	100	188.802.000
	KECAMATAN SOGAE'ADU				
01	Pembangunan jalan ruas We'a-we'a - Lasela Kec. Sogaeadu (DAK Transdes Afiriasi Rp. 1.000.000.000,- + DAU Rp. 19.550.000,-TA.2016)	Stabilisasi = 302 m	1.019.550.000	100	859.990.530
		Lapen = 298			
		Tembok Penahan = 294,5 m			
02	Pembangunan lanjutan Jalan ruas Sogaeadu - Botogo'o Kecamatan Sogaeadu (DAK Transdes Afiriasi Rp. 900.000.000,- + DAU Rp. 18.320.000,- TA.2016)	Lapen = 255	918.320.000	100	272.444.840
		Tembok Penahan = 192,5 m			
03	Pembangunan jalan ruas Saitagaramba - Kantor Camat Sogaeadu (DAU TA.2016)	Lapen = 255	300.000.000	100	291.289.900
		Tembok penahan = 47,2 m			
04	Pembangunan Lanjutan Jembatan Lauri pada jalan ruas Lauri - Somolo-molo, Kecamatan Sogaeadu (DAU TA.2016)		1.000.000.000	-	23.660.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
05	Pembangunan Jalan Menuju lapangan Olahraga Sogae'adu Kec. Sogaeadu (DAU TA.2016)	Duiker plat = 2 tpt	200.000.000	100	193.300.000
		Stabilisasi = 146 m			
		Tembok penahan = 138 m			
06	Pembangunan jalan ruas Sihare'o - Baho Mua Kec.Sogaeadu (DBH Prov. TA.2016)	Stabilisasi = 290 m	500.000.000	100	486.439.900
		Parit Pas = 112 m			
		Parit Pas+Tembok penahan = 50.5 m			
		Tembok Penahan = 104.85 m			
07	Pembangunan lanjutan Jalan ruas Tulumboho - Laira, Kec. Sogaeadu (DAU TA. 2016)	Stabilisasi = 134.5 m	500.000.000	100	479.109.900
		Tembok Penahan = 338.6 m			
	<u>KECAMATAN SOMOLOMOLO</u>				
01	Pembangunan jalan ruas Somolo-molo Menuju Puskesmas, Kecamatan Somolo-molo (DAU TA.2016)	Lapen = 255	500.000.000	100	486.890.000
		Parit Pas = 41 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 63 m			
		Tembok Penahan = 7 m			
02	Pembangunan lanjutan jalan ruas Somolo-molo - Sisaratandrawa, Kecamatan Somolo-molo (DAU TA.2016)	Lapen = 511.5	750.000.000	100	729.199.000
03	Pembangunan jalan ruas Huno - So'ewali Kec. Somolo-molo (DAU TA.2016)	Pembukaan = 3,500 m	750.000.000	100	734.070.000
	<u>KECAMATAN HILIDUHO</u>				
01	Pembangunan jalan ruas Balohili Menuju Desa Fadoro Lauru dhi. Dimulai dari Fadoro Lauru Kec. Hiliduho (DAU TA.2016)	Pembukaan = 131 m	750.000.000	100	728.147.000
		Lapen = 385			
		Parit Pas = 35 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 123.5 m			
		Tembok Penahan = 10 m			
02	Pembangunan lanjutan jalan ruas Hiligodu Tanoseo - Gunungsitoli Alo'oa, Dhi. Melalui Hiligeo Dusun V, Kec. Hiliduho (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 2 tpt	700.000.000	100	676.374.000
		Lapen = 250			
		Parit Pas = 112 m			
		Tembok Penahan = 190.7 m			
03	Pembangunan Jalan ruas Dima - Mazingo Tanose'o dhi. Dimulai dari Dusun III Desa Dima, Kec. Hiliduho (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt	1.000.000.000	100	978.592.000
		Box Culvert = 1 tpt			
		Lapen = 200			
		Parit Pas = 336 m			
		Tembok Penahan = 34.5 m			
		Bronjong = 33 m			
04	Pembangunan jalan ruas Desa Ombolata-Sisarahili Menuju Hiliwa'ele I Botomuzoi, Kec. Hiliduho (DAU TA.2016)	Lapen = 170	400.000.000	100	382.731.500
		Parit Pas+Tembok Penahan = 158.7 m			
05	Pembangunan Jalan dari SD Ombolata Sinuwe Desa Ombolata Sisarahili Menuju SMPN 3 Hiliduho (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt	200.000.000	100	196.395.000
		Pembukaan = 100 m			
		Stabilisasi = 300 m			
		Parit Pas = 40.1 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 40.9 m			
		Tembok Penahan = 34 m			
06	Pembangunan lanjutan jalan dari Dusun IV Mazingo Tanoseo Menuju Desa Simandraolo Kecamatan Hiliduho/Gunungsitoli (DAU TA.2016)	Lapen = 75	200.000.000	100	196.579.000
		Parit Pas = 19.7 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 35.4m			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
07	Pembangunan jalan alternatif dari Desa Sisobalauru Kecamatan Hiliduho menuju Anaoma perbatasan Kabupaten Nias Utara Kecamatan Hiliduho (SILPA TA. 2015)	Pembukaan = 805 m	100.000.000	100	99.145.000
	KECAMATAN IDANOGAWO				
01	Pembangunan lanjutan jalan ruas Biouti - Laira (DAK Transdes Afirmasi Rp. 1.057.230.000,- + DAU Rp. 19.550.000,- TA.2016)	Duiker Plat = 2 tpt Stabilisasi = 920 m Parit Pas = 64 m Tembok Penahan = 348 m	1.076.780.000	100	1.058.649.900
02	Pembangunan jalan dari Desa Hilionozega Menuju Desa Sitolubania (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Stabilisasi = 59 m Tembok Penahan = 40 m	200.000.000	100	195.097.000
03	Pembangunan lanjutan jalan ruas dari Desa Otalua Menuju Desa Bobozoli Loloana'a, Kec. Idanogawo (DAU TA.2016)	Box Culvert = 1 tpt Lapen = 127,5 Tembok Penahan = 24,7 m	400.000.000	100	389.900.000
04	Pembangunan Ruas jalan Tetelesi - Bobozoli Loloana'a, Kecamatan Idanogawo (DAK Transdes Rp. 743.840.000,- + DAU Rp. 14.780.000,- TA.2016)	Duiker Plat = 3 tpt Box Culvert = 1 tpt Pembukaan = 1,110 m Stabilisasi = 90,5 m Parit Pas = 219,5 m	758.620.000	100	543.664.970
05	Pembangunan lanjutan jalan ruas Baruzo Desa Tigaserangkai Menuju Luaha Na'ai Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo	Box Culvert = 1 tpt Tembok Penahan = 16 m	300.000.000	100	292.210.000
06	Pembangunan jalan dari Dusun II Desa Laowo Hilimbaruzo - Desa Tetegeo Na'ai Kecamatan Idanogawo (DAU TA.2016)	Pembukaan = 800 m	200.000.000	100	196.986.000
07	Pembangunan lanjutan jalan ruas Hilina'a Tafu'o (KM. 41) - Lawalo, Kecamatan Idanogawo (DAK Afirmasi Infra. Jalan Rp. 761.196.000,- + DAU Rp. 15.150.000,- TA.2016)	Duiker Plat = 2 tpt Stabilisasi = 145 m Parit Pas+Tembok Penahan = 74,50 m Tembok Penahan = 215 m	776.346.000	100	762.183.000
08	Pembangunan lanjutan jalan Menuju lokasi Pelabuhan di Desa Bozihona, Kec. Idanogawo (DBH Prov. TA.2016)	Stabilisasi = 171 m	500.000.000	100	487.340.000
09	Pembangunan lanjutan jalan ruas Biouti - Sandruta, Kecamatan Idanogawo (DAK Transdes Afirmasi Rp. 500.000.000,- + DAU Rp. 9.800.000,-TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Box Culvert = 1 tpt Stabilisasi = 193 m Parit Pas = 16 m Tembok Penahan = 8 m	509.800.000	100	495.240.000
10	Pembangunan jalan dari Dusun IV Desa Laowo hilimbaruzo - Fatodano, Kecamatan Idanogawo (DAU TA.2016)	Pembukaan = 789 m	200.000.000	100	196.875.000
11	Pembangunan badan jalan dari dusun I desa Bobozoli Loloana'a Menuju Hilozoma desa Laowo Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo (DAU TA.2016)	Pembukaan = 1,100 m	200.000.000	100	197.145.000
12	Pembangunan lanjutan jalan dari simpang Jln. Kogem Menuju Awoni Kecamatan Idanogawo (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 2 tpt Stabilisasi = 170 m	200.000.000	100	194.185.000
13	Pembangunan Jembatan Sungai Idanonadu pada Ruas Jalan Tetelesi Holi Kec. Idanogawo (DAK IPD TA. 2016)	Stabilisasi = 52 m Tembok Penahan = 104,90 m Bronjong = 54 m Abutment = 2 tpt Jembatan = 1 tpt	2.552.937.500	85	1.996.725.913

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
14	Pembangunan Jembatan Sungai Idano Mau Hililawae pada Ruas Jalan Tetelesi Holi Kec. Idanogawo (DAK IPD TA. 2016)	Stabilisasi = 31 m	2.552.937.500	100	2.513.661.000
		Lapen = 394			
		Parit Pas = 36 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 35 m			
		Tembok Penahan = 101 m			
		Bronjong = 121 m			
		Abutment = 2 tpt			
		Jembatan = 1 tpt			
	Pembangunan jembatan Sungai Mezawa pada ruas jalan Desa Baruzo Menuju Desa Bobozoli Loloana'a Kec. Idanogawo (DAU TA.2016)	Stabilisasi = 67.7 m	1.000.000.000	100	987.509.900
		Bronjong = 50 m			
		Jembatan = 1 tpt			
	Pembangunan jalan dari Dusun II menuju Dusun I Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Duiker Plat = 1 tpt	200.000.000	100	193.770.000
		Stabilisasi = 191 m			
		Tembok Penahan = 155 m			
	Pembangunan jalan dari jalan PDG Hilina'a menuju simpang Tafuo Kec. Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Duiker Plat = 1 tpt	100.000.000	100	99.233.600
		Stabilisasi = 45 m			
		Tembok penahan = 90 m			
	Pembangunan box culvert ruas jalan Tetelesi-Bozhona di Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Box Culvert = 1 tpt	200.000.000	100	193.754.900
8	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		10.102.801.367		8.906.130.242
	KECAMATAN HILISERANGKAI				
01	Pemeliharaan Jalan Ruas Fadoro Hunogoa - Lolofaoso Kec. Hiliserangkai (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 2.100	2.050.360.000	100	2.038.049.000
		Parit Pas+Tembok Penahan = 177,70 m			
02	Pemeliharaan Jalan Ruas Awela - Ehosakhozi, Kec. Hiliserangkai (DAU TA.2016)	Duiker plat = 1 tpt	200.000.000	100	199.124.000
		Lapen = 314			
03	Penanggulangan longsor oprit jembatan sungai Molawa, Kecamatan Hiliserangkai (DBH Prov. TA. 2016)	Bronjong = 18 m	150.000.000	100	149.195.000
04	Rehabilitasi jalan dari Dusun I Desa Awela menuju Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai dhi. Perbatasan Desa Awela dengan Desa Ombolata Kecamatan G.Sitoli Idanoi, Kecamatan Hiliserangkai (SILPA)	Lapen = 200	200.000.000	100	193.045.000
	KECAMATAN GIDO				
01	Pemeliharaan Jalan dalam Ibu Kota Kecamatan Gido, dhi. Jalan Pemuda (DBH Prov. TA.2016)	Lapen = 402	200.000.000	100	199.825.000
		Tembok Penahan = 6 m			
02	Pemindahan Jembatan Bailey pada sungai Gido Sebua di Nifalo'olauru (Bailey ex. Sungai Sogaedu-Somi), Kec. Gido		200.000.000	-	-
	KECAMATAN HILIDUHO				
01	Pemeliharaan Jalan Ruas Hilina'a-Lasara Dhi. Dimulai dari Mazingo Kec. Hiliduho (DAK IPD TA. 2016)	Hotmix = 2.060	3.565.132.500	85	2.862.988.442
		Parit Pas = 19,50 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 52 m			
		Tembok Penahan = 25 m			
		Bronjong = 47 m			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02	Pembangunan Bronjong pada Jalan Ruas Fadoro Luru-Sinarikhi Kec. Hiliduho (SISA DAK TA. 2015)	Bronjong = 30 m	200.000.000	100	193.995.000
	KECAMATAN IDANOGAWO				
01	Pemeliharaan jalan ruas Hilina'a Tafu'o - Siofaewali, Kec. Idanogawo (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 453 Parit Pas = 81,10 m Tembok Penahan = 76,50 m	525.450.000	100	521.257.000
02	Pemeliharaan/Penanggungan longsor di Jalan Ruas Tetehosi-Holi, Kec. Idanogawo (DBH Provinsi TA. 2016)	Pembukaan = 490 m	200.000.000	100	194.195.000
03	Pemeliharaan jalan dalam Ibukota Kecamatan Idanogawo Dhi. Jalan disekitar lapangan bola dan Gereja BNKP Tetehosi Kecamatan Idanogawo (DAU TA.	Kewajiban kepada pihak ketiga TA.2012	122.435.500	-	-
04	Pemeliharaan Jalan Taman Bunga dalam Ibukota Kecamatan Idanogawo	Lapen = 50	200.000.000	100	193.919.900
05	Pemeliharaan jembatan darurat sungai Fauro I Kec. Idanogawo (SISA DAK TA. 2015)	Bronjong = 30 m Penggantian papan = 1 tpt	160.000.000	100	
06	Penanganan Darurat jalan ruas Tetehosi - Holi dhi. Dusun I Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Lapen = 256	200.000.000	100	193.545.000
	KECAMATAN BOTOMUZOI				
01	Pemeliharaan jalan Menuju kompleks SMP Negeri 1 Botomuzoi		4.095.000	100	4.095.000
02	Pemeliharaan lanjutan jalan Botombawo - Ononamolo Talafu Dhi. Dimulai dari Ononamolo Talafu, Kecamatan Botomuzoi (DAK Rp.3.806.320.000 + DAU Rp.380.632.000.-)	Kewajiban kepada pihak ketiga TA.2015	821.081.209	100	821.073.000
	KECAMATAN MA'U				
01	Pemeliharaan jembatan sungai Fagato, Kecamatan Ma'u (SILPA TA. 2016)	Tembok penahan = 10 m Penggantian papan = 1 tpt	40.000.000	100	3.590.000
02	Pemeliharaan jembatan sungai Nari, Kecamatan Ma'u (SILPA TA. 2016)	Tembok penahan = 3 m Penggantian papan = 1 tpt	40.000.000	100	3.590.000
03	Pemeliharaan jembatan sungai Sinaota, Kecamatan Ma'u (SISA DAK TA. 2015)	Tembok penahan = 4 m Penggantian papan = 1 tpt	40.000.000	100	3.590.000
	KECAMATAN ULUGAWO				
01	Pemeliharaan jembatan sungai Gori-gori, Kec. Ulugawo (SILPA TA. 2015)	Parit pas. = 8 m Tembok penahan = 14 m Penggantian papan = 1 tpt	40.000.000	100	39.490.000
02	Pemeliharaan jalan ruas Tetehosi-Holi dhi. Desa Orabili Kecamatan Ulugawo (SILPA TA. 2015)	Lapen = 273	200.000.000	100	194.145.000
	KECAMATAN SOGAEADU				
01	Pemeliharaan jalan ruas Sogaeadu-Somolo-molo dhi. Dimulai dari Saitagaramba Kecamatan Sogaeadu/Somolo-molo (DAK Tambahan UD TA. 2015)	Kewajibanb kepada pihak ketiga TA. 2015	328.434.000	100	328.434.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	KECAMATAN BAWOLATO				
01	Pemeliharaan Jembatan Sungai Sondri'l pada ruas jalan Sisarahili - Banua Sibohou Silima'ewali Kecamatan Bawolato (SILPA TA. 2015)	Penggantian papan = 1 tpt	70.000.000	100	69.375.000
02	Pemeliharaan Jalan Ruas Sindrondro-Tagaule Kecamatan Bawolato (SISA DAK TA. 2015)	Tembok penahan = 132 m	200.000.000	100	195.119.900
03	Pemeliharaan Jalan Ruas Hilina'a Tafuo-Si'ofaewali Kecamatan Bawolato (SISA DAK TA. 2015)	Lapen = 130	145.813.158	100	145.495.000
9	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		62.262.132.316		49.553.313.260
	KECAMATAN BOTOMUZOI				
01	Peningkatan lanjutan jalan ruas Dahadano Botombawo - Talafu Kecamatan Botomuzoi (DAK IPD TA. 2016)	Hotmix = 3.980 Parit Pas = 150 m Tembok Penahan = 52,50 m	4.069.880.000	100	4.040.549.000
02	Peningkatan Lanjutan Jalan dari Hilihambawa Bot. Menuju Sisobahili Dola Bot. Kecamatan Botomuzoi (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 750 Parit Pas = 178 m Tembok Penahan = 127,50 m	1.035.200.000	100	1.027.549.900
03	Peningkatan lanjutan jalan ruas Desa Ononamolo Talafu - Sohuwo Desa Olanori (DAU TA.2016)	Lapen = 471 Tembok penahan = 64.5 m	600.000.000	100	588.571.000
04	Peningkatan jalan dari Desa Hiliwaele II Menuju Mohili Berua (ex. Padat Karya Kecamatan Botomuzoi) (DBH Prov. TA.2016)	Lapen = 170 Parit Pas = 121 m Tembok Penahan = 154.6 m	400.000.000	100	394.224.800
05	Peningkatan jalan Menuju kompleks SMP Negeri 1 Botomuzoi (DBH Pusat TA.2016)		245.905.000		1.250.000
	KECAMATAN HILISERANGKAI				
01	Peningkatan lanjutan jalan ruas Lahemo - Awela dhi. dari Ehosakhozi Kec. Hiliserangkai (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 868 Parit Pas+Tembok Penahan = 26 m	1.544.447.500	100	1.521.140.000
02	Peningkatan Lanjutan jalan ruas Lolowua Fadoro Lalai dhi. dari Fadoro Lalai Kec. Hiliserangkai (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 692 Parit Pas = 116 m Tembok Penahan = 56,84 m Bronjong = 87 m	1.035.200.000	100	1.017.436.000
03	Peningkatan jalan ruas Lolowua - Lolowua Hiliwarasi dhi, dimulai dari dusun II Desa Lolowua Hiliwarasi Kec. Hiliserangkai (DBH Prov. TA. 2016)	Lapen = 163 Parit pas = 64 m Tembok penahan = 10 m	250.000.000	100	247.865.000
04	Peningkatan ruas jalan Lolowua - Hilizialauru, dhi. Dari Hilizialauru Kec. Hiliserangkai (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 ptp Lapen = 560 Parit pas = 134.5 m Parit pas+tembok penahan = 224 m Bronjong = 6 m	1.000.000.000	100	996.410.000
05	Peningkatan jalan ruas Lalai I/II - Desa Awela dhi, dimulai dari Desa Lalai I/II, Kecamatan Hiliserangkai (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 1 ptp Lapen = 458 Parit Pas = 251 m Parit Pas+Tembok Penahan = 22,50 m Tembok Penahan = 127,70 m	1.035.200.000	100	1.031.546.600
06	Peningkatan jalan ruas Lalai I/II - Desa Awela dhi, dimulai dari Awela, Kecamatan Hiliserangkai (DAU TA.2016)	Lapen = 485	500.000.000	100	494.095.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
07	Peningkatan lanjutan jalan dari simpang Tiga sungai Boloza menuju Ladea (ex. PNPM Mandiri) Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai	Lapen = 200	200.000.000	100	193.195.000
	KECAMATAN MA'U				
01	Peningkatan Lanjutan Jalan Ruas Hiliweto - Lasara Siwalubana, Kec. Ma'u (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 1 tpt Hotmix = 1.480 Parit Pas = 177,50 m Tembok Penahan = 240 m	2.050.360.000	80	641.359.700
	KECAMATAN GIDO				
01	Peningkatan Lanjutan Jalan ruas Lolozasai - Sisobahili, Kec. Gido (DAU		750.000.000	100	700.670.655
02	Peningkatan Jalan ruas Duria - Somi, Kecamatan Gido (DAK IPD TA. 2016)	Hotmix = 1.025 Tembok Penahan = 1.624 m	2.552.937.500	100	2.472.620.000
03	Peningkatan lanjutan Jalan ruas Lasara Idanoi-Sisobahili Kec. Gido (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 1 tpt Stabilisasi = 386 m Lapen = 220 Parit Pas+Tembok Penahan = 26 m Tembok Penahan = 136,50 m Bronjong = 21 m	1.035.200.000	100	1.030.100.000
04	Peningkatan jalan ruas Lahemo - Awela, Dhi. Dimulai dari Nifalo'o Lauru Kec. Gido (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 420 Parit Pas = 170 m Perit Pas+Tembok Penahan = 43,50 m Tembok Penahan = 57 m Bronjong = 40 m	1.035.200.000	100	1.027.812.000
05	Peningkatan jalan ruas Lolozasai - Bayo, Kecamatan Gido (DAK Afiriasi Infra. Jalan Rp. 750.000.000,- + DAU Rp. 15.150.000,-)	Duiker Plat = 1 tpt Lapen = 392 Parit Pas = 365 m Tembok Penahan = 78,50 m	765.150.000	100	752.375.000
06	Peningkatan jalan ruas Simpang Ohiuso Menuju jalan Odowa Kecamatan Gido (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Lapen = 200 Parit Pas+Tembok Penahan = 30.5 m Tembok Penahan = 18.5 m	300.000.000	100	296.814.500
07	Peningkatan Jalan ruas Sirete - Somagiao, Kecamatan Gido (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Stabilisasi = 43 m Tembok Penahan = 247 m	300.000.000	100	290.805.000
08	Peningkatan Jalan ruas Soewe - Si'afasi Kec. Gido (DAU TA.2016)	Lapen = 297	300.000.000	100	296.235.300
09	Peningkatan jalan ruas Hilizoi-Hiliweto (komplek kantor pemerintahan) Kecamatan Gido (DAU TA.2015)	Kewajiban kepada pihak ketiga TA.2015	413.869.960	100	-
10	Peningkatan Jalan Ruas Hiliweto-Lasara Siwalubana dhi. Dimulai dari Hiliweto, Kecamatan Gido (Dak Tambahan UD TA. 2015)	Kewajiban kepada pihak ketiga TA.2015	472.379.088	100	-
11	Peningkatan struktur jalan di Ibukota Kecamatan Gido (BKP TA. 2015)	Kewajiban kepada pihak ketiga TA.2015	1.518.649.860	100	1.518.649.860
	KECAMATAN ULUGAWO				
01	Peningkatan lanjutan Jalan dalam Ibu Kota Kecamatan Ulugawo (DAU TA.2016)	Duiker plat = 1 tpt Lapen = 144.5 Tembok penahan = 83.3 m	300.000.000	100	297.300.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	KECAMATAN BAWOLATO				
01	Peningkatan lanjutan jalan ruas Huno - Hou, Kecamatan Bawolato (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 1 tpt Hotmix = 1.250 Parit Pas = 148 m Tembok Penahan = 778 m	2.301.791.200	100	2.271.170.000
02	Peningkatan jalan ruas Hilihuru-Hilifaosi dhi. dimulai dari Siofabanua, Kec. Bawolato (DAK IPD TA. 2016)	Pembukaan = 152 m Stabilisasi = 200 m Lapen = 612 Parit Pas = 65,50 m Parit Pas+Tembok Penahan = 61 m Tembok Penahan = 447,30 m	1.035.200.000	100	1.019.561.000
03	Peningkatan lanjutan jalan ruas Sindronro - Tagaule, Kecamatan Bawolato (DAK IPD TA.2016)	Duiker Plat = 6 tpt Box Culvert = 3 tpt Stabilisasi = 5.400 m Tembok Penahan = 841,70 m	5.077.470.100	100	5.025.450.000
04	Peningkatan jalan ruas Amakhaita Desa Sisarahili Menuju Desa Dahana Kecamatan Bawolato (DAK Afirmasi Infra Jalan Rp. 600.000.000,- + DAU Rp. 11.820.000,-TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Pembukaan = 195 m Stabilisasi = 100 m Lapen = 179 Parit Pas+Tembok Penahan = 48 m Tembok Penahan = 130 m	611.820.000	100	604.102.000
05	Peningkatan jalan ruas Sisarahili - Banuasibohou Silima Ewali (DAK Afirmasi Infra Jalan Rp. 1.000.000.000,- + DAU Rp. 18.900.000,-TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt Box Culvert = 1 tpt Pembukaan = 584 m Stabilisasi = 300 m Lapen = 167 Parit Pas+Tembok Penahan = 99 m	1.018.900.000	100	315.591.600
06	Peningkatan jalan dari Desa Orahua Menuju Baho Idano Mola (DAU TA.2016)	Lapen = 272,5	300.000.000	100	296.884.000
07	Peningkatan jalan Menuju Air Terjun Moambolo (DBH Prov. TA.2016)	Lapen 220	300.000.000	100	296.924.000
08	Peningkatan jalan Menuju pantai Dawala Desa Gazamanu Kec.Bawolato (DAU TA.2016)	Lapen = 181 Parit pas = 20 m Tembok penahan = 80,5 m	400.000.000	100	396.265.000
09	Peningkatan jalan depan Gereja BNKP Jemaat Bawolato (DAU TA.2016)	Duiker plat = 1 tpt Lapen = 47 Tembok penahan = 101,5 m	200.000.000	100	197.512.000
10	Peningkatan Ruas Jalan dari Kantor Pertanian menuju Lala Alio Luaha Zuani, Dusun V Desa Sisarahili Bawolato Kec. Bawolato (SILPA TA. 2015)	Stabilisasi = 76m Tembok penahan = 152 m	175.000.000	100	174.334.900
	KECAMATAN SOGAE'ADU				
01	Peningkatan lanjutan jalan Baruzo - Saitagaramba Kec. Sogaeadu (DAK IPD TA.2016)	Hotmix = 650 Parit Pas = 298,50 m Parit Pas+Tembok Penahan = 9 m Tembok Penahan = 483,50 m	2.050.360.000	100	2.003.113.000
02	Peningkatan lanjutan jalan ruas Sogaeadu - Somolo-molo Kec. Sogaeadu/Somolo-molo (DAK IPD TA. 2016)		4.621.727.500	-	961.640.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03	Pembangunan jalan ruas Saitagaramba - Sisarahili Sogaeadu, Kecamatan Sogaeadu (DAU TA.2016)	Pembukaan = 266.5 m	300.000.000	100	296.384.900
		Stabilisasi = 120 m			
		Lapen = 120			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 37 m			
		Tembok Penahan = 11 m			
04	Peningkatan Jalan Ruas Sogaeadu-Somolo-molo Kec. Sogaeadu/ Somolo-molo (DAK Rp. 2.000.000.000.- + DAU Rp. 200.000.000.-)	Kewajiban kepada pihak ketiga TA.2015	519.688.008	100	-
05	Peningkatan Jalan Persatuan dari Dusun II Desa Baruzo Kecamatan Sogaeadu menuju lokasi Kantor Bupati Nias (SILPA TA. 2015)	Lapen = 180	200.000.000	100	195.145.000
	<u>KECAMATAN HILIDUHO</u>				
01	Peningkatan lanjutan jalan ruas Desa Hiliduho Menuju Lasara dhi. Dimulai dari Lasara Kec. Hiliduho (DAU TA.2016)	Lapen = 150	500.000.000	100	492.373.200
		Tembok Penahan = 132 m			
02	Peningkatan Lanjutan Jalan Ruas Lasara Tanose'o - Anaoma (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 1 tpt	2.050.360.000	100	2.039.699.000
		Pembukaan = 462 m			
		Lapen = 715			
		Parit Pas = 115 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 81,50 m			
		Tembok Penahan = 184,50 m			
		Bronjong = 87 m			
03	Peningkatan jalan ruas Fadoro Lauru-Larumae Kec. Hiliduho (DAK IPD TA. 2016)	Hotmix = 2.225	2.552.937.500	90	2.160.481.145
		Parit Pas = 28 m			
		Tembok Penahan = 392,70 m			
04	Peningkatan lanjutan jalan ruas Onowaembo Hiligara-Sinarikhi dhi. dari Sinarikhi Kec. Hiliduho (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 500	1.035.200.000	100	1.021.699.000
		Parit Pas = 26 m			
		Tembok Penahan = 50,50 m			
		Bronjong = 45 m			
05	Peningkatan jalan dari Desa Ombolata Sisarahili Menuju Ononamolo Talafu Kecamatan Hiliduho/Botomuzoi (DBH Prov. TA.2016)	Duiker Plat = 3 tpt	250.000.000	100	246.756.300
		Pembukaan = 565 m			
		Parit Pas = 12 m			
	<u>KECAMATAN IDANOGAWO</u>				
01	Peningkatan Lanjutan jalan Bobozoli Loloana'a - Baruzo, Kecamatan Idanogawo (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt	500.000.000	100	496.014.900
		Lapen = 300			
		Parit Pas+tembok penahan = 17.5 m			
		Bronjong = 20 m			
02	Peningkatan ruas jalan Tetehosi - Bozihona Kec. Idanogawo (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 2 tpt	3.059.485.000	80	2.298.054.240
		Stabilisasi = 650 m			
		Hotmix = 300			
		Tembok Penahan = 644 m			
03	Peningkatan lanjutan jalan ruas Tetehosi - Holi, Kecamatan Idanogawo (DAK IPD TA. 2016)	Duiker Plat = 6 tpt	4.069.880.000	90	856.020.000
		Box Culvert = 1 tpt			
		Hotmix = 1100			
		Parit Pas = 227 m			
		Tembok Penahan = 101,5 m			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
04	Peningkatan lanjutan jalan ruas Bobozioli Loloana'a -Siofabanua (DAK IPD TA. 2016)	Stabilisasi = 375 m	1.544.447.500	90	1.317.188.260

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Lapen = 470			
		Parit Pas = 140 m			
		Parit Pas+Tembok Penahan = 154 m			
		Tembok Penahan = 28 m			
05	Peningkatan Jalan ruas Saiwahili Hiliadulo - Somolo-molo (DAK IPD TA. 2016)	Lapen = 600	935.970.000	100	934.744.900
		Parit Pas+Tembok Penahan = 104 m			
		Tembok Penahan = 10 m			
06	Peningkatan jalan dari mesjid Menuju lokasi Pekan Bozihona Kec. Idanogawo (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 1 tpt	300.000.000	100	296.535.000
		Stabilisasi = 73.5 m			
		Tembok penahan = 163.5 m			
07	Peningkatan jalan Menuju Poskesdes Oladano Kecamatan Idanogawo (DAU TA.2016)	Lapen = 107	200.000.000	100	199.590.000
		Parit pas = 105.6 m			
		Tembok penahan = 41.8 m			
08	Peningkatan lanjutan jalan dari Jl. Omasido Gotong Royong Desa Orahili Zuzundrao Menuju Desa Hilina'a Tafuo dan Desa Awoni Lauso Kecamatan	Duiker Plat = 1 tpt	200.000.000	100	197.188.000
		Stabilisasi = 157 m			
		Tembok penahan = 20 m			
	KECAMATAN SOMOLO-MOLO				
01	Peningkatan jalan dalam Ibukota Kecamatan Somolo-molo Menuju Hilimborodano, Kecamatan Somolo-molo (DAU TA.2016)	Duiker Plat = 2 tpt	750.000.000	100	739.870.000
		Pembukaan = 65.5 m			
		Lapen = 182.5			
		Parit Pas = 153.5 m			
		Tembok penahan = 32 m			
	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM				
01	Konsultansi perencanaan DED kawasan SOZIONA	1 Dokumen perencanaan	600.000.000	100	594.760.000
02	Konsultan Penyusunan Data Base Jaringan Jalan Kabupaten Nias (DAU)	Dokumen perencanaan	100.000.000	-	1.700.000
03	Konsultan Perencanaan DAK Afirmasi Jalan	1 Dokumen Data perencanaan	50.000.000	100	49.850.000
04	Konsultan Perencanaan DAK Transdes Reguler	1 Dokumen Data perencanaan	50.000.000	100	46.946.000
05	Konsultan Perencanaan DAK Transdes Afirmasi	1 Dokumen Data perencanaan	50.000.000	100	49.850.000
06	Konsultan Pengawasan (DAU TA. 2015)	1 Dokumen Data perencanaan	442.316.600	100	442.316.600
07	Biaya Perencanaan Kegiatan DAK dan DAU TA.2017 Bidang Bina Marga	Biaya operasional survey dan perencanaan DAK+DAU TA.2017	200.000.000	100	139.025.000
	BIDANG SUMBER DAYA AIR		16.572.098.398		16.347.212.504
10	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya		9.040.498.398		8.916.377.025
	KECAMATAN SOGAE'ADU				
01	Peningkatan Lanjutan DI. Sinizi Kecamatan Sogaeadu (DAK IPD TA. 2016)	Saluran = 462 m	1.215.000.000	100	1.194.841.700
		Bak Bagi = 1 unit			
		Bendungan = 1 unti			
02	Peningkatan Lanjutan DI. Sikhula Deu Kecamatan Sogaeadu (DAK IPD TA. 2016)	Saluran = 623 m	830.000.000	100	812.475.000
		Tembok Penahan = 69 m			
03	Peningkatan Lanjutan DI. Uluwi Kecamatan Sogaeadu (DAK Afirmasi TA. 2016)	Saluran = 197 m	315.000.000	100	310.520.450
		Saluran Tanah = 125 m			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	KECAMATAN BAWOLATO				
01	Peningkatan Lanjutan DI. Sisake Kecamatan Bawolato (DAK IPD TA. 2016)	Saluran = 467 m Bak Bagi = 2 unit	1.049.000.000	100	1.037.470.000
02	Peningkatan Lanjutan D.I. Bulumaoso Kecamatan Bawolato (DAK IPD TA. 2016)	Saluran = 288 m Bak Bagi = 2 unit	523.000.000	100	513.585.300
03	Peningkatan Lanjutan DI. Simanani Kecamatan Bawolato (DAK Afiriasi TA. 2016)	Saluran = 136 m Bak bagi = 1 Unit	315.000.000	100	308.604.500
04	Peningkatan Lanjutan DI. Zumuzu Kecamatan Bawolato (DAK IPD TA. 2016)	Saluran = 399 m Bak bagi = 1 unit	930.000.000	100	924.495.000
05	Peningkatan Lanjutan Sarana dan Prasarana DI. Moambolo Kecamatan Bawolato (Sisa DAK 2010-2014)	Saluran = 51,5 m	100.000.000	100	99.220.875
	KECAMATAN IDANOGAWO				
01	Peningkatan Lanjutan DI. Taimboli Kecamatan Idanogawo (DAK IPD TA. 2016)	Saluran = 275 m Bak Bagi = 1 unit	523.000.000	100	514.001.000
02	Rehabilitasi Lanjutan DI. Laowo Kecamatan Idanogawo (DAK Afiriasi TA. 2016)	Saluran = 381 m Tembok Penahan = 18 m	839.690.000	100	827.636.650
03	Rehabilitasi Lanjutan DI. Awoni Lauso Kecamatan Idanogawo (DAK Afiriasi TA. 2016)	Saluran = 261 m Bendungan = 1 unit	808.000.000	100	795.100.800
04	Peningkatan Lanjutan DI. Torifo Kecamatan Idanogawo (DAK IPD TA. 2016)	Saluran = 402 m Bak Bagi = 2 unit	930.000.000	100	919.146.000
05	Pembangunan Daerah Irigasi baru Dekha Desa Bobozoli Loloana'a Kecamatan Idanogawo (Sisa DAK TA. 2010-2014)	Saluran = 118,6 m	200.000.000	100	198.620.000
	KECAMATAN BOTOMUZOI				
01	Pembangunan Baru DI. Desa Banuasibohou Kecamatan Botomuzoi (DBH Pusat TA. 2016)	Saluran = 340,56 m	150.000.000	100	149.222.000
02	Rehabilitasi sarana dan Prasarana irigasi DI. Bozawa, Kecamatan Botomuzoi (Sisa DAK TA. 2010-2014)	Saluran = 28,4 m Tembok Penahan = 29,7 m	156.285.918	100	155.421.000
03	Rehabilitasi DI. Noho Kecamatan Botomuzoi (Sisa DAK 2015)	Saluran = 80 m	156.522.480	100	156.016.750
11	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong		7.531.600.000		7.430.835.479
	KECAMATAN SOGAE'ADU				
01	Perkuatan Tebing di sekitar Jembatan Balley Sungai Mua Desa Sisarahili Sogaeadu Kecamatan Sogae'adu (DAU TA. 2016)	Bronjong = 76 m	853.000.000	100	851.552.250
02	Lanjutan Pengendalian Banjir di Muara Sungai Sinizi, Sungai Afia, Sungai Idanomate dhi. Normalisasi sungai di Muara Sungai Sinizi, Sungai Afia, Sungai Idanomate Kecamatan Sogaeadu (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 740 m TPT = 21 m	250.000.000	100	248.667.600
03	Normalisasi Sungai Sinizi Kecamatan Sogaeadu (DAU TA. 2016)	Bronjong = 730 m	250.000.000	100	248.798.200
04	Pembangunan bronjong di Sungai Simandraolo Dusun II Desa Saitagaramba Kecamatan Sogaeadu (DAU TA. 2016)	Bronjong = 103 m	400.000.000	100	396.166.275

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<u>KECAMATAN BAWOLATO</u>				
01	Perkuatan Tebing Sungai Mola dhi. Di belakang SD Sisarahili Dusun II Desa Siofabanua, Kecamatan Bawolato (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 24 m	300.000.000	100	298.841.300
	<u>KECAMATAN IDANOGAWO</u>				
01	Perkuatan Tebing Sungai Siholi di belakang gedung SDN No. 077295 Baruzo Bobozoli Dusun I Desa Baruzo Kecamatan Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 120 m	500.000.000	100	492.306.300
02	Perkuatan Tebing Lanjutan di Sungai Sifa'ano Desa Hilimoasio Dua Kecamatan Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 17 m	300.000.000	100	299.081.600
03	Perkuatan tebing Sungai Na'ai dan di belakang Gedung SD Laowo Hilimbaruzo Desa Laowo Hilimbaruzo Kec. Idanogawo (DAU TA. 2016)	Bronjong = 45 m	300.000.000	100	298.765.900
04	Lanjutan Pembangunan Bronjong Sungai Idanogawo di Desa Ahedano menuju Desa Tetelesi, Kecamatan Idanogawo (DAU TA. 2016)	Bronjong = 36 m	500.000.000	100	498.851.200
05	Pembangunan Bronjong di Sungai Fauro Belakang Gereja Jemaat Hiliweto Iraono Hura Desa Tuhewaebu Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Bronjong = 42 m	200.000.000	100	199.370.875
06	Pembangunan Bronjong di Sungai Mo'awu Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Bronjong = 26 m	100.000.000	100	99.428.450
07	Pembangunan Bronjong Sungai Idano Nadu di Desa Saiwahili Dusun II Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Bronjong = 40 m	100.000.000	100	99.429.450
	<u>KECAMATAN BOTOMUZOI</u>				
01	Perkuatan tebing uruawan jembatan Muzoi di Desa Hiliwaele I Kecamatan Botomuzoi (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 26 m	400.000.000	100	398.198.375
	<u>KECAMATAN HILISERANGKAI</u>				
01	Perkuatan Tebing sungai Boloza Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai (DAU TA. 2016)	Bronjong = 30 m	500.000.000	100	498.041.500
	<u>KECAMATAN SOMOLO-MOLO</u>				
01	Perkuatan Tebing Sungai Mahau di Desa Somolo-molo Kecamatan Somolo molo (DBH Pusat)		400.000.000	100	397.692.275
	<u>KECAMATAN ULUGAWO</u>				
01	Perkuatan Tebing di Sungai Mezawa Desa Holi, Kecamatan Ulugawo (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 24 m	150.000.000	100	148.996.000
02	Pembangunan bronjong di Sungai Dahana dhi. Jalan menuju Kantor Camat Ulugawo, Kecamatan Ulugawo (DAU TA. 2016)	Bronjong = 25,1 m	150.000.000	100	148.999.000
03	Lanjutan Pembangunan Bronjong di Sungai Idanogawo dhi. Lapangan Orahu Desa Holi Kecamatan Ulugawo (DAU)	Bronjong = 50,6 m	200.000.000	100	198.835.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	KECAMATAN HILIDUHO				
01	Perkuatan Tebing Sungai Muzoi Desa Ombolata Sisarahili Kecamatan Hiliduho (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 51 m	350.000.000	100	347.095.700
02	Pembangunan lanjutan Bronjong di Sungai Sinoto Dusun I Desa Fadorolauru, Kecamatan Hiliduho (DBH Pusat TA. 2016)	Bronjong = 22 m	100.000.000	100	99.265.875
	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM				
01	Operasional Komisi Irigasi Kabupaten Nias		100.000.000	100	80.385.980
02	Pengadaan jasa konsultan Perencanaan Kegiatan Bronjong/ Talud/ Perkuatan Tebing		50.000.000	100	49.433.150
03	Pengadaan Jasa Konsultansi Pemetaan dan Inventarisasi Sungai di Kabupaten Nias	Dokumen pemetaan	450.000.000	1 Doku	446.456.000
04	Lanjutan Jasa Konsultansi Pemetaan dan Inventarisasi Daerah Irigasi di Kecamatan Sogae'adu dan Kecamatan Idanogawo	Dokumen pemetaan	300.000.000	1 Doku	296.400.250
05	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) di Wilayah Kabupaten Nias (swakelola)	Belanja pemeliharaan	192.600.000	100	191.101.824
06	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Bendung Nandrigi DI. Uluwi, Kecamatan Sogae'adu	Dokumen pemetaan	56.000.000	1 Doku	55.177.150
07	Biaya Perencanaan Kegiatan DAK dan DAU TA.2017 Bidang Sumber Daya Air	Biaya operasional/survey dan perencanaan DAK+DAU TA.2017	80.000.000	100	43.525.000
	BIDANG CIPTA KARYA		17.379.082.580		16.031.767.302
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		7.370.975.000		7.298.455.000
	KECAMATAN BOTOMUZOI				
01	Pembangunan Parit Beton Desa Talafu dimulai dari Gereja Katolik St.Yohanes Talafu Desa Talafu Bot Menuju perbatasan Kec. Alasa (DAU TA. 2016)	Drainase = 124,00 m	150.000.000	100	148.935.000
02	Pembangunan tembok penahan/drainase di Kompleks SMK Negeri 2 Botomuzoi di Desa Ononamolo Talafu Kec. Botomuzoi	Drainase = 64,00 m Tembok Penahan = 78,20 m	700.000.000	100	683.645.000
03	Pembangunan tembok penahan/bronjong dan parit beton di SMKN 1 Botomuzoi	Parit Beton = 115,00 m Tembok Penahan = 31,79 m	500.000.000	100	491.245.000
04	Lanjutan pembangunan drainase di SMPN 1 Botomuzoi (SILPA TA. 2015)	Drainase = 62,50 m	200.000.000	100	199.210.000
	KECAMATAN GIDO				
01	Pembangunan Drainase Jalan Produksi Menuju Sungai Daulo Desa Uumbu Kec. Gido (DAU TA. 2016)	Drainase = 57,00 m	150.000.000	100	148.535.000
02	Pembangunan Drainase Desa Lasara Idanoi (Delimao) Kec. Gido (DAU TA. 2016)	Drainase = 45,50 m	125.000.000	100	123.410.000
03	Pembangunan tembok penahan di Jalan Ruas Lolozasai - Bakarua Kec. Gido		600.000.000	100	586.605.000
04	Pembangunan drainase Teteakho Desa So'ewe Kecamatan Gido	Drainase = 72,50 m	200.000.000	100	198.910.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
05	Pembangunan parit beton/tembok penahan di Jalan Togi Mbogi Dusun I Desa Sirete Kecamatan Gido	Drainase = 309,00 m	200.000.000	100	198.835.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
06	Pembangunan lanjutan parit beton di Jalan eks. Padat Karya di Dusun I Desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido (SILPA TA. 2015)	Drainase = 167,00 m	200.000.000	100	199.585.000
07	Pembangunan drainase pada pemukiman warga Desa Lolozasai Kecamatan Gido (SILPA TA. 2015)	Drainase = 101,00 m	100.000.000	100	99.695.000
08	Pembangunan lanjutan parit beton di Teteakho Desa Soewe Kecamatan Gido (SILPA TA. 2015)	Drainase = 82,00 m	150.000.000	100	149.585.000
	<u>KECAMATAN HILISERANGKAI</u>				
01	Pembangunan parit beton di jalan baru Menuju sungai Ladu Desa Hilizia Luru Kecamatan Hiliserangkai	Drainase = 131,50 m	200.000.000	100	198.910.000
	<u>KECAMATAN MA'U</u>				
01	Pembangunan Parit Beton dan tembok penahan di ruas Dusun I Desa Atualuo Kecamatan Ma'u	Drainase = 44,00 m	150.000.000	100	148.660.000
02	Pembangunan Tembok Penahan di depan gereja BNKP Tuhemberua Dusun I Desa Tuhemberua Kecamatan Ma'u (DAU TA. 2016)	Tembok Penahan = 68,50 m	200.000.000	100	198.910.000
03	Pembangunan tembok penahan di Dusun I Desa Tuhemberua Kecamatan Mau dhi. pada perbatasan Desa Atualuo (Tugu PNPB Mandiri) Kecamatan Ma'u (SILPA TA. 2015)	Tembok Penahan = 58 m	200.000.000	100	199.685.000
04	Pembangunan tembok penahan di belakang gereja Katolik St. Veronika Hilimbaruzo II Desa Tuhemberua Kecamatan Ma'u	Tembok Penahan = 23 m	100.000.000	100	99.695.000
	<u>KECAMATAN ULUGAWO</u>				
01	Pembangunan parit beton dari Desa Holi Menuju Kantor Camat Kecamatan Ulugawo	Drainase = 156 m	200.000.000	100	198.785.000
02	Pembangunan tembok penahan di Desa Fatodano dhi. Gereja BNKP Fahandrona Kecamatan Ulugawo (DAU TA. 2016)	Tembok Penahan = 27,20 m	200.000.000	100	198.785.000
03	Pembangunan Tembok Penahan / Parit Beton di Ruas Jalan Holi menuju Fahandrona Kecamatan Ulugawo lokasi Dusun I Desa Fatodano Kecamatan Ulugawo (SILPA TA. 2015)	Tembok Penahan = 16 m	200.000.000	100	199.410.000
	<u>KECAMATAN BAWOLATO</u>				
01	Pembangunan parit beton di lokasi Dusun III Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato	Drainase = 83,50 m	100.000.000	100	98.720.000
02	Pembangunan tembok penahan jalan Amakhaita dari SMK Menuju SMA dan Kantor Camat di Dusun IV Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAU TA. 2016)	Tembok Penahan = 67,00 m	100.000.000	100	98.795.000
03	Pembangunan parit beton di sekeliling Polsek Bawolato Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DBH Pusat TA. 2016)	Drainase = 92,00 m	100.000.000	100	98.695.000
04	Pembangunan tembok penahan di Dusun I dan Dusun II Desa Orahili Kecamatan Bawolato (DBH Pusat TA. 2016)	Tembok Penahan = 43,50 m	100.000.000	100	98.095.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<u>KECAMATAN SOGAEADU</u>				
01	Pembangunan parit beton disamping Gereja BNKP Jemaat Hilibadalu Dusun III Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu (DAU TA. 2016)	Tembok Penahan = 36,00 m	-	-	3.875.000
02	Pembangunan tembok penahan disamping Gereja BNKP Hilibadalu Dusun III Desa Hilibadalu Kecamatan Sogaeadu (DAU TA. 2016)	Tembok Penahan = 36,00 m	150.000.000	100	147.785.000
03	Pembangunan parit beton di jalan Tuhedauli Desa Sisarahili Kecamatan Sogaeadu (SILPA TA. 2015)	Drainase = 70,00 m	100.000.000	100	99.420.000
	<u>KECAMATAN HILIDUHO</u>				
01	Pembangunan parit beton di Desa Ombolata Sisarahili Kecamatan Hiliduho (DAU TA.2016)	Drainase = 127,50 m	150.000.000	100	147.985.000
02	Pembangunan tembok penahan/ parit beton di lingkungan Gereja Katolik ST. Agustinus Hilihambawa Dusun II Desa Hiligodu Tanose'o, Kecamatan Hiliduho (DBH Pusat TA. 2016)	Tembok Penahan = 52,00 m	145.975.000	100	145.575.000
03	Pembangunan bronjong/tembok penahan di ruas jalan desa Dima menuju Sinarikhi Kecamatan Hiliduho (SILPA TA. 2015)	Tembok Penahan = 88,00 m	200.000.000	100	199.485.000
	<u>KECAMATAN IDANOGAWO</u>				
01	Pembangunan parit beton di Dusun IV Desa Otalua Kecamatan Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Drainase = 126 m	150.000.000	100	148.885.000
02	Pembangunan parit beton di Dusun I Menuju Dusun II Desa Mondrali Kec.Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Drainase = 150,00 m	150.000.000	100	148.585.000
03	Pembangunan Parit beton dari perbatasan Desa Baruzo Menuju perbatasan Laowo Desa Bobozoli Loloana'a Kec.Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Drainase = 98,00 m	150.000.000	100	148.985.000
04	Pembangunan tembok penahan di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Tembok Penahan = 53,00 m	100.000.000	100	98.720.000
05	Pembangunan parit beton dari Dusun I Menuju Dusun II Desa Laowo Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Drainase = 160,00 m	150.000.000	100	147.935.000
06	Pembangunan Tembok Penahan di Dusun II Desa Laowohilimbaruzo Kecamatan Idanogawo (DAU TA. 2016)	Tembok Penahan = 86,00 m	200.000.000	100	199.085.000
07	Pembangunan drainase di pemukiman penduduk Desa Otalua Kecamatan Idanogawo (SILPA)	Drainase = 600 m	200.000.000	100	199.285.000
08	Pembangunan tembok penahan depan gedung Serbaguna Desa Laowo Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Drainase = 28 m	100.000.000	100	99.395.000
09	Pembangunan tembok penahan tanah di Desa Tuhewaebu menuju Hiligafoa Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Tembok Penahan = 35 m	100.000.000	100	99.395.000
10	Pembangunan Tembok Penahan di Jalan Bozihona dhi. antara Desa Tetehosi dan Desa Otalua Kecamatan Idanogawo (SILPA TA. 2015)	Tembok Penahan = 61 m	100.000.000	100	99.420.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	KECAMATAN SOMOLO-MOLO				
	01 Pembangunan Tembok Penahan disamping Gereja Katolik Desa Soewali Kecamatan Somolo-Molo (SILPA TA. 2015)	Tembok Penahan = 16,00 m	100.000.000	100	99.300.000
13	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		10.008.107.580		8.733.312.302
	KECAMATAN BOTOMUZOI				
	01 Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Desa Talafu Bot. Kecamatan Botomuzoi (DAK IPD TA. 2016)	Sambungan Rumah = 38 SR Resevoir = 19 unit	668.500.000	100	615.328.880
	02 Pembangunan jalan setapak Menuju SMP Negeri 3 di Desa Balohili Bot Kec. Botomuzoi (DAU TA. 2016)	Jalan Setapak = 88,50 m Tembok Penahan = 34,50 m	150.000.000	100	147.860.000
	03 Pembangunan jalan setapak Menuju Dusun I/II Desa Hiligodu Kec. Botomuzoi (DBH Pusat TA. 2016)	Jalan Setapak = 107,00 m	100.000.000	100	98.680.000
	KECAMATAN GIDO				
	01 Pembangunan sarana air bersih di Desa So'ewe Kecamatan Gido (DAK IPD TA. 2016)	Sambungan Rumah = 95 SR Reservoir = 1 unit Bronkep = 1 unit	825.000.000	100	745.697.239
	02 Pembangunan sarana air bersih di Desa Somi Botogo'o Kec. Gido		100.000.000	100	98.380.000
	KECAMATAN HILISERANGKAI				
	01 Pembangunan jalan setapak dari jalan Provinsi Menuju Gereja GPT dan GPDI di Dusun I Lolofaoso Lalai Kecamatan	Jalan Setapak = 31,40 m Tembok Penahan = 34,50 m	150.000.000	100	148.985.000
	02 Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai (DAK IPD TA. 2016)	Sambungan Rumah = 62 SR Reservoir = 1 unit Bronkep = 2 unit	825.000.000	100	763.679.750
	03 Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Desa Awela Dusun II Kecamatan Hiliserangkai (DAK IPD TA. 2016)	Sambungan Rumah = 60 SR Reservoir = 1 unit Bronkep = 1 unit	723.000.000	100	705.915.000
	KECAMATAN MA'U				
	01 Pembangunan Jalan Setapak Mulai depan gereja Katolik Dusun II Desa Tuhemberua Menuju Ahedano Desa Lasara Siwalubanua (DAU TA.2016)	Jalan Setapak = 240,00 m	200.000.000	100	198.360.000
	KECAMATAN BAWOLATO				
	01 Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato (DAK IPD TA. 2016)	Sambungan Rumah = 120 SR Reservoir = 1 unit Bronkep = 1 unit	1.154.270.000	100	1.048.565.000
	02 Pembangunan jalan setapak Menuju lokasi Pustu Botohaenga Kecamatan Bawolato (DBH Pusat TA. 2016)	Jalan Setapak = 149,00 m	150.000.000	100	148.085.000
	KECAMATAN SOGAEADU				
	01 Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Desa Tulumbaho Kec. Sogaeadu (DAK Rp. 800.000.000,- + DAU Rp. 25.000.000,- TA. 2016)	Sambungan Rumah = 85 SR Reservoir = 1 unit Bronkep = 1 unit	825.000.000	100	750.456.815

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Desa Sihare'o Sogaeadu Kecamatan Sogaeadu (Sisa DAK TA.2015)	Sambungan Rumah = 8 SR	170.328.580	100	169.610.000
03	Pembangunan sarana air bersih di mata air Nandrigi di RT. III Dusun I Desa Saitagaramba Kecamatan Sogaeadu	Reservoir = 1 unit Bronkep = 1 unit	50.000.000	100	49.325.000
	<u>KECAMATAN SOMOLO-MOLO</u>				
01	Pembangunan lanjutan jalan setapak dari Dusun III Somolomolo Menuju Dusun II Desa Huno Kecamatan Somolo-molo	Jalan Setapak = 569, 50 m	500.000.000	100	472.395.000
	<u>KECAMATAN HILIDUHO</u>				
01	Pembangunan Jalan setapak di SDN Hiligodu, Kecamatan Hiliduho		4.025.000	100	4.025.000
02	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Desa Ombolata Saloo Kec. Hiliduho (DAK Rp. 704.290.000,-+ DAU Rp.23.000.000,-)	Sambungan Rumah = 70 SR Reservoir = 1 unit Bronkep = 1 unit	725.500.000	100	491.104.000
03	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Dusun I Desa Silima banua Kecamatan Hiliduho (DAK IPD TA. 2016)	Sambungan Rumah = 45 SR Reservoir = 2 unit Bronkep = 1 unit	1.028.500.000	100	944.040.000
	<u>KECAMATAN IDANOGAWO</u>				
01	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan di Dusun I Loloana'a Desa Bobozili Loloana'a Kecamatan Idanogawo (DAK Rp. 1.048.250.000,-+ DAU Rp. 27.000.000,-)	Sambungan Rumah = 120 SR Reservoir = 1 unit Bronkep = 2 unit	1.075.000.000	100	595.216.618
02	Pembangunan Lanjutan rabat beton di Dusun I Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo (DAU TA. 2016)	Jalan Setapak = 172,00 m Parit Beton = 30,00 m	150.000.000	100	148.185.000
03	Pembangunan Jalan Setapak di rumah KAT RT I, RT II Dusun I Desa Tuhewaebe Kecamatan Idanogawo (DBH Pusat TA. 2016)	Jalan Setapak = 219,00 m	150.000.000	100	147.510.000
	<u>SKPD DINAS PU</u>				
01	Penyusunan Rencana Induk Strategis Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Nias (DAU TA.2015)	Kewajiban kepada pihak ketiga 2015	203.984.000	1 Doku	203.984.000
02	Biaya Perencanaan Kegiatan DAK dan DAU TA.2017 Bidang Cipta Karya	Data perencanaan kegiatan DAK & DAU TA. 2017	80.000.000	100	37.925.000
	BIDANG PERALATAN		6.123.400.000		5.759.252.595
14	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan		6.123.400.000		5.759.252.595
1.	Rehabilitasi Berat AMP	Belanja pemeliharaan AMP 1 unit	500.000.000	100	496.360.200
2.	Operasional Workshop dan Alat Berat	Belanja ATK, honorarium pengelola kegiatan	778.400.000	100	638.475.766
3.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Belanja pemeliharaan suku cadang alat berat sebanyak 31 unit	800.000.000	100	750.883.229
4.	Pembangunan Dorsmeer	1 Unit	25.000.000	100	24.948.000
5.	Pengadaan Alat Berat		-		-
-	Pengadaan alat berat Finisher	1 Unit	2.720.000.000	100	2.663.650.000
-	Pengadaan alat berat Vibratory Roller	1 Unit	1.200.000.000	100	1.086.800.000
6.	Pengadaan kelengkapan alat-alat laboratorium	6 paket	50.000.000	100	49.390.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	7. Belanja alat-alat keselamatan kerja (Kotak P3K, Racun Api, Safety Shoes, Helm Kerja, Masker, Sarung Tangan).	1 Paket	50.000.000	100	48.745.400
		JUMLAH	174.727.441.987		151.816.976.409

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-13
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Perumahan dan Penataan Ruang
pada SKPD Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.061.250.000		942.780.505
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Biaya Jasa Surat Menyurat al : pengadaan materai, perangko dan benda pos lainnya selama 12 bulan	5.000.000	100	4.977.000
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Jasa Layanan Internet selama 12 bulan	102.000.000	100	33.049.932
	03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dhi. STNK roda empat sebanyak 2 unit dan roda dua sebanyak 20 unit	9.600.000	100	9.566.863
	04 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor al : sapu lantai, gayung air, pembersih lantai, pengharum kamar mandi, pembersih kloset, cairan pencuci tangan dettol, tisu kotak paseo, sapu lidi, dan lain-lain selama 12 bulan	5.000.000	100	5.000.000
	05 Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	37.500.000	100	37.499.000
	06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	14.900.000	100	14.898.900
	07 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengadaan bahan bacaan berupa surat kabar selama 12 bulan	6.000.000	100	6.000.000
	08 Penyediaan makanan dan minuman	Pengadaan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan	48.750.000	100	48.702.000
	09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	310.000.000	100	307.736.810
	10 Monitoring/Survei/Pengawasan/Evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyediaan biaya monitoring/survei/ pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	120.000.000	100	115.150.000
	11 Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya honor Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Operator SIPKD, Pegawai Tidak Tetap dan pengadaan alat tulis kantor selama 12 bulan	402.500.000	100	360.200.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		496.100.000		422.514.456
	01 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor : Laptop, Printer, Lemari Arsip, Meja Kerja, Kursi Kerja, Infocus, Hardisk Eksternal, Global Positioning System (GPS), Kompas, Handycam, Kamera Digital, Hammer Test, Kalkulator, UPS, AC, Brankas dan Finger Print	213.100.000	100	184.380.000
	02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dhi. perluasan tempat parkir kendaraan Dinas TRPK Kabupaten Nias	75.000.000	100	39.004.000
	03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat sebanyak 2 unit	66.000.000	100	65.947.306
	04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor al : service AC, perbaikan mesin listrik genset, service printer dll	82.000.000	100	81.686.000
	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya kendaraan dinas sebanyak 2 unit	60.000.000	100	51.497.150

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		98.000.000		39.950.000
	01 Mengikuti Kegiatan Diklat Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di luar daerah	Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi sebanyak 9 orang	98.000.000	100	39.950.000
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000		33.000.000
	01 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Adanya Rencana Kerja SKPD sebanyak 1 dokumen	5.000.000	100	5.000.000
	02 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Adanya Laporan Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen	3.500.000	100	3.500.000
	03 Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Adanya Rencana Strategi (Renstra) SKPD sebanyak 1 dokumen	15.000.000	100	15.000.000
	04 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Adanya Laporan Tahunan SKPD sebanyak 1 dokumen	6.000.000	100	6.000.000
	05 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Adanya LPPD dan LKPJ SKPD sebanyak 2 dokumen	3.500.000	100	3.500.000
05.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.975.500
	01 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	14.975.500
	URUSAN PERUMAHAN				
06.	Program Lingkungan Sehat Perumahan		6.994.970.500		5.120.105.900
	01 Pembangunan Prasarana Sanitasi				
	- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Sogae'adu dhi. Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Desa Wea-wea	Jumlah MCK Kombinasi + IPAL Komunal yang dibangun di Desa Wea-wea sebanyak 0 unit	264.777.000	0	-
	- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Gido dhi. Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Desa Lasara Idanoi	Jumlah MCK Kombinasi + IPAL Komunal yang dibangun di Desa Lasara Idanoi sebanyak 0 unit	275.000.000	0	-
	- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Idanogawo dhi. Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal di Desa Oladano	Jumlah MCK Kombinasi + IPAL Komunal yang dibangun di Desa Oladano sebanyak 0 unit	275.000.000	0	-
	- Biaya Penunjang DAK Reguler Sub Bidang Sanitasi	Tersedianya Biaya Penunjang DAK Reguler Sub Bidang Sanitasi	42.883.000	0	4.950.000
	- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Bawolato (SISA DAK TAMBAHAN 2015 Rp. 155.770.500)	Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pembayaran kewajiban kelompok masyarakat yang belum diselesaikan)	155.770.500	70	155.770.500
	- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Botomuzoi dhi. Pembangunan MCK + di Desa Balohili Botomuzoi	Jumlah MCK Kombinasi + yang dibangun di Desa Balohili Botomuzoi sebanyak 2 unit	300.000.000	87,81	300.000.000
	- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Hiliduho dhi. Pembangunan MCK + di Desa Ombolata Salo'o	Jumlah MCK Kombinasi + yang dibangun di Desa Ombolata Salo'o sebanyak 2 unit	300.000.000	70,20	300.000.000
	- Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Hiliserangkai dhi. Pembangunan MCK + di Desa Dahadano Botombawo	Jumlah MCK Kombinasi + yang dibangun di Desa Dahadano Botombawo sebanyak 2 unit	289.713.000	61	202.799.100
	- Biaya Penunjang DAK Afiriasi Sub Bidang Sanitasi	Tersedianya Biaya Penunjang DAK Afiriasi Sub Bidang Sanitasi dan terlaksananya kegiatan DAK Afiriasi Sub Bidang Sanitasi	46.827.000	100	46.370.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja GNKPI di Desa Sisarahili Ma'u Kecamatan Ma'u	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Sisarahili Ma'u Kecamatan Ma'u sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.200.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Hiligodu Tanose'o Kecamatan Hiliduho	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Hiligodu Tanose'o Kecamatan Hiliduho sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.000.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Mesjid di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.400.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja AMIN di Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.500.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Mesjid di Desa Hiliweto Kecamatan Gido	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Hiliweto Kecamatan Gido sebanyak 1 unit	100.000.000	100	98.200.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Holi Kecamatan Ulugawo	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Holi Kecamatan Ulugawo sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.300.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.400.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Sisarahili Bawolato Kecamatan Bawolato	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Sisarahili Bawolato Kecamatan Bawolato sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.500.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Lasara Siwalubanua Kecamatan Ma'u	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Lasara Siwalubanua Kecamatan Ma'u sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.200.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja GPD di Desa Hilizia Lauru Kecamatan Hiliserangkai	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Hilizia Lauru Kecamatan Hiliserangkai sebanyak 1 unit	125.000.000	100	123.300.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja AFY di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo sebanyak 1 unit	150.000.000	100	146.200.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Sirete Kecamatan Gido	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Sirete Kecamatan Gido sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.500.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Somolo- molo Kecamatan Somolo-molo	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Somolo- molo Kecamatan Somolo-molo sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.200.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP di Desa Balohili Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Balohili Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.300.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja BNKP Jemaat Hilimaigila Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai sebanyak 1 unit	100.000.000	100	98.400.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Gereja Sungai Yordan di Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo sebanyak 1 unit	150.000.000	100	148.500.000
	- Pembangunan Prasarana Sanitasi dhi. Pembangunan Toilet Umum di Lingkungan Mesjid di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato	Jumlah Toilet Umum yang dibangun di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato sebanyak 1 unit	100.000.000	100	98.600.000
	- Biaya Penunjang DAK IPD Sub Bidang Sanitasi	Tersedianya Biaya Penunjang DAK IPD Sub Bidang Sanitasi dan terlaksananya kegiatan DAK IPD Sub Bidang Sanitasi	125.000.000	100	105.151.400
	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Laowohilimbaruzo Kecamatan Idanogawo	Tercapainya rumah layak huni di Desa Laowohilimbaruzo Kecamatan Idanogawo sebanyak 50 unit	500.000.000	30	250.000.000
	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sandruta Kecamatan Idanogawo	Tercapainya rumah layak huni di Desa Sandruta Kecamatan Idanogawo sebanyak 38 unit	380.000.000	30	190.000.000
	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo	Tercapainya rumah layak huni di Desa Biouti Timur Kecamatan Idanogawo sebanyak 31 unit	380.000.000	30	155.000.000
	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Otalua Kecamatan Idanogawo	Tercapainya rumah layak huni di Desa Otalua Kecamatan Idanogawo sebanyak 26 unit	260.000.000	30	260.000.000
	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dhi. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Hiligogowaya Maliwa'a Kecamatan Idanogawo	Tercapainya rumah layak huni di Desa Hiligogowaya Maliwa'a Kecamatan Idanogawo sebanyak 38 unit	380.000.000	30	190.000.000
	- Biaya Penunjang DAK IPD Sub Bidang Perumahan	Tersedianya Biaya Penunjang DAK IPD Sub Bidang Perumahan dan terlaksananya kegiatan DAK IPD Sub Bidang Perumahan	100.000.000	100	84.176.000
	- Biaya Operasional Tim Penyusun Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan BSPS di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016	Tersedianya Biaya Operasional Tim Penyusun Peraturan Bupati	25.000.000	100	19.631.600
02	Pembangunan drainase/parit beton				
	- Lanjutan pembangunan parit beton + tembok penahan di jalan Mbombonakhe Desa Tetelesi Kec. Idanogawo	Parit Beton dan Tembok Penahan yang dibangun sepanjang 105 m	200.000.000	100	198.100.000
	- Pembangunan Parit Beton di Jalan Mbombonakhe Dusun I Desa Tetelesi Kecamatan Idanogawo	Parit Beton yang dibangun sepanjang 49,8 m	120.000.000	100	116.988.500
	- Pembangunan Parit Beton antara SMKN 1 Hiliserangkai dan Gedung Gereja GPI Desa Hilizia Luru Kecamatan Hiliserangkai	Parit Beton yang dibangun sepanjang 82,09 m	200.000.000	100	196.468.800
07.	Program Pengembangan Perumahan		300.000.000		239.408.000
	01 Biaya Umum Kegiatan Fisik DAK Tahun Anggaran 2016	Tersedianya biaya umum dan terlaksananya kegiatan fisik DAK tahun anggaran 2016	300.000.000	100	239.408.000
08.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah		35.157.004.722		10.158.273.458
	01 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Lanjutan Gedung Kantor:				
	- Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Nias (Tahap 2)	-	12.231.600.000	0	13.430.678

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	- Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Tahap 2)	-	8.191.200.000	0	19.847.900
	- Pembangunan Kantor SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias (DAK Rp 3.077.290.000 + DAU Rp 84.900.000)	Adanya gedung kantor SKPD yang dibangun sebanyak 1 unit	3.162.190.000	96,3	2.540.974.850
	- Relokasi Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ma'u	Adanya Kantor Kecamatan Ma'u sebanyak 1 unit	2.068.100.000	92	1.565.441.358
	- Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD Kabupaten Nias (Tahap III)	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Nias (Tahap III)	956.200.000	100	897.401.700
	- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ulugawo	Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ulugawo sebanyak 1 unit	150.000.000	100	147.308.300
	- Pembangunan Kantor Bupati Nias	-	3.211.311.000	0	-
02	Pembangunan tembok penahan di Kawasan Perkantoran Pemerintah kabupaten Nias di Desa Hilizoi Kecamatan Gido	Panjang tembok penahan yang dibangun sepanjang 77,2 m	1.054.000.000	100	1.047.328.350
03	Pembangunan Tembok Penahan di SMKN 1 Hiliserangkai	Panjang tembok penahan yang dibangun sepanjang 13,2 m	100.000.000	100	97.481.500
04	Pembangunan Lapangan Upacara/ Pembersihan Halaman Gedung				
	- Pembangunan Lapangan Upacara dan Parit Beton di Kantor Kecamatan Somolo-molo	Pembangunan Lapangan Upacara dhi. parit beton sepanjang 42,4 m dan paving block seluas 741 m ²	425.800.000	85	325.725.900
	- Penataan Lapangan Upacara Kantor Kecamatan Hiliserangkai	Penataan Lapangan Upacara dhi. tembok penahan sepanjang 76,4 m dan paving block seluas 449,87 m ²	581.515.000	100	577.110.000
	- Penataan Lapangan Upacara Kantor Kecamatan Hiliduho	Penataan Lapangan Upacara dhi. paving block seluas 1300 m ²	425.800.000	100	419.336.300
	- Penataan Lapangan Kantor Kecamatan Sogaeadu	Penataan Lapangan Kantor dhi. tembok penahan sepanjang 88,7 m	581.515.000	100	529.816.100
	- Pembersihan Lapangan Sepak Bola di Desa Tetelesi Ibukota Kecamatan Idanogawo	Pembersihan Lapangan Sepak Bola dhi. tembok penahan sepanjang 197 m	500.000.000	100	489.414.600
05	Fasilitasi Kegiatan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Nias dan Gedung Kantor DPRD Kab. Nias	Terlaksananya kegiatan tim teknis pelaksanaan pembangunan gedung/kantor Bupati Nias dan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Nias TA. 2016	69.200.000	100	65.704.900
06	Pemeliharaan Gedung Kantor/ Rumah Dinas				
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Bupati Nias	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas sebanyak 1 unit	206.875.000	100	203.142.700
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Nias	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas sebanyak 1 unit	196.875.000	100	190.394.700
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit	201.875.000	100	198.453.300
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit	191.875.000	100	188.482.700
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit	206.875.000	100	203.201.500
07	Penataan Halaman Gedung Kantor				
	- Penataan Halaman Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias di Desa Hiliweto Kecamatan Gido	Tertatanya halaman gedung kantor sebanyak 1 unit	196.875.000	100	193.562.900
08	Pematangan Lahan				
	- Pematangan Lahan Relokasi Kantor Camat Mau	Pematangan lahan (Pembayaran yang belum diselesaikan)	127.323.722	100	127.323.722

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	09. Pembangunan Rabat Beton				
	- Pembangunan Rabat Beton dan Penataan Halaman di Kompleks Kantor Kantibmas Kecamatan Somolo molo	Terbangunnya rabat beton sepanjang 17 m dan tembok penahan sepanjang 14,7 m	120.000.000	100	117.389.500
09.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		90.000.000		22.273.000
	01. Monitoring Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya monitoring dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan hasil dikeluarkannya rekomendasi IMB	90.000.000	100	22.273.000
10.	Program Perencanaan Tata Ruang		850.000.000		778.789.000
	01. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Kecamatan Gido sebagai calon Ibukota Kabupaten Nias (Tahap I)	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan sebanyak 1 dokumen	700.000.000	100	684.176.100
	02. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Kabupaten Nias	Tersempurnakannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Bangunan Gedung sebanyak 1 dokumen	50.000.000	100	45.095.000
	03. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Nias	Tersempurnakannya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota sebanyak 1 dokumen	100.000.000	100	49.517.900
11.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		2.603.750.000		2.147.994.200
	01. Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Nias	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Nias dhi. kegiatan pengambilan sampah selama 12 bulan	1.400.000.000	71,47	1.000.551.100
	02. Pengadaan Tong Sampah Kebutuhan di Wilayah Kabupaten Nias	Adanya Tong Sampah sebanyak 2.050 unit	1.113.750.000	100	1.059.093.300
	03. Lanjutan Pembuatan Gudang Peralatan dan Suku Cadang Kegiatan Persampahan	Adanya gudang peralatan dan suku cadang kegiatan persampahan, 1 unit	90.000.000	100	88.349.800
		JUMLAH	47.699.075.222		19.920.064.019

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-18
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		611.000.000		506.663.507
	01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya rekening telpon, air, listrik, faximile dan internet selama 12 bulan	40.000.000	100	28.440.116
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yg mendapat pengurusan izin Kendaraan (roda empat sebanyak 3 Unit dan roda dua sebanyak 17 Unit)	15.000.000	100	5.698.490
	03 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan	25.000.000	100	24.950.000
	04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	10.000.000	100	9.325.400
	05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya selama 12 bulan	10.000.000	100	9.958.000
	06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan	17.000.000	100	14.950.000
	07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan	4.000.000	100	2.650.000
	08 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum selama 12 bulan	35.000.000	100	30.511.500
	09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah serta perjalanan Dinas Luar Daerah lainnya selama 12 bulan	275.000.000	100	216.685.001
	10 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya biaya Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta perjalanan Dinas Dalam Daerah lainnya selama 12 bulan	75.000.000	100	64.895.000
	11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya Honor Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator komputer SIPKD, Penyimpan dan Pengurus Barang, Panitia Penerima serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selama 12 bulan	105.000.000	100	98.600.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		449.500.000		339.853.000
	01 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya peralatan kerja	285.000.000	90	191.963.000,00
		-Laptop			
		-Meja Biro			
		-Meja 1/2 Biro			
		-Printer			
		-Lemari Rak			
		-Brankas			
		-Gorden dll			
	02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas (roda-4) sebanyak 3 unit	99.500.000	100	99.500.000
	03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Tersedianya biaya Pemeliharaan gedung kantor	25.000.000	100	8.460.000
	04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya biaya Perbaikan peralatan kerja seperti Komputer, Laptop dan Printer, Mesin Tik	20.000.000	100	19.950.000
	05 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Mesin generator yang dipelihara dan dioperasikan 1 unit	20.000.000	100	19.980.000
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		80.000.000		32.000.000
	01 Mengikuti diklat/bimtek/workshop/kursus/ sosialisasi di luar daerah	Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ workshop/ kursus/ sosialisasi di luar daerah sebanyak 8 orang	80.000.000	100	32.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
04	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		31.500.000		29.825.000
	01 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen	5.000.000	100	4.787.500
	02 Penyusunan RENSTRA	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016 - 2021 sebanyak 1 dokumen	15.000.000	100	14.100.000
	03 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja (LK) SKPD Tahun 2015 seban	3.500.000	100	3.300.000
	04 Penyusunan Laporan Tahunan	Dokumen Laporan Tahunan 2015 sebanyak 1 dokumen	5.000.000	100	4.787.500
	05 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2015 sebanyak 2 dokumen	3.000.000	100	2.850.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		15.000.000
	01 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya keikutsertaan Bappeda pada Pameran Pembangunan Tahun 2016	15.000.000	100	15.000.000
	URUSAN PERENCANAAN				
06	Program Perencanaan Tata Ruang		180.000.000		47.610.200
	01 Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Terselenggaranya Koordinasi penataan ruang daerah	55.000.000	100	47.610.200
	02 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034	Disosialisasikannya Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034	125.000.000	-	-
07	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1.470.000.000		1.090.258.479
	01 Pelaksanaan Musrenbang Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten Nias Tahun 2016	360.000.000	100	263.153.900
	02 Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1 Dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017	50.000.000	100	47.479.250
	03 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias	Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016	75.000.000	100	60.491.350
	04 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Bupati Nias	1 Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Nias Tahun 2015	100.000.000	100	96.813.500
	05 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Nias Periode 2011-2016	1 Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban AMJ Bupati Nias Periode 2011-2016	70.000.000	100	55.472.100
	06 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Nias Tahun 2016 - 2021	1 Dokumen RPJMD Kab. Nias Tahun 2016 -2021	350.000.000	100	295.602.029
	07 Penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nias	1 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS P-APBD Kabupaten Nias Tahun 2016	60.000.000	100	56.716.750
	08 Penyusunan KUA PPAS APBD Kabupaten Nias	1 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS APBD Kabupaten Nias Tahun 2017	70.000.000	100	68.771.500
	09 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Nias	Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Tugas Pembantuan	40.000.000	100	33.023.700
	10 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber dana DAK	85.000.000	100	78.331.900
	11 Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	60.000.000	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	12 Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Nias	Tersedianya Dokumen SIPD	40.000.000	-	0
	13 Penggandaan Perda Tentang RPJPD Kabupaten Nias Tahun 2005 - 2025	Penggandaan Perda RPJPD Kabupaten Nias	35.000.000	100	34.402.500
	14 Fasilitas dan Pendampingan Implementasi SIPKD Modul Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya instalasi dan pendampingan implementasi SIPKD Modul Perencanaan	75.000.000	-	0
08	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		225.000.000		117.137.500
	01 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nias	Analisis data/indikator bidang Kesejahteraan Rakyat	50.000.000	100	32.023.000
	02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nias	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	85.000.000	-	0
	03 Pemetaan Sarana Prasarana Kesehatan	Tersusunnya database prasarana kesehatan berikut dengan peta kesehatan di Kabupaten Nias	90.000.000	100	85.114.500
09	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya		70.000.000		64.107.800
	01 Operasional Pokja Sanitasi Kabupaten Nias Tahun 2016	Terpenuhinya biaya Koordinasi Pelaksanaan Sanitasi Kabupaten Nias	70.000.000	100	64.107.800
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		50.000.000		31.083.450
	01 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Nias	Tersedianya Data/Indikator Bidang Ekonomi	50.000.000	100	31.083.450
		JUMLAH	3.182.000.000		2.273.538.936

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-20
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		432.040.000		408.518.771
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya untuk kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan	2.500.000	100	2.216.500
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan	20.000.000	100	5.743.560
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi kendaraan dinas roda dua (pengurusan STNK) sebanyak 7 unit, roda empat sebanyak 3 unit	5.100.000	100	2.670.000
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor untuk kelancaran tugas selama 12 bulan	14.500.000	100	14.499.920
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biaya penggandaan surat-surat dinas, formulir/ blanko tilang dan lain-lain selama 12 bulan	5.000.000	100	2.798.600
	06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biaya penggantian komponen listrik/penerangan kantor selama 12 bulan	4.500.000	100	4.498.573
	07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tagihan rekening Surat kabar (koran) dan buku peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	2.500.000	100	2.400.000
	08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan Kantor selama 12 bulan	600.000	0	0
	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Biaya perbaikan dan pengadaan peralatan kerja dhi. Komputer, laptop, printer, mesin tik dan lain-lain selama 12 bulan	7.500.000	100	6.799.318
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, minuman harian staf dan minuman tamu selama 12 bulan	8.500.000	100	8.382.000
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	170.000.000	100	169.850.300
	12 Monitoring /Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan pembinaan/pengawasan/evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	50.000.000	100	49.800.000
	13 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara, SIPKD, PPTK/PPK, Bendahara barang dan pengurus barang, panitia /Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan panitia Penerima barang/ jasa, Honor Operator SIPKD, staf pengelola administrasi belanja pegawai (pembantu PPK), tenaga jaga malam dan tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan	141.340.000	100	138.860.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		197.820.000		185.266.160
	01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Laptop 3 unit, lemari besi 1 unit filing kabinet 1 buah, kamera digital 1 buah, printer 2 unit, komputer pc 1 buah modem 5 buah, hardisk eksternal 3 buah	49.800.000	100	49.212.955
	02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang mendapat perbaikan/ perawatan	13.520.000	100	13.512.955
	03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Operasional dan pemeliharaan 3 unit kendaraan dinas roda empat dan 2 unit kendaraan roda 2 Chips	133.500.000	100	121.755.419
	04 Pemeliharaan dan Operasional Mesin Genset	Operasional dan pemeliharaan mesin Genset (BBM, Pelumas, Servis)	1.000.000	100	784.831
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		80.000.000		79.891.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan formal bidang LLAJ, Pengadaan Barang/Jasa, keuangan dan pembekalan Kepala Dinas, penyelia pengujian kendaraan bermotor sebanyak 6 orang	80.000.000	100	79.891.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000		31.883.980
	01 Penyusunan LAKIP SKPD	1 Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2016	3.500.000	100	3.478.500
	02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen Rencana kerja SKPD Tahun 2017	5.000.000	100	4.978.300
	03 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen laporan tahunan SKPD Tahun 2016	6.000.000	100	5.922.000
	04 Penyusunan rencana strategis satuan kerja Perangkat daerah	1 Dokumen renstra SKPD 2016-2021	15.000.000	100	14.034.380
	05 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Laporan LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2016	3.500.000	100	3.470.800
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		10.000.000		8.999.523
	01 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	10.000.000	100	8.999.523
06	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		2.090.741.987		1.349.735.874
	01 Pengadaan Moda Transportasi Darat (Sisa DAK Tahun 2011 s.d 2014 Rp. 250.000.000,- + DAU Rp. 15.000.000,-)	Pengadaan sepeda motor roda 2 untuk pelaksanaan monitoring moda di desa - desa dan biaya umum proyek sebanyak 7 unit	265.000.000	100,00	184.990.025
	02 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya sarana dan fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang di jalan-jalan di wilayah Kabupaten Nias.	40.000.000	100,00	40.000.000
	03 Pengadaan Halte Bus	Tersedianya halte bus di titik strategis untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan juga anak sekolah di jalan-jalan di Kabupaten Nias dan Biaya Umum Proyek	227.850.000	0,00	21.200.000
	04 Pengadaan Bus Sekolah (Sisa DAK 2011 s/d 2014 Rp. 1.500.391.987,- DAU Rp. 57.500.000,-)	Pengadaan Bus Sekolah dan biaya umum proyek sebanyak 3 unit	1.557.891.987	100,00	1.103.545.849
07	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		1.481.370.000		1.303.049.516
	01 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terlaksananya Penertiban Kendaraan Angkutan Umum	50.000.000	100,00	44.769.800
	02 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Koordinasi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	20.000.000	100,00	18.722.700
	03 Biaya Pos Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum	Sewa Pos Pemeriksaan Kendaraan bermotor di 5 (lima) lokasi	10.000.000	100,00	10.000.000
	04 Monitoring Pengelolaan Moda Transportasi Darat	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan moda transportasi lokal sebanyak 34 desa	95.000.000	100,00	93.685.700
	05 Biaya Operasional Kapal Bermotor/Boat	Operasional kapal bermotor Soziona dan honorarium kapten kapal	45.000.000	100,00	38.819.591
	06 Biaya Operasional Bus Sekolah	Biaya operasional bus sekolah berupa biaya bahan bakar minyak, gaji supir, biaya pemeliharaan dan asuransi keselamatan sebanyak 2 unit.	100.000.000	100,00	73.724.275
	07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dhi. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DAK 2016 Rp. 499.520.000,- + DAU Rp. 26.250.000)	Pengadaan / Pemasangan Rambu Lalu Lintas, RPPJ dan Guard Rail, dan Biaya Umum Proyek	525.770.000	100,00	395.209.300
	08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dhi. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Sisa DAK 2011 s/d 2014 Rp. 605.000.000,- + DAU Rp. 30.600.000)	Tersedianya Guard Rail pada jalur rawan kecelakaan di Kabupaten Nias dan Biaya Umum Proyek	635.600.000	100,00	628.118.150

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
08	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		110.000.000		103.900.000
	01 Survey/Pendataan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan di Kab. Nias	Data fasilitas dan perlengkapan jalan di Wilayah Kab.Nias 1 dokumen	15.000.000	100,00	14.300.000
	02 Pengawasan Pejabat Daerah dan Tamu dari luar daerah	Bantuan Petugas Pengawasan	20.000.000	100,00	14.600.000
	03 Pengamanan Jalan pada Acara-acara Resmi Pemerintahan dan Hari-hari Besar Keagamaan dan Pasar-pasar Tradisional	Terlaksanannya pengamanan lalu lintas di jalan raya.	75.000.000	100,00	75.000.000
09	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		150.000.000		113.732.426
	01 Pengawasan /Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	Pendataan/Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	25.000.000	100,00	22.160.000
	02 Pengelolaan Media Center	Pengelolaan Website Dishub Kominfo Kab. Nias	20.000.000	10,00	1.500.000
	03 Biaya Operasional Mobil Pusat Informasi Teknologi Komunitas (M-Pustaka)	Biaya Operasional M-Pustaka	35.000.000	100,00	21.459.000
	04 Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang penyiaran publik	Penyuluhan dan Sosialisasi kepada masyarakat pengguna Informasi Komunikasi dan Informatika	20.000.000	100,00	19.499.136
	05 Pembentukan wadah kelompok informasi masyarakat di kecamatan	Pelaksanaan sosialisasi sekaligus pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan sebanyak 4 kelompok	25.000.000	100,00	24.146.563
	06 Pembinaan kelompok informasi Masyarakat (KIM)	Pembinaan KIM yang sudah terbentuk sebanyak 6 kelompok	25.000.000	100,00	24.967.727
		JUMLAH	4.584.971.987		3.584.977.250

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4 - 22
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		384.260.000	100	366.615.597
	01 Penyediaan jasa surat menyurat (DAU)	Terlaksananya jasa administrasi surat-menyurat (materai dan biaya pengiriman surat) selama 12 bulan	5.000.000	100	4.999.000
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU)	Tagihan rekening telepon, air, faximile serta pemasangan jaringan listrik baru selama 12 bulan	21.600.000	100	13.812.697
	03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	3.400.000	100	563.000
	04 Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAU)	Tagihan rekening biaya kebersihan kantor selama 12	300.000	100	300.000
	05 Penyediaan alat tulis kantor (DAU)	Pemenuhan alat tulis kantor kelancaran tugas	18.000.000	100	17.995.000
	06 Penyediaan barang cetakan & penggandaan (DAU)	Pencetakan, penggandaan dan fotocopy surat-surat dinas dan dokumen lainnya selama 12 bulan	7.000.000	100	7.000.000
	07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 12 bulan	10.000.000	100	10.000.000
	08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (DAU)	Tagihan surat kabar, majalah, bulletin, buku perundang-undangan dan referensi selama 12 bulan	2.400.000	100	1.200.000
	09 Penyediaan makanan & minuman (DAU)	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, koordinasi, makanan dan minuman harian staf selama 12 bulan	25.000.000	100	23.969.000
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (DAU)	Keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	160.000.000	100	158.722.500
	11 Monitoring /survey/ pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah (DAU)	Pelaksanaan pembinaan/pengawasan/evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	80.000.000	100	79.920.000
	12 Penyediaan jasa administrasi umum (DAU)	Honorarium para satuan pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan	51.560.000	100	48.134.400
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		242.800.000	100	228.116.950
	01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 3 Unit	51.300.000	100	48.717.000
	02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (DAU)	Peralatan kerja antara lain : Printer : AC, Filling Kabinet, Printer, Laptop, Pengadaan Telepon.	60.000.000	100	56.650.000
	03 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DAU)	Gedung kantor yang mendapat perbaikan/perawatan	5.000.000	100	4.999.000
	04 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (DAU)	Operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit	32.000.000	100	31.965.000
	05 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (DAU)	Peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	7.000.000	100	7.000.000
	06 Pengadaan Jeruji Jendela/Anti Maling Kantor (DAU)	Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Jerajak Besi	75.000.000	88	66.285.950
	07 Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Kantor (DAU)	Pemasangan Instalasi Internet/Listrik/Telepon	12.500.000	100	12.500.000
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000	100	45.400.000
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal (DAU)	Aparatur yang mengikuti diklat bintek/workshop/kursus/ sosialisasi luar daerah	50.000.000	100	45.400.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		49.200.000	100	46.889.350
	01 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) SKPD (DAU)	1 Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2016	3.000.000	100	2.595.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD (DAU)	1 Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2016	2.000.000	100	1.650.000
03	Penyusunan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (DAU)	1 Dokumen Rencana Strategi (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021	7.500.000	100	7.478.300
04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD (DAU)	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2016	3.500.000	100	3.492.000
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD (DAU)	2 Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2016	2.000.000	100	1.845.000
06	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	2 Dokumen Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	31.200.000	100	29.829.050
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		10.000.000	100	9.388.000
01	Mengikuti pameran pembangunan (DAU)	Turut sertanya Kantor Lingkungan Hidup pada Pameran Pembangunan	10.000.000	100	9.388.000
06	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		212.250.000	100	212.250.000
01	Pengadaan Tong Sampah untuk kebutuhan Sekolah-Sekolah dan Kantor Pem. Kab. Nias	Pengadaan tong sampah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 140 set	212.250.000	100	212.250.000
07	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		2.401.350.000	94	2.264.130.150
01	Pengujian kualitas Air (DAU)	Pelaksanaan pengujian kualitas air di 6 sungai	90.000.000	93	83.808.300
02	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (DAU)	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Nias dengan 60 peserta	110.000.000	69	75.907.700
03	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Kesehatan dan Puskesmas Bawolato Kec. Bawolato (DAK=Rp.360.660.000,- + DAU= Rp. 47.200.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Kesehatan dan Puskesmas Bawolato Kec. Bawolato	11.363.000	100	11.363.000
04	Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Fadoro Lauru Kec. Hiliduho (DAK=Rp.200.000.000,- + DAU = Rp. 33.750.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Fadoro Lauru Kec. Hiliduho sepanjang 30 meter	233.750.000	95	220.940.400
05	Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Tuhegafoa II Kec. Hiliduho (DAK=Rp.200.000.000,- + DAU = Rp. 33.750.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Tuhegafoa II Kec. Hiliduho sepanjang 30 meter	233.750.000	94	220.828.300
06	Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Lalai Kec. Hiliserangkai (DAK=Rp.200.000.000,- + DAU = Rp. 33.750.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Lalai Kec. Hiliserangkai sepanjang 30 meter	233.750.000	95	220.576.100
07	Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Dahadano Botombawo Kec. Hiliserangkai (DAK=Rp.200.000.000,- + DAU = Rp. 33.750.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Dahadano Botombawo Kec. Hiliserangkai sepanjang 30 meter	233.750.000	95	220.678.400
08	Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Hilimbawo Bot Kec. Botomuzoi (DAK=Rp.200.000.000,- + DAU = Rp. 33.750.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Hilimbawo Bot Kec. Botomuzoi sepanjang 30 meter	233.750.000	95	220.945.600
09	Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Lasara Bot Kec. Botomuzoi (DAK=Rp.200.000.000,- + DAU = Rp. 33.750.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Lasara Bot Kec. Botomuzoi sepanjang 30 meter	233.750.000	95	220.949.800
10	Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi (DAK=Rp.200.000.000,- + DAU = Rp. 33.750.000,-)	Pelaksanaan Pembangunan Bronjong Pencegah Longsor di Desa Hilihambawa Kec. Botomuzoi sepanjang 30 meter	233.750.000	95	220.954.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	11	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Kesehatan dan Puskesmas Bawolato Kec. Bawolato.	521.137.000	99	514.588.600
	12	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan Peraturan Bupati Nias tentang izin lingkungan	32.600.000	100	32.589.950
08	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		125.000.000	89	111.206.900
	01	Pengembangan data dan informasi lingkungan melalui penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah/SLHD (DAU)	65.000.000	83	54.082.900
	02	Sosialisasi Program Adiwiyata (DAU)	60.000.000	95	57.124.000
		JUMLAH	3.474.860.000	95	3.283.868.947

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-24
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		382.800.000		327.117.575
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangk, benda-benda pos lainnya dan biaya-biaya paket pengiriman surat-surat dinas selama 12 bulan	1.000.000	100	665.500
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan biaya rekening telpon, air, listrik, faxmilli dan internet selama 12 bulan	42.000.000	100	26.040.651
	03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yg mendapat pengurusan izin (2 Unit roda empat dan 7 Unit roda dua).	5.000.000	100	2.582.509
	04 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Retribusi sampah selama 12 bulan	300.000	100	300.000
	05 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kantor selama 12 bulan	20.000.000	100	9.975.000
	06 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 12 bulan	15.000.000	100	11.672.000
	07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan	7.500.000	100	5.377.050
	08 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemasangan dan pengadaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	3.000.000	100	1.076.000
	09 Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan Rumah Tangga selama 12 bulan	3.000.000	100	2.139.100
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan selama 12 bulan	3.000.000	100	1.800.000
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Rapat, tamu dan pelaksanaan kegiatan gotong royong selama 12 bulan	15.000.000	100	8.460.700
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah serta perjalanan Dinas Luar Daerah lainnya selama 12 bulan	175.000.000	100	170.649.065
	13 Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah serta perjalanan Dinas Dalam Daerah lainnya selama 12 bulan	8.000.000	100	7.800.000
	14 Penyediaan jasa administrasi umum	Honor Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Operator Komputer SIPKD, Penyimpan dan Pengurus Barang, Panitia Penerima serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selama 12 bulan	85.000.000	100	78.580.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		272.500.000		235.322.172
	01 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor : Card Rider KTP-el (1 unit), TV dan perlengkapan lainnya (2 Unit), Kipas angin (3 Unit), Exhaust fan (3 Unit), Kursi putar (15 Unit), Kursi sofa (2 Unnit), Meja Rapat (1 Unit), Mesin Hitung Uang (1 Unit), External Hard Disk (5 Unit), Laptop (2 Unit), Komputer PC (5 Unit), Printer (6 Unit), Jam dinding (3 Unit).	185.500.000	100	167.928.500
	02 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin kantor	15.000.000	100	14.829.500
	03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara sebanyak 2 unit BB 1017 W dan BB 7002 V	64.000.000	100	49.294.172
	04 Pemeliharaan dan pengoperasian Mesin Genset	Pemeliharaan dan pengoperasian mesin genset kantor 2 unit	8.000.000	100	3.270.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		28.000.000		8.000.000
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ workshop/kursus/sosialisasi di luar daerah sebanyak 2 orang	28.000.000	100	8.000.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		18.000.000		16.935.350
01	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen Renja SKPD Tahun 2017.	3.000.000	100	2.821.200
02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja (LK) SKPD Tahun 2016	2.000.000	100	1.918.450
03	Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016 -2021.	7.500.000	100	6.932.200
04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen Laporan Tahunan 2016	3.500.000	100	3.294.300
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2016	2.000.000	100	1.969.200
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		20.000.000		19.225.750
01	Mengikuti kegiatan pameran pembangunan	Keikutsertaan dalam Kegiatan pameran pembangunan Kabupaten Nias.	20.000.000	100	19.225.750
06	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.388.700.000		1.101.355.300
01	Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pemutahiran dan Pengembangan Database Kependudukan se-Kabupaten Nias TA 2016.	80.000.000	100	23.468.500
02	Pengolahan data dan penyusunan laporan kependudukan	Laporan Data Kependudukan TA 2016 sebanyak 1 dokumen	5.000.000	-	-
03	Pelaksanaan penerapan e- KTP	Data KTP Elektronik dan petugas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan se-Kabupaten Nias TA 2016 (sebanyak 1 orang/ Kecamatan x 10 Kecamatan = 10 Orang).	228.000.000	100	208.119.300
04	Pelayanan pencatatan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran	Tertib administrasi penerbitan dokumen kependudukan.	69.200.000	100	63.618.750
05	Monitoring dan evaluasi pelaporan pencatatan sipil di kecamatan	Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Nias.	23.500.000	100	18.800.000
06	Pelayanan langsung pemrosesan dokumen kependudukan diseluruh kecamatan Kabupaten Nias	Pelayanan langsung pemrosesan dokumen kependudukan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Nias.	380.000.000	100	269.485.050
07	Penyusunan dokumen administrasi kependudukan	Dokumen KK dan KTP serta tersedianya honorarium Operator Entry Data (sebanyak 16 orang).	360.000.000	100	321.596.500
08	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan	Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.	200.500.000	100	154.064.700
09	Penatausahaan arsip hasil pelayanan pencatatan sipil	Terdokumentasinya hasil pelayanan pencatatan sipil.	42.500.000	100	42.202.500
		JUMLAH	2.110.000.000		1.707.956.147

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-26
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Program Pelayanan Administrasi		478.595.000		457.583.983
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DAU)	Terpenuhinya materi, perangko dan benda pos lainnya selama 12 bulan	3.000.000	100	1.854.170
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik (DAU)	Terpenuhinya jasa kantor untuk 12 bulan	24.710.000	100	17.692.174
	3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (DAU)	Terpenuhinya pemeliharaan/perbaikan komputer, printer, mesin ketik, AC dan genset	5.000.000	100	4.192.500
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (DAU)	Terpenuhinya alat tulis kantor (1 tahun)	25.845.000	100	25.842.740
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DAU)	Terpenuhinya Kartu Barang dan Penggandaan Kartu Alat Kontrasepsi 1 paket	15.000.000	100	14.929.799
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DAU)	Terpenuhinya alat-alat instalasi listrik/penerangan kantor untuk 12 bulan	2.500.000	100	2.015.000
	7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DAU)	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (sapu, sapu lidi, kain pel, pengharum ruangan dan alat kebersihan lainnya)	2.500.000	100	2.500.000
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DAU)	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan (1 SKH dan 1 SKM)	4.000.000	100	2.400.000
	9. Penyediaan Makanan Minuman (DAU)	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat-rapat staf, rapat-rapat koordinasi dan kegiatan lain dilingkungan BP2AKB Kabupaten Nias untuk 12 bulan	35.000.000	100	34.997.600
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (DAU)	Terlaksananya keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah untuk 12 bulan	200.000.000	100	200.000.000
	11. Monitoring/Survei/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DAU)	Terlaksananya kegiatan Monitoring/Survei/Pengawasan/Evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah untuk 12 bulan	60.000.000	100	59.960.000
	12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum (DAU)	Terpenuhinya honorarium pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara Pengurus Barang, Operator SIPKD untuk 12 bulan	101.040.000	100	91.200.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		120.000.000		118.625.573
	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (DAU)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor al : - Finger Print (1 Unit) - Laptop (1 unit) - Filling Kabinet (1 buah) - Printer(2 Unit) - Kipas Angin (5buah) - Meja 1/2 Biro (2 Buah)	25.000.000 5.000.000 8.000.000 2.500.000 3.000.000 2.750.000 3.750.000	100 100 100 100 100 100 100	24.901.502 4.970.454 7.980.341 2.485.228 2.982.274 2.733.750 3.749.455
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAU)	Terlaksananya perbaikan atap, plafon, pintu, kunci dan pengecatan	20.000.000	100	19.993.373
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU+SILPA)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas roda empat sebanyak 4 unit (BB 8204 V, BB 1067 V, BB 8172 V, BB 7001 V)	75.000.000	100	73.730.698

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (RP)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000		30.250.000
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (DAU)	Aparatur yang mengikuti kegiatan diklat, bimtek/workshop, kursus, sosialisasi di luar daerah (4 org/5 kali) yaitu : 1. Pengadaan Barang dan Jasa 2. Bimtek Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berbasis Akual. 3. Sosialisasi dan Bimtek Aset Daerah yakni implementasi PP No 27 Tahun 2014 4. Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah	40.000.000	100	30.250.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		24.500.000		24.492.680
	1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD (DAU)	Tersusunnya Rencana kerja SKPD Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen	4.000.000	100	3.998.000
	2. Penyusunan LAKIP SKPD (DAU)	Tersusunnya LAKIP SKPD Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen	3.000.000	100	2.996.600
	3. Penyusunan Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen	4.500.000	100	4.499.080
	4. Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2015	Tersusunnya LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2015 sebanyak 2 dokumen	3.000.000	100	2.999.000
	5. Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2016-2021 sebanyak 1 Dokumen	10.000.000	100	10.000.000
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.995.776
	1. Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya penyampaian informasi KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.000.000	100	14.995.776
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
6.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		110.000.000		99.501.400
	1. Pengembangan Kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) (DAU)	Terlaksananya pengembangan kegiatan Kabupaten Layak Anak	36.000.000	100	35.234.350
	2. Penguatan Forum Anak Kabupaten	Terlaksananya Penguatan Forum Anak Kabupaten	34.000.000	100	27.267.250
	3. Pelatihan Kader Desa PKDRT dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Pelatihan Kader Desa PKDRT dan Perlindungan Anak	40.000.000		36.999.800
7.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		220.000.000		219.828.601
	1. Perayaan Hari-Hari Besar Nasional (DAU)	Terlaksananya kegiatan peringatan Hari-hari Besar Nasional : 1. Peringatan Hari Keluarga 2. Peringatan Hari Anak Nasional 3. Peringatan Hari Ibu	170.000.000	100	169.999.927
	2. Pembinaan Desa Percontohan Program PKK (DAU)	Terlaksananya pembinaan desa percontohan PKK	50.000.000	100	49.828.674
8.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		130.000.000		114.112.052
	1. Penguatan/Operasional Kegiatan PUG (DAU)	Telaksananya kegiatan/operasional PUG di Kab. Nias	35.000.000	100	31.578.000
	2. Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan Terpadu dan pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A (DAU)	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan Terpadu dan pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A	40.000.000	100	32.673.544

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	3. Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan (DAU)	Terlaksananya fasilitasi/pendampingan kasus-kasus KDRT dan perlindungan anak	15.000.000	100	9.863.236
	4. Pelatihan TOT Analisis Responsif Gender (ARG) (DAU)	Terlaksananya Pelatihan TOT Analisis Responsif Gender (ARG)	40.000.000	100	39.997.272
	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				
9.	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		554.400.000		336.846.200
	1. Operasional PLKB (DAU)	Terpenuhinya operasional PKB/PLKB (Rp. 200.000/bulan x 31 Orang)	74.400.000	100	74.400.000
	2. Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK)	Terlaksananya kegiatan Balai Penyuluhan KB di 10 Kecamatan	450.000.000	100	232.446.680
	3. Pembentukan dan Pencanaan Kampung Keluarga Berencana (DAU)	Terlaksananya Pembentukan dan Pencanaan Kampung Keluarga Berencana	30.000.000	100	29.999.520
10.	Program Pelayanan Kontrasepsi		262.360.000		239.791.041
	1. Pelayanan KB Kesatuan Gerak PKK KB-Kes (DAU)	Terlaksananya Pelayanan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes (10 Kecamatan)	30.000.000	100	29.149.750
	2. Pelayanan KB Bhakti Sosial TNI KB-Kesehatan Terpadu (DAU)	Terlaksananya Pelayanan KB Bhakti Sosial TNI KB-Kesehatan Terpadu (10 Kecamatan)	35.000.000	100	34.966.200
	3. Pelayanan Bulan Bhakti IBI- KB Kesehatan (DAU)	Terlaksananya Pelayanan Bulan Bhakti IBI- KB Kesehatan (10 Kecamatan)	15.000.000	100	14.986.191
	4. Operasional Pelayanan Tim KB Keliling (TKBK) (DAU)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB melalui Tim KB Keliling (TKBK)	40.000.000	100	40.000.000
	5. Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi (kontak Wanita dan Kontak Pria) (DAU)	Terlaksananya pelayanan KB tubektomi/WOP (MOP 50 akseptor dan MOW 65 akseptor)	115.000.000	100	114.688.900
	6. Pendistribusian Alokasi ke Fayankes (Fasilitasi Pelayanan Kesehatan) (DAK)	Terlaksananya Pendistribusian Alokasi Ke Fayankes	27.360.000	100	6.000.000
11.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK- KRR)		70.000.000		69.348.627
	1. Pembinaan/Pengembangan, Peningkatan Akses dan Kualitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R) (DAU)	Meningkatnya Kualitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R) dari tumbuh, tegak dan tegar	55.000.000	100	54.563.436
	2. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	15.000.000	100	14.785.191
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB		1.844.726.125		1.300.397.243
	1. Pengadaan Mobil Box Pengantar Alokasi (DAK Rp. 285.380.000 + DAU Rp. 8.700.000)	Tersedianya Mobil Box Pengantar Alokasi	294.080.000	0	-
	2. Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan ((DAK Rp. 907.500.000+ DAU Rp. 18.275.000)	Tersedianya Sarana Kerja Petugas Lapangan	925.775.000	100	731.709.818
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana KIE dan Pengolahan Data Program KB (DAK + DAU)	Tersedianya Sarana dan Prasarana KIE dan Pengolahan Data Program KB	221.089.000	100	214.801.626
	4. Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB (DAK Rp. 289.000.000 + DAU Rp. 8.700.000)	Tersedianya Sarana Pelayanan Klinik KB	306.700.000	100	258.263.754
	5. Pengadaan Sarana Kantor (meubelair) Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAU)	Tersediannya Pengadaan Sarana Kantor (meubelair) Balai Penyuluhan KB Kecamatan	18.000.000	100	17.926.772
	6. Pengadaan BKB Kit (sisa DAK 2015 = Rp 42.165.568 + SILPA Rp. 4.216.557)	Tersediannya BKB Kit	46.382.125	100	45.102.273
	7. Jasa Konsultansi Perencanaan (DAU)	Terbayarkannya Jasa Konsultansi Perencanaan	32.700.000	100	32.593.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13.	Program Pengembangan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga		100.000.000		98.626.291
	1. Pendataan Keluarga (DAU)	Tersedianya data demografi, keluarga, peserta KB dan tahapan keluarga sejahtera Kabupaten Nias sebanyak 1 dokumen	75.000.000	100	73.749.200
	2. Penguatan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Nias (DAU)	Terfasilitasinya Kegiatan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Nias	25.000.000	100	24.877.091
14.	Program Advokasi, KIE dan Koseling		40.000.000		40.000.000
	1. Operasional Tim KIE KB Keliling (DAU)	Terlaksananya pelayanan KIE KB melalui Mobil Penerangan (MUPEN) sebanyak 24 kegiatan	40.000.000	100	40.000.000
15.	Program Pembinaan Peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		133.000.000		132.875.100
	1. Operasional PPKBD (DAU)	Terbayarkannya Operasional PPKBD (2 semester)	68.000.000	100	68.000.000
	2. Pembentukan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS (DAU)	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS	25.000.000	100	24.888.600
	3. Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS (DAU)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS	40.000.000	100	39.986.500
JUMLAH			4.142.581.125	100	3.297.274.567

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4 - 28
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		533.980.000		522.789.158
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan materai selama setahun dan frekuensi pengiriman surat-surat kedinasan selama 12 bulan	2.000.000	100	2.000.000
	02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran rekening telepon, Listrik dan internet/wi-fi kantor selama 12 bulan	107.514.500	100	100.302.483
	03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terperbaikinya printer (4 unit), lap top (3 unit) dan AC ruangan (2 unit).	12.000.000	100	12.000.000
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK) selama 12 bulan	14.000.000	100	14.000.000
	05 Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Terpenuhinya cetak, penggandaan dan foto copy surat-surat kedinasan dan dokumen penting lainnya selama 12 bulan	12.000.000	100	12.000.000
	06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerangan berupa bola lampu neon, saklar dan wayar listrik untuk kebutuhan kantor 12 bulan	8.465.500	100	8.465.500
	07 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor berupa pengharum ruangan, komoceng, sapu, ember dan parang.	3.000.000	100	3.000.000
	08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa 1 SKH dan 3 SKM.	4.000.000	100	4.000.000
	09 Penyediaan makanan Minuman	Terpenuhinya minuman harian pegawai dan konsumsi rapat staf sebanyak 4 kali.	15.000.000	100	15.000.000
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah kepulauan Nias pegawai dalam rangka melaksanakan koordinasi/konsultasi dan menghadiri rapat-rapat di luar daerah terkait tupoksi 12 bulan	200.000.000	100	197.271.175
	11 Monitoring/Survey/Pengawasan/ evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka menghadiri pelaksanaan musrenbang kecamatan, masa Reses DPRD Kab. Nias, Kunjungan Kerja Bupati Nias serta rapat/monitoring/ evaluasi terkait tupoksi SKPD 12 bulan	76.500.000	100	76.450.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya honor.insentif Pengelola Keuangan APBD Kab. Nias, pengurus/penyimpan barang serta pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa/penerima barang/jasa TA. 2016 untuk 12 bulan	79.500.000	100	78.300.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		147.630.000		129.293.323
	01 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan kerja kantor berupa pengadaan finger print sebanyak 1 unit dan UPS sebanyak 1 unit.	5.500.000	100	5.400.000
	02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda empat (4), Bahan Bakar Minyak Solar dan terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional roda empat (4) dengan No. Pol. B 9792 PSC dan BB 8235 V selama 1 tahun.	101.000.000	100	82.763.323
	03 Pengangkutan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.	Terfasilitasinya pengangkutan dan perpindahan gedung kantor.	-	0	-
	04 Mutasi Sarana Mobilitas Penanggulangan Bencana Bantuan Pemerintah Pusat.	Terfasilitasinya mutasi kendaraan 1 unit dengan No. Pol. B 9337 PMA dan 1 unit motor Trail dengan No. Pol. B 3264 PBQ	41.130.000	100	41.130.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		30.000.000		25.534.000
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksana bimtek pegawai SKPD sebanyak 5 orang	30.000.000	100	25.534.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		18.000.000		18.000.000
	01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya 1 dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2017	3.000.000	100	3.000.000
	02 Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya 1 dokumen Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	7.500.000	100	7.500.000
	03 Penyusunan Laporan Kinerja (LK) SKPD	Tersusunnya 1 dokumen Laporan (LK) SKPD tahun 2016	2.000.000	100	2.000.000
	04 Penyusunan laporan tahunan SKPD	Tersusunnya 1 dokumen Laporan Tahunan SKPD tahun 2016	3.500.000	100	3.500.000
	05 Penyusunan laporan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya 2 dokumen Laporan LPPD dan LKPJ SKPD tahun 2016	2.000.000	100	2.000.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.975.000
	01 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten SKPD Tahun 2016 yang dilaksanakan di Lapangan Beringin Desa Hiliweto Kec. Gido.	15.000.000	100	14.975.000
06	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		820.110.000		811.190.498
	01 Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terfasilitasinya penyaluran dana bantuan sosial PKH Kab. Nias kepada penerima manfaat (KSM) : Tahap I sebanyak 5.428 KSM, Tahap II sebanyak 5.428 KSM, Tahap III sebanyak 5.428 KSM dan Tahap IV sebanyak 5.428 KSM.	392.260.000	100	391.346.364
	02 Pemutahiran Data PMKS dan Pendataan Sumber Kesejahteraan Sosial (SKS)	Tersedianya data PMKS Kabupaten Nias tahun 2016 sebanyak 1 dokumen.	22.850.000	100	22.850.000
	03 Pembinaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (PFM) melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)	Tersalurnya bantuan sosial sebanyak 4 KUBE di Kabupaten Nias.	100.000.000	100	100.000.000
	04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Masyarakat Miskin	Tersalurnya bantuan sosial kepada kegiatan usaha kecil masyarakat miskin sebanyak 40 orang	200.000.000	100	197.475.000
	05 Fasilitasi Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi 10 orang siswa Warga Binaan Sosial (WBS) di Balai Keterampilan Warga Binaan Sosial Tanjung Morawa berupa pelatihan keterampilan salon, bengkel, jahit menjahit atau bordir.	50.000.000	100	49.299.334
	06 Biaya Pendukung Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Nias	Terfasilitasinya operasional TKSK Kabupaten Nias sebanyak 10 orang dalam rangka pendataan KKS, KIS dan Raskin Kabupaten Nias tahun 2016.	55.000.000	100	50.219.800
07	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		40.000.000		-
	01 Optimalisasi fungsi Lembaga Konsultasi, Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tidak terlaksana.	25.000.000	0	-
	02 Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Nias.	Tidak terlaksana.	15.000.000	0	-
08	Program Pembinaan Anak Terlantar		60.000.000		58.600.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	01 Bantuan sosial bagi anak terlantar dan anak jalanan	Tersedianya kebutuhan sehari-hari anak terlantar sebanyak 30 anak dan kebutuhan sehari-hari sebanyak 1 orang masyarakat terlantar bertempat tinggal Yayasan Karya Faomasi Zoaya/Laverna Gunungsitoli.	60.000.000	100	58.600.000
09	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma		60.000.000		47.362.000
	01 Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyandang Cacat	Terlaksananya monitoring dan pendampingan bagi masyarakat penyandang cacat berat sebanyak 32 orang.	30.000.000	100	30.000.000
	02 Bantuan Sosial Perawatan Pasien Masalah Kejiwaan dan Eks Trauma Ke Rumah Sakit Jiwa	Terlaksananya rujukan pasien yang mengalami gangguan jiwa di Rumah Sakit jiwa di Tuntungan Medan sebanyak 1 orang	30.000.000	50	17.362.000
10	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		60.000.000		60.000.000
	01 Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak Panti asuhan Kiderdoff Kec. Gido sebanyak selama 1 tahun	60.000.000	100	60.000.000
11	Program Penanganan Fungsi-fungsi Sosial Dalam Kehidupan Kebangsaan		35.250.000		-
	01 Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Tingkat Kabupaten Nias	Tidak terlaksana.	35.250.000	0	-
12	Program Pembinaan Lanjut Usia (Lansia)		107.480.000		104.805.000
	01 Pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyandang Lanjut Usia Terlantar (LUT)	Terlaksananya pendampingan dan monitoring penyaluran dana jaminan sosial bagi masyarakat Lanjut Usia Terlantar sebanyak 50 orang	50.000.000	100	49.875.000
	02 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial Bagi LANSIA	Terfasilitasinya kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat lanjut usia sebanyak 100 orang (@ Rp. 300.000,- / bulan/ org selama 1 (satu) tahun.	57.480.000	100	54.930.000
13	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana		201.000.000		193.952.900
	01 Biaya Operasional Pengiriman Bantuan kepada korban Bencana	- Terfasilitasinya penjemputan bantuan sosial bagi korban bencana alam dari Pemerintah Provsu. - Terfasilitasinya penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam di Kab. Nias sebanyak 31 kali kejadian dengan jumlah korban 62 KK	75.000.000	100	74.970.900
	02 Biaya Operasional TAGANA Kabupaten Nias	Terpenuhinya biaya operasional personil TAGANA Kabupaten Nias sebanyak 10 orang dalam rangka penanganan tanggap darurat korban bencana alam.	45.000.000	100	38.000.000
	03 Pengadaan bahan pangan tanggap darurat (emergency food)	Tersedianya bahan pangan dan sandang tanggap darurat bagi masyarakat Kab. Nias yang korban bencana selama 1 tahun.	75.000.000	100	74.982.000
	04 Pemutakhiran Data Base Korban Bencana Kabupaten Nias	Tersedianya data base masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Nias tahun 2016.	6.000.000	100	6.000.000
14	Program Pemberian Bantuan Sosial		117.500.000		108.672.300
	01 Penanganan Mayat Terlantar (Mr. X).	Terfasilitasinya pemakaman mayat terlantar (Mr. X) sebanyak 1 orang.	17.500.000	50	12.925.000
	02 Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat/Lansia	Terfasilitasinya masyarakat cacat dan LUT berupa kursi roda	30.000.000	100	30.000.000
	03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin.	Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin.	70.000.000	100	65.747.300
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		662.800.000		655.532.816

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
	01	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 25 peserta.	50.000.000	100	49.375.000
	02	Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Kabupaten Nias	Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi mekanik otomotif mesin diesel bensin dan mesin bensin kealian teknik kendaraan ringan selama 74 hari di Sehat Training Center Medan dan pemberian sertifikat, peralatana KIT dasar mekanik bagi 15 orang peserta.	400.000.000	100	395.378.000
	03	Biaya operasional Sistem Informasi Bursa Kerja Online (BKOL) Kabupaten Nias	Terlaksananya fungsi BKOL sebanyak info lowongan kerja.	20.000.000	100	19.998.000
	04	Pemutakhiran Data Pekerja Anak Putus Sekolah dari Keluarga Penerima Manfaat PKH.	Terlaksananya pemutakhiran data kepada 59 anak putus sekolah.	30.000.000	100	29.923.000
	05	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Ke Luar Daerah	Terfasilitasinya pengiriman Tenaga Kerja Kab. Nias ke Batam Prov. Riau di perusahaan PT. PHILIPS dan PT. RUBYCON sebanyak 183 orang.	112.800.000	100	112.280.816
	06	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri.	Terlaksananya pelatihan bagi 25 orang.	50.000.000	100	48.578.000
16		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		85.000.000		83.616.200
	01	Pembentukan dan Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Nias	Pengajuan Usul Keputusan Gubsu tentang Upah Minimum Kabupaten (UMKab.) Nias Tahun 2016 sebesar Rp. 2.039.808.-	50.000.000	100	49.224.200
	02	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Terlaksananya pendataan perusahaan di 10 kecamatan.	35.000.000	100	34.392.000
		JUMLAH	2.993.750.000			2.834.323.195

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-31
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		349.650.000		343.457.444
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan perangko, meterai dan jasa pengiriman selama 12 bulan	1.000.000	100	1.000.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening Telepon, Air dan Listrik selama 12 bulan	20.000.000	100	15.266.796
	03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang diperbaiki selama 12 bulan	5.000.000	100	5.000.000
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	9.650.000	100	9.650.000
	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	7.500.000	100	7.500.000
	06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	2.000.000	100	1.991.000
	07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga selama 12 bulan	11.000.000	100	10.716.748
	08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	2.000.000	100	1.560.000
	09 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Pengadaan makanan dan minuman Pegawai, rapat staf dan tamu selama 12 bulan	10.000.000	100	10.000.000
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	150.000.000	100	149.322.900
	11 Monitoring/Evaluasi/serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Monitoring, koordinasi dan evaluasi dalam daerah selama 12 bulan	53.500.000	100	53.450.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium pejabat/staf pengelola keuangan, pemegang dan pengurus barang selama 12 bulan	78.000.000	100	78.000.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		138.500.000		130.392.768
	01 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan kantor antara lain laptop 3 unit, printer 2 unit, infocus 1 unit, CCTV 1 paket	72.000.000	100	66.965.890
	02 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	15.000.000	100	12.034.331
	03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan roda 4 yang dipelihara 1 unit BB 1039 V	32.000.000	100	31.969.047
	04 Pemeliharaan Rutin/Operasional mesin Genset	Operasional dan perbaikan mesin genset 1 unit	1.500.000	100	1.497.500
	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional roda dua sebanyak 1 unit	18.000.000	100	17.926.000
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		40.000.000		30.500.000
	01 Mengikuti diklat/bimtek/workshop/ kursus/ sosialisasi di luar daerah	Pegawai SKPD mengikuti diklat/ bimtek sebanyak 7 orang	40.000.000	100	30.500.000
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		18.000.000		18.000.000
	01 Penyusunan rencana kerja SKPD	1 Dokumen Rencana Kerja SKPD	3.000.000	100	3.000.000
	02 Penyusunan RENSTRA SKPD	1 Dokumen RENSTRA SKPD	7.500.000	100	7.500.000
	03 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen LAKIP SKPD	2.000.000	100	2.000.000
	04 Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD	3.500.000	100	3.500.000
	05 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD	2.000.000	100	2.000.000
05.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.795.000
	01 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	14.795.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
06.	Program Penciptaan Iklim Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		85.000.000		81.185.687
	01 Penyusunan Kebijakan / Produk Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembalian, Penjatuhan Sanksi/Denda serta Pembebasan/ Penghapusan Piutang Daerah kepada Penerima Manfaat Dana Bergulir	1 dokumen Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembalian, Penjatuhan Sanksi/Denda serta Pembebasan/ Penghapusan Piutang Daerah kepada Penerima Manfaat Dana Bergulir	20.000.000	100	19.999.500
	02 Sosialisasi Kebijakan tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sosialisasi kebijakan Pemerintah tentang UMKM dengan landasan hukum yang mendasarinya	35.000.000	100	31.334.187
	03 Penyusunan Database UKM dan Koperasi	1 Database UMKM dan Koperasi di Kabupaten Nias	30.000.000	100	29.852.000
07.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		65.000.000		57.719.500
	01 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Produk Lokal	Pelatihan bidang kewirausahaan bagi pelaku UMKM produk lokal (pengrajin) dalam rangka pengelolaan usahanya sebanyak 20 orang	45.000.000	100	37.819.500
	02 Pelatihan Pengurus Koperasi Berbasis Komoditi Karet dan Coklat	Unit Koperasi/Kios Penyedia Sarana Produksi di Tingkat Kecamatan/ Desa sebanyak 15 koperasi	20.000.000	100	19.900.000
08.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)		470.000.000		464.974.750
	01 Fasilitasi UMKM yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian	Sarana produksi pertanian melalui pemberdayaan UMKM aktif sebanyak 11 UMKM	75.000.000	100	74.768.000
	02 Fasilitasi Koperasi yang aktif mendukung penyediaan sarana Produksi Pertanian	Sarana produksi pertanian melalui pemberdayaan koperasi aktif sebanyak 5 koperasi	75.000.000	100	74.848.000
	03 Pemantauan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM dan Koperasi	Penyaluran, Pembinaan, Pengawasan dan Penagihan Dana Bantuan Modal Bergulir bagi UMKM dan Koperasi sebanyak 48 UMKM dan 9 Koperasi	150.000.000	100	146.073.000
	04 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UKM	Sarana pendukung pemasaran dalam mempromosikan hasil produk UMKM dan peningkatan kemitraan usaha, 135 UMKM	30.000.000	100	29.978.000
	05 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan kepada industri rumah tangga dan industri kecil dalam peningkatan pendapatan keluarga, 7 UMKM	40.000.000	100	39.908.750
	06 Pengadaan Tenda Bagi Pedagang	Penyediaan tenda sebagai sarana usaha bagi UMKM, 32 tenda UMKM	100.000.000	100	99.399.000
09.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		315.000.000		313.319.000
	01 Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi yang Berprestasi	Jumlah Koperasi Aktif Sehat sebanyak 10 koperasi	25.000.000	100	24.992.000
	02 Pelatihan Manajemen Modern Bagi Pengurus Koperasi	Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi bagi pengurus koperasi sebanyak 20 orang	40.000.000	100	39.998.000
	03 Peningkatan Pembinaan Koperasi Melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Pembinaan Koperasi melalui RAT untuk 30 koperasi	50.000.000	100	50.000.000
	04 Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi di Lokasi Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK	Pembinaan dan penyuluhan koperasi di lokasi desa percontohan di 5 desa (Desa Ehosakhozi, Bozhona, Hilizoi, Ononamolo Talafu dan Dahana)	20.000.000	100	20.000.000
	05 Gerakan Sosialisasi Sadar Koperasi	Sosialisasi Sadar Koperasi dengan peserta 30 orang	30.000.000	100	29.943.000
	06 Perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi	Perayaan HUT Koperasi	30.000.000	100	30.000.000
	07 Pembentukan Koperasi Baru	Jumlah Koperasi Baru sebanyak 10 koperasi	30.000.000	100	29.900.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
08	Bantuan Operasional Dekopinda Kabupaten Nias	Kegiatan Dekopinda Kabupaten Nias	20.000.000	100	18.540.000
09	Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Peserta Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sebanyak 4 desa	45.000.000	100	44.951.000
10	Pembubaran Koperasi yang Tidak Aktif	Jumlah koperasi tidak aktif yang dibubarkan sebanyak 24 koperasi	25.000.000	100	24.995.000
		JUMLAH	1.496.150.000		1.454.344.149

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4 - 33
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		458.000.000		445.923.369
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Adanya meterai selama 12 bulan	1.998.000	100	1.962.000
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Terbayarnya rekening air dan listrik selama 12 bulan	11.000.000	100	4.936.868
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengurusan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit (BB 1016 V)	1.000.000	-	-
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Adanya Alat Tulis Kantor (ATK) selama 12 bulan	12.500.000	100	12.400.000
	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan surat-surat dinas, blanko dan formulir selama 12 bulan	7.000.000	100	6.900.000
	06 Penyediaan peralatan rumah tangga	Adanya peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersihan selama 12 bulan	4.500.000	100	4.425.000
	07 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya rekening Surat kabar selama 12 bulan	4.500.000	100	4.500.000
	08 Penyediaan makanan dan Minuman	Adanya Makanan dan Minuman keperluan rapat-rapat dinas, staf dan tamu selama 12 bulan	18.500.000	100	17.900.000
	09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di Luar Daerah selama 12 bulan	230.000.000	100	227.650.501
	10 Monitoring/survey/pengawasan evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Monitoring/ survey/pengawasan evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	97.172.000	100	95.919.000
	11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terbayarnya Honorarium Pejabat/Staf Pengelola Keuangan selama 12 bulan	69.830.000	100	69.330.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		112.500.000		110.725.000
	01 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terlaksananya lanjutan pemagaran gedung kantor Disporabudpar Kab. Nias	30.000.000	100	29.500.000
	02 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional BB 1016 V sebanyak 1 unit	32.500.000	100	31.500.000
	03 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor selama 12 bulan	10.000.000	100	9.850.000
	04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor : - Laptop 14"(2 unit) - Camera Digital (1 buah) - Kipas Angin Besar (2 buah) - Kipas Angin Kecil (2 buah) - Meja Biro (2 buah) - Meja ½ Biro (2 buah) - Kursi Putar (2 buah) - Kursi Plastik (1 lusin) - Printer (2 buah)	40.000.000	100	39.875.000
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000		39.786.800
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ikut sertanya Aparatur pada pelaksanaan Diklat dan Bimtek di luar daerah sebanyak 6 orang	40.000.000	100	39.786.800
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		24.500.000		23.244.500
	01 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1 Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017	4.000.000	100	4.000.000
	02 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015	3.000.000	100	2.996.900

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	03	Penyusunan Rencana Strategi SKPD	1 Dokumen Rencana Strategi SKPD Tahun 2016-2021	100	8.750.000
	04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	100	4.500.000
	05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2015	100	2.997.600
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		20.000.000		20.000.000
	01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan Tahun 2016 di Lapangan Beringin Gido	100	20.000.000
06	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		315.000.000		310.584.700
	01	Pelaksanaan Penyambutan dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kab. Nias Tahun 2016 di Lapangan Beringin Gido	100	25.000.000
	02	Pelaksanaan seleksi dan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera di Kabupaten Nias	Seleksi kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Kab. Nias Tahun 2016 sebanyak 25 orang dan terkirimnya 2 orang sebagai Paskibraka Tingkat Sumatera Utara di Medan	100	235.584.700
	03	Pertemuan Rutin Pimpinan Organisasi Pemuda dan Tokoh Pemuda	Pertemuan Rutin Pimpinan Organisasi Pemuda dan Tokoh Pemuda sebanyak 1 kali	100	50.000.000
07	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		100.000.000		99.243.000
	01	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda sebanyak 20 orang	100	99.243.000
08	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		270.000.000		227.426.000
	01	Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Kabupaten Nias Tahun 2016 di Lapangan Beringin Hiluweto Gido	100	50.000.000
	02	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Kabupaten Nias	Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Kabupaten Nias Tahun 2016	100	149.850.000
	03	Pelatihan Wasit Olahraga	Pelatihan Wasit Olahraga Tingkat Kabupaten Nias	-	7.576.000
	04	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Pemberian penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	100	20.000.000
09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		205.000.000		204.297.800
	01	Pengadaan Kostum Marching Band	Kostum Marching Band untuk SMK Negeri I Idanogawo	100	54.757.800
	02	Pengadaan Alat-alat Olahraga	Alat-Alat Olahraga Bola Voli untuk SMA/SMK dan SMP se Kabupaten Nias	100	49.800.000
	03	Pengadaan Alat Kelengkapan Marching Band	Alat kelengkapan Marching band untuk SMK Negeri I Sogaeadu	100	99.740.000
10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		530.000.000		425.440.000
	01	Rehabilitasi Rumah Adat Tradisional di Kabupaten Nias	Rumah adat tradisional 1 buah an. Arofati Ndraha di Kecamatan Hiliduho	100	49.875.000
	02	Pembinaan Sanggar Budaya	Pembentukan dan Pelantikan Pengurus Sanggar Budaya Tingkat Kecamatan se Kabupaten Nias sebanyak 10 sanggar	100	30.000.000
	03	Penyusunan Sinopsis Asal Usul/Sejarah Batu Megalith	1 Dokumen Sinopsis Asal Usul/Sejarah Batu Megalith Bawi Sigelo Galua dan Batu Megalith Lahemo	100	100.000.000
	04	Perawatan dan Pelestarian Batu Megalith Desa Saitagaramba	Perawatan dan pelestarian Batu Megalith Desa Saitagaramba	100	99.850.000
	05	Perawatan dan Pelestarian Batu Megalith Desa Akhelauwe	Perawatan dan pelestarian Batu Megalith Desa Akhelauwe	-	4.300.000
	06	Perawatan dan Pelestarian Rumah Adat Tradisional	Rumah Adat Tradisional 2 buah di Desa Sisarahili Kec. Bawolato dan Desa Balodano Kec. Ma'u	100	141.415.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		25.000.000		25.000.000
	01 Fasilitas Pembentukan Pengurus Baru Sanggar Budaya Kabupaten Nias	Pengurus Baru Sanggar Budaya Kabupaten Nias	25.000.000	100	25.000.000
12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		650.000.000		649.422.111
	01 Mengikuti Kegiatan PRSU di Medan	Ikutsertanya Pemerintah Kabupaten Nias pada Kegiatan PRSU di Medan Tahun 2016	275.000.000	100	274.611.511
	02 Penyelenggaraan Hari Pariwisata	Hari Pariwisata Kabupaten Nias Tahun 2016 di Hiliweto Gido	50.000.000	100	50.000.000
	03 Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di TMII Jakarta	Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di TMII Jakarta	325.000.000	100	324.810.600
13	Program Peningkatan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan		1.580.000.000		1.555.720.000
	01 Pembinaan Desa Percontohan Program PKK	Pembinaan 3 Desa Percontohan Program PKK tahun 2016 - Desa Hiliwarasi Kec. Hiliserangkai - Desa Talafu Kec. Botomuzoi - Desa Orahili Kec. Ulugawo	30.000.000	100	30.000.000
	02 Biaya Operasional dan Perawatan Objek Wisata Pemandian Air Panas Mbomboaukhu	Objek Wisata Pemandian Air Panas Mbomboaukhu selama 12 bulan	50.000.000	100	42.495.000
	03 Lanjutan Penataan Sarana Objek Wisata Bahari Desa Tagaule Kecamatan Bawolato	Sarana Objek Wisata Bahari Desa Tagaule Kecamatan Bawolato berupa Pondok, Jalan Rabat Beton dan Kios Wisata	1.000.000.000	100	994.275.000
	04 Pembuatan Gapura dan Pengecatan Shelter di Objek Wisata Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato	Pembuatan 2 buah Gapura dan Pengecatan Shelter di Objek Wisata Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato	20.000.000	100	20.000.000
	05 Pengadaan Kelengkapan Rest Area di Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato	Kelengkapan Rest Area di Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato dalam rangka Pesta Ya'ahowu antara lain : Kepala Muda, Keripik Pisang,	80.000.000	100	80.000.000
	06 Pembangunan Panggung Terbuka di Objek Wisata di Objek Wisata Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo	Panggung 1 (satu) buah panggung terbuka di Objek Wisata di Objek Wisata Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo	100.000.000	100	99.550.000
	07 Pengerasan Tempat Parkir di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo	Pengerasan Tempat Parkir di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo	100.000.000	100	99.550.000
	08 Pengerasan Jalan di Lingkungan Objek Wisata Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato	Pengerasan Jalan ± 200 m di Lingkungan Objek Wisata Pantai Nalawo/Dawala Kecamatan Bawolato	200.000.000	100	189.850.000
14	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Budaya		220.000.000		218.600.000
	01 Keikutsertaan Tim Kesenian Kabupaten Nias pada Pembukaan Pesta Ya'ahowu di Kabupaten Nias Selatan dan pada acara Penutupan di Kota Gunungsitoli	Ikutsertanya Tim Kesenian Kabupaten Nias pada Pembukaan Pesta Ya'ahowu di Kabupaten Nias Selatan dan pada acara Penutupan di Kota Gunungsitoli	80.000.000	100	80.000.000
	02 Lomba Maena Kreasi Baru se Kepulauan Nias di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo	Pemerintah Kabupaten Nias ikut serta pada Lomba Maena Kreasi Baru se Kepulauan Nias di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo	100.000.000	100	100.000.000
	03 Keikutsertaan Utusan Kabupaten Nias pada Pemilihan Puteri Pariwisata di Kabupaten Nias Barat	Pemerintah Kabupaten Nias ikut serta pada Pemilihan Puteri Pariwisata di Kabupaten Nias Barat	20.000.000	100	18.600.000
	04 Keikutsertaan Utusan Kabupaten Nias pada Lomba Voli Pantai di Kabupaten Nias Utara	Pemerintah Kabupaten Nias ikut serta pada Lomba Voli Pantai di Kabupaten Nias Utara	20.000.000	100	20.000.000
		JUMLAH	4.550.000.000		4.355.413.280

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel 4-35
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Yang Dilaksanakan oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		391.333.200		348.175.820
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, perangko dan benda pos lainnya keperluan administrasi kantor	2.000.000	100	1.497.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening pesawat telepon, faximile, air, listrik dan internet untuk 12 bulan	25.000.000	100	7.194.160
03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor untuk kebutuhan 1 tahun anggaran	11.000.000	100	8.713.230
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan/fotocopy	8.000.000	100	4.333.500
05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Peralatan listrik dan komponen penerangan peralatan listrik lainnya.	5.000.000	100	1.431.000
06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan kantor	4.000.000	100	1.999.000
07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tagihan surat kabar harian untuk 12 bulan serta tersedianya buku peraturan perundang-undangan	4.000.000	100	3.500.000
08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kebutuhan rapat-rapat dinas serta tamu kantor	15.000.000	100	11.061.000
09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	167.000.000	100	166.990.400
10	Monitoring / survey / pengawasan / evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, koordinasi dan evaluasi dalam daerah	50.000.000	100	49.975.000
11	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terbayarkannya honorarium satuan pengelola keuangan SKPD untuk 12 bulan	97.833.200	100	90.308.200
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan dan pengurusan izin kendaraan dinas / operasional : - 1 unit kendaraan roda 4 ,BB 1042 V. - dan 8 unit kendaraan roda 2 (- BB 2313 V, - BB 2198 V, - BB	2.500.000	100	1.173.330
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		88.460.000		68.629.554
01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda-4 dan roda-2	32.000.000	100	29.791.209
02	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin kantor kesbangpol dan linmas	14.000.000	100	6.101.440
03	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perengkapannya	Pemeliharaan Perbaikan komputer , printer dan genset	10.000.000	100	5.554.900
		Pemeliharaan Perbaikan mesin genset	3.000.000	100	870.000
04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor TV dan perlengkapannya	6.122.042	100	4.832.590
		Tersedianya peralatan kantor Laptop	8.029.337	100	6.814.620
		Tersedianya peralatan kantor kamera	3.186.837	100	3.117.800
		Tersedianya peralatan kantor proyektor	9.702.148	100	9.152.970
		Tersedianya peralatan kantor filling cabinet	2.419.636	100	2.394.025
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		60.000.000		59.000.000
01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti diklat/bimtek/workshop/kursus/ sosialisasi di luar daerah	60.000.000	100	59.000.000
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		18.000.000		13.444.600
01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	1 Dokumen Renja SKPD Tahun 2016	3.000.000	100	2.053.000
02	Penyusunan RENSTRA SKPD	1 Dokumen renstra SKPD tahun 2011 - 2021	7.500.000	100	5.291.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
02	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	1 Dokumen LAKIP SKPD	2.000.000	100	1.742.000
03	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 dokumen Laporan Tahunan SKPD	3.500.000	100	2.553.000
04	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 dokumen LPPD dan LKPJ SKPD	2.000.000	100	1.805.600
05.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		20.000.000		19.888.950
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2015	20.000.000	100	19.888.950
06.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		200.000.000		187.451.600
01	Facilitasi FKUB dan DP-FKUB di Kab. Nias	Pertemuan/rapat pengurus FKUB dan DP-FKUB Kab. Nias	60.000.000	100	57.648.200
02	Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nias	Pertemuan rapat KOMINDA Kab. Nias.	50.000.000	100	46.831.200
03	Facilitas Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri Kabupaten Nias	Terwujudnya koordinasi, efisien dan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Kabupaten Nias	90.000.000	100	82.972.200
07	Program Pemasyarakatan dan peningkatan Wawasan Kebangsaan		150.000.000		140.077.000
01	Pelaksanaan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Tercapainya pemantapan peningkatan wawasan kebangsaan	50.000.000	100	48.669.000
02	Facilitasi pelaksanaan rapat dan operasional Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (DP FKDM) dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Nias	Tercapainya pemantapan peningkatan wawasan kebangsaan	50.000.000	100	46.044.000
03	Facilitasi pelaksanaan rapat dan Operasional Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kab.Nias	Tercapainya Pemantapan Peningkatan wawasan kebangsaan	50.000.000	100	45.364.000
07.	Program Peningkatan dan Pengembangan Demokrasi		50.000.000		45.855.900
01	Pemantauan masalah aktual di Kab. Nias	Terciptanya Stabilitas Nasional di Daerah	20.000.000	100	18.187.300
02	Verifikasi pemeriksaan dan pengajuan bantuan keuangan Parpol	Terwujudnya Tatakelola administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol	25.000.000	100	22.886.600
03	Pendaftaran dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Nias	Tercapainya Peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan ormas	5.000.000	100	4.782.000
08	Program Pendidikan politik Masyarakat		50.000.000		47.605.900
01	Pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat sebanyak 50 orang	50.000.000	100	47.605.900
08.	Program Penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas		50.000.000		47.945.300
01	Pelatihan bagi Personil Linmas di Kabupaten Nias	Tercapainya Penguatan Kelembagaan dan Personil Linmas	50.000.000	100	47.945.300
09.	Program Pemantapan dan Peningkatan Ideologi		165.000.000		150.537.500
01	Pelaksanaan Upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 setiap bulan di Kab. Nias	Terlaksananya Upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 setiap bulan	50.000.000	100	48.137.000
02	Memfasilitasi pelaksanaan hari-hari besar nasional di Kab. Nias	Terlaksananya upacara hari-hari besar nasional yaitu hari Kebangkitan Nasional, HUT Kemerdekaan RI/Pameran Pembangunan, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan	115.000.000	100	102.400.500
JUMLAH			1.242.793.200		1.128.612.124

⁻⁾ Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-36
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.053.640.000		1.012.282.277
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan materai, perangko dan benda pos dan Jasa surat menyurat kantor selama 12 bulan	500.000	100	498.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan biaya rekening telepon, listrik dan air kantor selama 12 bulan	12.800.000	100	11.000.327
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pengurusan administrasi kendaraan dinas (pengurusan STNK) roda-4 sebanyak 2 unit dan roda-2 sebanyak 3 unit selama Tahun 2014	1.200.000	100	487.000
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 Bulan	6.000.000	100	6.000.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat tulis kantor selama 12 bulan	12.000.000	100	11.383.250
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Penggandaan/ fotocopy buku-buku, formulir, surat-surat dinas, dll selama 12 bulan	5.000.000	100	4.992.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Peralatan listrik dan komponen penerangan peralatan listrik kantor selama 12 bulan	500.000	100	500.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya surat kabar Kantor selama 12 Bulan	4.000.000	100	2.040.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat serta tamu kantor selama 12 bulan	16.000.000	100	15.280.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta kegiatan lainnya terkait Satpol PP selama 1 tahun	125.000.000	100	124.996.700
11	Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi Serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Keikutsertaan aparatur dalam monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun	55.000.000	100	54.975.000
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terbayarkan Honorarium satuan pengelola keuangan SKPD dan honorarium pegawai honorer/tidak tetap kategori I sebanyak 4 org	117.240.000	100	117.240.000
13	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	Terbayarkan uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP dan Banpol PP sebanyak 64 Orang.	698.400.000	95	662.890.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		241.850.000		241.833.925
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor antara lain :	51.850.000	100%	51.846.625
		- Plakat pada Upacara sebanyak 35 buah	1.400.000	100	1.400.000
		- Finger Print 1 Unit	5.000.000	100	5.000.000
		- Laptop 2 Unit	10.000.000	100	10.000.000
		- Handycam 1 Unit	5.000.000	100	5.000.000
		- Proyektor (Infocus) 1 Unit	7.000.000	100	6.996.625
		- Pentungan 50 Buah	2.950.000	100	2.950.000
		- Genset 1 Unit	5.500.000	100	5.500.000
		- AC 1 Unit	4.000.000	100	4.000.000
		- Lemari 2 Unit	4.000.000	100	4.000.000
		- Brankas 1 Unit	7.000.000	100	7.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya dana Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional roda 4 Merk FORD sebanyak 2 unit dengan BB 8160 V dan 8230 V selama 1 tahun	100.000.000	100	99.987.300
3	Pengadaan Perlengkapan Pengendalian Massa (Dalmas)	Tersedianya Perlengkapan Pengendalian Massa (Dalmas) diantaranya :	90.000.000	100	90.000.000
		- Baju PDL II 61 Pasang	12.810.000	100	12.810.000
		- Baret 61 Pasang	6.100.000	100	6.100.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		- Lambang Satpol 61 Pasang	3.050.000	100	3.050.000
		- Baju Kaos Pol PP 61 Buah	3.050.000	100	3.050.000
		- Ikat Pinggang Kecil 61 Buah	6.100.000	100	6.100.000
		- Kopel Perekat 61 buah	4.270.000	100	4.270.000
		- Kaos Kaki 61 Pasang	1.830.000	100	1.830.000
		- Sepatu PDL II 61 Pasang	22.570.000	100	22.570.000
		- Handy Talky (HT) 5 Unit	6.000.000	100	6.000.000
		- Tameng 32 Unit	16.000.000	100	16.000.000
		- Pentungan 10 Buah	600.000	100	600.000
		- Ring Pentungan 61 Buah	1.220.000	100	1.220.000
		- Helm PHH 32 Unit	6.400.000	100	6.400.000
III	Program Peningkatan Disiplin		<u>24.900.000</u>		<u>24.900.000</u>
	1 Bantuan Kepada Pelatih Upacara	Tersedianya Bantuan Pelatih Upacara Bendera sejumlah	24.900.000	100	24.900.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		<u>140.000.000</u>		<u>136.780.600</u>
	1 Mengikuti Kegiatan Diklat / bimtek / workshop / kursus / sosialisasi luar daerah	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti Diklat Bimtek/Workshop/ Kursus/Sosialisasi di Luar Daerah sebanyak 2 org PPNS, 2 Org Diklat Dasar dan 5 Org Bimtek lainnya	100.000.000	100	96.780.600
	2 Pelatihan Dasar Satpol Pamong Praja	Tersedianya Biaya Pelaksanaan Pelatihan Dasar Satpol PP Kab. Nias selama 12 Bulan sebanyak 64 orang	40.000.000	100	40.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<u>18.000.000</u>		<u>17.945.000</u>
	1 Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD sebanyak 1 dokumen	3.000.000	100	2.949.000
	2 Penyusunan LAKIP SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Satpol Kabupaten Nias sebanyak 1 dokumen	2.000.000	100	1.999.000
	3 Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersusunnya RENSTRA SKPD sebanyak 1 dokumen	7.500.000	100	7.500.000
	4 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD sebanyak 1 Dokumen	3.500.000	100	3.498.000
	5 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya Laporan LPPD dan LKPJ SKPD sebanyak 2 dokumen	2.000.000	100	1.999.000
VI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		<u>10.000.000</u>		<u>10.000.000</u>
	1 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan SKPD dalam kegiatan pameran pembangunan kabupaten tahun 2016	10.000.000	100	10.000.000
VII	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		<u>486.110.000</u>		<u>461.983.000</u>
	1 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya pengendalian Keamanan lingkungan (Tim Terpadu) tahun 2016	30.000.000	100	29.500.000
	2 Pengawasan Peraturan Daerah Kab. Nias	Terlaksananya Pengawasan terhadap pelanggaran PERDA tahun 2016	78.600.000	100	77.500.000
	3 Pengamanan Kunker Pejabat/Temu Pisah/Ramah Tamah/Unjuk Rasa/Demo dan hari-hari besar keagamaan	Terlaksananya Bantuan Pengamanan pada Unjuk Rasa Demonstrasi, Temu Pisah, Ramah Tamah Pejabat di Kabupaten Nias tahun 2016	304.670.000	100	282.263.000
	4 Pengawasan Pimpinan/Pejabat/Tamu Pejabat Kab.nias	Terlaksananya Pengawasan Pimpinan/Pejabat /Tamu Pejabat Kab.Nias Tahun 2016	72.840.000	100	72.720.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	VIII Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		41.800.000		41.800.000
	1 Perpanjangan Izin Senjata Api	Terlaksananya Perpanjangan Izin Senjata Api sebanyak 5 Pucuk selama Tahun 2016	41.800.000	100	41.800.000
		JUMLAH	2.016.300.000		1.947.524.802

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-39
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dan Pertanahan pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.903.918.800		7.899.938.664
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, materai, benda pos lainnya dan biaya pengiriman surat-surat dinas (12 Bln)	77.200.000	100	53.859.000
02	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya rekening telepon, listrik, air di gedung kantor, rumah dinas/jabatan, pendopo dan mess Pemda di Medan (1 Thn)	649.040.000	100	481.052.220
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pembayaran PKB-BBN kendaraan dinas (roda 6 sebanyak 6 unit, Roda 4 sebanyak 42 unit dan Roda 2 sebanyak 40 unit)	100.000.000	100	55.232.251
04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya honorarium pengawas kebersihan, peralatan kebersihan dan upah/jasa kepada tenaga kebersihan di Kantor Bupati Nias, Rumah Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pendopo, Lapangan Merdeka, Gedung Nasional dan Mess Pemda Nias di Medan	975.000.000	100	909.083.542
05	Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Tersedianya biaya pembayaran PBB (Mess Pemda di Medan, Pendopo dan Rumah dinas jabatan) dan Retribusi Sampah (Kantor Bupati Nias, Pendopo, Rumah dinas jabatan)	15.000.000	100	6.078.980
06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (12 Bln)	114.000.000	100	113.239.700
07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan dan fotocopy surat-surat dinas (12 Bln)	188.000.000	100	178.187.250
08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (Penerangan Bangunan Kantor)	Tersedianya biaya pembelian/ penggantian komponen instalasi listrik yang rusak di Kantor Bupati Nias, Rumah Dinas/Jabatan, Pendopo dan Gedung Nasional (12 Bln)	135.000.000	100	132.838.200
09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya pembayaran rekening bahan bacaan SKH/SKM, majalah, dan buku peraturan perundang-undangan	109.000.000	100	97.304.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan Pegawai, rapat, dan tamu Pemerintah Kabupaten Nias di Rumah jabatan Bupati Nias, Wakil Bupati Nias dan Sekda Kab. Nias (12 Bln)	1.070.020.000	100	999.160.250
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah (12 Bln)	3.547.455.000	100	3.162.585.782
12	Monitoring/Survey/Pengawasan/ Evaluasi serta Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas melaksanakan monitoring/survey/ pengawasan /evaluasi serta menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (12 Bln)	835.375.000	100	779.000.000
13	Perjalanan Dinas ke Luar Negeri	Tersedianya biaya perjalanan dinas Bupati Nias ke luar Negeri (Provinsi Hubei, RRC dan Negara Amerika Serikat)	250.000.000	100	249.897.989

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
14	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya biaya Honorarium PA (1 Org), KPA (3 Org), Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org), PPTK (12 Org), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1 Org), Pejabat Penghubung Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org), Bendahara Pengeluaran (1 Org), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji (1 Org), Bendahara Penerimaan (1 Org), Bendahara Pengeluaran Pos KDH (1 Org), Bendahara Pembantu Pengeluaran KPA (3 Org), Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK (3 Org), Staf Pembantu Bendahara Pos KDH (1 Org), Pengelola Administrasi Keuangan lingkup Setda Kab. Nias (Penanggungjawab: 1 Org dan staf pelaksana: 2 Org), Pengurus Barang (12 Org), Penyimpan Barang (1 Org), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (2 Org), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (4 Org), Operator SIPKD (3 Org), Operator Mesin Genset (5 Org), Operator Sound System (5 Org), Bantuan kepada Staf Perwakilan Pemkab. Nias di Medan (1 Org), Bantuan kepada personil Pengamanan Bupati Nias, Wakil Bupati Nias dan Pendopo Kab. Nias (3 Org), Bantuan kepada ADC/Staf Kelompok Kerja Bupati Nias, Wakil Bupati Nias, Sekda Kab. Nias, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati Nias (15 Org), Honorarium Tenaga Honorer Kategori I (4 Org) serta Belanja Barang dan Jasa (Belanja Bahan Pakai Habis serta Belanja Cetak	779.028.800	100	625.381.750
15	Registrasi dan Penomoran Barang Milik Daerah	Tersedianya Data Barang Milik Daerah di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Nias	30.100.000	100	27.562.450
16	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Nias	12.900.000	100	12.782.250
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Tersedianya laporan keuangan tahunan Sekretariat Daerah Kab. Nias	16.800.000	100	16.693.050
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		5.014.020.000		4.689.488.413
01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor, Laptop 2 Unit, Filling kabinet 4 Unit, Printer 1 Unit,	37.200.000	100	25.916.000
02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor, a.l:	196.400.000	100	163.501.500
		- Laptop (5 Unit)			
		- Printer (4 Unit)			
		- Wireless (2 Unit)			
		- Hardisk Eksternal (2 Unit)			
		- Kursi tamu/sofa (1 Unit)			
		- Kursi /Sice (1 Set)			
		- AC 2 PK (2 Unit)			
		- Televisi (1 Unit)			
		- Alat pemadam api/kebakaran (4 Unit)			
		- Meja kerja Pejabat (1 Unit)			
		- TV Monitor LED (3 Unit)			
		- Layar monitor (1 Unit)			
		- Gorden (1 Paket)			
		- Mesin absensi (3 Unit)			
		- Kamera digital (1 Unit)			
		- Lemari dokumentasi (1 Unit)			
		- CPU dan Monitor (1 Unit)			
03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor, Laptop 1 unit, Printer 1 Unit	9.000.000	100	7.568.900
04	Pengadaan Meubelair	-Meubelair Lemari 2 Pintu: 4 Unit	48.500.000	100	47.990.000
		-Meubelair Lemari Rak: 1 Unit			
		-Sofa:1 Set			
		-Lemari arsip : 5 Unit			
		-Meja 1/2 Biro 4 Unit			
		-kursi kerja: 3 Unit			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
05	Pengadaan Bahan-bahan Dalam Rangka Perayaan HUT Kemerdekaan RI	Terlaksananya pembelian bahan-bahan dan perlengkapan dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2016 termasuk upah pengecatan dan pemasangan gapura serta umbul-umbul di Kantor Bupati Nias, Rumah Dinas Jabatan dan Pendopo Kab. Nias	10.000.000	100	5.324.000
06	Pengadaan Peralatan di Rumah Jabatan/dinas	Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan di rumah dinas/jabatan	180.000.000	100	168.685.000
07	Pengadaan Pagar Kawat Berduri di lingkungan Kantor Bupati Nias dhi. Sekretariat Daerah BPKAD dan BKD Kab. Nias	Terlaksananya pengadaan Pagar Kawat Berduri di lingkungan Kantor Bupati Nias dhi. Sekretariat Daerah BPKAD dan BKD Kab. Nias	100.000.000	100	99.995.500
08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan ruangan Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan serta pengecatan gedung Kantor Bupati	215.000.000	100	210.299.100
09	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer/Laptop, Printer, Ac, TV, Parabola dan Digital, Sound system dan Wireless)	125.000.000	100	110.818.000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Nias (2 Unit : BB 1 V dan BB 2 V)	85.000.000	100	81.706.489
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat Eselon II (Sekda, Asisten dan Staf Ahli) sebanyak 9 unit, Kendaraan dinas operasional sebanyak 32 Unit dengan rincian: Kendaraan roda 4 double gardan: 3 Unit, Kendaraan roda 6: 4 Unit, Kendaraan roda 4: 24 Unit, pengadaan bak truk 1 Unit.	1.432.420.000	100	1.369.443.174
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor (komputer PC/ Laptop/Notebook, AC dan Printer)	35.500.000	100	32.935.000
13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan Bupati Nias, dan Wakil Bupati Nias	75.000.000	100	58.717.450
14	Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pengoperasian 4 Unit mesin genset di Kantor Bupati Nias, Rumah dinas/jabatan dan Pendopo Kab. Nias sekaligus penyediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) serta biaya BBM mesin potong rumput.	265.000.000	100	196.988.300
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Tersedianya kendaraan dinas jabatan Wakil Bupati Nias, dan Kendaraan operasional Sekda Kab Nias serta Kendaraan Operasional Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Nias (3 Unit)	2.000.000.000	100	1.910.280.000
16	Pengadaan Teratak	Tersedianya teratak keperluan pemerintah daerah Kabupaten Nias sebanyak 10 Set beserta kelengkapannya dan 20 Set Terpal	200.000.000	100	199.320.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		115.000.000		114.417.050
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Nias	100.000.000	100	99.440.000
02	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Nias	Terlaksananya pemrosesan usul kenaikan pangkat, KGB, DP3/SKP, DUK dan inventarisasi daftar hadir PNS lingkup Setda Kab. Nias	15.000.000	100	14.977.050
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		475.651.200		406.326.070
01	Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/ Sosialisasi di Luar Daerah	Tersedianya biaya/kontribusi untuk mengikuti diklat, kursus, bimtek/workshop/sosialisasi luar daerah (25 Orang)	131.500.000	100	101.250.000
02	Penilaian Kecamatan/Camat Terbaik	Terlaksananya penilaian kecamatan/camat terbaik	80.000.000	100	78.326.070
03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya/kontribusi untuk mengikuti bimtek/diklat (51 Orang)	264.151.200	100	226.750.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		489.000.000		458.409.410
01	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Laporan Tahunan SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2015 (1 Dokumen)	6.000.000	100	5.995.000
02	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	LPPD & LKPJ Bupati Nias Akhir Tahun Anggaran 2015 Setda Kab. Nias (2 Dokumen)	3.500.000	100	3.493.490
03	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Renja SKPD (1 Dokumen)	18.500.000	100	18.301.150
04	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	Dokumen Renja SKPD Sekretariat Daerah Kab. Nias (1 Dokumen)	15.000.000	100	14.894.000
05	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias	Dokumen laporan Kinerja Pemerintah Kab. Nias (1 Dokumen)	40.000.000	100	38.460.250
06	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen Perjanjian Kerja di Lingkungan Kab. Nias (1 Dokumen)	40.000.000	100	37.044.420
07	Penyusunan Renstra SKPD	RENSTRA SKPD Sekretariat Darah Kab. Nias Tahun 2016-2021 (1 Dokumen)	35.000.000	100	28.904.315
08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab Nias	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab Nias (1 Dokumen)	40.000.000	100	37.108.855
09	Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kab. Nias	Dokumen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kab. Nias (1 Dokumen)	30.000.000	100	28.727.370
10	Penyusunan Laporan Kegiatan Hari-hari Bulanan Bupati Nias	Dokumen Laporan Kegiatan Hari-hari Bulanan Bupati Nias	35.000.000	100	33.709.100
11	Penyusunan Memori Jabatan Bupati Nias Periode 2011-2016	Memori Jabatan Bupati Nias periode 2011-2016 (1 Dokumen)	40.000.000	100	38.139.150
12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Nias	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Bupati Nias (1 Dokumen)	31.000.000	100	29.624.535
13	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kab. Nias Tahun 2017-2021	Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kab. Nias Tahun 2017-2021 (1 Dokumen)	25.000.000	100	24.843.200
14	Fasilitasi kunjungan kerja Bupati Nias/Wakil Bupati Nias ke Kecamatan di Kab. Nias	Kunjungan kerja Bupati Nias/Wakil Bupati Nias (4 Kecamatan : Kec. Gido, Hiliduho, Hiliserangkai dan Idanogawo)	60.000.000	100	59.640.500
15	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada SKPD Berkinerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	SKPD Berkinerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	70.000.000	100	59.524.075
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.995.500
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Tersedianya biaya dalam mengikuti Pameran Pembangunan	15.000.000	100	14.995.500
	URUSAN PERTANAHAN				
07	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		400.000.000		342.070.555
01	Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya Pensertifikatan tanah milik Pemkab Nias sebanyak 27 Sertifikat	150.000.000	100	97.437.650
02	Identifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya identifikasi tanah milik Pemkab Nias sebanyak 62 Lokasi	40.000.000	100	39.600.000
03	Perintisan Batas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias yang Terletak di Ononomolo I Lot Kec. Gunungsitoli Selatan dhi. Lokasi Kantor Bupati Nias dan DPRD Kabupaten Nias	Terlaksananya perintisan batas tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias yang terletak di Desa Ononomolo I Lot. Kecamatan Gunungsitoli Selatan dhi. Lokasi Kantor Bupati Nias dan DPRD Kab. Nias	20.000.000	100	19.474.300
04	Pemasangan Pilar Batas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias	Pemasangan pilar batas tanah milik Pemerintah Kab. Nias sebanyak 200 Pilar	60.000.000	100	59.999.205

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
05	Survey Lokasi Tanah yang Akan Dihilangkan Kepada PemKab Nias	Terlaksananya survey lokasi tanah yang akan dihilangkan kepada Pemkab Nias sebanyak 62 lokasi	40.000.000	100	39.275.000
06	Fasilitasi Penyelesaian Masalah-masalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias	Terselesaikannya masalah-masalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 4 kasus	40.000.000	100	38.270.700
07	Satuan Tugas Penanganan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Nias	Terbentuknya Satgas Penanganan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Nias	50.000.000	100	48.013.700
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
08	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		115.000.000		107.491.100
01	Kuliah Agama PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, BKD dan BPKAD Kabupaten Nias	Terlaksananya kuliah agama bagi PNS dilingkungan Sekretariat Daerah, BKD dan BPKAD Kabupaten Nias (12 kali)	35.000.000	100	33.775.000
02	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar Keagamaan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar Keagamaan (MTQ/STQ, PHBI, Paskah, Safari Ramadhan 1437/2016 M, Buka Puasa Bersama, Halal Bil Halal Idul Fitri, PESPARAWI, Natal Oikumene, LPPSN, Ramah Tamah Tahun Baru)	80.000.000	100	73.716.100
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
09	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		1.015.000.000		930.308.640
01	Fasilitasi Tamu Pemerintah Daerah	Tersedianya biaya keperluan fasilitasi tamu Pemerintah Kabupaten Nias	120.000.000	100	69.415.000
02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya biaya penyediaan kebutuhan harian rumah tangga Bupati/Wakil Bupati Nias	360.000.000	100	360.000.000
03	Pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintahan Kab Nias	Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintahan Kabupaten Nias sebanyak 2 kali	70.000.000	100	65.509.400
04	Pemrosesan Pengangkatan /Penghunjungan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya pemrosesan pengangkatan/ penghunjungan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Anggaran, beserta perubahannya (1 Kegiatan)	10.000.000	100	9.996.000
05	Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Tahun 2016 sebanyak 3 kali	60.000.000	100	59.981.575
06	Fasilitasi Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Nias Terpilih Periode 2016-2021	Tersedianya biaya fasilitasi administrasi, transportasi dan akomodasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih beserta keluarga (Orang tua, Istri dan anak anak), FORKOPIMDA Kab. Nias, Tokoh masyarakat/agama yang mengikuti acara pelantikan Bupati/Wakil bupati Nias terpilih periode 2016-2021 di Ibukota Provinsi Sumatera Utara	100.000.000	100	95.421.425
07	Pengelolaan dan Penatalayanan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Tersedianya biaya pelayanan keprotokolan Pemerintahan: Pengadaan kalung bunga, pengadaan plakat (21 Unit), bantuan kepada pembawa acara kegiatan, penerima tamu, penata tempat, sanggar seni tari, pengalun bunga pada acara pada kegiatan Pemkab. Nias, sewa sound system, dan keyboard.	55.000.000	100	44.900.000
08	Pelaksanaan Rapat Forum SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Terlaksananya Rapat Forum SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebanyak 1 kali	25.000.000	100	24.808.140
09	Pelaksanaan Temu Pisah FORKOPIMDA / Muspida Plus Kabupaten Nias	Tersedianya biaya pelaksanaan Temu Pisah FORKOPIMDA/Muspida Plus Kabupaten Nias (1 kali)	45.000.000	100	39.058.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
10	Fasilitasi Keprotokolan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias	Tersedianya biaya pelayanan Keprotokolan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias	100.000.000	100	98.795.600
11	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA. 2017	Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 (1 Dokumen)	45.000.000	100	38.977.500
12	Fasilitasi Sekretariat Forkada se-kepulauan Nias	Terfasilitasi Administrasi Sekretariat Forkada se - Kepulauan Nias	25.000.000	100	23.446.000
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		976.500.000		870.972.364
01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa APBD Kabupaten Nias	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa APBD Kab. Nias TA.2016	80.000.000	100	75.764.600
02	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja TA 2017	Peraturan Bupati Nias tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias TA. 2017 (1 Dokumen)	95.000.000	100	77.312.925
03	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja TA. 2016	Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias tentang Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias TA. 2016 (3 Dokumen)	43.000.000	100	37.964.850
04	Penghimpunan Data, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Nias	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Nias Tahun 2016 (1 Dokumen)	50.000.000	100	49.777.700
05	Fasilitasi Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kab. Nias	Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Kab. Nias TA. 2016 (1 Dokumen)	50.000.000	100	43.491.800
06	Menghimpun dan Mengevaluasi Data Laporan Kegiatan Bidang Perekonomian	Laporan Kegiatan Bidang Perekonomian (1 Dokumen)	20.000.000	100	19.634.000
07	Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) di Wilayah Kabupaten Nias	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) di Wilayah Kabupaten Nias (1 Kegiatan)	75.000.000	100	70.626.300
08	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 (1 Kegiatan)	75.000.000	100	70.248.650
09	Koordinasi, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM bersubsidi di Wilayah Kabupaten Nias	Terlaksananya Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM bersubsidi di Wilayah Kabupaten Nias (1 Kegiatan)	35.000.000	100	31.410.300
10	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nias	Laporan Inflasi Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 (1 Dokumen)	50.000.000	100	47.206.589
11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Ranperda tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (1 Dokumen)	50.000.000	100	18.883.900
12	Penyusunan Naskah Akademik tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias	Naskah Akademik tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias (1 Dokumen)	30.000.000	100	29.698.000
13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias	Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Nias tentang Perusahaan daerah Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias (1 Dokumen)	50.000.000	100	48.930.300
14	Verifikasi dan Evaluasi Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang diusulkan oleh Organisasi Keagamaan	Terlaksananya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang diusulkan oleh Organisasi Keagamaan di Kab. Nias TA 2016	173.000.000	100	151.190.700

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
15	Penyusunan Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan wilayah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Tim Penggerak PKK serta Dharma Wanita Persatuan di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias TA. 2017	Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan wilayah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas oleh pejabat, pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (tp-PKK) serta Dharma Wanita persatuan di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017 (1 Dokumen)	40.500.000	100	40.442.250
16	Pemilihan Calon Direktur PDAM Tirta Umu Kabupaten Nias Periode 2016-2020	Terpilihnya Direktur PDAM Tirta Umu Kabupaten Nias Periode 2016-2020	30.000.000	100	29.364.350
17	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan Perda No 2 Tahun 2010 tentang PD Pasar Ya'ahowu	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Ya'ahowu (1 Dokumen)	30.000.000	100	29.025.150
11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		510.000.000		429.305.870
01	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa	Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa di Kab. Nias (1 Dokumen)	50.000.000	100	49.599.250
02	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa	Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kab. Nias (1 Dokumen)	50.000.000	100	41.329.650
03	Penyusunan Naskah Akademik tentang Penataan Desa di Kabupaten Nias	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab. Nias tentang Penataan Desa di Kab. Nias (1 Dokumen)	30.000.000	100	29.918.500
04	Penyusunan Ranperda Kabupaten Nias tentang Penataan Desa di Kabupaten Nias	Rancangan Peraturan Daerah Kab. Nias tentang Penataan Desa di Kab. Nias (1 Dokumen)	75.000.000	100	63.881.450
05	Program Legislasi Daerah	Terlaksananya Program Legislasi Daerah dilingkup Pemerintah kab. Nias	60.000.000	100	55.986.700
06	Eksaminasi Terhadap Berbagai Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Nias	Terlaksananya Eksaminasi terhadap berbagai rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perda Kab. Nias sebanyak 2, Perbup Nias sebanyak 10 dan Keputusan Bupati Nias sebanyak 300)	70.000.000	100	68.217.620
07	Evaluasi Peraturan Desa	Terlaksananya evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Nias sesuai peraturan perundang-undangan	30.000.000	100	0
08	Asistensi Peraturan Daerah Kabupaten Nias	Terlaksananya proses pembahasan rancangan Perda Kab. Nias di DPRD Kab. Nias dan Peraturan Bupati Nias	70.000.000	100	65.035.150
09	Pengawasan Terhadap Hukum Daerah Bawahan	Terlaksananya Pengawasan terhadap produk hukum daerah bawahan yang diterbitkan oleh Camat dan Kepala Desa	25.000.000	100	23.881.000
10	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Nias	Peraturan Bupati Nias tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Nias (1 Dokumen)	50.000.000	100	31.456.550
12	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah		1.878.000.000		1.757.415.313
01	Persiapan Pelaksanaan P3D untuk Daerah Otonom Baru	Terlaksananya P3D untuk Daerah Otomomi Baru (Kota Gunungsitoli) sebanyak 1 Kali	35.000.000	100	32.557.900
02	Pemetaan Urusan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Nias berdasarkan Revisi PP 41 Tahun 2007	Pemetaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Nias berdasarkan revisi PP 41 Tahun 2007 (1 Dokumen)	117.250.000	100	113.611.240
03	Penyusunan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kabupaten Nias	Dokumen Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kabupaten Nias (1 Dokumen)	50.000.000	100	44.841.640

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
04	Penyusunan Ranperda tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Nias	Ranperda tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Nias (1 Dokumen)	183.500.000	100	152.190.440
05	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah	Perbup tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 (1 Dokumen)	40.000.000	100	35.170.700
06	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Nias sebanyak 1 Kali	99.250.000	100	41.656.430
07	Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias	Naskah Akademik Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias (1 Dokumen)	30.000.000	100	28.934.530
08	Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (1 Dokumen)	25.000.000	100	24.769.330
09	Penyelenggaraan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Nias	Terselenggaranya Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nias (1 Kegiatan)	215.000.000	100	205.961.583
10	Penyelenggaraan Kegiatan POKJA Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nias	Tersedianya honorarium Pokja ULP Kab. Nias (1 Tahun)	978.000.000	100	978.000.000
11	Penyusunan Buku Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nias Tahun 2016	Buku Daftar Paket Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nias Tahun 2016 (1 Dokumen)	20.000.000	100	19.953.590
12	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias	Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias (1 Dokumen)	35.000.000	100	34.021.190
13	Persiapan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Nias Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Nias Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	50.000.000	100	45.746.740
13	Program Penegakan Hukum		325.000.000		284.189.482
01	Pelayanan Pendampingan Hukum kepada Aparat Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya pendampingan dalam proses penyelidikan/penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Nias dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan	30.000.000	100	29.145.500
02	Penyuluhan Hukum di Wilayah Kabupaten Nias	Terlaksananya penyuluhan hukum di Kecamatan Ulugawo dan Kecamatan Ma'u	80.000.000	100	73.323.910
03	Menjalankan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Tersedianya biaya menjalankan Perkara Perdata (4 Perkara) dan Tata Usaha Negara	50.000.000	100	42.357.592
04	Pembentukan Tim Fasilitas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) Kab. Nias	Terbentuknya Tim Fasilitas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) Kab. Nias (1 Kegiatan)	45.000.000	100	36.698.100
05	Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kabupaten Nias	Terbentuknya Tim Fasilitas Pembentukan Desa Sadar Hukum di Wilayah Kabupaten Nias (1 Desa di Kec. Ma'u)	50.000.000	100	40.232.680
06	Pembentukan Sekretariat Bersama Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum Kepada Aparat Pemerintah Desa	Terbentuknya Sekretariat Bersama Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Hukum Kepada Aparat Pemerintah Desa	70.000.000	100	62.431.700

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
14	Program Pendokumentasian Produk Hukum		95.000.000		90.324.950
01	Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias dan Berita Daerah Kabupaten Nias	Terlaksananya Pengundangan Perda Kabupaten Nias dalam Lembaran Daerah dan pengundangan Peraturan Bupati Nias dalam Berita Daerah	50.000.000	100	46.487.250
02	Penggandaan Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias	Terlaksananya penggandaan Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias.	45.000.000	100	43.837.700
15	Program Penataan Administrasi Pemerintahan		110.000.000		106.861.210
01	Pembakuan Nama Rupabumi Kab. Nias	Tersedianya Data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur rupabumi di Kab Nias (1 Dokumen)	60.000.000	100	58.764.600
02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nias	Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nias (1 Dokumen)	50.000.000	100	48.096.610
16	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga		67.100.000		64.524.166
01	Pelaksanaan SKJ di lingkungan Sekretariat Daerah, BKD dan BPKAD Kabupaten Nias	Terlaksananya SKJ di lingkungan Sekretariat Daerah, BKD dan BPKAD Kabupaten Nias (24 kali)	67.100.000	100	64.524.166
17	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		40.000.000		24.985.900
01	Penegasan Batas Daerah Kabupaten Nias	Terlaksananya penegasan Batas Daerah Kabupaten Nias	40.000.000	100	24.985.900
18	Program Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa		60.000.000		59.077.450
01	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya penetapan dan penegasan Batas Desa di Kab. Nias	60.000.000	100	59.077.450
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		230.000.000		212.380.800
01	Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa	Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa sebanyak 1 (satu) kali	50.000.000	100	49.370.950
02	Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kab. Nias	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kab. Nias sebanyak 1 (satu) Kali	80.000.000	100	78.079.700
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kab. Nias (10 Kecamatan)	40.000.000	100	35.998.000
04	Pelatihan dan Pembekalan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi Kepala Desa Terpilih TA. 2016 se-Kab. Nias	Terlaksananya Pelatihan dan Pembekalan tugas Pokok dan fungsi bagi kepala Desa Terpilih TA. 2016 se-Kab. Nias 1 (satu) kali	60.000.000	100	48.932.150
20	Program Pemilihan Kepala Desa		1.300.000.000		624.775.175
01	Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias	Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa di Kab. Nias TA. 2016	1.250.000.000	100	576.393.575
02	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih TA 2016 (73 Orang)	50.000.000	100	48.381.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		152.550.000		132.296.900
01	Pelatihan SPSE Versi 4, SIKap, E-Kontrak Non E-Tendering, E-Lelang cepat dan E-Purchasing	Terselenggaranya Pelatihan SPSE Versi 4, SIKap, E-Kontrak Non E-Tendering, E-Lelang cepat dan E-Purchasing kepada PPK, ULP dan Pejabat Pengadaan (1 Kegiatan)	25.000.000	100	24.889.100
02	Penataan Piranti Pendokumentasian	Piranti Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias (Penyediaan gambar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Cetak gambar digital dan bantuan kepada personil pendokumentasian pada kegiatan Pemkab Nias)	28.550.000	100	28.550.000
03	Pengelolaan dan Penataan PPID	Tersedianya Informasi, Data dan Dokumentasi Pemerintah Kab. Nias	20.000.000	100	19.798.000
04	Sosialisasi Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Nias	Terbentuknya PPID Utama dan Pembantu serta terlaksananya Informasi yang terbuka sesuai dengan UU No. 14 tentang KIP	50.000.000	100	33.509.200
05	Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Kab. Nias	Terlaksananya pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu serta terlaksananya informasi yang terbuka sesuai dengan UU No. 14 tentang KIP	29.000.000	100	25.550.600
22	Program Sistem Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi		373.280.000		361.729.000
01	Pengadaan Jasa Internet Service Provider (ISP)	Tersedianya biaya Jasa Internet Service Provider (ISP) sebesar 10 MBps	269.280.000	100	269.280.000
02	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pendukung Sandi dan Telekomunikasi	Terlaksananya pemanfaatan dan pemeliharaan Perangkat Sandi dan Telekomunikasi (peralatan sandi, radio rig dan SSB)	6.000.000	0	0
03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Perangkat Internet/Website	Terlaksananya Akses Internet/Website di Lingkup Setda Kab. Nias	58.000.000	100	53.399.000
04	Pembuatan Aplikasi Sistem Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias	Tersedianya biaya pembuatan Aplikasi Sistem Laporan Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias	40.000.000	100	39.050.000
23	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa		729.450.000		630.798.570
01	Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Nias	Tersedianya layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Nias Tahun 2016 (1 Kegiatan)	300.000.000	100	217.494.070
02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kerjasama dengan media massa	264.450.000	100	254.550.000
03	Pelaksanaan Temu Pers	Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (2 Kali)	90.000.000	100	88.196.700
04	Penyusunan Buletin Pemerintah Kabupaten Nias	Tersedianya Buletin "Data Tuwu" Pemkab. Nias (1 Dokumen)	75.000.000	100	70.557.800
	URUSAN PILIHAN				
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
24	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		226.530.000		222.176.185
01	Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Kecamatan Kab. Nias (10 Kecamatan)	65.000.000	100	64.765.110
02	Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kab. Nias	Tersedianya biaya pelaksanaan Sosialisasi Sumber Daya Alam (Kec. Botomuzoi, Hiliduho, Hiliserangkai, Idanogawo dan Bawolato)	91.530.000	100	89.750.395

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[8]
03	Pendataan Potensi Sumber Daya Alam	Tersedianya biaya Pendataan Potensi Sumber Daya Alam (10 Kecamatan)	70.000.000	100	67.660.680
		JUMLAH	23.616.000.000	99,3%	20.835.258.737

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-41
Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias
Tahun Anggaran 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.776.295.000.-		5.158.767.773.-
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko dan materi selama 12 bulan	1.210.000	100%	1.200.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, air, internet dan listrik selama 12 bulan	354.370.000	100%	236.249.537
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/ operasional roda 4 (19 unit) dan roda 2 (36 unit)	63.500.000	100%	10.657.900
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa clining servis (tenaga kebersihan) pada kantor DPRD, Sekretariat DPRD dan rumah Jabatan Ketua DPRD (20 org)	500.550.000	100%	451.900.000
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias selama 12 bulan	100.000.000	100%	88.526.900
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Blanko cetak, fotocopy surat-surat dinas dan fotocopy buku-buku UU, PP, Kepres dan sejenisnya	88.000.000	100%	40.506.800
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat atau komponen peralatan listrik selama 12 bulan	30.000.000	100%	30.000.000
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, majalah, buku-buku UU, PP, Kepres sejenisnya dan buku kerja selama 12 bulan	35.000.000	100%	8.400.000
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Biaya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu-tamu DPRD Kabupaten Nias selama 12 bulan	542.745.000	100%	525.714.000
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Biaya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	3.200.000.000	100%	3.017.709.136
	11 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi/ serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	200.000.000	100%	158.675.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37 orang, honorarium Pejabat/ Staf Pengelola Keuangan 16 orang, honorarium Pendamping Alat-Alat Kelengkapan DPRD 6 orang, honorarium Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa 3 orang, honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 orang, honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang 2 orang, dan honorarium Tenaga Ahli DPRD 6 orang.	660.920.000	100%	589.228.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6.837.816.000		4.068.031.851
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/ operasional roda empat, 12 unit	4.600.000.000	52%	2.332.320.000
	2 Pengadaan Jaringan Internet	Website DPRD Kabupaten Nias, 1 paket	55.000.000	100%	34.000.000
	3 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor antara lain mesin generator set (genset) 1 unit, mesin hitung uang elektrik 1 unit, mesin potong rumput 1 unit, mesin absensi (finger print) 1 unit, mesin potong kayu 1 unit, kain Gorden 1 unit, dispenser 6 unit, televise 12 unit, receiver digital televise 10 unit, personal komputer unit (PC-Unit) 1 unit, wireless N Router 3 unit, laptop 5 unit, meja rapat 24 buah, kursi kerja Pimpinan 5 unit, kursi rapat 29 buah, kamera DSLR 3 unit, sound system dan kelengkapannya 1 paket, AC 1,5 PK 2 unit, AC 1 PK 4 unit, lemari filling cabinet 10 unit, meja penerima tamu 1 unit, printer 12 unit dan scanner uk. F4 3 unit.	692.266.000	100%	652.005.600
	4 Biaya Umum Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan barang/jasa di Setwan (4 kegiatan)	92.500.000	100%	53.667.900
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan Ketua DPRD 1 unit	75.000.000	100%	74.547.000
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung DPRD dan Knator Sekretariat DPRD (1 unit)	200.000.000	100%	198.550.000
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan penyediaan bahan bakar minyak oli dan door smeer untuk mobil dinas dan operasional (kendaraan dinas Pimpinan, Komisi dan operasional Sekwan roda 4 (19 unit), roda 2 (36 unit)	863.050.000	100%	574.324.201
	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan peralatan/perlengkapan gedung kantor DPRD dan Setwan antara lain pemeliharaan laptop, PC-unit, meubelair, sound system, televise, receiver televise, mic conference, AC Split, AC lemari, jaringan internet dan printer (12 bulan)	130.000.000	100%	90.735.000
	9 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Pemeliharaan dan penyediaan bahan bakar minyak oli mesin genset (12 bln)	70.000.000	100%	6.385.000
	10 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Kendaraan dinas/ operasional roda dua, 2 unit	60.000.000	100%	51.497.150
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		407.500.000		378.012.250
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, antara lain PSR 25 stel, PDH 25 stel, PSH 50 stel.	407.500.000	100%	378.012.250
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		262.550.000		238.917.100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur/ PNS Setwan dalam mengikuti kegiatan Bimtek, Diklat, Seminar kursus dan work shop di luar daerah 24 orang	262.550.000	100%	238.917.100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000		26.931.600
1	Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2017, 1 dokumen	5.000.000	100%	4.450.000
2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2015, 1 dokumen	3.500.000	100%	3.250.000
3	Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Renstra SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021, 1 dokumen	15.000.000	100%	10.085.800
4	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Laporan Tahunan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2015, 1 dokumen	6.000.000	100%	5.995.800
5	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	LPPD dan LKPJ SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Tahun 2015, 2 dokumen	3.500.000	100%	3.150.000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		10.000.000		8.119.000
1	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Pameran pembangunan tentang perkembangan dan hasil capai kegiatan SKPD, 1 kali kegiatan	10.000.000	100%	8.119.000
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		10.568.837.000		8.340.685.137
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rapat-rapat pembahasan Ranperda oleh DPRD (17 Ranperda)	1.116.864.000	100%	1.067.160.100
2	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	--	-	0%	-
3	Kegiatan Reses	Kegiatan reses DPRD Kabupaten Nias, 3 kali	870.345.000	100%	622.920.000
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pendalaman tugas bagi Pimpinan/Anggota DPRD di luar daerah (2 kali)	754.900.000	100%	733.140.400
5	Kegiatan Panitia-Panitia Khusus DPRD	Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD ke luar daerah sebanyak 7 kali	2.592.479.000	100%	1.771.209.891
6	Kegiatan Badan Kehormatan DPRD	Kunjungan Kerja Badan Kehormatan DPRD ke luar daerah sebanyak 2 kali	310.292.000	100%	302.191.800
7	Kegiatan Komisi-Komisi DPRD	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD ke luar daerah sebanyak 3 kali	2.593.043.000	100%	2.366.159.488
8	Kegiatan Badan Musyawarah	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah DPRD ke luar daerah sebanyak 2 kali	506.500.000	100%	352.086.246
9	Kegiatan Badan Anggaran	Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD ke luar daerah sebanyak 2 kali	704.452.000	100%	415.142.693
10	Penyusunan Program dan Rencana Kerja DPRD dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Program & Rencana Kerja DPRD dan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 (1 dok)	66.100.000	100%	-
11	Penyediaan Buku-Buku Risalah Rapat dan Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD	Dokumen, arsip risalah rapat dan dokumentasi kegiatan DPRD (12 bulan)	56.000.000	100%	19.000.000
12	Operasional Sekretariat Fraksi-Fraksi DPRD	Kegiatan rapat-rapat fraksi di DPRD, 6 fraksi	289.800.000	100%	68.433.500
13	Survey Besaran Tarif Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias	--	80.000.000	0%	-
14	Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD ke luar daerah sebanyak 2 kali	590.812.000	100%	585.991.019
15	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias beserta Keluarga	--	-	0%	-
16	Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW)	Anggota DPRD Kabupaten Nias Pengganti Antar Waktu (PAW) 1 orang	37.250.000	100%	37.250.000
		JUMLAH	23.895.998.000		18.219.464.711

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-43
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		605.900.000		498.419.280
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya selama 12 bulan	2.000.000	100	1.219.976
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan biaya rekening telepon, air, listrik, faxmili dan internet selama 12 bulan	95.720.000	100	34.903.755
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 (1 unit) dan Roda 2 (11 unit)	4.500.000	100	1.864.500
04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	5.000.000	100	2.839.900
05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan ATK selama 12 bulan	27.000.000	100	26.926.020
06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan	50.000.000	100	48.177.966
07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan	3.000.000	100	2.990.400
08	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (3 SKH)	3.000.000	100	3.000.000
09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dinas, tamu dan harian PNS selama 12 bulan	35.000.000	100	34.841.025
10	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	174.500.000	100	148.665.738
11	Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	82.840.000	100	71.450.000
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya jasa administrasi umum selama 12 bulan	123.340.000	100	121.540.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		156.800.000		142.141.130
01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor AC 2 unit, Laptop 5 unit, printer 2 unit, dan 1 unit proyektor	78.000.000	100	69.715.000
02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	25.000.000	100	24.039.800
03	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4	32.000.000	100	31.978.155
04	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	21.800.000	100	16.408.175
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		28.000.000		22.000.000
01	Mengikuti Kegiatan Diklat Bimtek/ Workshop/ Kursus/ Sosialisasi di luar Daerah	Tersedianya biaya untuk mengikuti oendidikan dan pelatihan formal (5 orang)	28.000.000	100	22.000.000
04	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		18.000.000		17.983.000
01	Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Pendapatan Kab. Nias Tahun 2016	3.000.000	100	2.999.500
02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Dinas Pendapatan Kab. Nias	2.000.000	100	1.999.650
03	Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra Tahun 2016-2021	7.500.000	100	7.486.200
04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	3.500.000	100	3.499.000
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2015	2.000.000	100	1.998.650

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
05	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		15.000.000		14.800.580
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kab. Nias	15.000.000	100	14.800.580
06	Program Pemantauan dan Pengendalian Program di Bidang Pendapatan Daerah		638.000.000		618.390.530
01	Penyampaian SPPT dan DHKP PBB	Terlaksananya Penyampaian SPPT dan DHKP PBB kepada Wajib Pajak	20.000.000	100	19.975.000
02	Penyampaian SKP Daerah kepada WP	Terlaksananya Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	25.000.000	100	24.744.600
03	Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	65.000.000	100	64.850.000
04	Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya evaluasi target PAD di masing-masing UKP	28.000.000	100	27.996.000
05	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Nias.	Tersusunnya Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Nias.	340.000.000	100	329.548.900
06	Rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.	Terlaksananya rapat tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	30.000.000	100	27.317.800
07	Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Tahun 1999 - 2009.	Terlaksananya penelitian dan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah	100.000.000	100	95.424.140
08	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nias	Tersusunnya Peraturan Bupati Nias tentang Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Nias	30.000.000	100	28.534.090
07	Program Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi		247.000.000		244.118.050
01	Rapat Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Rapat Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (1 Keg)	30.000.000	100	29.678.000
02	Penyusunan Data Setoran PAD dan Pengendalian Benda Berharga di UKP PAD.	Terlaksananya evaluasi target PAD di masing-masing UKP	32.000.000	100	32.000.000
03	Monitoring dan Verifikasi SKHPK/ SKHPL Pemanfaatan Kios/Lods Pasar Beringin dan Pasar Ex Gudang Garam serta Pasar Tradisional di Kecamatan Idanogawo, Bawolato dan Kecamatan Hiliduho.	Terlaksananya monitoring dan verivikasi SKHPK/SKHPL pemanfaatan kios/losd	45.000.000	100	44.949.400
04	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Kios/ Lods Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kab. Nias.	Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan kios/losd pasar tradisional	45.000.000	100	44.770.800
05	Penyesuaian dan Pengendalian Benda Berharga di Kecamatan	Terlaksananya penyesuaian data setoran PAD dan pengendalian Benda Berharga di Kecamatan	35.000.000	100	34.892.000
06	Uji Petik Pemungutan Retribusi di Pasar Pekan.	Terlaksananya uji petink pemungutan retribusi di pasar/pekan	35.000.000	100	34.827.850
07	Pelaksanaan Pengawasan dan Verifikasi Data Wajib Pajak PBB - P2.	Terlaksananya pengawasan dan verifikasi data wajib pajak PBB P2	25.000.000	100	23.000.000
08	Program Pendataan dan Pendaftaran Subjek/ Objek Pajak/ Retribusi Daerah		85.000.000		77.832.240
01	Perhitungan dan Penetapan Pajak/ Retribusi Daerah.	Terlaksananya Perhitungan dan Penetapan Pajak/ Retribusi daerah	25.000.000	100	24.963.500
02	Sosialisasi Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kab. Nias	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Nias tentang penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Nias	60.000.000	100	52.868.740

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar/Pekan		180.000.000		177.813.620
01	Pendataan dan Peremajaan Objek/Subjek PAD	Tertaksananya Pendataan dan Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak/Retribusi	40.000.000	100	39.973.600
02	Pelaksanaan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat tentang Pajak Reklame.	Tertaksananya pelayanan langsung kepada Masyarakat tentang Pajak Reklame	30.000.000	100	29.191.700
03	Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Tertaksananya Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.000.000	100	34.988.320
04	Pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Nias	Tertaksananya penataan administrasi Pengelolaan PBB P2 Kabupaten Nias	75.000.000	100	73.660.000
		JUMLAH	1.973.700.000		1.813.498.430

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel 4-65
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Statistik
yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kab. Nias
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		372.500.000		364.610.444
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan perangko dan benda-benda pos lainnya termasuk biaya paket pengiriman surat-surat dinas selama 12 bulan	1.500.000	100	1.500.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya rekening telepon, faximile, air dan listrik kantor selama 12 bulan	15.000.000	100	9.591.494
	03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pebbaikan komputer, mesin tik, meja+kursi, laptop dll selama 12 bulan	10.000.000	100	9.987.400
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia biaya Alat Tulis Kantor untuk kelancaran tugas di BPPS selama 12 bulan	17.000.000	100	16.980.600
	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya biaya penggandaan/fotokopi buku-buku, petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll selama 12 bulan	7.500.000	100	7.450.000
	06 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya selama 12 bulan	5.000.000	100	4.986.500
	07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya biaya alat kebersihan kantor selama 12 bulan	10.000.000	100	9.779.500
	08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	5.000.000	100	4.910.000
	09 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat staf, rapat-rapat koordinasi selama 12 bulan	25.000.000	100	24.974.950
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	120.000.000	100	120.000.000
	11 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Monitoring/survey/pengawasan evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	60.000.000	100	60.000.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium satuan pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan	96.500.000	100	94.450.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		227.220.000		220.681.066
	01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional sebanyak 4 unit	80.000.000	100	76.732.000
	02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan printer, filing cabinet, finger print, laptop, kursi sice	71.000.000	100	68.003.850
	03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	10.000.000	100	9.928.700
	04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sebanyak 1 unit	37.220.000	100	37.167.226
	05 Rehabilitasi Sedang/ berat Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/ Operasional yang direhab 1 unit	25.000.000	100	24.856.800
	06 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Genset	Mesin Genset yang dipelihara 1 unit	4.000.000	100	3.992.490
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		30.000.000		30.000.000
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti diklat, bimtek, lokakarya dan seminar dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur sebanyak 6 orang	30.000.000	100	30.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.500.000		13.420.750
01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	1 Dokumen Renja SKPD	2.500.000	100	2.487.200
02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja SKPD	1.500.000	100	1.500.000
03	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD	5.000.000	100	4.958.350
04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen laporan tahunan SKPD	3.000.000	100	2.975.200
05	Penyusunan LPPD SKPD	1 Dokumen LPPD SKPD	1.500.000	100	1.500.000
05	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.997.000
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	14.997.000
	URUSAN STATISTIK				
06	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		320.000.000		317.235.775
01	Penyusunan buku Nias Dalam Angka (NDA)	Buku Nias Dalam Angka (NDA)	70.000.000	100	69.680.050
02	Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)	Buku PDRB Kabupaten Nias	50.000.000	100	49.579.800
03	Penyusunan Buku Indeks Harga Bahan Konstruksi dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IHBK-IKK)	Buku IHBK-IKK	50.000.000	100	49.730.150
04	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias	Buku IPM Kabupaten Nias	50.000.000	100	49.693.500
05	Penyusunan Buku Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Nias	Buku ICOR	50.000.000	100	49.743.900
06	Penyusunan Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kabupaten Nias	Buku Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kab. Nias	50.000.000	100	48.808.375
07	Program Program Pengkajian dan Penelitian		320.000.000		275.566.800
01	Fasilitasi Tim Kelompok Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pendidikan	Adanya penelitian tentang issue penting di bidang Pendidikan di Kabupaten Nias	70.000.000	100	68.721.700
02	Penelitian tentang Unsur Hara Tanah di Kabupaten Nias	Adanya penelitian tentang Unsur Hara Tanah di Kabupaten Nias	150.000.000	100	148.358.700
03	Fasilitasi Pembentukan Dewan Riset Daerah	Terbentuknya Dewan Riset Daerah Kab. Nias	50.000.000	-	10.167.600
04	Fasilitasi Pemrosesan Penerbitan Izin Penelitian	Terlaksananya Penerbitan Izin Penelitian 100 izin	20.000.000,00	100	18.318.800
	JUMLAH		1.298.220.000	100,00	1.236.511.835

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-47
Realisasi Program dan kegiatan Bidang Pengawasan Kabupaten Nias
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		349.220.000	100	307.154.561
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan materai, perangko, dan jasa surat menyurat kantor selama 12 bulan	3.000.000	100	960.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya rekening listrik, rekening fax, dan rekening air kantor selama 12 bulan	16.220.000	100	13.825.619
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pengurusan/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 sebanyak 9 unit	5.500.000	100	2.109.680
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	25.000.000	100	24.937.472
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya formulir, buku dan dokumen selama 12 bulan	10.000.000	100	10.000.000
	06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	8.000.000	100	4.710.590
	07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan	6.500.000	100	6.500.000
	08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan sebanyak 2 SKH selama 12 bulan	5.000.000	100	4.805.000
	09 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu kantor selama 12 bulan	25.000.000	100	24.995.500
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	145.000.000	100	137.865.700
	11 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	30.000.000	100	9.775.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terpenuhinya pembayaran honorarium pengguna anggaran, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara gaji, pejabat pengadaan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang serta honor operator SIPKD selama 12 bulan	70.000.000	100	66.670.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		186.200.000	100	182.641.185
	01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya laptop 5 unit, lemari arsip 2 unit, filling cabinet 5 unit, kipas angin 2 unit, printer 2 unit, UPS/Stabilizer 1 unit, hardisk eksternal 1 unit	76.200.000	100	72.676.181
	02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehabilitasi gedung kantor 1 unit	50.000.000	100	49.973.369
	03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda-4 yang mendapat pemeliharaan sebanyak 1 (satu) unit BB 238 V	37.000.000	100	36.999.635
	04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan laptop, printer, AC, mesin fotocopy	20.000.000	100	19.992.000
	05 Pemeliharaan dan pengoperasian mesin genset	Mesin generator yg dipelihara dan dioperasikan selama 12 bulan	3.000.000	100	3.000.000
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		48.000.000	100	38.610.320
	01 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA/DPPA tahun anggaran 2016 dan Renja SKPD Inspektorat Kab.Nias Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen	3.000.000	100	2.996.680
	02 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP Inspektorat Kabupaten Nias TA 2015 sebanyak 1 dokumen	2.000.000	100	1.950.000
	03 Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Nias 2016-2021 sebanyak 1 dokumen	7.500.000	100	7.499.200

NO		PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU	REALISASI	
				ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersusunnya Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Nias TA 2015 sebanyak 1 dokumen	3.500.000	100	3.482.000
	05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya LPPD dan LKPJ Inspektorat Kabupaten Nias TA 2016 sebanyak 2 dokumen	2.000.000	100	1.999.440
	06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan	Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Nias TA 2017 sebanyak 1 dokumen	30.000.000	100	20.683.000
		URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
04		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		1.656.800.000	100	1.505.385.468
	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler yang meliputi Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Pengelolaan Keuangan, Aspek SDM dan Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah sebanyak 64 LHP	612.800.000	100	524.360.786
	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus/Kasus ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dan pemeriksaan Sertijab sebanyak 37 LHP	200.000.000	100	191.365.000
	03	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI 1 LHP, Inspektorat Provinsi 1 LHP dan Inspektorat Kabupaten 1 LHP	54.000.000	100	44.604.886
	04	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Tersusunnya Laporan Koordinasi sebanyak 1 (satu) laporan	80.000.000	100	79.736.800
	05	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Tersedianya data temuan, rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 1 laporan	20.000.000	100	18.951.200
	06	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Penilaian SPIP sebanyak 4 SKPD (Dinas Perhubungan, Kantor Perpustakaan, BPPT, Dinas Pendapatan)	25.000.000	100	24.598.100
	07	Pemeriksaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dana BOS sebanyak 10 LHP	80.000.000	100	77.300.000
	08	Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer Lainnya sebanyak 4 LHP	70.000.000	100	64.475.000
	09	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias dan Penilaian Laporan Kinerja SKPD Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	Tersusunnya Laporan Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2015 sebanyak 7 laporan dan Penilaian LAKIP sebanyak 7 SKPD (Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catpil, BPBD, RSUD Gunungsitoli, Dinas Perhubungan, Kantor Kec. Hiliduho, Kantor Kec. Gido)	45.000.000	100	27.148.700
	10	Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kabupaten	Rapat Koordinasi/Tindak Lanjut Pengawasan Tingkat Kabupaten Nias sebanyak 1 kali	75.000.000	100	69.996.286
	11	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias TA 2015 sebanyak 1 laporan	35.000.000	100	32.402.000
	12	Operasional Tim TPKN/TP/TGR Kabupaten Nias	Terlaksananya Rapat Tim TPKN/TP/ TGR sebanyak 1 kali	25.000.000	100	20.998.600
	13	Monitoring kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Terhimpunnya laporan hasil monitoring kepatuhan pegawai untuk penyampaian LHKASN dari pejabat setingkat Eselon III dan IV sebanyak 60 orang dari jumlah pejabat setingkat Eselon III dan IV wajib laporan sebanyak 556 pegawai dengan persentase 10,79 %	35.000.000	100	34.932.010
	14	Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya rapat penanganan ijazah palsu ASN sebanyak 2 kali	25.000.000	100	22.588.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	15	Pemeriksaan Dana Desa	200.000.000	100	199.125.000
	16	Reviu RKA SKPD dan PPKD	50.000.000	100	47.879.400
	17	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi	25.000.000	100	24.923.700
05	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		180.000.000	100	166.936.910
	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	150.000.000	100	145.020.510
	02	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengawasan Fungsional	30.000.000	100	21.916.400
06	Program Pembinaan Ketaatan PNS Membayar Pajak-Pajak Pribadi		32.000.000	100	31.901.400
	01	Pengelolaan, Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/PNS dan Guru-guru Gol. III/a ke atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	32.000.000	100	31.901.400
07	Program Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi		20.000.000	0	-
	01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)	20.000.000	0	-
		JUMLAH	2.472.220.000		2.232.629.844

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-51
Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2016

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	KEUANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		693.490.000		658.545.255
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangko, benda-benda pos lainnya dan biaya paket pengiriman surat-surat dinas selama 12 bulan	4.000.000	100	3.997.250
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.000.000	100	-
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang mendapat pengurusan perizinan, yaitu roda dua (4 unit) dan roda empat (2 unit)	2.500.000	100	1.992.570
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Perlengkapan alat tulis kantor selama 12 bulan	50.000.000	100	49.966.495
	05 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	3.450.000	100	3.450.000
	06 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	15.000.000	100	14.851.800
	07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tagihan surat kabar 2 SKM dan 2 SKH.	4.000.000	100	3.150.000
	08 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman Rapat-Rapat Dinas, Staf dan Tamu selama 12 bulan	34.000.000	100	28.495.640
	09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk mengikuti rapat konsultasi bagi pegawai ke Luar Daerah selama 12 bulan	400.000.000	100	376.411.500
	10 Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dan koordinasi Dalam Daerah selama 12 bulan	100.000.000	100	99.050.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya biaya honor PNS yang mengelola program berdasarkan beban kerja selama 12 bulan	78.540.000	100	77.180.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		395.540.000		331.876.616
	01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan & perlengkapan Kantor dapat disediakan berupa :		100	
		Laptop/Notebook, 6 unit	96.000.000		84.829.200
		UPS, 4 buah	7.000.000		5.753.400
		Printer, 6 buah	15.000.000		13.973.180
		Server, 1 unit	100.000.000		72.750.000
		Filling Cabinet/lemari besi, 3 buah	10.800.000		10.469.850
		Keyboard komputer 4 buah, dan mouse 10 buah.	3.200.000		3.144.300
		Meja biro 6 unit	28.000.000		22.690.250
		A C 1 unit	7.100.000		7.024.500
		kursi rapat rangka besi 24 buah	10.710.000		10.704.000
		Finger print 1 unit	4.000.000		3.991.700
	02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda-4, sebanyak 3 unit	85.730.000		70.671.128
	03 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor (Komp, Laptop, AC, TV, Parabola, Mesin Fotokopi, Printer)	28.000.000	100	25.875.108
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		130.000.000		109.987.000
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya mengikuti kegiatan Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luar Daerah sebanyak 26 orang	130.000.000	100	109.987.000
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		55.000.000		52.701.745
	01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Renja BKD Kabupaten Nias 2017, 1	5.000.000	100	4.986.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	KEUANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	02 Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya RENSTRA BKD 2016-2021, 1 dokumen	15.000.000	100	13.113.020
	03 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kerja SKPD Tahun 2015, 1 dokumen	3.500.000	100	3.490.000
	04 Penyusunan Laporan Tahunan	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD 2015, 1 dokumen	6.000.000	100	5.983.800
	05 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya LPPD dan LKPJ SKPD 2015, 2 dokumen	3.500.000	100	3.499.000
	06 Pengelolaan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Tersusunnya LHKPN, 1 dokumen	22.000.000	100	21.629.925
05.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.983.343
	01 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	14.983.343
06.	Program Pendidikan Kedinasan		700.000.000		700.000.000
	01 Bantuan kepada PNS Peserta Diklat	Jumlah aparatur yang mendapat kontribusi untuk mengikuti Diklat PIM II, 2 orang; Diklat PIM III, 8 orang dan Peserta Diklat PIM IV, 10 orang.	700.000.000	100	700.000.000
07.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		4.060.698.600		3.378.564.906
	01 Pemberian Tambahan Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	PNS Tugas Belajar S-1 yang mendapat kontribusi, 3 orang	73.930.000	100	59.330.000
		PNS Tugas Belajar S-2 yang mendapat kontribusi, 16 orang	747.325.000	100	548.087.500
		PNS Tugas Belajar S-3 yang mendapat kontribusi, 4 orang	400.000.000	100	272.595.800
		PNS Tugas Belajar Dokter Spesialis yang mendapat kontribusi, 1 orang	150.000.000	100	106.000.000
	02 Pendaftaran dan Seleksi Calon Mahasiswa Program D-IV Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	Terlaksananya pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Mahasiswa Program D-IV Pekerjaan Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, sebanyak 19 orang	45.000.000	100	43.658.844
	03 Pemrosesan SPMJ dan Daftar Penilaian Kinerja PNS	Terprosesnya SPMJ dan Daftar Penilaian Kinerja PNS	5.000.000	100	4.999.103
	04 Tim Baperjakat Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya kegiatan Tim Baperjakat Pemerintah Kabupaten Nias sebanyak 2 kali	30.000.000	100	27.655.380
	05 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural/ Fungsional	Terlaksananya pelantikan pejabat Struktural/ Fungsional	65.000.000	100	63.718.590
	06 Penyelenggaraan Sumpah/ Janji bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS	Terlaksananya pengangkatan sumpah/janji bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS sebanyak 488 orang.	25.000.000	100	24.708.864
	07 Pemrosesan Surat Pernyataan Pelantikan	Terprosesnya Surat Pernyataan Pelantikan.	2.500.000	100	2.412.850
	08 Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN Pemkab Nias	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang Melanggar Disiplin	35.000.000	100	32.365.540
	09 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK)	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	134.125.000	100	121.571.860
	10 Pengelolaan sistem Aplikasi e-formasi (Kementerian PAN dan RB)	Terlaksananya Pengelolaan sistem Aplikasi e-formasi	20.000.000	100	19.954.690
	11 Pengelolaan dan Pengembangan Website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias	Tersedianya Website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias	25.000.000	100	21.912.080
	12 Penataan jaringan dan Pembekalan Teknis Operator Komputer	Terlaksananya Pembekalan Teknis bagi Operator Komputer	12.000.000	100	11.565.440
	13 Pengelolaan Administrasi Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala	Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS se-Kab. Nias berjumlah 1.426 orang	22.500.000	100	22.500.000
	14 Rapat koordinasi Bidang Kepegawaian	Terlaksananya rapat koordinasi bidang kepegawaian.	65.000.000	100	63.946.030
	15 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.	80.000.000	100	76.282.080

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK %	KEUANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
16	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan usul formasi CPNS	Dokumen Kebutuhan PNS yang ideal, 1 dokumen.	12.000.000	100	11.823.575
17	Seleksi Penerimaan Pegawai ASN Formasi Tahun 2016	Terlaksananya konsultasi Penerimaan Pegawai ASN Formasi Tahun 2016	16.353.600	100	16.353.600
18	Diklat Prajabatan	Keikutsertaan CPNS pada Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I, berjumlah 158 orang.	859.185.000	100	837.496.000
19	Pengelolaan Seleksi Administrasi Pendaftaran Peserta Diklat PIM IV, III dan II	Seleksi Administrasi Pendaftaran Peserta Diklat PIM IV, III dan II sebanyak 21 orang	15.000.000	100	12.383.760
20	Pengelolaan Administrasi dan Pendaftaran PNS Ujian Dinas TK. I dan TK. II	Terprosesnya Administrasi Peserta Ujian Dinas TK. I dan TK. II, sebanyak 57 orang	20.000.000	100	16.394.960
21	Pemberian Tambahan Biaya kepada PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II	Biaya Kontribusi untuk Mengikuti Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II	35.000.000	0	-
22	Pengelolaan dan pemrosesan administrasi Keputusan Bupati Nias tentang Pemberian Tugas Belajar dan Surat Bupati Nias tentang Pemberian Izin Belajar	Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nias tentang pemberian Tugas Belajar sebanyak 5 orang dan Surat Bupati Nias tentang pemberian Izin Belajar sebanyak 21 orang	11.000.000	100	10.200.000
23	Pengelolaan administrasi peningkatan pendidikan	Terprosesnya Administrasi Peningkatan Pendidikan Bagi PNS yang memperoleh Pendidikan yang Lebih Tinggi sebanyak 22 orang	30.000.000	100%	25.243.800
24	Pelayanan Administrasi Pengajuan Usul CPNS menjadi PNS	Terprosesnya Usul CPNS menjadi PNS, sebanyak 383 orang	34.000.000	100%	33.895.469
25	Pemrosesan pengangkatan, pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional tertentu	Terprosesnya pengangkatan, pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional Umum = 132 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu = 58 orang.	30.000.000	100%	29.746.743
26	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, periode April = 211 orang, periode Oktober = 160 orang.	90.000.000	100%	87.836.078
27	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Terprosesnya Administrasi Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang Telah Memenuhi Syarat, sebanyak 31 orang.	35.000.000	100%	34.962.663
28	Tim Terpadu Penertiban dan Pembinaan PNS	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban PNS oleh Tim Terpadu di 10 wilayah kecamatan.	100.000.000		94.849.272
29	Pemrosesan berkas administrasi Calon Pegawai ASN	Terlaksananya konsultasi tindak lanjut Pemrosesan berkas administrasi Calon Pegawai ASN.	125.000.000		64.960.990
30	Pengelolaan Usul Kenpang Pengabdian dan SK Pensiun bagi PNS dan Janda/Duda	Terprosesnya Usul Kenpang Pengabdian dan SK Pensiun bagi PNS dan Janda/Duda, sebanyak 90 orang.	80.000.000		77.679.799
31	Pelayanan Administrasi Pengajuan Usul Pemberian Satya Lencana bagi PNS	Terprosesnya adm. Usul PNS untuk mendapatkan Satya Lencana, sebanyak 133 orang	25.000.000	100%	22.987.774
32	Pemberian Penghargaan kepada PNS Terbaik dan Berprestasi di Lingkungan Pemkab Nias	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada PNS Terbaik dan berprestasi di lingkungan Pemkab Nias	85.000.000	100%	80.867.563
33	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	450.000.000	100%	327.140.256
34	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Tersusunnya Peraturan Bupati Nias tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 1 dokumen.	41.900.000	100%	41.778.513
35	Supervisi dan Pengelolaan Administrasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Terlaksananya Supervisi dan Pengelolaan Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS.	28.880.000	100%	28.699.440
		JUMLAH	6.049.728.600	86,73	5.246.658.865

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4 - 55
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, perangko dan benda pos lainnya keperluan administrasi kantor selama 12 bulan	4.000.000	100	3.995.160
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening pesawat telepon, faximile, air, listrik dan internet selama 12 bulan	25.000.000	100	10.181.454
03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor selama 12 bulan	15.000.000	100	15.000.000
04	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Izin pajak kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 10 unit dan roda empat sebanyak 1 unit	3.400.000	100	1.387.915
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan/fotocopy selama 12 bulan	15.000.000	100	15.000.000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rekening koran dan peraturan-peraturan sebanyak 1 SKH	2.000.000	100	1.488.000
07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan Kantor selama 12 bulan	3.000.000	100	3.000.000
08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kebutuhan rapat-rapat dinas serta tamu kantor selama 12 bulan	12.000.000	100	11.864.000
09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah selama 12 bulan	131.140.000	100	125.033.300
10	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama 12 bulan	132.600.000	100	132.325.000
11	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terbayarkannya honorarium satuan pengelola keuangan SKPD untuk 12 bulan	57.360.000	100	57.360.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan	10.000.000	100	9.806.000
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda-4 (BBM, Pelumas dan services) dengan No. Pol. BB 246 V	32.000.000	100	31.995.000
03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor selama 12 bulan	15.000.000	100	15.000.000
06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 2 unit	40.000.000	100	35.852.000
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti Diklat, Bimtek/Worshop/Kursus/ Sosialisasi Luar sebanyak 9 orang	45.000.000	100	45.000.000
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
01	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen Rencana Kerja SKPD BPPT Kab. Nias	2.500.000	100	2.500.000
02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja BPPT Kab. Nias	1.500.000	100	1.500.000
03	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen laporan tahunan SKPD BPPT Kab. Nias	3.000.000	100	3.000.000
04	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Laporan LPPD dan LKPJ SKPD BPPT Kab. Nias	1.500.000	100	1.500.000
05	Penyusunan Renstra SKPD	1 Dokumen Renstra SKPD BPPT Kab. Nias	5.000.000	100	5.000.000
05.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan				
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	14.300.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
06.	Program Peningkatan Pengembangan Informasi dan Pelayanan Perizinan				
01	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Tersedianya data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	30.000.000	100	28.788.000
02	Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Fasilitasi kegiatan Tim Teknis Pelayanan	15.000.000	100	12.930.000
03	Fasilitasi Tim Perhitungan Besaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlaksananya Perhitungan Besaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15.000.000	100	14.025.000
04	Pembuatan Buku Daftar Badan Usaha di Kabupaten Nias	Data Izin Usaha Tahun 2015 sebanyak 30 buah	20.000.000	100	18.920.000
05	Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan kepada pelaku usaha sebanyak 50 org di Kec. Hiliserangkai	20.000.000	100	19.700.000
JUMLAH			671.000.000		636.450.829

^{*)} Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-59
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanganan Bencana Daerah
yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<u>725.960.000</u>		<u>594.310.557</u>
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan akan Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya selama 12 bulan	1.500.000	100	1.500.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Tersedianya biaya untuk Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Faximail dan Internet selama 12 bulan	31.000.000	100	26.332.382
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35.900.000	100	35.899.265
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Biaya Penggandaan/Fotokopi selama 12 bulan	25.000.000	100	24.999.760
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Tagihan Rekening SKH dan Media Masa lainnya selama 12 bulan	4.000.000	100	3.120.000
	6 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih lainnya selama 12 bulan	5.000.000	100	5.000.000
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman rapat-rapat	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka Pelaksanaan kegiatan kedinasan selama 12 bulan	35.000.000	100	34.900.800
	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 12 bulan	260.000.000	100	195.908.350
	9 Monitoring / Survey / Pengawasan / Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Monitoring / Survey / Pengawasan / Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah selama 12 bulan	130.000.000	100	115.000.000
	10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium para Pejabat Pengelola Keuangan SKPD selama 12 bulan	183.160.000	100	136.250.000
	11 Pengurusan surat perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Tersedianya biaya pengurusan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	15.400.000	100	15.400.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<u>325.000.000</u>		<u>313.950.510</u>
	1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor al: 5 printer, 2 unit Komputer PC, 3 laptop, 1 unit infocus, 1 unit televisi warna dan parabola	70.000.000	100	69.000.000
	2 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat (B 1926 PQQ, B 9934 PSC, B 9500 PTA, B 9965 PTA, BK 9149 VA, BL 7064 NO)	130.000.000	100	129.950.510
	3 Pemeliharaan Mesin Genset	Terpeliharanya mesin Genset 3 unit	5.000.000	100	5.000.000
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	45.000.000	100	45.000.000
	5 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Alat-alat kerja dinas kantor	20.000.000	100	20.000.000
	6 Pengangkutan Peralatan Gedung Kantor	Terangkutnya Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	0	-
	7 Pemasangan Listrik pada Gedung BPBD di Gido	Terpasangnya Listrik pada Gedung BPBD di Gido	30.000.000	100	30.000.000
	8 Penyambungan Air PDAM pada Gedung BPBD di Gido	Tersambungnya Air PDAM pada Gedung BPBD di Gido	15.000.000	100	15.000.000
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		<u>40.000.000</u>		<u>33.063.900</u>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Biaya untuk Mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop / Kursus / Sosialisasi Luar Daerah sebanyak 4 orang	40.000.000	100	33.063.900
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<u>18.000.000</u>		<u>18.000.000</u>
	1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya 1 dokumen Laporan Kinerja SKPD TA. 2015	2.000.000	100	2.000.000

NO		PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	2	Penyusunan RENJA	Tersusunnya 1 dokumen RENJA SKPD TA. 2017	3.000.000	100	3.000.000
	3	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Tersusunnya 2 dokumen LKPJ dan LPPD 2016	2.000.000	100	2.000.000
	4	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	3.500.000	100	3.500.000
	5	Penyusunan Renstra 2016-2021	Tersusunnya 1 Dokumen Renstra SKPD 2016-2021	7.500.000	100	7.500.000
05.		Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		15.000.000
	1	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	15.000.000
		URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
06.		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam		442.150.000		385.687.186
	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nias	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektoral tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nias	40.000.000	0	-
	2	Bantuan Kepada Petugas Posko Siap Siaga Bencana pada Kabupaten Nias	Bantuan kepada petugas Posko siap siaga Bencana pada BPBD Kabupaten Nias	100.000.000	100	100.000.000
	3	Bantuan kepada petugas Operator SSB Kabupaten Nias	Bantuan operator Kecamatan : 1 org x 10 kec. x 12 bln x Rp.250.000,-	46.000.000	100	46.000.000
	4	Bantuan Kepada Petugas Speed Boat	Terpeliharanya Speed Boat serta tersedianya Bantuan kepada Petugas Jaga Keamanan Speed Boat	18.000.000	100	10.500.000
	5	Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat	Terpeliharanya Speed Boat serta tersedianya bantuan kepada Operator Speed Boat (2 Orang Nakhoda dan 1 Orang Penjaga)	20.000.000	100	20.000.000
	6	Sosialisasi tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nias	80.000.000	100	72.539.000
	7	Penyusunan Ranperda Kab Nias tentang Penanggulangan Bnecana Daerah	Tersedianya Ranperda Tentang Penanggulangan Bencana Daerah	83.150.000	100	81.689.300
	8	Peringatan Terjadinya Gempa Bumi Nias tanggal 28 Maret 2005 di Kab Nias	Terlaksananya Peringatan Gempa Bumi Nias tanggal 28 Maret 20005 di Kab Nias	35.000.000	100	34.999.500
	9	Pemeliharaan Alat Komunikasi	Terpeliharanya Alat Komunikasi SSB 11 unit dan HT 19 unit	20.000.000	100	19.959.386
07.		Program Kedaruratan		138.500.000		97.359.344
	1	Pengadaan Peralatan dan Logistik dalam Penanganan Bencana	Tersedianya Peralatan dan Logistik untuk Penanganan Korban Bencana di Kabupaten Nias	30.000.000	100	29.933.050
	2	Pendistribusian peralatan dan Logistik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Terlaksananya pendistribusian Barang Logistik dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa	28.500.000	100	18.575.000
	3	Biaya Pengangkutan dan Penjemputan Peralatan dan Bahan Logistik dari Luar Daerah ke Kabupaten Nias	Tersedianya Biaya Pengangkutan dan Penjemputan Peralatan dan Barang Logistik dari Luar Daerah ke Kabupaten Nias	25.000.000	100	19.351.294
	4	Operasional Penanganan Pengungsi	Tersedianya Biaya Operasional Petugas dalam penanganan pengungsi	25.000.000	0	-
	5	Survey dan Pendataan Lokasi Tempat Pengungsian dan Sumber daya yang tersedia di Kecamatan dalam wilayah Kab Nias	Data Lokasi Pengungsian dan data sumberdaya yang tersdia pada Kecamatan dalam wilayah Kab Nias	30.000.000	100	29.500.000
08.		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		707.000.000		422.306.252
	1	Pemeliharaan dan Operasional Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangki Air	Tersedianya biaya operasional mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air	60.000.000	100	44.574.310
	2	Operasional Petugas Pemadam Kebakaran	Petugas Damkar, 14 orang x Rp. 500.000,- x 2 kali ooperasi/unit	42.000.000	100	14.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	3 Pengadaan Mobil Tangki Air	Tersedianya Mobil Tangki Air sebanyak 1 unit	600.000.000	100	358.880.825
	4 Biaya Umum Pengadaan Mobil Tangki Air	Tersedianya Biaya Umum Pengelolaan/ Pengadaan Mobil Tangki Air	5.000.000	100	4.851.117
09.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		9.056.363.000		8.358.788.350
	1 Pelatihan Tekhnis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Bagi Tenaga Pelaksana Perhitungan di Kab Nias	Meningkatnya Sumber Daya Tekhnisi Penilaian dan Perhitungan Kerudakan Pasca Bencana di Kab Nias sebanyak 50 orang	60.000.000	100	50.982.000
	2 Prasurvey / Pra-perencanaan dan kegiatan penanggulangan bencana yang disampaikan ke BPBD Provinsi dan BNPB Pusat	Tersedianya Prasurvey / praperencanaan dan kegiatan penanggulangan bencana yang disampaikan ke BPBD Provinsi dan BNPB Pusat sebanyak 1 dokumen	50.000.000	0	7.575.000
	3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kab Nias	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana DI kab Nias	8.946.363.000	100	8.300.231.350
		JUMLAH	11.467.973.000		10.238.466.099

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-61
Realisasi Pelaksanaan dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan
se-Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	KECAMATAN GIDO				
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		184.600.000		183.268.991
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan meterai, perangko, dan benda pos lainnya	2.000.000	100%	2.000.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya rekening listrik kantor	8.000.000	100%	6.763.991
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan	14.000.000	100%	14.000.000
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya pencetakan dan foto kopi surat-surat dinas selama 12 bulan	5.000.000	100%	5.000.000
	5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya biaya pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih lainnya untuk 12 bulan	2.000.000	100%	1.980.000
	6 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dinas dan biaya minuman harian staf selama 12 bulan	29.400.000	100%	29.400.000
	7 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	29.000.000	100%	29.000.000
	8 Monitoring / Survey / Pengawasan / Evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan Pembinaan / Pengawasan / Evaluasi ke desa serta koordinasi ke tingkat Kabupaten	60.000.000	100%	59.925.000
	9 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium bagi PPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus barang, Penyimpan barang, Petugas Dispenda dan Operator SIPKD	35.200.000	100%	35.200.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		88.900.000		88.900.000
	1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	68.700.000	100%	68.700.000
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	7.000.000	100%	7.000.000
	3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional	Lancarnya kegiatan Pegawai Kantor	6.400.000	100%	6.400.000
	4 Pemeliharaan dan pengoperasian mesin genset	Operasional dan pemeliharaan mesin genset (BBM, Pelumas, Servis)	3.000.000	100%	3.000.000
	5 Operasional dan pemeliharaan mesin potong rumput	Terpeliharanya peralatan kantor sebanyak 1 paket	1.800.000	100%	1.800.000
	6 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	2.000.000	100%	2.000.000
3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20.000.000		20.000.000
	1 Mengikuti kegiatan Bimtek/ workshop/kursus/sosialisasi di luar daerah	Lancarnya Kegiatan Kepegawaian	20.000.000	100%	20.000.000
4	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan		13.500.000		13.500.000
	1 Penyusunan Renja Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD Tahun 2016	2.500.000	100%	2.500.000
	2 Penyusunan LAPORAN Kinerja SKPD	Adanya dokumen Laporan Kinerja SKPD	1.500.000	100%	1.500.000
	3 Penyusunan laporan tahunan SKPD	Adanya laporan tahunan SKPD	3.000.000	100%	3.000.000
	4 Penyusunan LPPD dan LKPJ	Adanya dokumen LPPD dan LKPJ SKPD	1.500.000	100%	1.500.000
	5 Penyusunan Renstra	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2021	5.000.000	100%	5.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		28.000.000		28.000.000
1	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan	28.000.000	100%	28.000.000
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		85.000.000		85.000.000
1	Peringatan hari-hari besar nasional	Fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	55.000.000	100%	55.000.000
2	Fasilitasi kegiatan keagamaan dan hari-hari besar keagamaan	Fasilitasi pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan di tingkat Kecamatan	15000000	100%	15000000
3	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya Hari Sumpah Pemuda di Kec.. Gido	7.500.000	100%	7.500.000
4	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Terlaksananya Hari Hari Pendidikan Nasional di Kec.. Gido	7.500.000	100%	7.500.000
7	Program Pemantauan dan Pengendalian Program dibidang Pendapatan Daerah		6.000.000		5.900.000
1	Pemantauan dan pendataan objek-objek Pajak dan Retribusi Daerah	Tercapainya pendapatan daerah diwilayah Kec. Gido	6.000.000	100%	5.900.000
8	Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		54.000.000		54.000.000
1	Rapat koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan	12.000.000	100%	12.000.000
2	Rapat koordinasi antar Kepala Unit Kerja dan unsur Muspika Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat koordinasi antar kepala unit kerja dan unsur Muspika	10.000.000	100%	10.000.000
3	c. Monitoring/evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	dan kemasyarakatan di Kecamatan	7.000.000	100%	7.000.000
4	Koordinasi dan Pembinaan Administrasi APB Desa	Desa dapat melakukan kegiatan sesuai dengan APB Desa	25.000.000	100%	25.000.000
9	Program Pemberdayaan Perempuan		12.000.000		12.000.000
1	Fasilitasi / Pembinaan TP. PKK	Fasilitasi dan pembinaan TP. PKK Kecamatan	12.000.000	100%	12.000.000
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		8.000.000		8.000.000
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan gotong royong	5.000.000	100%	5.000.000
2	Fasilitasi program Raskin	Pengelolaan dan pendistribusian Raskin berjalan lancar	3.000.000	100%	3.000.000
TOTAL			500.000.000		498.568.991
II	KECAMATAN IDANOGAWO				
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		157.500.000		153.528.412
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya	1.000.000	100%	999.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik kantor	5.000.000	100%	3.109.412
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan	20.000.000	100%	20.000.000
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya biaya pencetakan dan foto kopy surat-surat dinas selama 12 bulan	9.000.000	100%	9.000.000
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Ruangan	Pemenuhan Alat Listrik dan elektronik.	1.000.000	100%	1.000.000
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya biaya pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih lainnya untuk 12 bulan	3.500.000	100%	3.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya biaya rapat-rapat pegawai dan biaya minuman harian staf selama 12 bulan	20.000.000	100%	20.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi mengikuti rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28.000.000	100%	28.000.000
	9. Monitoring/Survey/Pengawasan/ Evaluasi serta Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan pembinaan/pengawasan/evaluasi kedesa serta koordinasi ketingkat Kabupaten	45.000.000	100%	45.000.000
	10. Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium bagi PPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Petugas Dispenda dan Operator SIPKD	25.000.000	100%	22.920.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		52.500.000		52.500.000
	1. Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor seperti Laptop, Proyektor, Printer dan meja kerja	18.000.000	100%	18.000.000
	2. Pemeliharaan Rutin berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas Camat	5.000.000	100%	5.000.000
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor sebanyak 1 paket	10.000.000	100%	10.000.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2 yang dipelihara	12.500.000	100%	12.500.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	2.500.000	100%	2.500.000
	5. Pemeliharaan dan pengoperasian mesin genset	Operasional dan pemeliharaan mesin genset (BBM, Pelumas, Servis)	3.000.000	100%	3.000.000
	6. Pemeliharaan dan operasional mesin potong rumput	Terpeliharanya mesin pemotong rumput untuk keperluan kantor	1.500.000	100%	1.500.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.000.000		15.000.000
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur Pemerintahan desa yang lebih berkualitas dengan mengirimkan 4 orang pegawai untuk melaksanakan Bimtek/pelatihan	15.000.000	100%	15.000.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.500.000		13.498.550
	1. Penyusunan Renja Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD Tahun 2017	2.500.000	100%	2.500.000
	2. Penyusunan LAKIP SKPD	Adanya Dokumen LAKIP SKPD	1.500.000	100%	1.500.000
	3. Penyusunan laporan tahunan SKPD	Adanya laporan tahunan SKPD	3.000.000	100%	2.998.550
	4. Penyusunan renstra SKPD	Adanya dokumen laporan Renstra SKPD	5.000.000	100%	5.000.000
	5. Penyusunan LPPD dan LKPJ	Adanya dokumen LPPD dan LKPJ SKPD	1.500.000	100%	1.500.000
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		31.000.000		31.000.000
	1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan	31.000.000	100%	31.000.000
6.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam Olahraga dan Kesenian		28.000.000		28.000.000
	1. Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian	Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Kecamatan pada kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian	28.000.000	100%	28.000.000
7.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		110.000.000		80.000.000
	1. Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Fasilitasi pelaksanaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2014	70.000.000	100%	70.000.000
	2. Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	Fasilitasi pelaksanaan perayaan hari – hari besar keagamaan di tingkat kecamatan	30.000.000	100%	30.000.000
	3. bantuan operasional kepada Forum Persaudaraan antar umat beragama dan badan Kerja sama Antar Gereja Kecamatan Idanogawo	Terlaksananya kegiatan Forum ersaudaraan antar umat beragama dan badan Kerja sama Antar Gereja Kecamatan Idanogawo	10.000.000	100%	10.000.000
8.	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		67.500.000		67.484.100
	1. Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat koordinasi Pemerintah Tingkat kecamatan	12.000.000	100%	11.984.100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Rapat Koordinasi antar Kepala Unit Kerja dan Unsur Muspika di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat koordinasi antar kepala unit kerja dan unsure Muspika	8.000.000	100%	8.000.000
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi di tingkat desa	7.000.000	100%	7.000.000
	4. koordinasi dan Pembinaan APB Desa	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Pembinaan APB Desa	32.500.000	100%	32.500.000
	5. Pelaksanaan bulan bakti Gotong royong	Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong di tingkat kecamatan	8.000.000	100%	8.000.000
9.	Program Pemantauan dan pengendalian program bidang pendapatan daerah		5.000.000		0
	1 Pemantauan dan pendataan Objek objek pajak dan retribusi daerah	terlaksananya pemantauan objek objek pajak dan retribusi daerah pada 28 desa	5.000.000	100%	0
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		20.000.000		20.000.000
	1. Fasilitasi Program RASKIN di Kecamatan	Pengelolaan dan pendistribusian raskin berjalan lancar	5.000.000	100%	5.000.000
	2. Fasilitasi/Pembinaan TP.PKK	Fasilitasi dan pembinaanTP. PKK Kecamatan	5.000.000	100%	5.000.000
	3. Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Fasilitasi pelaksanaan perlombaan antar desa se-Kecamatan Idanogawo	5.000.000	100%	5.000.000
	4. Pelaksanaan kegiatan Desa Percontohan 10 program PKK	Terbentuknya desa percontohan 10 Program PKK	5.000.000	100%	5.000.000
JUMLAH			500.000.000		461.011.062
III	KECAMATAN BAWOLATO				
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		193.200.000		185.022.486
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya	1.500.000	100%	1.500.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik kantor	7.500.000	100%	7.287.386
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor	13.962.000	100%	13.962.000
	4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih lainnya	9.258.000	100%	9.258.000
	5 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan fotocopy surat-surat dinas dan dokumen lainnya	5.000.000	100%	5.000.000
	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, minuman harian staf dan makanan dan minuman tamu	20.000.000	100%	20.000.000
	7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.000.000	100%	30.485.100
	8 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan pembinaan/pengawasan/evaluasi ke desa-desa serta koordinasi ke tingkat Kabupaten	75.000.000	100%	75.000.000
	9 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium bagi PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus barang, Penyimpan Barang, Petugas Dispenda dan Operator SIPKD	24.780.000	100%	21.330.000
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan bahan bacaan (surat kabar)	1.200.000	100%	1.200.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		128.300.000		128.300.000
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	54.000.000	100%	54.000.000
	2 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	4.000.000	100%	4.000.000
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda-2 yang dipelihara sebanyak 2 unit	12.800.000	100%	12.800.000
	4 Pemeliharaan dan Operasional Mesin Genset	Operasional dan pemeliharaan mesin genset (BBM,Pelumas,Service)	6.500.000	100%	6.500.000

NO		PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
					FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	5	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Sarana dan Prasarana kerja antara lain laptop 1 unit, meja makan 2 unit, printer 3 unit, kursi makan 2 lusin, tangki air 2 unit, filling kabinet 3 unit, meja kerja 2 unit	41.000.000	100%	41.000.000
	6	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas Camat	Rumah dinas camat yang dipelihara	10.000.000	100%	10.000.000
03.		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12.000.000		8.750.000
	1	Mengikuti kegiatan diklat Bimtek/workshop/kursus/sosialisasi diluar daerah	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan sebanyak 1 orang	12.000.000	100%	8.750.000
04.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.500.000		13.500.000
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2017	2.500.000	100%	2.500.000
	2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015	1.500.000	100%	1.500.000
	3	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	3.000.000	100%	3.000.000
	4	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Laporan LPPD dan LKPJ Tahun 2015	1.500.000	100%	1.500.000
	5	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2021	5.000.000	100%	5.000.000
05.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		15.000.000		15.000.000
	1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan	15.000.000	100%	15.000.000
07.		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		65.000.000		65.000.000
	1	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Fasilitasi pelaksanaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2016 sebanyak 1 kali	50.000.000	100%	50.000.000
	2	Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan	Fasilitasi pelaksanaan peringatan Hari-hari Besar Keagamaan sebanyak 1 kali	15.000.000	100%	15.000.000
08		Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		48.000.000		48.000.000
	1	Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan sebanyak 4 kali	10.000.000	100%	10.000.000
	2	Rapat Koordinasi antar Kepala Unit dan Unsur MUSPIKA di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat Koordinasi antara Kepala Unit Kerja dan Unsur Muspika sebanyak 2 kali	8.000.000	100%	8.000.000
	4	Koordinasi dan pembinaan Administrasi APB Desa	terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan administrasi APB Desa sebanyak 1 kali	30.000.000	100%	30.000.000
10.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		15.000.000		15.000.000
	1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan gotong royong sebanyak 1 kali	10.000.000	100%	10.000.000
	2	Fasilitasi Program Raskin di Kecamatan	Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN di 16 Desa	5.000.000	100%	5.000.000
11		Program Pemberdayaan Perempuan		10.000.000		10.000.000
	1	Fasilitasi / Pembinaan TP PKK	Fasilitasi dan Pembinaan TP. PKK Kecamatan	10.000.000	100%	10.000.000
			JUMLAH	500.000.000	97,71	488.572.486
IV		KECAMATAN HILIDUHO				
		URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		194.400.000		189.815.069
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya	500.000	100%	498.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik kantor	3.000.000	100%	2.274.370
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor	17.500.000	100%	17.495.559
	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih lainnya	3.000.000	100%	3.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan fotocopy surat-surat dinas dan dokumen lainnya	2.500.000	100%	2.497.800

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, minuman harian staf dan makanan dan minuman tamu	20.000.000	100%	19.977.100
	7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	42.000.000	100%	39.070.950
	8	Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan pembinaan/pengawasan/evaluasi ke desa-desa serta koordinasi ke tingkat Kabupaten	77.000.000	100%	76.900.000
	9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium bagi PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus barang, Penyimpan Barang, Petugas Dispenda dan Operator SIPKD	28.100.000	100%	27.350.000
	10	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pengurusan izin kendaraan roda dua	800.000	100%	751.290
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		78.150.000			76.980.705
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	2.000.000	100%	1.999.200
	2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	5.000.000	100%	4.987.800
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda-2 yang dipelihara	6.150.000	100%	6.145.500
	3	Pemeliharaan dan Operasional Mesin Genset	Operasional dan pemeliharaan mesin genset (BBM,Pelumas,Service)	5.000.000	100%	4.988.250
	4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Sarana dan Prasarana kerja antara lain :bendera umbul umbul 1 paket, rak buku 2 unit, laptop 2 unit, sound system 1 unit, mesin genset 1 unit, lemari 2 unit, filling kabinet 2 unit, meja kerja 2 unit, pengadaan printer 2 unit, kursi plastik 5 lusin, kursi citose 1 lusin.	60.000.000	100%	58.859.955
03.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12.000.000			9.500.000
	1	Mengikuti kegiatan diklat Bimtek/workshop/kursus/sosialisasi diluar daerah	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan sebanyak 2 orang	12.000.000	100%	9.500.000
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.500.000			13.198.500
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2017	2.500.000	100%	2.500.000
	2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015	1.500.000	100%	1.500.000
	3	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	3.000.000	100%	2.994.500
	4	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Laporan LPPD dan LKPJ Tahun 2015	1.500.000	100%	1.500.000
	5	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2021	5.000.000	100%	4.704.000
05.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		27.010.000			26.900.850
	1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan	27.010.000	100%	26.900.850
06.	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Dalam Olahraga dan Kesenian		5.000.000			4.574.000
	1	Fasilitas/Pembinaan Kegiatan Kepemudaan, Olahraga, dan Kesenian	Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Kecamatan pada kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian	5.000.000	100%	4.574.000
07.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		50.000.000			49.942.600
	1	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Fasilitasi pelaksanaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2016	50.000.000	100%	49.942.600
08	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		45.240.000			45.126.291
	1	Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan sebanvak 4 kali	12.000.000	100%	11.965.600

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2	Rapat Koordinasi antar Kepala Unit dan Unsur MUSPIKA di Tingkat Kecamatan	6.000.000	100%	5.998.100
	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	6.500.000	100%	6.425.000
	4	Koordinasi dan pembinaan Administrasi APB Desa	20.740.000	100%	20.737.591
09.	Program Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah		6.000.000		5.925.000
	1	Pemantauan dan Pendapatan objek-objek Pajak dan Retribusi Daerah	6.000.000	100%	5.925.000
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		10.700.000		10.676.600
	1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	5.000.000	100%	4.976.600
	2	Fasilitasi Program Raskin di Kecamatan	5.700.000	100%	5.700.000
11	Program Pemberdayaan Perempuan		8.000.000		8.000.000
	1	Fasilitasi / Pembinaan TP PKK	8.000.000	100%	8.000.000
		JUMLAH	450.000.000		440.639.615
V	KECAMATAN HILISERANGKAI				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		153.965.000		139.053.488
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	100%	500.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	100%	2.485.688
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.500.000	100%	12.500.000
	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	100%	3.000.000
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	100%	4.000.000
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.965.000	100%	11.965.000
	7	Rapat koordinasi dan Konsultasi/ ke luar daerah	39.500.000	100%	27.477.800
	8	Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	47.000.000	100%	46.825.000
	9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	32.500.000	100%	30.300.000
2	Program Peningkatan Kapasitas		20.000.000		19.000.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	100%	19.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		69.050.000		51.750.000
	1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor	40.250.000	100%	22.950.000
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.600.000	100%	7.600.000
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.500.000	100%	12.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4 Pemeliharaan dan Operasional Mesin Genset	Operasional dan pemeliharaan mesin Genset (BBM, Pelumas, Service)	4.000.000	100%	4.000.000

NO		PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
					FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah Dinas Camat Yang terpelihara	2.500.000	100%	2.500.000
	6	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor yang terpelihara	2.200.000	100%	2.200.000
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		16.000.000		16.000.000
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja SKPD TA. 2017	2.500.000	100%	2.500.000
	2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Dokumen LAKIP SKPD TA. 2016	1.500.000	100%	1.500.000
	3	Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra SKPD 2016-2020	7.500.000	100%	7.500.000
	4	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2016	3.000.000	100%	3.000.000
	5	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Laporan LPPD dan LKPJ Tahun 2016	1.500.000	100%	1.500.000
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		23.625.000		23.575.000
	1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan	23.625.000	100%	23.575.000
		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
6		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		8.600.000		8.600.000
	1	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat yang dilayani kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.600.000	100%	8.600.000
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
7		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		74.500.000		67.000.000
	1	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Fasilitasi pelaksanaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2015, Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda	62.500.000	100%	55.000.000
	2	Fasilitas Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan tingkat kecamatan	12.000.000	100%	12.000.000
		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
8		Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		46.260.000		46.260.000
	1	Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah tingkat Kecamatan	15.000.000	100%	15.000.000
	2	Rapat Koordinasi antar Kepala Unit Kerja dan Unsur MUSPIKA di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat koordinasi antara Kepala Unit Kerja dan Unsur MUSPIKA	9.000.000	100%	9.000.000
	3	Koordinasi dan pembinaan Administrasi APB Desa	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan administrasi APB Desa	22.260.000	100%	22.260.000
9		Pogram Pemberdayaan Perempuan		20.000.000		15.000.000
	1	Fasilitasi/Pembinaan TP PKK	Fasilitasi dan pembinaan TP. PKK Kecamatan	20.000.000	100%	15.000.000
10		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		9.000.000		9.000.000
	1	Pembekalan bagi aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Meningkatnya pengetahuan Aparatur dan BPD mengenai Administrasi Desa	9.000.000	100%	9.000.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
11		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		9.000.000		-
	1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah desa yang melaksnakan Gotong Royong	3.000.000	-	-
	2	Fasilitasi Prgram Raskin di Kecamatan	Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN	6.000.000	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		JUMLAH	450.000.000		395.238.488

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
VI	KECAMATAN BOTOMUZOI				
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		171.590.000		158.486.727
	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai, dan benda pos lainnya selama 12 bulan	1.000.000	100%	1.000.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik kantor dan rumah dinas selama 12 bulan	5.000.000	100%	3.586.027
	3 Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan	14.000.000	100%	13.999.000
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya pencetakan dan fotocopy surat-surat dinas selama 12 bulan	5.000.000	100%	4.999.400
	5 Belanja komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penggantian komponen instalasi listrik	2.950.000	100%	2.950.000
	6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih lainnya sebanyak 1 paket	2.500.000	100%	2.500.000
	7 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dinas dan biaya minuman harian staf selama 12 bulan	18.000.000	100%	17.990.000
	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	32.000.000	100%	22.697.300
	9 Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan di tingkat desa serta koordinasi ke tingkat Kabupaten	60.500.000	100%	60.225.000
	10 Penyediaan jasa administrasi umum	Honorarium para pejabat pengelola keuangan SKPD untuk 12 bulan	30.640.000	100%	28.540.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		47.700.000		47.246.000
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda-2 yang dipelihara sebanyak 3 unit	3.200.000	100%	2.746.000
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	2.000.000	100%	2.000.000
	3 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Operasional dan pemeliharaan mesin Genset (BBM, Pelumas, Service)	5.000.000	100%	5.000.000
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor	5.000.000	100%	5.000.000
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas	2.500.000	100%	2.500.000
	6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan prasarana kantor yaitu : laptop, infokus, printer, lemari kayu	30.000.000	100%	30.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		13.000.000		8.750.000
	1 Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/ Sosialisasi di Luar Daerah	Tersedianya biaya kontribusi dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/ Sosialisasi di Luar Daerah sebanyak 2 orang	13.000.000	100%	8.750.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.500.000		13.490.000
	1 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Dokumen Renja SKPD Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen	2.500.000	100%	2.500.000
	2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen	1.500.000	100%	1.500.000
	3 Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Laporan Renstra SKPD	5.000.000	100%	4.990.000
	4 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen	3.000.000	100%	3.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2016 masing-masing sebanyak 1 dokumen	1.500.000	100%	1.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		27.710.000		27.710.000
1	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Menghadiri pelaksanaan Musrenbang di 18 Desa serta melaksanakan Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kali	27.710.000	100%	27.710.000
6	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		10.000.000		10.000.000
1	Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian	Fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian tingkat kecamatan	10.000.000	100%	10.000.000
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		62.500.000		62.500.000
1	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Perayaan Hari Besar Nasional :			
		- Peringatan HUT Kemri Tahun 2016	40.000.000	100%	40.000.000
		- Peringatan HUT Sumpah Pemuda 2016	7.500.000	100%	7.500.000
		- Peringatan Hardiknas Tahun 2016	5.000.000	100%	5.000.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Botomuzoi Tahun 2016	10.000.000	100%	10.000.000
8	Program Pemantauan dan Pengendalian Program di Bidang Pendapatan Daerah		5.000.000		4.825.000
1	Monitoring, Evaluasi, Pendataan Objek Pajak dan Retribusi	Monitoring dan pendataan objek pajak	5.000.000	100%	4.825.000
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		10.000.000		10.000.000
1	Pembenahan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	Pembekalan aparatur pemerintahan desa dan BPD	10.000.000	100%	10.000.000
10	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		49.500.000		49.045.000
1	Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kecamatan sebanyak 4 kali	12.000.000	100%	12.000.000
2	Rapat koordinasi antar Kepala Unit Kerja dan Unsur MUSPIKA di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi antar kepala unit kerja dan unsur Muspika tingkat Kecamatan sebanyak 2 kali	7.500.000	100%	7.220.000
3	Koordinasi dan pembinaan administrasi APBDesa	Koordinasi dan pembinaan administrasi APBDesa	30.000.000	100%	29.825.000
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		39.500.000		39.175.000
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kegiatan bulan bakti gotong royong	6.000.000	100%	6.000.000
2	Fasilitasi Program Raskin di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi serta pengawasan dalam pendistribusian beras Raskin di 18 desa selama 12 bulan	6.750.000	100%	6.625.000
3	Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Perlombaan Desa di 18 Desa	6.750.000	100%	6.550.000
4	Fasilitasi Pembinaan TP-PKK	Fasilitasi kegiatan TP.PKK Kecamatan dan desa	10.000.000	100%	10.000.000
5	Sosialisasi Pendaftaran Tanah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Botomuzoi	Sosialisasi pendaftaran tanah	10.000.000	100%	10.000.000
JUMLAH			450.000.000		431.227.727
VII	KECAMATAN ULUGAWO				
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		172.250.000		168.836.900
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya kegiatan administrasi dan surat menyurat	1.000.000	100%	1.000.000
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya kegiatan administrasi dan surat menyurat	16.570.000	100%	16.570.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya kegiatan administrasi dan surat menyurat	3.000.000	100%	3.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor	3.760.000	100%	3.760.000
	5 Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya kegiatan kantor dan rapat-rapat	16.000.000	100%	16.000.000
	6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di luar daerah	31.000.000	100%	28.376.900
	7 Monitoring/survey/Pengawasan/Evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya kegiatan monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	71.900.000	100%	71.800.000
	8 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Lancarnya kegiatan pengadministrasian keuangan dan barang di kantor	29.020.000	100%	28.330.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		65.810.000		65.810.000
	1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabata / Dinas	Lancarnya kegiatan di kantor. Pengadaan berupa: Sofa 1 set.	4.000.000	100%	4.000.000
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Lancarnya kegiatan di kantor. Pengadaan berupa: Laptop 1 unit, Filing Cabinet 2 unit, Lemari Rak 1 unit, Kipas Angin 6 unit, Printer 1 unit, Lemari 1 unit, Jam dinding 9 buah	29.310.000	100%	29.310.000
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Lancarnya kegiatan pegawai di kantor	7.500.000	100%	7.500.000
	4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5.000.000	100%	5.000.000
	5 Pemeliharaan dan pengoperasian mesin genset	Lancarnya kegiatan di kantor	20.000.000	100%	20.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		13.500.000		8.750.000
	1 Mengikuti Kegiatan Diklat Bimtek/ Workshop/ Kursus/ Sosialisasi di luar daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek 1 orang	13.500.000	100%	8.750.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		16.000.000		16.000.000
	1 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Terdokumentasikannya Rencana Kerja SKPD Tahun 2017	2.500.000	100%	2.500.000
	2 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terdokumentasikannya Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015	1.500.000	100%	1.500.000
	3 Penyusunan Renstra SKPD	Terdokumentasikannya RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021	7.500.000	100%	7.500.000
	4 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Terdokumentasikannya Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015	3.000.000	100%	3.000.000
	5 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Terdokumentasikannya LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2011-2016	1.500.000	100%	1.500.000
5	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		60.720.000		60.720.000
	1 Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Lancarnya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Terlaksana 2 kali	15.000.000	100%	15.000.000
	2 Rapat Koordinasi Antar Kepala Unit Kerja dan Unsur Muspika di Tingkat Kecamatan	Lancarnya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan. Terlaksana 2 kali.	6.000.000	100%	6.000.000
	3 Koordinasi dan Pembinaan Administrasi APB Desa	Desa dapat melaksanakan kegiatan sesuai APBDes. Terlaksana sebanyak 1 kali.	39.720.000	100%	39.720.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		10.000.000		10.000.000
	1 Fasilitasi / Pembinaan TP PKK	Lancarnya kegiatan PKK Kecamatan. Terlaksana 1 kali kegiatan.	10.000.000	100%	10.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		26.220.000		26.220.000
1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terdokumentasikannya Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2017	26.220.000	100%	26.220.000
8	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		74.500.000		71.500.000
1	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Terpeliharanya nilai-nilai kebangsaan dan kepahlawanan. Terlaksana 3 kegiatan	62.500.000	100%	59.500.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan	Terpeliharanya nilai-nilai keagamaan.	12.000.000	100%	12.000.000
9	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		11.000.000		11.000.000
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terpeliharanya nilai-nilai kegotong-royongan. Terlaksana di 2 desa.	6.000.000	100%	6.000.000
2	Fasilitasi Program Raskin di Tingkat Kecamatan	Lancarnya penyaluran raskin Terlaksanan di 14 desa	5.000.000	100%	5.000.000
JUMLAH			450.000.000		438.836.900
VIII	KECAMATAN MA'U				
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 202.500.000		Rp 202.400.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai, perangko, dan benda pos lainnya untuk kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan	Rp 1.000.000	100%	Rp 1.000.000
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan 1 tahun anggaran	Rp 15.000.000	100%	Rp 15.000.000
3	Penyediaan peralatan Rumah tangga	tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersi lainnya	Rp 2.000.000	100%	Rp 2.000.000
4	Penyediaan Makan dan Minuman	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat rapat staf, minuman harian staf dan makan/minuman tamu	Rp 17.000.000	100%	Rp 17.000.000
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi mengikuti rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 25.000.000	100%	Rp 25.000.000
6	Monitoring/Survei/Pengawasan/Evaluasi serta rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Pelaksanaan pembinaan/pengawasan/evaluasi ke Desa desa serta koordinasi ketingkat kabupaten	Rp 101.400.000	100%	Rp 101.300.000
7	Penyediaan Jasa Adminitrasi Umum	Honorarium bagi satuan pengelola keuangan SKPD	Rp 41.100.000	100%	Rp 41.100.000
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		Rp 46.400.000		Rp 46.399.000
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan prasarana kantor (Laptop,Printer dan Harddisk)	Rp 16.900.000	100%	Rp 16.900.000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas roda 2 yang di pelihara dan pajak	Rp 17.500.000	100%	Rp 17.500.000
3	Peneliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Kantor	Laptop dan Printer	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000
4	Pemeliharaan dan pengoperasian mesin genset	Operasional dan pemeliharaan mesin genset (BBM, Pelumas, Service)	Rp 7.000.000	100%	Rp 6.999.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 20.000.000		Rp 12.750.000
	Mengikuti kegiatan Diklat Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di luar daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi diluar daerah	Rp 20.000.000	100%	Rp 12.750.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 13.500.000		Rp 13.500.000
1	Penyusunan remcana kerja satuan kerja perangkat daerah	Dokumen rencana kerja SKPD tahun 2017	Rp 2.500.000	100%	Rp 2.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Kdokumen LAKIP SKPD TA.2017	Rp 1.500.000	100%	Rp 1.500.000
3	Penyusunan Rencan Strategi satuan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen RESTRA SKPD Tahun 2015-2021	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000
4	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Dokumen Laporan Tahunan SKPD Tahun 2016	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.000.000
5	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Laporan LPPD dan LKPJ SKPD tahun 2016	Rp 1.500.000	100%	Rp 1.500.000
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 17.160.000		Rp 17.160.000
1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan forum Musrenbang Kecamatan	Rp 17.160.000	100%	Rp 17.160.000
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Olahraga dan Kesenian		Rp 20.000.000		Rp -
1	Fasilitasi Kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat,Budaya dan Kesenian Daerah	Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Kecamatan pada pelestarian dan aktualisasi Adat, Budaya dan kesenian Daerah	Rp 20.000.000	-	-
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Rp 65.000.000		Rp 65.000.000
1	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan Hari hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan	Rp 35.000.000	100%	Rp 35.000.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan	Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari hari besar Keagamaan Tingkat Kecamatan	Rp 30.000.000	100%	Rp 30.000.000
8	Program Pemantauan dan Pengendalian Program dibidang Pendapatan Daerah		Rp 6.325.000		Rp 6.275.000
1	Pemantauan dan Pendataan Objek-objek pajak dan Retribusi daerah	Terdatanya Objek objek Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 6.325.000	100%	Rp 6.275.000
9	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		Rp 45.440.000		Rp 45.432.000
1	Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Rp 16.000.000	100%	Rp 16.000.000
2	Rapat Koordinasi Antar Kepala Unit Kerja dan Unsur Muspika Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar unit kerja dan Unsur Muspika	Rp 4.000.000	100%	Rp 4.000.000
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di moningtori dan di Evaluasi sebanyak 11 desa	Rp 3.300.000	100%	Rp 3.300.000
4	Koodinasi dan Pembinaan Administrasi APBDesa	Jumlah Desa yang dibina sebanyak 11 Desa	Rp 22.140.000	100%	Rp 22.132.000
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Rp 13.675.000		Rp 13.600.000
1	Fasilitasi Program RASKIN di Kecamatan	Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN	Rp 8.675.000	100%	Rp 8.600.000
2	Fasilitasi/Pembinaan Tim Penggerak PKK	Fasilitasi dan Pembinaan TP.PKK Kecamatan	Rp 5.000.000	100%	Rp 5.000.000
JUMLAH			Rp 450.000.000		Rp 422.516.000
IX	KECAMATAN SOMOLO-MOLO				
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		165.180.000		160.027.500
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya	1.000.000	100%	1.000.000
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor	18.000.000	100%	16.615.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan fotokopi surat-surat dinas dan dokumen lainnya	4.000.000	100%	4.000.000
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih lainnya	3.000.000	100%	3.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000	100%	1.500.000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, minuman harian staf dan makanan/ minuman tamu	14.000.000	100%	14.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	41.000.000	100%	37.232.500

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	8 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan pembinaan/ pengawasan/ evaluasi ke Desa-desa serta koordinasi ke tingkat Kabupaten	51.000.000	100%	51.000.000
	9 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium bagi PPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Petugas Dispenda dan Operator SIPKD	31.680.000	100%	31.680.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		66.000.000		66.000.000
	1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor (Laptop 2 Unit, Printer 5 Unit, Kursi Plastik 3 Lusin, Kursi Kerja 6 Unit, Wireless 1 Unit)	25.000.000	100%	25.000.000
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Perawatan gedung kantor	10.000.000	100%	10.000.000
	3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	12.500.000	100%	12.500.000
	4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Biaya perawatan peralatan kerja	8.500.000	100%	8.500.000
	5 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Operasional dan pemeliharaan mesin genset (BBM, Pelumas, Service)	8.000.000	100%	8.000.000
	6 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Potong Rumput	Operasional dan pemeliharaan mesin potong rumput (BBM, Pelumas, Service)	2.000.000	100%	2.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.500.000		13.500.000
	1 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Renja SKPD Tahun 2017	2.500.000	100%	2.500.000
	2 Penyusunan RENSTRA	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016 -2021	5.000.000	100%	5.000.000
	3 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja (LK) SKPD Tahun 2015	1.500.000	100%	1.500.000
	4 Penyusunan Laporan Tahunan	Dokumen Laporan Tahunan 2015	3.000.000	100%	3.000.000
	5 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2015	1.500.000	100%	1.500.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		21.000.000		12.750.000
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/ workshop/kursus/ sosialisasi di luar daerah (Sebanyak 2 Orang)	21.000.000	100%	12.750.000
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		24.200.000		24.200.000
	1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan	24.200.000	100%	24.200.000
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		50.000.000		50.000.000
	1 Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional (HUT Kemri Ke-71 1 Kali, Hari Sumpah Pemuda 1 Kali)	50.000.000	100%	50.000.000
7	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Dalam Olahraga dan Kesenian		15.000.000		7.000.000
	1 Fasilitasi/ Pembinaan Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian	Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Kecamatan pada kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian	15.000.000	100%	7.000.000
8	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		54.420.000		54.420.000
	1 Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan (Sebanyak 6 Kali)	12.000.000	100%	12.000.000
	2 Rapat Koordinasi Antar Kepala Unit Kerja dan Unsur MUSPIKA di tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar Kepala Unit Kerja dan Unsur Muspika (Sebanyak 6 Kali)	8.400.000	100%	8.400.000
	3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-Jumlah Desa yang dimonitor dan di evaluasi Sebanyak 11 Desa -Jumlah dokumen laporan kependudukan	10.200.000	100%	10.200.000
	4 Koordinasi dan Pembinaan administrasi APBDesa	Pembinaan dan pengendalian APBDes (Sebanyak 1 Kegiatan)	23.820.000	100%	23.820.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Program Pemantauan dan Pengendalian Program Bidang Pendapatan Daerah		5.700.000		5.700.000
1	Pemantauan dan Pendataan Objek - Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian objek pajak dan retribusi daerah di wilayah Kec. Somolo-molo (Sebanyak 11 Desa)	5.700.000	100%	5.700.000
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		28.500.000		28.000.000
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di 2 Desa	8.500.000	100%	8.500.000
2	Fasilitasi Program Raskin di Kecamatan	Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian Raskin di 11 Desa	7.500.000	100%	7.500.000
3	Fasilitasi Pembinaan TP-PKK	Fasilitasi dan pembinaan TP. PKK Kecamatan di 11 Desa	12.500.000	100%	12.000.000
11	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		6.500.000		6.275.000
1	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan (1 Kegiatan)	6.500.000	100%	6.275.000
TOTAL			450.000.000		427.872.500
X	KECAMATAN SOGAE'ADU				
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		171.500.000		171.183.850
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan meterai, perangko, dan benda pos lainnya	700.000	100%	699.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya rekening listrik kantor	2.000.000	100%	1.999.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan	14.000.000	100%	14.000.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya pencetakan dan foto kopi surat-surat dinas selama 12 bulan	3.000.000	100%	3.000.000
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya biaya pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih lainnya untuk 12 bulan	2.400.000	100%	2.400.000
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dinas dan biaya minuman harian staf selama 12 bulan	20.400.000	100%	20.260.350
7	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50.000.000	100%	49.980.500
8	Monitoring / Survey / Pengawasan / Evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan Pembinaan / Pengawasan / Evaluasi ke desa serta koordinasi ke tingkat Kabupaten	40.000.000	100%	39.925.000
9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium bagi PPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus barang, Penyimpan barang, Petugas Dispenda dan Operator SIPKD	39.000.000	100%	38.920.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		64.500.000		63.406.000
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1.500.000	100%	1.500.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	4.000.000	100%	4.000.000
3	Pemeliharaan dan pengoperasian mesin genset	Operasional dan pemeliharaan mesin genset (BBM, Pelumas, Servis)	2.000.000	100%	1.967.000
4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor sebanyak 1 paket	2.000.000	100%	1.989.000
5	Pengadaan Peralatan Kerja	Tersedianya mesin pemotong rumput, rak buku, Laptop, Microphone, Almari, Filling kabinet, Podium, Meja kerja	50.000.000	100%	48.950.000
6	Sewa Rumah Dinas Jabatan Camat	Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan Camat	5.000.000	100%	5.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan		13.500.000		13.471.300
1	Penyusunan Renja Kerja SKPD	Dokumen Renja SKPD Tahun 2016	2.500.000	100%	2.498.400
2	Penyusunan LAPORAN Kinerja	Adanya dokumen Laporan Kinerja SKPD	1.500.000	100%	1.499.100
3	Penyusunan laporan tahunan SKPD	Adanya laporan tahunan SKPD	3.000.000	100%	2.999.200
4	Penyusunan LPPD dan LKPJ	Adanya dokumen LPPD dan LKPJ SKPD	1.500.000	100%	1.499.100
5	Penyusunan Renstra	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2021	5.000.000	100%	4.975.500
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		26.000.000		25.994.600
1	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan	26.000.000	100%	25.994.600
5	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		15.000.000		14.771.000
1	Fasilitasi / Pembinaan kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian	Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Kecamatan pada kegiatan kepemudaan, olahraga dan kesenian	15.000.000	100%	14.771.000
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		80.000.000		79.996.500
1	Peringatan hari-hari besar nasional	Fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	60.000.000	100%	59.996.500
2	Fasilitasi kegiatan keagamaan dan hari-hari besar keagamaan	Fasilitasi pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan di tingkat Kecamatan	20.000.000	100%	20.000.000
7	Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		45.000.000		44.664.700
1	Rapat koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan	14.000.000	100%	13.975.400
2	Rapat koordinasi antar Kepala Unit Kerja dan unsur Muspika Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan rapat koordinasi antar kepala unit kerja dan unsur Muspika	8.000.000	100%	7.993.250
3	Pembinaan dan Pengendalian APBDes	Pembinaan dan Pengendalian APBDes	23.000.000	100%	22.696.050
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		14.000.000		13.750.000
1	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan dalam kegiatan mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Formal	14.000.000	100%	13.750.000
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		10.500.000		10.346.750
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan gotong royong	5.000.000	100%	4.996.750
2	Fasilitasi program Raskin	Pengelolaan dan pendistribusian Raskin berjalan lancar	5.500.000	100%	5.350.000
10	Program Pemberdayaan Perempuan		10.000.000		10.000.000
1	Fasilitasi / Pembinaan TP. PKK	Fasilitasi dan pembinaan TP. PKK Kecamatan	10.000.000	100%	10.000.000
JUMLAH			450.000.000		447.584.700
TOTAL			4.650.000.000	95,7	4.452.068.469

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel 4-63
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.012.020.000		924.364.518
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan materai dan benda pos lainnya selama 12 bulan	2.500.000	100	2.499.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya rekening jasa internet selama 12 bulan	95.000.000	100	94.179.619
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terpenuhinya honorarium bagi pejabat/staf pengelola BMD selama 12 bulan	69.120.000	100	69.120.000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	--	7.000.000	0	7.000.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya honorarium tenaga kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan	20.000.000	100	19.997.500
6	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan	25.000.000	100	24.988.700
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12.000.000	100	11.994.800
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	5.000.000	100	4.966.200
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Tersedianyaperalatan dan perlengkapan rumah tangga selama 12 bulan	1.000.000	100	950.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya rekening koran selama 12 bulan	5.000.000	100	4.360.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai selama 12 bulan	24.000.000	100	23.562.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya tugas-tugas kedinasan di luar daerah selama 12 bulan	375.000.000	100	373.966.499
13	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya tugas-tugas kedinasan dalam daerah selama 12 bulan	65.000.000	100	16.200.000
14	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terpenuhinya honorarium bagi pejabat/staf pengelola keuangan selama 12 bulan	306.400.000	100	270.580.200
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		352.230.000		300.927.488
01	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	115.192.000	100	107.709.749
02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung/kantor	7.500.000	100	7.455.682
03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	59.538.000	100	59.522.709
04	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10.000.000	100	9.992.455
05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pembenahan Kantor BPKAD Kabupaten Nias	10.000.000	100	9.937.018
06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 unit	150.000.000	100	106.309.875
03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		24.500.000		23.591.600
01	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2017	4.000.000	100	3.885.400
02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja BPPT Tahun 2015	3.000.000	100	2.977.800
03	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen laporan tahunan SK tahun 2015	4.500.000	100	3.887.700
04	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Laporan LPPD dan LKPJ SKPD tahun 2015	3.000.000	100	2.939.600
05	Penyusunan Renstra SKPD	1 Dokumen Renstra SKPD	10.000.000	100	9.901.100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
04	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.841.955
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	14.841.955
05	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah		2.921.250.000		2.710.668.753
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017	Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017	300.000.000	100	281.348.700
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017	Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2017	75.000.000	100	59.659.200
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016	300.000.000	100	286.535.700
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016	Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Perubahan APBD	75.000.000	100	74.063.200
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015	250.000.000	100	230.370.600
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015	Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015	75.000.000	100	69.578.000
7	Penelitian dan Pengesahan DPA dan DPPA	Penelitian dan pengesahan DPA	50.000.000	100	46.082.800
8	Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah	Penelitian dan Penerbitan SPD Belanja Langsung	125.000.000	100	117.037.100
9	Fasilitasi dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	100.000.000	100	99.669.046
10	Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keikutsertaan aparatur dalam kegiatan Diklat/Bimtek/ Sosialisasi bidang KEUDA	175.000.000	100	131.641.597
11	Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Daerah	Terselenggaranya Akuntansi Keuangan Daerah	100.000.000	100	78.898.000
12	Penyusunan Laporan Semester		100.000.000	100	90.617.000
13	Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah serta penelitian dokumen pengeluaran belanja daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah serta penelitian dokumen pengeluaran	150.000.000	100	149.924.000
14	Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji CPNS/PNS serta Pembinaan Bendahara se-Kabupaten Nias	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengelolaan Gaji CPNS/PNS serta Pembinaan Bendahara se-Kabupaten Nias	130.000.000	100	129.337.500
15	Penyusunan Laporan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian	Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian	125.000.000	100	111.306.000
16	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	35.000.000	100	33.900.000
17	Penyediaan Kertas Komputer untuk Daftar Gaji CPNS/PNS se-Kabupaten Nias	Tersedianya Kertas Komputer untuk Daftar Gaji CPNS/PNS se-Kabupaten Nias	100.000.000	100	100.000.000
18	Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Nias yang diserahkan menjadi aset Pemerintah Desa	Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Nias yang diserahkan menjadi aset Pemerintah Desa	100.000.000	100	93.079.941
19	Penetapan status penggunaan barang milik daerah	Penetapan status penggunaan barang milik daerah	60.000.000	100	57.971.023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
20	Penyusunan DKBMD dan BKPM	Tersusunnya DKBMD dan BKPM	25.000.000	100	24.940.014
21	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	41.250.000	100	41.215.255
22	Penghapusan Barang Milik Daerah		180.000.000	100	171.305.537
23	Penilaian Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias	Dokumen Penilaian Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias	150.000.000	100	147.050.745
24	Verifikasi Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	75.000.000	100	60.225.000
25	Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias	Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias	25.000.000	100	24.912.795
JUMLAH			4.325.000.000		3.974.394.314

^{*)} Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-65
Realisasi Program dan Kegiatan
pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nias
Tahun 2016

No	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				Fisik (%)	Anggaran (RP)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		150.650.000		103.902.100
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengadaan materai, perangko & benda pos lainnya.	500.000	100	492.000
	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis Kantor untuk 12 bulan	14.150.000	100	13.993.100
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 Bulan	5.000.000	-	-
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya rekening surat kabar sebanyak 2 SKH dan penggandaan buku peraturan perundang-undangan	3.000.000	-	-
	5 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman keperluan rapat-rapat dinas, minuman harian staf, dan tamu	15.000.000	100	7.095.000
	6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi tugas-tugas kedinasan ke luar daerah	72.000.000	100	51.772.000
	7 Monitoring Survey/Pengawasan/Evaluasi/serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya monitoring dan koordinasi tugas-tugas kedinasan dalam daerah	5.000.000	100	3.750.000
	8 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terbayarkannya honorarium pejabat/staf pengelola keuangan SIKPD	36.000.000	100	26.800.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		119.025.000		78.844.000
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua sebanyak 1 Unit	20.000.000	100	17.926.000
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yakni laptop, printer, kursi kerja, meja, kipas angin dan UPS	80.025.000	100	60.918.000
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor untuk (perbaikan plafon, pengecatan gedung dan penggantian kunci pintu)	14.000.000	-	-
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya rutin berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	-	-
3	Program Peningkatan Displin Aparatur		30.325.000		30.240.000
	1 Pengadaan PIN KORPRI	Terpenuhinya PIN KORPRI	30.325.000	100	30.240.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		48.000.000		20.421.000
	1 Mengikuti Kegiatan Diklat Bimtek/worshpp/Kursus/Sosialisasi di Luar Daerah	Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi di Luar daerah sebanyak 4 Orang	32.000.000	100	20.421.000
	2 Rapat Kerja Daerah KORPRI Kabupaten nias	terlaksananya rapat Kerja KORPRI Kabupaten Nias	16.000.000	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		7.500.000		7.128.500
	1 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD sebanyak 1 dokumen	2.500.000	100	2.150.000
	2 Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen	5.000.000	100	4.978.500
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		50.000.000		49.973.450
	1 Pelaksanaan HUT KORPRI	Terlaksananya HUT KORPRI Kabupaten Nias	50.000.000	100	49.973.450
	JUMLAH		405.500.000		290.509.050

No	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				Fisik (%)	Anggaran (RP)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel 4-67
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		660.780.000		617.494.997
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, benda pos lainnya dan biaya pengiriman surat-surat dinas selama 12 bulan	3.000.000	100	3.000.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya rekening telepon, listrik, faxmili dan internet selama 12 bulan	35.320.000	100	33.022.296
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg mendapat pengurusan izin (roda empat 1 Unit, roda dua 70 Unit)	20.500.000	100	14.701.047
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan ATK selama 12 bulan	28.000.000	100	28.000.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan/ fotokopi buku petunjuk, formulir, surat dinas selama 12 bulan	10.000.000	100	10.000.000
	06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan peralatan listrik dan komponen penerangan peralatan listrik lainnya selama 12 bulan	12.000.000	100	11.990.000
	07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dan bahan kebersihan kantor selama 12 bulan	6.000.000	100	6.000.000
	08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rekening surat kabar 2 SKH	3.000.000	100	2.275.000
	09 Penyediaan Makanan dan Minuman	Rapat, tamu dan minuman harian selama 12 bulan	25.000.000	100	24.999.000
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	200.000.000	100	190.082.654
	11 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	90.000.000	100	89.825.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honor Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Komputer SIPKD, Penyimpan dan Pengurus Barang, Panitia Penerima serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	227.960.000	100	203.600.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		185.000.000		177.588.000
	01 Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor : laptop 3 unit, AC 3 unit, filling cabinet 1 unit, meja biro 1 unit, papan pengumuman 1 unit	80.000.000	100	73.659.500
	02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor BKPPP/BP3K	50.000.000	100	49.900.000
	03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara 1 unit (BB 241 V)	32.000.000	100	31.528.000
	04 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan kantor yang dipelihara (komputer, laptop dan lain-lain)	20.000.000	100	19.980.000
	05 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Mesin Genset yang dioperasikan pada BKPPP Kab. Nias (1 unit) dan BP3K (2 unit).	3.000.000	100	2.520.500
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		82.000.000		81.288.400
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti Diklat, Bimtek/ Workshop/Kursus/ Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 12 orang	75.000.000	100	75.000.000
	02 Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian	Aparatur yang mendapat penilaian angka kredit penyuluh pertanian	7.000.000	100	6.288.400

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		24.500.000		24.207.400
01	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	1 Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2017	4.000.000	100	3.916.000
02	Penyusunan Renstra SKPD	1 Dokumen Laporan Renstra SKPD Tahun 2016 -2021	10.000.000	100	9.998.200
02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja SKPD	3.000.000	100	2.964.000
03	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD	4.500.000	100	4.405.000
04	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen Laporan LPPD dan LKPJ SKPD	3.000.000	100	2.924.200
05.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.993.500
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	15.000.000	100	14.993.500
06.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan		2.778.800.000		1.493.229.800
01	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Bantuan transport Pimpinan BP3K/KJF, PPL PNS dan THL-TBPP di Kabupaten Nias - Pimpinan BP3K/KJF (10 orang) - Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (47 orang)	268.800.000	100	252.800.000
02	Penilaian kemampuan peningkatan kelas kelompok tani se Kabupaten Nias	Penilaian manajemen kelembagaan kelompok tani di wilayah binaan PPL sebanyak 500 kelompok	90.000.000	100	89.900.000
03	Pemberdayaan Kontak Tani sebagai penyuluh swadaya	Jumlah kontak tani yang diberdayakan sebagai penyuluh swadaya sebanyak 34 orang	60.000.000	100	60.000.000
04	Pelatihan Kontak Tani sebagai Penyuluh swadaya	Jumlah kontak tani yang dibina dan dilatih sebagai penyuluh swadaya sebanyak 34 orang	40.000.000	100	40.000.000
05	Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 2017	Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tahun 2017	10.000.000	100	9.993.800
06	Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kecamatan 2017	Programa Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian Kecamatan tahun 2017 (10 kecamatan)	10.000.000	100	10.000.000
07	Rapat POSKO Tingkat Kabupaten	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten sebanyak 14 kali	150.000.000	100	142.840.000
08	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Penilaian prestasi /kerja Penyuluh Pertanian sebanyak 47 orang	50.000.000	100	49.996.000
09	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) Kecamatan Sogaeadu (DAK 2016)	Balai Penyuluh Pertanian yang dibangun	1.260.000.000	0	-
10	Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) (DAK 2016)	Balai Penyuluh Pertanian yang direhabilitasi : - BPP Kecamatan Gido - BPP Kecamatan Idanogawo - BPP Kecamatan Bawolato - BPP Kecamatan Botomuzoi	840.000.000	100	837.700.000
07.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		45.000.000		44.935.000
01	Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani/Kelompok PKK/PT.P2WKSS	3 Kelompok wanita tani/kelompok PKK/PT.P2WKSS yang diberdayakan	20.000.000	100	19.935.000
02	Rembug dan Mimbar Sarasehan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nias	Terbentuknya kepengurusan dan rumusan kesepakatan KTNA tingkat Kecamatan/Kabupaten Nias	25.000.000	100	25.000.000
08.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan		400.000.000		330.585.500
01	Pembinaan/Monitoring Kelompok Pengelola Lumbung Pangan	12 desa yang cukup dan mampu mengembangkan cadangan pangan	20.000.000	100	18.693.800
02	Penyusunan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Nias	Program Ketahanan Pangan Tahun 2016, 1 dokumen	20.000.000	100	19.346.100
03	Pendataan daerah rawan pangan	Data daerah rawan pangan, 1 dokumen	75.000.000	100	74.950.000
04	Pemantauan dan monitoring pola pangan harapan (PPH)	Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di 10 Desa	75.000.000	100	74.934.400

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	06 Lomba pengolahan pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kabupaten	Mendukung Ketahanan Pangan melalui diversifikasi pangan sebanyak 10 kelompok	55.000.000	100	53.056.000
	06 Lomba pengolahan pangan non beras berbasis pangan lokal di tingkat Kecamatan	Mendukung Ketahanan Pangan melalui diversifikasi pangan sebanyak 50 kelompok	50.000.000	100	49.911.000
	07 Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Tersedianya rekomendasi/pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian di bidang ketahanan pangan	65.000.000	0	-
	08 Penyusunan Data Ketahanan Pangan	1 Dokumen Ketersediaan data base pangan utama	40.000.000	100	39.694.200
09.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan		484.000.000		436.254.600
	01 Percontohan penerapan paket teknologi pertanian pada lahan BP3K	Terlaksananya desiminasi teknologi pertanian terapan dilahan BP3K sebanyak 10 unit	70.000.000	100	33.775.000
	02 Pelatihan bulanan bagi PPL secara rayonisasi di tingkat BP3K	Terlatihnya penyuluh pertanian di BP3K secara rayonisasi (3 rayon)	15.000.000	100	6.771.600
	03 Pelatihan Penyuluh/Petugas tentang Kakao	Terlatihnya penyuluh/petugas tentang kakao sebanyak 12 orang	165.000.000	100	161.894.000
	04 Demplot Cabe	Terlaksananya desiminasi teknologi pengelolaan usaha tanaman cabe sebanyak 12 unit	84.000.000	100	83.964.000
	05 Demplot Padi Sawah	Terlaksananya desiminasi teknologi pengelolaan usaha tanaman padi sawah sebanyak 30 unit	150.000.000	100	149.850.000
10.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.		200.000.000		196.777.500
	01 Pelatihan bagi Penyuluh Pertanian/Petani tentang Penanggulangan Penyakit Ternak Babi dan Ayam	Terlatihnya PPL dan Petani Peternak tentang penanggulangan penyakit ternak babi dan ayam sebanyak 75 orang	60.000.000	100	59.347.000
	02 Pelatihan Pengolahan Ransum Ayam Buras bagi Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Ransum Ayam buras bagi Penyuluh Pertanian sebanyak 30 orang	60.000.000	100	58.100.000
	03 Pelatihan Penyuluh tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak Babi	Penyuluh pertanian dan kontak tani yang terlatih tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak babi di Kabupaten Nias sebanyak 51 orang	80.000.000	100	79.330.500
11.	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan		150.000.000		144.449.600
	01 Pemberdayaan Kelompok Perikanan Tentang Budidaya Ikan Air Tawar	15 kelompok perikanan air tawar yang diberdayakan	85.000.000	100	84.726.500
	02 Pelatihan Petugas/Penyuluh Pertanian Tentang Budidaya Ikan Lele Jumbo	10 petugas/penyuluh pertanian yang dilatih	50.000.000	100	44.823.100
	03 Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan Lele Jumbo dengan Media Terpal	10 orang di 10 kecamatan yang mendapat bantuan pembuatan kolam	15.000.000	100	14.900.000
		JUMLAH	5.025.080.000	70,88	3.561.804.297

^{*)} Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-69
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nias Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		336.500.000	94,6	318.338.699
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan Perangko, benda-benda pos lainnya, pengiriman surat-surat Dinas selama 12 bulan	1.000.000	100	999.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening telepon, listrik, faximile, air dan jaringan internet selama 12 bulan	20.500.000	100	14.042.614
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pengurusan BPKP dan Perpanjangan STNK/pajak kendaraan dinas	10.000.000	100	3.334.230
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan	7.500.000	100	7.500.000
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	13.000.000	100	13.000.000
	6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan/fotokopi buku petunjuk, formulir, surat dinas selama 12 bulan	10.000.000	100	10.000.000
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik dan komponen penerangan peralatan listrik lainnya	1.500.000	100	1.500.000
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dan bahan kebersihan kantor	7.500.000	100	7.500.000
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rekening surat kabar (SKH/ SKM)	4.000.000	100	3.600.000
	10 Penyediaan Makanan Minuman	Pemenuhan makanan dan Minuman keperluan pelaksanaan rapat-rapat dinas tamu dan minuman harian selama 12 bulan	25.000.000	100	25.000.000
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	100.000.000	100	95.362.855
	12 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	50.000.000	100	50.000.000
	13 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honorarium satuan pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan	86.500.000	100	86.500.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		147.000.000	85,64	125.896.170
	1 Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (meja rapat 1 unit, laptop 1 unit)	20.000.000	100	19.936.750
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	15.000.000	100	15.000.000
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional roda empat.	100.000.000	100	89.586.442
	4 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Belanja Perawatan Mesin Genset	12.000.000	11,44	1.372.978
	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		32.000.000	59,38	19.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 3 orang	32.000.000	60	19.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		24.500.000	98	24.000.000
	1 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1 Dokumen Renja SKPD TA. 2017	4.000.000	100	4.000.000
	2 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja SKPD TA. 2015	3.000.000	100	3.000.000
	3 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	1 Dokumen Rencana Strategis SKPD 2016-2021	10.000.000	100	9.500.000
	4 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1 Dokumen Laporan Tahunan SKPD TA. 2015	4.500.000	100	4.500.000
	5 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD TA. 2015	3.000.000	100	3.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (RP)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		20.000.000	98	19.610.650
	1 Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Tahun 2016	20.000.000	100	19.610.650
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		390.000.000	60	233.642.850
	1 Pembinaan dan Fasilitas DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Nias DPC LPM Kabupaten, Kecamatan, LPM Desa	Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten, Kecamatan Desa	30.000.000	1,45	435.000
	2 Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Masyarakat dengan memanfaatkan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kelompok masyarakat yang dilatih sebanyak 30 orang	30.000.000	100	29.589.000
	3 Pembinaan/Fasilitas/Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten	Pokjanal posyandu yang dibina/difasilitasi sebanyak 1 kali (10 kelompok)	120.000.000	100	111.282.000
	4 Pelatihan Budidaya Jamur	Kelompok yang dilatih sebanyak 2 kelompok	50.000.000	0	-
	5 Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kelompok masyarakat yang Pembinaan sebanyak 2 kelompok (30 org)	50.000.000	100	42.895.000
	6 Pembinaan/Perlombaan LPM Desa di Kabupaten Nias	Jumlah LPM Desa yang ikut lomba	30.000.000	0	-
	7 Pelatihan/Perlombaan Jahit Menjahit	Kelompok Masyarakat yang dilatih sebanyak 2 kelompok (40 org)	50.000.000	98,88	49.441.850
	8 Pelatihan/Perlombaan Kader Posyandu di Kabupaten Nias	Kelompok Posyandu yang ikut lomba sebanyak 10 kelompok	30.000.000	0	-
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		2.310.000.000	71,95	1.662.030.365
	1 Pelaksanaan Kegiatan Pelombaan Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang ikut berpartisipasi dalam lomba Kategori tertib Administrasi PKK sebanyak 10 Desa	100.000.000	100	91.953.600
	2 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Nias	Jumlah desa yang berpartisipasi pada pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	500.000.000	50	287.930.500
	3 Fasilitas Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias	Terfasilitasinya kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Tahun 2016	360.000.000	100	328.211.660
	4 Evaluasi Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ranperdes APBDesa)	Rencana Peraturan Desa (Ranperdes APBDesa) yang dievaluasi sebanyak 170 Ranperdes	200.000.000	100	112.127.200
	5 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Masyarakat di Desa Lokasi PT-P2W-KSS	- Kelompok binaan masyarakat 1 Desa - Lokasi PT-P2W-KSS 1 Desa	80.000.000	100	79.200.000
	6 Pembinaan dan Penilaian Desa Percontohan 10 Program PKK kategori tertib Administrasi PKK	Desa yang ikut berpartisipasi dalam lomba Kategori tertib Administrasi PKK 10 Desa	30.000.000	100	29.590.000
	7 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati	50.000.000	100	42.401.255
	8 Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang pembina dalam pengendalian dan pengelolaan Keuangan Desa	750.000.000	100	597.009.150
	9 Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa	Teridentifikasi dan Terinventarisasi kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa sebanyak 1 dokumen (untuk 20 Desa)	50.000.000	100	32.415.000
	10 Pembinaan, Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga keuangan Mikro Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Nias	Telaksananya pembinaan, pengkoordinasian, pendataan, pemantauan dan pelaporan lembaga keuangan mikro SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan	75.000.000	0	-
	11 Fasilitas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Nias	Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Kabupaten Nias sebanyak 5 (lima) yaitu Badan Usaha Milik Desa di Bozihona dan Biouti Timur (BUMDes bersama), Tuhemberua, Ononomolo Talafu, Siafaoroasi, Simanere Bot.	55.000.000	97,52	53.636.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUT PUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (RP)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12	Gerakan Desa Mandiri Kabupaten Nias	Terwujudnya Desa Mandiri sesuai potensi SDM dan SDA Desa setempat	60.000.000	25	7.556.000
		JUMLAH	3.260.000.000	73,69	2.402.518.734

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-71
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		247.610.000		242.319.527
01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Materai, Perangko dan benda pos Lainnya, 12 bulan	500.000	100	498.000
02	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Adanya pemeliharaan Peralatan kerja berupa komputer, mesin tik, meja dll, 12 bulan	6.000.000	100	5.955.000
03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, 12 bulan	15.700.000	100	15.700.000
04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Adanya biaya perpanjangan STNK kendaraan dinas / operasional, BB 8218 V (MPK) 1 unit	2.300.000	100	959.040
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Adanya biaya penggandaan/FC buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat Dinas, dll, 12 bulan	6.000.000	100	6.000.000
06	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya, bola lampu 25 buah, stop kontak 15 buah, fitting 14 buah dan kabel 35 meter	2.000.000	100	2.000.000
07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya rekening telepon, air, listrik, faximile dan internet, 12 bulan	7.000.000	100	6.597.287
08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya surat kabar sebanyak 7 SKH, 12 bulan	3.000.000	100	2.835.000
09	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makan dan Minum pegawai dan tamu, 12 bulan	12.000.000	100	12.000.000
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, 12 bulan	115.600.000	100	112.280.200
11	Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Monitoring/survey/pengawasan /evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, 12 bulan	30.000.000	100	29.985.000
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Operator SIPKD dan Penerima hasil pengadaan Barang/Jasa, Admin RUP, Pejabat Pengadaan Barang, 12 bulan	47.510.000	100	47.510.000
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		126.000.000		119.288.713
01	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor, Filing Kabinet 1 unit, Rak buku 4 unit, AC 1 unit, Kamera Digital 1 unit	19.000.000	100	17.380.000
02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya perawatan gedung kantor, 12 bulan	55.000.000	100	50.839.242
03	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya Perawatan kendaraan dinas / operasional, BB 8218 V dan BK 1090 K, 2 unit	52.000.000	100	51.069.471
03	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000		23.750.000
01	Diklat bintek / workshop / kursus/sosialisasi di luar daerah	Adanya Aparatur yang mengikuti Diklat, Bintek, Kursus (5 orang) yaitu : bintek aplikasi modul Aset, bintek tentang penyusunan RPJMD & Renstra SKPD berbasis kinerja dan bintek penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis akrual	25.000.000	100	23.750.000
04	Program Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.500.000		13.500.000
01	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja (LK) SKPD Tahun 2015, 1 Dokumen	1.500.000	100	1.500.000
02	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen Renja SKPD Tahun 2017, 1 Dokumen	2.500.000	100	2.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03	Penyusunan Laporan Tahunan	Dokumen Laporan Tahunan 2015, 1 Dokumen	3.000.000	100	3.000.000
04	Penyusunan RENSTRA	Adanya Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016-2021, 1 dokumen	5.000.000	100	5.000.000
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Adanya Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD, 2 dokumen	1.500.000	100	1.500.000
05	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		15.000.000		14.975.000
01	Mengikuti kegiatan Pameran Pembangunan	Adanya dana untuk keikutsertaan pada kegiatan Pameran Pembangunan Kab. Nias, 1 kegiatan	15.000.000	100	14.975.000
06	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		330.890.000		315.829.000
01	Pengadaan koleksi bahan Pustaka Perpustakaan Umum	Tersedianya koleksi bahan Pustaka umum, 1.600 buku	163.240.000	100	161.679.000
02	Processing dan preservasi bahan pustaka	Adanya Perawatan Bahan Koleksi Pustaka, 1 kegiatan	5.000.000	100	5.000.000
03	Penyediaan Jasa Perpustakaan	Tersedianya Honorarium Ketua dan Sekretaris Perpustakaan Desa, sebanyak 50 orang (25 Ketua dan 25 Sekretaris)	52.650.000	100	39.150.000
04	Layanan Perpustakaan pada hari Sabtu	Terlaksananya Layanan Perpustakaan Sabtu, 52 hari	20.000.000	100	20.000.000
05	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah sekolah yang dilayani Mobil Perpustakaan Keliling, 25 sekolah	70.000.000	100	70.000.000
06	Lomba meringkas berkualitas	Adanya peningkatan minat baca bagi siswa - siswi di masing - masing sekolah, 23 sekolah (69 siswa)	20.000.000	100	20.000.000
07	Program Penataan Dokumentasi Kepustakaan dan Kearsipan		17.000.000		16.484.773
01	Pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah	Tersediannya Dokumentasi tentang kegiatan Pemerintah Daerah, 12 bulan	12.000.000	100	11.680.000
02	Pengadaan Piranti Pendokumentasian	Adanya Alat Piranti Pendokuemtasian, Lensa Camera 1 unit	5.000.000	100	4.804.773
		JUMLAH	775.000.000	100	746.147.013

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-74
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanian dan Kehutanan
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		814.001.900		790.863.969
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, benda pos lainnya dan biaya pengiriman surat-surat dinas 12 bulan	3.000.000	100	3.000.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya rekening telpon, listrik, faxmili dan internet 12 bulan	50.000.000	100	39.455.214
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yg mendapat pengurusan izin (roda empat sebanyak 1 unit, dan roda dua sebanyak 5 unit dari 22 unit yang direncanakan)	7.600.000	26	2.719.288
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor kebutuhan selama 12 bulan	20.000.000	100	19.994.282
	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan kebutuhan selama 12 bulan	20.000.000	100	20.000.000
	06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	5.000.000	100	5.000.000
	07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan	30.000.000	100	28.117.500
	08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rekening surat kabar 2 SKH 12 bulan	4.000.000	100	2.700.000
	09 Penyediaan Makanan dan Minuman	Rapat, tamu dan minuman harian selama 12 bulan	30.000.000	100	29.541.600
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	315.854.065	100	315.286.085
	11 Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	150.000.000	100	150.000.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Honor Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator SIPKD, Staf Pengelola Keuangan, Penyimpan dan Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 bulan	178.547.835	100	175.050.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		253.700.000		218.791.763
	01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara sebanyak 1 unit (BB 8217 V)	34.700.000	100	34.551.763
	02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor :	129.000.000	100	119.000.000
		- Meja rapat : 4 unit			
		- Kursi rapat : 2 unit			
		- Laptop : 2 unit			
		- Printer : 4 unit			
		- Filling cabinet : 4 unit			
		- Sound system : 1 set			
		- AC : 2 unit			
		- Camera Digital : 4 unit			
		- Handycam : 2 unit			
		- Mesin pompa dan kelengkapannya : 1 unit			
		- Finger print : 1 unit			
	03 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor	Pemeliharaan Komputer PC sebanyak 2 unit, Laptop sebanyak 4 unit, dan Printer 12 unit, Projector sebanyak 2 Unit.	30.000.000	100	10.791.000
	04 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Operasinya mesin genset untuk kelancaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias selama 12 bulan	10.000.000	100	4.724.000
	05 Pengadaan dan Pemasangan Jeruji	Pengadaan dan Pemasangan Jeruji (Pintu 4 bh dan Jendela/angin-angin 136 bh)	50.000.000	100	49.725.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70.000.000		57.714.000
01	Mengikuti diklat/bimtek/workshop/ kursus/ sosialisasi di luar daerah	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat/bimtek/ workshop/ kursus/ sosialisasi di luar daerah sebanyak 12 orang dengan materi pelatihan Aplikasi SIPKD Modul Aset, Pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah, Penerapan Program Aplikasi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis akrua,	70.000.000	100	57.714.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Dan Keuangan		29.500.000		29.499.700
01	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen Renja SKPD Tahun 2017	5.000.000	100	5.000.000
02	Penyusunan RENSTRA	1 Dokumen Renstra SKPD Tahun 2016 -2021	11.500.000	100	11.499.700
03	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan Kinerja (LK) SKPD Tahun 2015	3.500.000	100	3.500.000
04	Penyusunan Laporan Tahunan	1 Dokumen Laporan Tahunan 2015	6.000.000	100	6.000.000
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	2 Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD Tahun 2015	3.500.000	100	3.500.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan		45.000.000		42.500.000
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam Kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten Nias 1 Kegiatan	20.000.000	100	20.000.000
02	Pelaksanaan Ubinan Produksi Prakarsa Tanaman Pangan Kabupaten	Pelaksanaan ubinan prakarsa tanaman pangan kerjasama dengan BPS di 3 Kecamatan	25.000.000	100	22.500.000
06	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		11.868.506.310		9.993.117.659
01	Pengembangan Intensifikasi Khusus (Insus) Tanaman Padi Sawah	Peningkatan intensifikasi padi sawah untuk mencapai rata-rata 5,5 ton/ha seluas 285 Ha	855.000.000	100	786.315.194
02	Pengembangan Intensifikasi Umum (Inmum) Tanaman Padi Sawah	Pengembangan Intensifikasi Umum Tanaman Padi Sawah seluas 100 Ha	50.000.000	100	47.842.000
03	Pelaksanaan Forum SKPD	Pelaksanaan Forum SKPD sebanyak 1 kali	30.000.000	100	28.000.000
04	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Cabe	Peningkatan intensifikasi cabe seluas 6 Ha	150.000.000	100	134.632.000
05	Pengadaan Mini Tiller	Pengadaan Mini Tiller sebanyak 8 unit	152.000.000	100	124.010.000
06	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun sepanjang 334 meter	289.963.880	100	275.378.000
07	Bantuan Sarana Produksi pada Lokasi Percontohan PKK/PT P2WKSS/KWT	Desa percontohan yang dibina sejumlah 3 Desa	25.000.000	100	23.873.500
08	Pengumpulan Data Statistik Pertanian	Data statistik pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan sebanyak 1 Kegiatan	100.000.000	100	99.712.400
09	Dana Pendukung dan Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	Pembinaan terhadap Gapoktan PUAP tahun 2016 sebanyak 10 Gapoktan	60.000.000	100	58.521.000
10	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Peningkatan kemampuan pengelola UPPO (tidak terlaksana)	45.000.000	-	-
11	Pemeliharaan Mesin Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) di Rumah UPPO	Berfungsi mesin alat pengolah pupuk organik di 2 unit rumah UPPO	45.000.000	67	15.035.000
12	Pelatihan Operator Alsintan (Hand Tractor, Power Tresher dan Minitiler)	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan operator alsintan (hand tractor, power tresher dan minitiler) sebanyak 40 orang	52.000.000	100	51.024.000
13	Penyediaan Tenaga Mekanik Hand Tractor, Power Tresher dan Minitiler	Tersedianya tenaga mekanik mesin-mesin pertanian (Hand Tractor, Power Tresher dan Minitiler) sebanyak 2 orang	40.000.000	100	39.944.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
14	Facilitasi Rapat Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Tingkat Kabupaten Nias	Terlaksananya Rapat POSKO Tingkat Kabupaten Nias sebanyak 7 kali	120.000.000	78	91.704.000
15	Dana Pendamping Non Fisik DAK 2016	Tersedianya dana pendamping (perencanaan, pengawasan dan biaya umum) untuk kegiatan DAK yaitu pembangunan sumber-sumber air	334.471.500	100	307.488.000
16	Pengembangan Sumber-Sumber Air				
	- DAM Parit di Kecamatan Bawolato (DAK)	DAM Parit yang Terbangun sebanyak 1 unit	705.596.375	100	658.398.450
	- DAM Parit di Kecamatan Gido (DAK)	DAM Parit yang Terbangun sebanyak 1 unit	705.596.375	100	659.016.900
	- DAM Parit di Kecamatan Idanogawo (DAK)	DAM Parit yang Terbangun sebanyak 1 unit	705.596.375	100	658.759.450
	- DAM Parit di Kecamatan Botomuzoi (DAK)	DAM Parit yang Terbangun sebanyak 1 unit	705.596.375	100	522.150.400
	- Pembangunan Embung di Hiliduho (DAK)	Embung yang Terbangun sebanyak 1 unit	1.000.000.000	100	940.620.650
	- Pembangunan Embung di Idanogawo (DAK)	Embung yang Terbangun sebanyak 1 unit	1.000.000.000	100	940.661.500
17	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Lauri Kecamatan Sogaeadu (Sisa DAK 2014 Rp.294.681.000 + SILPA Rp.29.468.100)	Penyelesaian kewajiban kepada Pihak Ketiga 1 Kegiatan	319.242.000	100	319.242.000
18	Pembangunan Embung di Kecamatan Hiliduho	Penyelesaian kewajiban kepada Pihak Ketiga (Retensi)	27.308.600	100	27.308.600
19	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier		1.904.483.300	100	1.679.623.500
	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kec. Gido (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun di 7 (tujuh) lokasi sepanjang 808,5 meter			
	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kec. Idanogawo (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun sepanjang 78 meter			
	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier di Kec. Sogaeadu (Sisa DAK Tambahan 2015)	Tidak terlaksana karena kendala teknis			
20	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/ direhabilitasi 1.437,48 meter dengan rincian:	1.393.750.000	100	1.369.334.115
	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Hiliweto Kecamatan Gido (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang jalan usaha tani yang dibangun sepanjang 159,2 meter			
	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan kapasitasnya 213,7 meter			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Usaha Tani di Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang jalan usaha tani yang dibangun sepanjang 221,28 meter			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Usaha Tani di Desa Dima Kecamatan Hiliduho (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 225,7 meter			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Usaha Tani di Desa Booziloli/Loloana'a Kecamatan Idanogawo (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 218,6 meter			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Usaha Tani di Desa Sindrondro Kecamatan Bawolato (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 210, 3 meter			
	Pembangunan Kapasitas Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo (Sisa DAK Tambahan 2015)	Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 188,7 meter			
21	Pembangunan Embung di Kecamatan Sogaeadu	Tidak terlaksana karena keterbatasan waktu (Kegiatan PAPBD)	917.901.530		-
22	Pengadaan Alat Mesin Pemipil Jagung	Jumlah Alat Mesin Pemipil Jagung yang diadakan sebanyak 5 unit	25.000.000	100	25.000.000
23	Pengadaan Alat Mesin Penepung Jagung	Jumlah Alat Mesin Penepung Jagung yang diadakan sebanyak 5 unit	110.000.000	100	109.523.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
07	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		150.000.000		144.550.500
	01 Gerakan Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao	Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao sebanyak 1 kegiatan	150.000.000	100	144.550.500
08	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		4.267.779.050		3.485.205.814
	01 Pengadaan Bibit Kakao	Jumlah bibit tanaman kakao yang diadakan sebanyak 12.000 batang - Kecamatan Hiliduho 4.000 batang - Kecamatan Idanogawo 4.000 batang - Kecamatan Gido 4.000 batang	132.000.000	100	128.636.400
	02 Pengadaan Bibit Karet Okulasi	Jumlah bibit karet yang diadakan sebanyak 120.000 batang - Kecamatan Ulugawo 6.000 batang - Kecamatan Somolo-molo 6.000 batang - Kecamatan Mau 6.000 batang - Kecamatan Botomuzoi 20.000 batang - Kecamatan Hiliserangkai 20.000 batang - Kecamatan Hiliduho 20.000 batang - Kecamatan Idanogawo 15.000 batang - Kecamatan Bawolato 10.000 batang - Kecamatan Gido 10.000 batang - Kecamatan Sogaeadu 7.000 batang	2.280.000.000	100	1.804.869.600
	03 Pengadaan Sarana Produksi Bagi Petani Penerima Bantuan Bibit Karet	Pengadaan Sarana Produksi berupa Pupuk NPK, Trico Derma, SP, Herbisida, Pesticida dan Fungisida bagi Petani Penerima Bantuan Bibit Karet di : - Kecamatan Ulugawo - Kecamatan Somolo-molo - Kecamatan Botomuzoi - Kecamatan Hiliserangkai - Kecamatan Hiliduho - Kecamatan Mau - Kecamatan Idanogawo - Kecamatan Bawolato - Kecamatan Gido - Kecamatan Sogaeadu	460.000.000	100	435.461.000
	04 Pelatihan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Karet	Jumlah petani dan aparatur yang dilatih tentang teknologi budidaya tanaman karet sebanyak 150 orang	125.000.000	100	123.145.500
	05 Penumbuhan dan Pembinaan Petani Penangkar Bibit Karet Okulasi	Pembangunan entres karet di tingkat penangkar sebanyak 1 unit di Desa Lasara Idanoi	70.000.000	100	62.039.500
	06 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Pembangunan jalan produksi perkebunan sepanjang 849 meter - Desa Sisobalauru Kec. Hiliduho 350 meter - Desa Loloasai Kec. Gido 257 meter - Desa Ehosakhozi Kec. Hiliserangkai 242 meter - Desa Tuhemberua Kec. Mau (tidak terlaksana)	1.118.956.436	100	849.231.200
	07 Pembangunan Jalan Produksi di Dusun IV Desa Hiliweto Kecamatan Gido	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga (Kegiatan tahun 2015 yang belum dibayarkan)	81.822.614	100	81.822.614
09	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		100.000.000		99.950.200
	01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular yang dipelihara petani yaitu : (Babi, Ayam, Anjing) sebanyak 14.165 ekor	100.000.000	100	99.950.200
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		425.000.000		408.712.200
	01 Pengembangan Ternak Babi	Jumlah bibit ternak babi unggul yang diberikan kepada peternak sebanyak 76 ekor	365.000.000	100	348.712.900
	02 Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peternak yang dilatih sebanyak 40 orang	60.000.000	100	59.999.300

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		35.000.000		29.815.778
01	Operasional Rumah Potong Hewan	Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Gunungsitoli selama 12 bulan	35.000.000	100	29.815.778
12	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		1.832.314.870		1.099.823.800
01	Pembuatan Kebun Bibit Rakyat	Kebun bibit rakyat di Tingkat Desa (20.000 batang) di 10 Kelompok	400.000.000	100	398.660.000
02	Gerakan Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2016	Gerakan Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2016 sebanyak 10.000 batang pohon	80.000.000	100	77.865.000
03	Pengkayaan pada Hutan Rakyat	Jumlah Luasan Tutupan Hutan dan Lahan di Kabupaten Nias (tidak terlaksana)	411.549.000	-	-
		- Kecamatan Botomuzoi			
		- Kecamatan Hiliserangkai			
		- Kecamatan Ulugawo			
		- Kecamatan Somolomolo			
06	Biaya Umum DAK Kehutanan	Biaya Umum DAK Kehutanan	21.128.400	100	21.128.400
07	Fasilitasi Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah) Dalam Kawasan Hutan	- Biaya Operasional Tim IP4T selama 1 tahun	125.000.000	100	46.671.600
		- Data Kepemilikan Tanah 1 dokumen			
08	Review Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL) 2016 - 2020 dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) Tahun 2016	Review Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL) 2016 - 2020 dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) Tahun 2016 sebanyak 2 dokumen	85.000.000	100	71.849.700
09	Pengadaan Sarana Pengamanan Hutan	Tersedianya sarana pengaman hutan terealisasi 1 unit kendaraan roda 2	50.459.925	100	17.841.100
10	Pengkayaan pada Hutan Rakyat (Pengadaan Tanaman Kehutanan)	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga (Kegiatan tahun 2015 yang belum dibayar)	465.808.000	100	465.808.000
11	Penanaman Tanaman Kehutanan Dalam Hutan Rakyat	Jumlah tanaman kehutanan yang ditanam (tidak terlaksana)	193.369.545	-	-
JUMLAH			19.890.802.130		16.400.545.383

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-76
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SEMUA SKPD				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		573.412.000		527.486.199
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya penyediaan materai dan benda pos lainnya untuk 12 bulan	1.000.000	100	887.500
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air, telepon dan listrik	Tersedianya biaya rekening Telepon, Air dan Listrik Kantor untuk 12 bulan	12.412.000	100	11.596.632
	03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pengurusan izin (roda empat sebanyak 1 Unit (Nopol BB 8232 V), dan roda dua sebanyak 12 Unit) untuk 12 bulan	4.600.000	100	4.149.176
	04 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya biaya perbaikan peralatan kerja berikut : Komputer, Laptop, Printer, Laptop dan perlengkapannya, AC, Infocus dan Mesin Genset untuk 12 bulan	25.000.000	100	17.275.000
	05 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk 12 bulan	19.400.000	100	19.400.000
	06 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan	10.000.000	100	10.000.000
	07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya penyediaan komponen peralatan listrik untuk 12 bulan	5.000.000	100	5.000.000
	08 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya biaya penyediaan bahan dan alat kebersihan.	5.000.000	100	5.000.000
	09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terpenuhinya biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor untuk 12 bulan	3.000.000	100	3.000.000
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya rekening surat kabar harian untuk 12 bulan	3.000.000	100	3.000.000
	11 Penyediaan makan dan minum	Tersedianya biaya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu untuk 12 bulan	25.000.000	100	24.975.000
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi/ Konsultasi untuk 12 bulan	250.000.000	100	217.441.891
	13 Monitoring/Survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya Perjalanan dinas dalam daerah untuk 12 bulan	110.000.000	100	106.625.000
	14 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya honorarium pejabat/staf pengelola keuangan untuk 12 bulan	100.000.000	100	99.136.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		243.690.000		226.774.244
	01 Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur melalui pengadaan TV dan kelengkapannya sebanyak 1 unit, Kulkas sebanyak 1 unit, Laptop sebanyak 6 unit, Meja Kerja Pejabat sebanyak 1 unit, Kursi Kerja Pejabat sebanyak 1 unit, Lemari Arsip sebanyak 1 unit, Kamera digital 1 unit, AC sebanyak 2 unit, Filling Cabinet sebanyak 10 unit, Kipas angin sebanyak 6 unit, Meja Rapat sebanyak 16 unit, Kursi rapat 32 unit, Printer 10 unit.	168.990.000	100	157.653.618
	02 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan berkala/ rutin gedung kantor DKP Kabupaten Nias sebanyak 1 unit	30.000.000	100	26.000.000
	03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan berkala/ rutin Kendaraan Dinas / operasional roda 4 BB 8232 V sebanyak 1 unit untuk 12 bulan	34.700.000	100	34.514.626
	04 Pemeliharaan dan Pengoperasian Mesin Genset	Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional mesin genset sebanyak 1 unit untuk 12 bulan	10.000.000	100	8.606.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		76.500.000		60.292.900
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Berdasarkan SAP Berbasis Akual sebanyak 5 orang, Bimtek RPJMD sebanyak 2 orang, Bimtek tentang Asset sebanyak 1 orang, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman PBJP sebanyak 1 orang	76.500.000	100,00	60.292.900
04.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000		31.600.000
01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Tersusunnya Renja SKPD tahun 2017 sebanyak 1 dokumen	5.000.000	100	4.825.000
02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen	3.500.000	100	3.375.000
03	Penyusunan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah	Tersusunnya renstra SKPD tahun 2016-2021	15.000.000	100	14.000.000
04	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen	6.000.000	100	6.000.000
05	Penyusunan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ Tahun 2015 sebanyak 2 dokumen	3.500.000	100	3.400.000
05.	Program Peningkatan Sistem Informasi Pembangunan		20.000.000		20.000.000
01	Mengikuti Kegiatan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan pameran pembangunan Kabupaten Nias pada bulan Agustus Tahun 2016	20.000.000	100	20.000.000
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
06.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		285.000.000		282.614.300
01	Pembuatan Bagan Tancap	Terlaksananya pembuatan bagan tancap sebanyak 4 unit di Desa Balaletoba'a Kecamatan Bawolato	285.000.000	100	282.614.300
07.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		50.000.000		50.000.000
01	Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Terlaksananya pembinaan dan supervisi Pokmaswas yang telah terbentuk sebanyak 4 Pokmaswas (Pokmaswas Tenggiri Desa Somi dan Somi Botogoo Kecamatan Gido, Pokmaswas Lumba-lumba Desa Bozihona dan Laira Kecamatan Idanogawo, Pokmaswas Cumi-cumi Desa Botohaenga dan Tagaule Kecamatan Bawolato dan Pokmaswas Gurita Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato)	50.000.000	100	50.000.000
08.	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumberdaya Laut		205.000.000		181.254.600
01	Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat Pengawasan	Terlaksananya pemeliharaan speed boat pengawasan serta honorarium kepada 1 (satu) orang petugas jaga selama 12 bulan	30.000.000	100	26.000.000
02	Patroli dan Operasional Kapal Pengawasan Wilayah Penangkapan Ikan di Perairan Laut Kab. Nias	Frekuensi pelaksanaan patroli pengawasan di wilayah laut Kabupaten Nias sebanyak 10 kali	175.000.000	100	155.254.600
09.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		2.975.151.587		2.941.001.025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	01 Pembinaan POKDAKAN	Terlaksananya bina Kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) sebanyak 65 kelompok di 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kabupaten Nias	50.000.000	100	49.150.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
				FISIK (%)	(Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR di Desa Tuhewaebu Kecamatan Idanogawo	Terbangunnya sarana dan prasarana UPR (Unit Pembenihan Rakyat) di Desa Tuhewaebu Kecamatan Idanogawo sebanyak 1 unit	869.467.500	100	857.220.700
	03 Pembangunan Demplot Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Hiliotalua Kecamatan Gido	Terbangunnya sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar di Desa Hiliotalua Kecamatan Gido sebanyak 1 unit	340.017.500	100	336.678.700
	04 Pembangunan Demplot Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Soewe Kecamatan Gido	Terbangunnya sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar di Desa Soewe Kecamatan Gido sebanyak 1 unit	452.416.587	100	447.304.500
	05 Pengadaan Calon Induk Ikan Air Tawar	Terlaksananya pengadaan calon induk ikan air tawar sebanyak : 1.307 kg	208.050.000	100	206.234.000
	06 Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar	Terlaksananya pengadaan pakan ikan air tawar sebanyak : 5.025 kg	100.000.000	100	95.603.125
	07 Pembangunan Demplot Budidaya Ikan Air Tawar (Sisa DAK Tahun 2015)	Terlaksananya pembangunan Demplot Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Hiliwale I Kecamatan Botomuzoi sebanyak 1 unit, Desa Lasara Kecamatan Botomuzoi sebanyak 1 unit, Desa Laowo Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo sebanyak 1 unit, dan Desa Baruzo Kecamatan Sogaeadu sebanyak 1 unit	855.200.000	100	849.695.000
	08 Pelaksanaan Penilaian Peningkatan Kapasitas Kelas Kelompok Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap (POKDAKAN dan KUB) di Kabupaten Nias	Terlaksananya penilaian POKDAKAN sebanyak 30 Kelompok dan KUB sebanyak 30 KUB yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di seluruh Kabupaten Nias	100.000.000	100	99.115.000
10.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		2.721.345.728		1.855.774.057
	01 Pengadaan Alat Yang Dijatuhkan (Falling Gears) dhi. Tramel Net	Tersedianya tramel net untuk nelayan sebanyak 686 piece yang diterima oleh 24 KUB di Kecamatan Idanogawo dan Bawolato	408.900.000	100	312.362.357
	02 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	Tersedianya pengadaan alat penangkapan ikan (gill net) sebanyak 580 piece yang diterima oleh 15 KUB di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato	632.355.000	100	549.312.900
	03 Pengadaan Rumpon	Tersedianya rumpon yang diadakan sebanyak 25 unit yang diterima oleh 7 KUB di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato	197.848.000	100	192.378.000
	04 Pengadaan Motorisasi Perahu Nelayan	Tersedianya mesin utama untuk perahu nelayan sebanyak 80 unit yang diterima oleh 36 KUB di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato	522.500.000	100	419.461.800
	05 Pengadaan alat penangkapan Ikan	Tersedianya rawai dasar untuk nelayan sebanyak 90 unit	396.442.728	100	199.054.000
	06 Pengadaan alat bantu penangkapan ikan	Tersedianya rumpon untuk petani nelayan sebanyak 25 unit	380.800.000	100	183.205.000
	07 Pengadaan motorisasi Perahu Nelayan (Sisa DAK TA. 2015)	-	182.500.000	0	0
11.	Program Perencanaan, Pendataan dan Informasi		451.735.000		267.077.250
	01 Pendataan dan Penyajian data Statistik Perikanan	Tersusunnya Buku Statistik Perikanan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen	50.000.000	100	48.315.000
	02 Survey dan pemetaan Potensi Sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Nias	Tersedianya database dan peta sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Nias sebanyak 1 dokumen	251.735.000	100	94.345.450
	03 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya rencana zonasi wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 1 dokumen	150.000.000	100	124.416.800
12.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		15.000.000		14.900.000
	01 Pembinaan Desa Percontohan PT2WKSS di Kabupaten Nias	Terlaksananya pembinaan di Desa Percontohan PT2WKSS dan PKK di Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo	15.000.000	100	14.900.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13.	Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang		150.000.000		147.264.000
01	Pembuatan Terumbu Karang Buatan	Tersedianya habitat ikan buatan sebanyak 60 unit di perairan pulau onolimbu sebua dan onolimbu side-ide	150.000.000	100	147.264.000
14.	Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan		643.800.000		435.883.150
01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan yaitu : Vaccum Sealer sebanyak 1 unit, peralatan sistem rantai dingin sederhana sebanyak 150 Unit, peralatan pemasaran sederhana sebanyak : 30 unit	643.800.000	100	435.883.150
JUMLAH			8.443.634.315	83,40	7.041.921.725

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK

Tabel : 4-78
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	URUSAN WAJIB SKPD				
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.595.777.200		1.444.377.050
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan meterai, perangko, dan jasa surat menyurat kantor selama 12 bulan	1.000.000	100	1.000.000
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya rekening listrik, rekening LPJU, rekening fax, dan rekening air kantor selama 12 bulan	1.060.000.000	100	984.750.044
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perindag ESDM Kab. Nias, yang terdiri dari kendaraan roda 4 dengan Nomor Polisi BB 215 V dan BB 8199 V	3.200.000	100	3.200.000
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya biaya ATK untuk kelancaran tugas Dinas Perindag ESDM Kab. Nias, selama 12 bulan	15.687.200	100	15.684.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotokopi, buku-buku petunjuk, formulir, surat-surat dinas dll selama 12 bulan	10.000.000	100	9.996.900
	06 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dll selama 12 bulan	2.500.000	100	2.500.000
	07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kebersihan yaitu : Pengharum ruangan, pembersih lantai, tisu, pembersih kamar mandi, pembersih kaca, kain pel, sapu, keranjang sampah, pembasmi rumput, brush tangkai, kapur barus, kain lap, ember dll	4.500.000	100	4.352.000
	08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya rekening surat kabar sebanyak 3 jenis yaitu : Surat Kabar Harian SIB, Surat Kabar Mingguan KPK dan Surat Kabar Mingguan ICW	4.000.000	100	3.000.000
	09 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, rapat koordinasi dan minuman harian staf, selama	12.000.000	100	12.000.000
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk Keikutsertaan dalam menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	272.050.000	100	209.904.106
	11 Monitoring / Survey / Pengawasan / Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk Monitoring / Survey / Pengawasan / Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	75.000.000	100	73.400.000
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya Honor Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK SKPD, Staf Verifikasi, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerima, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Operator SIPKD dan Admin RUP.	135.840.000	100	124.590.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		99.000.000		89.154.000
	01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya peralatan kerja dan perlengkapan gedung kantor, yang terdiri dari Lemari 3 unit, Printer 3 unit, Laptop 1 unit, Kursi Staf 12 unit, dan Kursi Pimpinan 2 unit	43.500.000	100	38.597.500
	02 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala, dengan kegiatan Pembuatan Pagar, Gapura dan pemasangan kunci pintu ruangan	10.000.000	100	5.058.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	03 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala yang terdiri dari 2 unit kendaraan roda 4 dengan Nomor Polisi BB 215 V dan BB 8199 V	35.500.000	100	35.498.500
	04 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor antara lain 10 unit komputer PC dan 2 unit Laptop	10.000.000	100	10.000.000
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000		21.750.000
	01 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luar Daerah	Tersedianya biaya dalam rangka mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/Sosialisasi di Luar Daerah, yaitu Bimtek Renstra, Bimtek Keuangan, dan Bimtek Pengelolaan Asset	40.000.000	100	21.750.000
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.000.000		31.965.000
	01 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Tersusunnya Renja SKPD sebanyak 1 dokumen	5.000.000	100	5.000.000
	02 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP SKPD sebanyak 1 dokumen	3.500.000	100	3.500.000
	03 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD sebanyak 1 dokumen	6.000.000	100	6.000.000
	04 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya LPPD dan LKPJ SKPD sebanyak 2 dokumen	3.500.000	100	3.500.000
	05 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen	15.000.000		13.965.000
05	Program Peningkatan Pengembangan Informasi Pembangunan		15.000.000		15.000.000
	01 Mengikuti kegiatan pameran pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan pameran pembangunan Kabupaten tahun 2016	15.000.000	100	15.000.000
06	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		750.000.000		599.691.438
	01 Bimtek dan Bantuan Peralatan Teknik Pengolahan Dodol dan Keripik	Jumlah pelaku usaha pembuatan makanan ringan yang dilatih dan mendapatkan bantuan peralatan sejumlah 5 orang	100.000.000	100	93.789.250
	02 Bimtek dan Bantuan Peralatan Teknik Meubel Kayu	Jumlah pelaku usaha meubel kayu yang dilatih dan mendapatkan bantuan peralatan sejumlah 10 orang	100.000.000	100	84.264.300
	03 Bimtek dan Bantuan Peralatan Kerajinan Batu Akik	Jumlah pelaku usaha kerajinan batu akik yang dilatih dan mendapatkan bantuan peralatan sejumlah, 5 orang	50.000.000	100	41.927.097
	04 Mengikuti Pameran di Luar Daerah	Jumlah pameran luar daerah yang diikuti yaitu, Pameran APKASI dan Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara	250.000.000	100	244.690.391
	05 Pendataan dan pengembangan industri kecil menengah dan perdagangan	Ketersediaan Data dan Informasi mengenai Industri Kecil dan Menengah untuk keperluan publikasi melalui Buku Informasi IKM dan Perdagangan di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Bawolato, Kecamatan Sogaeadu, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Botomuzoi dan Kecamatan Hiliduho	50.000.000	100	48.600.200
	06 Fasilitas Kegiatan Dekranasda Kabupaten Nias	Terfasilitasinya kebutuhan operasional dan kegiatan Dekranasda Kabupaten Nias yaitu Fasilitas Pengukuhan Kepengurusan Masa Bhakti 2016-2021, Pengadaan Pakaian Seragam dan Pengadaan Peralatan Kantor yaitu : Laptop, Printer, Meja Biro, Lemari Arsip, Kursi Plastik dan Kamera Digital	200.000.000	100	86.420.200
07	Program Pengawasan Hasil-Hasil Industri		100.961.174		89.258.300

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	01 Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Peredaran Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai dan yang dilekati Pita Cukai Palsu di Kabupaten Nias	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Peredaran Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai dan yang dilekati Pita Cukai Palsu di wilayah Kabupaten Nias	50.000.000	100	38.687.000
	02 Pembuatan papan informasi peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu	Tersedianya papan informasi peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Bawolato, Idanogawo, Gido, Sogaeadu, Hiliserangkai, Botomuzoi dan Hiliduho.	50.961.174	100	50.571.300
08	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan		2.351.197.000		1.709.177.900
	01 Pengadaan PLTS Tersebar di Wilayah Kabupaten Nias	Jumlah pembangkit listrik tenaga surya tersebar yang diadakan, sejumlah 125 unit	800.000.000	100	727.435.000
	02 Pengadaan PLTS Tersebar untuk Fasilitas Sosial	Jumlah pembangkit listrik tenaga surya tersebar untuk fasilitas sosial yang diadakan, sejumlah 39 unit	407.000.000	100	378.059.000
	03 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang diadakan, sejumlah 55 unit	153.895.000	100	152.441.000
	04 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terpeliharanya 20 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah Kabupaten Nias	55.000.000	100	54.551.000
	05 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sistem PLTS Tersebar dan Terpusat di Kabupaten Nias	Terlatihnya 119 orang masyarakat untuk mengelola sistem PLTS Tersebar dan Terpusat di Kabupaten Nias	40.000.000	100	36.998.000
	06 Monitoring dan Pengawasan Terhadap Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap penambangan mineral bukan logam dan bantuan di 9 kecamatan (Kec.Bawolato, Kec.Idanogawo, Kec.Ulugawo, Kec.Sogaeadu, Kec.Gido, Kec.Ma'u, Kec.Hiliserangkai, Kec.Botomuzoi dan Kec.Hiliduho)	30.000.000	100	25.818.000
	07 Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan (FS dan DED)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan (FS dan DED)	250.000.000	-	-
	08 Pemetaan Lokasi Potensi Mineral, Batu Bara dan Sungai di Kabupaten Nias	Tersedianya Dokumen Lokasi Potensi Mineral, Batu Bara dan Sungai di 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten Nias	60.000.000	100	59.975.900
	09 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan pada tahun 2015	273.900.000	100	273.900.000
	10 Pengadaan PLTS Tersebar (sisa DAK 2015 Rp. 150.220.909 + Rp. 105.599.090 + SILPA Rp. 25.582.001)	Jumlah pembangkit listrik tenaga surya tersebar yang diadakan	281.402.000	-	-
09	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		150.000.000		94.834.050
	01 Pengawasan terhadap barang kadaluarsa dan bahan makanan yang mengandung formalin dan bahan pengawet lainnya	Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap barang kadaluarsa dan bahan makanan yang mengandung formalin dan bahan pengawet lainnya di wilayah Kabupaten Nias	40.000.000	100	23.450.000
	02 Fasilitas pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Tersedianya alat UTTP yang standart bagi pedagang di wilayah Kabupaten Nias	10.000.000	-	-
	03 Pengawasan terhadap harga barang bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan terhadap Pengusaha dan Distributor barang bersubsidi di 10 (sepuluh) Kecamatan	40.000.000	100	29.900.000
	04 Pengembangan informasi pasar dan pemantauan gejolak harga pasar di Kab. Nias	Tersedianya Informasi pasar di 10 Kecamatan di wilayah Kab. Nias melalui siaran RRI dan Pamflet	50.000.000	100	41.484.050
	05 Pelaksanaan Operasi pasar	Stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kabupaten Nias	10.000.000	-	-
10	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		4.103.846.790		2.138.391.400
	01 Rehabilitasi Pasar Tradisional di Desa Loloasai Kecamatan Gido	Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Tradisional di Desa Loloasai Kecamatan Gido	121.350.000	100	119.152.000
	02 Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Dekha Kecamatan Mau	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Dekha Kecamatan Mau	430.920.000	100	428.520.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	ANGGARAN (Rp.)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
03	Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai	858.355.000	100	653.690.000
04	Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Lolofaoso Lalai Kecamatan Hiliserangkai	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Lolofaoso Lalai Kecamatan Hiliserangkai	1.277.000.000	100	565.746.900
05	Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo	83.000.000	-	39.979.500
06	Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai	Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Ehosakhozi Kecamatan Hiliserangkai	333.221.790	100	331.303.000
07	Lanjutan renovasi kios tertutup pasar tradisional desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (Sisa DAK 2015 Rp. 592.726.246 + DAU Rp. 407.273.754)	Jumlah Pasar Tradisional yang direnovasi	1.000.000.000	-	-
		JUMLAH	9.238.782.164		6.233.599.138

*) Data sementara laporan keuangan SKPD, data final termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit BPK